Herdi Sahrasad & Al Chaidar, *et al.*

ASIA TENGGARA: KUASA DAN KEPEMIMPINAN

Risalah Kajian Kawasan

ASIA TENGGARA: KUASA DAN KEPEMIMPINAN

Risalah Kajian Kawasan

HERDI SAHRASAD

AL CHAIDAR

PENGANTAR

Oleh Emil Radhiansyah
Pengajar Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina

Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang baik dalam segi politik dan ekonomi. Perkembangan signifikan Asia Tenggara pada masa selanjutnya adalah terletak pada masyarakatnya.

Dengan tingkat hubungan antar-negara yang semakin erat dengan terbentuknya suatu organisasi regional, ASEAN, yang memiliki peran penting dalam memajukan Asia Tenggara dalam kancah internasional.

Perkembangan kerjasama dalam ASEAN yang menuju kepada ASEAN Community yang sedianya dicapai pada tahun 2015 mendatang, memberikan harapan baru terbentuknya suatu komunitas Asia Tenggara yang kuat dari dalam melalui beberapa pilar kerjasama yaitu ASEAN Political-Security Community (Komunitas Politik-Keamanan ASEAN), ASEAN Economic Community (Komunitas Ekonomi ASEAN), dan ASEAN Socio-Culture Community (Komunitas Sosio-kultur ASEAN).

Melalui kerjasama ini peran masyarakat dalam membangun adanya komunikasi melalui pertukaran informasi dan budaya dapat ditingkatkan terutama dalam tercapainya hubungan yang damai. Sementara dari bidang perdagangan dan perekonomian, tercapainya Komunitas Ekonomi ASEAN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara secara menyeluruh, melalui migrasi tenaga kerja, aliran investasi dan distribusi barang dan jasa serta transportasi.

Berbicara mengenai Asia Tenggara terkait buku "*Asia Tenggara, Kuasa dan Kepemimpinan*" yang ditulis Herdi Sahrasad ini, tentu-

nya tidak terlepas dari pengetahuan mengenai sebuah kawasan yang ada di dunia. Teuku May Rudy dalam bukunya *Studi Kawasan: Sejarah dan Perkembangan Politik di Asia* menyebutkan bahwa mempelajari suatu kawasan merupakan studi sebuah wila-yah yang di dalamnya membahas mengenai Ciri Khusus dari Wilayah tersebut (*Typical Study*), mengkaji mengenai Peristiwa Yang Terjadi di wilayah (*Events Study*), dan mengkaji mengenai kawasan/ regionalisme dan Organisasi Kerjasama Regional. Richard W. Mansbach memberikan definisi kawasan sebagai pengelompokan regional [yang] diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional, (Sylvya & Sudirman, 2010). Coulumbis dan Wolfe membaginya menjadi beberapa kriteria yaitu:

1. Kriteria Geografis:

   Mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua,sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti: Eropa, Asia, Amerika, Afrika

2. Kriteria Politik /Militer:

   Mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik seperti: NATO, Gerakan Non Blok (GNB)

3. Kriteria Ekonomi:

   Mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria perkembangan pembangunan ekonomi seperti GNP dan Output Industri.

4. Kriteria Transaksional:

   Mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa seperti imigran, turis, perdagangan dan berita.

Bruce Russet mendefinisikan kawasan sebagai:

1. Adanya kemiripan sosio kultur.
2. Sikap politik atau perilaku ekternal yang mirip, yang biasanya tercermin pada voting dalam siding PBB.
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi organisasi supra-nasional atau antarpemerintah.
4. Interdependensi ekonomi yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional.
5. Kedekatan geografik yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota negara negara tersebut.

Berdasarkan definisi dan kriteria yang diberikan di atas makna kawasan secara umum dapat diterjemahkan sebagai suatu wilayah yang memiliki kesamaan khusus baik dari segi kedekatan geografi serta kesamaan sosio kultur, dengan tingkat interaksi yang cukup sering (*Intens*) dalam hal ekonomi dan politik, sehingga menimbulkan tumbuhnya suatu kerjasama yang bersifat bilateral maupun multilateral ataupun mengarah kepada pembentukan suatu organisasi kawasan. Bila dilihat dari segi kedekatan geografi, kesamaan sosio kultur, intensitas kerjasama politik dan ekonomi, tingkat migrasi dan interaksi antar penduduk serta terbentuknya organisasi yang menaungi kerjasama yang terjadi di Asia Tenggara dapat dijelaskan bahwa Asia Tenggara merupakan suatu bentuk kawasan yang terdiri dari beberapa negara antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.

Merujuk kepada adanya kemiripan sosio kultural di negara negara asi tenggara yang digolongkan ke dalam suatu wilayah atau kawasan maka perlu untuk ditelusuri sejarah terbentuknya budaya di asia tenggara yang pada akhirnya membentuk sikap poli-

tik dan ekonomi di negara negara asia tenggara. Perkembangan sejarah budaya negara negara asia tenggara telah dimulai dalam kurun waktu 6000SM, (Munandar, 2011). Diperkirakan nenek moyang bangsa asia tenggara adalah bangsa Austronesia yang berasal dari asia tengah yang menetap di China dan menyebar ke berbagai wilayah di asia tenggara dan pasifik. Ketika pola penyebaran terhenti, penduduk Austronesia ini mulai mengembangkan pola budayanya masing masing, yang akhirnya membentuk budaya di negara negara asia tenggara hingga saat ini. terbentuknya pengembangan kebudayaan yang dikenal hingga kini menurut H. T. Fischer dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Dalam lingkungan masyarakat Austronesia terjadi perpecahan pada induk bangsa Austronesia sebelum migrasi.
2. Dalam migrasi yang terjadi, letak geografi dan lingkungan alam sangat berpengaruh terhadap daya adaptasi dari masyarakat Austronesia.
3. Letak geografi dan lingkungan memiliki pengaruh terhadap daya komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Austronesia.

Alasan yang dikemukakan oleh Fischer tadi tidak mempengaruhi hilangnya keahlian ataupun budaya masyarakat Austronesia yang terjadi justru adanya adaptasi terhadap lingkungan geografi tempat mereka bermigrasi. Hal lain yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan masyarakat Austronesia asia tenggara adalah kehadiran para pendatang yang berasal Arab, China, India dan dari eropa sebagai akibat revolusi industri yang pada akhirnya menimbulkan kebangkitan imperialisme. Hal yang dibawa oleh para pendatang ini adalah masuknya sistem kasta, bahasa, kepercayaan dan sistem politik, walaupun sebelum kedatangan mereka masyarakat asia tenggara telah mengembangkan sistem kepercayaan mereka sendiri dalam lingkungannya. Pengaruh yang dibawa oleh para pendatang tersebut melalui jalur perdagangan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung

terlebih dengan diperkenalkannya dan masuknya pengaruh agama seperti Hindu-Buddha, Islam dan Kristen yang mulai mendapatkan tempat dalam budaya lokal. Pengaruh yang masuk memberikan nuansa baru dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara pada masa tersebut terutama terhadap segi geopolitik. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa negara negara asia tenggara memiliki rumpun sejarah yang sama antara lain:

1. Kesamaan budaya yang terlihat dari arsitektur rumah tradisional dan kebahasaan/linguistik.
2. Masuknya pengaruh asing terhadap adaptasi budaya masyarakat asia tenggara yang diadopsi dan diteruskan secara turun temurun.
3. Adanya kesamaan dalam bidang budaya agraris dan maritim.
4. Adanya toleransi dan solidaritas yang ditunjukkan berdasarkan catatan masa silam terkait hubungan antar kerajaan di Asia Tenggara.

Negara-negara Asia Tenggara yang ekonominya akhir-akhir ini relatif berkembang pesat menambah kuat persaingan strategis antara dua negara terbesar di dunia, Amerika Serikat (AS) dan China. Persaingan kedua negara ini bisa dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam menarik investasi.

Indonesia sebagai salah satu pelopor prinsip non-blok yang sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, tentunya sangat mendukung dan mengupayakan menciptakan dasar sistem keamanan Asia Tenggara yang bertumpu pada prinsip Non-Blok.

Indonesia dan ASEAN menyadari bahwa sejak lama terjadi perebutan akses sumber minyak. Amerika dan Inggris kuasai minyak Indonesia lewat perusahaan-perusahaan multi-nasional yang terkenal dengan sebutan The Seven Sisters: Shell, British Petroleum,

Gulf, Exxon Mobil, Texaco, dan Chevron. Sedangkan Cina menanam pengaruhnya yang kian kuat di Indonesia dan ASEAN lewat Petro China, Chinooc, dan Sinopec. Perebutan pengaruh di Selat Malaka melibatkan China. Ke depan, bagi China, selat ini harus aman dan terhindar dari segala macam gangguan dalam suplai energi bagi China. Karena tanker-tanker China selalu melewati Selat Malaka dalam perjalanan mereka membawa minyak dari Timur Tengah. Bagi Amerika, Selat Malaka disadari betul sebagai urat nadi energi Cina. Sehingga Amerika memandang penguasaan selat ini merupakan langkah strategis menjinakkan Cina di kawasan Asia Tenggara bahkan juga Asia Pasifik, (Hendrajit, *The Global Re-view*, 2011).

Sebagai ilustrasi dan informasi. sekitar 63 ribu kapal laut melewati Selat Malaka mengangkut seperempat dari total perdagangan dunia dan setengah dari total minyak dunia. Bukan itu saja. Selat Malaka setiap harinya menjadi urat nadi transportasi minyak bumi sebesar 9,4 juta barel yang bisa menghidupi perekonomian Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, khususnya China dan Jepang.

Dengan begitu, selain Amerika Serikat dan Cina, Selat Malaka menjadi ajang kepentingan negara-negara baik yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka, maupun negara-negara pengguna Selat Malaka seperti Jepang, Taiwan, Korea, Cina, dan bahkan negara-negara Timur Tengah.

Dalam kaitan ini,lawatan Presiden Barack Obama ke Thailand, Myanmar dan KTT ASEAN di Kamboja pada November 2012 menekankan haluan strategis baru Amerika Serikat diaman AS menantang Cina (China) dan membawa negara Asia Tenggara pada opsi yang sulit.

Perjalanan pertama pasca terpilih kembali membawa Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Asia Tenggara seraya menekankan bahwa Amerika Serikat dalam kekuatan dan kepentingannya di Pasifik, terjalin kuat dengan ekonomi Asia, keamanan

dan tatatan politis. Gedung Putih menegaskan, kesuksesan Amerika pada abad ke-21 terkait dengan keberhasilan di Asia, (*Deutsche Welle, 2012)*

Penegasan itu kembali mengkonfirmasi apa yang diucapkan Menlu AS Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta pada beberapa tahun terakhir dalam berbagai konferensi yakni tentang haluan baru strategi Amerika Serikat tertuju pada kawasan Asia Pasifik.

Negara-negara Asia Tenggara membentuk cincin di sekitar Cina Selatan dan membentang di sepanjang Laut Cina Selatan, yang termasuk kawasan laut paling penting secara strategis dan ekonomis di dunia.

Asia Tenggara juga menghubungkan Cina dan kekuatan nomor dua di kawasan itu yakni India. Selain itu lebih dari 600 juta orang hidup di negara-negara anggota ASEAN. Secara keseluruhan organisasi ASEAN membentuk kekuatan ekonomi nomor tiga di Asia. Semua faktor tersebut membuat Asia Tenggara demikian menarik bagi Amerika Serikat.

Dalam skema global kaum Hawkish di AS, justru ditekankan perlunya menggalang kekuatan militer yang efektif di kawasan Asia Tenggara untuk melawan RRC sebagai pesaing potensialnya di masa depan, sehingga prinsip non-blok dalam menciptakan sistem keamanan dan pertahanan di Asia Tenggara, dipandang oleh kaum Hawkish sebagai gagasan dan langkah strategis yang tidak menguntungkan skema hegemoni global Amerika, (Hendrajit, *The Global Review*, 2011).

AS akan sebegitu rupa tetap terlibat dalam percaturan strategis di Asia Tenggara dan sudah memperkuat kekuatan militernya di Darwin Australia dalam kaitan rivalitasnya dengan RRC di Asia Pasifik. Dengan demikian ketegangan AS-China di kawasan Asia bukanlah hal yang mengejutkan. Dan mudah diprediksi, akan te-

rus berlanjut terkait dengan isu Laut China Selatan dan isu strategis lainnya di kawasan.

Buku *Asia Tenggara, Kuasa dan Kepemimpinan* yang ditulis Dr Herdi Sahrasad (dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina) ini dimaksudkan sebagai bacaan mengenai Asia Tenggara (*readings on Southeast Asia*) bagi para mahasiswa dan peminat studi Asia Tenggara. Tulisan-tulisan dalam buku ini semula merupakan risalah, esai dan artikel yang dimuat pelbagai jurnal dan media massa nasional.

Buku ini berusaha memaparkan dinamika kekuasaan dan kepemimpinan di kawasan Asia dengan perspektif interdisipliner yaitu ilmu sosial dan humaniora (ilmu politik, sejarah, hubungan antarbangsa, dan jurnalisme), dengan harapan bisalah berdayaguna dan memperoleh kritik dan saran dari pembaca yang budiman.

Tak ada gading yang tak retak, maka sebagai bagian dari komunitas epistemis, Herdi Sahrasad dalam buku sahaja ini telah berusaha memberikan sumbangsih bagi para mahasiswa, peneliti dan peminat kajian Asia Tenggara, dan selayaknya melengkapi koleksi buku yang mungkin sudah ada sebelumnya. *Wallahualam bi shawab*

Jakarta, Februari 2013

Herdi Sahrasad dan Al Chaidar

.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN: MENGHIKMATI ASIA TENGGARA

ASEAN: REGIONALISME DI ASIA TENGGARA

Asia Tenggara sebelum datangnya negara-negara kolonial Eropa pada abad 16, ditandai dengan pergulatan perebutan kekuasaan antarnegara yang ada di kawasan daratan maupun maritimnya.

Di daratan Asia Tenggara, terdapat empat negara terkemuka yang menjadi faktor politik internasional pada kurun abad 14-15 saat itu yaitu kerajaan Vietnam, Siam (Thailand), Khemer (Kamboja), dan Burma (Myanmar). Keempat negara inilah yang membentuk hubungan antar negara hingga kedatangan negara-negara kolonial Eropa.[1]

Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok: Asia Tenggara Daratan (ATD) dan Asia Tenggara Maritim (ATM). Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indo-China dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat China di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat.

Malaysia, meskipun ada bagian yang tersambung ke benua Asia, biasa dimasukkan ke dalam ATM karena alasan budaya. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN. Timor Leste yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN walaupun oleh beberapa pihak, atas alasan politis, negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik.

---

[1] Lihat, Nicholas Tarling, *The Cambridge of Southeast Asia* (Cambridge: Cambridge Universtiy Press. 1999), Vol.3, h.1800-1930; T. Milton Osborne, *Southeast Asia: An Introduction History* (Crowns Nest: Allen dan Uwin, 2004). Lihat juga, Ivan Sujatmoko, "Netralisasi Asia Tenggara (Pembentukan ASEAN)", *Makalah*, UNY, Yogyakarta, 2011.

Secara geografis, juga secara historis, sebenarnya Taiwan dan pulau Hainan juga termasuk Asia Tenggara, sehingga diikutkan pula. Namun demikian, karena alasan politik Taiwan dan pulau Hainan lebih sering dimasukkan ke kawasan Asia Timur. Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, yang terletak di selatan Jawa, oleh beberapa pihak dimasukkan sebagai Asia Tenggara meskipun secara politik berada di bawah administrasi Australia. Sebaliknya, Pulau Papua dimasukkan sebagai Asia Tenggara secara politik, meskipun secara geologi sudah masuk wilayah Australia.

Dalam kaitan ini, kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerajaan-kerajaan agraris dan kerajaan-kerajaan maritim.

Kegiatan utama kerajaan-kerajaan agraris adalah pertanian. Mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contoh kerajaan agraris adalah Kerajaan Ayutthaya, yang terletak di delta sungai Chao Phraya, dan Kerajaan Khmer yang berada di Tonle Sap. Kerajaan-kerajaan maritim kegiatan utamanya adalah perdagangan melalui laut. Kerajaan Malaka dan Kerajaan Sriwijaya adalah contoh dari kerajaan maritim.

Tidak banyak yang diketahui mengenai kepercayaan dan praktek keagamaan Asia Tenggara, sebelum kedatangan dan pengaruh agama dari para pedagang India pada abad ke-2 Masehi dan seterusnya. Sebelum abad ke-13, agama-agama Buddha dan Hindu adalah kepercayaan utama di Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan di daratan (semenanjung) Asia Tenggara pada umumnya memeluk agama Buddha, sedangkan kerajaan-kerajaan di kepulauan Melayu (Nusantara) umumnya lebih dipengaruhi agama Hindu. Beberapa kerajaan yang berkembang di semenanjung ini, awalnya bermula di daerah yang sekarang menjadi negara-negara Myanmar, Kamboja dan Vietnam.

Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru berkembang, yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah terkenal pada masa

abad 14-16, menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini lebih lemah dibandingkan dengan kerajaan Mughal, sehingga lebih mudah ditaklukkan oleh bangsa Eropa.

Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 M di Semenanjung Malaya yang strategis merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudera Pasai, ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 M. Sejak itu peperangan-peperangan antara Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Pedagang-pedagang Portugis berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. [2]

Pada tahun 1521 M, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam, seperti Kesultanan Maguindanao, Buayan dan Kesultanan Sulu. Akhir abad ke-16 M, giliran Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis, datang ke Asia Tenggara. Namun, Perancis dan Denmark tidak berhasil menguasai negeri di Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Kekuasaan politik negara-negara Eropa di negara-negara Asia berlanjut terus hingga pertengahan abad ke-20. [3]

KOLONIALISME EROPA

Kolonialis Eropa pertama kali sampai di Asia Tenggara pada abad keenam belas. Ketertarikan di bidang perdaganganlah yang umumnya membawa bangsa Eropa ke Asia Tenggara, sementara para misionaris turut serta dalam kapal-kapal dagang dengan harapan untuk menyebarkan agama Kristen ke wilayah ini.

Portugis adalah kekuatan Eropa pertama yang membuka akses jalur perdagangan yang sangat menguntungkan ke Asia Tenggara

[2] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998).
[3] D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara,* (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1988), cet-1.Lihat juga, Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam.*

tersebut, dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1151. Belanda dan Spanyol mengikutinya dan segera saja mengatasi Portugis sebagai kekuatan-kekuatan Eropa utama di wilayah Asia Tenggara. Belanda mengambil-alih Malaka dari Portugis di tahun 1641, sedangkan Spanyol mulai mengkolonisasi Philipina (sesuai nama raja Phillip II dari Spanyol) sejak tahun 1560-an. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau *Perserikatan Perusahaan Hindia Timur* yang bertindak atas nama Belanda, mendirikan kota Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat perdagangan dan ekspansi ke daerah-daerah lainnya di pulau Jawa, serta wilayah sekitarnya.

Menurut D.G.E Hall, perluasan dominasi Eropa di Asia Tenggara awalnya masuk atas dorongan imperialisme. Pada waktu itu di Eropa sedang terjadi industrialisasi besar-besaran, dan mendorong Eropa untuk mendapatkan suplai dari Asia Tenggara seperti minyak, karet, logam, dan lain-lain. Selain itu, pertumbuhan penduduk Eropa juga memerlukan permintaan yang lebih besar akan beras, kopi, the dan gula dari daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ekspansi dan kemudian kolonialisme di daerah jajahan. Kolonialisme di Asia Tenggara yang terjadi contohnya Burma oleh Inggris, Indo-China oleh Perancis, dan Hindia Belanda oleh Belanda.[4]

Inggris, yang diwakili oleh British East India Company, secara relatif datang ke wilayah ini lebih kemudian. Diawali dengan Penang, Inggris mulai memperluaskan kerajaan mereka di Asia Tenggara. Mereka juga menguasai wilayah-wilayah Belanda selama Perang Napoleon. Di tahun 1819, Stamford Raffles mendirikan Singapura sebagai pusat perdagangan Inggris dalam rangka persaingan mereka dengan Belanda. Meskipun demikian, persaingan tersebut mereda di tahun 1824 ketika dikeluarkannya traktat Anglo-Dutch yang memperjelas batas-batas kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Sejak tahun 1850-an dan seterusnya, mulailah ter-

---

[4] Lihat D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara*.

jadi peningkatan kecepatan kolonisasi di Asia Teng-gara. Kejadian ini, yang disebut juga dengan nama Imperialisme Baru, memperlihatkan terjadinya penaklukan atas hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara, yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. VOC dan East India Company masing-masing dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris, yang kemudian mengambil-alih secara langsung administrasi wilayah jajahan mereka. Hanya Thailand saja yang terlepas dari pengalaman penjajahan asing, meskipun Thailand juga sangat terpengaruh oleh politik kekuasaan dari kekuatan-kekuatan Barat yang ada. [5]

Akibat masuknya kolonialis Eropa ke Asia Tenggara, maka pada akhir abad ke 18 kawasan ini merupakan daerah yang dipengaruhi budaya Eropa. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya; *Pertama*, industrialisasi di Eropa membuat Eropa menjadi kuat secara ekonomi dan politik sehingga pengaruhnya hampir tersebar ke seluruh dunia. *Kedua*, adanya kemajuan komunikasi yang mendunia - yang berpusat di Eropa - menyebabkan mobilitas dan pengaruh 'Eropanisasi' menyebar, pun di Asia Tenggara. Karena adanya persaingan antar-negara Eropa, hal ini menjadi faktor keempat yang membuat Asia Tenggara menjadi ajang 'proxy war' bagi negara-negara Eropa. Dan hal ini juga menyebabkan Eropa 'memilih' untuk tetap menggunakan imperialisme dan 'sulit' untuk meninggalkan kebijakan ekspansi.[6]

Para sejarawan mencatat, Eropa juga melakukan pembagian wilayah atas Asia Tenggara dengan tujuan membagi-bagi daerah kekuasaan dan mencegah adanya pertikaian antar negara-negara Eropa. Namun terdapat paradoks dimana Eropa menerapkan batas berdasar geografis, padahal sejak zaman-zaman sebelumnya Asia Tenggara terbagi berdasar kesetiaan personal terhadap kerajaan dan hubungan antar-kerajaan. Mengingat bahwa Eropa juga

---

[5] Lihat, AB. Lapian, *Kolonialisme di Asia Tenggara* (Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional, LIPI, Jakarta, 1975)

[6] Lihat, Nicholas Tarling, *The Cambridge of Southeast Asia*.

mengalami proses yang panjang dan tidak mudah dalam mengadopsi model perbatasan seperti ini bahkan tidak menerapkannya.

Dalam hal ini, pada abad ke-19, merupakan masa-masa migrasi sebagai wujud dari transformasi ekonomi. Orang-orang Eropa tersebar ke seluruh penjuru Amerika, Australia, Afrika, terlebih lagi Asia. Begitu juga dengan orang India dan China yang banyak membanjiri Eropa. Hal ini mendatangkan keuntungan ekonomi dan politik bagi otoritas Inggris yang sedang menguasai Asia Tenggara, namun pada abad ke-20, hal ini malah menjadi penghambat dalam menciptakan sistem politik partisipasi. Di sini, Inggris berperan besar dalam masa-masa awal kolonialisme di Asia Tenggara. Meskipun Perancis, Spanyol, dan Belanda pada saat itu juga menanamkan pengaruhnya, namun tidak sebesar Inggris yang sedang menadi super power di Eropa pada saat itu. Inggris 'memiliki' India dan China sebagai wilayah komersialnya.[7]

Inggris juga menciptakan 'pemerintahan otonomi pribumi' di wilayahnya, namun hal ini dinilai hanya strategi belaka disamping tetap diterapkannya asas pecah belah. Gerakan-gerakan perlawanan juga senantiasa digelorakan oleh para pribumi di berbagai daerah. Tensi meningkat di Asia Tenggara dan merupakan masa sulit bagi Inggris, ketika akhirnya pada tahun 1884 terjadi perundingan di Afrika yang menghasilkan kesepakatan untuk me-*redrawn* wilayah perbatasan Asia Tenggara dan membagi kekuasaannya di antara negara-negara Eropa. Inggris menguasai India dan China, Belanda menguasai wilayah Jawa-Nusantara, Spanyol menguasai Philipina.

Belanda memberikan pengaruh besar terhadap Asia Tenggara, terutama Indonesia karena hampir tiga setengah abad mendu-

---

[7] Lihat, *D.G.E Hall*, *Sejarah Asia Tenggara.* Lihat juga, Constance Wilson, "Colonialism and Nationalism in Southeast Asia", *www. seasite.niu.edu*, 3 Maret 2012, diakses pukul 22.00, dan AB. Lapian, *Kolonialisme di Asia Tenggara.*

dukinya. Belanda sudah menduduki Indonesia pada saat Inggris hanya menduduki Fort Marlborough di Sumatera Barat. Inggris yang mempunyai ambisi yang besar dalam hal komersial sedikit bersinggungan dengan Belanda yang pada waktu itu, sekitar abad ke-19, mengokupasi dalam bentuk perusahaan dagang VOC. Melalui perjanjian di tahun 1824, akhirnya Inggris meninggalkan tanah Nusantara dengan imbalan Singapura, dan Indonesia dikuasai hampir sepenuhnya oleh Belanda. Namun pada kenyataannya, Belanda tidak sepenuhnya menang, karena perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia begitu besar seperti pada perang Padri oleh Imam Bonjol, pemberontakan Islam di Aceh, dan perang-perang di Jawa lainnya. Sementara itu, semenanjung Malaya berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris menaklukkan Malaka pada 1786 dan Singapura di tahun 1819. Hubungan Inggris dan keduanya cenderung kolaboratif. Inggrispun juga menduduki Burma dan Vietnam. Vietnam pada waktu itu telah diduduki oleh Perancis, dan karena alasan dendam lama Inggris merebut Vietnam dari Perancis. Siam (Thailand) menjadi negara satu-satunya pada masa itu yang tidak merasakan penjajahan. Hal ini dikarenakan sikapnya yang kompromistis terhadap Inggris. Siam berusaha menghindari konflik dengan jalan diplomasi.[8]

Pada dasarnya, kebijakan negara-negara Eropa terhadap negara-negara di Asia Tenggara merupakan bentuk keterdesakan politik, kekuatan ekonomi, dan manfaat strategis untuk mendukung revolusi industri dan revolusi teknologi mereka dengan jalan memobilisasi sumber daya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Kebijakan menentang hal inipun muncul di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang cenderung tegas dan anti-kompromi.

Tahun 1913, Inggris telah berhasil menduduki Burma, Malaya dan wilayah-wilayah Borneo, Perancis menguasai Indo-China, Belan-

---

[8] Lihat Nicholas Tarling, *The Cambridge of Southeast Asia*; dan Milton Osborne, *Southeast Asia: An Introduction History*.

da memerintah Hindia-Belanda, Amerika Serikat mengambil Philipina dari Spanyol, sementara Portugis masih berhasil memiliki Timor Timur.

Penguasaan kolonial memberikan dampak yang nyata terhadap Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan pasar Asia Tenggara yang besar, akan tetapi mereka juga mengembangkan wilayah ini dengan tingkat pengembangan yang berbeda-beda. Perdagangan hasil pertanian, pertambangan dan ekonomi berbasis ekspor berkembang dengan cepat dalam periode ini. Peningkatan permintaan tenaga kerja menghasilkan imigrasi besar-besaran, terutama dari India dan China, sehingga terjadilah perubahan demografis yang cukup besar. Munculnya lembaga-lembaga negara bangsa modern seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, media cetak, dan juga pendidikan modern (dalam lingkup yang terbatas}, turut menaburkan benih-benih kebangkitan gerakan-gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan tersebut.[9]

Dalam hal ini, berakhirnya Perang Dunia II melahirkan negara Dunia Ketiga di kawasan Asia Tenggara yang baru saja merdeka terlepas dari penjajahan. Kolonialisme Barat memberikan pengaruh terhadap pembentukan negara merdeka beserta bentuk dan sistem pemerintahan yang bekerja di dalamnya. [10]

Pada waktu Perang Dingin (pasca Perang Dunia II ,1945- 1990 hingga bubarnya Soviet), tatkala Komunis menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, Amerika membendungnya dengan mendirikan SEATO di Asia Tenggara. Tetapi organisasi regional dibentuk pertama kali yaitu The Association of South East Asia (ASA) pada tahun 1961, anggotanya terdiri dari Malaysia, Philipina, Thailand. Politik konfrontasi yang dilancarkan Pre-

[9] Didin Sugandi dan Ayi Budi Santosa, *Sejarah Asia Tenggara* (Bandung: Tanpa Penerbit, 1997). Sebagai bandingan lihat juga D.G.E Hall, *Sejarah Asia Tenggara*.

[10] Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.38-42.

siden Soekarno, yang berkonflik dengan Malaysia, menimbulkan ketegangan politik di kawasan. Namun setelah berakhirnya rezim Soekarno tahun 1966, hubungan dengan Malaysia terjalin baik pada masa Soeharto, sebagaimana hubungan politik dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Asia Tenggara menjadi kawasan bagi perebutan pengaruh wilayah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Vietnam Utara dikomandoi oleh Uni Soviet, sedangkan Vietnam Selatan yang liberalis memperoleh bantuan dari Amerika Serikat. Perang saudara yang terjadi di antara keduanya menimbulkan banyak kerugian yang berujung pada kekalahan Amerika Serikat. Perang Vietnam ini cukup menguji eksistensi ASEAN yang tengah berjuang menciptakan keseimbangan dan perdamaian antarnegara anggota. Netralitas ASEAN pada 1970-an juga turut dipertanyakan karena sebagian anggotanya ada yang masih memihak kepada salah satu blok. Singapura dan Malaysia masih merupakan negara persemakmuran Inggris. Thailand dan Philipina juga memiliki kerjasama keamanan formal dengan Amerika Serikat. Negara besar lainnya, China, juga turut memberikan pengaruhnya kepada Singapura, Thailand, dan Philipina, selain juga memiliki sentimentil khusus dengan Malaysia dan Indonesia terkait pemberontakan Komunis. Oleh karenanya, ASEAN kemudian memantapkan langkah untuk membentuk ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) meskipun realisasinya masih belum bisa optimal. [11]

Proses regionalisasi ASEAN merupakan tahapan pengintegrasian yang tidak dapat dipisahkan dengan interaksi dari negara-negara yang ada dalam kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini kemudian membentuk sebuah organisasi yang berlatar belakang agama, wilayah, bahasa, etnis, budaya, dan pengalaman kolonial yang disebut dengan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).[12]

---

[11] Lihat, Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara.*
[12] Lihat, Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara.*

Adanya kepentingan dan kesadaran bersama serta identitas bersama telah mendorong negara-negara di kawasan membentuk organisasi regional. Bagaimanapun Asia merupakan sebuah benua yang di dalamnya terdapat beberapa sub region dengan proses regionalisasi tersendiri. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang mencirikan *regionalization style* dan pola interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Tahun 1967 terbentuklah ASEAN dengan prakarsa lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Muangthai.

Untuk diketahui, regionalisme sudah lahir lebih awal dari fenomena globalisme. Perdagangan antar negara dan antar kota di masa lalu dimungkinkan dan dibatasi oleh kemampuan transportasi. Perdagangan di kawasan Laut Tengah bagian Timur dan kawasan laut Baltik berkembang pesat di abad pertengahan. Di abad modern muncul berbagai kerjasama regional seperti NAFTA, Mercusor, EC-EU, ASEAN, SAARC dan APEC. [13]

Bersamaan dengan berakhirnya perang dingin dan munculnya gerakan Glasnost dan Peretroiska pada tahun 1985 di Uni Soviet, serta runtuhnya tembok Berlin pada 1989, telah mendorong negara-negara di Eropa Timur, yang semula tergabung dalam COMECON, bergabung dengan EC-EU, sehingga EEC yang dimulai dengan 6 anggota pada tahun 1957, telah berkembang menjadi EU pada tahun 1992, beranggotakan 27 negara pada tahun 2007. Di Asia Tenggara pun hal serupa terjadi dengan berkembangnya anggota ASEAN dari semula 5 anggota pada tahun 67, menjadi 10 anggota di tahun 1999.

EEC yang berkembang menjadi EU, sudah menjadi kekuatan yang besar dan mulai melembaga sebagai sebuah konfederasi. Sedangkan ASEAN yang terus berupaya memperkuat kelembagaannya, masih diliputi dengan berbagai isu bilateral, antara lain

---

[13] Rahardi Ramelan, "Globalisasi, Regionalisme dan Teknonasionalisme", *makalah* untuk kuliah umum, ITS Surabaya, 1998.

masalah teritorial, yang menyebabkan timbulnya saling curiga dan konflik.[14]

Berbagai kerjasama dan makin kuatnya pasar regional telah dimanfaatkan oleh perusahaan dalam bidang jasa, contohnya Sing-Tel Singapura telah memasuki Indonesia dan negara ASEAN lainnya, Air Asia yang berbasis di Kuala Lumpur dan Lion Air yang berbasis di Jakarta, telah mengembangkan jaringan pelayanannya ke beberapa negara ASEAN. Jaringan restoran Pho dari Vietnam sudah dapat kita temui di Jakarta, demikian juga Es Teler 77 kita temui di Singapura dan berbagai franchise restoran Thailand. Jaringan kue doughnut Dunkin Donuts dan Krispy Kreme dari AS di Indonesia mendapat saingan ketat dari Ring Master serta J. Co dari Indonesia.

Demikian halnya juga dengan Bread Talk dari Singapura bersaing ketat dengan Bread Life. Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lokal yang sudah memasuki pasar regional secara intensif, melalui strategi *branding*, *positioning,* dan *differentiation* yang tepat (Philip Kotler, Herman Kartajaya, Hooi Den Huan 2007). Bisa diutarakan bahwa beberapa perusahaan telah berupaya berperan lebih di kawasan ASEAN, antara lain Benga-wan Solo, Dji Sam Soe/Sampurna, Goldilocks (Philipina), Extra Joss, Royal Selangor (Malaysia), San Migue (Philipina), sampai Sari Ayu dan Mustika Ratu. Perusahaan multinasional pun makin deras mengembangkan jaringannya ke berbagai kawasan seperti ASEAN, di antaranya Samsung dan Kinokuniya. Pendekata MNC dalam memasuki

---

[14] Sebagai bandingan, perkembangan di Amerika Selatan awal abad 21 menunjukan munculnya gerakan nasionalisme (anti Amerika) yang sangat kuat. Terpilihnya kembali Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela pada tahun 2006, dan Evo Morales pada tahun yang sama sebagai presiden Bolivia, telah menjurus kepada pembentukan kelompok negara yang didasari ideologi sosialisme, seperti halnya pada era perang dingin. Kelompok baru ini telah mengangkat kembali peran Kuba (Fidel Castro) dalam gerakan melawan kapitalisme. Diperkirakan kelompok ini akan memperlambat perkembangan Mercusor dalam tahun-tahun mendatang.

Di benua Afrika pun gerakan regionalisme tidak dapat dihindari, saat ini Afrika Selatan bersama beberapa negara di sekitarnya mulai menggalang kerjasama untuk lebih efektif meningkatkan perdagangan dan industri mereka.

kawasan tertentu memanfaatkan juga keadaan tiap negara. Glorecalization (Globalozation-Regionalization-Localization) telah menjadi konsep baru dalam penetrasi pasar, yaitu dengan pendekatan 3 C: *Globalization of Value* (Consistent global value), *Regionalization of Strategy* (Coordinated regional strategy), dan *Localization of Tactic* (Customized local tactic).[15]

Dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mudah kita jumpai eksekutif berkebangsaan Indonesia yang bekerja di Singapura dan berdomisili di Jakarta atau kebalikannya, demikian juga yang terjadi dengan eksekutif Singapura dan Malaysia.

Regionalisme telah berkembang dari kerjasama antar negara untuk meningkatkan persahabatan sebagai tetangga, menjadi satu pakta perdagangan dan ekonomi, sedang globalisasi perdagangan yang dimotori negara-negara maju dimulai dari sektor perdagangan dan kemudian memasuki sektor-sektor lainnya.

Bagi ASEAN, penting mengamati fenomena pertumbuhan ekonomi dan munculnya kekuatan baru China dan India dalam perdagangan internasional. Hal itu perlu mendapat perhatian bagi ASEAN.

Regionalisme di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip regionalisme yang terbangun dari intensitas interaksi yang ada. Dalam hal ini, terdapat beberapa perspektif dalam hubungan internasional yang menjelaskan regionalisme di Asia Tenggara. Secara teoritis, baik perspektif realisme maupun liberalisme berasumsi bahwa regionalisme di Asia Tenggara akan men-

---

[15] Baca, Rahardi Ramelan, "Globalisasi, Regionalisme dan Teknonasionalisme". China dengan tenaga kerjanya yang murah (karena masih dalam alam komunisme) telah menguasai pasar *consumer goods* sampai *low end consumer durables*. Industri dari negara-negara maju yang memproduksi di China, kemudian menerapkan *branding* baru, untuk tidak merusak *image* dari *brand* aslinya. Perusahaan China pun rajin membeli perusahaan terkemuka dunia. Contohnya IBM-Personal Computer telah dijual kepada Lenovo dari China. Demikian juga perusahaan-perusahaan China dalam bidang energi dan baja, telah agresif mengakuisisi beberapa perusahaan dunia. Kitapun merasakan akibat tsunami produk China ini dalam industri TPT, *consumer electronic*, sepatu sampai mainan anak-anak.

dorong terjadinya distribusi *power* dari dari entitas-entitas ASEAN yang kemudian akan berimplikasi pada terciptanya stabilitas kawasan. Perspektif realis memandang bahwa negara-negara ASEAN akan mengupayakan perimbangan kekuatan. Di lain hal, sebagai salah satu perspektif dalam hubungan internasional, perspektif liberalis berasumsi bahwa akumulasi dari hasil kolaborasi kebijakan luar negeri setiap negara anggota ASEAN akan menghasilkan manfaat terhadap negara-negara ASEAN, termasuk manfaat politik maupun ekonomi. Kedua perspektif tersebut memandang bahwa konsep regionalisme akan memberikan kemajuan bagi ASEAN dengan mendorong pola integrasi. [16]

Namun pada dataran praksis, kedua teori tersebut masih lemah untuk menjelaskan regionalisme di Asia Tenggara karena ternyata distribusi power seperti yang dijelaskan perspektif realis tidak menghasilkan stabilitas, sebaliknya memunculkan konflik baru yang mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara. Berbagai konflik antar negara terjadi Konflik Thailand-Myanmar, Konflik Thailand-Kamboja (Angkor Wat & Preah Viehar), Konflik Malaysia-Singapura (wikileaks, orientasi Barat, relokasi tanah), Konflik Philipina-Malaysia (Sabah), Konflik Indonesia-Malaysia (Sipadan, Ligitan, Ambalat). Di samping itu, kolaborasi dari setiap kebijakan luar negeri negara ASEAN malah menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi. Distribusi yang ada terpusat di negara tertentu karena bersifat distribusi ekonomi sentris sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi antar negara-negara ASEAN. Singapura tentunya memiliki perekenomian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara kecil seperti Philipina dan Laos.

Penting diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di Asia menganut prinsip “non-interference”. Prinsip ini dipegang oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, tidak terkecuali China. Karena situasi yang demikian, menghantarkan banyak

[16] Kompas, 18/11/2011

negara-negara di Asia dalam suatu, Lingle menyebutnya "hypocrisy" dan "Asian Dillemas". Terkait dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) prinsip tidak saling campur tangan itu masih dipegang. Represi yang dilakukan oleh pemerintah Philipina pada penduduk sipil Mindanao Selatan. Represi pemerintah Thailand terhadap orang-orang yang memeluk agama selain agama mayoritas. Pencaplokan Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 dan banyak lainnya merupakan deretan wajah buruk Asia di masa lalu.[17]

ASEAN, AS DAN ISU KAWASAN

Presiden AS Barack Obama tiba di Bali, Kamis (17/11/2011) untuk mengikuti KTT ASEAN. Adakah agenda tersembunyi orang no-mor satu di AS pada kedatangannya ke Indonesia kali ini? Berbagai kalangan melihat, AS lewat Obama berniat menggoalkan Exxon Mobile sebagai operator pertambangan migas di Blok Natuna Timur. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Ires), Marwan Batubara, memprediksikan hal itu lantaran melihat berbagai indikasi. Di antaranya adalah adanya iklan Exxon Mobile dan kedatangan Presiden AS ke Indonesia.[18]

Exxon beriklan dengan tujuan agar publik dapat menerima bila pemerintah Indonesia memutuskan sumber migas itu dikelola perusahaan tersebut. Kedatangan Obama ini mengingatkan pada kunjungan Sekretaris Negara Amerika saat itu Condolizza Rice ke Indonesia yang meminta Blok Cepu, dengan bagi hasil yang tentunya menguntungkan AS.

Dan benar, tidak lama kemudian, Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobile. Padahal Direktur Pertamina saat itu menyatakan

[17] Christopher Lingle, "Singapore's authoritarian capitalism: Asian values", *Source: Public Choice*, Volume 93, No.1-2, October 1997. Christopher Lingle, "The Geopolitcs and the 'Asian Country': Political Hazards and Strategic Uncertainty", dikutip oleh Jessie PH Poon dalam, "Regionalism in the Asia Pacific: Is Geography Destiny?", *Area*, Vol. 33, No. 3, 2001, h. 252-260.

[18] Kompas, 18/11/2011

mampu mengelola Blok Cepu. Pola yang sama pun terjadi saat ini. Di samping Exxon beriklan secara massif, Presiden Amerika itu pun akan datang dengan dalih menghadiri KTT ASEAN.

Dalam beberapa minggu berikut, ada keputusan pemerintah tentang siapa dan berapa persen nanti masing-masing sahamnya yang akan mengelola blok Natuna Timur (dulu Natuna D Alfa).

Calon kontraktornya ada empat, yaitu Pertamina, Exxon Mobile, Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis).

Tahun 2011, untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Serikat menjadi satu di antara 18 pemimpin negara yang duduk dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS). Amerika bersama Rusia menjadi anggota baru EAS.

Kehadiran Amerika Serikat dan Rusia dalam EAS semula dipandang tak memberi nilai positif bagi ASEAN. Sebab, kedua negara adidaya itu ditakutkan akan menyetir agenda-agenda ASEAN agar selaras dengan agenda mereka. Namun sepuluh negara anggota ASEAN menepis kekhawatiran itu dengan memberi persetujuan penuh pada 2010.

Di luar isu energi, lembaga pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk membahas isu-isu kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompok yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu mendesak Obama menekan Yudhoyono untuk memberangus undang-undang yang bersifat diskriminatif.

“Obama mesti jujur soal masalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia,” kata Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Elaine Pearson. “Ketidakpedulian pemerintah Indonesia atas aksi kekerasan terhadap kelompok agama, dan tindakan brutal aparat keamanan terhadap aksi unjuk rasa damai, merupakan hal yang tepat untuk memulai pembicaraan,” ungkap Pearson lebih lanjut.

Selain itu, masalah Laut China Selatan juga mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 yang digelar di Bali tersebut. Berbagai langkah Indonesia terkait isu Laut China Selatan (LCS) dianggap tepat sasaran dan bisa membawa ASEAN menempatkan diri dalam konflik China-AS.

Stabilitas ASEAN tidak terlepas dari berbagai dinamika di kawasan. Di bidang politik/keamanan, merujuk perspektif Carlyle A Thayer (*Southeast Asian Affairs*, 2011), ada tiga faktor yang mempengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini.

Pertama, bertambahnya ketegangan dalam hubungan China-AS; *Kedua*, meningkatnya kembali keterlibatan AS di Asia Timur; dan *Ketiga*, peningkatan keagresifan China di Laut China Selatan.

Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (primary driving force) dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Meluasnya ketegangan di Laut China Selatan dimulai ketika Vietnam dan Malaysia mengajukan perluasan klaim wilayah landas kontinen mereka ke sebuah area di Laut China Selatan sejauh 200 mil laut (370,4 kilometer) dari garis pantai.

China secara tegas menyatakan keberatan atas klaim Vietnam dan Malaysia, dengan menegaskan kedaulatannya yang tidak bisa dipertanyakan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya, *(Robert Beckman, Issues in Human Security in East Asia, 2011).*

ASEAN yang saat ini diketuai oleh Indonesia secara tepat telah melihat konflik di Laut China Selatan (LCS) berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara.

Pernyataan Menlu Marty Natalegawa yang telah menyampaikan pendapat bahwa ASEAN tidak akan membiarkan Asia Tenggara sebagai arena bersaing negara-negara besar patut diapresiasi.

Indonesia sebagai ketua ASEAN telah memastikan agar dua kekuatan besar, China dan AS, tidak dalam posisi berhadap-hadapan dan menjadikan Laut China Selatan sebagai ladang konflik bersenjata mereka.[19]

Persoalan Laut China Selatan itu bermula ketika China merasa dipojokkan dengan manuver Philipina yang hendak membawa ASEAN untuk berhadapan dengannya. Manuver Philipina ini, diduga dilakukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan China.

China juga menyatakan ketidaksukaannya dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam masalah Laut China Selatan. Meski mengakui tidak memiliki klaim atas wilayah Laut China Selatan, bagi AS keterlibatannya dalam rangka memastikan alur laut bagi pelayaran internasional aman.

Langkah-langkah agresif China yang mengiringi responsnya yang keras itu justru memperbesar kecenderungan ke arah pelibatan kekuatan-kekuatan ″ekstra-regional″ untuk mengimbanginya. ASEAN telah bersepakat memperluas East Asia Summit dengan memasukkan AS dan Rusia sebagai anggota tetap.

Kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia dan beberapa negara ASEAN pada bulan November 2010 dan kehadirannya dalam KTT ASEAN di Bali pada November 2011, menandai fase *re-engagement* (keterlibatan kembali) AS dalam percaturan regional di Asia Tenggara.

AS juga ingin memastikan China tidak melakukan intimidasi atau ancaman penggunaan kekerasan (use of force) untuk penyelesaian klaim dengan negara-negara yang kekuatan militernya tidak sebanding.

---

[19] "ASEAN yang saat ini diketuai oleh Indonesia secara tepat telah melihat konflik di Laut China Selatan (LCS) berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara," tutur Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikmahanto Juwana, (Antara, 19/11/11).

Dalam hal ini, Indonesia harus menjadi jangkar stabilitas di Asia Tenggara, menyatukan dan menjaga soliditas ASEAN dalam mengatasi rivalitas China-AS yang bersaing secara geopolitik-geostrategi dan berebut sumber daya alam di kawasan Laut China Selatan.

Namun demikian, dalam persepsi analis politik di AS dewasa ini, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara mengalami kemunduran besar dan tak terduga saat berlangsungnya KTT Menteri Luar Negeri di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. [20]

Thailand, Philipina, dan Indonesia telah lama menjadi sekutu Amerika Serikat. Singapura menikmati hubungan yang erat baik dengan Amerika Serikat maupun China.

Laos dan Myanmar secara tradisional dekat dengan China. Dan Brunei serta Malaysia menikmati hubungan yang baik, walaupun tidak erat dengan Amerika Serikat dan China.

Pengamat di seluruh Asia melaporkan bahwa konflik ini membuka perpecahan baru di ASEAN, yang negara-negaranya meliputi daerah yang luas dengan populasi lebih dari setengah milyar orang. Beberapa dari mereka berpendapat hal itu dapat menggelincirkan rencana ambisius organisasi itu untuk menciptakan pasar bersama atau ruang ekonomi tunggal di antara 10 negara anggotanya pada tahun 2015.

"Kebersamaan ASEAN tidak seperti dulu lagi", ungkap Thitinan Pongsudhirak, Direktur Institut Kajian Keamanan dan Internasional di Universitas Chulalongkorn di Thailand.[21]

"Di satu pihak, Piagam ASEAN mengatur kerjasama dan hubungan yang lebih erat. Di lain pihak, kepentingan negara-negara anggota ASEAN makin beragam. Tujuan Komunitas pada 2015 tidak dapat ditafsirkan secara harfiah atau diabaikan begitu saja," tulis

---

[20] Martin Sieff, "Laut China Selatan Memecah-belah para pemimpin ASEAN", *Asia-Pacific Defense Forum*, 8/8/2012.

[21] *Bangkok Post*, 27 Juli 2012.

Pongsudhirak. "Minimal, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN [APSC] – satu dari tiga pilar utama dari piagam ini – kini tampak mendapat tantangan setelah apa yang terjadi di Phnom Penh. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah Komunitas Ekonomi ASEAN yang secara potensial sangat kuat dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang terbukti lemah dapat mendukung APSC." Ungkapnya lebih lanjut.

Perselisihan di Phnom Penh

Perselisihan di Phnom Penh merupakan kejutan tak menyenangkan bagi hampir semua pemerintahan ASEAN terutama karena hal itu terjadi setelah sekian lama berlangsungnya masa optimis pertumbuhan ekonomi, perkembangan politik yang positif, dan diatasinya konflik tradisional baik di dalam maupun di antara negara-negara anggotanya.

Myanmar, negara yang sejak dulu paling tertindas dan paling terisolasi di kelompok ini, selama setahun terakhir telah melakukan langkah-langkah besar menuju demokrasi dan liberalisasi sistem politiknya. Hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa secara dramatis telah membaik.

Seluruh wilayahnya telah semakin makmur karena permintaan akan bahan mentah dan energi yang meningkat dengan cepat, terutama dari China. Indonesia tetap stabil dan sukses 14 tahun sejak mereka mulai berupaya melakukan transisi yang sangat berhasil menuju demokrasi seutuhnya.

Struktur dan forum ASEAN juga terbukti menjadi jembatan pembangun yang sangat berharga untuk memecahkan, menguburkan atau memadamkan konflik atau kecurigaan yang telah berlangsung lama di antara negara-negara anggota. Hubungan Vietnam dengan negara tetangganya Thailand telah membaik secara mantap. Negara-negara di sepanjang Sungai Mekong di Indo-China telah meningkatkan kerjasama dalam proyek-proyek hidroelektrik, serta kerjasama lingkungan dan keamanan. Indonesia dan

Malaysia, pesaing dan musuh tradisional selama berpuluh tahun setelah mereka meraih kemerdekaan, terus bekerjasama dalam bidang-bidang yang beragam.

Pemerintahan dari kebanyakan negara anggota ASEAN jelas menginginkan agar proses ini terus berlanjut. ASEAN menyadari bahwa anggota-anggotanya harus bekerja sama dalam hal-hal tersebut serta meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN sehingga dapat bersaing secara efektif dengan raksasa regional seperti China dan India dalam dasawarsa mendatang.

"ASEAN dan hampir semua negara anggota dalam KTT Asia Timur menyadari pentingnya peningkatan persatuan dan kepercayaan diri ASEAN sebagai dasar bagi (sebuah) rancangan regional baru yang meningkatkan keamanan, dialog politik dan ekonomi, keselarasan, perdamaian, dan kemakmuran," ungkap Ernest Z. Bowers, Direktur Program Asia Timur di Pusat Kajian Strategis dan Internasional [CSIS] yang ada di Washington.

Bowers menyajikan visi sebuah ASEAN yang kuat, bersatu secara ekonomi, dan bahkan secara politik meningkat persatuannya.

Namun, Sekjen ASEAN, yang juga mantan menteri luar negeri Thailand Surin Pitsuwan, memperingatkan bahwa keberhasilan ASEAN dalam meningkatkan integrasi regional telah menjadikannya sebagai sasaran yang menarik bagi kekuatan-kekuatan luar yang tak bernama. [22]

Sementara itu Pongsudhirak juga mengakui bahwa divisi-divisi baru dalam kebijakan luar negeri dan isu-isu strategis bermunculan di dalam komunitas negara-negara ASEAN.

Dewasa ini, ASEAN diperhitungkan AS/Barat, China dan Rusia karena ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km^2 atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka lebih 600 juta orang atau setara

[22] *Strait Times* pada 26 Juli 2012.

dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010 saja, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1.8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia.

Dalam pandangan AS, kondisi maritim dan daratan ASEAN tampaknya menjadi semakin dikuasai oleh berbagai kepentingan. Untuk memperbaiki langkah keliru yang dilakukan ASEAN dan meraih kembali momentum menuju tahun 2015, kepemimpinan organisasi dari semua negara anggota [memiliki] banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Mengenai konflik teritorial Laut China Selatan, China telah mengambil posisi yang jelas dan konsisten bahwa setiap pertikaian harus dinegosiasikan antara China dan negara individu lainnya yang terlibat secara langsung hanya dalam pembicaraan bilateral, meskipun negara lain tersebut adalah anggota ASEAN.

AS Inginkan Negosiasi Multilateral

Persengketaan di wilayah kepulauan Spratly menjadi salah satu variabel ancaman beberapa negara seperti Philipina dan Thailand untuk menambah armada lautnya. Hal serupa juga dilakukan oleh China, yang semakin sering berpatroli di wilayah tersebut. Di kepulauan Spratly yang diduga menyimpan cadangan minyak berlebih menjadi rebutan beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Philipina, Thailand (sebagian besar merupakan negara Asia Tenggara) dengan China.

Di Selat Taiwan, China daratan bersitegang dengan Taiwan. Perlombaan senjata pun terjadi. Taiwan memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat (AS) yang meminjamkan bantuan baik keuangan untuk membeli persenjataan dari AS. Sebagai tandingan terhadap keberadaan pengaruh AS di wilayah selat tersebut,

China tidak segan untuk memamerkan proses modernisasi angkatan bersenjatanya. Meskipun kapabilitas persenjataan China masih jauh daripada AS atau sebaliknya. Dengan kata lain, boleh jadi negara-negara Asia sedang dalam proses meningkatkan militernya, namun menurut Lingle, peningkatan tersebut belum dapat menyamai apalagi melampaui Barat—meskipun Barat dalam taraf tertentu telah mengurangi persenjataan mereka secara berangsur.

Sebagai tambahan, teknologi persenjataan terbaru menggunakan nuklir dan hidrogen yang teknologi dan penelitiannya masih dikendalikan oleh Barat. Bahkan pengembangan nuklir di dunia masih dipimpin dan dimiliki oleh Barat. Ditambah pula, Barat yang menciptakan sistem pengembangan nuklir. Sistem tersebut menjadi tatanan baru dunia sehingga hanya negara-negara tertentu (yang memperoleh legitimasi dari Barat) yang diijinkan untuk mengembangkan nuklir.

Negara-negara di wilayah Asia identik dengan ketidakstabilan akibat pergolakan politik. Amerika Serikat mendukung prinsip bahwa China harus bernegosiasi dalam sebuah forum multilateral secara simultan dengan negara-negara lain yang bersengketa dengannya atas klaim teritorial di Laut China Selatan.

Indonesia telah menjadi garda depan dalam upaya-upaya untuk mencegah terpecah-belahnya ASEAN akibat perbedaan di antara pemerintahan mengenai pertikaian di Laut China Selatan.

Tidak ada yang ingin membubarkan ASEAN, termasuk China. China telah menjadi pihak utama yang menikmati perdamaian, kestabilan, dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut sekaligus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi melalui investasinya di area itu dan kebutuhannya akan bahan mentah dari wilayah itu.

Namun, proses integrasi kesepuluh negara komunitas tersebut selama 45 tahun terakhir telah berlangsung berdasarkan prinsip konsensus dan kesabaran universal secara suka rela. Dalam hal

ini, ASEAN telah mengikuti dan dipengaruhi oleh keberhasilan Uni Eropa, yang berkembang dari bentuk awalnya, Pasar Bersama perdagangan bebas saja dengan enam negara Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1957 menjadi Uni Eropa dengan 27 negara anggota – lebih dari setengah dari mereka menggunakan Euro sebagai mata uang bersama – yang tetap ada hingga kini.

Jika Kamboja, Laos, dan Myanmar lebih mendekat ke China pada saat Philipina dan Vietnam menjadi lebih waspada akan China dan tetap bertikai dengan negara itu, terdapat kekhawatiran bahwa perbedaan ini akan meracuni semangat saling bekerjasama dan upaya-upaya positif untuk mencapai konsensus yang selama ini telah berhasil dijalankan ASEAN.

Namun, Kamboja dan Laos adalah dua negara kecil, miskin, dan terisolasi di jantung Indo-China dengan posisi sangat kurang penting dalam hal populasi dan ekonomi dibandingkan dengan tetangga mereka Thailand dan Vietnam. Padamnya potensi konflik dan persaingan antara Thailand, sekutu tradisional dari Amerika Serikat, dan Vietnam, yang memiliki hubungan yang baik dan berkembang dengan Amerika Serikat, telah menjadi pencapaian diplomatik jangka panjang ASEAN yang paling menonjol. Indonesia juga tetap dekat dengan Washington.

Tidak ada bahaya nyata saat ini yang akan memecah-belah atau membubarkan ASEAN. Keberhasilan ekonomi dan diplomatik baru-baru ini masih menjadi pengalaman paling penting dari pemerintah negara-negara anggota dan pembuat kebijakan, yang semuanya telah banyak berinvestasi di dalamnya.

Tujuan untuk mempersatukan ekonomi masih bisa dicapai dengan tenggat waktu tahun 2015. Namun bahkan jika tidak tercapai, riwayat keberhasilan ASEAN dalam membina perdamaian dan kerjasama serta pertumbuhan regional tetap merupakan faktor keunggulannya.

Pelajaran lain yang dapat diambil dari evolusi panjang Uni Eropa selama 55 tahun terakhir adalah kemunduran besar dalam integrasi atau pertumbuhan ekonomi dapat terjadi – seperti krisis ekonomi panjang pada tahun 1973 setelah embargo minyak Arab dan peningkatan harga minyak sebanyak empat kali lipat oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, dan kemudian krisis keuangan saat ini yang mengguncang zona Euro. Terkadang, rencana ambisius untuk berintegrasi lebih lanjut harus ditunda selama beberapa tahun bahkan dasawarsa. Tapi pengelompokan regional tetap mampu mengatasi badai dan membangkitkan kembali rencana-rencana yang lebih ambisius di waktu yang lebih memungkinkan.

ASEAN dan Masalah di Kawasan

Sampai awal milineum ketiga, tepatnya 2006, negara- negara di Asia Tenggara menjadi sorotan dunia, terutama dalam kaitan perkembangan politik dan demokratisasi. Pertama adalah penahanan tokoh prodemokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dan kedua, penggagalan rencana kudeta militer terhadap Presiden Philipina Gloria Macapagal Arroyo, serta Thailand era Thaksin Sinawatra yang dikudeta.

Ketiganya sama-sama melibatkan peran dan posisi militer dalam politik. Sesuatu yang selalu dijadikan indikasi sejauh mana demokratisasi berjalan. Bayang-bayang peran militer dalam politik juga masih terjadi di Indonesia kendati sudah datang reformasi. Rupanya masa transisi tidak bisa berjalan cepat. Inilah sebagian dari pelajaran demokrasi yang bisa didapat dari negara-negara Asia Tenggara. Bukan berarti negara seperti Malaysia tidak menyimpan benih-benih persoalan serupa.

Kondisi Myanmar telah menjadi perhatian besar dari dunia internasional. Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Asia-Eropa di Nusa Dua Bali beberapa tahun silam mengeluarkan tuntutan agar pemerintah junta militer Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi. Pemimpin oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi

(NLD) itu kembali ditahan setelah terjadi bentrokan antara pendukungnya dan pendukung pemerintah saat berkunjung ke daerah utara Myanmar. Itulah sebabnya negara-negara ASEM yang melibatkan antara lain negara-negara Asia Tenggara, Uni Eropa, China, dan Jepang mendesak agar Yangoon segera membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi dan menjamin kebebasan politik di negara anggota ASEAN itu.

Belum reda soal terhalangnya demokrasi di Myanmar akibat kekuasaan junta militer, tiba-tiba muncul berita tentang rencana kudeta militer yang kembali terjadi di Philipina. Upaya kudeta militer terhadap Presiden Arroyo itu berhasil digagalkan. Namun, semua itu menjadi noda atau sedikitnya catatan atas demokratisasi di negara tersebut. Bagi Philipina, kudeta militer bukan cerita baru. Yang sekarang terjadi pun kabarnya digerakkan oleh tokoh-tokoh lama seperti Gringo Honasan, yang tercatat pada 1980-an sebagai kolonel muda yang berkali-kali melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Cory Aquino. Kini dia menjadi politikus. Namun, dugaan menyebutkan keterlibatannya dalam aksi kudeta yang dilakukan perwira-perwira muda angkatan bersenjata di negaranya. Sementara Thaksin dikudeta militer sehingga kondisi ekonomi Thailand memburuk, seiring dengan memburuknya demokrasi di negeri itu.

Kasus Myanmar dan Philipina serta Thailand memberikan pelajaran penting tentang proses demokratisasi khususnya di Asia Tenggara yang masih akan menghadapi kendala dan tantangan. Bagaimana peranan militer dalam politik yang seharusnya sudah menjadi cerita usang, masih terjadi. Tanpa harus risih atau malu-malu, Myanmar bahkan seperti mengabaikan imbauan dan kecaman dunia internasional termasuk tetangga terdekatnya yakni Thailand dan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, di Philipina, terbentuknya pemerintahan pasca-Marcos sesungguhnya membuka pintu bagi upaya membangun demokrasi di sana. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah selalu digoyang oleh

berbagai hal termasuk ancaman kudeta militer yang masih saja terjadi. Belum ada jaminan bagi terbentuknya sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil.

Kasus Myanmar dan Philipina serta Siam membedakan ketiga negara dengan Malaysia dan Singapura. Di kedua negara itu, demokrasi tidak selalu menjadi tuntutan karena komitmen terhadap pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan lebih mengemuka. Walaupun tetap ada catatan buram atas perkembangan demokrasi di kedua negara tersebut. Pemerintahan Mahathir Mohamad yang berusia dua dasawarsa masih bertumpu pada kekuatan mayoritas dengan aliansi partai-partai yang tak tergoyahkan. Akibatnya, perlawanan dari kelompok proreformasi belum mendapatkan tempat. Salah satu noda demokrasi yang akan selalu dikenang adalah penangkapan dan penahanan mantan deputi Anwar Ibrahim. Terhadap kebebasan pers, yang selalu menjadi tolak ukur penting demokrasi, baik di Malaysia maupun Singapura juga belum ada kemajuan signifikan.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejak reformasi digulirkan pada 1998, demokratisasi di Indonesia tengah mencari titik konsolidasi, meski korupsi, oligarkisme dan konflik horisontal terus membayangi kawasan ini. Akibatnya, militer masih menjadi bayang-bayang kekuatan yang nyata, sementara kesiapan para politikus atau elite sipil cenderung kurang begitu meyakinkan. Beruntung bahwa kebebasan pers telah memberikan stimulan penting dalam proses pengembangan demokrasi, maka, meskipun berlangsung secara gradual, upaya menapak ke arah konsolidasi demokrasi makin jelas arahnya.

Karena itu, negara-negara di Asia Tenggara khususnya ASEAN terus dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan dalam mencapai konsolidasi demokratisasi, khususnya ekonomi dan politik.

Apa yang terjadi di Thailand, sejak kudeta 19 September 2006 lalu yang menjatuhkan PM. Thaksin Shinawatra dengan dukungan

militer, praktis kemunduran iklim demokrasi di negara tersebut. Namun seiring dengan mulai tumbuhnya iklim demokrasi di Thailand, pemerintahan sekarang yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu, telah berdampak terhadap kehidupan demokrasi di negara tersebut. [23]

Kudeta di Thailand menunjukkan bahwa demokrasi di negeri itu masih belum terkonsolidasi dan sangat mungkin di masa depan terjadi lagi. Sudah puluhan kali kudeta melanda negeri Siam ini.

Sejak Thailand dipimpin oleh PM Yingluck Shinawatra, seorang perempuan, praktis kehidupan demokrasi di negara yang sering mengalami kudeta militer tersebut telah memulai kehidupan demokrasi yang baru. Reformasi politik dan ekonomi telah menggairahkan iklim investasi di Thailand. Geliat ekonomi pasca-banjir yang melanda Thailand mulai menunjukkan gerak ekonomi dan perdagangan.

Thailand semasa dikuasai oleh militer terus mengalami langkah mundur, khususnya dalam hal penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan konstelasi politik di Thailand, menandakan bahwa negara tersebut menghadapi ujian dan tantangan dalam upaya menumbuhkan iklim demokrasi dan penegakan HAM. Menyusul jatuhnya Thaksin Shinawatra mengalami mosi tidak percaya oleh rakyatnya sendiri yang didukung oleh militer, praktis kehidupan politik di negara tersebut mengalami kemunduran.[24]

Selain Thai, pada 2006 kekuasaan Presiden Gloria Maccapagal juga digoyang oleh pihak oposisi yang merasa bahwa Arroyo melakukan kecurangan dalam Pemilu dan korupsi, namun transisi politik negara tersebut tidak mengalami gejolak dengan adanya kudeta militer.

---

[23] Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya", *Riau Pos*, 9 Oktober 2012. Hasrul Sani Siregar adalah Master Ekonomi-Politik Internasional, IKMAS, UKM Bangi, Malaysia.

[24] Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya."

Perubahan kepemimpinan dan pergolakan politik dalam negeri di masing-masing negara anggota ASEAN tidak menghalangi negara-negara ASEAN untuk tetap komitmen dan tetap teguh dalam menghormati dasar-dasar dan komitmen masing-masing negara anggota bagi kepentingan regional ASEAN sendiri.

Negara-negara anggota ASEAN sendiri memandang bahwa krisis yang terjadi di negara-negara ASEAN tersebut adalah sebagai fenomena dan perubahan politik dan ekonomi regional dan dunia yang ditandai oleh regionalisasi dan globalisasi ekonomi-politik dunia.

Terlepas dari berbagai kesulitan yang melanda ASEAN, kawasan ini setiap tanggal 8 Agustus merayakan HUT berdirinya ASEAN. Selama lebih 40 tahun ini, ASEAN telah mencapai prestasi yang mengagumkan di bidang politik, ekonomi dan kerja sama regional, dan menjadi organisasi internasional paling penting di kawasan Asia Tenggara dan salah satu kekuatan regional yang tidak boleh diremehkan di arena internasional. [25]

Tahun 1970-an adalah masa perkembangan dan diperkokohnya ASEAN. Kala itu Amerika Serikat dan Uni Soviet bertarung sengit untuk merebut lingkungan pengaruh di seluruh jagad. Menanggapi situasi itu, negara-negara anggota ASEAN yang ingin menentukan nasibnya sendiri sudah menyadari betapa pentingnya untuk meningkatkan kerja sama keamanan kolektif dalam rangka menyeimbangi pengendalian negara-negara adi kuasa terhadap kawasan Asia Tenggara. Tahun 1971, ASEAN dalam pertemuannya di Kuala Lumpur mengumumkan Deklarasi Netralisasi Asia

---

[25] Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) semula dikenal dengan Perhimpunan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 31 Juli tahun 1961, dengan Malaya (Malaysia), Philipina dan Thailand sebagai tiga anggotanya. Tanggal 7 dan 8 Agustus tahun 1967, para menteri luar negeri dari Indonesia, Singapura, Thailand, dan Philipina serta Wakil Perdana Menteri Malaysia mengadakan pertemuan di Bangkok, dan mengumumkan Deklarasi Berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu Deklarasi Bangkok 1967, berarti resmi berdirinya ASEAN.

Tenggara, mengumumkan target pembangunan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral. Tahun 1973, ASEAN secara kolektif memboikot "sistem keamanan kolektif Asia" yang dikemukakan oleh Uni Soviet. Tahun 1976, Pertemuan Puncak Pertama ASEAN menandatangani Perjanjian Kerja Sama Persahabatan Asia Tenggara dan Deklarasi Koordinasi ASEAN, menandakan penampilan ASEAN di arena internasional sebagai kekuatan regional. Tahun 1984, Brunei masuk menjadi anggota ASEAN.

Sejak tahun 1990-an, ASEAN memasuki tahap perkembangan pesat. Berakhirnya konfigruasi konfrontasi antara dua kutub juga menyediakan peluang strategis bagi ASEAN untuk melakukan kerjasama semua arah antar-anggota dan dengan negara yang bukan anggota ASEAN. Tahun 1992, Pertemuan Puncak Ke-4 ASEAN mengajukan tiga strategi, yaitu memperdalam kerjasama, menerima anggota baru, dan mendirikan mekanisme dialog keamanan multilateral regional.

Sejak itu, ASEAN berangsur-angsur menerima Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999) sebagai anggota baru. Dengan demikian, ASEAN akhirnya menjadi satu kelompok negara yang beranggotakan 10 negara dengan luasnya 4,48 juta kilometer dan jumlah penduduk melampaui 500 juta jiwa. Terhitung sampai akhir tahun 2006, nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN mencapai 500 miliar dolar Amerika, dan PDB perkapitanya mencapai 1.000 dolar Amerika. Saat itu ASEAN mempunyai dua negara peninjau (Timor Leste dan Papua Nugini) serta 10 negara mitra dialog (AS, Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Selandia Baru, Kanada dan Rusia).

ASEAN berusaha mendorong pengintegrasian kawasan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan. Zona perdagangan bebas ASEAN diaktifkan tanggal 1 Januari tahun 2002. Tujuannya ialah mewujudkan bea masuk nol persen. Oktober tahun 2003, Pertemuan Puncak ASEAN menerima baik Deklarasi Bali, yang antara lain berbunyi membangun ASEAN sebagai masyarakat eko-

nomi, keamanan dan kebudayaan sebelum tahun 2020. Para pemimpin ASEAN tahun 2005 mengajukan rencana penyusunan Piagam PBB, agar perkembangan ASEAN menjadi lebih mekanistik. Sejak tahun 2005, para menteri ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN telah menandatangani tiga persetujuan tentang pembangunan masyarakat ekonomi, yang menyangkut bidang-bidang perdagangan, pariwisata, penerbangan, pergudangan dan distribusi serta pembebasan visa. Mei tahun 2006, pertemuan menteri pertahanan pertama ASEAN digelar. Pertemuan ini khusus memperhatikan penyelesaian masalah keamanan non tradisional, antara lain, pembajakan di laut, terorisme dan kejahatan lintas negara.

ASEAN menaruh perhatian pula pada pembinaan mekanisme musyawarah intern, dan secara berangsur-angsur mendirikan serangkaian mekanisme kerja, antara lain, pertemuan puncak, pertemuan menlu, komisi eksekutif, pertemuan menteri ekonomi, pertemuan tingkat menteri lainnya, Sekretariat ASEAN, Panitia Ad Hok serta lembaga swadaya dan semi pemerintah. Kesemua mekanisme itu telah menyediakan jaminan kuat untuk memelihara persatuan intern ASEAN, menangani persengketaan antar anggota dan mendorong maju perkembangan bersama.

Sejalan dengan terus meningkatnya kekuatan ekonomi dan daya pengaruh, ASEAN memainkan peranan yang semakin besar dalam urusan regional dan internasional. Juli tahun 1994, Forum Kawasan ASEAN didirikan. Para peserta forum itu terutama bertukar pendapat mengenai masalah politik dan keamanan Asia dan Pasifik yang menjadi perhatian bersama. Tahun 1997, setelah terjadi krisis moneter Asia, ASEAN untuk pertama kali mengadakan pertemuan 10 plus tiga dengan para pemimpin dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Oktober tahun 1994, ASEAN memprakarasi Konferensi Asia-Eropa untuk melakukan penjajakan menyeluruh dengan para pemimpin Tiongkok, Jepang, Korea Selatan serta Komisi Uni Eropa tentang peningkatan dialog poli-

tik, dan kerja sama ekonomi. September tahun 1999, atas prakarsa ASEAN, Forum Kerja Sama Asia Timur-Amerika Latin pun resmi didirikan.

Makin terasa bahwa dunia dihadapkan kepada perubahan yang semakin cepat. Krisis ekonomi dan politik yang melanda negara-negara ASEAN sejak 1997 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi juga dirasakan di negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti halnya Malaysia, Thailand dan juga Philipina.

Kesan kebersamaan, senasib dan sepenanggungan di antara negara-negara ASEAN telah melahirkan komitmen untuk menyelesaikannya dan mengatasi krisis tersebut secara bersama-sama.

Tidak saja krisis ekonomi, krisis politik (kepemimpinan) yang terjadi di negara-negara ASEAN, juga dilihat sebagai ujian dan tantangan ASEAN untuk senantiasa selalu memecahkannya secara bersama-sama dengan komitmen yang tinggi yang tentunya tidak turut campur dalam masalah dalam negeri masing-masing anggota ASEAN.[26]

Komitmen dan kepedulian yang tinggi dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada secara bersama-sama tersebut merupakan dasar dan arah tujuan serta komitmen dari perumusan hakekat berdirinya ASEAN.

Dasar pembentukan ASEAN adalah sebagai mempererat, meningkatkan, ikut menjaga kestabilan dan keamanan dan tidak ikut campur dalam masalah politik dalam negeri dari masing-masing anggota ASEAN.

Secara geopolitik dan geoekonomi, ASEAN memiliki komitmen dan kepedulian terhadap kawasannya dan hal tersebut merupakan hal yang wajar bagi ASEAN untuk selalu memberikan sumbangsihnya terhadap kemajuan, keamanan, dan kestabilan kawasan regional maupun internasional.

---

[26] Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya."

Perubahan ekonomi dan politik menuju era regionalisasi dan globalisasi secara terbuka tersebut yang ditandai oleh keterbukaan kawasan (open regionalism) baik regional maupun internasional merupakan agenda perubahan yang akan dihadapi oleh ASEAN ke depan.

Kita tentunya sepakat bahwa tujuan dan cita-cita ASEAN adalah menghindari dari pengaruh asing yang ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya.

Namun demikian, dialog dan kerja sama dengan mitranya seperti dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Korea Selatan dan Rusia tetap perlu dilaksanakan mengingat negara-negara tersebut memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga keamanan dan kestabilan regional, khususnya Asia Tenggara. Dalam konteks politik regional, ASEAN memiliki komitmen dan moral dalam menjaga keamanan dan kestabilan politik kawasannya.

Negara-negara ASEAN sebagai kekuatan regional akan lebih aktif untuk melihat perkembangan dan perubahan ekonomi dan politik baik perubahan politik-ekonomi regional maupun internasional yang secara tiba-tiba dapat berubah dengan cepatnya.

Dalam kerangka kerjasama regional, ASEAN juga akan dihadapkan kepada perbedaan dan kepentingan dari masing-masing anggotanya.

Perbedaan tersebut terjadi sebagai akibat dari perubahan misi dan visi dalam suatu kerjasama regional dan perubahan konstelasi politik-ekonomi dunia.

Perbedaan tersebut akan menjadi keragaman menuju ASEAN yang memiliki visi ke depan menuju apa yang dicita-citakan oleh ASEAN yaitu “ASEAN Community 2015”.

ASEAN pada bulan November 2012 ini akan melaksanakan KTT tingkat Kepala Pemerintahan di Phnom Penh, Kamboja. Kamboja yang merupakan Ketua ASEAN untuk tahun 2012 berkomitmen terus meningkatkan komitmen dan kerja sama sesama negara-

negara anggota ASEAN lainnya. KTT ASEAN nantinya merupakan konferensi yang merupakan agenda tahunan bagi negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog ASEAN untuk saling mengadakan dialog dan kerjasama dalam rangka membangun kepercayaan sesama negara-negara anggota dan mitra dialog ASEAN lainnya seperti China. Keputusan China untuk membuka perwakilan mereka di ASEAN terhitung semenjak tanggal 1 Oktober 2012, merupakan keberhasilan ASEAN sebagai organisasi regional yang menjadi mitra China dalam hal kerja sama khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. China membuka dan memiliki wakil mereka di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Tujuan pembukaan perwakilan mereka di ASEAN adalah sebagai upaya memperkuat kerja sama yaitu antara ASEAN dan China. [27]

Peluncuran misi China di ASEAN ini adalah untuk mendemonstrasikan komitmen China menjadi negara tetangga, sahabat dan mitra yang baik dalam menghadapi tantangan bersama, dengan cara yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kemitraan strategis, demikian kata Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan.

China adalah salah satu mitra dagang utama ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Semenjak zona perdagangan bebas ASEAN-China diterapkan pada 2010 lalu, total perdagangan kedua belah pihak (ASEAN dan China) mencapai nilai tertinggi pada 2011 yaitu 363 miliar dolar AS. Dalam delapan bulan pertama 2012, jumlahnya meningkat pesat. Duta Besar China untuk ASEAN, Yang Xiuping, dalam peresmian perwakilan China di Sekretariat ASEAN di Jakarta, menegaskan bahwa kerjasama kedua pihak akan menguntungkan bagi ekonomi dan keamanan kawasan.[28]

Kerjasama yang komprehensif antara China dan ASEAN tidak hanya memberikan dorongan bagi perkembangan sosial dan eko-

---

[27] Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya."

[28] Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya."

nomi, namun juga menyumbang bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia dan dunia secara keseluruhan.

MEWUJUDKAN KOMUNITAS ASEAN

Pertemuan Puncak KTT ke-19 ASEAN 13-19 November 2012 membahas sejumlah isu yang menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak ASEAN kali ini antara lain adalah permohonan Myanmar untuk menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2014, putaran pertama pembahasan penerapan Deklarasi Tata Perilaku di Laut China Selatan, perundingan antara ASEAN dengan negara-negara pemilik senjata nuklir AS, China, Inggris, Perancis dan Rusia serta permohonan keanggotaan Timur Leste.[29]

Dalam KTT ke-19 ASEAN ini, para pemimpin ASEAN menyepakati Deklarasi Bali atau Prinsip Bali III yang menjadi dasar kerjasama ASEAN untuk terbentuknya Komunitas ASEAN pada 2015. Pada KTT itu para pemimpin negara ASEAN mengabulkan permohonan Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN pada 2014. Sebagai rangkaian dari KTT ke-19 ASEAN, diselenggarakan pula Pertemuan Puncak ke-6 Asia Timur (EAS) yang diikuti dua anggota baru EAS yaitu Rusia dan Amerika Serikat.

Bagaimanapun Organisasi regional ASEAN tetap relevan dengan persoalan abad ke-21 di kawasan ini, baik dilihat sebagai tantangan maupun peluang. Dalam era ini, kekuatan hegemoni dunia, yang sebelumnya terpusat pada AS-Uni Soviet pada masa Pe-

---

[29] Presiden Amerika Serikat Barack Obama menjadi presiden pertama AS yang turut serta dalam acara tersebut, sementara Presiden Rusia Dmitry Medvedev berhalangan hadir karena harus mempersiapkan pemilihan umum di dalam negeri. Sepuluh pemimpin Asia Tenggara yang hadir dalam KTT ke-19 ASEAN adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN, Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, Perdana Menteri Laos Thingsing Thammavong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar Thein Sein, Presiden Philipina Aquino III, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long, dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra.

rang Dingin, bergeser membentuk kekuatan multipolar yang melahirkan kekuatan negara adidaya baru. Khususnya terkait dengan bangkitnya China sebagai kekuatan regional.

Selama ini yang kita tahu adalah kentalnya “kerjasama” dengan Amerika Serikat berikut sekutunya. Karena itu tidak berlebihan ketika banyak pihak melihat ASEAN sebagai organisasi yang bereaksi secara berlebihan pada sejumlah isu yang muncul di Asia Tenggara, khususnya pasca-Perang Dingin yang terkait dengan upaya menyelesaikan konflik Kamboja, kemudian bergeser pada isu hak asasi di Myanmar.

Sejak awal, pembentukan ASEAN didesain serta dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan keamanan di kawasan Asia Tenggara sebagai prasyarat terjadinya pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara anggota. ASEAN tidak dibentuk untuk melakukan integrasi ekonomi anggotanya atau membentuk sebuah institusi supranasional.

Kalau Uni Eropa memilih pendekatan integrasi ekonomi dan membangun masyarakat Eropa melalui Perjanjian Roma pada tahun 1975, maka cara ASEAN justeru berbeda serta, pada tingkat tertentu, condong memperkuat fondasi regional melalui kerjasama keamanan. Pertama melalui Deklarasi Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) pada tahun 1971, kemudian pada KTT ASEAN di Bali tahun 1976 menghasilkan dokumen penting Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).

Karena itu dengan munculnya China sebagai kekuatan yang fenomenal di kawasan, tentu membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai pola yang telah ada dan itu lebih mengemuka setelah kejadian di Phnom Penh, Kamboja, Juli 2012 lalu. Bukan hanya terkait integrasi pembentukan masyarakat ASEAN di atas pilar ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya, melainkan juga terkait evaluasi ulang peran dan fungsinya di era globalisasi. Pengelompokan regional di Asia Tenggara berada pada simpang kritis di tengah sejumlah masalah, termasuk ancaman resesi eko-

nomi global ataupun interaksi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, India, Rusia, dan Jepang.[30]

Kegagalan pertama ASEAN menghasilkan komunike bersama dalam sejarah 45 tahun organisasi regional ini pada pertemuan di Phnom Penh, Kamboja Juli 2012 menunjukkan ada perubahan signifikan dalam regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor perubahan penting ini adalah China. Sejak tiga tahun terakhir, tanda-tanda perubahan dengan China sebagai faktor penyebab perubahan ini sudah mulai terasa. Tahun 2010, China di depan para menteri luar negeri ASEAN sudah mengatakan, *"…kalian harus mengerti kami adalah negara besar dan kalian adalah negara-negara kecil."* [31]

Menurut Rene Pattiradjawane, gagalnya komunike bersama para menlu ASEAN dalam pertemuan di Kamboja adalah refleksi China melihat ASEAN yang mudah dipecah dan dibelah, termasuk dalam mencari solusi damai atas klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Kita harus membaca pikiran China sebagai *"…sekarang kita sudah menjadi kekuatan yang lebih besar di kawasan, jadi kalian negara-negara ASEAN harus menunduk lebih rendah lagi."*

Dalam hal ini, pengamat dan komentator politik regional China menyebut krisis yang terjadi di Laut China Selatan, khususnya antara China dan Philipina, sebagai ombak kecil yang tidak akan mampu menjungkalkan perahu diplomatik besar China. Dalam bahasa para diplomat ASEAN di pertemuan Kamboja, China telah membayar kursi kepemimpinan ASEAN yang ketika itu dipegang Kamboja.[32]

---

[30] "Kawasan Perbatasan, Asean di Tengah Perubahan Kekuatan Kawasan", *www.kawasanperbatasan.com*, 5/11/12, diakses pukul 22.00

[31] Rene L. Pattiradjawane, "ASEAN Dipecah Belah China", *Kompas*, Rabu, 18 Juli 2012

[32] Kantor berita Xinhua melaporkan berita pertemuan tahunan ASEAN ini mengutip ucapan terima kasih Menlu China kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen karena telah mendukung kepentingan utama China. Gagalnya komu-

Dengan mudah kita akan menuduh Kamboja ”telah dibeli” China dengan sikap Menlu Kamboja Hor Namhong yang ke luar dari ruangan setelah pendekatan oleh Menlu Indonesia dan Singapura. Kamboja memiliki kepentingan yang lebih besar dengan China, terutama setelah kunjungan Presiden China Hu Jintao, Mei lalu.

Pinjaman lunak dan hibah dari China kepada Kamboja, yang disalurkan melalui bank-bank Pemerintah China, digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik tenaga air, properti, dan resor turis. Bantuan China lebih mudah diperoleh ketimbang negara maju, seperti AS atau Eropa, yang memiliki syarat ketat, termasuk persyaratan terkait masalah politik, seperti hak asasi manusia.

Kalau kita periksa, maka tampak bahwa dalam pertikaian dengan Philipina mengenai klaim tumpang tindih di Kepulauan Spratly, China pun menggunakan ”otot”-nya dengan menurunkan impor buah-buahan dari Philipina serta menekan biro perjalanan untuk menunda kunjungan wisata orang-orang Tionghoa ke Philipina. Tindakan ini menjadi ancaman bagi industri Philipina yang menghasilkan devisa. Bagi ASEAN sendiri, terutama Indonesia sebagai negara besar dan menjadi pendiri penting organisasi regional ini, perlu mencari terobosan lain kalau memang Menlu Marty Natalegawa menganggap organisasi ini tak boleh kehilangan sentralitasnya di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, dalam kurun lima tahun ke depan, akan sulit bagi ASEAN untuk mengimbangi kekuatan besar yang tidak hanya mewakili kepentingan China, tetapi juga kepentingan AS.[33]

Regionalisme bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah upaya penting bersama dalam menghadapi perubahan-perubahan drastis dunia, khususnya sistem ekonomi yang bisa mempengaruhi semua negara. Kita berharap ASEAN tidak terperangkap

---

nike bersama para menlu ASEAN setelah 45 tahun menunjukkan besarnya pengaruh diplomatik China dalam organisasi regional ini.

[33] Rene L.Pattiradjawane, “ASEAN Dipecah Belah China.”

dan memiliki strategi ke luar dari situasi global ataupun bentrokan kepentingan negara-negara besar, khususnya China.

Di sisi lain, ketika kepentingan masing-masing anggota berbenturan satu sama lain—atau bersinggungan dengan kekuatan tetangga, seperti klaim tumpang tindih Laut China Selatan—organisasi regional ini dianggap tak mampu menyelesaikannya dan condong mendorong persoalan "masuk ke bawah karpet". Tetapi apakah benar demikian?

Hal ini perlu dilihat dari secara cermat, sebab dalam sejarahnya tidak banyak persoalan perbatasan yang dapat diselesaikan para pihak terkait sengketa kedaulatan. Ini kenyataan yang memang menjadi pokok persoalan penting dalam rangka antisipasi untuk memberikan bobot dan nuansa ke-ASEAN-an bagi kawasan strategis Asia Tenggara.

Organisasi regional yang dihormati dan disegani oleh kekuatan di luar kawasan ataupun negara tetangga non-ASEAN ini memang berbeda dengan Uni Eropa. Integrasi ekonomi, masyarakat, ataupun politik ASEAN memang sangat berbeda sebab tidak jarang bahwa negara-negara kawasan ini adalah negara bekas jajahan yang mempunyai "tradisi" serta ikatan yang berbeda dengan negara penjajah dan sekutunya.

Persoalan ASEAN dewasa ini adalah sejumlah isu ekonomi, politik, dan keamanan yang dihadapi di kawasan Asia Tenggara yang menjadi terlalu besar, sehingga ASEAN tampak tak lagi bisa melakukan apa pun dengan memadai. Menurut Rene L Pattiradjawane, ASEAN pascaperang Indo-China memang diharapkan menjadi *panacea* bagi stabilitas politik keamanan dan dinamika ekonomi. Mekanisme kerja sama ASEAN melalui noninterferensi dan mufakat dianggap sudah tak lagi memadai di era globalisasi. Dalam era ini, kekuatan hegemoni dunia, yang sebelumnya terpusat pada AS-Uni Soviet pada masa Perang Dingin, bergeser mem-

bentuk kekuatan multipolar yang melahirkan kekuatan negara adidaya baru.[34]

Dengan demikian, untuk membentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2015, ASEAN yang ingin memainkan dan menjaga peran sentralnya perlu mengelola arsitektur regional dengan baik dan menjaga keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) dalam berhadapan dengan negara-negara besar di luar kawasan.(*)

[34] *Kompas* ,1 Oktober 2012

DINASTI, KUASA DAN RETRADISIONALISME POLITIK DI ASIA TENGGARA

DINASTI DAN KEKUASAAN

Jargon kekuasaan arogan yang pernah diucapkan oleh Louis XIV: *l''etat c''est moi* (negara adalah saya), pernah mewarnai panggung politik Asia Tenggara. Warna itu sempat terlihat dalam lanskap politik di Korea Utara (negara sosialis pinggiran) dan Ferdinand Marcos di Philipina (negara kapitalis pinggiran).

Para analis kemudian melihat jargon politik itu di masa lalu untuk beberapa negara berubah menjadi *l''etat c''est ma famille* (negara itu adalah keluargaku). Philipina era Ferdinand Marcos, Indonesia era Orde Baru Soeharto dan Iran di bawah Shah Iran Reza Pahlevi, oleh para akademisi sering disebut sebagai fenomena "negara keluarga" yang bercorak despotisme ketimuran atau otokrasi timur. Di sini, seakan sirna sudah jargon "res republica" (daulat rakyat) dikalahkan *l''etat c''est moi dan l''etat c''est ma famille.* [1]

Sudah tentu terjadi pertarungan politik, ketegangan antara negara dan masyarakat terjadi sebagai konflik yang endemik di antara

---

[1] Baca *Karl* A. *Wittfogel*. "*Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power*." (New Haven: Yale University Press 1957). Wittfogel menyebutkan tentang despotisme Timur dari peradaban hidrolik seperti yang terjadi pada totaliterisme Rusia dan China, yang mengancam masa depan peradaban Barat. '*'Wittfogel's great concern with despotism as the social policy of "hydraulic civilizations" is, however, more than just a new point of view which differentiates between feudalism and the "hydraulic society." By claiming marginal and sub-marginal extensions of Oriental despotism over a large part of Asia and into the heart of Europe by Chinese and Russian totalitarianism, he finds the whole of Western "industrial" civilization and even the future of mankind itself endangered"*. .Mengenai frasa klasik Raja Louis XIV, "*L'etat c'est moi*" ("Negara adalah saya") bisa diderivasikan oleh penguasa di Timur dengan model negara keluarga, menampilkan despotisme rezim "tua" yang merupakan personifikasi dari negara,. Namun civil society sebagian masih mengingat pandangan yang berseberangan dengan despotisme Timur itu: "Saya lebih mencintai negara saya daripada keluarga saya, tetapi saya lebih mencintai perikemanusiaan daripada negara saya," ungkap Francois Fenelon, seorang intelektual Perancis.

para elitenya. Di Philipina, perpecahan elite meledak setelah Benigno Aquino tewas dibunuh intelijen Marcos, dan di Jakarta, kubu Benny Murdani dan Habibie, juga kubu militer Wiranto dan Prabowo, dimana kesemuanya bergesekan menyusul krisis ekonomi yang melanda fase akhir Orde Baru.[2]

Di Teheran, para ulama (mullah) kemudian menentang Shah Iran, mendorong bangkitnya rakyat, menimbulkan perpecahan elite penguasa yang memihak perubahan, dan akhirnya mencetuskan Revolusi Islam yang populis, menjatuhkan rezim Shah yang sangat kapitalis.

Dalam konteks Asia Tenggara, Thailand, Philipina dan Indonesia adalah negara-negara yang sedang dilanda arus reformasi politik sampai era akhir abad 20. Dan banyak kalangan berpendapat bahwa tiga negara ini baik Thailand, Philipina dan Indonesia sampai dengan awal abad 21 tetap menjadi ikon contoh suksesnya demokrasi di kawasan ini, meski dirundung konflik internal silih berganti.

Sejarah kemudian mencatat bahwa di kawasan Asia Tenggara hanya 2 (dua) negara saja yang memiliki tradisi perubahan politik secara cepat yaitu Philipina dan Indonesia. Di Philipina kepemimpinan Marcos menjadi contoh bagaimana *people power* mampu menjatuhkan rezim yang populis-otoriter. Pada tahun 1998 hal yang sama terjadi di Indonesia. Rezim populis-otoriter Soeharto akhirnya jatuh di tangan perlawanan rakyat dan mahasiswa.

Dalam pandangan ini, terdapat tiga paradigma pembangunan politik. *Pertama,* negara-negara yang berfokus kepada pembangunan ekonomi dengan mengabaikan perkembangan demokrasi politik. Singapura dan Malaysia adalah contoh negara di kawasan yang masuk dalam kategori ini. *Kedua*, Negara-negara yang fokus kepada perkembangan politik akan tetapi lemah dalam konteks

---

[2] Tentang gesekan kubu Wiranto dan Prabowo, lihat Donald K. Emmerson, (Ed.), *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*, (M E Sharpe Inc. Amazon, 1999).

ekonomi. Thailand, Philipina dan Indonesia adalah ketiga negara di kawasan ini yang sangat maju *level* demokrasinya akan tetapi lemah secara ekonomi. Thailand sudah mulai melakukan reformasi di bidang ekonomi terutama sekali setelah krisis mata uang Baht melanda Thailand pada tahun 1997.

Ketiga, adalah kategori dimana secara politik dan ekonomi negara yang bersangkutan masih lemah dan belum memasuki era demokrasi. Negara-negara di kawasan Indo-China seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar adalah negara-negara yang masuk dalam kategori ketiga ini.

Menarik jika kita mengaitkan tesis ini kepada apa yang terjadi di Thailand dan Philipina dan Indonesia dewasa ini. Ketiga negara ini secara teoritis masuk dalam kategori kedua yakni negara-negara yang baik secara politik (demokrasi berkembang) akan tetapi lemah secara ekonomi.

Nampaknya terdapat gejala global bahwa sistem politik demokrasi yang dibangun tidak didasarkan kepada fundamental ekonomi yang baik akan terus mengalami gangguan dan ketidakmapanan. Hal inilah yang jelas terlihat dalam konteks ketiga negara tersebut. Jika kemudian kita melihat bagaimana isu-isu populer yang digulirkan pihak oposisi kedua negara tersebut adalah seputar masalah ekonomi dan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penguasaan ekonomi untuk kepentingan pribadi. Apa yang menarik dari kedua negara ini dalam berdemokrasi. Sebuah sistem tradisional-kolonial yang kemudian dipaksanakan untuk berdemokrasi menjadi inti dari teater drama politik di kedua negara tersebut. Thailand misalnya, tradisi politik yang banyak dipengaruhi oleh warisan kerajaan Sukhotai menjadi model bagaimana elite-elite Thailand berpolitik. Sementara di Philipina tradisi *people power* tetap menjadi isu sepanjang masa yang diusung ketika Philipina berada di level krisis politik. Bahkan sebagian besar rakyat Philipina menganggap bahwa *people power* 1986 adalah bagian dari gerakan suci.

Dan memang pada akhirnya kita menyaksikan di Philipina, Marcos ditumbangkan oleh people power dan *res republica* kembali bergema dan di Indonesia, gerakan mahasiswa pro-reformasi menjebol kuasa Orba pada Mei 1998. Namun demikian, di Korut, Kim junior (Kim Jong Il) naik jadi presiden dan masih berlaku semboyan "negara itu adalah keluargaku'', suatu gejala politik *herediter* yang berkesinambungan.

Asia memang kaya dengan tradisi politik keluarga. Lihat saja Sri Lanka, India, Pakistan, Banglades, apakah akan disusul Philipina, Indonesia, Jepang,Malaysia, Singapura dan Korea Selatan? Sri Lanka menempatkan diri sebagai pelopor dinasti politik di Asia pada zaman modern ini. Di Asia Tenggara, gejala dinasti politik belakangan ini kian terasa.

Di Malaysia anak lelaki mantan PM Tun Abdul Razak kini menjadi Deputi Perdana Menteri yakni Nadjib Razak, sedangkan di Singapura B.G. Lee menggantikan menjadi perdana menteri, meneruskan kuasa Bapak Singapura, Lee Kuan Yew. Di Philipina, misalnya, Gloria Macapagal Arroyo, putri Presiden Diosdado Macapagal, yang menjabat tahun 1961 sampai 1965- tampil sebagai orang pertama di negerinya. Ia naik ke panggung politik dengan membawa nama besar ayahnya. Dimulai dari men-jadi senator, lalu wakil presiden, kemudian presiden, Gloria Macapagal Arroyo menambah panjang deretan dinasti politik di Asia.[3]

Hal yang hampir sama terjadi pula di Indonesia, dengan tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden di masa lalu. Jalan yang dilalui Megawati tak jauh berbeda dengan yang ditapaki Gloria Macapagal Arroyo. Dari parlemen, lalu menjadi wakil presiden, dan akhirnya presiden. Mereka menjadi orang pertama setelah tergusurnya presiden pendahulunya: yang satu lewat "aksi rakyat" yang diteguhkan Mahkamah Agung, dan yang satunya lagi lewat kesepakatan di parlemen.

---

[3] Ahluwalia, "Klan, Kuasa, dan Kekerasan", *www.inilah.com* (08/01/2008) diakses pukul 09:36

Di era pasca reformasi 1998, berbagai dinasti politik itu kian bersaing seiring irama demokrasi. Demikianlah, keluarga Soeharto, Abdurrahman Wahid dan lainnya, terus berusaha mengajukan jago-jagonya merambah jalan politik guna memperoleh tempat terhormat di kekuasaan.

Sebenarnya secara historis, tradisi dinasti politik itu memiliki benang merah dengan sejarah kerajaan di masa lampau. Masa kejayaan kerajaan maritim di Asia Tenggara berakhir ketika rekan dagang asingnya mulai mengendalikan sepenuhnya operasi dagangnya. Gejalanya sudah dimulai semenjak kantor-kantor dagang besar dari India Selatan mulai mengibarkan benderanya di Asia Tenggara (abad 11M), yang puncaknya pada abad yang sama Kerajaan Chola (Dravida) melakukan aksi sapu bersih terhadap pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Tetapi yang paling melemahkan adalah ketika Dinasti Song mulai membangun kekuatan dagang lautnya dan para pedagang Cina mulai bermukim di negara-negara Asia Tenggara untuk membuat jaringan dagangnya sendiri (abad 12M), yang puncaknya Admiral Zheng He (Cheng Ho) dari Dinasti Ming membuat manuver-manuver politik di pelabuhan-pelabuhan Nusantara (abad 15 Masehi).

Dalam hal ini, sejak jatuhnya Malaka, pusat perdagangan dan peradaban Islam Asia Tenggara, ke tangan Portugis sekitar 495 tahun silam, tepatnya pada 1511, kemerosotan dan kekalahan bangsa muslim di kawasan Asia Tenggara semakin parah. Kejatuhan Malaka itu merupakan peristiwa yang sangat simbolis bagi perubahan drastis sejarah umat manusia, yaitu titik permulaan kekalahan seluruh dunia Islam dan kemenangan bangsa-bangsa Eropa Barat dalam mengungguli bangsa muslim di mana pun, termasuk di Asia Tenggara. Bangsa-bangsa Eropa itu terbukti unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban.

Sejak itu pula peradaban Islam yang sudah melemah kian bergerak menjauh dari pergaulan kosmopolit dalam lingkungan peradaban *hemispheric* Islam yang sudah mapan. Pada akhirnya,

bangsa-bangsa muslim di dunia Islam, termasuk tentu saja Asia Tenggara, kembali menjadi kumpulan bangsa terbelakang. Dalam kasus Asia Tenggara pasca-Abad Perniagaan, menurut Anthony Reid, kolonialisme Portugis, Spanyol, dan Belanda selama hampir tiga setengah abad telah membangkitkan perlawanan kalangan muslim yang umumnya dipimpin sultan, ulama, cendekiawan, dan bangsawan.[4]

Dalam perkembangannya, sejarah kemudian mencatat bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara malah semakin sibuk dengan "urusan" antar keluarga kerajaan dan lupa diri, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan dagang dari Eropa yang membawa kekuatan militer menguasai pelabuhan-pelabuhan di perairan Nusantara dan mematikan perusahaan-perusahaan pelayaran lokal.

Di sini kita dapat mengambil hikmah pentingnya memiliki swadaya dan swasembada produksi komoditas perdagangan, tidak hanya sekadar menjadi calo/agen penjualan merek asing, dan untuk itu kita harus belajar lebih menghormati para produsen merek-merek Indonesia.

Tahap pembangunan kekuasaan politik Asia Tenggara memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan standar pembangunan kerajaan-kerajaan di Cina, India, Eropa, dan lain-lain pada zamannya.

Dalam buku "Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula'' (2006), Paul Michel Munoz membagi proses pembangunan kekuasaan politik negara di Asia Tenggara menjadi tiga tahap: [5]

---

[4] Lihat, Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992); Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999); juga, Herdi Sahrasad, "Solusi untuk Freeport", *Koran Tempo,* opini, 28/3/2006.

[5] Paul Michel Munoz, *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia Dan Semenanjung Malaysia.* (Yogyakarta: Mitra Abadi, 2009), terjemahan dari buku Paul Michel

1. Tahap Lokal.

Pada tahap ini konsolidasi kekuasaan terbatas pada wilayah yang kecil, yang sering merupakan jaringan pemukiman yang terorganisir pada suatu wilayah. Para pemimpin lokalnya belum memiliki kemampuan penaklukan militer terhadap komunitas tetangganya, tetapi dapat melakukan serbuan-serbuan singkat untuk melakukan perampasan-perampasan.

2. Tahap Regional.

Pada tahap ini para pemimpin daerah sudah mampu memperluas kekuasaannya ke daerah tetangga melalui penaklukan militer. Walaupun begitu penaklukan ini tidak diikuti dengan asimilasi ataupun penghancuran, tetapi penguasa taklukan tetap dibiarkan berkuasa dengan kewajiban membayar upeti dan tunduk pada perintah penguasa penakluk. Penguasa taklukan (Rakai, Datu, dll.) masih memiliki kekuasaan atas wilayah adatnya. Pada fase ini terjadi perubahan yang dinamis dari komposisi dinasti penguasa, lokasi pusat kekuasaan, dan batas wilayah kekuasaan yang amorphous. Sistem semacam ini, Munoz memberikan istilah kekuasaan "mandala", yaitu suatu wilayah pengaruh (daerah adat-istiadat tanpa batas daerah yang jelas) atau juga wilayah kekuasaan yang khusus (misalnya, suatu pelabuhan dan area pemukimannya, suatu pertanian dan area pemukimannya, dll.). Contoh yang jelas dapat dilihat bagaimana Dinasti Syailendra dan Dinasti Sanjaya mengkonsolidasikan mandalanya masing-masing (termasuk perebutan pengaruh di Selat Sunda, abad 10M), juga di masa ketika Dinasti Sanjaya merupakan bagian dari mandala Dinasti Syailendra (abad 9M), dan diplomasi keke-luargaan pada masa Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokesvara Dharmavamsa Airlangga Anantavikramottungadeva (abad 11M).

Munoz, *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula",* (Singapore: Editions Didier Millet, 2006).

3. Tahap Imperial.

Sepanjang sejarah Asia Tenggara tahap ini jarang sekali tercapai, dimana dua mandala atau lebih tergabung dalam kesatuan administrasi kerajaan. Ciri khas pada tahap ini adalah wilayah taklukan bertransformasi menjadi wilayah administrasi provinsi. Hanya ada tiga kerajaan yang mencapai tahap ini, yaitu Dinasti Angkor di Kamboja (abad 9M), Dinasti Pagan di Irawadi Birma (abad 11M), dan Dinasti Rajasa di Singosari dan Majapahit (abad 13–14M).

Pada tahap imperial ini, para Rakai (raja daerah) yang ditaklukan diganti posisinya oleh Gubernur propinsi yang dipilih dari anggota keluarga besar Raja. Para gubernur ini membuat replika pemerintahan pusat di daerahnya dengan skala yang lebih kecil. Sebagai kompensasi pengambilalihan tanah mereka, para Rakai (dan keluarganya) diberikan posisi di pemerintahan pusat. Seperti halnya yang terjadi pada Raden Wijaya yang merupakan Pangeran Galuh (Kerajaan Pakuan Pajajaran sendiri baru berdiri pada 1333M) yang diangkat menantu oleh Prabu Kertanegara dan dijadikan komandan militer di Tuban (sekitar 1292M).

KLAN, KUASA, DAN KEKERASAN

Secara historis, sebenarnya, tradisi dinasti politik kontemporer memiliki benang merah dengan sejarah kerajaan di masa lampau. Ada pengulangan historis atas fenomena klan politik di masa lampau dengan apa yang terjadi masa kini. Politik dinasti (dynasty politics) secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan dimana anggota keluarga (sanak famili) diberi dan/atau mendapat posisi dalam struktur kekuasaan. Jadi, kekuasaan hanya terbagi kepada dan terdistribusi di kalangan kerabat, dan keluarga sedarah. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan

dari hanya bebarapa orang. Oleh karena itu di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan itu, dinasti juga menjadi musuh demokrasi, karena dalam demokrasi, rakyat lah yang memilih para pemimpinnya. Jadi, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.[6]

Pada abad ke-12, Dinasti Song membangun kekuatan dagang lautnya dan para pedagang China mulai bermukim di negara-negara Asia Tenggara untuk membuat jaringan dagang. Lalu, Admiral Zheng He (Cheng Ho) dari Dinasti Ming menggelar serangkaian manuver politik di pelabuhan-pelabuhan Nusantara.

Ternyata, waktu itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara malah sibuk dengan urusan antarkeluarga kerajaan. Akhirnya, perusahaan dagang dari Eropa yang membawa kekuatan militer menguasai pelabuhan-pelabuhan di perairan Nusantara. Perusahaan-perusahaan pelayaran lokal pun sempoyongan.

Yang tampak kemudian, politik antarkeluarga tak lepas dari tahap pembangunan kekuasaan politik Asia Tenggara. Padahal, kawasan Asia Tenggara punya ciri khas tersendiri dan berbeda dengan standar pembangunan kerajaan-kerajaan di China, India, dan Eropa pada zamannya.

Karena itu, dalam klan politik di Asia Tenggara dewasa ini, pola-pola lama dan residu dari habitus masa lalu masih sering mengemuka seperti kebiasaan memberi upeti, patronisme, patron-klien, kultur hirarkis, dan kecenderungan mengutamakan hal-hal prosedural ketimbang hal-hal substansial

Paradoks demokrasi dalam wujud pertarungan terbatas antar-oligarki keluarga tetap kental sampai awal abad ke-21 ini. Ujung-

---

[6] Baca, "Bahaya Politik Dinasti", *http://cetak.kompas.com/read/2010/04/23/03395434/bahaya.politik.dinasti*

ujungnya, kekuasaan negara di tangan keluarga terkemuka mengarah pada terbentuknya dinasti demokrasi. [7]

Kecenderungan ini, ternyata, bukan hanya terjadi di negara dunia ketiga seperti India, Pakistan, Bangladesh, Philipina, Korea Utara, Argentina, Kuba, Singapura, dan Indonesia.

Sebagaimana dicatat sosiolog Dr Thamrin Amal Tomagola, di negara maju dan kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat pun kecenderungan mengkristalnya dinasti demokrasi terjadi. Klan kekuasaan berbungkus dinasti demokrasi itu melibatkan keluarga besar Kennedy, Bush, dan Clinton.

Bedanya hanya soal urutan. Di AS, kinerja prestasi lebih ditekankan ketimbang darah keluarga. Artinya, meritokrasi diterapkan di AS.

Di negara dunia ketiga, apalagi di negara otoritarian seperti Korea Utara dan Kuba, darah keluarga dijunjung buta tanpa peduli kinerja prestasi. Hal itu berlaku bagi Kim Jong Il (Korut) penerus Kim Il Sung dan Raul Castro (Kuba) penerus Fidel Castro.

Ihwal klan-klan kekuasaan itu, dari kawasan Asia Selatan telah melahirkan nama-nama besar. Pakistan memunculkan klan Bhutto, di India ada klan Nehru Gandhi. Dari kawasan Timur Tengah, ada klan Gemayel di Lebanon.

Tapi, kebesaran nama itu ternyata tidak seiring dan sejalan dengan kejayaan. Hidup sebagian besar tokoh yang lahir dari kekuatan klan yang berkuasa itu, bahkan, berakhir tragis. Mereka kehilangan nyawa secara tak wajar.

Pembunuhan atas Benazir Bhutto adalah tragedi terkini yang harus dihadapi satu klan politik. Tragedi keluarga itu diawali dengan kematian sang pemimpin klan, Zulfiqar Ali Bhutto. Ia tewas di tiang gantungan yang disiapkan lawan politiknya, Jenderal Zia ul-Haq, 4 April 1979.

---

[7] Ahluwalia, “Klan, Kuasa, dan Kekerasan.”

Sejak itu, kematian terus membayangi keluarga Bhutto. Pada 1985, Shahnawaz, putra Bhutto, ditemukan tewas di apartemennya di Prancis. Keluarga mencurigai istri Shahnawaz meracuninya. Sebelas tahun kemudian, Murtaza, adik laki-laki Benazir, tewas diterjang peluru polisi.

Benazir sendiri tewas 27 Desember 2007 seusai berkampanye di Rawalpindi. Penyebab kematiannya masih simpang siur karena keluarga dan partai yang dipimpinnya punya versi berbeda dengan pernyataan pemerintah Pakistan.

Bilawal Bhutto, mahasiwa Oxford University, Inggris, tampil sebagai pewaris klan politik Bhutto di Pakistan, negeri yang rawan amuk politik.

Di AS, klan Kennedy tak henti menangisi kematian satu per satu anggota keluarga mereka yang punya nama *moncer*. Tragedi diawali pembunuhan John F Kennedy (JFK) yang saat itu memimpin AS di Dallas pada 22 November 1963.

Pada 6 Juni 1968, giliran Senator Robert Kennedy tewas ditembak. Jaksa Agung pada masa pemerintahan JFK itu *didor* ketika sedang berkampanye.

John Kennedy Jr, putra JFK, tewas bersama istri dan iparnya setelah pesawat kecil yang dipilotinya jatuh di Samudera Atlantik, 16 Juli 1999. Saat itu, Kennedy Jr berusia 38 tahun dan dikabarkan sedang mengincar kursi Senat untuk mewakili New York.

Di Lebanon, keluarga Gemayel harus membayar mahal untuk keterlibatan mereka di pentas politik negaranya. Karier politik keluarga Gemayel diawali oleh Pierre Gemayel dengan mendirikan Partai Kataeb.

Pada 14 September 1982, klan Gemayel kehilangan politisi pertama mereka setelah Bachir Gemayel, putra bungsu Pierre, tewas terkena bom. Padahal, sembilan hari kemudian, ia akan menduduki kursi Presiden Lebanon.

Sebelumnya, Maya, putri Bachir Gemayel, tewas akibat bom yang ditujukan kepada ayahnya. Posisinya digantikan kakaknya, Amin Gemayel, yang memerintah hingga 1988.

Amin segar bugar hingga kini. Tapi, ia kehilangan seorang putranya, Pierre, yang tewas pada 21 November 2006.

Di India, Indira Gandhi dan dua putranya tewas secara tragis. Indira, putri PM pertama India Jawaharlal Nehru, terbunuh di New Delhi pada 31 Oktober 1984. Ia ditembak dua pengawalnya yang keturunan Sikh sebagai balas dendam atas perintahnya kepada tentara untuk menyerang kuil Sikh.

Sanjay Gandhi, putra Indira yang digadang-gadang meneruskan kiprah keluarga Gandhi di pentas politik, bernasib sama. Sanjay tewas akibat sebuah kecelakaan udara.

Tinggallah Rajiv, putra sulung Indira, yang kemudian memenuhi harapan itu. Sayangnya, nasib Rajiv pun sama tragisnya. Ia tewas setelah bom yang dibawa anggota kelompok separatis Tamil meledak di hadapannya pada 21 Mei 1991.

“Saya berupaya mencegahnya ke politik,” tulis Sonia, istri Rajiv. Sonia juga berupaya tidak ke politik, sampai tahun 1998 saat didesak Partai Kongres (I). “Ini bagian dari kehidupan politik. Ibu mertua dan suami saya hidup dan mati demi negeri ini,” ujar Sonia dalam wawancara tahun 2004.

Menurut analisis politik dan profesor sejarah pada Universitas Delhi, Manesh Ranganrajan, kawasan Asia Selatan tetap panas oleh kelompok yang merasa dikucilkan oleh demokrasi. Sementara militer merasa lebih pantas. “Mereka bertarung di antara ballot (surat suara) dan bullet (peluru)," ujar Manesh.

Klan Gandhi kini bertumpu kepada Sonia, janda Rajiv, dan putra mereka, Rahul, tokoh muda lulusan Harvard University, AS, yang mulai berkiprah di pentas politik.

Dalam kampanye di Amethi menjelang pemilihan umum India, April 2004, Rahul disambut meriah. Warga Amethi pernah memilih almarhum ayahnya, Rajiv Gandhi, sebagai wakil rakyat di parlemen India.

Rahul disambut lautan manusia yang berulang-ulang memekikkan kalimat “Hidup Rahul Gandhi!” Sambutan muncul saat konsultan keuangan berusia 33 tahun itu keluar dari mobil dan menebar senyum. Wajahnya sangat mirip sang ayah.

“Saya sangat bahagia berada di sini,” kata Rahul waktu itu kepada seorang warga desa. “Saya akan melanjutkan pekerjaan yang pernah dilakukan ayah saya di sini. Saya berjanji menghidupkan kembali impian ayah saya,” katanya.[8]

Rahul sempat disebut-sebut sebagai calon anggota parlemen masa depan dari Partai Kongres yang pernah berjaya. Tapi, ia kini harus berjuang keras meredam kekuasaan partai Hindu nasionalis Bharatiya Janata.

Rahul bertekad merebut kembali kursi parlemen yang dulu pernah diduduki neneknya, mantan PM Indira Gandhi, yang tewas dibunuh kaum separatis Sikh pada 1984.

Konstituen di negara bagian penting Uttar Pradesh itu juga pernah membawa ayahnya menjadi anggota parlemen sampai tiga kali (1984, 1989, 1991). Tapi, pada 1991, Rajiv tewas dibunuh ekstremis.

Pada awal abad ke-21 ini kita menyaksikan kian menggejalanya paradoks demokrasi dalam wujud pertarungan terbatas antaroligarki keluarga dan tergenggamnya kekuasaan negara di tangan keluarga terkemuka hingga kadang menjadi dinasti demokrasi.

Apa yang dialami Dinasti Gandhi juga dialami keluarga Bandaranaike di Sri Lanka. Dinasti-dinasti ini praktis mendominasi kehidupan politik seusai negara-negara ini merdeka dari Inggris.

---

[8] *Reuters,* edisi 1-20 April 2004

Mereka berkuasa di tengah keragaman suku dan agama yang acap kali berbenturan. Muncul kelompok militan. Tak sedikit juga aksi bersenjata membentuk negara sendiri. Belum lagi ambisi pemimpin militer yang merasa diri lebih pas untuk memimpin ketimbang para politisi tadi.

Dan anggota dinasti ini hampir tak ada yang lolos dari pembunuhan yang dilakukan kelompok bersenjata, militan, ataupun pemimpin militer yang ambisius. Kelompok Al Qaeda mengaku di balik pembunuhan Benazir.

Kematian Benazir Bhutto di Pakistan, berbeda dengan sang ayah, Zulfikar Ali Bhutto, yang merupakan pendiri dinasti. Zulfikar merupakan PM Pakistan pertama pilihan rakyat. Tetapi, pemimpin militer Jenderal Mohammad Zia ul-Haq melakukan kudeta tahun 1977 dan menghukum gantung Zulfikar Bhutto.

Nasib dua adik Benazir juga berakhir dengan pembunuhan. Shanawaz ditemukan tewas di Perancis, tahun 1985. Adiknya yang lain, Mir Murtaza, juga tewas dibunuh tahun 1996. Entah "kutukan" ini masih akan berlaku atau tidak apabila anak cucu Bhutto ikut dalam politik kelak.

"Masih ada ancaman serangan, tetapi Allah melindungi siapa saja. Jadi saya tidak takut," ujar Benazir saat ziarah ke makam ayahnya di Naudero, Provinsi Sindh di selatan. Ini setelah dia lolos dari bom bunuh diri yang menewaskan 150 orang saat kembali ke Pakistan.

Di Sri Lanka, PM Solomon Bandaranaike tewas di tangan seorang biksu tahun 1959. Istrinya, Sirimavo Bandaranaike, lantas menjadi PM perempuan pertama di dunia. Putri mereka, Chandrika Kumaratunga, yang lantas menjadi PM dan presiden juga tak luput dari serangan Macan Tamil tahun 1999. Dia lolos, tetapi mata kanannya buta.

Di Banglades, seusai pisah dari Pakistan tahun 1971, para politisi juga tak luput dari pembunuhan. Sheikh Hasina ikut politik sete-

lah ayahnya yang juga bapak kemerdekaan, Sheikh Mujibur Rahman, tewas dalam kudeta militer tahun 1975. Militer di Banglades merasa lebih pantas memimpin dibandingkan politisi.

Jenderal Ziaur Rahman, yang menjadi pemimpin seusai kudeta, terbunuh dalam kudeta militer yang gagal tahun 1981. Istrinya, Begum Khaleda Zia, menjadi PM tahun 1981. Saingannya, Sheikh Hasina, mengambil jabatan PM tahun 1996. Khaleda dan Hasina kini ditahan atas tuduhan korupsi.

Adanya “kutukan” atas politisi di Asia Selatan sebenarnya sudah disadari. Benazir Bhutto menyadari itu dan menghendaki tiga anaknya tidak ikut ke politik.

DINASTI KUASA DI ASIA TENGGARA

Asia memang kaya dengan tradisi politik keluarga. Lihat saja Sri Lanka, India, Pakistan, dan Banglades. Sri Lanka menempatkan diri sebagai "pelopor" hidupnya dinasti politik di Asia pada zaman modern ini. Di Asia Tenggara, gejala dinasti politik belakangan ini pun kian terasa.

Di Malaysia anak lelaki mantan PM Tun Abdul Razak kini menjadi Deputi Perdana Menteri yakni Nadjib Razak, sedangkan di Singapura B.G. Lee menggantikan menjadi perdana menteri, meneruskan kuasa Bapak Singapura, Lee Kuan Yew. Di Philipina, misalnya, Gloria Macapagal Arroyo, putri Presiden Diosdado Macapagal, yang menjabat tahun 1961 sampai 1965- tampil sebagai orang pertama negerinya. Ia naik ke panggung politik dengan membawa nama besar ayahnya. Dimulai dari menjadi senator, lalu wakil presiden, kemudian presiden, Gloria Macapagal Arroyo menambah panjang deretan hidupnya dinasti politik di Asia. [9]

Hal yang hampir sama tejadi pula di Indonesia, dengan tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden di masa lalu. Jalan

[9] Ahluwalia, “Klan, Kuasa, dan Kekerasan”.

yang dilalui Megawati tak jauh berbeda dengan yang ditapaki Gloria Macapagal Arroyo. Dari parlemen, lalu menjadi wakil presiden, dan akhirnya presiden. Mereka menjadi orang pertama setelah tergusurnya presiden pendahulunya: yang satu lewat aksi rakyat yang diteguhkan Mahkamah Agung, dan yang satunya lagi lewat kesepakatan di parlemen.

Dinasti politik berlangsung dimana budaya berperan dalam politik, perubahan kepemimpinan, seperti yang terjadi di Asia akhir-akhir ini dan itu memberi kesan bahwa masyarakat di Asia lebih toleran terhadap - jika bukan mendukung - suksesi kepemimpinan mengikuti alur dinasti. [10]

Dinasti dan Kuasa di Philipina

Pada pemilu Philipina 2010, Benigno Simeon "Noynoy" Conjuangco Aquino III (50) makin menanjak, melampaui kandidat-kandidat lainnya dalam pemilihan presiden Philipina dan dipastikan menjadi presiden baru. Putra mantan presiden Corazon Aquino itu memenangkan pemilu 2010. Dengan demikian, dinasti Aquino kembali memimpin Philipina.

Pelaksanaan pemilu presiden itu terasa sangat melegakan banyak pihak, karena berlangsung dalam situasi tenang. Betapa tidak, hari-hari menjelang pemilihan dicemari dengan aksi-aksi kekerasan antarkelompok pendukung kandidat. Noynoy terbukti memperoleh mandat yang kuat dari rakyat, dan hal itu tentu sangat penting untuk menjamin kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.

Yang paling menarik dari pemilu ini adalah pertarungan tiga dinasti presiden Philipina, yakni dinasti Marcos, dinasti Arroyo, dan dinasti Aquino. Di negeri itu memang sudah umum ada suami, istri, anak, kakak, adik, dan kerabat memegang jabatan dan terpilih sebagai pejabat pemerintah. Sebagian besar adalah kelu-

---

[10] Kishore Mahbuban, "Dinasti Kepemimpinan Negara-Negara Asia", *Koran Tempo, 11*/1/2013. Kishore adalah Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, di National University of Singapore.

arga-keluarga yang punya dukungan partai atau dukungan kelompok bersenjata untuk melindungi kepentingan mereka.

Dinasti politik merupakan gejala universal. Sejarah politik sudah membuktikan, kebesaran nama seorang politikus sangat berpengaruh pada keterpilihan anggota keluarganya.

Ibunda Noynoy, Cory Aquino, pernah menjabat sebagai presiden Philipina, sementara ayahnya, Senator Benigno ''Ninoy'' Aquino Jr. adalah politikus oposisi yang disegani.

Nama panggilan Noynoy yang disandangnya berasal dari nama sang kakek yang pernah menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Namun terlepas dari kontroversi soal dinasti politik, kemunculan Noynoy membawa harapan bakal munculnya perubahan pada kehidupan demokrasi dan pemerintahan di negeri itu, karena dinasti Aquino telah teruji sebagai garda depan demokrasi di Philipina.

Menilik bahwa keterpilihan dan popularitas Noynoy terutama karena faktor nama besar dinasti Aquino, maka ia harus bisa membuktikan bahwa dinasti politik tidak perlu terkait dengan praktik kroniisme dan pemusatan kekuasaan. Selain menjadi anggota DPR dari Distrik Tarlac dan anggota Senat, 'prestasi' terbesar Noynoy adalah hampir menjadi korban pembunuhan politik bersama sang bunda dalam percobaan *coup* di tahun 1987.[11]

Dalam hal ini, nama Ferdinand Marcos masih tertanam kuat. Buktinya, setahun setelah pulang dari pengasingan ke Philipina, Imelda Marcos, istri presiden diktator itu, dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai kandidat presiden pada Pemilu 1992, walaupun pada akhirnya kemenangan diraih calon dukungan Presiden Aquino, Fidel Ramos. Namun Imelda tidak menyerah, tiga tahun kemudian mantan Ibu negara itu berhasil menjadi anggota DPR dari Provinsi Leyte, yang merupakan kampung halaman ayahnya. Pada Pemilu 2010, Imelda lagi-lagi berhasil

[11] *Tempo,* 16 Mei 2010.

menjadi anggota DPR, kali ini mewakili Provinsi Ilocos Norte. Menariknya, Imelda mengisi kursi yang ditinggalkan Ferdinand Marcos, Jr., yang tak lain adalah putranya sendiri.

Anak-anak Marcos dan Imelda rupanya juga berhasil berkiprah di panggung kekuasaan Philipina. Marcos, Jr., misalnya, memiliki karir politik yang cemerlang. Kini, politisi yang populer disapa Bongbong itu "naik kelas" di parlemen Philipina dengan menjadi senator. Bahkan, menurut stasiun berita ABS-CBN, mulai muncul wacana untuk mencalonkan Bongbong sebagai presiden pada Pemilu 2016. Isu itu masih ditepis oleh yang bersangkutan. "Saya masih belum terpikir untuk maju pada Pemilu 2016," ujarnya. Sebelum menjadi Senator pada Juni 2010, Bongbong menjadi anggota DPR periode 1992-1995, lalu Gubernur Ilocos Norte dari 1998 hingga 2007, dan kemudian terpilih sebagai wakil rakyat mewakili provinsi yang sama dari 2007 sampai 2010. Sebagai anggota DPR Ilocos Norte, Bongbong menggantikan kakaknya, Imee Marcos. Kakak-adik ini sukses "bertukar jabatan" sebagai penguasa Ilocos Norte. Setelah sukses membangun kekuatan di daerah, dinasti Marcos kini mencoba meluaskan pengaruh mereka ke tingkat nasional. Agenda mereka adalah memulihkan nama baik Marcos.[12]

Keluarga Marcos dikenal gila kuasa. Sampai kini, jenazah Marcos terbujur kaku di musoleum keluarga di Batac City, menunggu untuk dimakamkan. Namun, Imelda dan anak-anak ingin suami dan ayah mereka dimakamkan dalam upacara kenegaraan karena statusnya sebagai mantan presiden Philipina. Tidak hanya itu, mereka berupaya agar Marcos diakui sebagai pahlawan Philipina. Jenazah Marcos diusulkan agar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Libingan Ng Mga Bayani di Taguig City, Metro Manila.

Tentu Bongbong beralasan, ayahnya, bagaimanapun juga, adalah seorang pejuang saat melawan penjajahan Jepang di Philipina

[12] *Vivanews.com*, Jum'at, 20 Mei 2011.

pada Perang Dunia II dan berjasa membangun negaranya. "Sebagai mantan presiden dan prajurit, dia berhak dimakamkan di Libingan Ng Mga Bayani," kata Bongbong. Presiden Philipina Benigno Aquino III, dengan tegas menolak wacana itu. Seperti dikutip *ABS-CBN*, presiden yang akrab dengan sapaan Noynoy itu beralasan bahwa Marcos lah yang bertanggung jawab menghabisi nyawa ayahnya, Senator Benigno "Ninoy" Aquino Jr., pada 1983. Ninoy ditembak tim pembunuh di Bandara Manila sekembalinya dari pengasingan di AS. Saat itu dia dipandang sebagai tokoh oposisi yang bisa mengancam rezim Marcos.

Pembunuhan Ninoy itulah yang membuat ibunda Noynoy, Corazon Aquino, masuk ke gelanggang politik, menumbangkan rezim Marcos pada 1986, dan akhirnya menjadi presiden. Wacana menguburkan Marcos sebagai pahlawan belakangan malah menguat. Bongbong berhasil mempengaruhi para anggota parlemen untuk membuat resolusi mengenai pemakaman Marcos di taman makam pahlawan.

Agaknya, persaingan dinasti di Philipina masih akan lama, sebab dinasti Marcos, Aquino dan Arroyo sangat mungkin disusul oleh dinasti-dinasti lainnya yang berambisi untuk berkuasa.

Dinasti Politik di Malaysia

Sebagaimana di Philipina, dunia politik kaum Melayu di Malaysia juga telah lama diwarnai fenomena dinasti politik. Menurut Sterling Seagrave (1996), perubahan politik di Malaysia sejak zaman kemerdekaan hingga 1970-an diwarnai jalinan kekerabatan para pemimpinnya. UMNO sejak semula berkembang sebagai arena eksklusif para dinasti politik Melayu. Presiden pertama UMNO, Tunku Abdul Rahman, salah satu bapak kemerdekaan Malaysia, pernah memenangkan Pilpres 1955. Namun tragedi kerusuhan rasial di Kuala Lumpur 1969 menjadi pukulan telak bagi Rahman. Ia dianggap terlalu proetnis China dan dianggap pi-

hak yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. PM Tunku Rahman akhirnya mundur pada 1970.[13]

Kemunduran ini diduga dilakukan dengan cara 'kudeta istana' yang dilakukan salah satu elite UMNO yaitu Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak merupakan menantu Mohammad Noah yang merupakan ketua senat dalam parlemen Malaysia.[14] Tun Abdul Razak sempat populer karena keberhasilannya dalam merumuskan New Economic Policy (NEP). Dengan program itu, Razak dianggap berhasil meletakkan industrialisasi dan pembangunan di Malaysia. Sepanjang kepemimpinannya, Razak tampak terus mengeliminasi posisi politik kalangan keturunan China dan India.[15]

Dinasti politik keluarga Perdana Menteri Tun Abdul Razak terus mengalami kemunduran sejak munculnya Mahathir sebagai perdana menteri selama 20 tahun kemudian. Naiknya pemerintahan Mahathir selama beberapa dasawarsa sempat menurunkan aroma dinasti politik dalam panggung politik Malaysia hingga digantikan oleh Ahmad Badawi. Dan menantu Badawi yakni Khairy, juga terjun ke politik, bertarung untuk kursi parlemen pada 2008, dan seterusnya.[16]

---

[13] Ahmad Nyarwi, "Pemilu Malaysia, Rasisme dan Dinasti Politik", *Media Indonesia,* 10 Maret 2008. Berbagai kalangan menilai masa pemerintahan Tunku Abdul Rahman tampak lebih diterima oleh semua etnis di Malaysia termasuk yang tergabung dalam MCA (minoritas China) dan MIC (mewakili minoritas India).

[14] Mohammad Noah merupakan salah satu elite Melayu terkuat yang ikut memprakarsai kerjasama bisnis dengan para keturunan China Malaysia untuk membangun Genting Highlands Resorts. Sebuah tempat judi terkenal di Malaysia dan Asia Tenggara.

[15] Pada 1971, Kementerian Perdagangan dan Industri diambil alih dari menteri asal MCA dan digantikan dari kalangan Melayu (UMNO). Tahun 1974, Razak kemudian juga mengambil alih kementerian keuangan yang sebelumnya dipegang oleh kalangan MCA. Pengambilalihan kedua pos kementerian strategis itu selama beberapa dasawarsa kemudian semakin menunjukkan jejak kemunduran kalangan elite keturunan China dalam panggung politik Malaysia.

[16] Ahmad Nyarwi, "Pemilu Malaysia, Rasisme dan Dinasti Politik".

Badawi digantikan putera Tun Razak yang kini menjadi Perdana Menteri Malayia yakni Najib Razak. Najib bersaing sengit dengan tokoh oposisi Anwar Ibrahim. Sementara anak ketiga Mahathir Mohamad yakni Mukhriz Mahathir juga mendaftarkan diri untuk menjadi caleg Partai United Malays National Organization dari wilayah Jerlun, Kedah pada 2008. Mukhriz Mahathir dianggap memiliki keahlian politik karena telah ditempa saat menjadi pengurus sayap pemuda UMNO. Selain di bidang politik, Mukhriz matang sebagai pengusaha. Penerus klan Mahathir tersebut juga menjadi pucuk pimpinan di Bioven, produsen vaksin kanker, Opcom Holdings, Kosmo Tech, Perdana Peace Global Organisation, serta Ketua Asosiasi Franchise Malaysia.

Di kubu oposisi, istri mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, mengajukan pencalonan di Permatang Pauh Penang pada pemilu 2008. Sementara itu Nurul Izzah Anwar, anak sulung Anwar Ibrahim dan Wan Azizah, mendaftarkan pencalonan pertamanya di Lembah Pantai, Kuala Lumpur pada pemilu 2008.

Majunya dua anggota keluarga Anwar Ibrahim itu memunculkan spekulasi bahwa keduanya membawa misi untuk membuka pintu bagi ayahnya yang juga mantan wakil Perdana Menteri dan menteri keuangan itu ke pemerintahan. Menguatnya dinasti politik pada masa pemilu Malaysia ini juga tidak hanya berlangsung pada elite Melayu.

Hal serupa juga berlangsung pada elite keturunan China, Lim Kit Siang, pemimpin oposisi dari etnis Tionghoa. Ia juga mendorong putranya, Lim Guan Eng, dan istrinya Betty Chew mencalonkan diri di Bagam, Penang. Begitu pula dengan Ketua Democratic Action Party (DAP), Karpal Singh, yang mendukung pencalonan putranya, Gobind Deo Singh, di Johor. [17]

[17] Ahmad Nyarwi , "Pemilu Malaysia, Rasisme dan Dinasti Politik".

Klan dan Kuasa di Indonesia

Kecenderungan klan atau dinasti politik juga menguat kembali di Indonesia. Sebagian elite negara mendukung anak-anak mereka menjadi calon politisi di parlemen atas restu orang tua mereka sebagai elit penguasa.

Indonesianis Prof Benedict Anderson menilai para elite dan politisi Indonesia di era reformasi kembali berwatak feodalisme secara terang benderang.

Dulu di era Soeharto korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela sampai keponakan, kolega dan kerabat. Dewasa ini di zaman reformasi sampai era Presiden SBY-Boediono, Ben Anderson melihat para politisi itu mempersiapkan keluarga, anak, keponakan dan kerabat untuk meneruskan kepemimpinan. Para politisi itu tak ada apa-apanya kecuali mendompleng. Hal itu cermin feodalisme serta cermin kemauan pemimpin yang gila-gilaan seperti di Korea Utara.[18] Negara itu komunis tapi pemimpinnya turun-temurun sampai tiga generasi. "Ketimbang membagi kekuasaan kepada orang lain, lebih baik membagi kepada anak sendiri," kata Ben Anderson.

Sejauh ini dinasti politik yang muncul antara lain trah SBY, Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Gus Dur, Habibie dan Soeharto, dimana istri, keponakan dan putra-putri mereka terjun ke politik dengan mendompleng ketenaran suami atau orangtuanya.

Ada semacam *Bapakisme* era Orba yang berulang sekarang. Di daerah gejala serupa terjadi antara lain di Banten dan Sulsel. Sekali lagi, Ben menyebut itu feodalisme dan cermin kemauan pemimpin yang gila-gilaan seperti elite rezim komunis Korut.

Di masa mendatang akan terjadi perubahan, meski memang masih perlu waktu. Menurutnya, orang-orang DPR umumnya meru-

---

[18] Percakapan dengan Benedict Anderson, Indonesianis dan mahaguru Cornell University AS di Jakarta September 2008. Menurutnya, gejala dinasti politik itu tak sehat, dan merupakan suatu retradisionalisme politik.

pakan hasil zaman Orde Baru. Agaknya, formasi di zaman Soeharto adalah neofeodalisme, korupsi dan gejala buruk itu berlanjut sampai era SBY ini. Ada persamaan kultur politik era SBY-Boediono dengan di masa Orde Baru yakni bentuknya diktator dengan sistem oligarki. Bagi-bagi lahan, tak boleh ada oposisi, dan sebagainya.

Mereka tahu, asal bagi lahan dan semua diajak masuk, oligarki itu aman. Belum ada bagian dari oligarki yang berani keluar dan berbuat sesuatu. Situasi ini mungkin akan berubah kalau ada krisis ekonomi lagi. Sangat ngeri rasanya.

Menyinggung kembali soal feodalisme, Ben Anderson menuturkan, ketika zaman revolusi sampai 1950-an, kaum bangsawan atau raja kecil-kecilan merasa terancam karena tekanan dari bawah. Masyarakat melihat mereka sebagai antek penjajah, *brengsek*, dan sebagainya.

Partai juga memiliki dasar haluan kuat seperti PNI, PKI, dan Masyumi, sehingga memiliki daya tarik lebih besar ketimbang para bangsawan ini. Raja kecil ini lalu mencoba kembali masuk birokrasi tanpa melalui proses pemilihan. Akibatnya, kecenderungan dinasti politik di negeri ini kian berbiak seperti cendawan di musim hujan.

Tampaknya korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini masih sangat melekat kuat pada para pengambil keputusan di hampir semua lembaga atau institusi publik milik bangsa.

Pasalnya, tiap petinggi partai politik tidak segan-segan menempatkan putra-putrinya di “'nomor jadi” untuk caleg. Sebut saja putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) basis massa PDIP di Jawa Tengah. Atau Dave Laksono (putra Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono) dan Maruarar Sirait (putra Tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait) Muhammad Iqbal (putra Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah), Agus Haz (putra mantan Ketua Umum PPP Hamzah

Haz). Tak ketinggalan Edi Baskoro Yudhoyono (putra Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) di dapil basis massa Partai Demokrat di Jawa Timur.

Terkesan sikap mental *aji mumpung* oleh segelintir elit yang tidak malu-malu membatasi ruang kebebasan politik publik bagi anak bangsa lainnya yang potensial.

Padahal, kekuasaan dalam negara modern merupakan manifestasi dari kekuasaan rakyat, sejatinya merupakan amanat rakyat kepada pemegang kekuasaan negara untuk dilaksanakan sesuai tujuan kehidupan bernegara. Karena itu, manipulasi pelaksanaan kekuasaan secara moral dan hukum merupakan korupsi kekuasaan. Entitas korupsi politik terjalin bersemayam dengan praktik pelaksanaan kekuasaan.

Dalam kasus tampilnya anak-anak elit penguasa sebagai caleg itu, maka ada beberapa kecenderungan kuat atas fenomena itu.

Pertama, ini adalah bagian dari pembentukan dinasti politik keluarga. Di Amerika Serikat tren dinasti politik juga terjadi, klan politik John F Kennedy adalah contohnya. Begitu juga klan politik Mahatma Gandhi di India.

Kedua, ini adalah bagian dari desain meneruskan ideologi partai. Namun, tingkat relevansinya tak begitu kuat. Sebab kini langgam politik bergerak ke arah de-ideologisasi politik.

Pertanyaan publik, mampukah anak tokoh politik itu meraup dukungan suara hanya berbekal nama besar keluarga? Bisa jadi.

Mengenai kedinastian ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah majunya Edy Baskoro, putra keduanya, menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat karena mendapat kemudahan dan pengaruh hubungan kekeluargaan.

"Betul Edy Baskoro jadi calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat. Namun bila dikaitkan dengan dinasti politik saya rasa itu tidak tepat karena bukan turun temurun," tegas SBY usai acara

buka puasa bersama wartawan di Istana Negara Jakarta, Minggu (28/9/2008) malam.

Kepala Negara menjelaskan Edy Baskoro maju sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat karena kemampuan yang dimiliki anaknya tersebut baik dari sisi akademisi dan juga ketertarik-annya pada dunia politik.

Edy sudah aktif di Partai Demokrat sejak 2005. Ia dicalonkan men-jadi Caleg dari Daerah pemilihan 7 Jawa Timur dan itu pun bukan nomor urut satu namun tiga.

Presiden Yudhoyono kembali menegaskan bahwa istilah dinasti politik tidak tepat karena siapapun dengan latar belakang keluar-ga dari manapun bila memiliki kemampuan dapat terjun ke dunia politik secara demokratis. SBY keberatan dengan istilah dinasti, meski itu sudah jadi realitas politik.

Pertanyaan selanjutnya, adakah relevansi nama besar keluarga dengan kualitas kepemimpinan politik sang anak?

Untuk mendapat jawaban ini, kita tentu harus menunggu. Publik harus betul-betul meneliti rekam jejak calon, jadi tak hanya karena nama besar keluarga.

Yang mesti diingat, kelatahan dinasti politik, bisa jadi bumerang yang merusak nama baik seseorang. Karena itu pula Wapres M Jusuf Kalla melarang anak-anak, keponakan, dan keluarga besar-nya menjadi calon legislatif melalui jalur nepotisme politik

Menyoal masalah dinasti politik, menarik rasanya untuk sedikit menyinggung tentang trah politik Keluarga Cendana. Secara fisik, mantan Presiden Soeharto sudah hilang dari ranah politik Tanah Air. Tetapi, mampukah trah putra Kemusuk itu menapaki pang-gung politik nasional?

Tak sedikit putra pemimpin bangsa yang kemudian juga muncul di kancah politik nasional. Sebagian punya kemampuan politik

yang prima, tapi tak sedikit pula yang hanya bermodalkan nama besar orang tua mereka.[19]

Sekitar 22 tahun lalu, Megawati Soekarnoputri yang memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, keluar dari persembunyiannya. Dia menjadi wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu tujuh tahun, anak kedua proklamator Soekarno itu, terpilih sebagai Ketua Umum PDI di Surabaya sebelum didongkel pada Kongres PDI di Medan.

Tapi, dengan kereta PDI Perjuangan, dia meraih tampuk teratas negeri ini, 56 tahun setelah ayahnya bersama Mohammad Hatta memproklamirkan republik ini, 34 tahun setelah kekuasaan Bung Karno runtuh.

Bagaimana dengan trah Pak Harto? Sebenarnya pada Pemilu 2004 lalu, puteri sulung penguasa Orde Baru itu, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) telah memulai karir di politik pasca lengsernya Pak Harto. Bersama mantan KSAD, R. Hartono, dia membentuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Saat itu, Mbak Tutut jadi salah satu 'jualan' PKPB. Selain itu, partai dengan warna kental oranye itu juga mengusung isu kesuksesan mantan Presiden Soeharto dalam membangun kerangka ekonomi, terutama ketahanan pangan dan luasnya lapangan kerja.

Faktanya, Mbak Tutut yang pernah jadi petinggi Golkar itu, hanya mampu membawa PKPB meraih dukungan suara 2,12%. PKPB hanya mengantarkan dua anggotanya mendapatkan kursi legislatif. Dan, karena tak mencapai *electoral trashhold*, PKPB pun lenyap dari peredaran.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universtas Airlangga Surabaya, Kacung Maridjan, sulit bagi Keluarga Cendana bangkit kembali dalam kancah politik nasional. "Kejatuhan Soeharto karena ia ter-

---

[19]R Ferdian Andi R, "Asa Trah Cendana di Jagat Politik, dan Klan, Kuasa dan Kekerasan", *www.inilah.com* (08/01/2008).

lalu memberi fasilitas kemudahan dalam bisnis dan politik kepada anak-anak dan kroninya," katanya.

Kacung membedakan prosesi jatuhnya kekuatan politik Bung Karno dan Pak Harto. Jika Bung Karno jatuh sendiri, Pak Harto jatuh bersama keluarga dan kroninya.

"Jadi tidak bisa dibandingkan antara keluarga Bung Karno dan keluarga Pak Harto dalam konteks politik," katanya.

Para analis melihat, tidak bakal terjadi Soehartois atau kebangkitan Keluarga Cendana dalam politik nasional. Bila pun bangkit, sama sekali tidak akan mendominasi politik nasional.

Kenapa Kacung begitu yakin? Menurutnya, bila terminologi stabilitas dan kesejahteraan yang diusung Keluarga Cendana, hal itu takkan mampu menggiring publik pada romantisme kepemimpinan Pak Harto. Sebab, semua partai politik di Indonesia dipastikan mengusung kesejahteraan dan stabilitas kepada rakyat. Dan itu bukan otoritas keluarga Pak Harto saja.

Tetapi, peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Avi Warman Adam berpendapat lain. Menurutnya, masih ada kesempatan bagi trah Cendana masuk di kancah politik nasional. Masih ada peluang berkiprah di lembaga publik maupun politik. Syaratnya, polemik mengenai Pak Harto mulai mereda.

"Bisa saja itu terjadi sekitar dua Pemilu lagi," katanya. Meski begitu, dari Keluarga Cendana, hanya Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo yang punya modal pengalaman politik karena pernah aktif di Golkar.

Keyakinan Asvi merujuk pada kasus putra-putri pemimpin Indonesia. Meutia Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang juga Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah putri Bung Hatta. Contoh paling gamblang tentu putra-putri Bung Karno; Megawati, Rachmawati, dan Guruh Sukarnoputra.

Hampir semua anak mantan pemimpin kita berkiprah di ruang publik. Jadi, tak tertutup pula kemungkinannya hal ini berlaku bagi trah Cendana. Bahkan Yenny Wahid, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid pun sudah terlibat aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski demikian, persoalan yang terjadi selama 32 tahun kepemimpinan Pak Harto, akan jadi ganjalan bagi putra-putrinya. Pasalnya, hampir semua putra-putri Pak Harto memanfaatkan nama besar ayahnya dalam kancah politik dan bisnis.

Bagaimanapun, keterlibatan secara aktif anak-anak Pak Harto dengan memanfaatkan ayahnya, jelas menjadi batu ganjalan.

Tapi, tak ada batu yang tak bisa terkikis. Ganjalan itu, bisa saja terkikis jika Mbak Tutut dan Keluarga Cendana mencitrakan diri sebagai keluarga yang sosial.

Dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia, baru Ir Soekarno dan Soeharto yang mampu melambangkan kebesaran. Di eranya, Bung Karno dijuluki Panglima Besar Revolusi. Pak Harto dijuluki Bapak Pembangunan.

Julukan bagi kedua mantan presiden fenomenal itu jelas memiliki arti penting. Bung Karno dikenal sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, Pak Harto dikenal dengan Paham *development*-nya dalam upaya memajukan negeri ini.

Selain guratan prestasi, era kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto juga sama-sama tergores kasus-kasus kekerasan. Zaman Orde Lama dipuncaki pemberontakan G 30 S PKI. Zaman Orde Baru lebih banyak lagi. Puncaknya, rusuh massal di tengah berkibarnya reformasi 1998.

Bagaimana kedua tokoh besar negeri kepulauan berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini mewariskan kekuatan politik, ekonomi, dan kekuasaannya kepada para penerusnya?

Klan Soekarno secara fenomenal direpresentasikan lewat kehadiran Megawati Soekarnoputri. Ya, Mega boleh dibilang cukup berhasil mengkapitalisasi nama besar Soekarno dalam politik praktis.

Mengibarkan bendera PDI Perjuangan, pada Pemilu 1999, Mega meraih dukungan mayoritas dan PDI-P tampil sebagai partai pemenang pemilu. Mega menjadi Presiden RI kelima menggantikan Abdurrahman Wahid.

Sukses Mega di Pemilu 1999 diikuti saudara-saudaranya. Rachmawati Soekarnoputri mendirikan Partai Pelopor yang pada Pemilu 2004 meraih suara 0,79%. Sukmawati Soekarnoputri mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme yang pada Pemilu 2004 memperoleh suara 0.80%.

Mega sendiri, pada Pemilu 2004, meraih suara 18,31%. Lebih mujur ketimbang saudara-saudaranya meski tetap kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI.

Praktis, pada Pemilu 2004, putri-putri Bung Karno saling bertarung merebut hati rakyat. Tentu juga memperebutkan tafsir ajaran Bung Karno yang memang masih bisa menjadi kapital politik di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan teori sosiologi dari Emilie Durkheim yang membedakan kelompok masyarakat menjadi dua bagian, yaitu tradisional dan modern.

Durkheim berpendapat, masyarakat tradisional bersifat ‘mekanis’ dan dipersatukan oleh kenyataan bahwa setiap orang lebih kurang sama. Karenanya, punya banyak kesamaan di antara sesamanya.

Dalam masyarakat tradisional, kata Durkheim, kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual. Norma-norma kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi.

Sosiolog Clifford Geertz, dalam konteks dunia ketiga, menyatakan bahwa klan politik muncul di negara-negara baru seperti India

dengan Nehru-Gandhi, Indonesia dengan Soekarno, Philipina dengan Arroyo, dan Malaysia dengan Tun Abdul Razak. Klan politik ini di Asia menemukan faktanya.

Di Indonesia, dari klan Bung Karno, hanya Megawati yang masih eksis hingga kini. Tapi, tampaknya, Megawati pun sadar dengan hitungan usianya yang terus beranjak.

Tak heran jika putri kandungnya, Puan Maharani, mulai diperkenalkan pada publik di Pemilu 2004. Nama Puan pun masuk dalam struktur pengurus PDI-P.

Dalam pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), nama Puan juga sempat beredar.

Tampak jelas Megawati betul-betul mempersiapkan generasi ketiga Soekarno untuk meneruskan klan Soekarno dalam percaturan politik dan kekuasaan di negeri ini.

Berbeda dengan Soeharto. Sejak lengser pada 21 Mei 1998, klan Pak Harto lebih banyak tersandung kasus. Ada yang terkait langsung dengan kasus hukum Pak Harto, ada juga yang di luar itu.

Tommy Soeharto, misalnya, tercatat paling sering terjerat kasus. Putra kesayangan Pak Harto itu pernah dipenjara akibat kasus pembunuhan Hakim Agung Syarifudin Kartasasmita. Tommy juga diperkarakan dalam kasus BPCC, Goro, dan sederet kasus lain.

Sementara Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, dan anak lainnya, bahkan sampai ke cucu Pak Harto, acap bergelut dengan berbagai skandal yang lebih bersifat *privacy*.

Hanya Siti Hardiyanti alias Mbak Tutut yang sedikit banyak mau mengikuti jejak ayahnya. Selain sempat menjabat Menteri Sosial di era Pak Harto, pada Pemilu 2004 Mbak Tutut memunculkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Intinya, pelan tapi pasti, klan Soekarno dan klan Soeharto tetap menggeliat. Tetap bakal mewarnai altar politik dan kekuasaan di negeri ini.

Menyikapi klan politik ini, media pun mulai gencar bergunjing tentang nepotisme yang mewabah di tubuh partai politik berkaitan dengan proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di daerah maupun di pusat. Para petinggi partai menempatkan anak dan cucu serta kerabat sebagai calon wakil rakyat.

Reaksi pun bermunculan. Ada yang menuding nepotisme seperti itu tidak boleh lagi dibiarkan di era seperti sekarang. Tetapi ada juga yang risau dengan sikap seperti itu. Karena, tirani pikiran antinepotisme mematikan peluang, bahkan hak anak-anak dan keluarga petinggi untuk menduduki jabatan di lembaga-lembaga publik. Padahal posisi pada lembaga publik, termasuk DPR/DPRD adalah hak semua warga negara.

Dalam perpolitikan global kita mengenal dinasti politik Kennedy, Rockefeller, dan kini George Bush di Amerika Serikat. Nama Kennedy, Rockfeller, dan Bush mendominasi struktur kekuasaan di negeri Paman Sam itu dari dulu sampai sekarang. George W Bush, yang pernah menjabat Presiden AS, adalah anak dari George Bush yang pernah menjadi presiden. Nama-nama Kennedy bertaburan di birokrasi Amerika Serikat.

Di Indonesia, dinasti politik Soekarno tetap hadir dan berkiprah. Anak-anak Soekarno, terutama yang perempuan, malang melintang dalam dunia perpolitikan. Abdurrahman Wahid juga mulai membangun dinasti politiknya. Salahkah mereka?

Setiap orang memiliki hak untuk membangun karir anak-anak dan keluarga di masa depan. Kalau seorang anak menjadi presiden menggantikan ayahnya yang pernah menjadi presiden, tidak salah. Yang salah adalah karena dia berstatus anak presiden lantas memiliki hak istimewa menjadi presiden.

Hak istimewa inilah yang menyebabkan nepotisme berbahaya. Selama tidak berbau eksklusif dan istimewa, mobilitas sebuah ke-

luarga dalam hirarki jabatan publik tidak pantas disebut sebagai nepotisme.

Karena itu, syarat paling penting untuk menghindari tudingan nepotisme terletak pada sistem rekrutmen, baik oleh partai politik maupn oleh lembaga negara yang lain. Asas keterbukaan dan kompetensi hendaknya menjadi pegangan untuk menghindari tudingan nepotisme.

Dalam kasus pencalonan anggota DPR pun demikian. Para petinggi partai boleh saja menjagokan anak atau anggota keluarganya menjadi wakil rakyat. Tetapi dia harus bersaing dan bersanding dengan yang lain dalam sistem rekrutmen yang adil, terbuka, serta menghargai derajat kompetensi. Anak-anak dan kerabat politisi partai itu tidak bisa otomatis memperoleh keuntungan lebih dibandingkan orang lain.

Mereka, anak-anak petinggi dan elite partai, harus membuktikan kompetensinya sebagai politisi. Telah berkiprah lama dalam dunia kepartaian. Diberi kesempatan bersaing yang sama dengan yang lain. Jangan mentang-mentang anak petinggi partai, lantas otomatis memperoleh prioritas. Inilah yang keliru.

Selain sistem rekrutmen yang terbuka dan menghargai asas kompetensi, tudingan nepotisme bisa ditangkis oleh keluarga para petinggi partai, bila mampu menahan diri untuk tidak terjebak pada semangat *aji mumpung*. Semangat menahan diri, karena tahu diri inilah yang dikenal dengan dimensi etis.

Jadi, selama etika dan proses rekrutmen dijaga asasnya, tidak ada alasan menuding anak pejabat atau petinggi yang bertarung dalam pemilu sebagai nepotisme. Jabatan publik adalah hak semua orang. Karena itu tidak ada kelompok mana pun yang merasa lebih berhak dan tidak boleh memiliki hak dalam percaturan mengisi jabatan-jabatan publik itu.

Sebagai hal yang manusiawi, kehadiran peran sentimen, fanatisme, dan loyalitas keluarga sama sahnya dengan kehadiran peran

sentimen, fanatisme, dan loyalitas suku, agama, dan ras dalam dinamika demokrasi. Namun, begitu masuk ranah demokrasi, berbagai sentimen, fanatisme, dan loyalitas primordial harus tunduk, tanpa kecuali, pada kesediaan menjunjung tinggi nilai-nilai universal demokrasi, seperti toleransi, keterbukaan, keterwakilan, dan akuntabiltas. Penjunjungan itu diperagakan dengan menaati sistem dan mekanisme demokrasi melalui pemanfaatan aneka instrumen kelembagaan demokrasi yang kerangka landasannya termaktub dalam Konstitusi. Singkatnya, demokrasi konstitusional di-nomor-satu-kan, hal-hal lain di-nomor-dua-kan.

Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha sebagai *supporting system* belaka dari jejaring politik dan ekonomi. Lantas mengapa taipan berbondong-bondong menduduki jabatan publik? Kini kesempatan untuk masuk ke wilayah politik terbuka lebar.

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan, dengan daya pikat finansial yang besar, nominasi bisa dibeli agar mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif (Nuryanti, 2005). Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar serta pengaruh politiknya terbatas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin rumit dan berbiaya tinggi.

Semakin banyak kelompok politik yang harus didekati dan disuap, sehingga biaya transaksi malah melampaui keuntungan dari rente.

KONKLUSI

Musuh utama demokrasi konstitusional adalah oligarki atau monopoli kekuasaan, suatu retradisionalisme politik dalam bentuk kemasan baru tapi substansinya lama. Terlepas apakah oligarkisme dan monopoli itu dibangun dengan atau tanpa kekerasan fisik atau kekerasan struktural kelembagaan, maka oligarkisme dan monopoli itu tetap harus dikoreksi atau dilawan. Monopoli dan

oligarki paling marak terjadi dalam dunia politik, bisnis korporasi dan birokrasi.

Dalam semua hal, di Asia dan berbagai belahan dunia, terbukti betapa merajalelanya monopoli dan oligarki melalui jaringan dan dinasti politik maupun dinasti bisnis, baik yang berbasis keluarga maupun tidak, yang pada akhirnya sering mengundang kecemburuan dan iri hati pihak lain. Ujung-ujungnya, kekerasan mewarnai dinasti demi dinasti dengan cerita akhir berupa tragedi kematian. Sejarah sudah sering bersaksi demikian.(*)

TAIPAN CHINA PERANTAUAN, PASAR DAN ISU RASIAL DI ASIA TENGGARA[1]

KOMUNITAS CHINA DI ASIA TENGGARA

Sinolog Wang Gungwu pernah berhujah bahwa di Asia Tenggara, Indonesia merupakan contoh sebuah negara yang mempunyai kompleksitas "masalah China".

Salah satu masalah tersebut erat kaitannya dengan identitas kultural etnis China sebagai golongan etnis nonpribumi, yang berhadapan dengan identitas kultural mayoritas penduduk golongan asli (bumiputera). Sehingga gesekan, konflik dan kekerasan rasial antara kaum nonpribumi keturunan Tionghoa dan pribumi itu seringkali terjadi karena faktor sosial-ekonomi dan identitas.[2]

Namun demikian, Wang Gungwu juga menyatakan bahwa etnis China di negara Asia Tenggara sangat loyal, berpendidikan, dan sangat bermanfaat bagi negara. Mereka juga siap mengabdi pada negara dimana mereka berdomisili. Sekarang tinggal bagaimana cara negara memanfaatkan kelebihan mereka.

Wang juga menyatakan bahwa perpindahan etnis China ke berbagai negara di Asia Tenggara secara tidak langsung membentuk karakter kepribadian mereka menjadi lebih baik. Pertumbuhan karakter ras ini terjadi seiring perkembangan zaman dan kondisi lingkungan di negara mereka tinggal.

---

[1] Tulisan ini merupakan revisi atas makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan "Seminar Nasional dan Rakernas Perhimpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen se-Indonesia", di Jakarta 30 November 2006. Tulisan ini merupakan riset atas laporan media massa dan riset kepustakaan, dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh anak bangsa betapa pentingnya keadilan sosial, kerjasama antargolongan, sinergi segenap potensi anak bangsa dan nasionalisme baru bagi masa depan *nation building* di Indonesia yang terancam kesenjangan sosial dan ketidakadilan.

[2] Profesor Wang Gungwu, Sinolog terkemuka di Asia, dari Institut Asia Timur di National University of Singapore menyampaikan pandangan itu pada seminar bertajuk "*The Potential of The Chinese Diaspora and the Benefits for South East Asia*" di Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2012.

Wang Gungwu mengakui, mereka tidak berlepas diri dari budaya asal, namun etnis keturunan China itu terkenal loyal pada pemerintah setempat. Dengan generasi yang semakin berpendidikan, kelompok etnis ini perlu didayagunakan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk perkembangan bangsa-bangsa Asia Tenggara

Dari tahun ke tahun, warga China bertambah jumlahnya di negara-negara Asia Tenggara pada abad ke 19. Saat itu, posisi China sangat lemah, kalah dari kolonialisme Eropa dan Jepang. China, hampir tidak selamat dari pengaruh asing.

Dan warga China yang pergi ke negara-negara Asia Tenggara adalah pedagang. "Di China, status sosial pedagang sangat rendah. Status ini naik ketika mereka sampai di negara lain. Inilah yang membuat mereka betah tinggal di Asia Tenggara," kata Wang.

Posisi para pedagang China semakin menanjak setelah pada akhir abad ke 19 perdagangan menjadi semakin penting.

Pada akhir abad ke-19 itu, karakter etnis China yang berpendidikan mulai terbentuk. Sebelumnya, warga China beranggapan bahwa mereka harus belajar di dalam negeri, lulus ujian, dan menjadi pejabat negara. Dengan semakin banyaknya kaum cendekiawan China yang datang ke Asia Tenggara, orang China mendapatkan berbagai pendidikan baru dan pengalaman baru.

Orang China di luar China adalah yang pertama mendapatkan pendidikan baru, ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, ide-ide baru di bidang ekonomi dan industri. Harus kita akui bahwa orang-orang China sangat antusias belajar dari Barat.

Orang China yang sudah mapan dengan kepemimpinan Eropa (Belanda, Inggris) harus dihadapkan dengan kejatuhan kolonialisme di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, etnis China harus membangun kembali norma-norma dan kehidupan mereka bersama pribumi. Etnis China cepat beradaptasi dan mempersiapkan anak mereka untuk dunia yang baru. Mereka beradaptasi dengan kebutuhan baru akan ekonomi pasca-kolonial.

Pada abad ke 20, antara tahun 1960-1970, jumlah warga China yang lahir di Asia Tenggara terus bertambah. Mereka disebut peranakan dan jadi mayoritas warga China saat ini. Menurut Wang Gungwu, inilah kelompok etnis China yang memiliki peran, dan membuat kontribusi bagi kemajuan Asia Tenggara.

Wang yakin, para peranakan ini adalah orang-orang yang loyal pada negara tempat mereka tinggal. Dengan pendidikan yang mereka peroleh, etnis China memiliki potensi yang besar bagi negara dimana mereka tinggal, di antaranya adalah untuk kestabilan ekonomi dan berbagai keuntungan lainnya.

Menurut Wang, yang memiliki pandangan konstruktif dan positif itu, etnis China lebih memilih berintegrasi dalam negara bangsa di Asia Tenggara. Nampaknya, bagi minoritas Tionghoa di Asia Tenggara dan terutama Indonesia, peristiwa Kerusuhan Mei 1998 merupakan kejadian yang bisa dimaafkan, meski tak akan dilupakan.

Peristiwa itu sendiri ternyata juga membuat pemerintah China sangat merisaukan perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia periode tersebut, yang tidak saja dapat berdampak pada kondisi kawasan di Asia Tenggara tetapi juga bagi kondisi dalam negeri China. Selain itu, China pun risau terhadap nasib sekitar 7 juta etnis China dan sekitar 200 ribu warga negaranya di Indonesia.[3]

Artinya, sebagai peradaban tua, China merasa perlu memelihara dan mempertahankan ikatan primordial antara RRC dan etnis China perantauan di Asia Tenggara, sebagaimana wajarnya.

Menurut Menlu China Tang Jiaxuan (1998-2008), pemerintah China menyatakan tidak dapat menutup mata terhadap kerusuhan Mei 1998 dimana banyak korbannya adalah anggota masyarakat

---

[3] Hal itu diungkapkan Menlu China Tang Jiaxuan (1998-2008) dalam buku memoarnya, *Heavy Storm and Gentle Breeze: Tang Jiaxuan's Diplomatic Memoir* (Beijing: Foreign Languages Press, 2011).

keturunan etnis China. Untuk itu melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta, Pemerintah China melakukan serangkaian aksi penyelamatan dan evakuasi warganya dan anggota masyarakat keturunan etnis China di Indonesia dengan mengunjungi tempat-tempat kejadian seperti antara lain di Jakarta dan Kalimantan.

China menyampaikan sikap tegas negaranya untuk melindungi warga negaranya dan keturunan etnis China di Indonesia agar tidak menjadi korban kerusuhan. Untuk itu, Beijing menugaskan staf kedutaannya di Indonesia untuk secara aktif melakukan evakuasi warga negaranya dan keturunan etnis China. Ia juga memerintahkan kedutaannya untuk melonggarkan dan mempermudah permohonan warga negara Indonesia keturunan etnis China untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di China, termasuk memberi bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Mengingat status hukum keturunan etnis China di Indonesia adalah warga negara Indonesia, Pemerintah China pun tidak lupa mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negaranya, termasuk warga negara keturunan etnis China.[4]

Menlu Tang menyampaikan ke Menlu Indonesia Ali Alatas bahwa serangan terhadap warga keturunan etnis China di Indonesia dapat memunculkan kemarahan masyarakat China di seluruh dunia. Sebagai negara asal keturunan etnis China, Pemerintah China meminta Pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh melakukan berbagai langkah dan upaya perlindungan dan penanganan konflik, serta menjamin kerusuhan serupa tidak lagi berulang.

Tang juga menekankan perlunya Indonesia dan China untuk terus belajar dari sejarah dan menatap ke masa depan. Hubungan persahabatan kedua negara yang telah berlangsung sejak dua abad yang lalu dan peran Indonesia sebagai negara pertama di

---

[4] Bahkan guna menyampaikan sikap serius Pemerintah China, secara khusus Tang yang waktu itu menlu China menemui Alatas di sela-sela pertemuan ASEAN Regional Forum di Manila pada bulan Juli 1998.

Asia Tenggara yang membuka hubungan diplomatik dengan RRC, tidak dapat diabaikan begitu saja meski masih terdapat isu-isu sensitif, termasuk isu yang terkait dengan keturunan etnis China di Indonesia.

Namun khusus terkait korban kerusuhan Mei 1998 dimana korbannya banyak yang berasal dari keturunan etnis China, secara jujur Tang mengakui bahwa sebenarnya keturunan etnis China sebenarnya bukanlah target, tetapi lebih sebagai korban akibat dari puncak ketidakpuasan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia yang sudah lama terpendam. Dan secara kebetulan tingkat ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia keturunan etnis China banyak yang lebih baik dari pada masyarakat Indonesia pada umumnya.

Oleh sebab itu, sambil tetap memberikan perhatian terhadap isu etnis China di Indonesia, Tang melihat perlunya kedua negara terus meningkatkan upaya membina hubungan kedua negara. Dan dalam satu dekade terakhir ini, hubungan Indonesia-China terlihat semakin erat. Sikap Tang realistis, obyektif dan tidak menggurui Republik Indonesia sehingga bisa diterima sebagai masukan yang berharga bagi Jakarta.

***

Hubungan ras/etnis menjadi tema perenial dalam kajian Asia Tenggara. Pelbagai peristiwa dan kecenderungan yang mencetuskan ketegangan di pelbagai kelompok etnis dan kebutuhan untuk memelihara harmonis antar-etnik bagi persatuan nasional, menjadi suatu studi para akademisi di berbagai belahan bumi.

Dalam hal ini, analisa dan studi hubungan-hubungan etnis/ras di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Singapura dengan referensi khusus atas peran etnis Tionghoa dalam kerangka pembangunan bangsa (nation building), sangatlah relevan. Para sarjana studi Asia Tenggara untuk sebagian, secara kritis menguji berbagai isu penting seperti politik etnik, pembangunan bangsa, integrasi nasional, kebijakan negara dan resolusi konflik di Asia

Tenggara. Para sarjana yang memiliki latar beragam etnik, menguji perspektif mereka dan berusaha secara *genuine* meninjau peran minoritas Tionghoa di Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi, perdagangan dan politik.

Ahli masalah China, Leo Suryadinata, mengemukakan bahwa penting bagi kita untuk menganalisa dan menyimak berbagai isu dan faset yang berbeda-beda yang dialami atau dirasakan dalam kaitan mengenai hubungan etnis dan pembangunan bangsa di Asia Tenggara. Wang Gungwu mencatat, etnisitas Tionghoa di negara-negara Asia Tenggara modern, yang mengadopsi kemodernan yang muncul di Eropa Barat 200 tahun silam, memiliki peran, masalah dan kesempatan dalam proses pembangunan bangsa.

Negara bangsa modern di Asia Tenggara masih merupakan sesuatu yang baru, dalam prosesi ke arah itu, Indonesia, Philipina, Malaysia masih menghadapi problem etnis Tionghoa dan bagaimana pembangunan bangsa di ketiga negara sebaiknya dilaksanakan, di tengah pluralitas masyarakatnya, dan terutama di tengah kenyataan bahwa etnis Tionghoa memiliki distingsi budaya dan modal ekonomi yang relatif amat menonjol dan mengemuka.

Wang Gungwu melihat pembangunan bangsa yang memiliki pluralitas etnis, agama dan budaya, bisa diibaratkan dengan perkawinan yang memiliki komitmen untuk jangka panjang.

Menurut Wang Gungwu, di era globalisasi, dimana negara bangsa terancam oleh globalisasi itu sendiri, maka etnis Tionghoa di Asia Tenggara sebaiknya bersama-sama kaum bumiputera menyandang tanggung jawab bersama, solid dan komit merespon globalisasi dan transnasionalisasi, seraya melakukan *nation building* bagi keberlanjutan negara modern di kawasan ini. [5]

---

[5] Leo Suryadinata, (Ed), *Ethnic Relations and Nation Building in Southeast Asia: The Case of Ethnic Chinese* (Singapore: ISEAS and SSAS, 2006), h. 8-14.

Konteks Indonesia

Indonesia merupakan contoh penting di Asia Tenggara tentang masyarakat majemuk yang kompleks, dalam pengertian terdiri dari ratusan kelompok etnis (rasial) yang hidup berdampingan dalam sebuah unit politik, tetapi tidak terintegrasi dengan baik, bahkan mengalami ketegangan, kekerasan dan konflik etnis yang laten dan sporadis, sebagaimana yang ditemukan dalam banyak kasus antara pribumi Muslim dan minoritas Tionghoa (Cina).

Kelompok-kelompok etnis ini, terutama antara pribumi Muslim dan minoritas Tionghoa, sering melakukan fungsi ekonomi berbeda dalam masyarakat mereka masing-masing, mengalami polarisasi sosial, tumpang tindih dan berhimpitan dengan perbedaan agama, ras, sosial dan kesenjangan ekonomi. Situasi dan kondisi yang kompleks ini menimbulkan masalah dan kendala untuk membangun integrasi nasional yang wajar, kenyal dan kuat di Indonesia.

Dalam konteks integrasi ini, menurut Myron Weiner, ada lima jenis integrasi yakni integrasi nasional, integrasi teritorial, integrasi massa dan elite, integrasi nilai-nilai dan perilaku integratif. Integrasi nasional merupakan tingkat tertinggi yang musti dicapai jika sebuah negara bangsa yang modern (*modern nation-state)* hendak dibentuk. Indonesia sejak merdeka mencita-citakan tercapainya integrasi nasional ini secara kuat, kenyal dan berkelanjutan.

Namun dari pengalaman relasi pribumi Muslim dan etnis Tionghoa di Indonesia era Orde Baru, masalah integrasi nasional nampak masih merupakan problem yang pelik dan rumit karena fungsi ekonomi yang berbeda di kalangan pribumi Muslim dan Tionghoa, segregasi etnis dan polarisasi sosial antara pribumi Muslim dan minoritas Tionghoa, sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Fungsi ekonomi yang berbeda, segregasi etnis dan polarisasi sosial antara etnis pribumi Muslim dan minoritas Tionghoa sejak la-

ma terjadi karena pengalaman kolonialisme yang panjang di Nusantara, yang telah mempengaruhi dan menentukan kedudukan sosial etnis Tionghoa di Indonesia. Penguasa kolonial Belanda menempatkan diri mereka sebagai lapisan teratas, sedangkan etnis Tionghoa ditempatkan penjajah pada posisi tengah dan penduduk pribumi diposisikan pada lapisan sosial terendah.

Di bawah penjajahan Belanda, etnis Tionghoa di perkotaan merupakan kelas menengah dan melaksanakan fungsi ekonomi yang penting, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa banyak orang Tionghoa miskin di Indonesia pada masa kolonial. Secara umum masyarakat Tionghoa di era kolonial Belanda menduduki posisi ekonomis sebagai kelas pedagang (perantara) yang penting dan kehidupan sosial-ekonominya lebih baik dibandingkan penduduk pribumi pada waktu itu.

Secara historis, etnis Tionghoa telah diakui sebagai salah satu warga negara Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling Wet van* 2 September 1854, Ned. S.18 yaitu (1). Golongan Eropa; (2). Golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India dan Arab; dan (3). Golongan Pribumi. Pembagian golongan itu merupakan tujuan dari penjajah Belanda yang menerapkan politik *devide et impera* atau politik memecah-belah dimana ketika itu penjajah Belanda mengadu domba antara golongan pribumi dengan etnis Tionghoa.

Golongan pribumi seolah-olah golongan yang inferior, tidak dipercaya, tidak jujur, bodoh dan selalu memusuhi etnis Tionghoa. Sebaliknya, etnis Tionghoa digambarkan sebagai suatu komunitas yang licik, mau menang sendiri, eksklusif, kikir, serigala ekonomi, superior, arogan dan sebagainya. Di bawah era kolonial, penggolongan dan pengakuan tersebut telah menyebabkan tindakan-tindakan diskriminatif terutama terhadap etnis Tionghoa

Setelah kemerdekaan politik dicapai di Indonesia (1949), penguasa kolonial tersingkir dari dunia politik dan digantikan oleh tokoh tokoh setempat. Penduduk pribumi sangat ingin meningkatkan diri

dalam bidang ekonomi. Namun, mereka menemukan etnis Tionghoa dan tuan-tuan bekas penjajah (yang diwakili oleh berbagai perusahaan multinasional Barat) di Indonesia. Bagaimanapun, lebih mudah menyerang kekuatan ekonomi etnis Tionghoa daripada perusahaan Barat, yang kurang begitu kelihatan dan memiliki pengaruh lebih besar. Tidaklah mengejutkan jika gempuran dipusatkan pada etnis Tionghoa daripada kepada bekas penjajah.

Selain itu, para tokoh pribumi mengetahui bahwa dengan menjadi masyarakat multietnis, rasa kebangsaaan di kalangan penduduk menjadi agak lemah dan karena itu mereka merasakan perlunya membangun bangsa-bangsa baru. Banyak yang merasa bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang yang memiliki kebudayaan asing dan ingin mengintegrasikan kebudayaan tersebut ke tengah masyarakat tempat mereka berada. Sebenarnya, aspek-aspek ekonomi dan budaya merupakan dua bidang utama dari apa yang disebut masalah China *(Chinese problem) di* Indonesia.

MINORITAS ETNIS DAN DOMINASI PASAR

Amy Chua, seorang profesor dari Yale University, AS, pernah mengatakan bahwa di mana ada sekelompok minoritas etnis yang mendominasi pasar – sekalipun ada sistem politik demokrasi -, bisa diramalkan akan terjadi serangan terhadap kelompok minoritas. Bagaimana mungkin?

Amy Chua berpendapat, sistem pasar yang dipakai untuk mengorganisasi ekonomi tidak dapat dikom-binasikan dengan sistem demokrasi untuk mengorganisasi politik. Terjadi komplikasi sosial, politik dan ekonomi yang mencuatkan konflik dan ketegangan di kawasan Asia Tenggara yang multi-rasial.

Sementara banyak orang berpendapat bahwa kerusuhan terjadi karena kelompok minoritas tidak terintegrasi dengan kelompok mayoritas, dimana tekanannya ada pada relasi minoritas-mayoritas, Amy Chua tetap melihat faktor dominasi minoritas terhadap

pasar (perekonomian), merupakan salah satu pemicu kerusuhan rasialis.[6]

Dalam sejarah bangsa kita pun pernah dilaksanakan kebijakan pembauran agar kelompok minoritas Tionghoa hilang, lebur menjadi satu dengan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas Tionghoa selama 32 tahun mengalami aneka kebijakan pembauran: ganti nama, larangan memakai bahasa Tionghoa, larangan merayakan perayaan Tionghoa, dan larangan terhadap agama yang dianut orang Tionghoa. Peristiwa Mei 1998 membuktikan bahwa kebijakan Orde Baru itu terbukti gagal. Orang Tionghoa menjadi sasaran pembakaran, penjarahan, pemerkosaan dan banyak etnis Tionghoa yang lari menyelamatkan diri. Menurut laporan, 110.000 warga negara Indonesia keturunan Cina meninggalkan negeri ini (Leo Suryadinata, 1998). Mereka juga membawa modalnya yang diperkirakan berjumlah antara $30 dan $100 miliar. Dalam kasus ini nampak betapa rasa marah dan rasa iri yang berkembang berkali-kali meledak menjadi kerusuhan anti-Tionghoa, yang paling besar dan dahsyat adalah peristiwa Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 itu membuktikan kebijakan pembaruan gagal total. Dalam melihat kerusuhan rasialis di Indonesia itu, menurut Amy Chua, masalahnya bukan pada membaur atau tidak membaur. Kelompok minoritas Tionghoa adalah kelompok yang diberinya istilah *market-dominant minorities*, yaitu kelompok minoritas yang kaya-raya berkat sistem ekonomi pasar, seperti kasus menonjolnya/dominannya minoritas Tionghoa dalam perekonomian di Indonesia. Sejauh ini, sistem pasar pada zaman ini sudah menjadi semacam dogma yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, justru sistem yang dipuji-puji inilah yang melahirkan sekelompok kecil yang kebetulan adalah kelompok minoritas etnis yang memiliki kekayaan menonjol seperti dalam konteks di Indonesia, Philipina dan Thailand.

---

[6] Amy Chua, *World on Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability* (New Haven: Yale Law School, 2003).

Dalam kaitan ini, menjadi menarik bahwa belum lama ini mantan Perda-na Menteri Singapura Lee Kuan Yew menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia bersikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di kedua negara. Indonesia dan Malaysia juga dinilai Lee Kuan Yew ingin agar Singapura selalu mengalah seperti orang-orang Tionghoa di kedua negara tersebut. "Di Indonesia dan Malaysia orang-orang Tionghoa adalah pekerja keras dan orang-orang yang berhasil, namun mereka secara sistematis dipinggirkan (*marginalized*),'' kata Lee Kuan Yew.[7]

Pernyataan Lee itu mengundang reaksi dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, - yang kemudian melalui Deplu masing-masing, memanggil Dubes Singapura di kedua negara -, untuk meminta klarifikasi dan verifikasi atas statemen Lee yang sensitif tersebut. Perdana Menteri Malaysia Abdulah Badawi menyatakan tidak menerima permintaan maaf Lee Kuan Yew. "Saya tidak bisa menerima hal itu,'' kata Badawi.

Lee rupanya menyadari bahwa di Asia Tenggara, sebagaimana di seluruh dunia, hampir selalu ada *market-dominant minorities*. Di Asia Tenggara, etnis Tionghoa dicatat sebagai kelompok yang semacam itu, termasuk di Indonesia sendiri. Angka statistik yang sering dikutip adalah, tiga persen etnis Tionghoa menguasai 70 persen ekonomi Indonesia. Lepas dari kebenaran angka statistik ini, sesungguhnya ada kesan bahwa kelompok etnis Tionghoa Indonesia lebih kaya dan lebih makmur dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat oleh kehadiran konglomerat Tionghoa yang mengelilingi mantan Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Maka, kendatipun ada pengusaha pribumi yang sukses, mereka ini seakan-akan tidak terlihat.

Di negara-negara Asia Tenggara lainnya, sentimen anti-Tionghoa tidak meledak sesering di Indonesia, tetapi etnis Tionghoa yang

---

[7] *The Straits Times*, 16 September 2006

minoritas dan tetap memainkan peran sentral dalam ekonomi tetap menonjol. Ini berlaku di Malaysia, Philipina, Vietnam, Thailand, Kamboja dan Laos. Di Myanmar, yang masih diperintah oleh junta militer, golongan etnis Tionghoa merupakan mitra bisnis dan rekan kolaborasi yang tak terpisahkan dari jenderal-jenderal di Yangoon. Pada umumnya, kelompok etnis Tionghoa- yang dijuluki Yahudi dari Timur- mampu menarik keuntungan dari sistem ekonomi pasar yang kemudian menjelma menjadi globalisasi.

Di Asia Tenggara, minoritas Tionghoa amat berjaya di sektor perekonomian dan perdagangan, meskipun kaum bumiputera berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Sehingga akademisi Leo Suryadinata (1999) dan Kunio Yushihara (*Building A Prosperous Southeast Asia,* 1991) menyebut pengusaha Tionghoa perantauan (*the overseas Chinese)* itu merupakan penggerak perekonomian yang tak bisa diabaikan oleh siapapun elite yang berkuasa karena mereka memiliki jaringan bisnis regional dan inter-nasional yang berkembang semenjak lama, bahkan sejak era kolonial. Kenyataan ini berimplikasi politik maupun sosial-ekonomi, dan membuat minoritas Tionghoa sering mengalami dilema dalam hubungannya dengan kaum bumiputera di Asia Tenggara.[8]

Karena itu, pernyataan Lee Kuan Yew yang membela dan berempati kepada minoritas Tionghoa di Indonesia dan Malaysia yang dianggap Lee mengalami marginalisasi dan diskriminasi, selayaknya dibaca dan ditafsirkan pula sebagai kesulitan Singapura sekaligus mencerminkan *the Singaporean predicament* dalam menempatkan diri dan bergaul di tengah bangsa-bangsa multi etnik di Asia Tenggara yang dewasa ini secara ekonomi relatif tertinggal dari negeri Singa.

Di negeri Singa ini, kekayaan 18 ribu orang WNI (keturunan) mencapai Rp800 triliun (US$80 miliar), jumlah ini merupakan se-

---

[8] Lihat, Kunio Yushihara, *Building A Prosperous Southeast Asia,* (Oxford University Press, 1991)

pertiga aset 55 ribu orang terkaya di Singapura yang bernilai US$260 miliar. Arus uang dari Indonesia ke Singapura itu membuktikan bahwa Singapura merupakan negeri yang ditimbang paling aman-nyaman bagi kaum Tionghoa akibat trauma dengan kerusuhan rasial Mei 1998. "Singapura memiliki kebijakan terbuka untuk menarik imigran kaya seperti Indonesia," kata Tho Goa Hong, Market Director Merril Lynch, Global Private Client. Kriteria orang kaya yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki US$1 juta. Pertumbuhan orang kaya di Singapura akan mencapai 20-25 persen dalam beberapa tahun mendatang karena *good governance* yang baik.[9]

Kesuksesan Taipan Tionghoa di Asia Tenggara

Menurut Victor Simpao Limlingan, Doktor lulusan Harvard University, kesuksesan ekonomi etnis Tionghoa di Asia Tenggara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, sebagai golongan minoritas dan penduduk kota, profesi mereka sebagai pedagang sebelum mereka bermukim di Asia Tenggara, dan adanya tunjangan kapital besar dari luar negeri.

Mengenai hal ini, Leo Suryadinata berpendapat bahwa kedua faktor tersebut tidaklah benar, karena mereka awalnya bukan berasal dari kelas pedagang, melainkan dari kelas buruh dan petani. Kapital yang besar dari luar juga tidak betul, melainkan mereka hanya bermodalkan 'dengkul'. Dari kelemahan studi Limlingan dalam menjelaskan hubungan Konghucuisme dengan kemajuan ekonomi itu, nampaknya pen-dapat Peter L. Berger sebagaimana sering dirujuk Leo Suryadinata dapat menutup 'kelemahan' dari teori Limlingan.

Di Tiongkok, menurut Peter Berger, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena Konghucuisme yang dianut adalah Konghucuisme elite yang memiliki karakter menghambat terjadinya modernisasi negara. Sementara itu, Tionghoa perantauan *(overseas Chinese)* le-

[9] Laporan *Merril Lynch* dan *Reuters*, 10/10/2006.

bih banyak menerapkan Konghucuisme rakyat, yang bersikap positif terhadap kerja, pragmatis, disiplin dan kerja keras.

Semuanya lebih terkait dengan masalah keseharian dan kerja. Sebagai perantau yang menjadi wirausaha (*entrepreneurs*) menurut teori Schumpeter, mereka lebih berani mengambil resiko (*risk takers*), karena mereka memang tidak memiliki apa-apa dan ingin cepat memperoleh kesuksesan (kekayaan).

Leo Suryadinata tetap meragukan Konghucuisme Rakyat yang menyebabkan Tionghoa perantau sukses dalam bidang ekonomi. Menurutnya, sistem politik dan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara juga dapat menjadi hal yang penting bagi terbentuknya modal Tionghoa Perantauan yang kini dominan di kawasan Asia Tenggara ini. Kenyataan ini bisa dilihat dari keberhasilan para taipan Tionghoa di Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Thailand yang memiliki kekayaan miliaran dollar AS dan menjadi para kapitalis Asia yang disegani oleh Barat/Amerika.[10]

Berikut ini data kependudukan di negara-negara Asia Tenggara:

Kamboja	suku Khmer (94%), Tionghoa (4%), suku Vietnam (1%), lainnya (kebanyakan suku Cham) (1%)
Laos	Lao Daratan Rendah (56%), Lao Theung (34%), Lao Soung (10%)
Myanmar	suku Burma (68%), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine (4%), lainnya (termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya) (13%)
Thailand	suku Thai (75%), Tionghoa (14%), suku Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%)
Vietnam	suku Vietnam (88%), Tionghoa (4%), Thai (2%), lainnya (6%)
Brunei	Melayu (69%), Tionghoa (18%), suku pribumi Brunei (6%), lainnya (7%)
Philipina	Filipino (80%), Tionghoa (10%), Indo-Arya (5%), bangsa Eropa dan Amerika (2%), Arab (1%), lainnya (2%)

[10] Percakapan dengan Prof Leo Suryadinata, ISEAS Singapura, September 2005.

Indonesia	suku Jawa (45%), suku Sunda (14%), suku Madura (8%), lainnya (33%)
Malaysia	Melayu dan Orang Asli (60%), Tionghoa (30%), Tamil (6,4%), lainnya (2%)
Singapura	Tionghoa (76%), Melayu (15%), Indo-Arya (7%), lainnya (2%)

Wikipedia, dari berbagai sumber

Taipan China Perantauan di Indonesia dan Asia Tenggara

Sejarah Indonesia modern sejak zaman kolonial sampai era Orde Baru, bisa dikatakan sebagai sejarah keberlanjutan marginalisasi kalangan borjuis pribumi (Muslim). Pandangan ini umumnya bertolak dari perspektif Richard Robison (1978), bahwa pada era kolonial, kekuasaan Belanda mengamankan rumah-rumah perdagangan yang mereka kuasai.[11]

Lantas, kolonial Belanda juga menguasai perusahaan-perusahaan perbankan, perkebunan, perkapalan dan pertambangan, monopoli dalam perdagangan internasional serta investasi berskala besar. Sementara itu, para pedagang Tionghoa diposisikan sebagai perantara (*intermediaries*) bagi pasar domestik. Struktur seperti ini mengucilkan para borjuis pribumi Muslim, tanpa proteksi dari negara, terbatas pada perdagangan skala kecil dan produksi komoditi pedesaan dan kota kecil, yang tidak mampu bersaing dengan produksi orang-orang Tionghoa.

Struktur ekonomi serupa itu terus berlanjut di bawah kapitalisme negara pada masa Orde Lama, dan tetap bertahan di bawah birokrasi-militer dan kapitalisme-klien (*client capitalism*) pada masa Orde Baru, kecuali peran Belanda yang perlahan digantikan oleh kekuatan ekonomi asing lainnya.

[11] Richard Robison,"Toward A Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State", *Indonesia*, No.25 (April 1978), h.17-39. Salah satu ilmuwan sosial yang meminjam perspektif Robison itu adalah Yudi Latif. Lihat Yudi Latif, "Dari Nation Building Menuju State Building", *makalah*, Centre for Parliamentary & Presidential Studies (CPPS)-Universitas Paramadina, 2004.

Di era Orde Baru itu terdapat 10 konglomerat (taipan) etnis Tionghoa sebagai pengusaha terkaya di dunia. Menurut suatu kajian,[12] mereka adalah Liem Sioe Liong (Saling Group) dengan kekayaan US$4;6 miliar, Eka Tjipta Widjaja US$3,8 miliar, Keluarga Wonowidjojo US$3,0 miliar, Prajogo Pangestu US$2,0 miliar, Djuhar Sutanto US$1,8 miliar, Putra Sampurna US$1,7 miliar, Sjamsul Nursalim US$1,3 miliar, Sukanto Tanoto US$1,1 miliar, Mochtar Riady US$1,1 miliar, dan R Budi Hartono US$1,0 miliar.

Pada tahun 2012, sejumlah konglomerat (taipan) itu terus berkibar dan kekayaannya membesar. R. Budi Hartono, CEO Djarum Group kembali dianugerahi predikat sebagai orang terkaya di Indonesia di tahun 2012 ini oleh majalah Forbes. Kekayaannya mencapai 6.5 miliar dollar Amerika. Kekayaan ini banyak bersumber dari sahamnya di Bank Central Asia. Sebagai pemegang kuasa saham mayoritas dengan Group Djarum.

Posisi kedua ditempati oleh kakak kandung R. Budi, Michael Hartono, sebagai Co-Owner dari Djarum Group dengan kekayaan 6.3 miliar dollar Amerika. Pemilik Bayan Resources, Low Tuck Kwong berada di posisi ketiga daftar orang terkaya di Indonesia dengan total aset mencapai 3,6 miliar dolar disusul oleh Martua Sitorus dari Wilmar International yang memiliki harta senilai US$ 3 miliar. Sukanto Tanoto, bos Raja Garuda Mas melengkapi posisi lima besar orang terkaya di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaan US$ 2,8 miliar.

Posisi berikutnya dalam daftar Orang Terkaya di Indonesia diraih oleh pemilik Rajawali Group, Peter Sondakh dengan harta senilai 2,6 miliar dolar. Di bawah Peter Sondakh, Keluarga Achmad Hamami menempati posisi ketujuh dengan 2.2 miliar dolar dan disusul oleh Sri Prakash Lohia dari Indorama pada urutan kedelapan yang memiliki kekayaan senilai US$ 2 miliar. Bos CT Group, Chairul Tanjung berada pada posisi sembilan dengan keka-

[12] Baca Majalah "*Forbes*" edisi 17 Juli 1995

yaan yang sama seperti Sri Prakash Lohia dan Kiki Barki dari Harum Energi melengkapi daftar 10 besar Orang Terkaya di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai 1,7 miliar dolar Amerika.

Selain sepuluh orang tersebut, terdapat 7 orang lain yang masuk ke dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes 2012. Ketujuh orang tersebut adalah Murdaya Poo dari Central Cipta Murdaya dengan aset senilai US$ 1,5 miliar; Edwin Suryadjaya (Saratoga, Adaro) yang memiliki total kekayaan 1,4 miliar dolar; Tahir (Mayapada) dan pemilik MNC Group Harry Tanoesoedibjo dengan kekayaan masing-masing 1,3 miliar dolar; dua petinggi Adaro Garibaldi Thohir dan Theodore Rahmat yang masing-masing memiliki 1,2 miliar dan 1,1 miliar dolar serta bos Alfamart, Djoko Susanto dengan aset 1 miliar dolar Amerika yang menutup daftar tersebut.

Berdasarkan daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2012 seperti yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daftar tersebut masih diisi oleh muka-muka lama seperti Hartono bersaudara.

Sebagian dari konglomerat (taipan) itu mampu mengembangkan usahanya di luar negeri dan memiliki jaringan bisnis internasional yang kuat. Gordon Redding mencatat bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa hanya 2,1 persen dari populasi, namun mereka menguasai sekitar tiga perempat modal swasta dalam negeri. Peristiwa Tapos 4 Maret 1990, dimana Presiden Soeharto mengadakan temu muka dengan para pengusaha kapitalis Tionghoa yang memiliki asset ekonomi amat besar, yang bila disatukan kekayaan mereka mencapai Rp155 triliun, padahal produk domestik bruto Indonesia waktu itu hanya Rp156 triliun. Ekonom Frans Seda menggambarkan peristiwa ini sebagai pertemuan yang berhadap-hadapan antara pucuk pimpinan negara dan pucuk pimpinan konglomerat. Pada hemat saya, peristiwa ini merupakan sebuah teater terbuka di mata masyarakat luas, yang membawa konsekuensi semakin tumbuhnya kesadaran kritis pribumi,

termasuk Muslim, terhadap kapitalisme Tionghoa perantauan di Indonesia.

Keuletan pengusaha Tionghoa dalam membangun kerjasama, koneksi dan kolusi dengan penguasa Indonesia, merupakan salah satu kunci mengapa para kapitalis Tionghoa (taipan) perantauan di Indonesia itu bisa berkembang luas, pesat dan cepat. Selain itu, menurut penelitian Alexander Irwan, para pengusaha etnis Tionghoa juga mampu membangun jaringan bisnis dengan kapitalis asing, Jepang, misalnya. Mereka dengan erat menggandeng tangan perusahaan-perusahaan Jepang di Asia Timur dan Tenggara.[13]

Sementara itu, di era Orba, utang utang swasta dan negara mencapai sekitar US$150 miliar (swasta sekitar US$80 miliar dan negara sekitar US$70 miliar) dan ada beban BLBI (tumpukan utang) oleh para konglomerat Indonesia sekitar Rp600 triliun yang harus ditanggung rakyat. Yang mengejutkan, tetap saja sejumlah konglomerat berkibar kekayaannya, *go international* dan *go public* .

Dalam soal utang negara, sejauh ini suatu wacana palsu mengenai utang luar negeri masih disebarluaskan oleh aparat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa program-program yang didanai oleh Bank Dunia, misalnya, adalah bantuan atau hibah. Pemahaman inilah yang membuat masyarakat memandang program-program tersebut sebagai sebuah pemberian. Sehingga rakyat tidak tahu jika harus menanggung beban mengembalikan utang tersebut. Semen-

[13] Untuk uraian mengenai etnis Tionghoa ini, lihat Alexander Irwan, "Yang Ersatz dan Yang Regional", *Bisnis Indonesia*, 16 Juli 1995; Alexander Irwan, "Dominasi Pengusaha Etnis Cina di Asia Timur dan Tenggara", *Bisnis Indonesia*, 23 Juli 1995; Alexander Irwan, "Bisnis Jepang dan etnis Cina di Indonesia", *Bisnis Indonesia*, 2 Juli 1995; Kunio Yoshihara, *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia;* Olle Tornquist, "Rent Capi-talism, State and Democracy", dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), h. 29-49;. juga, Hewison, Robison and Rodan (Eds.), *Southeast Asia in the 1990s, Authoritarianism, Democracy and Capitalism* (Sydney: Allen and Unwin, 1993).

tara dalam soal utang swasta, rakyat juga harus membayarnya (*bail out)* seperti kasus BLBI Rp600 triliun itu menyusul kesepakatan pemerintah Orba Soeharto dengan IMF dan Bank Dunia ketika krisis moneter melanda kita tahun 1997-1998. Dengan kata lain, utang swasta dan negara menjadi beban rakyat yang kian miskin dewasa ini. Sungguh menjadi tantangan bagi kaum inteligensia, profesional dan *civil society* yang peduli, komit dan mencintai bangsanya untuk mengatasi problem besar tersebut.

Golongan Terkaya dan Isu Diskriminasi

Daftar orang terkaya 2006 di Indonesia versi majalah *Forbes Asia* cukup mengagetkan. Pasalnya, pemilik grup Raja Garuda Mas (RGM), Sukanto Tanoto, nama yang sering disebut-sebut sebagai salah satu 'debitor kakap' versi Bank Mandiri, ternyata menempati posisi pertama orang terkaya Indonesia. Di masa lalu, posisi puncak dalam daftar orang terkaya Indonesia versi *Forbes* selalu dihuni oleh Rachman Halim dari Gudang Garam, atau Liem Sioe Liong (Sudono Salim). Kemudian diikuti bos Djarum Kudus R. Budi Hartono, lantas Putera Sampoerna dan lain-lain. Dalam kontek Putera Sampoerna, setelah menjual hampir seluruh sahamnya di pabrik rokok Sampoerna dan anak-anak perusahaannya dan menerima dana tunai sekitar Rp 18 triliun, lalu Putera dinobatkan sebagai terkaya nomor satu di Indonesia. Artinya, pemeringkatan posisi para pengusaha top tersebut masih masuk akal. Sebab, perusahaan-perusahaan mereka tergolong tak hanya *survive*, bahkan bisa berkembang meski di tengah krisis. Kelompok Salim (yang dimiliki Liem Sioe Liong), misalnya, diberitakan akan menginvestasikan puluhan triliun rupiah dalam megaproyek di India. Tapi, menurut *Forbes tahun 2006*, Liem menduduki peringkat terbawah (nomor 10) dalam 10 besar orang terkaya Indonesia 2006. Kekayaannya hanya senilai 800 juta dolar AS. Nama-nama lain di daftar *Forbes* itu tergolong masuk akal kecuali Sukanto Tanoto. Menurut majalah bisnis itu, Sukanto memiliki kekayaan senilai 2,8 miliar dolar AS (sekitar 25,2 triliun). Hal ini

mengejutkan karena Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo saat jumpa pers 14 Juni 2006 menyatakan, RGM termasuk salah satu dari debitur kakap Bank Mandiri yang belum' melunasi utangnya yang mencapai total Rp 4 triliun.

Mengomentari prestasi Sukanto sebagai konglomerat Tionghoa perantauan dan menjadi orang terkaya versi *Forbes* itu, para pengamat sering melihat hal itu sebagai penghinaan terhadap institusi perbankan!. "Orangnya masih kesandung kredit macet, tapi dia dinobatkan jadi orang terkaya. Ini menghina sekali," kata analis saham Ferial Anwar dan pengamat perbankan nasional sekaligus Pemimpin Redaksi *Infobank*, Eko B. Supriyanto, Selasa (5/9/2006).

Mengenai pemeringkatan ala *Forbes* itu, dan Sukanto Tanoto tentu tak bisa disalahkan. Dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap dirinya menyangkut kasus kredit macet di Bank Mandiri maupun soal skandal Unibank yang membuatnya dinyatakan sebagai tersangka. Namun perlakuan hukum terhadap dirinya haruslah obyektif, fair dan wajar. Yang jelas, ada kemungkinan harta pribadi Sukanto memang besar. Sebab, meski seseorang tersangkut kredit macet, perangkat hukum di Indonesia memang memungkinkan harta pribadi tidak terjerat oleh persoalan utang perusahaan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), perusahaan boleh meminjam kredit berapa saja, tapi tidak ada pengawasan penggunaan kredit itu ketika masuk ke kepentingan pribadi. Meski kiprah Sukanto di perbankan juga kurang elok, dan Unibank, sebuah bank binaan RGM, mengalami kolaps, proses hukum terhadap dirinya haruslah tidak boleh ada diskriminasi dan harus tetap fair dan obyektif. Sejauh ini pertanggungjawaban Sukanto terhadap nasabah, begitu saja diserahkan ke pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Celakanya, perangkat perundang-undangan membuat obligor kakap *bin bandel* leluasa melarikan duitnya ke luar negeri dan bersembunyi di Singapura, negeri surga persembunyian favorit para borjuis hitam Indonesia. Hal ini tak lepas dari pemberlakuan rezim devisa bebas.

Sehingga orang begitu leluasa membawa kabur duit korupsi, duit hasil menjarah, duit hasil perjudian, duit kolusi-manipulasi, duit narkoba, tanpa kontrol.

Merespon hal ini analis Farial Anwar mengatakan, "Kita pun miris dengan fakta bahwa Indonesia sebagai negeri miskin, tetapi memiliki segelintir orang *super wah*." Pihak Sukanto Tanoto sendiri tampak risih mengomentari berita tersebut. "Kalau soal itu, kita tidak berkomentar karena harus ada penelitian yang mendalam," komentar Juru Bicara RGM Group, Satrio Hutomo, seperti dikutip situs *detik.com,* September 2006.

Satrio juga menambahkan bahwa Sukanto tidak pernah ditetapkan sebagai buronan oleh Mabes Polri. Jika saat ini Sukanto bermukim di Singapura, itu disebabkan karena kantor pusat RGM berada di sana. "Tapi Pak Sukanto sering bolak-balik ke Indonesia. Beliau memang tinggal di sana," tambah Satrio. RGM sendiri memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Singapura sejalan dengan minat kelompok usaha tersebut menembus pasar global. Sejauh ini, Tim Tipikor dan Polri sudah mengungkapkan bahwa Sukanto merupakan tersangka skandal Unibank.

Kiprah Taipan China Perantauan

Bagaimanakah kiprah konglomerat Tionghoa perantauan di Indonesia pasca Orde Baru Soeharto? Ternyata kian jaya. Konglomerat terkemuka Indonesia, Sudono Salim (Liem Sioe Liong, *boss* Salim Group) diberitakan menanamkan modal Rp30 triliun di India, sementara konglomerat Sukanto Tanoto menginvestasikan dananya di Brasil Rp 4 triliun. Di tengah keprihatinan dan kesulitan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-Kalla) merayu modal asing agar masuk ke Indonesia, kabar soal investasi Salim dan Sukanto di luar negeri itu, sungguh mencengangkan.

Namun demikian, tidak banyak publik domestik dan *civil society* yang peduli. Apakah langkah kedua konglomerat itu bisa dianggap *capital flight*? Terserah pembaca menafsirkannya. Namun

yang ingin penulis garis-bawahi adalah bahwa di era globalisasi modal bebas bergerak tak terkendali, dan siapa yang kuat maka bisa melangkah cepat dan pesat. Nasionalisme barangkali hanya menjadi ideologi kita, -- kaum intelektual dan *civil society* yang prihatin, tapi tak punya "modal ekonomi'' dalam skala Salim dan Sukanto tadi.

Ekspansi para konglomerat Tionghoa Indonesia ke dunia internasional sudah berjalan sejak lama. Pada era Orde Baru sampai era reformasi dewasa ini, sesungguhnya konglomerat Tionghoa perantauan adalah "penguasa rill'' jagad ekonomi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sinolog I. Wibowo (2004), secara gamblang menyatakan di hampir semua negara-negara ASEAN, pengusaha Tionghoa Perantauan (the *Overseas Chinese*) menguasai 70 persen kue ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat pada hampir semua bursa saham yang ada, 70 persen perusahaan yang listing adalah milik keturunan Tionghoa.

Taipan Asia Tenggara dan Perubahan di China

Sebagian taipan (konglomerat) Tionghoa Indonesia menanamkan investasi triliunan rupiah di negeri China. Selain mencari keuntungan, mereka juga ingin memelihara ikatan lahir-batin dengan tanah leluhur yang kini menjadi raksasa ekonomi dunia tersebut. Dan China (RRC) dalam dua dekade ini telah jauh berubah. Kenyataan itu melanda Asia.

Dulu Asia ketakutan terhadap ekspor ideologi komunisme China, tetapi kini, dalam kurun waktu yang relatif singkat semuanya berubah sejak Deng Xiaoping mengantar negerinya ke pusaran globalisasi. Dengan menciptakan slogan yang terkenal: Gaige, Kaifang (reformasi dan membuka diri). Semboyan itu pada akhirnya telah membuat China memasuki arus globalisasi dan menjadi determinan yang langsung diperhitungkan. Sekarang dunia ramai bicara kapitalisme China yang telah merambah hampir semua negara di dunia. Lihatlah data tahun 2004, China telah menjadi produsen barang-barang manufaktur yang sangat diperhitungkan.

Sejak 1990, China telah menjadi penghasil TV terbesar di dunia, penghasil semen terbesar di dunia, penghasil pupuk buatan dan baja tertinggi di dunia dan terakhir memantapkan diri sebagai penghasil barang-barang elektronik, komputer dan sepeda motor dengan pangsa pasar di atas 25 persen dari pasar dunia. Memang sudah saatnya kita banyak belajar dari China. Tidak kurang Amerika Serikat sudah mulai melihat China sebagai sesuatu kekuatan yang sangat diperhitungkan di jagat raya ini.

Mereka melihat China kini sebagai tantangan atau saingan dari Timur. China telah berubah. Beijing bergerak dari penghasil produk pertanian menjadi penghasil barang-barang manufaktur. Pada Tahun 1980, China masih mengandalkan 90 persen ekspor produk barang primer dan pertanian. Tetapi sejak tahun 1990, situasi telah terbalik, China memproduksi dan mengekspor 90 persen barang manufaktur dan sisanya 10 persen barang pertanian. Mata uang China telah sangat lama dianggap lebih kuat dari nilai kurs yang ditetapkan. Mata uang Yuan yang kuat dipertahankan pada posisinya agar seluruh produk manufakturnya lebih kompetitif, lebih murah.

Akan tetapi, meminjam perspektif mendiang Lie Tek Tjeng, masih ada kecurigaan di kalangan Tionghoa Asia Tenggara bahwa Barat terus meniup-niupkan isu "ancaman kulit kuning" (*the yellow menace*) di kawasan Asia Tenggara, bahwa Barat terus mempertahankan kecurigaan Asia Tenggara terhadap RRC maupun orang-orang etnik Cina. Seandainya terjalin hubungan serasi antara RRC dan Asia Tenggara, maka dalam pandangan etnis Tionghoa di Asia Tenggara, peranan Barat di Asia akan surut dan ini tidak mereka inginkan. Lagipula hubungan harmonis antara penduduk pribumi Asia Tenggara dan warga etnik Cina mereka akan mengurangi --kalau tidak mengeliminasi-- peranan orang kulit putih (Barat) di Asia Tenggara. Pihak Barat mau mengurangi ketegangan-tegangan rasial di Asia Tenggara jika ini menghambat perkembangan ekonomi yang menguntungkan mereka, tetapi mereka ti-

dak mau memberantas rasialisme jika ini akan mengurangi – bahkan mengeliminasi - kehadiran dan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Adalah kenyataan bahwa orang pribumi dan orang etnis Cina di Asia Tenggara lebih percaya orang kulit putih (Barat) daripada satu sama lain.

Di tengah pertumbuhan ekonomi China yang membuncah, para konglomerat Tionghoa perantauan di Indonesia dan Asia Tenggara jelas makin memiliki banyak kesempatan dan peluang untuk mengembangkan bisnis mereka di pasar global. Di dalam situasi demikian, jelas konglomerat Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara makin leluasa bergerak mengembangkan apa yang disebut sinolog Leo Suryadinata sebagai MNcs Tionghoa (*multi national corporations* Tionghoa).[14]

Diversifikasi usaha MNCs Tionghoa ini sudah sedemikian jauh, mencakup sektor industri semen, penerbangan, terigu, *pulp*, ekspor-impor, perbankan dan keuangan, agribisnis, pertambangan, kehutanan, manufaktur dan kelautan. Dari merekalah tumbuh MNCs yang sanggup menandingi MNCs Barat di Asia Tenggara. Sehingga jelaslah, hal itu membuktikan konglomerasi era Orde Baru masih berfungsi dan tidak lenyap oleh terjangan krisis ekonomi. Mereka mungkin sudah mendapatkan jaringan nasional dan internasional baru, serta memiliki *'backing/ patronase baru'* pasca Soeharto. Mereka berkembang secara bisnis dan kultural di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Sejarah era reformasi sudah tentu menunggu cerita seru ini.

KONKLUSI

Orang Kaya di Asia dan Indonesia

Kawasan Asia masih jadi surga bagi profesional dan pekerja keras untuk bisa menjadi orang kaya raya. Pada 2008, jumlah miliuner

[14] Percakapan dengan Prof Leo Suryadinata, di ISEAS Singapura, September 2005.

dari Asia diperkirakan melonjak lagi, meski angkanya belum pasti. Sosok orang kaya di Indonesia, misalnya, telah diungkap berbagai media seperti Forbes Asia, Swa, Tempo, Globe, dan Warta Ekonomi.

Asia mencatat, jumlah orang kayanya melonjak lebih dari 30 persen pada akhir 2007. Sejumlah taipan dari India dan Tiongkok menempati urutan puncak daftar 1.125 miliuner di seluruh dunia dengan total kekayaan US$4,4 triliun. Tahun sebelumnya, Forbes juga mencatat jumlah miliuner baru 946 orang dengan total kekayaan US$ 3,5 triliun.[15]

Tercatat, sedikitnya 211 miliuner berasal dari Asia, meningkat dari 160 orang pada 2007. Sekitar 53 miliuner berasal dari India, meningkat dari 36 orang pada 2007. Sementara itu, miliuner dari Tiongkok melonjak dari 20 orang pada 2007 menjadi 42 orang pada 2008.

Miliuner asal Hongkong bertambah 5 orang, menjadi 26. Jika digabungkan dengan Beijing, jumlah miliuner asal Tiongkok menjadi yang terbanyak.

Jepang, yang pernah berada di puncak selama 20 tahun, mencatatkan hasil yang kontras dengan hanya menempatkan 24 taipan dalam daftar. Tidak berubah dibanding 2007 atau turun dari 27 orang pada 2006.

Kami melihat tren yang menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin beberapa tahun di belakang Amerika Serikat (AS), kata Editor Senior Forbes Luisa Kroll.

India menempati urutan ketiga dalam jumlah miliuner, setelah AS yang memimpin dengan 469 miliuner, meningkat dari 415 miliuner pada 2007. Sementara itu, Rusia mencatat 87 miliuner.

Empat miliuner India yang berada pada 10 besar, antara lain, raksasa industri baja Lakshmi Mittal di posisi keempat dengan keka-

[15] *Jawa Pos*, 11 Maret 2008.

yaan US$ 45 miliar, diikuti taipan petro kimia Mukesh Ambani dengan kekayaan US$ 43 miliar serta saudaranya, Anil Ambani, dengan kekayaan US$ 42 miliar. Pemilik properti KP Singh berada di urutan kedelapan dengan kekayaan US$ 30 miliar.

Korea Selatan 12 miliuner dan Malaysia delapan. Taiwan menempatkan tujuh miliuner, Indonesia dan Singapura masing-masing lima miliuner, Thailand tiga orang, dan Philipina dua orang.

Tanggung Jawab Sosial

Keberadaan orang kaya raya di Indonesia yang dibeberkan Forbes Asia dari tahun ke tahun diharapkan memberi multiplier efek sekaligus mesin penggerak perekonomian nasional. Syaratnya, meminjam perspektif Indonesianis dari Australia Prof J.A.C. Mackie, mereka harus serius menjalankan tanggung jawab sosial untuk membangun kesejahteraan sosial dan menumbuhkan wirausaha muda, bukan sebaliknya.

Selama ini, ungkap Mackie, orang kaya di Indonesia terkesan eksklusif. Hanya mereka yang berada di lingkaran dalamlah yang bisa ikut tumbuh bersama dalam bisnis gaya konglomerasi itu.

Kini sudah 10 tahun reformasi dan sudah selayaknya kalangan berduit itu ikut mendorong tumbuhnya pengusaha baru untuk berperan dalam kancah bisnisnya.

Bila Anthony Salim, Syamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, Ciputra, Sudhamek, Aburizal Bakrie, Chaerul Tanjung, Arifin Panigoro, dan lain-lain mampu menumbuhkan wirausaha muda dan memberdayakan masyarakat yang lemah, tentu nama mereka akan sangat terpatri dan berwibawa di mata masyarakat.

Artinya, mereka tetap berkomitmen pada urusan keadilan sosial dan kepentingan bangsa. Semestinya tanggung jawab sosial dan moral itu mereka optimalkan.

Para analis dan inteligensia sering menuding orang kaya era Orde Baru cenderung *rent seeking* dan tidak kreatif. Indonesianis dari

Jepang Kunio Yoshihara (Toward A Prosperous Asia, 2000) menyatakan, kaum kaya (konglomerat) Indonesia itu telah membebani rakyat dengan skandal BLBI Rp 650 triliun, suatu kejahatan finansial terbesar di Dunia Ketiga dalam sejarah dunia modern pasca Perang Dunia II, yang tak ada bandingannya.

Orang-orang kaya tersebut bukan pebisnis yang merangkak dari bawah. Mereka dianggap cuma jago kandang dan punya hubungan baik dengan penyandang dana di luar negeri, tapi tak punya pondasi industri yang kukuh.

Kita ingin kebangkitan orang-orang kaya di Indonesia akan membawa berkah - bukan kutuk - bagi kehidupan kaum bawah agar bisa mendaki ke tingkat yang lebih baik.

Investasi kaum kaya itu seharusnya diperkuat untuk menciptakan lapangan kerja. Orang kaya harus bermakna bagi kaum papa. Sebab, tanah air ini milik semua warga dan tanggung jawab sosial orang kaya tentu lebih berat karenanya.

Pertanyaannya, kata Richard Robison, apakah golongan kaya yang merupakan bablasan oligarki Orde Baru itu masih memiliki hati nurani, moralitas, dan komitmen sosial? Sejarah kadang berbicara lain dan acap kita merasa ngilu dan nyeri jika merindukan hal-hal baik semacam itu, apalagi modal kapitalis memiliki logikanya sendiri. Cenderung kian jauh dari hati nurani dan komitmen sosial. Itulah masalah dan tantangan bagi orang-orang kaya di Indonesia, yang mayoritas rakyat masih memelihara ilusi atas kepedulian mereka.(*)

KUASA & KEPEMIMPINAN DI ASIA TENGGARA: SOEHARTO, LEE KUAN YEW DAN MAHATHIR MOHAMAD [1]

Presiden Soeharto adalah pemimpin besar Republik Indonesia, sebagaimana almarhum Presiden Soekarno. Setiap pemimpin besar, kata orang bijak, umumnya meninggalkan masalah besar. Itulah sejarah.

Profesor Nurcholish Madjid menyatakan bahwa sebagai Bapak Bangsa, Soekarno dan Soeharto secara obyektif harus dilihat kelebihan dan kekurangannya, plus-minusnya, tidak boleh hanya kelemahan dan kekurangannya saja. Demikian halnya Pemimpin Singapura Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad, Pemimpin Malaysia.

Nurcholish Madjid, cendekiawan Muslim kesohor yang sulit dicari bandingannya di Indonesia, dengan reputasi internasionalnya yang luar biasa, dalam berbagai ceramah dan kulahnya di Paramadina, telah meletakkan dasar-dasar pemikiran dalam melihat Indonesia dan para pemimpinnya secara obyektif, empiris dan epistemis, serta dibuat bandingannya dengan kepemimpinan di Malaysia dan Singapura.

Telaah epistemis ini berusaha keras melacak, meneliti dan menganalisis kepemimpinan tiga tokoh besar di Asia Tenggara itu untuk anak-anak bangsa agar bisa belajar dari pendahulu mereka.

***

Masih belum berakhir kontroversi masyarakat Asia Tenggara akan tiga pemimpin —yang pernah sukses membangun rakyat-

[1] Risalah ini ditulis bersama oleh Herdi Sahrasad dan Al Chaidar, pengamat terorisme dan politik serta dosen Fisip Universitas Malikussaleh Aceh yang juga Direktur Centre for Terrorism and Strategic Studies, University of Indonesia. Penulis berterimakasih kepada Al Chaidar yang kini mahasiswa pasca sarjana Antropologi UI atas bantuan, kritik dan diskusinya untuk risalah ini.

nya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang spektakuler[2]— yaitu Soeharto dari Indonesia, Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad dari Malaysia. Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir adalah tiga tokoh yang menerapkan demokrasi dengan corak yang kontroversial demi melaksanakan rencana dan program pembangunan ekonomi. Hanya dalam beberapa dekade pemerintahan mereka, masyarakat Indonesia, Singapura dan Malaysia telah mengalami transformasi radikal dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.[3] Sebagai konsekuensinya, Indonesia, Singapura dan Malaysia tidak dapat menghindari harus kehilangan kebebasan untuk menguji ideologi-ideologi lain karena program modernisasi yang dicanangkan bersifat monolitik, pragmatis, *program oriented*, dan menerapkan pola stabilitas keamanan yang ultra ketat. Namun, ada konsekuensi positif yang dihasilkan oleh kedua pemimpin ini: Soeharto dan Mahathir berhasil membawa Indonesia dan Malaysia menuju *New Industrializing Countries* (NICs) yang mencengangkan. Bahkan Lee Kuan Yew, bukan hanya berhasil membawa Singapura menjadi *New Industrializing Economies* (NIEs), ia juga berhasil "memindahkan" posisi Singapura dari Dunia Ketiga ke Pertama.

Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir adalah tiga tokoh Asia yang mewakili Dunia Ketiga yang memiliki banyak persamaan —

---

[2] Begitu spektakulernya keberhasilan program ekonomi kedua tokoh ini dapat dilihat dalam deskripsi sejarah, yang untuk kasus Indonesia, dalam John Bresnan, *Managing Indonesia: The Modern Political Economy* (New York: Columbia University, 1993). Untuk kasus Singapura, lihat Lee Kuan Yew, *From Third World to First, The Singapore Story (1965-2000): Memoirs of Lee Kuan Yew* (Singapore: Singapore Press Holdings, 2000). Untuk kasus Malaysia, lihat Mahathir Mohamad, *Jalan Ke Puncak* (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications, 1999).

[3] Tentang transformasi yang dahsyat yang dilakukan oleh Soeharto, lihat Hal Hill, "The Economy", dalam Hal Hill (ed.), *Indonesia's New Order: The Dynamic of Socio-Economic Transformation* (New South Wales: Allen and Unwin, 1994), h. 54-114. Untuk Singapura di bawah Lee Kuan Yew, lihat Richard Robison, (ed.), *Pathways to Asia: The Politics of Engagement* (Sydney: Allen and Unwin, 1996), h. 92. Untuk kasus Malaysia di bawah Mahathir, lihat Peter Searle, *The Riddle of Malaysian Capitalism: Rent Seekers or Real Capitalists?* (Honolulu dan New South Wales: University of Hawai'i Press, Asian Studies Association of Australia dan Allen and Unwin, 1999).

di samping beberapa perbedaan— yang menarik untuk ditelaah. Sebagaimana akan dibahas di dalam kerangka acuan ini, tiga tokoh ini masing-masing adalah pembangun negaranya sendiri dengan sikap yang "hati-hati mendekati demokrasi."

Dengan sikap ini berarti bahwa ketiga tokoh ini berusaha menjauh sementara dari demokrasi, atau dapat juga disebutkan bahwa tiga tokoh ini terlihat sangat "mencurigai" demokrasi sebagai konsep eksternal yang dipraktekkan secara luas oleh komunitas internasional dan mendekatinya dari sisi yang sama: menggunakan regimentasi untuk mengukuhkan institusi demokrasi namun tanpa nilai-nilai kebebasan berpendapat,[4] tanpa pengakuan yuridis penuh terhadap hak-hak asasi manusia[5] dan tidak memberikan kesempatan tum-buhnya otonomi bagi daerah-daerah periferal.[6]

Untuk menilai secara lebih jelas peran Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir dalam pembangunan ekonomi, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah pembangunan ekonomi modern Indonesia, Singapura dan Malaysia.

---

[4] Yang dimaksud dengan 'tanpa kebebasan berpendapat' di sini kurang lebih sama dengan "dominasi wacana", atau "hegemoni makna" dalam bahasa Taufik Abdullah untuk melihat fenomena sosialisasi wajib Pancasila melalui P4 di Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya khas Asia Tenggara; artinya, fenomena ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunai dan bahkan Myanmar, lihat majalah *Ummat,* No. 8 Thn. 1, 16 Oktober 1995, h. 40.

[5] Tentang keadaan hak-hak asasi manusia di Indonesia dan Malaysia yang dinilai negatif oleh banyak kalangan, lihat misalnya Amnesty International, *Indonesia* (London: Amnesty International Publication, 1977). Untuk kasus Singapura, lihat Amnesty International, *Report of Mission to Singapore 1978,* (London: Amnesty, 1980). Untuk kasus Malaysia di bawah Mahathir, lihat R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, *Malaysian Politics Under Mahathir* (London dan New York: Routledge, 1999), h. 103-121.

[6] Tentang dominasi pusat terhadap daerah, lihat Benedict R.O'G Anderson, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective", dalam bukunya, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

INDONESIA, SOEHARTO DAN ORDE BARU

Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana sejarah politik-ekonomi Indonesia. Dan, karena sangat luasnya cakupan sejarah modern Indonesia,[7] maka untuk kebutuhan studi ini, hanya sejarah ekonomi pada masa Orde Baru saja yang menjadi fokus perhatian mendalam studi ekonomi-politik tentang Soeharto. Studi ini akan melihat struktur (*structure*), kebijakan dan perencanaan (*policy and planning*), dan kinerja (*performance*) ekonomi Orde Baru di bawah Soeharto.

Berbeda dengan ekonomi kolonial yang terbelah antara sektor modern dan sektor tradisional,[8] dan di mana Pemerintah Kolonial Belanda hanya melihat Indonesia tidak lebih hanya sebagai sumber bahan mentah murah dan berlimpah untuk kebutuhan industri di Belanda, dan pola ini terus berlangsung hingga dasawarsa 1950-an, maka pembangunan ekonomi Indonesia boleh dikatakan baru dimulai pada dasawarsa 1960-an.[9]

Baru setelah tahun 1960-an dan terutama pada masa Soehartolah industrialisasi dilakukan dengan luas dan gempita dengan pembukaan pintu bagi partisipasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).[10]

---

[7] Sejarah ekonomi modern Indonesia sudah dimulai semenjak abad ke-13. Lihat M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the present* (London: Macmillan, 1981).

[8] Untuk sekedar pengantar memahami sejarah ekonomi Indonesia masa kolonial, lihat J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study in Plural Economy* (Massachusett: Cambridge University Press, 1939). Dan juga J.H. Boeke, *Economics and Economy Policy of Dual Societies*, (Haarlem, 1953).

[9] Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, "Pengantar", dalam J. Thomas Linblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia: Berbagai Tantangan Baru,* (terj.), (Jakarta: LP3ES, 2000), h. xvii.

[10]. Dengan adanya PMA dan PMDN ini, maka surplus yang rata-rata sekitar 75% di atas impor, atau sekitar 12,4% dari PDB yang pada masa kolonial dikirim kembali ke Belanda, menjadi pemasukan bagi ekonomi Indonesia. Lihat H.W. Dick, "Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang hilang", dalam Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan baru* (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 160-176.

Kebijakan ekonomi (*economic policy*) Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah kolonial Belanda membentuk Departemen Urusan Ekonomi di Hindia Belanda pada 1934,[11] tapi tidak dimaksudkan untuk perumusan kebijakan — apalagi perencanaan — ekonomi.

Hanya di bawah Soeharto perencanaan ekonomi serius dilakukan yang bukan hanya untuk sekedar menghadapi krisis di masa Orde Lama, tapi lebih kepada upaya penyempurnaan kebijakan (perencanaan dan program) ekonomi.[12]

Sebagaimana ditunjukkan oleh Lindblad,[13] kebijakan ekonomi (khususnya kebijakan industri dan pembangunan) untuk meningkatkan daya-beli (*purchasing power*) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terfokus di Jawa.[14] Wilayah Luar Jawa, meski baru diperhatikan pada akhir masa kekuasaan Soeharto, kurang menampakkan adanya keterkaitan antara perubahan demografis dengan kapasitas ekspornya.[15] Artinya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda.

Namun, bagaimanapun sejarah ekonomi Indonesia sudah memperlihatkan bahwa ekonomi yang dulu muncul karena eksploitasi berkepanjangan imperialisme Belanda, lalu karena upaya mobilisasi logistik perang Tentara Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, selanjutnya karena Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang disusul periode pergolakan politik 1949-1966 di mana modal

---

[11] G.H.A. Prince, "Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942", dalam Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia..*, h. 216-226.

[12] Kuntjoro-Jakti, "Pengantar", dalam Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*…, h. xvii.

[13] J. Thomas Lindblad, "Pertumbuhan Ekonomi di Luar-Jawa", dalam Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia …,* h. 333-369.

[14] Kuntjoro-Jakti, "Pengantar", dalam Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*…, h. xviii.

[15] Kuntjoro-Jakti, "Pengantar", dalam Lindblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*…, h. xvii.

swasta domestik (*domestic private capital*) gagal terbentuk[16] meski telah mendapatkan sejumlah konsesi dari nasionalisasi perusahaan asing, maka praktis hanya sejak Pelita I (1969-1974) Indonesia mulai mengalami stabilitas ekonomi[17] dan mengupayakan adanya pembangunan yang digerakkan oleh dan untuk kepentingan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. Maka modernisasi pun terjadi di segala bidang dan transformasi masyarakat dari yang agraris ke masyarakat industrial pun terwujud di bawah komando Soeharto.

Pembangunan yang semula mengandalkan modal asing, oleh Soeharto mulai digeser dengan kebijakan-kebijakan kolusif, proteksi yang berlebihan dan nepotis yang hendak memunculkan kaum pemodal domestik yang kuat[18] dari kalangan militer, keluarga Cendana, kelompok Astra, kelompok Liem, kelompok Soedarpo, kelompok Sultan Hamengku Buwono, dan kelompok Sutowo.[19] Akibatnya, muncul benih-benih kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan Soeharto, selain korupsi yang sudah sejak awal sulit diberantas.

Beberapa faktor utama yang bersifat politik inilah, selain ada beberapa faktor tambahan lainnya,[20] yang menjadi penyebab munculnya krisis ekonomi Indonesia pada 1997 yang parah (*deep crisis*)

---

[16] Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen and Unwin, 1986), h. 36-68.

[17] Lihat Anne Booth dan Peter McCawley, (ed), *Ekonomi Orde Baru,* (terj.) (Jakarta: LP3ES, 1982), h. viii.

[18] Jean Aden, "Entrepreneurship and Protection in the Indonesia Oil Service Industry" dan juga Richard Robison, "Industrialization and the Economic and Political Development of Capital: The Case of Indonesia", dalam Ruth McVey, (ed.), *Southeast Asian Capitalists,* (New York: Cornell University SEAP, 1992), h. 89-102 dan h. 65-88.

[19] Robison, *Indonesia: The Rise of Capital…,* h. 278-352.

[20] Faktor IMF (International Monetary Fund) adalah salah satu faktor pemicu yang menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia di bawah Soeharto. Lihat Nicola Bullard, Walden Bello dan Kamal Malhotra, "Taming the Tigers: The IMF and the Asian Crisis", dalam Jomo K. Sundaram, (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia,* (London: Zed Books, 1998), h. 85-132.

setelah Indonesia mencapai beberapa dekade pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pengurangan kemiskinan.[21]

Dalam perkembangannya, Indonesia sempat sulit keluar dari krisis ekonomi di Asia yang dimulai terjadi pada tahun 1997. Indonesia, bersama Korea Selatan dan Thailand, menurut data resmi IMF, mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar di mana tingkat GDP masing-masing negara (Indonesia, Thailand, Korea Selatan) pada tahun 1998 mengalami penurunan GDP sebesar -14,1%, -10,8% dan -6,7%. Thailand dan Korsel telah berhasil keluar dari krisis ekonomi, sedangkan Indonesia masih tetap terpuruk, mencemaskan dan diliputi ketidakpastian, suatu hal yang dikhawatirkan mengancam transisi dari otoriterianisme menuju demokrasi.

Krisis ekonomi Asia yang menggilas Indonesia terjadi tahun 1997, diawali dengan adanya tekanan dari spekulator intemasional terhadap mata uang Bath Thailand sehingga menjadi 28.8 per US$ pada masa Juni- Juli 1997. Akibatnya pemerintahan Thailand yang dipimpin PM Chavalit Yongchaiyuth pada waktu itu harus meminta bantuan kepada IMF dan pada akhimya mendapat dana bantuan sebesar US$17 miliar.

Dampak dari perekonomian Thailand yang mengalami "demam" ini adalah tertulamya negara-negara tetangga oleh "virus" resesi ekonomi, salah satunya adalah Indonesia. Pada tanggal 13 Agustus 1997 dengan dilepasnya pembatas perdagangan mata uang, maka nilai rupiah semakin lama semakin tidak terkendali dan tak terkontrol oleh pemerintah Orde Baru Soeharto.

[21] Lihat Hal Hill, *The Indonesian Economy in Crisis*: *Causes, Consequences and Lessons,* (Singapore: ISEAS, 1999). Juga Mohammad Sadli, "The Indonesian Crisis", dan Andrew McIntyre, "Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia", dalam H.W. Arndt & Hal Hill (eds.), *Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons and the Way Forward,* (Singapore: ISEAS, 1999), h. 16-27 dan h. 142-157.

Hal ini menyebabkan nilai rupiah menjadi lemah terhadap dollar AS, dari Rp2000/dollar AS pada 1997 terus melemah dan merosot sampai menjadi Rpl7.000/dollar AS pada 1998. Di balik krisis moneter ini, ternyata menurut mantan anggota DPR, Dr Sri Bintang Pamungkas dan Ir Bambang Warih Kusuma, ada sekitar 2000 orang warga negara Indonesia yang mestinya bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kejahatan mereka, baik itu yang bersalah dan jahat sebagai elite pejabat/birokrat (sipil-militer), pengambil keputusan, pimpinan Bank Indonesia dan para direksi bank pemerintah/swasta maupun para pengusaha/konglomerat yang bermasalah akibat utang miliaran rupiah sampai triliunan rupiah yang diselewengkan atau macet, yang terjadi di era Orde Baru Soeharto maupun era transisi BJ Habibie. Dan sampai sejauh ini, mereka sebagian besar tak tersentuh oleh pengadilan atau hukum meskipun telah menyengsarakan rakyat banyak, bangsa dan negara akibat kesalahan dan kejahatan mereka. Kemerosotan moneter ini ditambah lagi dengan adanya beberapa faktor yang memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.

Pertama, para spekulan terpacu dengan ambruknya nilai tukar Baht Thailand untuk mencoba memperoleh keuntungan dengan melakukan spekulasi pada mata uang Rupiah.

Kedua, itikad pemerintahan Soeharto pada waktu itu untuk melakukan perbaikan struktural perekonomian Indonesia tidak ada. Bahkan ada kecenderungan untuk berusaha melindungi kerajaan bisnis anak-anak maupun kroninya. Hal ini dapat dilihat pada kasus penutupan Bank Andromeda milik Bambang Trihatmodjo, putra Presiden Soeharto, sebagai bagian dari kesepakatan untuk menutup 16 bank agar dapat memperoleh bantuan IMF sebesar US$ 23 Miliar. Namun setelah 16 bank itu ditutup, tiba-tiba pemerintah memberi izin kepada Bambang Trihatmodjo dan koleganya itu untuk mendirikan Bank dengan nama baru, tetapi tetap menggunakan infrastruktur Bank Andromeda. Melihat sikap keras kepala Presiden Soeharto ini, IMF bertindak lebih tegas

dengan mengajukan syarat-syarat yang lebih ketat pada *Letter of lntent (LOI)* kedua pada tanggal 5 Januari 1998.[22]

Dan yang *ketiga,* adalah situasi politik dalam negeri yang terus menerus memanas terutama akibat gerakan mahasiswa dan *civil society* yang telah menyebar dari Jakarta hingga kota-kota besar di luar pulau Jawa. Puncaknya adalah pada saat terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 yang memicu amuk massa, yang keesokan harinya memicu kerusuhan massal yang melumpuhkan segala kegiatan sosial-ekonomi di Jakarta. Setelah Presiden Soeharto didemonstrasi kaum mahasiswa secara besar-besaran dalam gerakan "Revolusi Mei 1998", ia juga "dikhianati" oleh 14 Menterinya dan tidak mendapat dukungan ABRI. Akibatnya, orang terkuat Orba itu tidak mempunyai pilihan kecuali menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, dengan meninggalkan warisan utang luar negeri yang menggunung, perburuan harta karun dan perburuan manusia oleh manusia atas nama negara, agama dan kekuasaan dengan ribuan korban yang tewas atau cacat-luka.

Indonesia kemudian terpuruk dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, sementara Singapura dan Malaysia (juga negara-negara Asia Tenggara lainnya), yang walaupun mengalami krisis ekonomi yang hampir sama dengan yang dialami Indonesia, namun Singapura dan Malaysia masih bisa bangkit dan keluar dari krisis.

PEMBANGUNAN POLITIK-EKONOMI SINGAPURA

Untuk melihat bagaimana Singapura keluar dari krisis ekonomi 1997, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah (ekonomi) 'bangsa etnik China Perantauan' yang mendiami sebuah pulau kecil di

---

[22] Vishnu Juwono, "Abdurrahman Wahid dan Agenda Pasca SI-MPR", opini, *Kompas*, 19 Juni 2001.

ujung timur Semenanjung Malaya.[23] Sejarah ekonomi Singapura adalah sejarah sebuah bangsa yang reluktan, ia senantiasa dibayangi oleh kecemasan akan masa depan. Merdeka karena dikeluarkan dari Malaysia pada 9 Agustus 1965,[24] Singapura merasa cemas dan bermodalkan 'rasa cemas' inilah justeru negara ini mulai bangkit dan melakukan pembangunan dengan serius dan hati-hati. Ekonomi yang dibangunnya pun adalah ekonomi yang penuh dengan keengganan yang dimanajemen oleh People's Action Party (PAP),[25] sebuah partai tunggal yang dominan.[26] Bangsa ini tumbuh dengan cara bertahan (*the politics of survival*) dari berbagai pengaruh negara-negara tetangganya yang memiliki banyak lahan dan sumber daya yang tertanam di dalamnya.[27]

Singapura memulai pembangunan ekonominya dengan transformasi penduduk ke mentalitas disiplin kerja industrial.[28] Artinya, pembangunan ekonomi ini dilakukan dengan proses *culturalisation of economiy and politics;* bahwa tanpa nilai tambah dan kompetisi, negara pulau ini akan hancur.[29] Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sejak 1959, kondisi inilah yang mengkristalkan ideologi tentang 'survival' yang kemudian oleh PAP disederhanakan menjadi pembangunan ekonomi. Singapura tumbuh sebagai bangsa yang mementingkan konsensus. Identik de-

---

[23] Tentang struktur sosial Singapura yang terdiri dari 77% etnik China, lihat Jamie Mackie, "Changing Patterns of Chinese Big Business in Southeast Asia", dalam Ruth McVey, (ed.), *Southeast Asian Capitalists*, (Cornell: SEAP, 1992), h. 161-190.

[24] Lihat N. Barber, *The Singapore Story* (Glasgow: Fontana, 1978).

[25] Lihat T.J. Bellows, *The People's Action Party of Singapore*, (Yale University: Southeast Asian Studies No. 4, 1970), h. 54.

[26] Chan Heng Chee, *The Dynamic of One Party Dominance* (Singapore: NUS Press, 1976), h. 6.

[27] Chan Heng Chee, *Singapore: The Politics of Survival* (Singapore: Oxford University Press, 1971), h. 2.

[28] Chua Beng Huat, "Culturalisation of economy and politics in Singapore", dalam Richard Robison, (ed.), *Pathways to Asia: The Politics of Engagement*, (Sydney: Allen and Unwin, 1996), h. 92.

[29] Chua Beng Huat, "Culturalisation of economy and politics in Singapore", h. 93.

ngan Indonesia, Singapura mengembangkan ideologi *shared values* yang mementingkan bangsa di atas komunitas dan masyarakat di atas pribadi; keluarga sebagai dasar bagi masyarakat; dukungan masyarakat bagi setiap pribadi; konsensus dan menghindari konflik sebagai dasar pengambilan keputusan dan menekankan harmoni antar ras dan agama.[30] Barulah setelah semua sistem dasar politik diterapkan, ekonomi pasar yang berorientasi nilai lebih, *competitiveness*, ekspor manufaktur dan sektor industri lainnya mulai dikembangkan.[31] Hasilnya adalah sebuah ekonomi yang sudah bergerak jauh, tidak lagi sekedar bertahan (*survival*) melainkan sudah menjadi satu macan Asia yang disegani dalam bidang ekonomi.[32] Di bawa Lee Kuan Yew juga Singapore identik dengan pertumbuhan ekonomi, di samping kontrol politik yang cerdik profesional (*skillful political control*).[33]

Sebuah republik kecil seperti Singapura, ekonomi menjadi satu-satunya alat untuk bertahan. Berbekal US$ 20 juta hasil alam, utamanya karet, Singapore memulai perdagangan internasionalnya di tahun 1961 untuk menghidupi rakyatnya.[34] Kemudian Singapore menjual barang-barang manufaktur senilai S$ 120 juta.[35] Maka, Singapura mulai menjadi negara yang atraktif sebagai tempat penanaman modal yang dimulai dari angka S$ 44 juta oleh swasta Amerika Serikat.[36] Selain itu, penerimaan Singapura dari pela-

---

[30] Chua Beng Huat, "Culturalisation of economy and politics in Singapore", h. 94.

[31] John Drysdale, *Singapore: Struggle for Success* (Singapore: Times Books International, 1984).

[32] Lihat Dennis Bloodworth, *The Tiger and The Trojan Horse* (Singapore: Times International Press, 1986).

[33] James Minchin, *No Man is an Island: A Portrait of Singapore's Lee Kuan Yew* (Sydney: Allen and Unwin, 1990).

[34] Lihat K.G. Tregonning, *Malaysia*, (Melbourne: F.W. Chesire, 1964), terutama tabel h. 70.

[35] Lihat K.G. Tregonning, *Malaysia*.

[36] *Lihat* K.G. Tregonning, *Malaysia*. Pada saat yang sama bahkan Malaysia mengalami minus M$ 223 dalam bidang penanaman modal asingnya.

buhan mencapai S$ 398 juta dan dari sektor jasa sebesar S$ 404.[37] Mulailah Singapura menyadari diri bahwa manufaktur dan jasa adalah lahan hidupnya, bukan pada pertanian. Tak perlu lagi dipaparkan secara kuantitatif, bagaimana spektakulernya ekonomi Singapura berubah kemudian, mungkin dengan gambaran bahwa Singapura di bawah Lee Kuan Yew sudah bukan lagi negara Dunia Ketiga, melainkan sudah menjadi Dunia Pertama.[38]

Namun, dari studi kritis sejarah ekonomi, pembangunan Singapura bukannya tanpa masalah. Lebih dari setahun setelah krisis keuangan dan mata uang meledak di Asia Tenggara, dimulai dengan kejatuhan mata uang Baht pada Juli 1997,[39] Singapura ikut terpuruk bukan karena terbukanya sistem ekonomi yang dianut, melainkan karena kurangnya reformasi ekonomi dan restrukturisasi ekonominya sehingga tidak fleksibel dan kompetitif ketika diserang oleh para pialang dan pedagang mata uang di dunia internasional.[40] Langkah yang diambil oleh Singapura adalah memperkuat sistem finansial dalam negeri dan memperbaiki daya kompetisi internasional ekonominya.[41] Karena memiliki fundamental makroekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang baik, sistem sosial dan stabilitas politik yang sehat, serta sistem finansial domestik yang handal, Singapura tidak begitu menderita oleh krisis moneter ini, melainkan bahkan bisa bangkit dengan cepat setelah memperbaiki beberapa masalah keuangan dalam

---

[37] Lihat K.G. Tregonning, *Malaysia*. Pada saat yang sama Malaysia justru mengalami minus M$ 138 juta dalam sektor jasa.

[38] Lihat Kee Kuan Yew, *From Third World to First, The Singapore Story (1965-2000).*

[39] Tentang episode awal mula terjadinya krisis finansial Asia yang dimulai di Thailand ini, lihat Bhanupong Nidhiprabha, "Economic Crises and the Debt-Deflation Episode in Thailand", dalam H.W. Arndt dan Hal Hill,(eds.), *Southeas Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward* (Singapore: ISEAS, 1999), h. 67-80.

[40] Chia Siow Yue, "The Asian Financial Crisis: Singapore's Experience and Response", dalam H.W. Arndt dan Hal Hill,(eds.), *Southeas Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward,* (Singapore: ISEAS, 1999).

[41] Chia Siow Yue, "The Asian Financial Crisis…", h. 51.

negerinya.[42] Singapura kemudian bangkit dari krisis dengan agak mudah. Sebagai salah satu *Newly Industrializing Economies* (NIEs), tanpa intervensi pemerintah, Singapura tetap melaju sebagai negara yang menganut kebijakan *laissez-faire,*[43] tidak seperti Malaysia yang menjalankan kebijakan intervensi pemerintah dalam mengatasi krisis.

Lee Kuan Yew dan Paradoks Negeri Singa

Di kalangan puak Melayu, Malaysia dan masyarakat kita, keberhasilan Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, menimbulkan perasaan bercampur: kagum, sinisme, cemburu dan suka-tidak suka, karena kontroversi Lee di Asia Tenggara, karena paradoks negeri mini tersebut.

Bayangkan, Lee pada bulan Agustus 1991 memprakarsai diadakannya Konvensi China Sedunia di Singapura untuk mengumpulkan pengusaha-pengusaha China perantauan (Overseas Chinese) dari seluruh dunia. Konvensi ini dihadiri 800 pengusaha besar China yang datang dari 30 negara termasuk dari Indonesia.

Pertemuan ini telah membangkitkan premordialisme para pengusaha China bahwa keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi tidak lepas dari kesamaan mereka yang mewarisi tradisi budaya super yaitu China. Ini kemudian dikaitkan dengan sifat-sifat tradisi budaya itu untuk bersikap hemat, kerja keras, mengutamakan pendidikan, persatuan dan saling membantu, bahkan ditekankan kembali Confucianisme sebagai etos pengikat orang-orang China.

Tujuan Konvensi ini adalah untuk membentuk jaringan kerjasama ekonomi masyarakat bisnis internasional China untuk memanfaatkan berbagai peluang bisnis. Karuan saja jaringan kerjasama yang berbau rasialis ini menggoncang nasionalisme Pribumi di negara-negara khususnya ASEAN, dan khususnya Indonesia

---

[42] Chia Siow Yue, "The Asian Financial Crisis…", h. 52-53.

[43] Yilmaz Akyüz, "The East Asian Financial Crisis: Back to the Future", dalam Jomo K.S. (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia* (London: Zed Books, 1998), h. 33.

yang sedang berusaha keras untuk mempersatukan non-pribumi ke dalam kesatuan dengan yang pribumi sangat dibuat marah dengan perilaku Konvensi yang dihadiri banyak pengusaha non-pribumi dari Indonesia itu.

Konvensi ini kemudian disusul dengan Konvensi serupa yang di-adakan di Hongkong pada bulan November 1993 yang dihadiri 1000 pengusaha besar China dari seluruh dunia. Indonesia diwa-kili 40 konglomerat non-pribumi.

Tentu saja, dampak pertemuan-pertemuan itu telah membangkit-kan kembali reaksi kesadaran kaum Pribumi di negara-negara ASEAN terutama Malaysia dan Indonesia untuk mewaspadai ge-rak langkah para pengusaha China di negara-negara itu.

Reaksi premordialisme ini bisa dilihat dari reaksi pengusaha Pro-bosutedjo, saudara tiri Soeharto, yang sekalipun sejak tahun 1980 pemerintah sudah menganjurkan untuk meninggalkan istilah pri dan non-pri yang menyebabkan usaha HIPPI berubah arti men-jadi Himpunan Pengusaha Putera Indonesia, reaksi keras menye-babkan HIPPI kembali diartikan menjadi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia seperti semula.

Reaksi itu dapat dimaklumi karena persatuan China Sedunia de-mikian ditakuti sebagai usaha melarikan modal Indonesia ke luar negeri (capital flight) yang berarti merusak ekonomi dalam negeri. Reaksi ini memang patut dimaklumi, lantaran sudah lama peme-rintah RRC sendiri menganjurkan pengusaha-pengusaha China perantauan untuk menanamkan modal mereka secara besar-besaran ke RRC.

Tentu, tanpa orang-orang keturunan China ini, sulit bagi RRC un-tuk bisa mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi. Para pengamat memperkirakan bahwa 60% investasi asing di daratan China ini dibawa oleh para pengusaha keturunan Chi-na. Tanpa orang-orang keturunan China seperti Mochtar Riady atau Soedono Salim dari Indonesia. Robert Kuok dari Malaysia

atau Charoen Pokphan dari Thailand, tidak banyak modal yang akan masuk ke daratan China untuk investasi.

Reaksi juga datang dari Siswono Yudohusodo yang menyebut ada sembilan dosa orang-orang keturunan China di Indonesia, yaitu antara lain: mereka hidup secara eksklusif, segregasi dalam kehidupan sosialnya, maunya cuma bergaul antara mereka, mereka yang menjadi pengusaha membuat diskriminasi dalam penerimaan buruh (karyawan), antara yang pribumi dan non-pribumi, diskriminasi dalam upah dan sebagainya.

Singapura pada zaman Singasari kita sebut sebagai Tumasek. Negara ini luasnya tak lebih besar dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Singapura adalah negara nir sumber daya alam dan kekayaan bumi. Sebuah negara yang benar-benar tak bisa menggantungkan kehidupannya dengan kekayaan alam. Sir Thomas Stamford Raffles pada awal abad 19, tepatnya 1819 mulai merintis "kehidupan" di Tumasek. Raffles yang tahu Tumasik secara geografis menjadi perlintasan dagang internasional mulai menyewanya dari seorang pangeran Melayu.

Pada tahun 1942 tentara Dai Nippon mengalahkan sekutu di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Kalimantan Utara (kini Brunei, red) dan juga Singapura. Peristiwa ini adalah salah satu kurun yang paling mengejutkan bagi Singapura yang sama sekali tak pernah menyangka Inggris kalah oleh tentara Matahari Terbit.

Jepang masuk ke Singapura pada 12 April 1942 dan mengganti namanya dengan Syonan, yang artinya Cahaya dari Selatan. Penamaan ini berkaitan pula dengan posisi strategis yang dimiliki Singapura. Sebuah pulau kecil yang nantinya akan menjadi negara dari selatan dan turut berperan besar dalam percaturan dunia. Mengapa Singapura diidentikkan sebagai Selatan? Hal itu menurut sebuah informasi karena memang selama ini penjajahan konon selalu datang dari utara. Coba saja perhatikan, dan sebagai

tambahan bahan tentang Utara-Selatan ini bisa membaca novel Pramoedya Ananta Toer, *Arus Balik*.

Tapi Jepang tak lama-lama memegang kemenangan yang telah diraihnya. Setelah direbut kembali oleh Inggris, Singapura menjadi sebuah pulau tambang uang untuk melunasi utang-utang yang dimiliki Inggris. Tak hanya Singapura tepatnya, Malaysia dan Brunei pun terkeruk juga untuk melunasi utang yang diakibatkan perjanjian Lend and Lease Act, perjanjian pembayaran biaya sewa alat-alat perang pada Amerika. Tentang hal itu bisa dibaca di buku *The Genesis of Malaysia Konfrontasi: Brunei and Indonesia 1945 – 1965,* karya Greg Poulgrain.

Singapura pun menjadi negara mandiri setelah melepaskan diri dengan Malaysia pada tahun 1965. Lee Kuan Yew menjadi The Founding Father of Republic Singapore. Negara yang hanya memiliki garis pantai 150.5 kilo meter ini pelan-pelan tapi pasti menjadi negara yang berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara umumnya. Baik secara demografis, maupun sejara finansial. Secara demografis, etnis China menjadi mayoritas di negara ini dengan jumlah kurang lebih 75 persen dari total penduduk 5 juta. Sisanya 25 persen dibagi-bagi beberapa etnis, Melayu, Tamil dan juga India. Secara finansial, karena tidak memiliki sumber daya alam satu pun, orientasi ekonomi Singapura sejak awal mengarah pada industri jasa. Profit oriented inilah yang membuat Singapura membuka dirinya bagi siapa saja, atau negara mana saja yang ingin menanamkan modal dan bekerjasama. Singapura tidak salah dalam hal ini. Singapura harus menggunakan cara ini sebab ia beda dengan Brunei yang melimpah sumber daya dan kekayaan alamnya.

Satu-satunya cara agar Singapura eksis sebagai negara adalah membuka dirinya dan membangun besar-besaran industri jasa. Dan hal itu berhasil, selain karena Singapura memang strategis di jalur pasar dunia, ada beberapa hal lain yang membuatnya menarik di mata Israel dan Amerika. Anggaran militer Singapura itu

4,4 miliar dolar US. Jauh sekali dibanding dengan Indonesia. Mereka juga punya industri militernya sendiri. Jadi tidak melulu bergantung pada negara-negara asing produsen senjata. Sama persis dengan Israel. Israel, meski bergantung pada negara produsen senjata dari Barat, tapi juga membangun persenjataan mereka sendiri. Singapura sudah bisa membuat dari senjata ringan, mesin hingga artileri, mereka sudah mampu membuat sendiri.

Angkatan bersenjata Singapura, keseluruhan, berjumlah 60.500 pasukan. Jauh di bawah Indonesia. Jumlah itu sudah termasuk 39.800 wajib militer dengan masa dinas 24 sampai 30 bulan. Tapi mereka juga memiliki pasukan cadangan berjumlah 213.800. Jadi, jumlahnya meliputi seluruh penduduk dan populasi Singapura.[44]

Singapura benar-benar telah menjalankan *total defense war*. Mereka punya wajib militer untuk seluruh penduduk, setiap saat semua warga negara Singapura bisa dimobilisasi, dan dipersenjatai.

Setiap penduduk Singapura itu sudah ada registrasi militernya, kepangkatannya. Ketika terjadi ancaman atau serangan, maka mereka per daerah atau per wilayah sudah bisa langsung melapor dan bergabung pada markas-markas yang sudah ditentukan.

Orang-orang sipil itu tahu pangkat mereka apa, berapa anak buahnya dan tugasnya apa. Bahkan senjatanya pun sudah disetor di masing-masing markas. Ini benar-benar seperti konsep Israel, bah-

---

[44] Dulu, Indonesia, menurut Ken Conboy dalam bukunya yang berjudul "Kopassus", bisa disebut sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, pada sidang parlemen Singapura tahun 1999 terkuak sebuah informasi, bahwa negara ini menghabiskan sekitar 7,27 miliar dolar dalam setahun, atau sekitar 25% dari anggaran belanja negara untuk alokasi pertahanan. Dan pada tahun 2000, menurut laporan Asian Defense Journal, tak kurang Singapura memiliki empat F-16B, 10 F-16D fighters, 36 F-5C fighters, dan delapan F-5T fighters. Sedangkan Indonesia, kini hanya memiliki enam F-16, itupun tak semuanya bisa dan layak terbang karena terus-menerus melakukan kanibalisasi untuk perbaikannya. Dan pada pemerintahan Megawati, terjadi pembelian pesawat tempur Sukhoi, tapi itu pun tak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pesawat Sukhoi yang dibeli oleh Departemen Perdagangan itu dirancang untuk perang dan melawan tank yang di Indonesia sama sekali tidak dibutuhkan.

wa semua penduduk dewasa adalah tentara sipil yang militer. Bukan militer yang membangun supremasi di atas sipil.

Angkatan Darat mereka memiliki 50.000 pasukan, tidak terlalu banyak. Angkatan Laut 4.500 dan Angkatan Udara 6.000. Tapi yang menarik adalah, Singapura juga memiliki *Forces Abroad*, pasukan-pasukan yang di tempatkan di luar negeri. Pasukan ini bukan untuk misi internasional, tapi pasukan Singapura sendiri, kebanyakan adalah Angkatan Udara.

Singapura menempatkan pasukannya di Perancis, Australia, Brunei, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand dan Amerika. Penempatan pasukan itu disertai dengan penempatan pesawat tempur, pesawat pengintai tanpa awak sampai pesawat pengisi bahan bakar di udara yang kebanyakan di parkir di Amerika.

Kalau kita bandingkan dengan kekuatan militer Indonesia? Jauh sekali. Seandainya Indonesia membom Singapura, mereka bisa membalas dengan lebih kuat lagi dari yang bisa dilakukan Indonesia. Jika sekarang kita terbang dengan pesawat komersial ke Singapura butuh waktu 1 jam 20 menit. Tapi kalau untuk melakukan serangan *pre-emptif strike*, Singapura hanya butuh waktu kurang dalam 30 menit.

Didikan Israel yang sangat disiplin memang menghasilkan kekuatan yang bukan main. Salah satu disiplin yang diterapkan Israel pada para kadet Singapura adalah bangun pukul 5.30 untuk memulai aktivitasnya. Bahkan salah seorang kadet pernah membantah dan memberikan alasan kepada kolonel Golan dengan mengatakan, “Kolonel Golan, orang-orang Arab tidak ada di sini dan tidak akan menduduki kepala kita. Mengapa kita melakukan latihan segila ini?” Dan menjawab komplain para kadet itu, Goh Keng Swee memerintahkan para kadet itu untuk melakukan apa yang diperintahkan Kolonel Golan, jika tidak, mereka akan melakukannya lebih berat lagi. Hanya dalam setahun, latihan yang dibangun oleh Israel ini telah menghasilkan 200 komandan militer yang terlatih.

Sekitar 2006, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia bersikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di kedua negara. Indonesia dan Malaysia juga dinilai Lee Kuan Yew ingin agar Singapura selalu mengalah seperti orang-orang Tionghoa di kedua negara tersebut. "Di Indonesia dan Malaysia orang-orang Tionghoa adalah pekerja keras dan orang-orang yang berhasil, namun mereka secara sistematis dipinggirkan (*marginalized*),'' kata Lee Kuan Yew.[45]

Pernyataan Lee itu mengundang reaksi dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, - yang kemudian melalui Deplu masing-masing, memanggil Dubes Singapura di kedua negara-, untuk meminta ''klarifikasi dan verifikasi'' atas pernyataaan Lee yang sensitif tersebut. Namun, Perdana Menteri Malaysia Abdulah Badawi menyatakan tidak menerima permintaan maaf Lee Kuan Yew. "Saya tidak bisa menerima hal itu,'' kata Badawi.

Lee rupanya menyadari bahwa di Asia Tenggara, sebagaimana di belahan dunia lainnya, hampir selalu ada *market-dominant minorities*. Di Asia Tenggara, etnis Tionghoa dicatat sebagai kelompok yang semacam itu, termasuk di Indonesia sendiri. Angka statistik yang sering dikutip adalah, tiga persen etnis Tionghoa menguasai 70 persen ekonomi Indonesia. Lepas dari kebenaran angka statistik ini, sesungguhnya ada kesan bahwa kelompok etnis Tionghoa Indonesia lebih kaya dan lebih makmur dibandingkan dengan kelompok etnis lain di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat oleh kehadiran konglomerat Tionghoa yang mengelilingi mantan Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Maka, kendatipun ada pengusaha pribumi yang sukses, mereka ini seakan-akan tidak terlihat.

Di negara-negara Asia Tenggara lainnya, sentimen anti-Tionghoa tidak meledak sesering di Indonesia, tetapi minoritas etnis Tiong-

[45] *The Straits Times*, 16 September 2006

hoa tetap menonjol dalam memainkan peran sentral dalam ekonomi. Ini terjadi di Malaysia, Philipina, Vietnam, Thailand, Kamboja dan Laos. Di Myanmar, yang masih diperintah oleh junta militer, golongan etnis Tionghoa merupakan "mitra bisnis dan rekan kolaborasi" yang tak terpisahkan dari jenderal-jenderal di Yangoon. Pada umumnya, kelompok etnis Tionghoa- yang dijuluki Yahudi dari Timur-mampu menarik keuntungan dari sistem ekonomi pasar yang kemudian menjelma menjadi globalisasi. Di Asia Tenggara, minoritas Tionghoa amat berjaya di sektor perekonomian dan perdagangan, meskipun kaum bumiputera berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Sehingga akademisi Leo Suryadinata (1999) dan Kunio Yushihara menyebut pengusaha Tionghoa perantauan (*the overseas Chinese)* itu merupakan penggerak perekonomian yang tak bisa diabaikan oleh siapapun elite yang berkuasa karena mereka memiliki jaringan bisnis regional dan internasional yang berkembang semenjak lama, bahkan sejak era kolonial. Kenyataan ini berimplikasi politik maupun sosial-ekonomi, dan membuat minoritas Tionghoa sering mengalami dilema dalam hubungannya dengan kaum bumiputera di Asia Tenggara. [46]

Karena itu, pernyataan Lee Kuan Yew yang "membela dan berempati" kepada minoritas Tionghoa di Indonesia dan Malaysia yang dianggap Lee mengalami marginalisasi dan diskriminasi, selayaknya dibaca dan ditafsirkan pula sebagai kesulitan Singapura sekaligus mencerminkan *the Singaporean predicament* dalam menempatkan diri dan bergaul di tengah bangsa-bangsa multi etnik di Asia Tenggara yang dewasa ini secara ekonomi relatif tertinggal dari negeri Singa.

Di negeri Singa ini, kekayaan 18 ribu orang WNI (keturunan) mencapai Rp800 triliun (US$80 miliar), jumlah ini merupakan sepertiga aset 55 ribu orang terkaya di Singapura yang bernilai US$260 miliar. Arus uang dari Indonesia ke Singapura itu mem-

---

[46] Kunio Yushihara, *Building A Prosperous Southeast Asia,* (Oxford University Press, 1991).

buktikan bahwa Singapura merupakan negeri yang ditimbang paling aman-nyaman bagi kaum Tionghoa akibat trauma dengan kerusuhan rasial Mei 1998. "Singapura memiliki kebijakan terbu-ka untuk menarik imigran kaya seperti Indonesia," kata Tho Goa Hong, Market Director Merril Lynch, Global Private Client. Kriteria orang kaya yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki US$1 juta. Pertumbuhan orang kaya di Singapura akan mencapai 20-25 persen dalam beberap tahun mendatang karena *good governance* yang baik.[47]

Dalam kaitan isu rasial ini, Amy Chua, seorang profesor dari Yale University, AS pernah mengatakan bahwa dimana ada sekelompok minoritas etnis yang mendominasi pasar -sekalipun ada sistem politik demokrasi -, bisa diramalkan akan terjadi serangan terhadap kelompok minoritas. Bagaimana mungkin? Amy Chua berpendapat, sistem pasar yang dipakai untuk mengorganisasi ekonomi tidak dapat dikombinasikan dengan sistem demokrasi untuk mengorganisasi politik. Terjadi komplikasi sosial, politik dan ekonomi yang mencuatkan konflik dan ketegangan di kawasan Asia Tenggara yang multirasial.

Sementara banyak orang berpendapat bahwa kerusuhan terjadi karena kelompok minoritas tidak terintegrasi dengan kelompok mayoritas, dimana tekanannya ada pada relasi minoritas-mayoritas, namun Amy Chua tetap melihat faktor dominasi minoritas terhadap pasar (perekonomian), merupakan salah satu pemicu kerusuhan rasialis. [48]

Hubungan Singapura-Indonesia

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang memiliki relasi dengan dinamika hubungan yang cukup fluktuatif. Namun kedua negara ini memiliki peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam efektivitas ASEAN. Kedua ne-

---

[47] Laporan *Merril Lynch* dan *Reuters*, 10/10/2006)

[48] Amy Chua, *World on Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability,* (New Haven: Yale Law School, 2003).

gara ini memang memiliki luas territorial, jumlah populasi, serta pertumbuhan ekonomi yang sangat berbeda.[49]

Fluktuasi atau ketidaktetapan hubungan Singapura-Indonesia yang berbeda pada setiap presiden Indonesia. Kadang baik, namun tak jarang pula memburuk. Pada zaman Soekarno hubungannya sangat tegang, era mantan presiden Soeharto berangsur membaik hingga menjadi sangat baik karena pada saat Indonesia kekurangan beras di dalam negeri tahun 1972, Singapura membantu Soeharto untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Relasi dua negeri ini membaik dan mendingin.

Namun hubungan bilateral keduanya pada kepemimpinan Habibie memanas kembali karena Habibie mengetahui bahwa Singapura mencuri pasir Indonesia di pulau perbatasan antara Indonesia dan singapura.

Zaman Gus Dur kembali memanas karena menurut Bilveer, Gus Dur terlalu provokatif mengeluarkan ide untuk bersama Malaysia "memusuhi" Singapura. Pemerintahan Megawati cukup baik. Sedangkan rezim SBY juga menjalin hubungan baik dengan Singapura, namun cukup terganggu dengan masalah ekstradisi yang berjalan cukup alot antara keduanya.

Memburuknya hubungan Indonesia-Singapura memang tercipta saat Singapura melindungi para koruptor Indonesia yang bersembunyi di Singapura. Pihak Singapura pun dengan senang hati memberikan pelayanan yang *excellent* bagi para koruptor tersebut. Ini terasa menjengkelkan Indonesia.

Inikah paradoks bagi Singapura, di satu sisi Singapura adalah negara bersih yang bebas dari korupsi, namun di sisi lain Singapura menjadi pelindung bagi para koruptor Indonesia.

---

[49]Pernyataan Bilveer Singh Ph.D, dosen tamu National University of Singapore saat menyampaikan kuliah *Singapore's Foreign Policy* di Kelas Internasional Program Studi Hubungan Internasional – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI-UMY) di Ruang simulasi sidang ASEAN di jurusan HI Fisip UMY, Jumat sore (26/3/2007).

Paradoks ini sebenarnya memang tidak pernah terlepas dari kepentingan, mengapa Singapura melindungi para koruptor Indonesia. Dan ini sudah terjadi sejak Singapura belum merdeka, sudah sangat lama sekali dan terus begitu hingga sekarang, ekstradisi pun tidak mencapai kesepakatan. Namun hingga saat ini Singapura tetap sebagai investor terbesar di Indonesia.

Data Kemenlu menyebutkan pada 2011 nilai investasi Singapura mencapai US$5,1 miliar. Sedangkan pada kuartal III 2012 nilai investasi Negeri Singa di Indonesia mencapai US$3,5 miliar. Dan nilai investasi yang terus meningkat di Indonesia itu, mengindikasikan hubungan Indonesia dan Singapura makin baik serta kuat. Hubungan Indonesia dan Singapura saat ini semakin menguat, hal ini tercermin dengan semakin meningkatnya investasi negara tersebut di Indonesia. Memang, berdasarkan data dan fakta, hubungan Indonesia - Singapura makin menguntungkan di bidang perdagangan, investasi, maupun pariwisata.

Di sisi lain hubungan Singapura-Indonesia juga diwarnai isu ekstradisi, yang tergolong isu sensitif, yang menjadi duri dalam daging bagi hubungan Indonesia-Singapura. Sampai sekarang masalahnya masih terkatung-katung karena Singapura tidak bersedia menandatanganinya meski sudah dibicarakan sejak tahun 1974.[50]

Sudah sering Indonesia menyatakan kekecewaannya, hingga akhirnya kekecewaan tersebut diekspresikan dalam bahasa yang lebih lugas, tajam, dan keras. Di sela-sela pertemuan internasional kontraterorisme tanggal 4-5 Desember di Bali, pejabat Indonesia menilai Singapura tidak beritikad baik karena tidak mau menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Ekspresi kekecewaan dikemukakan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Apalagi delegasi Singapura dalam pertemuan di Den-

---

[50] *Kompas*, 04/02/2007.

pasar menyatakan bahwa kerjasama melawan terorisme tetap bisa dijalin tanpa harus terikat perjanjian ekstradisi.

Pernyataan delegasi Singapura menimbulkan kontroversi. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menegaskan, di beberapa negara yang mempunyai perjanjian ekstradisi, proses pengadilan bagi kasus terorisme termasuk mudah dilaksanakan.

Atas pertimbangan itu, Downer menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme. Pernyataan itu didukung Indonesia yang kebetulan bersama Australia menjadi tuan rumah pertemuan.

Perjanjian ekstradisi termasuk penting sebagai kerangka hukum yang efektif untuk memerangi terorisme dan berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan ekonomi. Tanpa perjanjian ekstradisi, upaya mengadili teroris atau penjahat lainnya menjadi sulit.

Maka, menjadi pertanyaan besar, apa pertimbangan Singapura sehingga tidak bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi. Seperti sudah disinggung, Singapura berargumen bahwa kerjasama melawan terorisme atau kejahatan lainnya bisa berjalan tanpa harus terikat dalam perjanjian ekstradisi.

Lebih dari itu, Singapura sering menegaskan, perjanjian ekstradisi sulit dilaksanakan karena sistem hukum yang berbeda. Singapura menganut sistem hukum dengan acuan utama kerangka hukum Persemakmuran, *Commonwealth*.

Rangkaian argumentasi itu dinilai tidak terlalu meyakinkan. Sebab, sejumlah negara, antara lain Australia, Malaysia, dan Hongkong, yang menggunakan sistem hukum Persemakmuran sebagai acuan, sudah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Persoalan sekitar perbedaan sistem hukum ini, menurut Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, pernah diperdebatkan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Goh Chok Tong dan sejumlah menterinya di Istana Bogor.

Para analis cenderung berpendapat, keberatan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi lebih menyangkut pembelaan terhadap kepentingan ekonominya. Hampir tidak terkait dengan isu teroris. Singapura diyakini dapat mengekstradisi kaum teroris, sekalipun tidak ada perjanjian untuk itu.

Sudah bukan rahasia lagi, seperti disinyalir oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sendiri, sejumlah tersangka pelaku korupsi menjadikan Singapura sebagai suaka perlindungan, *safe haven*. Singapura menjadi suaka bagi kong-lomerat bermasalah Indonesia.

Segera terbayang bahwa keuangan dan perekonomian Singapura akan terguncang jika para pemilik uang yang bermasalah itu diekstradisi ke Indonesia dan kemudian diadili. Sejauh ini, Singapura tidak bersedia mengungkapkan jumlah uang orang Indonesia yang disimpan di negara itu atas alasan kerahasiaan bank.

Namun, kiranya menarik pernyataan PM Goh beberapa tahun lalu. Dalam wawancara dengan harian Kompas bulan Oktober 2002 di Singapura, Goh menyatakan bahwa Singapura termasuk salah satu pusat perdagangan dunia. Sekiranya uang Indonesia membutuhkan *safe haven*, pasti bukan hanya ke Singapura, tetapi juga ke pusat-pusat keuangan dunia lainnya. Menurut Goh, mungkin karena letaknya sangat dekat dengan Indonesia, tekanan pun mudah dilakukan terhadap Singapura.

Tentu saja dalam perspektif yang lebih seimbang, bukan hanya Singapura yang harus dipersalahkan. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atas larinya para koruptor dan konglomerat bermasalah ke Singapura atau ke negara lain.

Sekiranya tidak ada kolusi, atau sistem hukum Indonesia berjalan baik, ruang gerak koruptor dan konglomerat bermasalah menjadi sangat sempit. Kemungkinan melarikan diri pun menjadi serba sulit jika supremasi hukum berfungsi dan para penegak hukum

tidak dibusukkan oleh uang. Begitu juga ekspor pasir laut secara ilegal ke Singapura dimungkinkan oleh sistem hukum yang lemah.

Tuntutan ekstradisi bagi koruptor dan konglomerat bermasalah dari Singapura tentu saja sangat penting dalam upaya memerangi kejahatan ekonomi. Namun, sekiranya para tersangka dipulangkan, tetap muncul pertanyaan, apakah para tersangka dapat diadili secara benar. Keraguan timbul karena para terdakwa korupsi di Indonesia umumnya dibebaskan.

Maka, tuntutan perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan negara lain perlu diiringi oleh pembenahan keadaan dalam negeri Indonesia. Begitu mudahnya koruptor, konglomerat bermasalah, atau penjahat lain melarikan diri ke luar negeri lebih merefleksikan sistem hukum Indonesia sendiri yang kedodoran.

Singapura memang sebuah negara kecil, namun negara tersebut terus berupaya memperluas wilayahnya melalui pembangunan gedung tinggi, reklamasi, dan pembangunan di bawah tanah. Itulah yang disampaikan Menteri Pembangunan Nasional Khaw Boon wan. [51]

Saat ini sepertiga lahan di Singapura digunakan untuk industri, perdagangan dan perumahan. Sementara dua pertiga lainnya digunakan untuk jalan, pelabuhan, bandara, waduk, utilitas, tempat latihan militer serta fasilitas sosial dan komunitas seperti lahan parkir, rumah sakit, dan sekolah.

Singapura berupaya untuk mendaur ulang dan mengoptimalkan lahan yang ada agar pemanfaatannya dapat dikelola dengan baik. Lahan kosong di Pulau Tengah dan Bidadari akan dibuka untuk pemukiman sementara penggunaan lahan perumahan dan industri yang ada akan semakin diintensifkan. Singapura tetap menjadi tempat yang bergengsi dan nyaman untuk membesarkan keluarga .

---

[51] *Kompas*, 04/02/2007

Dalam kaitan ini, kemenangan Partai Aksi Rakyat (People Action Party-PAP) yang kembali menguasai mayoritas parlemen, memantapkan Singapura sebagai negeri paradox (Singapore Paradox). Kemenangan itu sekaligus mencerminkan keajegan dan kesinambungan kapitalisme dan demokrasi non-liberal di Asia.[52]

Di bawah Lee Kuan Yew, Singapura adalah rezim otoriter yang membangun kapitalisme dalam kerangka demokrasi iliberal, dengan undang-undang keamanan internal yang ketat, dan *draconian*, seraya menyebut pentingnya nilai-nilai Asia dalam pembangunannya.

Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dibarengi perasaan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dewasa ini, yang tercermin selama pemilu. Isu biaya hidup yang makin tinggi mulai dari harga makanan, rumah, biaya kesehatan, dan transportasi kerap disuarakan pihak oposisi dalam kampanye. Disamping jurang kaya miskin yang makin melebar dan masalah lapangan kerja yang banyak diambil oleh pekerja asing.

PAP mengalahkan partai oposisi hampir di semua distrik dengan memenangkan 81 kursi dan menyisakan 6 kursi untuk oposisi. Ada kenaikan kursi oposisi sebagai luapan ketidakpuasan publik.

Singapura merupakan negara kota dengan luas wilayah 710 kilometer persegi. Singapura, negara berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa dengan produk domestik bruto (GDP) sekitar 132 miliar dollar AS pada 2009, menjadi pusat keuangan dan bisnis regional yang maju pesat, hadir sebagai saingan baru bagi pusat keuangan mapan seperti Hongkong dan Swiss.

Advokat Todung Mulya Lubis yang juga Ketua TII (Transparency International Indonesia) pernah menulis bahwa, Singapura merupakan negeri paradoks karena berkhotbah mengenai *clean government, rule of law* dan *good governance*, namun mendulang sukses

[52] *Republika*, Senin (9/4/2010).

dari uang-uang haram hasil penjarahan uang negara Indonesia yang dilakukan pejabat dan pengusaha tak bertanggung jawab.

Tidak heran melihat banyak gedung, apartemen, dan kantor yang merupakan investasi orang-orang Indonesia yang oleh pemerintah Singapura diberikan banyak kemudahan, termasuk pajak dan izin tinggal (permanent residence), bahkan dalam beberapa kasus diberi kewarganegaraan Singapura. Beberapa pengusaha Indonesia diketahui memiliki status warga negara Singapura. Mereka lalu menjadi *untouchables* karena bukan lagi warga negara Indonesia.

Banyak orang Indonesia mengeluhkan hal ini karena melihat Singapura memainkan standar ganda. Di satu sisi Indonesia sering diberi kuliah tentang *good governance, good corporate governance*, dan *rule of law*, tetapi di sisi lain Singapura tidak membantu memerangi korupsi dalam arti membawa koruptor dan asetnya ke Indonesia. Kemenangan PAP, karena itu, adalah kemenangan bagi pemantapan lanjutan sekaligus kesinambungan paradoks Singapura.

Ke depan, sebagaimana ditegaskan Lee Kuan Yew, sang mentor senior, Singapura bermimpi menjadi pusat perdagangan Yuan kedua setelah Hong Kong karena kenaikan penggunaan global mata uang China itu lebih luas.

“Hong Kong adalah bagian dari China. Hong Kong banyak terhubung dengan pasar-pasar keuangan internasional. Jadi China akan menggunakan Hong Kong; luapannya mungkin datang kepada kami,” kata Lee Kuan Yew.

Meski ekonominya tumbuh dan kaya, rakyat Singapura kehilangan kebebasan. Tentunya ini adalah harga yang harus dibayar warga negeri mini itu ketika otoriterisme kian melembaga. Singapura dan Indonesia kadang mengalami gesekan dalam relasi kedua negara, suatu fakta bahwa potensi konflik terus tersembunyi di bawah karpet di kedua negara.

EKONOMI-POLITIK MALAYSIA

Untuk memahami bagaimana pengalaman Malaysia dalam pembangunan ekonomi dan apa langkah yang ditempuh Mahathir dalam mengatasi krisis, kita harus melihat ke sejarah ekonomi Malaysia. Sejarah ekonomi Malaysia —yang pada awalnya sebagian besar bersandar pada produk pertanian dan alam hutan— dimulai dari masa pra-kolonial hingga tahun 1961.[53] Produksi utama Malaysia, pada 3 dekade awal setelah kemerdekaan 1957, adalah karet dan kayu serta produk tambang tembaga.

Partner investasi utama Pemerintah Kerajaan Malaysia adalah Jepang yang memang mengharapkan hasil alam dan pertanian dalam perdagangan. Sistem ekonomi Malaysia pada mulanya merupakan sistem ekonomi kolonial Inggris yang telah meletakkan pola dasar sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.[54]

Diskrepansi relatif masih saja terjadi antara pedagang kecil yang umumnya kaum Melayu dengan pedagang besar yang umumnya berasal dari etnis China. Kemerdekaan politik pada 31 Agustus 1957 belum membawa kemerdekaan ekonomi bagi Malaysia yang kemudian mengakibatkan kerusuhan antar kaum setelah Pemilihan Umum Mei 1969.[55]

Peristiwa berdarah ini telah membuka peluang kepada golongan muda dalam Partai UMNO sendiri untuk mengambil alih kendali pemerintahan yang kemudian meluncurkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. Mahathir muncul secara perlahan dan cerdik ke panggung politik mewakili asosiasi kaum pedagang makanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1976

---

[53] K.G. Tregonning, *Malaysia*, h. 55.

[54] Jomo K. Sundaram, "Ekonomi Bebas atau Pembebasan Ekonomi: Beberapa Pandangan tentang Perlunya Tata Ekonomi Dunia Baru", dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1982, h. 96.

[55] Jomo K. Sundaram, "Ekonomi Bebas atau Pembebasan Ekonomi…" h. 97.

dengan mengandalkan "sentimen politik" Melayu[56] yang kuat dan "sentimen ekonomi" DEB yang rasional.[57]

Ekonomi Malaysia mengalami pertumbuhan yang stabil[58] selama satu dekade segera setelah Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Mahathir serius dalam mereduksi kemiskinan dan melakukan *economic planning* terutama dalam *Rancangan Malaysia Ketiga 1976-1980* dan *Rancangan Malaysia Keempat 1981-1986*.[59] Secara implisit, setidaknya masih merupakan hipotesis dalam studi ini, kebijakan ekonomi Mahathir dengan DEB (Dasar Ekonomi Baru atau lebih dikenal dengan *New Economic Policy*) lebih merupakan imitasi dari kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia era Soeharto. Malaysia mulai memperluas partner investasinya dari Jepang ke Amerika Serikat.

DEB merupakan rekayasa sosial yang unik dan berani yang dilakukan oleh negara berkembang yang masih muda seperti Malaysia.[60] Perubahan ekonomi-politik yang sangat dramatis mulai terjadi, khususnya menyangkut jaringan politik dan afiliasi bisnis sebagian kaum (Melayu) "Bumiputera" yang didukung negara. Di bawah DEB ini juga usaha Malaysianisasi perusahaan asing yang bergerak dalam bidang karet dan kelapa sawit berlangsung secara sukses. Namun, pihak pemodal asing, terutama Amerika Serikat, masih terus menanamkan modalnya di Malaysia khususnya pada sektor manufaktur.

---

[56] Tentang hal ini, lihat Mahathir Mohamad, *The Malay Dilemma*, (Kuala Lumpur: Federal Publications, 1970).

[57] Tentang DEB, lihat Mahathir Mohamad, *Jalan ke Puncak*, Selangor: Pelanduk Publications, 1999. Lima tahun pertama DEB (1971-1975) mencapai sasaran di mana jumlah modal milik pribumi telah bertambah dengan tingkat yang amat pesat sekian kali lipat dari pertumbuhan kapital kaum etnis China.

[58] Pertumbuhan ekonomi Malaysia waktu itu mencapai 8,7% per tahun.

[59] Jomo K. Sundaram, "Ekonomi Bebas atau Pembebasan Ekonomi…", h. 99.

[60] Sieh Lee Mei Ling, "The Transformation of Malaysian Business Groups", dalam Ruth McVey, (ed.), *Southeast Asian Capitalists,* (New York, Ithaca: Cornell University SEAP, tth), h. 103.

Namun pada tahun 1997, Mahathir mendapat cobaan berat dengan adanya krisis yang melanda beberapa negara Asia, termasuk Malaysia. Krisis ini terutama disebabkan karena "kapitalisme kroni" Mahathir.[61] Namun ia berani menolak saran dan resep IMF dan menerapkan CBS (*Currency Board System*) atau *Fixed Exchange Rate*. Mahathir memiliki otonomi relatif sebagai politisi Dunia Ketiga.

Apa yang dilakukan Mahathir dengan menolak paket penyelamatan dari IMF kemudian membuahkan hasil. Kontrol modal dan kebijakan makro ekonomi yang ekspansif adalah kunci keberhasilan Malaysia di bawah Mahathir dalam upayanya keluar dari kemelut krisis finansial dari Juli 1997 hingga September 1998 dengan cara menentang arus.[62] Selain itu, Mahathir juga mengandalkan ekspor dan menjaga kestabilan perdagangan bilateral, terutama dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1999, perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat berjumlah U.S. $30.5 miliar, dengan ekspor Amerika Serikat ke Malaysia berjumlah U.S.$9.1 miliar dan AS mengimpor dari Malaysia meningkat menjadi US. $21.4 miliyar. Malaysia menjadi partner dagang 12 terbesar dan 17 besar pasar ekspor bagi AS.

Selama paruh pertama 2000, ekspor AS berjumlah U.S.$5 miliar, sementara impor AS dari Malaysia mencapai U.S.$11.6 miliar. Jika pada saat kemerdekaan ekonomi Malaysia didominasi oleh dua komoditas utama, karet dan timah, maka setelah 40 tahun kemerdekaan, ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu negara terbaik Asia dalam bidang ekonomi. Dari awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an, ekonomi Malaysia mengalami diversifikasi yang luas dan pertumbuhan yang cepat mencapai rata-rata hampir 8% per

---

[61] Jomo K. Sundaram., "Malaysia: From Miracle to Debacle", dalam Jomo K. Sundaram. (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia* (Hongkong: Hong Kong University Press, *tth*), h. 195.

[62] Prema-chandra Athukorala, "Swimming against the Tide: Crisis Management in Malaysia", dalam H.W. Arndt & Hal Hill (eds.), *Southeast Asia's Economic Crisis: Origins, Lessons, and the Way Forward,* (Singapore: ISEAS, 1999), h. 28-29.

tahun. Pada 1999, nominal per capita GDP Malaysia telah mencapai $3,238.

Investasi asing dan domestik telah memainkan peran yang penting di dalam transformasi ekonomi Malaysia. Industri manufaktur tumbuh dari 13.9% dari GDP pada tahun 1970 menjadi 30% pada tahun 1999, sementara pertanian dan pertambangan tumbuh pada 42.7% dari GDP pada 1970, jatuh ke angka 9.3% dan 7.3%, pada tahun 1999. Industri manufaktur tumbuh mencapai 30% dari GDP (1999). Maka mulailah ekonomi Malaysia berhasil tertransformasikan dari yang semula mengandalkan sektor karet dan timah, menjadi produk industri komponen elektronik berteknologi tinggi. Di bawah Mahathir, Malaysia adalah salah satu negara pengekspor peralatan semi-konduktor terbesar dunia di samping produk dan peralatan listrik.[63]

Pemerintah Malaysia di bawah Mahathir menyambut baik dan mendukung *Foreign Direct Investment* (FDI). Menurut statistik Malaysia, pada tahun 1999, AS merupakan negara terbanyak yang menanamkan modalnya di Malaysia dalam sektor manufaktur yang mencapai angka investasi sebesar RM 5.2 miliar (US$1.37 miliar). Umumnya penanaman modal AS berkonsentrasi pada bidang kimia, elektronik dan sektor kelistrikan. Angka kumulatif investasi swasta AS di Malaysia mencapai US $10 miliar, yang mana 60%-nya di sektor minyak dan gas bumi serta sektor petro kimia, sisanya di sektor manufaktur, khususnya semikonduktor dan produk elektronik lainnya.[64]

Dalam hal ini, Mahathir sesungguhnya sama uniknya dengan Soeharto dan Lee Kuan Yew, terutama dalam menjaga kestabilan politik, seperti menjaga kestabilan harga dan hubungan dagang dengan negara mitra-dagang utama. Mahathir memiliki banyak persamaan dengan Soeharto dan Lee Kuan Yew, terutama ketika mereka bertiga berani menentang IGGI dan IMF.

---

[63] *Statistical Year Book Malaysia*, 1999.
[64] *Statistical Year Book Malaysia*, 1999.

Mahathir, Nilai-Nilai Asia dan Ekonomi-Politik Malaysia

Dalam konteks Malaysia di bawah era Mahathir, tampak jelas bahwa visi, misi dan agendanya sebagai negarawan, telah difokuskan sejak awal untuk mengangkat harkat dan martabat puak Melayu di negeri jiran itu, dengan nilai-nilai Asia yang dipersepsikannya sebagai peradaban dan budaya Asia.

Dalam persepsi Mahathir, nilai-nilai Asia mengandungi nilai seperti: tiadanya sikap individualisme yang keterlaluan, adanya rasa tanggung jawab bagi masyarakat, hubungan kekeluargaan yang mantap, mengutamakan pendidikan dan bersikap hati-hati dan cermat. Selain itu, nilai-nilai Asia itu termasuk juga kegigihan berusaha, bekerja, membangun perkumpulan/perserikatan untuk negara, membangun kontrak sosial antara rakyat dan negara dengan moral yang tinggi dan menjunjung kebebasan dengan sikap bertanggung jawab, memelihara kepercayaan terhadap rakyat sebagai pemegang amanah dan menghormati alam lingkungan[65].

Mahathir yakin bahwa kemakmuran ekonomi Asia sebelum krisis moneter pada tahun 1997 adalah hasil kekuatan dan keunikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Asia yang membawa mereka kepada kemajuan ekonomi. Mahathir melihat bahwa nilai-nilai Asia itu terdapat dalam masyarakat lain khususnya masyarakat Barat. Mahathir mengakui kebanyakan nilai Asia tersebut pernah dimiliki oleh Barat sebelum sistem sosial, nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan Barat mengalami kemerosotan menjadi individualisme yang keras. Baginya, nilai yang dahulu begitu kuat yang dipegang oleh masyarakat konservatif Barat seperti “kepentingan keluarga” dan “kekuatan otoritas” kini tidak lagi diamalkan/dipraktekkan oleh masyarakat Barat. Sebaliknya, kedua nilai ini dite rima dan dikembangkan oleh rakyat Malaysia untuk digunakan seirama dengan pesatnya pembangunan negara serta kemajuan ekonomi puak Melayu. Pasca Mahathir, gebrakan antikorupsi

[65] Lukman Mohamad dan Azmi Abdul Manaf, (eds), *Globalisasi di Malaysia*, (Kuala Lumpur, UKM, 2003).

oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi juga relatif mencengangkan. Gebrakan itu memberikan prospek cerah bagi masa depan modernisasi Malaysia. Abdullah yang pada bulan Oktober 2003 menggantikan Dr. Mahathir Mohammad yang meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri, menjadi harapan baru bagi model kepemimpinan Asia yang progresif.[66]

Abdullah adalah pengagum berat "the great admirer", atas kesuksesan Mahathir dalam mengangkat harkat dan martabat puak Melayu dari warga negera kelas dua menjadi kelas satu di Malaysia telah menjadi prestasi terbesar Mahathir sebagai negarawan Asia. Dalam bukunya, *The Malays Dilemma* (1970), Mahathir mengungkapkan betapa puak Melayu itu mengidap kelemahan fatal seperti lamban, malas, marginal, bodoh dan pasrah pada statusnya sebagai warga negara kelas dua. Mahathir melihat nilai-nilai Melayu itu harus direformasi dan disesuaikan dengan spirit modernisasi. Bahkan pada akhirnya Mahathir pada akhir abad 20 menyatakan bahwa nilai-nilai Melayu merupakan salah satu sumber nilai-nilai Asia yang sesuai dengan perkembangan globalisasi.

Nilai-nilai Asia (*Asian values*) menjadi diskursus di kalangan masyarakat global dengan kesuksesan kepemimpinan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad di Malaysia, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dan mantan PM Zhu Rongji di China. Juga keberhasilan Taiwan dan Korsel dalam modernisasi ekonomi mereka.

Pada waktu yang sama, sebagian nilai nilai Barat yang lain seperti "kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat" semakin dikurangi atau dikesampingkan peran dan kedudukannya dalam masyarakat Melayu.

Studi akademisi Hitchcock (1994) melihat dengan jelas perbedaan antara nilai masyarakat Asia dibandingkan nilai Barat yang diwakili oleh rakyat Amerika Serikat. Hasil kajian menunjukkan ma-

---

[66] Herdi Sahrasad, "Mahathir, Abdullah Badawi dan Nilai-Nilai Asia", opini, *Suara Pembaruan,* 10 Maret 2004

syarakat Asia dan Amerika Serikat meletakkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak-hak individu sebagai nilai terpenting yang berlaku dalam masyarakat Barat. Hal ini membuktikan perbedaan nilai antara masyarakat Asia dan Barat itu mempunyai nilai yang relevan bagi masing-masing masyarakat itu.

Nilai-nilai sosial utama masyarakat Asia dan Barat/Amerika Serikat:

Masyarakat Asia	Masyarakat AS/Barat
1. Kerukunan masyarakat	1.Kebebasan mengeluarkan pendapat
2. Harmoni	2.Kebebasan pribadi
3. Kebertanggungjawaban	3.Hak-hak individu pegawai negeri
4. Terbuka kepada pemikiran	4.Perdebatan terbuka baru
5. Kebebasan mengeluarkan	5.Berfikir sendiri Pendapat
6. Menghormati pihak	6.Pertanggungjawaban berkuasa (pemerintah) pegawai pemerintah

Sumber: Hitchcock (1994)

Bentuk nilai-nilai Asia di Malaysia lebih kepada keperluan otoritas yang kuat serta hak keluarga dan masyarakat, sementara kebebasan individu/hak individu lebih menonjol dalam masyarakat AS/Barat. Sehubungan itu, ada perbedaan dalam hal peranan aktif masyarakat sipil, praktik demokrasi, prinsip pemerintah berasaskan undang-undang dan kebebasan pers/media massa dalam membangun keharmonisan antar-golongan, kemajuan ekonomi dan pembangunan bangsa yang diberlakukan oleh Mahathir selama berkuasa.

Baginya kepentingan masyarakat lebih utama ketimbang kepentingan individu, meskipun Mahathir tidak menolak hak dan kebebasan individu itu. Mahathir dipengaruhi secara relatif oleh nilai-nilai Islam dan Melayu[67].

[67] Herdi Sahrasad, "Mahathir, Abdullah Badawi dan Nilai-Nilai Asia."

Pendekatan Mahathir telah dikonsepkan oleh Mendes (1994) sebagai "Model Mahathir" untuk membedakan pendekatan nilai-nilai Asia yang dibawa oleh pemimpin Asia lain seperti Singapura, China, dan Taiwan. Menurut Mendes, nilai nilai Asia di Malaysia merupakan satu penekanan nilai-nilai Melayu Islam yang berbeda dengan nilai-nilai Asia di Singapura, Taiwan dan China yang lebih menekankan paham Konfusianisme dan nasionalisme China. Dupont (1996:14) berpendapat, meskipun dari segi fakta ajaran Islam di Malaysia berbeda dengan kepercayaan neokonfusianisme di Singapura dan negara-negara berpenduduk China lainnya di Asia Timur, namun Mahathir menyesuaikan perbedaan tadi dengan memasukkan sifat masyarakatnya yang tersendiri ke dalam praksis nilai-nilai Asia yang lebih luas.

Naisbitt (1997), Inoguchi dan Newman (1997) berpendapat model nilai-nilai Asia terbentuk melalui reaksi pemerintah terhadap kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik pada dekade 1990-an sebelum terjadinya krisis ekonomi dan politik pada bulan Juli 1997.

Dalam hal ini, prinsip utama pendekatan nilai nilai Asia Mahathir ialah pemerintahan yang absah, berotoritas kuat atau pemerintah yang kuat dan dihormati sehingga Malaysia dipandang sebagai sebuah negara yang sejahtera dan bermartabat, mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Bagi Mahathir, tanpa wewenang/otoritas yang kukuh masyarakat akan mudah terjerumus ke arah anarki.

Pandangan Mahathir ini paralel dengan studi Welsh (1996) yang menyatakan bahwa rakyat Malaysia yang juga menyokong pendirian Mahathir dalam membatasi kebebasan pers/media dan NGO agar tidak terlalu luas karena dikawatirkan bisa membawa kepada ketegangan SARA (antar suku, agama, ras, antargolongan) dan terganggunya rencana pembangunan ekonomi negara. Secara umum, pemerintahan yang kuat dapat membatasi kebebasan asasi individu dalam mengeluarkan pendapat melalui me-

dia serta berhimpun dan bersatu dalam LSM/NGO. Walau bagaimanapun, pelaksanaan (amalan) nilai-nilai Asia yang terkesan "dikekang atau dibatasi" itu, termasuk diberlakukannya undang-undang "*draconian" ISA (Internal Security Act)* dalam sistem pemerintahan Mahathir, telah dikritik hebat oleh sebagian masyarakat. Kalangan LSM dan intelektual menganggap pembatasan kebebasan pers/media itu sebagai tindakan mengabsahkan bentuk pemerintahan otoriter di Malaysia. Tak mengherankan jika Gunnar Myrdal menganggap Mahathir sebagai pemimpin Asia yang tergolong keras, *hard*, bukan *soft*, lembek. Sehingga Malaysia tidak terjerumus dalam korupsi akut seperti kasus Indonesia dan Philipina yang dirundung KKN karena para pemimpinnya *soft*, lembek.

Konflik Mahathir-Badawi

Perseteruan Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dengan mantan orang dekatnya, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, hingga tahun 2007 belum mereda.

Mahathir mengungkapkan dirinya tidak akan menghentikan kritikan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Ungkapan Mahathir ini menepis harapan akan berakhirnya perselisihan politik yang pahit di negara puak Melayu itu.

Kritik yang dilontarkan Mahathir yang sangat mengganggu adalah menuding Badawi telah membalikkan sejumlah kebijakan darinya termasuk sejumlah proyek raksasa infrastruktur seperti pembangunan jembatan ke Singapura. Mahathir berulang-ulang menuduh Badawi menjatuhkan martabat negara lantaran gagal menjalankan proyek raksasa miliaran dolar yang menyambungkan Johor Selatan dengan Singapura.

Bahkan koran *the Strait Times,* Oktober 2006, menyiarkan bahwa Mahathir menuduh Badawi telah menjadikan Malaysia sebagai negara polisi atau diktator. Selain itu, Mahathir juga menuduh Badawi telah melakukan praktik KKN dengan melibatkan anak

dan menantunya dalam bisnis dan pemerintahan negara. Adapun menantu yang dimaksud adalah Kamaludin, yang saat itu menjadi penasihat Badawi selain sebagai pengusaha sukses. Mahathir juga menuduh Badawi telah melarang anggota partai berkuasa UMNO (*United Malays National Organization)* untuk bertemu dengannya.

Tentu saja semua tuduhan tersebut dibantah, bahkan Badawi balik menuduh Mahathir melakukan KKN ketika berkuasa.

Namun berbagai tuduhan gencar Mahathir tersebut mendapat reaksi keras dari para pendukung Badawi. Para menteri di kabinet sepenuhnya berada di belakang Badawi termasuk Wakil PM dan Menhan Malaysia, Tun Najib Razak.

Bahkan Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin dan Kepala Menteri Negara Bagian Kedah, Mahdzir Khalid meminta agar Mahathir mundur dari jabatannya sebagai penasihat di berbagai perusahaan strategis pemerintah, seperti perusahaan minyak Petronas, perusahaan mobil Proton, dan Otoritas Lengkawi Island. Sebab menurutnya ketiga posisi tersebut dahulu diberikan Badawi kepada Mahathir, sementara kritikan tajam Mahathir terus dilancarkan kepada Badawi dan pemerintahannya.

Sebagai mantan pemimpin Malaysia yang telah berkuasa selama 22 tahun, Mahathir rupanya kecewa terhadap Badawi karena tidak meneruskan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkannya, seperti proyek Jembatan Johor-Singapura, perusahaan mobil Proton dan sebagainya. Padahal berbagai proyek tersebut merupakan proyek prestisius bagi Mahathir. Apalagi sebelumnya Badawi berjanji akan melanjutkan berbagai proyek tersebut.

Namun setelah berkuasa, Badawi yang semula ditunjuk Mahathir sebagai penggantinya ternyata tidak melanjutkan keinginan Mahathir. Badawi malah membatalkan sebagian proyek Mahathir seperti pembangunan Jembatan Johor. Namun alasan Badawi juga

cukup logis, karena pihak Singapura menerapkan berbagai syarat yang tidak mungkin dilakukan pemerintah Malaysia, apalagi dana untuk pembangunan proyek tersebut semakin sulit didapat pemerintahnya.

Sementara proyek Proton dinilai Badawi sebagai pemborosan keuangan negara, sebab selama ini negara terus mensubsidi perusahaan mobil kebanggaan Malaysia tersebut, sementara di pasaran internasional mobil Proton kurang laku sehingga hanya "jago kandang". Proyek mobil Proton mirip dengan proyek pabrik pembuatan pesawat terbang IPTN di era Orde Baru. Perusahaan yang beralih nama menjadi PTDI tersebut cukup membebani keuangan negara dan produknya kurang laku di pasaran internasional, sehingga terjadilah rasionalisasi besar-besaran.

Etnis, dan Ketimpangan Ekonomi di Malaysia

Sebagaimana dicatat Prof. Wang Gungwu dalam *Chinese Politics in Malaysia, The China Quarterly* (1970), posisi istimewa etnis China di Malaysia sebenarnya warisan zaman kolonial. Keturunan China diberi keleluasaan dalam bidang perdagangan dan pertambangan sebagai bagian politik untuk menyudutkan puak Melayu. Meskipun sudah merdeka tahun 1957, pola hubungan seperti di zaman penjajahan tidak berubah, kecuali pelakunya bergeser, karena tetap terjadi kolusi antara penguasa (politisi Melayu) dan pengusaha, yang kebanyakan keturunan China. Kesenjangan ekonomi pun meruak dan menimbulkan kerawanan sosial, yang akhirnya meletus dalam kerusuhan etnis tahun 1969.

Sampai sejauh ini, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mengungkapkan penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Menurut data yang disampaikan UMNO sehari menjelang pembukaan sidang tahunan 15 November 2006, etnis China

mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu. Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sementara etnis China 71 persen. Data ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan menyulut kebencian sosial. Meski data itu oleh pihak UMNO tidak dimaksudkan untuk meresahkan etnis China yang meliputi 25 persen penduduk, atau keturunan India yang mencakup 10 persen penduduk, dalam kenyataannya kekhawatiran dan kegelisahan etnis China Malaysia tetap merebak.

Data statistik itu sendiri oleh UMNO sengaja diangkat untuk tujuan perbaikan ekonomi bumiputra. Apalagi ada penilaian bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan data kesenjangan ekonomi etnis China dan puak Melayu di tengah era keterbukaan Malaysia sekarang ini. Persoalan kesenjangan termasuk kasatmata dan merupakan isu laten. UMNO nampaknya sengaja menyingkapkan data kesenjangan ekonomi untuk mempertahankan Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy* atau NEP) yang dilakukan Malaysia setelah kerusuhan rasial tahun 1969, yang menewaskan ratusan orang.

Kebijakan itu bertujuan membantu puak Melayu meraih kemajuan agar tidak tertinggal dibandingkan dengan golongan etnis China. Hanya saja, sebagai evaluasi, puak Melayu tetap saja tertinggal meski NEP sudah dilaksanakan bertahun-tahun.

Dalam konteks ini, perselisihan Mahathir dan Badawi sesungguhnya mengkonfirmasikan "konflik kepentingan" elite kuasa di Malaysia yang bersifat laten, sekaligus merefleksikan *postpower syndrome* Mahathir sendiri. Apalagi Mahathir merasa usahanya mengangkat ekonomi puak Melayu belum sepenuhnya berhasil, namun di tangan Badawi, usaha itu (*New Economic Policy* atau NEP) ternyata untuk sebagian telah ditinjau kembali, bahkan dirubah lagi karena konteks masalah dan tantangan ekonomi-politik dan globalisasi yang berpusar di luar kendali.

Sementara itu berkaitan dengan kepemimpinan Malaysia di bawah PM Abdullah Badawi, nilai-nilai Asia nampaknya lebih ditransformasikan kedalam realitas sosial dan tindakan nyata dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Terobosan Abdullah untuk membentuk komisi khusus guna membongkar korupsi di kalangan kepolisian dan menindak pebisnis dan anggota kabinetnya yang korup, merupakan 'angin segar" bagi pelaksanaan *good governance* di Malaysia.

Bagi Abdullah, sebagaimana pendahulunya, sikap masyarakat Asia lebih kontekstual ketimbang sikap masyarakat Barat yang bias dan memiliki standar ganda, dalam mana di era globalisasi masyarakat Barat dianggapnya hanya mementingkan diri sendiri, bersifat imperialis ekonomi dan kurang perduli dengan nasib Dunia Ketiga. Abdullah tidak anti modal asing, namun cermat dan cerdas dalam menyiasati investasi asing dan nilai-nilai asing (Barat) yang masuk ke Malaysia. Baginya, nilai-nilai Barat yang berfaedah bisa dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai Asia, namun Asia tetap Asia dan Barat tetaplah Barat. Hal ini paralel dengan pandangan Samuel Huntington yang menyatakan bahwa Asia menerima modernisasi Barat namun menolak Pembaratan (Westernisasi) sebab barang impor asing hanyalah "benda" yang gemerlapan namun institusi sosial politik Asia yang bersifat "batiniah" tidak cocok bila diimpor dari Barat.

Islam di Malaysia

a. Islam Khadari dan Nilai Asia

Sebagaimana kita ketahui, melalui Barisan Nasional (BN), Abdullah Ahmad Badawi (Pak Lah) berhasil memenangi pemilu di Malaysia, terutama dalam mengalahkan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Trengganu, dan hampir mengalahkan PAS di Kelantan. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kaum Islam moderat di Indonesia dan Asia Tenggara.

Sementara bagi partai-partai Islam di Indonesia yang melancarkan gerakan "syariah Islam", kemenangan Pak Lah yang menyerukan *Islam khadari* (Islam yang berperadaban, toleran, maju, pluralis dan modern) sebagai nilai-nilai Asia baru, juga merupakan cambuk untuk refleksi, mawas diri, introspeksi dan belajar dari kekalahan PAS seraya menata diri dalam arus reformasi.

Kemenangan Pak Lah, sang pemimpin Islam moderat, tidak datang begitu saja. Ia merupakan kontinyuitas dari proses kerja, kreativitas dan perjuangan panjang "para pemimpin" Islam moderat Malaysia (*Islam khadari* - bahasa elok yang dipakai Syafiq Hasyim)[68] di bawah pimpinan PM Mahathir Mohamad dalam memodernisasi dan memajukan perekonomian puak Melayu yang 90 persen memeluk Islam.

Komitmen Mahathir ditandai dengan upaya pemerintahannya untuk mengakomodasikan kebangkitan Islam dalam kerangka modernisasi dan pembangunan ekonomi, yang dihubungkan dengan cita-cita sekular dalam menjadikan Malaysia sebuah negara industri pada 2020.[69] Mahathir berulangkali mengatakan Islam adalah agama yang progresif untuk menggalakkan kemajuan ekonomi dan pembangunan.

Seirama dengan Datuk Mahathir, Pak Lah pun dikenal masyarakat Malaysia sebagai seorang pemimpin Islam moderat yang *committed* dengan cita-cita menyatukan Melayu dan agama Islam dalam konteks keunggulan dan kemajuan. Komitmen Abdullah Ahmad Badawi untuk mengangkat harkat dan martabat puak Melayu amatlah kuat, dan itu dilakukan secara ''inklusif'' dengan mengajak kelompok Non-Muslim untuk bekerjasama sehingga golongan Non-Muslim bisa menerima, tidak melawan dan tidak merasa terancam.

---

[68] Syafiq Hasyim , "*Malaysia dan Islam ''Khadari''*", opini, *Kompas*, 30/03/2004

[69] David Camroux, "Accomodation, Cooption and Confrontation", *Asian Survey,* jurnal *XXVI* No.9, September 1996.

Jauh hari sebelum ia memangku jabatan perdana menteri, Pak Lah telah memperlihatkan komitmen sosialnya untuk membangun kerjasama antara Muslim dan Non-Muslim demi kemajuan dan manfaat bersama, sebagaimana pernyataannya:

> *"What the government has done to advance the Malays, of whom 90 percent are Muslims, has been accepted by non-Muslims and their respective coalition party leaders in Barisan Nasional. This is due to the spirit of "mufakat" which in Malay literally means "working together with others for our mutual benefit." Through this practice, we can develop the status of Malays without facing any opposition from non-Muslims."*[70]

Sebagaimana Pak Lah, tokoh Islam moderat Malaysia lainnya yang memiliki komitmen membangun ummat dalam kerangka kerjasama dengan golongan/ras non-Muslim adalah Datuk Seri Najib Tun Razak yang kemudian menjadi Deputi Perdana Menteri. Sebagai Menteri Pendidikan pada waktu itu di era Mahathir, Najib Tun Razak menyadari bahwa pendidikan amatlah penting dalam membentuk kaum Melayu yang kompetitif agar berhasil dalam persaingan di era globalisasi.

Dalam upaya menjadikan orang Melayu sebagai model bagi masyarakat Islam global, Najib Tun Razak berkata bahwa sebagai orang Islam, orang Melayu tidak boleh membiarkan diri dalam ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan.

> *"We have to face this reality and work towards developing our selves in various fields, Knowledge is integral if we want to remain competitive in the era globalization. The country's education system is geared towards enabling Malays to succeed."*[71]

Komitmen dan moto perjuangan kepemimpinan Islam moderat di Malaysia bukanlah slogan kosong yang tidak dipraktikkan, melainkan justru diimplementasikan secara mantap dan berke-

---

[70] *New Strais Times,* 29 Februari 1997.
[71] *The Star,* 14 Mei 1999.

sinambungan dalam upaya mewujudkan Islam yang toleran, maju, modern dan pluralis di Malaysia, dalam faktor-faktor formula sebagai berikut:

- *Pertama*, Islam mesti dibawa ke abad-21 dengan modernisasi.
- *Kedua*, Ummat Islam mesti bersatu karena Islam menuntut perpaduan sesama pengikutnya dan itu merupakan tanggung jawab bersama ummat Islam.
- *Ketiga*, Sekiranya ummat Islam di Malaysia tidak bersatu, maka mereka akan menjadi lemah dibandingkan dengan kelompok lain dan mudah dikuasai oleh neo-kolonialisme Barat.
- *Keempat*, Tidak ada konflik dan pertentangan antara nilai-nilai Islam dengan kemakmuran, kemajuan dan pembangunan ekonomi. Sekiranya PAS mengatakan hal ini sebagai sekuler, maka kaum non-Muslim belaka yang akan diuntungkan. Dalam hal ini, Malaysia berupaya menerapkan kebijakan yang adil kepada kaum non-Muslim dan terus mengejar kemajuan materi sungguhpun itu dianggap sekuler dan ditentang oleh golongan Islam militan dan konservatif (PAS).[72]

Amat kuat kesadaran para pemimpin Islam moderat seperti Pak Lah dan Najib Tun Razak bahwa, kestabilan politik, pemerintahan yang kuat dan baik, teknologi dan sains, kekayaan materi dan sofistikasi modern adalah sebagian proses untuk mengukuhkan persaudaraan keummatan dan kebangsaan (*ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah*) menuju Malaysia masa depan. Sudah tentu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum merupakan suatu keharusan sebagai bagian integral dari

[72] Patricia Martinez, *Mahathir, Islam dan Dilema Melayu Baru*, dalam Ho Khai Leong dan James Chin, (eds.), *Pentadbiran Mahathir: Prestasi dan Krisis dalam Pemerintahan*, (Singapore and Kuala Lumpur: Times Publishers, 2003).

apa yang disebut para pemimpin Islam moderat itu sebagai "Islam yang disiplin dan mengawal".

Keberhasilan kepemimpinan Islam moderat di Malaysia dalam memenangi pemilu juga tidaklah lepas dari formulasi sosok Malaysia baru masa depan yang dirumuskan Mahathir dalam *The Vision 2020* (Wawasan 2020), yang mendiskripsikan negaranya dalam elemen-lemen berikut:

1). Maju dalam ekonomi, 2). keadilan sosial, 3). stabilitas politik, 4). kualitas hidup, 5). nilai-nilai spiritual dan sosial, 6). Kebanggaan nasional dan 7). kepercayaan diri. Sehingga masyarakat Malaysia tahu ke arah mana harus berjalan dan mengarungi masa depan kehidupannya.

Dengan kata lain, model kepemimpinan Islam moderat itu sudah dipatrikan secara mantap oleh Mahathir, yang kelanjutannya diperkuat oleh generasi Pak Lah dan Najib.

Kalangan pers dan media internasonal memprediksi surutnya Islam berhaluan keras di Malaysia merupakan isyarat dan fenomena kebangkitan kembali Islam yang moderat, toleran, dan humanis di Asia Tenggara, Islam yang berperadaban, pluralis dan modern, yang oleh Abdullah Badawi digemakan sebagai *Islam Khadari*.

Sebagaimana diketahui, sejak pemboman World Trade Center, New York 11 September 2001 dan maraknya isu Jamaah Islamiyah (JI) yang disinyalir melansir gerakan terorisme dalam kerangka jaringan internasional di bawah kepeloporan Al-Qaeda, citra Islam moderat di Asia Tenggara memudar dan terdekonstruksi.

Walaupun kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai wilayah periferal Islam, kemunculan Islam moderat di Malaysia sempat tercatat sebagai *concern* masyarakat internasional menyusul munculnya pemikiran Anwar Ibrahim "*The Asian Renaissance*" (Gelombang Kebangkitan Asia) yang berteraskan masyarakat

madani, di mana Anwar menjadi simbol Islam, yang menandai Islamisasi Malaysia secara meluas dan mendalam pada tahun 1990-an tanpa terperangkap ke dalam ekstremisme Islamis. Pada kurun waktu itu, retorika Islam garis keras PAS telah berhadapan dengan ajakan Islam yang toleran, maju, pluralis dan modern dari Anwar Ibrahim sebelum disingkirkan oleh Mahathir Mohamad. [73]

Dulu di bawah pimpinan PM Mahathir Mohamad dan kemudian Pak Lah, dengan *sense of purpose dan sense of direction,* modernisasi dan perekonomian puak Melayu yang 90 persen memeluk Islam, relatif maju pesat. Komitmen Mahathir, yang dilanjutkan oleh Abdullah Badawi, ditandai dengan upaya pemerintahannya untuk mengakomodasikan kebangkitan Islam dalam kerangka modernisasi dan pembangunan ekonomi, yang dihubungkan dengan cita-cita sekular dalam upaya menjadikan Malaysia sebuah negara industri pada tahun 2020 .

Pak Lah meneruskan agenda Mahathir *Vision 2020* yang menegaskan bahwa agama Islam mengesahkan secara menyeluruh program pembangunan yang berpremiskan kapitalisme, dan bahwa Islam “mendisiplin dan mengawal’’ modernisme dan pembangunan ekonomi demi keabsahan politik.

Bagi masyarakat Trengganu, BN dan Pak Lah terbukti bukanlah pengobral janji instan dalam pemilu, sebab sesungguhnya mereka sejak jauh hari telah mempraktikkan program penyebaran Islam di Malaysia yang berlaku beriringan dengan perkembangan ekonomi dan bahwa model Islam Malaysia pantas diikuti oleh negara-negara lain untuk diterima dalam sistem pentadbiran (*governance)* mereka. (*New Straits Times, 25/02/ 1997).*

[73] Noor Farish, *PAS Victory is A Political One: Look Beyond Rhetoric of Islam vs Secularism* (Asiasource, 1999).

Hal ini menyadarkan rakyat, khususnya puak Melayu, bahwa Pak Lah sudah lama menunjukkan model Islam moderat yang berperadaban, yang perduli pada pluralitas dan modernitas. Sementara Islam berhaluan keras, PAS lebih mengandalkan slogan lama seperti syari'ah Islam, tradisi dan bahaya "jahiliyah modern."

Di bawah kepemimpinan Pak Lah sebagai penerus Mahathir, Islam moderat membangkitkan kaum perempuan agar menjadi "khalifah" untuk menjalankan tugas-tugas lebih daripada seorang isteri dan ibu untuk memberi khidmat dalam kehidupan masyarakat dan mengambil bagian dalam pembangunan negara dan ummat. Hal ini bertentangan dengan slogan Islam berhaluan keras PAS yang berbau sengit paternalisme, patriarki dan fanatisme agama, selain menganggap liberalisasi dan modernisme oleh Islam moderat (BN) itu sebagai penyelewengan atas konsep dalam tradisi dan sumber Islam, suatu lagu lama yang tak lagi memikat rakyat.[74]

Kekalahan PAS di Trengganu tak terhindarkan akibat maraknya isu bahwa PAS mempunyai ciri-ciri fundamentalisme yang berbau penyelewengan agama, yang bisa mendistorsi Islam. Isu ini sangat mengkhawatirkan puak Melayu, mengingat mereka masih memiliki memori sosial tentang isu terorisme Jamaah Islamiyah (JI) dan Darul Arqam 1995-96 yang melakukan pembangkangan terhadap negara.

Dengan melihat keberhasilan Islam moderat di Malaysia, bukan berarti Islam berhaluan keras di Indonesia lantas bakal surut atau kalah dramatis dalam berpacu meningkatkan pengaruh. Bagaimanapun para pemimpin Islam moderat tidak boleh meremehkan upaya dan capaian golongan Islam berhaluan keras di sini dalam memikat ummat untuk mengikuti jejak mereka dalam menghadapi apa yang mereka sebut "jahi-

---

[74] Ho Khai Leong and James Chin, (eds), *Mahathir's Administration: Performance and Crisis in Governance* (Times Books International, 2001).

liyah modern'': kapitalisme-liberalisme, ketidakadilan dan dehumanisasi. Apabila para pemimpin dan kaum Islam moderat mampu memberikan jawaban terhadap masalah dan krisis di Indonesia, niscaya akan surutlah kaum Islam berhaluan keras di Indonesia yang citranya terpuruk di dunia internasional akibat terorisme agama dan kekerasan sejenis yang berbahaya.

Memang ada kesamaan antara partai-partai Islam di Malaysia dan Indonesia yakni memperjuangkan dan mengkampanyekan gagasan pemerintahan berdasarkan syari'ah Islam. Di Indonesia, partai-partai Islam memiliki memori sosial yang kuat atas Piagam Jakarta. Dengan memori sosial itu, partai-partai Islam pasca Orde Baru Soeharto, mencoba melakukan kritisisme dan koreksi serta klaim atas kegagalan modernisme sekuler di Indonesia dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan beradab.

Untuk sebagian, agenda perjuangan syari'ah Islam juga diinspirasikan keberhasilan PAS di Malaysia dalam memperoleh kekuasaan di negara bagian Kelantan sejak 1978, yang pada pemilu 2004 dominasi PAS itu nyaris dikikis oleh BN.

Bagi partai-partai Islam di Indonesia yang melancarkan gerakan syari'ah Islam, sebagaimana PAS di Malaysia, kemenangan BN yang menyerukan *Islam Khadari* (Islam yang berperadaban, toleran, maju, pluralis dan modern) seyogianya menjadi pelajaran berharga dalam menampilkan diri dan menata ulang agendanya, dalam mengarungi arus perubahan pada level regional dan global.

Surutnya Islam berhaluan keras di Malaysia tak terlepas dari keberhasilan para pemimpin Islam moderat untuk meyakinkan puak Melayu bahwa konservatisme dan radikalisme Islam bukanlah jawaban atas kompleksitas modernisme dan globalisme yang dihadapi rakyat Malaysia dalam menapak ke depan. Dan ini selayaknya menjadi cermin bagi para pemimpin Muslim berhaluan keras dan partai-partai Islam di Indonesia dalam

kontestasi pemilu dan dalam mengarungi masa mendatang agar mereka tak terjebak ekstremisme dan kebuntuan ideologi serta gagal menjawab tantangan zaman.

b. Islamisme dan Nasionalisme

Dalam tiga dasawarsa terakhir, kita menyaksikan kebangkitan Islam di Malaysia, yang merupakan bagian dari kebangkitan Islam di Asia Tenggara, yang tidak semata-mata terinspirasi oleh kemajuan peradaban Barat. Studi Evers dan Sharon Siddique (1993) menyebutkan terdapat empat model gerakan yang melatarbelakangi kebangkitan Islam. Pertama, gerakan penolakan atas rasionalisasi, yaitu penolakan atas demistifikasi dunia. Kedua, gerakan sebagai sebuah usaha untuk mengatasi tekanan-tekanan modernisasi. Ketiga, gerakan anti imperialis dan hegemoni. Dan keempat, gerakan pembaruan yang merupakan doktrin agama itu sendiri.

Namun demikian, sekalipun Islam mengalami kebangkitan, pengaruhnya ke dalam politik Malaysia tidaklah dominan. Atmosfer politik pada Pemilu Malaysia Maret 2008 ini masih mencerminkan kuatnya arus sosial dan pemikiran Nasionalisme terhadap Islamisme.

Sebagaimana dicatat pakar politik Malaysia Mohamad Abubakar (1988), meskipun Islam secara universal diterima sebagai faktor sosial yang menyatukan, - yang tanpa hal ini golongan Melayu akan menjadi lemah -, namun Islamisme tidak sempat mendominasi negeri ini. PAS hanyalah parpol minoritas di Malaysia. Ini terbukti Islam hanya mempertahankan yang telah ada, yaitu sebagai bagian integral dari nasionalisme Melayu, seperti yang terefleksikan pada dinamika BN/UMNO.

Keyakinan Islam nampak tetap dipertahankan, sekalipun dalam bentuk yang tidak memungkinkannya menjadi satu-satunya penentu dalam kehidupan sosial dan individu.

Dalam hal ini, semboyan "agama, bangsa dan tanah air" sejak kemerdekaan Malaysia, telah mencakup aspirasi politik Melayu. Kedudukan Islam dan Nasionalisme sebagai sekutu alami tetap berlangsung aman sampai hari ini.

Kaum nasionalis dan agama bersekutu dalam BN/UMNO untuk memperjuangkan supremasi politik dan kemandirian kultural golongan Melayu di hampir segala bidang kehidupan bangsa, dan sampai kini kampus Universitas Malaya (di mana Mahathir, Badawi dan Anwar Ibrahim merupakan alumninya) adalah salah satu wadah di mana orang-orang Melayu dari dari berbagai paham ideologi dan politik secara *real politics* dipersatukan oleh tujuan nasionalisme untuk mewujudkan Malaysia yang modern dan maju, sebagai *the struggle for the real* yang melampaui Islamisme sempit puak Melayu.

Gejolak Politik Malaysia

a. Demokrasi Malaysia

Pemilu ke-12 di Malaysia 8 Maret 2008 diikuti 10,9 juta pemilih, termasuk 700.000 pemilih baru dari 26 juta penduduk. Seluruh partai politik memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DUN (DPRD), kecuali di Sarawak. Sejak kemerdekaan tahun 1957, koalisi Barisan Nasional (BN) selalu memenangi Pemilu. Dari berbagai dialog dengan para aktivis UMNO dan inteligensia di Universitas Malaya dalam lawatan penulis ke Malaysia, masih tampak bahwa peluang BN untuk meraih kemenangan tetap besar.

Pemilu itu dipercepat dari jadwal oleh PM Abdullah Ahmad Badawi dengan harapan koalisi Barisan Nasional-dengan UMNO sebagai mitra utama- bisa menang. Mumpung rakyat masih dapat diyakinkan karena masih merasakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik yang relative baik, dibandingkan Indonesia atau Philipina, misalnya. Namun demikian, para akademisi mengkritik bahwa demokrasi yang dipraktik-

kan di negeri jiran itu tak lebih dari demokrasi prosedural, semacam quasi-demokrasi, semi-demokrasi bersifat legal-formal atau ''demokrasi iliberal''. (Fareed Zakaria, 1988). Bagaimanapun, di Malaysia kebebasan sipil dan kemerdekaan pers amat dibatasi.

Dalam pemilu ini, Abdullah Badawi yakin akan menang. Dia maju dengan tema kampanye mempromosikan "masyarakat Islam *khadari*," yakni masyarakat Muslim yang moderat dan beradab, mendukung pembangunan dan bersikap inklusif terhadap semua ras. Tujuannya jelas: berupaya menarik warga mayoritas Melayu (etnis Muslim) sebanyak mungkin dari kubu oposisi yang didominasi partai-partai berasas Islam, seperti Parti Islam Se-Malaysia (PAS), DAP (Democratic Action Party) dan Partai Keadilan Rakyat yang merupakan oposan utama yang tergabung ke dalam Barisan Alternatif (BA).

Badawi ingin menunjukkan, Malaysia butuh masyarakat yang berpandangan Islam moderat, cinta damai, adil, dan mendukung pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan diri di semua bidang pekerjaan, bukan Islam konservatif seperti yang dianut PAS. Sesungguhnya koalisi Barisan Nasional, terutama Organisasi Bangsa Melayu Bersatu (UMNO) yang dipimpin Abdullah, kali ini juga tidak akan kesulitan memenangi pemilu secara nasional.

Ingat, bahwa pada Pemilu 1999, etnis Melayu yang merupakan 60% dari 25 juta penduduk Malaysia memang banyak yang bersikap anti-Barisan Nasional. Toh UMNO tetap menang. Demikian halnya pada pemilu 2004, kemenangan itu kembali berulang. Oposisi yang dimotori PAS/BA pasti menyadari arti kekalahan ini. Maklum, sejak mendapat kemerdekaan dari penjajah Inggris pada 1957, UMNO dan Barisan Nasional selalu menang secara nasional.

Dalam Pemilu ini akan bertanding dua kubu yakni Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO (United Malays National Or-

ganization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) melawan Barisan Alternatif (BA) yang dimotori PKR (Partai Keadilan Rakyat), PAS (Pan Malaysian Islamic Party atau Partai Islam Se-Malaysia), dan DAP (Democratic Action Party).

Tapi Barisan Nasional dan media massa pro pemerintah selalu memberikan label kepada oposisi sebagai "barisan pembangkang", sedangkan oposisi memilih nama barisannya sebagai Barisan Alternatif (BA).

Parpol yang menjadi motor di BN adalah partai yang keanggotaannya berdasarkan ras, seperti partai berdasarkan ras Melayu, China, dan India. Sedangkan di barisan alternatif hanya PAS yang merupakan partai ras, yakni partai Islam. Sedangkan PKR dan DAP merupakan parpol multiras.

Pada akhir tahun lalu, ada usulan agar BN melakukan gabungan partai atau membentuk partai baru multiras, tapi hal itu ditolak UMNO.

Dalam BN, banyak parpol kecil atau daerah yang mendukung, seperti Partai Gerakan di Penang, Partai Progresif Rakyat (PPP), dan Partai Bersatu Sabah (PBS). Terdapat 14 Parpol pendukung dalam BN, sedangkan dalam barisan alternatif ada 19 Parpol.

Malaysia begitu terpukul oleh kenaikan harga barang, tindak kriminal yang menjadi-jadi, korupsi di berbagai tempat, dan ketegangan antar-etnis. Semakin lama Barisan Nasional menangguhkan pemilu, mereka bisa semakin kehilangan banyak dukungan dalam pemilu.

Sejatinya, masa empat tahun pemerintahan Badawi bagi kaum menengah ke bawah cukup menjemukan, mengecewakan, dan diwarnai banyak kegagalan. Sejak memenangi Pemilu 2004, koalisi yang dipimpin Badawi mendapatkan 90% dukungan di parlemen.

Koalisi BN di parlemen ke-11 menguasai 199 kursi atau 90 persen dari total 222 kursi dan mengontrol 13 DUN(DPRD) dari 14 negera bagian, kecuali Kelantan yang dikuasai PAS.

Tapi, pemerintahan Badawi tak henti menuai berbagai kritik pedas. Di antaranya, ia dianggap lemah dan tidak bisa mewujudkan janji yang diucapkan saat kampanye, yaitu memberantas korupsi dari bumi Malaysia di bidang bisnis maupun politik.

Sejauh ini, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi.

Data statistik yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mengungkapkan penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Etnis China mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60%n dari total 26 juta penduduk negeri itu. Konon kini etnis Melayu hanya menguasai 11,7% (bukan 20%) kegiatan bisnis, sedangkan etnis China 71%.

Pada 2005, Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara. Kondisinya di belakang Indonesia dan Thailand .

Mengikuti ukuran nisbah Gini (*Gini coefficient*), ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, Malaysia berada pada 0.47. Bercermin pada data Bank Dunia, jurang pendapatan individu di Malaysia adalah kedua paling buruk di Asia. Hanya Papua New Guinea yang lebih buruk dari Malaysia. Dari 127 negara, Malaysia berada di urutan 101 dari segi indeks Gini.

Dan selama krisis moneter 1997-1998, kalangan menengah ke bawah di Malaysia dikorbankan oleh pemerintah untuk menopang ekonomi lapisan atas.

b. Instabilitas Ekonomi-Politik di Malaysia

Sebagai dampak dari krisis global, buruknya kondisi perekonomian dunia mengakibatkan perusahaan-perusahaan di Malaysia, terutama sektor manufaktur ditutup atau mengurangi aktifitasnya.

Hal ini membuat tingkat penggangguran di Malaysia pada tahun 2009 menjadi 4,5% berbanding hanya 3,7% tahun 2008. Sejak bulan Oktober 2008 sebanyak 25.000 orang tenaga kerja kehilangan pekerjaan, sebanyak 30.900 orang diberhentikan sementara dan 23.900 orang mengalami pemotongan gaji. Pada 2010, ekonomi Malaysia dapat tumbuh antara 4,0% hingga 5,0%. Semua sektor perekonomian menunjukkan perkembangan positif antara lain sektor pertambangan (1,1%), manufaktur (1,7%), pertanian (2,5%) dan konstruksi (3,2%). Sektor jasa tetap menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,6%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia juga didukung oleh konsumsi swasta pada kadar 2,9% dan investasi swasta yang kembali pulih serta tumbuh sebesar 3,4%.

Semakin baiknya pertumbuhan ekspor yang mencapai 3,5% dapat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Inflasi tetap berada di antara 1,5%-2,5% dan tingkat pengangguran berada di bawah 4,0%. Pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar 2,5% menjadi RM 24.661 (US$ 7.046).

Namun di sisi lain, sesungguhnya sejak tahun 2005, menurut Anwar Ibrahim, Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara, malah di belakang Indonesia dan Thailand. Celakanya, pemerintah tidak sensitif atas kenyataan senjang sosial-ekonomi yang dialami puak Melayu di negeri itu.

Tak mengherankan jika kini para demonstran menuntut reformasi pemilu, keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan akses media yang seimbang bagi seluruh partai di Malaysia. Mereka

juga mengecam praktik penipuan pada pemilu yang selalu menguntungkan koalisi Barisan Nasional. Koalisi ini dimotori Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Gerakan massa kali ini merupakan pukulan berikutnya terhadap PM Najib Razak, musuh bebuyutan Anwar Ibrahim.

Kini dengan demo oposisi Puak Melayu itu, di Malaysia praktis puak Melayu pecah belah menjadi tiga kekuatan yakni PAS, Partai Keadilan, dan UMNO. Sementara itu, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis, karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pada 2008, mengungkapkan penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu.

Etnis China mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu. Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sementara etnis China 71 persen.

Tentu saja data yang disampaikan UMNO tahun 2008 itu menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan tersulutnya kebencian sosial.

Namun, sekurang-kurangnya dari pihak UMNO, paparan itu tidaklah dimaksudkan menggelisahkan etnis China yang meliputi 25 persen penduduk, atau keturunan India yang mencakup 10 persen penduduk.

Namun harus diakui, akibat kesenjangan ekonomi itu, pembelahan etnis di Malaysia, jadi lebih tajam dan mengkhawatirkan, sementara politik cenderung eksplosif. Setiap kali terjadi aksi demonstrasi besar, situasi politik mudah memanas, dan polisi serta penguasa menjadi tegang, bahkan panik.

Akibatnya, aparat polisi rezim mudah panik dan brutal dalam merespon demonstrasi massa: mereka menembak gas airmata secara membabi buta dan menangkap paksa sekitar 1600 demonstran, suatu demontrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir yang didukung pihak oposisi. Di antara mereka yang ditangkap adalah Nurul Izzah, putri Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi yang selama ini menentang Barisan Nasional, Abdul Hadi Awang, Presiden Pan-Malaysia Islamic Party (PAS), partai oposisi terbesar di Malaysia, dan Ambiga Sreenivasan, pemimpin Koalisi Bersih, yang mengorganisasi aksi unjuk rasa.

Pemilu belum akan dilakukan sampai tahun 2013, namun para analis menyatakan PM Najib Razak bisa mencari mandat awal setelah pertumbuhan ekonomi mencatat angka tertinggi pada 2010, suatu capaian yang dalam 10 tahun terakhir. Di bawah tekanan rakyat saat ini, Najib dapat mempertimbangkan kembali rencana untuk pemilu yang dipercepat dan menunda reformasi, seperti pemotongan subsidi bahan bakar atau melepas program tindakan afirmatif bagi mayoritas Melayu di negara itu.

Bagaimanapun, Malaysia kini menghadapi instabilitas politik-ekonomi: kalangan investor asing khawatir bahwa setiap gelombang sentimen anti-pemerintah bisa menunda reformasi ekonomi yang penting untuk memikat investasi.

c. PAS dan Teori Domino

Islamisme yang diwakili oleh PAS menyadari kemenangan secara nasional tidak datang dalam waktu dekat. PAS diduga akan memusatkan perhatian pada upaya memenangi suatu negara bagian. Pada pemilu 1999, Kelantan dan Terengganu yang bertetangga, jatuh ke tangan PAS. Tapi pada pemilu 2004 hanya Kelantan yang masih dikuasai PAS, dan pesaingnya, BN/UMNO tetap unggul. Dan itu pasti akan dipertahankan mati-matian, sekaligus memenangi satu lagi dari seluruhnya 13 negara bagian.

Sejak beberapa tahun terakhir, muncul keyakinan orang pada "teori domino" yang terbukti meleset: setelah Kelantan dan Terengganu, akan jatuh pula Kedah, negara bagian dengan 821.901 pemilih dan parlemen negara bagian (DUN) beranggota 36 orang. Pada 1999, BN meraih 24 kursi DPRD dan PAS 12 di Kedah. Di parlemen pusat, BN dan PAS masing-masing meraih delapan dan tujuh kursi untuk wilayah Kedah.

Dikenal sebagai lumbung beras Malaysia, Kedah adalah tanah kelahiran dua mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dan almarhum Tunku Abdul Rahman. Sehingga Kedah menjadi simbol kantong UMNO dan nasionalisme. Dalam kampanye untuk merebut Kedah, PAS mengumandangkan slogan "*Dah lama dah*" (Sudah terlampau lama), untuk mengingatkan rakyat setempat bahwa UMNO telah berkuasa terlampau lama di negara bagian itu. Sebagai balasan, UMNO Kedah membuat slogan *"Dah lama dah PAS membohongi kita"*. Banyak pengamat yakin, jika Kedah (Kelantan dan Terengganu) jatuh ke tangan PAS, Negara Bagian Perlis akan jadi domino runtuh berikutnya lagi.

Sejak pemilu 1999, BN/UMNO telah melakukan konsolidasi dan pada pemilu 2004 mereka berhasil, sehingga sekarang posisinya lebih kuat. Namun, hasil dua pemilu sela di Kedah beberapa tahun lalu menunjukkan, PAS mampu mempertahankan pengaruh di kalangan etnis Melayu, dan tetap menjadi ancaman serius bagi koalisi Barisan Nasional yang berkuasa. Perlu diingat, koalisi tersebut banyak kehilangan kursi, bukan karena oposisi memang kuat, melainkan karena para anggota DPRD dari UMNO yang bakal diganti, melakukan pembangkangan. Mereka menyuruh konstituennya tidak mendukung kandidat baru BN. Yang lebih *teruk* (bahasa Melayu yang berarti 'parah'), para anggota dewan yang ingin diganti oleh partainya sendiri itu, mengajak para pendukungnya mencoblos PAS.

Sekalipun PAS tampil bagus pada 1999 lalu, tapi akhirnya partai itu terpuruk pada pemilu 2004. Kini partai Islam tersebut harus berjuang keras untuk memenangi Negara Bagian Kelantan, Terengganu dan Kedah.

Di Kedah PAS perlu mempertimbangkan komposisi penduduknya: 75% etnis Melayu, 15% Tionghoa, dan 10% India . UMNO mengharapkan dukungan warga non-Melayu di daerah-daerah Kedah yang berkomposisi penduduk berimbang secara ras, yang merupakan separuh dari 36 konstituen negara bagian tersebut. Populasinya, 45% etnis Melayu, 45% Tionghoa, dan 10% etnis-etnis lain. Bagi PAS, upaya membidik daerah-daerah berpenduduk ras campuran tersebut bukan hal mudah. Pasalnya, partai itu harus bersaing pula dengan Parti Keadilan - sekutunya dalam Barisan Alternatif - yang bakal membidik pemilih yang sama. Demikian halnya di Kelantan dan Terengganu, BN dan BA bakal bersaing keras dan ketat.

d. Kekerasan Politik Malaysia

"Kami bukan penjahat, kami hanya meminta pemilihan umum yang bebas dan adil," kata putri pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, Nurul Izzah Anwar kepada wartawan setelah ayahnya jatuh dan terluka dalam sebuah huru-hara ketika dia dan pendukungnya disemprot gas air mata.

Koalisi Bersih yang diusung Anwar Ibrahim menginginkan reformasi pemilu, termasuk pemberantasan jual-beli suara dan pencegahan orang ikut pemilihan beberapa kali selama masa pemilu, juga penggunaan tinta yang sulit dihapus untuk mencegah voting berulang, pemberian akses media yang sama dan merata untuk semua parpol, serta pembersihan daftar pemilih.

Dengan demonstrasi ribuan orang itu, politik Malaysia berguncang lagi. Ribuan demonstran pro-reformasi dari kelompok oposisi di Kuala Lumpur, turun ke jalan menuntut reformasi pemilu, kebebasan berpendapat dan keadilan sosial.

Oposisi Malaysia mendapatkan keuntungan besar pada pemilu 2008 melawan koalisi pemerintah yang berkuasa. Namun, mereka bisa menang seandainya aturan pemilu lebih adil.

Karena itu, masuk akal kalau para demonstran menuntut pemerintahan Najib Rajak membuat undang-undang pemilu yang jujur, bebas serta lebih terbuka. Aksi ini dimotori oleh pihak oposisi, bahkan para pemimpin oposisi turut dalam demonstrasi ini.

Pihak oposisi menuding pemerintah memprovokasi kericuhan itu, dan pemerintah Najib Razak semakin terdesak karena banyaknya masalah korupsi dan diskriminasi rasial.

Aksi oposisi ini jelas bertujuan menyuarakan ketidakpuasan masyarakat Malaysia yang kecewa atas pemerintahan yang sekarang. Ada juga yang menafsirkan ini sebagai usaha menggulingkan pemerintahan berkuasa.

Gesekan Malaysia-Indonesia Soal Ambalat

Di bawah pemerintahan PM Najib Razak, sempat terjadi gesekan antara RI dan Malaysia soal tindakan kapal perang Diraja Malaysia yang sering memprovokasi masuk ke wilayah Ambalat. Komisi I DPR bertolak ke Malaysia melakukan pembicaraan soal sikap Malaysia tentang klaim Malaysia terhadap Ambalat itu.[75]

Terulangnya kembali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia dikarenakan belum ditemukannya titik temu dalam perundingan antara kedua negara. Hingga saat ini kedua negara masih mempertahankan klaim atas peta perbatasan, dimana Ambalat diakui oleh kedua negara. Proses perundingan sejauh ini telah 10 kali lebih dilakukan sejak tahun 2005. Deplu RI tidak akan membawa kasus Ambalat ke forum yang lebih tinggi yakni PBB.

---

[75] Departemen Luar Negeri merundingkan kasus Ambalat seperti yang disampaikan Juru Bicara Deplu Tengku Faizasyah, di Departemen Luar Negeri Selasa (02/06/2009) .

Selama tahun 2009, kapal perang Malaysia telah 11 kali memasuki wilayah Ambalat tanpa ijin. Untuk menjaga kedaulatan, TNI telah mengerahkan 7 kapal perang untuk menjaga perairan Ambalat.

Pemerintah Indonesia memperingatkan pemerintah Malaysia untuk menghormati perundingan mengenai status blok Ambalat dan menghentikan provokasi.

"Pada saat proses perundingan berjalan (seperti sekarang ini) kita berharap semua pihak menghormati perundingan," kata Menko Polhukam Widodo AS di Kantor Kepresidenan Jakarta, Sabtu (6/6/2009) malam, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima anggota Komisi I DPR.

Perkembangan yang terjadi di blok Ambalat seiring dengan beberapa kali provokasi yang dilakukan oleh Malaysia dinilai cukup mengganggu. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia kedaulatan adalah harga mati. Pemerintah serius menjaga kedaulatan.

Indonesia, akan menerapkan prinsip usir, halau kepada kapal-kapal Malaysia yang melanggar batas wilayah. Kalau tidak diindahkan akan diambil langkah tegas dengan mekanisme lain. Bahwa sekalipun istilah "perang" tidak terucap namun dikatakan bahwa Indonesia akan mengambil mekanisme lain atau upaya terakhir. TNI siap menghalau para pelanggar batas wilayah. TNI telah menggelar enam kapal untuk berjaga-jaga di blok Ambalat.

RI telah menyampaikan klaim dan protes sebanyak 35 kali. Hal itu menunjukkan ketegasan klaim Indonesia guna mengingatkan Malaysia untuk segera melakukan perundingan membahas penyelesaian Ambalat kembali. Kedua negara telah berunding 13 kali namun kemudian tertunda karena ada perubahan pada tim perunding Malaysia. Ketegangan Ambalat adalah bukti bahwa iritasi antara Indonesia dan Malaysia mudah terjadi pasca lengsernya Soeharto dan Mahathir di masing-masing negara tersebut.

KONKLUSI

Kendatipun Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir dicela dan dihujat oleh banyak kalangan karena menghalangi laju perkembangan demokrasi,[76] Soeharto dan Mahathir serta Lee Kuan Yew tidak lagi memperlakukan negara sebagai sesuatu yang impersonal, melainkan menjadikan paralel dengan kekuatan dan kekuasaan diri mereka berdua. Negara yang mereka pegang berdua menjadi demikian adidaya, tidak terhadap negara-negara lainnya, melainkan atas masyarakatnya sendiri.

Di sini sangat menarik bagaimana secara kultural negara tampil dalam personifikasi pemimpin. Negara dan pemimpin menjadi subyek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan-kepentingan kekuatan sosial yang ada.[77]

Kesuksesan negara dalam bidang ekonomi dan politik, untuk memperjuangkan kepentingannya tergantung dari komposisi dan konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada, nasional dan internasional.[78]

Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir telah juga sama-sama membawa negaranya masing-masing menjadi 'negara Bonapartis' yang tumbuh menjadi negara mandiri karena adanya tuntutan-tuntutan industrialisasi sehingga dibutuhkan aliansi-aliansi baru antara negara dengan kekuatan-kekuatan sosial-politik dan sosial-

---

[76] Tentang hal ini, lihat misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, "The Roles of the Indonesian Armed Forces in the Process of Democratization", *makalah,* yang disampaikan pada seminar "The Relations Between the European Union and Indonesia in the Context of Asian Crisis," Hague, Netherlands, 26 Oktober 1998, h. 3.

[77] Lihat Guillermo O'Donnell, "Reflection on the Pattern of Change in the Bureaucratic Authoritarian State," dalam *Latin American Research Review*, (Winter, 1978).

[78] Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991). h. 20.

ekonomi yang ada baik nasional maupun internasional.[79] Oleh karenanya, untuk melihat ketokohan Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir, secara struktural, tidak dapat diabaikan teori struktural tentang negara.[80]

Secara kultural, Soeharto adalah seorang Jawa, Lee Kuan Yew adalah seorang China Perantauan dan Mahathir adalah Melayu yang ketiganya memiliki kemandirian sikap kultural tersendiri dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik maupun ekonomi pada tingkat nasional maupun internasional.

Sikap radikal dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi politik asing telah diperlihatkan oleh Soeharto ketika berhadapan dengan IGGI dan oleh Mahathir serta Lee Kuan Yew ketika berhadapan dengan IMF. Ketiganya, secara kultural memiliki apa yang disebut oleh Liddle[81] "*relative autonomy*" dan mereka bertiga telah menunjukkan diri sebagai pemimpin yang bisa melihat dari cermin kebudayaan masyarakatnya. Artinya, kekuasaan yang telah ditegakkan merupakan sebentuk kebijakan yang adaptif yang bersumber dari budaya masyarakat itu sendiri.

Seorang pemimpin yang meskipun acap kali dilihat senantiasa mengambil peran menentukan dalam mengubah dan membentuk kembali masyarakatnya, namun struktur di atas mana kinerja pemimpin itu berlangsung masih sangat dipengaruhi oleh budaya yang bekerja di dalam masyarakat. Oleh karenanya, faktor budaya yang dominan di dalam sebuah masyarakat, secara langsung

---

[79] Untuk diskusi tentang teori ini, lihat Peter Evans, "Class, State and Dependence in East Asia: Lesson for Latin Americanists", *makalah*, yang dipersembahkan pada konferensi yang diorganisir oleh The Institute of Socal Sciences, Seoul National University, Seoul, Korea, 6 – 8 Juni 1985, sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman, *Negara dan pembangunan…*, h. 19.

[80] Untuk pengantar awal tentang teori ini, lihat Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan…*

[81] Untuk kerangka teoritis tentang kemandirian relatif ini, lihat R.W. Liddle, "The Relative Autonomy of the Third World Politician: Soeharto and Indonesian Economic Development in Comparative Perspective," *International Studies Quarterly* 35, no. 4 (July, 1991)

atau tidak, tetap menyumbangkan pengaruh tertentu terhadap kinerja kepemimpinan seseorang.[82]

Indonesia di bawah Soeharto, Singapura di bawah Lee Kuan Yew dan Malaysia di bawah Mahathir adalah negara yang memiliki kemandirian relatif yang lahir tidak hanya karena terjadinya perubahan struktural konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi yang ada, namun juga karena adanya perubahan konfigurasi sosial-budaya dan politik. Artinya, kemandirian relatif ini terjadi bukan hanya karena adanya perubahan struktur, melainkan juga secara kultural yang bukan para pemimpin negara sendiri yang membentuknya.[83] Oleh karenanya, untuk melihat peran ketiga tokoh ini, seorang peneliti mestilah mendekatinya dari sudut kultural dan struktural secara sekaligus. Selain itu analisis dan interpretasi dari berbagai perspektif juga penting untuk menjelaskan secara komprehensif tentang Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir.

Semua pencapaian Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir dalam membangun negara mereka masing-masing mengalami goncangan dahsyat pada tahun 1997. Banyak kajian yang mencoba menjelaskan tentang kehancuran finansial yang memicu resesi dan kemudian merembet ke krisis multidimensi; kerusuhan dan kekerasan bermunculan di berbagai daerah; gerakan separatisme di beberapa daerah dan krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia dan Malaysia, dan hanya sedikit saja yang dirasakan oleh Singapura, yang kesemuanya tidak dapat dimengerti tanpa perspektif historis, politik, ekonomi, sosial dan kultural.[84]

---

[82] Fachry Ali, "Masyarakat, Pemimpin dan Budaya di Asia Tenggara: Perspektif (Pengalaman) Indonesia", *makalah,* disampaikan dalam Seminar "Kebangkitan Asia: Peranan Generasi Baru Asia Tenggara", Institute for Southeast Asian Islamic Studies, IAIN Sulthan Syarif Qasim, Riau, 20-22 Juli 1997.

[83] Arief Budiman, *Negara daan Pembangunan*…., h. 19.

[84] Untuk kasus Indonesia tentang awal mula krisis hingga kejatuhan Soeharto, lihat Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi,* (terj.) (Jakarta: Gramedia dan The Asia Foundation, 2001).

Namun, ketiga tokoh ini mengakhiri masa kekuasaannya dengan cara yang kontras satu sama lain; Soeharto dipaksa mundur setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998) dengan cara yang tidak terhormat oleh mahasiswa dan dunia internasional, sementara Mahathir mundur dengan bangga dan penuh pesan retoris setelah 22 tahun berkuasa (1981-2003) dan Lee Kuan Yew bagaikan menurunkan tahta dari "kerajaan politik" Republik pulau Singapura kepada penggantinya.

Soeharto tunduk pada desakan melakukan reformasi (1998). Ia bahkan mengundang dan menawarkan kepada tokoh-tokoh "vokal" untuk ikut melakukan reformasi, sambil menyatakan tidak akan mencalonkan lagi sebagai presiden. Namun, tokoh-tokoh itu, dari yang moderat sampai yang keras, menolak ajakan Soeharto. Hanya Gus Dur yang sempat menyatakan kekecewaannya dengan mengatakan, "mau didukung *kok*, malah mundur."[85] Soeharto pun *step aside, lengser keprabon*. Masyarakat Indonesia pun merasa memperoleh peluang untuk mewujudkan obsesi demokrasi. Menyelenggarakan pemilihan umum, melahirkan UU Otonomi Daerah, demokratisasi di segala bidang, dan lain sebagainya. Namun, yang kemudian tampak di seluruh Indonesia adalah terjadinya anarki di mana-mana, dan bahkan disintegrasi bangsa.[86]

Lee Kuan Yew turun secara demokratis dan tidak mau memegang kekuasaan terlalu lama dan ia tetap dipandang sebagai "Bapak Bangsa" dan "the founding father" Singapura. Sementara itu, setelah 5 tahun kejatuhan Soeharto, Mahathir Mohamad di parlemen Malaysia mundur dengan sebuah retorika, sebuah pidato yang terasa menyentuh hati dan seolah-olah ditujukan kepada bangsa Indonesia. [87] Ia memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan obsesi demokrasi yang mungkin muncul setelah ia

---

[85] Lihat buku *Lengser Keprabon* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 2.
[86] Sulastomo, "Belajar dari Mahathir", *Kompas,* 3 November 2003.
[87] *Kompas,* 30 Oktober 2003.

mengundurkan diri dari jabatannya. Pidato itu secara implisit mengakui bahwa demokrasi belum dilaksanakan sebagaimana adanya. Sebuah pidato yang jujur karena ia mempunyai berbagai alasan mendasar dan kuat. Keyakinan bahwa jika demokrasi diimplementasikan, maka segala sesuatunya akan beres sama sekali tidak berdasar, terutama jika demokrasi langsung diterapkan. Mahathir menekankan, keberadaan Malaysia sebagai negara multi ras membuat negara itu berpotensi seperti kotak yang mudah terbakar, yang sewaktu-waktu dapat meledak jika kesatuan nasional tidak secara tekun dijaga. "Kita melihat betapa banyak masyarakat multietnis mengalami kegagalan. Jika kita tidak berhati-hati, kita pun akan mengalami kegagalan," tutur Mahathir dalam pidatonya.[88]

Dengan menyimak paparan di atas, begitu tampak bahwa kuasa dan kepemimpinan Soeharto, Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Soeharto (1966-1998) akhirnya jatuh dan dipermalukan oleh bangsanya akibat kekuasaan yang terlalu lama, korup dan melanggar hak asasi manusia, tapi tidak demikian halnya dengan Lee dan Mahathir yang tahu diri dan mundur di saat yang tepat.

Namun demikian, sejarah kepemimpinan Soeharto, Lee dan Mahathir di Indonesia, Malaysia dan Singapura seakan "benang merah'' yang melintasi Asia Tenggara, sebegitu rupa.(*)

[88] *Kompas*, 30 Oktober 2003.

Oposisi Anwar Ibrahim dan Politik Malaysia

SELINTAS TENTANG ANWAR IBRAHIM

Anwar Ibrahim adalah salah satu bintang politik Asia yang karirnya cepat berkembang. Ia juga tokoh reformasi populer di Malaysia. Wajah-nya pernah menjadi sampul majalah Time pada 1997 sebagai "Masa Depan Asia". Sebagai aktivis Muslim, ia mulai dikenal publik pada 1970-an sebagai mahasiswa radikal.

Anwar lahir pada 10 Agustus 1947 di Pulau Penang Utara. Ia anak dari buruh rumah sakit. Ia belajar di salah satu sekolah top Malaysia. Namanya terkenal sebagai aktivis pemimpin remaja Islam. Karena beberapa tindakannya, ia pernah dipenjara. Namanya pun dilambungkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Pada 1974, ia sempat dipenjara selama 20 bulan oleh Gerakan Keamanan Internal Malaysia karena memimpin demonstrasi anti pemerintahan melawan kemiskinan di utara. Kemudian, Mahathir mengajaknya bergabung dengan Organisasi Nasional Malaysia, partai utama pemerintah, pada 1982. Ia diajak untuk menjembatani rentang antara gambaran partai Malaysia yang nasionalis dan aspirasi Islam yang sedang berkembang. Di bawah Mahathir, Anwar berkembang pesat. Ia pernah menjabat berbagai posisi, seperti kementerian pertanian dan pendidikan dan menteri keuangan sejak 1991.

Anwar pernah ditunjuk untuk menggantikan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada 1993, ia pun diangkat menjadi wakil perdana menteri. Ketika tengah menjabat, ia merasa korupsi telah mengakar dalam politik dan bisnis Malaysia. Oleh karena itu, ia melakukan kampanye anti korupsi, kolusi, dan nepotisme pada 1998.

Anwar Ibrahim adalah murid politik Mohammad Natsir, tokoh Masyumi dan negarawan Indonesia. "Setelah menikah dengan Wan Azizah Wan Ismail, saya bawa langsung ke Abah Natsir untuk minta restu dan bimbingannya," kata Anwar yang memandang Natsir sebagai ayahandanya. Natsir telah mengajarkan Anwar bagaimana menggabungkan pemikiran idealisme Islam dan tindakan atau tingkah laku politiknya. [1]

Meminjam perspektif Khalid Jaafar, mantan sekretaris pers Anwar Ibrahim, kini Anwar telah memasuki tahap ketiga dalam hayat politiknya. Tahap pertama bermula sebagai pemimpin mahasiswa di Universiti Malaya. Sebagai presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBUM), beliau memperjuangkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Sebagai presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM), Anwar mula meniupkan kesadaran Islam di kalangan generasi muda. Gerakan ini diteruskan dengan lebih meluas dengan menubuh dan memimpin selama sepuluh tahun Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Meskipun tapak Anwar adalah Melayu-Islam namun sifat inklusifnya telah kelihatan dalam kepemimpinan Anwar sebagai presiden Majlis Belia Malaysia (MBM).

Tahap kedua, Anwar Ibrahim membuat keputusan *decisive* dalam tahun 1981. Desas desus waktu itu adalah ia akan bergabung ke dalam PAS (partai Islam se-Malaya). Dan Presiden PAS ketika itu telah memberikan tawaran. Semua pimpinan ABIM dan PKPIM tahu gosip politik tersebut. Dan hampir kesemua meramalkan

[1]Anwar hadir dan berpidato dalam acara ini, suatu seminar memperingati 100 tahun Mohammad Natsir di kampus Islam Internasional Selangor. Seminar ini bertujuan untuk mengangkat kembali tokoh pemikir dan politisi Islam. Selain seminar, juga diluncurkan buku tentang Mohammad Natsir agar bisa menjadi bahan bacaan generasi muda, yang berjudul "Mohammad Natsir Berdakwah di Jalur Politik Berpolitik di Jalur Dakwah." Selain Anwar, puteri Mohammad Natsir, yakni Asma Faridah Saleh, yang hadir dan memberikan sambutannya, sempat terhenti beberapa kali menahan tangis haru karena pemikiran dan perjuangan ayahnya diakui dan diperingati tidak saja di Indonesia tapi juga di Malaysia.

dan tidak sedikit yang mau agar Anwar mengambil alih pucuk pimpinan PAS. Namun Anwar kemudian memilih bergabung ke UMNO, dan tumbuh sebagai tokohnya pula. Tahap ketiga adalah langkah Anwar sebagai tokoh oposisi terkemuka dengan Barisan Alternatif-nya.

Anwar Ibrahim sejak semula memang tokoh yang kontroversial. Sebagai seorang pemuda Muslim ia lahir di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan di Pulau Penang, yang lebih kosmopolitan daripada masyarakat-masyarakat lain di Malaysia. Ketika menjadi remaja ia pun memasuki ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan menjadi salah seorang penganjur utama gerakan Islam di negeri jiran itu. Cap Islam itu tetap lekat padanya karena pengetahuan Islamnya yang baik walaupun kemudian ia memasuki UMNO (United Malay National Organisation). [2]

Saat menjadi Ketua ABIM, Anwar dikenal sebagai proponen gerakan Islam terkemuka di negeri tersebut. Di berbagai penerbitan, tiada hari berlalu tanpa menyebutkan dirinya sebagai pemimpin Islam kelak. Hubungannya yang dekat dengan berbagai gerakan Islam di Indonesia melengkapi tanda pengenal dirinya sebagai calon pemimpin gerakan Islam di masa depan. Pikiran-pikirannya tentang kedudukan agama Islam di negeri jiran itu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemikir di negeri tersebut. Bahkan keislamannya ini menutupi kesukaannya akan buku-buku dengan pemikiran liberal yang ada di Barat.[3]

---

[2] Abdurrahman Wahid, "Anwar, UMNO", *Kompas,* Selasa (20-10-1998).

[3] Dalam kaitan ini, Gus Dur pernah memperkirakan Anwar akan menjadi tokoh kunci dalam perkembangan dunia Islam yang kini tampak sedang berada di persimpangan jalan. Gus Dur, Paul D. Wolfowitz dan Anwar Ibrahim sempat bertemu di Jerman 2004 dan itu sangat penting. Ini rupanya juga dimengerti sepenuhnya oleh Paul Wolfowitz, hingga waktu itu ia datang dengan pesawat khusus ke Munchen dan kembali lagi ke Washington DC, setelah bertemu dengan Anwar Ibrahim dan Gus Dur. Baca, Abdurrahman Wahid, "Anwar Ibrahim & Paul Wolfowitz Dari Kaca Mata Gus Dur", *Esai*, The Wahid Institute, 8 Oktober 2004. Gus Dur dan Paul Wolfowitz sama-sama beranggapan, bahwa posisi Anwar Ibrahim, seperti Saad al-Din Ibrahim, Sekjen Muntada Al-Fikr Al-'Arabi (Klub Pemikiran Arab), yang

Bacaan humanistik-ilmiah inilah yang membuat Anwar Ibrahim meninggalkan ABIM, lalu memasuki pemuda UMNO. Sekaligus dia membawakan 2 wajah dalam peranan baru tersebut. Di satu sisi, ia tampak sebagai seorang Muslim modern yang mencoba mempertahankan keislamannya di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, Islam tidak ditampakkan sebagai agama kolot tetapi sebagai jalan hidup lurus dengan ukuran-ukurannya sendiri. Shalat, berakhlak pribadi yang tinggi dan berpikiran membentuk kembali kehidupan masyarakat yang telah diseret oleh materialisme Barat, merupakan tanda-tanda keagamaannya yang kuat.[4]

Namun pikiran keagamaan itu dibarengi pula oleh pikiran teknis yang lebih matang. Ia menjadi lebih nasionalis, terikat kepada kesejahteraan semua warga Malaysia dan memperhatikan dunia baru yang ditekuninya dalam kehidupan berbangsa. Demikianlah dia berkembang menjadi aktivis Islam plus Nasionalis Melayu sejati. Dan hal ini pula yang menyeretnya ke dalam dunia politik dan bergaul dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad.

Ia rela mengikuti pola yang lima belas tahun sebelumnya ditempuh oleh pemimpin Malaysia itu. Tidak heranlah jika kemudian Perdana Menteri Malaysia pada tahun 90-an mengangkatnya menjadi Wakil Perdana Menteri. Bukankah mereka secita-cita dan memiliki garis pemikiran yang sama? Karena itu, Mahathir membuang jauh-jauh semua politisi Melayu dari persaingan melawan Anwar. Bahkan kemudian Anwar menjadi "putra mahkota" Mahathir, meski akhirnya justru dipecat oleh Mahathir sendiri pada 1998.

Anwar kemudian menjadi lawan politik Mahathir, meski sebelumnya berhubungan sedemikian baik. Bahkan dalam pertalian keluarga pun keduanya memiliki hubungan yang unik. Karena

---

meringkuk bertahun-tahun di penjara Kairo, Mesir, harus dijaga sebagai salah satu tokoh Muslim moderat. Di lingkungan para pemimpin muslim, posisi seperti itu tidak dapat diisi oleh orang lain yang tidak memiliki latar belakang yang tepat.

[4] Abdurrahman Wahid, "Anwar, UMNO."

Wan Azizah, istri Anwar adalah juga sesama dokter yang menjadi kemenakan istri Mahathir. [5]

JALAN TERJAL ANWAR IBRAHIM

Tuduhan Sodomi

Sejak tak lagi menjabat di kekuasaan Anwar bertubi-tubi menghadapi cobaan. Anwar pernah dituduh melakukan sodomi dan korupsi. Tuduhan yang dapat menghentikan masa jayanya itu dirasa Anwar sebagai cara untuk menghentikan kampanye reformasinya. Ia kemudian masuk penjara karena tuduhan korupsi dan sodomi. Namun penjara tak membuatnya jera untuk berpolitik.

Pada September 1998, Dr. Munawar Anees, mantan penulis pidato Anwar dan Sukma Darmawan Sasmita Atmadja, saudara angkat Anwar, ditangkap atas kecurigaan melakukan sodomi dengan Anwar. Keduanya divonis hukuman penjara 6 bulan setelah mengaku bersalah atas dakwaan seks tidak normal dengan Anwar. Mereka kemudian menarik kembali pengakuan mereka dan mengajukan banding atas vonis tersebut. Alasannya, mereka mengklaim telah dipaksa mengaku bersalah.

Pada 29 September 1998, Anwar muncul di pengadilan dan mengaku tak bersalah atas dakwaan korupsi dan sodomi. Anwar muncul dengan mata lebam akibat dipukuli Inspektur Jenderal Kepolisian Rahim Noor. Belakangan, Rahim yang semula tidak mengakui perbuatannya, akhirnya minta maaf kepada publik atas pemukulan tersebut.

Selama persidangan, sebuah kasur dijadikan barang bukti di pengadilan. Pada kasur tersebut dikatakan terdapat jejak sperma Anwar. Hasil tes DNA menunjukkan sperma di kasur tersebut benar milik Anwar. Namun Anwar membantah kaitan dirinya dengan kasur tersebut. Tim pembela Anwar mengatakan, sampel

---

[5] Abdurrahman Wahid, "Anwar, UMNO."

DNA tersebut bisa jadi telah diambil dari Anwar saat tak sadarkan diri setelah dipukuli di tahanan. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Augustine Paul menerima bukti DNA tersebut.

Selama persidangan itu, Mahathir muncul di televisi untuk menjelaskan penangkapan wakilnya itu. Mahathir telah beberapa kali menyebut Anwar bersalah atas sodomi meski persidangan masih berjalan.

Pada 14 April 1999, Anwar dijatuhi vonis hukuman penjara 6 tahun atas dakwaan korupsi. Kemudian pada 8 Agustus 2000, Anwar divonis penjara 9 tahun atas dakwaan sodomi. Pada tahun 2001, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan yang mendukung vonis Anwar atas kasus korupsi. Pada Juli 2002, Anwar pun kalah di Pengadilan Federal atas kasus korupsi.

Kezaliman yang dirasakan Anwar Ibrahim setelah pemecatannya oleh PM Mahathir Mohamad sebagai deputi PM pada 1998 dan penjeblosannya ke penjara, membuat Anwar menempuh jalan oposisi yang keras. Nyaris tidak ada figur oposisi terkemuka di Malaysia, selain Anwar Ibrahim. Namun, tokoh oposisi yang tumbuh dari gerakan mahasiswa Islam ini bukan hanya aktivis Muslim yang berani keluar masuk penjara, melainkan juga cerdas dan bernas pemikirannya. Anwar adalah inteligensia Muslim terkemuka di Malaysia yang kaya gagasan, berwatak tranformatif dan imajinatif.

Kasus sodomi jilid II Anwar terjadi pada 29 Juni 2008. Ketika itu, Mohd Saiful Bukhari Azlan, mantan asisten Anwar, melaporkan Anwar ke polisi karena telah menyodominya.

Di Malaysia, tindak sodomi meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, bisa dikenai hukuman maksimum 20 tahun penjara dan cambuk.

Sejak awal kasus sodomi jilid II ini mencuat, Anwar bersikeras dirinya hanyalah korban rekayasa politik yang dilakukan pemerintah Malaysia. Menurut Anwar, dirinya dijadikan target sebagai

upaya pemerintah untuk menghentikan kebangkitan partai oposisi pimpinannya.

Di tengah deraan kasus sodomi yang menimpa Anwar, sebuah memo diplomatik Amerika Serikat (AS) bocor di WikiLeaks. Dalam memo tersebut terungkap adanya komunikasi antara pihak intelijen Singapura dan Australia mengenai masalah sodomi yang menjerat Anwar Ibrahim, mantan deputi perdana menteri yang kini menjadi pemimpin oposisi di Malaysia. Kuasa hukum Anwar pun berang.

Tim pengacara Anwar Ibrahim mengajukan protes ke pengadilan terkait munculnya pemberitaan di media Australia mengenai informasi, yang diklaim berasal dari memo yang dibocorkan WikiLeaks. Informasi itu tentang penilaian intelijen Singapura yang mempercayai bahwa mantan deputi PM Malaysia itu benar terlibat kasus sodomi.

Pengacara Anwar, Sankara Nair, seperti diberitakan laman harian New Straits Times, Selasa, 14 Desember 2010, menyatakan, pemberitaan media massa atas informasi yang belum dipastikan kebenarannya itu, bersifat spekulatif dan bisa menyesatkan publik serta mengganggu proses peradilan dan bisa menjatuhkan nama baik kliennya, yang belum diputuskan pengadilan apakah bersalah atau tidak atas kasus yang menjeratnya.

“Menurut penelusuran kolega-kolega dan sumber kami, tidak ada kabar seperti itu di laman WikiLeaks maupun di Sun Herald, yang dikabarkan sebagai media pertama yang memberitakan informasi itu, semuanya spekulatif,” demikian kata Sankara.

Pemberitaan isu sodomi itu jelas memberikan angin segar kepada kubu PM Najib Razak, untuk menyudutkan Anwar sebagai pesaing politiknya ke posisi yang sulit dan terpojok. Di Malaysia isu sodomi amat sensitif dan sangat merugikan Anwar karena merupakan pembunuhan karakter yang mematikan.

“Ini pembunuhan karakter bagi Anwar, dan pemberitaan spekulatif itu hanya menguntungkan kubu Najib Razak di Barisan Nasional,” kata M Chozin Amirullah MA, Ketua Umum PB HMI pada 2010 sewaktu baru kembali dari Kuala Lumpur atas undangan kubu Nurul Izzah Anwar Ibrahim.

Akademisi Farish A Noor, peneliti senior di Universitas Nanyang Singapura telah lama menegaskan memang ada beberapa elemen yang bisa membuat orang curiga, bahwa tuduhan sodomi merupakan manipulasi politik.

Sama seperti tuduhan atas Anwar sepuluh tahun sebelumnya, banyak pihak di Malaysia, terutama para pendukung Anwar, yang menganggap ini adalah salah satu cara menjatuhkan Anwar secara personal.

Bedanya, kali ini masyarakat Malaysia sudah mulai sinis dengan situasi politik saat ini, dan memang sudah tercipta situasi '*fatique of politics*' atau kelelahan politik. Ini disebabkan masyarakat yang hampir setiap minggu dihadapkan pada skandal-skandal para politisi yang sifatnya personal, termasuk isu skandal Najib Razak dengan perempuan penghibur keturunan Mongolia.

Hal ini merupakan satu sindrom politik di Malaysia yang bergeser ke arah personal, yaitu lebih menyorot kehidupan atau isu-isu individu para tokohnya, ketimbang mengedepankan isu-isu lebih penting seperti keadilan, pemerataan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Pada 9 Januari 2012, Anwar bisa menarik nafas legas karena Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan sodomi tersebut dan dibebaskan dari segala tuntutan. “Terima kasih Tuhan, keadilan telah ditegakkan,” kata politikus senior itu kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (9/1/2012).

Anwar menyebut tuntutan tersebut sebagai usaha kotor untuk membunuh karakternya yang dilakukan oleh koalisi Barisan Na-

sional dalam menghadapi pemilu 2013 mendatang. Warga Malaysia pun menyangsikan tuduhan tersebut. “Keadilan telah dilakukan. Saya bebas,” ujar Anwar ketika itu.

Pilih Beroposisi

“Saya tak ada masalah pribadi lagi dengan Pak Mahathir Mohamad. Dia memang menzalimi saya, memenjarakan saya tapi itu sudah saya maafkan. Persoalannya, saya memang tidak sepaham dengan dia. Bukan soal pribadi tapi menyangkut sistem dalam membangun Malaysia,” kata Anwar.[6]

Adalah Anwar yang menyatakan Asia tengah bangkit, seakan menuju zaman baru. Kebangkitan ekonomi Asia bagi Anwar hanyalah satu dimensi dari kebangkitan kembali benua itu secara lebih mendalam, mendasar, dan berdampak jauh--sebuah Renaisans Asia. Dalam perspektif Anwar, berbeda dengan Renaisans Eropa yang kehilangan jiwa karena mempromosikan “humanisme sekular yang tercerabut dari akar agama Judeo-Kristiani”. Renaisans Asia, sebaliknya, memiliki pondasi yang kuat pada agama dan tradisi, sementara Renaisans Eropa bersifat monolit, Kebangkitan Asia lebih kukuh karena dibangun di atas tradisi yang beragam, yaitu terdiri dari suatu konsorsium budaya-Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Kristen.[7] Dengan pikiran besar seperti itu, Anwar masuk ke tema-tema yang lebih spesifik: simbiosis antara Barat dan Timur, demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*), keadilan dan hukum, etika dan ekonomi, ekonomi yang manusiawi, keutamaan budaya, Islam di Asia Tenggara, dan masa depan Asia.

---

[6] Kata-kata di atas diucapkan Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, dalam jumpa pers, setelah dia menjadi pembicara dalam seminar internasional menyambut 100 Tahun Buya Hamka di Jakarta. Anwar Ibrahim banyak ditanya wartawan, seputar masa depan Malaysia, setelah dia mulai diperhitungkan dalam pentas politik di negari jiran tersebut.

[7] Anwar Ibrahim, *The Asian Rennaisance* (Singapura: Time Books International, 1998). Setiap kali saya (penulis) mendengarkan ceramahnya, terasalah bahwa ia memiliki khasanah intelektual yang luas sebagai pemikir dan negarawan.

Sayang bahwa ketika buku Anwar itu terbit pertama dalam edisi aslinya *(The Asian Renaissance*, 1996), dimana waktu itu pertumbuhan ekonomi Asia bertabur angka moncer, ternyata tak lama kemudian pada 1997 indikator ekonomi Asia itu hancur. Krisis merenggut Asia secara tiba-tiba. Dan di Malaysia, badai itu mengambil korban yang tidak lain Anwar sendiri. Tak hanya dicopot dari kursi wakil perdana menteri dan menteri keuangan, dia menjadi paria yang dipenjara. Namun kini Asia bangkit sebagaimana ramalan Anwar sendiri. Sebagaimana Kishore Mahbubani dalam memandang masyarakat Asia, Anwar juga percaya akan kemampuan masyarakat Asia membangun kembali peradaban Asia, yang jauh melampaui wilayah ekonomi dan politik praktis.

Anwar mengajak masyarakat Asia agar tidak terbutakan oleh pertumbuhan ekonomi Asia yang moncer dan lupa pada merajalelanya kebusukan suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Anwar juga khawatir terhadap praktek agama yang tanpa dimensi moral dan etika sehingga tidak memiliki cukup daya untuk mencegah dekadensi dan erosi moral melalui perilaku serba boleh serta korupsi.

Sebagaimana dicatat Farid Gaban, sungguh Anwar sebenarnya sangat optimistis bahwa iman atau agama - dalam keragamannya di Asia - bakal menjadi unsur penting jika bangsa-bangsa Asia ingin menemukan kembali jiwanya serta merekonstruksi peradabannya. Dia juga mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: Mungkinkah membangun sebuah peradaban dari beragam budaya? Bagaimana membangun peradaban baru Asia? Adakah nilai-nilai Asia sebenarnya? Adakah sumbangan Asia terhadap gagasan-gagasan universal? Kaya dengan renungan dan pencarian, Anwar menyelam ke dalam relung kesadaran serta khazanah klasik Asia, lalu menyembul dengan sebuah kepercayaan diri untuk siap berdialog - bukannya berkonfrontasi - dengan Barat. Farid Gaban melihat, Anwar tak terlalu meyakinkan ketika berusaha merekons-

truksi apa sebenarnya "Asia" itu--sebuah konsep yang memang agak kabur bahkan untuk orang Asia sendiri. [8]

Anwar adalah salah satu dari sedikit intelektual kontemporer Asia--kecuali mungkin Dr Soedjatmoko--yang memilih jalan sulit ketimbang sekadar mencampakkan segala hal dari Barat atau yang, karena kelewat terkesima pada Barat, cenderung menafikan miliknya sendiri. Anwar memberi penghormatan khusus kepada para pelopor Renaisans Asia yang mampu mentransendensikan kekhasan budaya untuk mencapai dataran universal seperti Muhammad Iqbal (penyair muslim dari Pakistan), Rabindranath Tagore (sastrawan Hindu dari India), Jose Rizal (novelis Kristen dari Philipina), dan Sun Yat-sen (pahlawan nasionalis China yang Konghucu). [9]

ANWAR IBRAHIM DAN POLITIK MALAYSIA

Anwar Ibrahim Kembali Berpolitik

Setelah kasus sodomi pertamanya dicabut pengadilan pada 2004, Anwar segera kembali ke dunia politik sebagai kepala oposisi multi-etnik dan revitalisasi yang berpusat di kalangan tokoh reformasi sosial sekuler dan Islam. Ia pun menunjukan kekuatannya di pemilu 2008 dengan nyaris mengalahkan Barisan Nasional yang sedang berkuasa.

Hal itu menempatkan koalisi tiga partai menguasai sepertiga kursi di parlemen. Ia pun memberikan tantangan pada pemerintahan Najib Razak.

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim yakin pemilu mendatang merupakan masa berakhirnya kekuasaan pemerintahan Barisan Nasional (BN), dan era dimulainya demokrasi di negeri jiran itu.

---

[8] Farid Gaban, "Renaisans Asia", *Majalah Tempo*, 24 November 1998.
[9] Farid Gaban, "Renaisans Asia."

Anwar menyampaikan keyakinannya bahwa Pakatan Rakyat (PR) akan merebut suara dari BN yang lima dekade berkuasa di Malaysia.

"Dengan kemajuan sekarang ini, kami yakin dapat mengambil alih pemerintahan," cetus Anwar.

Pada pemilu selanjutnya Anwar yakin oposisi akan memenangkan lebih dari 40 persen suara di wilayah BN, Johor dan Pahang, serta merebut kembali suara di lima negara bagian seperti yang pernah dimenangkan pada 2008, dan mendapatkan penambahan dukungan di Negeri Sembilan dan Terengganu.

Anwar juga meyakini dampak revolusi di negara-negara Arab belakangan ini atas rakyat Malaysia akan dapat menumbangkan penguasa diktator.

"Pergolakan Timur Tengah telah menumbangkan penguasa otokrasi. Di Singapura, suara oposisi meningkat, dan Myanmar juga telah membebaskan beberapa saingan politik. Kami akan menang di Malaysia sebagai dampak perubahan dunia itu," Anwar mencontohkan.

Lantas, kapan kebangkitan revolusi Malaysia terjadi? "Pada pemilihan umum nantilah jawabannya," ujar Anwar seraya memprediksi potensi kemenangannya dalam pemilu sekitar akhir Desember 2012 hingga Maret 2013.

Di bawah gerakan oposisi Anwar Ibrahim, ada kecenderungan kuat bahwa tatanan kehidupan masyarakat Malaysia, terutama di bidang pendidikan politik, tengah mengalami tahapan "silent reform" (reformasi diam-diam) yang secara terstruktur dimotori kelas menengah dan kaum terpelajar dengan sasaran utama menegakkan demokrasi, pemerintahan bersih dan adil.

Tujuan utama gerakan reformasi di Malaysia lebih ditekankan pada upaya menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), keadilan, dan demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berbicara. Gerakan reformasi sejak 1998 merupakan

respons masyarakat madani atas pemerintahan Mahathir Mohamad, yang kemudian digantikan Abdullah Ahmad Badawi, dan disusul Najib Razak. Pemerintahan UMNO yang otoritarian ini terus mengalami kemunduran legitimasi dan cenderung makin melemah akhir-akhir ini karena korupsi-kolusi mencekam, pemilu tidak bersih dan politik identitas me-nguat, serta watak pemerintah yang otoritarian dan tidak amanah.[10]

Pada 1998-1999, berbagai kalangan tidak yakin reformasi di Malaysia akan berhasil karena format politik dan sistem pers di negara itu tidak mendukung. Format politik Malaysia sejak merdeka didominasi oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) -- partai dominan dalam koalisi Barisan Nasional yang kini memerintah - sedangkan pers di negara itu umumnya dikendalikan oleh partai politik. Namun kini situasi berubah, dan Anwar punya peluang untuk menang.[11] Dewasa ini, orang kepercayaan Anwar yakni Khalid Jaafar menilai, konstelasi politik di negaranya sudah berubah karena peta kekuatan UMNO maupun Barisan Nasional tidak lagi seperti pada masa-masa silam.

Pertanyaan kini yang mengemuka antara lain adalah, apakah Malaysia akan menuju era baru dan Anwar memainkan peran penting dalam memotori gerakan pembaruan atau reformasi di negaranya? Menjawab hal ini, Anwar Ibrahim meyakini bahwa pada akhirnya rakyat Malaysia akan menentukan pilihannya, dalam hal ini berkeinginan kuat untuk menuju perubahan yang signifikan, keluar dari kebuntuan yang banyak dialami saat ini.[12]

---

[10] Tentang pemerintahan Mahathir Mohamad, lihat Ho Kai Leong, James Chin and Ho Khai Leong (Eds.), *Mahathir's Administration: Performance and Crisis in Governance* (Singapore: Times Academic Press, 2002). Lihat juga, Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia* (New York & London: Routledge Curzon, 2003).

[11] Pandangan semacam ini disampaikan oleh pengamat Malaysia dari LIPI, Dr Alfitra Salam pada tahun 1998, dan pandangan itu kini berubah karena perubahan situasi di Malaysia sendiri tentunya.

[12] Usman Yatim, "Anwar Ibrahim", *Madina*, opini, Jakarta, 2011.

Salah satu yang didambakan oleh rakyat Malaysia adalah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang bersih dan terbangunnya demokrasi dalam arti sesungguhnya. Paling tidak, Malaysia akan keluar dari keterkungkungan, baik dalam bidang politik, penegakan hukum, maupun ekonomi dan bidang lainnya.

Anwar Ibrahim tampaknya akan tampil sebagai tokoh alternatif di Malaysia, manakala rakyat Malaysia serius mendambakan perubahan, terutama dalam hal pola kepemimpinan, pembangunan demokrasi dan ekonomi bergaya madani sebagaimana kini sedang diusung oleh Anwar Ibrahim. Walau terus dihambat, Anwar terlihat yakin bahwa reformasi di negaranya kini tinggal menunggu waktu yang tepat.

Anwar menuturkan di hadapan publik bahwa tidak ada kemustahilan dalam hidup ini kalau kita memiliki keyakinan.

"Tidak ada kemustahilan dalam politik kalau kita mendengar suara rakyat. Sebelum pemilu saya beritahu pers di Singapura, kita akan menang 70 kursi di parlemen. Apa meraka kata: 'mustahil dong. Malam 8 Maret 2008, kita menang 82 kursi.' Tidak ada yang mustahil jika kita memiliki keyakinan," itulah kata Anwar dalam membawa Malaysia menuju perubahan yang signifikan.

Anwar melihat UMNO bersama Barisan Nasional bukan untuk selamanya menguasai panggung kekuasaan dan politik di Malaysia. Dia yakin, oposisi juga dapat berjaya di negaranya. Inilah obsesinya, suatu saat nanti, Perdana Menteri Malaysia tidak harus dari orang UMNO atau Barisan Nasional tapi juga dari oposisi.

Apakah Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri Malaysia pertama dari partai oposisi? Memakai keyakinan Anwar, hal itu memang bukan hal yang mustahil. Anwar yakin, jika melihat kondisi UMNO dan Barisan Nasional yang dinilainya sudah keropos, pemilu dapat dilakukan secara jujur dana adil maka oposisi akan dapat memenangkan pemilu.

"Suara kita dalam pemilu yang baru lalu sudah melonjak, padahal pemilunya banyak kecurangan. Kalau curang saja kita dapat suara besar, maka pemilu yang jujur kita akan menang. Suara rakyat menghendaki demikian," tegas Anwar.

Anwar menyatakan pula, "rekan-rekan intelektual juga tidak mempercayai bisa berlaku tsunami politik di Malaysia. Kenapa mereka tidak mempercayainya? Karena mereka lebih banyak membaca Michel Faucault, Jacques Derrida, Jurgen Hebermas dan Mohammad Arkoun, daripada membaca hati nurani rakyat. Tidak salah membaca teori dan pendekatan tentang *post-modernism, deconstruction*, bahkan saya anjurkan ulama dan intelektual kita membaca buku-buku Derrida, Habermas dan Arkoun agar tidak ketinggalan. Tetapi jangan lupa apa yang bergelut dan bergolak di dalam hati dan nurani rakyat.'' [13]

Para pengamat politik Malaysia bersilang pendapat tentang seberapa besar peluang Anwar Ibrahim menjadi orang nomor satu di Malaysia. Sebagian analis menilai popularitas Anwar bersinar seiring dengan meningkatnya perasaan antipemerintah.

Profesor Joseph Liow, dari S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, menyatakan, sekarang Anwar, Partai Keadilan Rakyat, dan kubu oposisi yang mendukungnya bisa sesegera mungkin melakukan konsolidasi memperkuat bangunan koalisinya, apalagi kredibilitas Anwar semakin terang. Namun tak mudah bagi Anwar untuk menuntaskan keinginannya menjadi orang nomor satu dalam pemilu Malaysia tahun depan. Sebab, penguasa Malaysia saat ini (UMNO) piawai dalam memainkan trik yang bakal mengancam prospek kemenangan oposisi.

Sebagai contoh, putusan pengadilan terhadap Anwar, diklaim merupakan upaya pemerintah Malaysia (UMNO) yang mulai reformis dengan berlaku independen dan adil. Belum lagi pemerintah selalu menjual hasil survei Merdeka Center yang hasilnya

---

[13] Usman Yatim, "Anwar Ibrahim".

dukungan kepada Najib masih berada pada angka 59 persen.

Dalam hal ini, James Chin, pengamat Malaysia di Universitas Monash, Australia, memprediksi bakal terjadi kompetisi ketat antara penguasa dan pihak oposisi dalam pemilu mendatang. Peluang Anwar besar jika pemilu Malaysia dilakukan adil dan transparan, tapi kondisi saat ini peluangnya masih 50-50.

Namun ada pula analis yang menilai putusan bebas bagi Anwar itu tak berdampak apa-apa. "Putusan itu tak berdampak apa pun," ujar Barry Wain, penulis buku mantan perdana menteri Mahathir Mohamad.

Dalam hal aksi reformasi, Anwar Ibrahim banyak termotivasi dari gerakan reformasi di Indonesia. Dia melihat Indonesia telah mengambil langkah yang begitu drastis, yaitu menuju ke demokrasi yang tulen, bukan demokrasi illiberal dan olok-olok sebagaimana dinilainya kini berlangsung di Malaysia.

Dalam hal ini, reformasi dan demokratisasi yang digerakkan oleh Anwar Ibrahim adalah untuk menuju masyarakat dan negara madani. Anwar sering mengingatkan bahwa, kita berada di Asia Tenggara, maka persoalan kita seharusnya berakar kepada masyarakat, kebudayaan dan keperluan Asia Tenggara. Anwar tidak mau Asia terlalu didominasi oleh wacana Barat, baik di bidang ekonomi, politik dan intelektual. Umat Islam Asia Tenggara perlu memulai dialog ketamadunan berdasarkan kedudukan geografis kita, yaitu dengan Cina dan India, dua negara yang sedang muncul sebagai gergasi ekonomi dunia.

Anwar dan Pemilu Malaysia 2008

Pada 8 Maret Malaysia 2008 mengadakan pemilihan umum. Jadwal dipercepat karena pemerintah menghadapi banyak masalah. Pemilu ke-12 di Malaysia ini diikuti 10,9 juta pemilih, termasuk 700 ribu pemilih baru dari 26 juta penduduk.

Seluruh partai politik (parpol) memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DUN (DPRD), kecuali di Sarawak. Sejak ke-

merdekaan tahun 1957, koalisi Barisan Nasional selalu memenangi pemilu.

Dalam pemilu ini bertanding dua kubu, yakni Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO (United Malays National Organization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) melawan Barisan Alternatif yang dimotori PKR (Partai Keadilan Rakyat), PAS (Pan Malaysian Islamic Party atau Partai Islam Se-Malaysia), dan DAP (Democratic Action Party).

Tapi, Barisan Nasional dan media massa pro-pemerintah selalu memberikan label kepada oposisi sebagai barisan pembangkang, sedangkan oposisi memilih nama barisannya sebagai Barisan Alternatif. Parpol yang menjadi motor di BN adalah partai yang keanggotaannya berdasarkan ras, seperti partai berdasarkan ras Melayu, Cina, dan India. Di barisan alternatif hanya PAS yang merupakan partai ras, yakni Partai Islam. PKR dan DAP merupakan parpol multiras.

Para akademisi dan aktivis UMNO di Kuala Lumpur dalam surat elektroniknya kepada penulis mengakui PM Malaysia dan Barisan Nasional (koalisi parpol yang dimotori UMNO, MCA, dan MIC) sengaja mempercepat pemilu paling lambat Maret 2008. Ini untuk mencegah Anwar Ibrahim ambil bagian. Alasan itu merujuk pada tokoh oposisi Anwar Ibrahim, mantan Wakil PM Malaysia dan mantan wakil presiden UMNO, yang segera bisa berpolitik mulai April 2008.

Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara ketika Datuk Abdulah Badawi menjabat perdana menteri. Tapi, pengadilan memutuskan ia dilarang berpolitik hingga Maret 2008. Itulah sebabnya, banyak pula pihak yang menduga keputusan Pemerintah Malaysia mempercepat pemilu 8 Maret itu untuk menutup peluang Anwar Ibrahim ikut bersaing dalam pemilu.

Ada juga pandangan aktivis UMNO bahwa pemilu Malaysia sengaja dipercepat karena banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah. Yang utama maraknya perselisihan berbasis etnis. Di antaranya, perselisihan antarkelompok etnis Muslim Melayu dengan etnis minoritas Tionghoa dan India.

Perselisihan itu merebak karena etnis minoritas tidak puas dengan pemerintahan yang didominasi politisi etnis Melayu. Dalam beberapa bulan terakhir Pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi diwarnai berbagai aksi demonstrasi.

Pemicunya, tuntutan reformasi terhadap pemilu, anggapan diskriminasi dari etnis India, serta melambungnya harga bahan bakar dan makanan. Meski demikian, Badawi tetap optimistis pemerintahannya dapat memperoleh kemenangan mutlak di Negara Bagian Kelantan. “Tetap ada harapan untuk menang. Itu pasti. Kami punya dukungan kuat di wilayah itu,” kata Badawi.

Para analis menilai kebijakan Badawi menghelat pemilu lebih awal itu sebagai antisipasi melonjaknya harga barang menyusul dicabutnya subsidi bahan bakar. Kritik serupa dilontarkan Anwar Ibrahim yang kini bermukim di Hong Kong. Pak Lah, sapaan akrab Badawi, dinilai Anwar sangat kerepotan. Apalagi, dukungan terhadap Pak Lah terus menurun.

Malaysia begitu terpukul oleh kenaikan harga barang, tindak kriminal yang menjadi-jadi, korupsi di berbagai tempat, dan ketegangan antaretnis. “Semakin lama Barisan Nasional menangguhkan pemilu, mereka bisa semakin kehilangan banyak dukungan dalam pemilu,” kata Anwar.

Masa empat tahun Pemerintahan Badawi cukup menjemukan, mengecewakan, dan diwarnai banyak kegagalan. Sejak memenangi Pemilu 2004, koalisi yang dipimpin Badawi mendapatkan 90 persen dukungan di parlemen.

Tapi, Badawi tak henti menuai berbagai kritik pedas. Di antaranya, ia dianggap lemah dan tidak bisa mewujudkan janji yang di-

ucapkan saat kampanye, yaitu memberantas korupsi dari bumi Malaysia di bidang bisnis maupun politik.

Sejauh ini konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik yang dipaparkan organisasi politik terbesar puak Melayu, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), mengungkapkan bahwa sejak kerusuhan etnis 1969, disusul berlakunya New Economic Policy (NEP) untuk memberdayakan ekonomi puak Melayu, penghasilan warga etnis China rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Etnis Cina sampai 2008 ini tetap mendominasi dua pertiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu.

Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sedangkan etnis Cina 71 persen. Bahkan, pada 2005 Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara. Kondisinya di belakang Indonesia dan Thailand. Mengikuti ukuran nisbah Gini (Gini coefficient), ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, Malaysia berada pada 0,47. [14]

Bercermin pada data Bank Dunia, jurang pendapatan individu di Malaysia kedua terburuk di Asia. Meminjam studi Anwar Ibrahim, hanya Papua New Guinea yang lebih buruk dari Malaysia. Dari 127 negara, Malaysia berada di urutan ke-101 dari segi indeks Gini.

Anwar mengingatkan bahwa selama krisis moneter 1997-1998, kalangan menengah ke bawah di Malaysia dikorbankan oleh pemerintah untuk menopang ekonomi lapisan atas. Paparan itu tidaklah dimaksudkan menggelisahkan etnis Cina yang meliputi 25 persen penduduk atau 10 persen keturunan India.

---

[14] Herdi Sahrasad, "Pemilu Malaysia dan Anwar Ibrahim", *Republika,* opini, Selasa, 19 Februari 2008.

Pembelahan etnis di Malaysia dinilai para analis jauh lebih tajam dan mengkhawatirkan dibandingkan di Indonesia. Gerakan politik etnis oleh etnis India dan Cina dalam bentuk protes dan demo makin menegaskan betapa politik etnis di Malaysia kian menajam karena kurang terakomodasi ke dalam sistem yang ada.

Revitalisasi politik inklusif tampaknya gagal dilakukan Badawi kepada kaum minoritas India dan Cina untuk meredakan suhu politik antaretnis yang membelah Malaysia itu agar arang tidak jadi abu.

Isu SARA dan Solusi Anwar Ibrahim

Malaysia adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengembangkan politik identitasnya. Setiap etnisnya mempunyai ruang yang cukup untuk mengembangkan dan memperkuat identitas kelompoknya.

Namun, keberhasilan dalam mengembangkan politik identitas tersebut kurang diimbangi dengan pembangunan kesadaran nasionalisme sehingga keberhasilan mengembangkan politik identitas dalam jangka panjang dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan Malaysia sebagai *nation-state*.[15] Apalagi globalisasi cenderung menggerus *nation-state* dengan lalu lintas modal, manusia, teknologi dan informasi, barang dan jasa yang begitu cepat dan masif.

Bagaimanapun, menguatnya politik identitas di Malaysia merupakan ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena politik identitas tidak dikembangkan dalam bingkai *nation state*.

Politik identitas di Malaysia dikembangkan dalam bingkai etnis, bahasa, dan agama, bukan dalam bingkai Malaysia sebagai sebu-

---

[15] Farish A. Noor, "Politik Identitas dan Demokratisasi di Malaysia", *Makalah*, Pusat Sudi Sosial Asia Tenggara, PAU Universitas Gadjah Mada, Kamis 23 April 2009.

ah negara.[16] Setiap etnis di Malaysia selalu berjuang untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Mereka enggan untuk membuka ruang-ruang komunikasi dengan pihak lain.

Di Malaysia etnis Melayu yang Muslim mendominasi pemerintahan, sementara etnis China dan India menjadi lapis kedua dan ketiga, dengan peran politik masing-masing yang sepadan, namun dalam bidang ekonomi, ras Cina relatif dominan. Ketegangan sosial ini masih kuat dirasakan oleh masyarakat karena masing-masing kelompok (Melayu, Cina dan India) masih mengalami sekat-sekat pemisah dan saling memperkuat identitas di tengah globalisme yang makin keras.

Farish A Noor melihat kaum elite Malaysia sangat sadar bahwa politik identitas yang berkembang saat ini sangat berbahaya terhadap keberlangsungan Malaysia sebagai *nation state*. Bahwa untuk menghindari dampak buruk dari politik identitas yang berkembang saat ini, masyarakat Malaysia harus segera merumuskan identitas nasionalnya. Saat ini yang harus dilakukan oleh masyarakat Malaysia adalah merumuskan identitas nasional yang bisa di-*share* dan menjadi kebanggaan semua masyarakat Malaysia tanpa dibatasi oleh etnis, bahasa, dan agama.

Politik identitas itu telah menghantam keutuhan dan integrasi nasional di Malaysia. Sebagai ilustrasi, pada 2010, misalnya, Malaysia muncul kembali dalam berita utama yang negatif di media internasional untuk alasan yang salah. Selama dua minggu berturut-turur tahun 2010 itu, pelaku pembakaran dan pengacau bernuansa SARA (suku,agama, ras, antargolongan) menyerang 10 tempat ibadah, termasuk gereja-gereja Kristen dan kuil Sikh. Meskipun tidak ada orang cedera dan kerusakan material bisa diperbaiki, tetap saja terasa adanya luka emosional dan psikologis yang menganga. Setelah banyak pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat pemerintah, penyebab kekerasan masih belum ter-

---

[16] Farish A. Noor, "Politik Identitas dan Demokratisasi di Malaysia."

selesaikan. Akibatnya, reputasi Malaysia sebagai bangsa berdamai dengan keragaman etnis dan agama dipertaruhkan. [17]

Mengenai politik identitas golongan Muslim, akademisi Norani Othman dari Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat adanya kompatibilitas Islamisasi dan demokratisasi di Malaysia dalam konteks regional dan global. Sayang, agenda Islamisasi ini lebih dijuruskan pada tujuan politik. Islamisasi digunakan pemerintah untuk memperkukuh kekuasaan mereka dengan politik identitas berbasis agama. Dengan adanya dualisasi hukum, satu untuk kaum muslim dan satu lagi untuk non-muslim, banyak kasus hak asasi manusia (HAM) yang tak terselesaikan karena terjepit di antara kedua sistem hukum. Dan buntunya kasus-kasus ini justru menguntungkan pemerintah otoritarian Malaysia. [18]

Menghadapi kerusuhan SARA ini, Anwar menyatakan pihaknya telah meminta perhatian terhadap kebutuhan yang lebih luas di dunia Muslim bagi kepemimpinan yang penuh konsistensi dan kredibilitas dalam mewujudkan keadilan, keadilan dan pluralisme. Nilai-nilai ini tertanam dalam tradisi Islam sebagai tujuan yang lebih tinggi dari Syariah seperti diuraikan oleh ahli hukum abad ke-12, Al-Shatibi.[19]

Anwar juga melihat cara-cara kotor yang digunakan dalam teknik-teknik propaganda bagi para pembakar kerusuhan SARA, ketika mana para politisi dan para demagog mengeksploitasi sentimen publik untuk menggalang dukungan dengan mengobarkan rasa takut.

---

[17] Anwar Ibrahim, "Muslims Have No Monopoly Over 'Allah'", *Wall Street Journal,* edisi 27/1/2010. Menurut Anwar, kata "Allah" itu sudah ada dalam leksikon Arab pra-Islam. Bahasa Semit juga menyebut Tuhan dengan sebagai kata "Allah", dalam bahsa Aram disebut dengan kata "Elaha", dan "Elohim" dalam bahasa Ibrani. Manuskrip sejarah membuktikan bahwa masyarakat Arab Muslim, Kristen dan Yahudi telah bersama berdoa kepada Tuhan, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, sebagai "Allah" selama lebih dari 1400 tahun.

[18] Lihat Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia…*

[19] Anwar Ibrahim, "Muslims Have No Monopoly Over 'Allah'."

Taktik pengalihan isu tersebut dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian publik atas skandal memalukan: mulai dari keputusan pengadilan yang kontroversial, tuduhan komisi selangit yang diekstrak dari pengadaan alutista militer, pencurian dua mesin jet dari inventarisasi Royal Air Force Malaysia dan isu selingkuh seks elite.

Perilaku ini telah memburuk sejak partai yang berkuasa kehilangan dua pertiga mayoritas di parlemen tahun lalu. UMNO sekarang sangat berjuang untuk mendapatkan kembali dukungan publik.

Anwar mengakui, ''Kita telah melihat umat Islam di seluruh dunia protes terhadap hukum diskriminatif yang disahkan di negara-negara liberal dan progresif di Barat. Namun sama seperti Perancis dan Jerman yang memiliki masalah mereka dengan burqa dan Swiss dengan menara-adzannya, demikian juga Malaysia, terbukti sering gagal untuk menawarkan lingkungan yang aman dan damai dalam mengakomodasi masyarakat minoritas.''

Serangan dan pembakaran terakhir menunjukkan apa yang salah dengan cara warga Muslim Malaysia dalam memperlakukan warga non-Muslim. Serangan itu diprovokasi oleh kontroversi atas penggunaan kata "Allah" oleh komunitas Kristen Malaysia, yang berjumlah lebih dari dua juta, atau sekitar 10% dari populasi.

Pada akhir 2007, Kementerian Dalam Negeri melarang penggunaan kata "Allah" oleh Herald, sebuah surat kabar Katholik, dan kemudian menyita 15.000 salinan dari Alkitab berbahasa Melayu yang diimpor dari Indonesia di mana kata untuk Tuhan diterjemahkan sebagai "Allah."

Pada 31 Desember 2009, sebuah putusan oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang membatalkan larangan sebelumnya, menegaskan jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama di Malaysia. Sejak itu, situasi yang sudah tegang memuncak, terutama karena hasutan oleh beberapa politisi sembrono, media

mainstream dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang memiliki hubungan keanggotaan dan kepemimpinan dengan UMNO, partai yang berkuasa. Sebagai contoh, koran *Utusan Malaysia,* harian terbesar berbahasa Melayu yang juga dimiliki oleh UMNO, memiliki sentimen Islamisme dengan menuduh non-Muslim menodai nama "Allah" dan menuduh konspirasi Kristen untuk menguasai Malaysia yang didominasi Muslim melalui konversi.

Sudah meluas keraguan publik atas pemerintahan Najib Razak, masyarakat juga prihatin atas hak asasi manusia, supremasi hukum dan korupsi yang merajalela; Indeks Persepsi Korupsi Transparency International Malaysia turun 10 poin pada 2009, serta menunjukkan indeks terburuk dalam lebih dari 15 tahun. Visi Malaysia sebagai lokasi yang damai dan stabil untuk investasi, pariwisata dan migrasi sekarang dalam bahaya.

Menghadapai berbagai kompleksitas persoalan itu, tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Malaysia telah disandera oleh kepentingan-kepentingan tertentu dari beberapa kelompok elite yang memanipulasi iman dan identitas sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan politik dan ekonomi. Ini adalah politik lama, dan telah menjadi jelas bahwa mereka yang memprovokasi kebencian hanya melakukannya untuk memperpanjang monopoli kekuasaan mereka. Anwar yakin mayoritas warga Malaysia menolak pendekatan ini.

Situasi ini menjadi sangat penting untuk Malaysia yang harus bersaing dengan lanskap sosial dan politik yang semakin terpolarisasi. Apalagi pemilu bersih belumlah terlaksana karena pemerintah Najib Razak takut kalah sehingga dicurigai menghalalkan segala cara. Politik yang kotor itu telah mendorong kubu Anwar berdemonstrasi besar. Sehingga pada tahun 2011, kubu anwar bergerak ke jalanan dengan seruan Pemilu bersih. Ini adalah tahun pertarungan politik jalanan. Unjuk rasa puluhan ribu warga Malaysia menuntut proses reformasi pemilu tahun itu, berakhir ricuh, Sabtu (9/8/2011).

Pihak berwenang Malaysia mengambil langkah-langkah keamanan yang luar biasa untuk mencegah pengunjuk rasa menguasai ibukota. Aparat menutup sejumlah ruas jalan di Malaysia, menutup stasiun kereta api dan memblokir jalan dengan truk sekaligus menyiramkan gas air mata ke para demonstran dekat Stadion Independence di pusat kota Kuala Lumpur. Di lokasi ini para aktivis reformis di bawah koordinasi kaum oposisi berusaha untuk berkumpul. Namun demikian, ribuan rakyat lainnya juga berusaha untuk mencapai stadion dari berbagai bagian Kuala Lumpur, meneriakkan "Hidup rakyat" dan membawa balon kuning dan bunga saat berjalan.

Aksi politik ini memiliki pengaruh domestik yang krusial. Sebagai pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim mengatakan di Twitter bahwa ia mengalamia cedera ketika kelompoknya terkena gas air mata. Dalam akun twitternya @anwaribrahim, Anwar menuliskan jika anak-anaknya yakni Nurul Izzah dan N Hana (putri bungsunya) ikut ditangkap dalam aksi unjuk rasa terbesar di Malaysia itu.[20] Sebelumnya dilakukan penangkapan terakhir itu, sekitar 230 orang ditahan sejak 25 Juni 2011, termasuk enam orang berdasarkan undang-undang keamanan yang keras yang mengizinkan penahanan tanpa diadili.

Dalam merespon kompleksitas kemelut sosial ini, Anwar meyakini bahwa masyarakat madani (civil society) di Malaysia menyadari bahwa untuk mengatasi tantangan yang dihadapi seperti ekonomi yang stagnan, politik yang kotor, korupsi politik, merosotnya standar pendidikan dan meningkatnya kejahatan, sangat tergantung pada kemampuan masyarakat madani Malaysia sebagai bangsa untuk menginternalisasi dan membuat nyata prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua, seluruh warga negara. Pandangan Anwar itu sangat kontekstual mengingat sejarah

[20] Polisi menembakkan gas air mata dan berulang kali mencoba untuk membubarkan kerumunan, menyebabkan demonstran berhamburan ke dalam gedung di dekatnya dan gang sebelum mereka bergabung kembali. Polisi helikopter terbang di atas kepala sebagai hujan singkat gagal untuk mencegah para pengunjuk rasa.

Islam di Asia Tenggara dikenal karena tradisi pluralistik dan inklusif, dan hubungan damai antara Muslim dan non-Muslim dari generasi ke generasi.

Sekali lagi, dengan bebasnya Anwar dari hukuman pengadilan, ja-lan politik Anwar makin lapang untuk meraih hari depan, meski tidak pernah ada kepastian untuk menang. Namun baginya, proses pergulatan dan perjuangan jauh lebih penting dan berharga, untuk kemudian berserah diri kepada Tuhan, Sang Maha Kuasa, yang telah membimbingnya menggerakkan reformasi di Malaysia. Setidaknya, sejak berada di luar kekuasaan, Anwar telah memimpin terus-menerus barisan oposisi untuk melancarkan perubahan dan pembaruan di negeri puak Melayu itu. Globalisasi demokrasi dari berbagai belahan bumi, termasuk dari Timur Tengah, memberikan implikasi yang konstruktif bagi gerakan kubu Anwar dalam mendobrak belenggu penindasan dan ketidakadilan.

Bagi Anwar, menang atau kalah dalam politik adalah soal lumrah sepanjang dilakukan secara beretika dan bermartabat . Oleh sebab itu, saya ingin menutup tulisan ini dengan kata-kata Anwar Ibrahim sendiri ketika dinyatakan bebas oleh pengadilan,. “Terima kasih Tuhan, keadilan telah ditegakkan. Kami akan meneruskan sita-cita dan agenda perjuangan .” [21]

[21] Ungkapan Anwar Ibrahim. Dilaporkan dalam berita *AFP*, Senin (9/1/2012).

THAILAND: KUDETA, PERUBAHAN REZIM DAN DEMOKRASI[1]

KRISIS THAILAND: DARI CHAVALIT HINGGA THAKSIN

Krisis Thailand terjadi tahun 1997 dengan adanya tekanan dari spekulator internasional terhadap mata uang Bath Thailand sehingga menjadi 28.8 per US$ pada Juni - Juli 1997. Akibatnya, Thailand mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar yakni mcngalami penurunan GDP -6,1% menurut data resmi IMF.

Perdana Menteri Thailand ketika itu, Chavalit Yongchaiyuth, harus meminta bantuan kepada IMF hingga akhimya mendapat dana bantuan sebesar US$17 Milyar. Implikasi politik dari krisis perekonomian ini adalah terjadinya pergantian rezim kekuasaan di Thailand. Kegagalan Chavalit mengatasi krisis ekonomi di Thailand telah menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan protes di kalangan rakyat dan mahasiswa.

Banyaknya pengangguran dan pengusaha yang beralih profesi menyebabkan ia harus mengundurkan diri pada tanggal 3 November 1997 dan digantikan oleh Chuan Leek Pai dari Partai Demokrat. Chuan Leek Pai sendiri mendapat kekuasaan karena diuntungkan oleh dua kondisi: *Pertama*, kegagalan pemerintahan Chavalit yang memberikan legitimasi yang besar kepada pemerintahan Chuan. *Kedua*, adalah Partai Demokrat, yang dipimpinnya, merupakan partai tertua di Thailand.

Organisasi Demokrat sendiri paling rapi dibandingkan partai lainnya. Tetapi yang terpenting bagi Chuan adalah mendapat dukungan dari para teknokrat paling andal di negerinya. Sehingga tak mengherankan jika dalam kabinet Chuan portofolio ekonomi

---

[1] Tulisan ini merupakan revisi atas esai Vishnu Juwono dan Herdi Sahrasad, "Dari Chuan Leek Pai hingga Thaksin Sinawatra", *Sinar Harapan*, 39 Juli 2001. Mengenai kudeta di Thailand, baca Yuli Ismartono, "Demokrasi dalam Transisi di Muangthai", *Majalah Prisma*, no.8, 1986, h.39-68.

diduduki oleh kaum teknokrat. Misalnya, Menteri Keuangan Tarrin Nimmanahaeminda adalah lulusan Harvard Business School dan pernah berkarir lama di Citibank. Supachai Panitch-pakdi, Mantan Direktur Jenderal World Trade Organisation (WTO), memegang jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri me-rangkap Menteri Perdagangan.

Posisi Gubernur Bank Sentral, jabatan yang amat penting bagi ke-bijakan moneter, dipegang oleh Chattumongkol Sonakul seorang pakar lulusan dari John F. Kennedy School of Government, Har-vard University. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, maka tidak heran IMF dengan mudahnya melakukan kerjasama dalam membuat dan memonitor pelak-sanaan program pemulihan ekonomi karena kesamaan visi, kete-rampilan dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menyele-saikan masalah perekonomian.

Setelah mendapat mandat yang cukup besar, langkah pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri Chuan adalah konsolidasi politik dengan merangkul lima partai yaitu Chart Thai, SAP, Cob-ra Faetion, Solidarity dan Seritham. Partai Demokrat dalam koalisi tersebut mempunyai suara terbesar sehingga mampu menem-patkan orang-orang profesionalnya, seperti Tarrin, Chattumong-kol, dan Supachai. pada posisi ekonomi yang penting sebagai pra-kondisi terbentuknya suatu pemerintahan.

Walaupun sudah berhasil membentuk pemerintahan akan tetapi secara politis pemerintahan Chuan berhadapan dengan kalangan oposisi, pengusaha swasta dan pengunjuk rasa dari golongan bu-ruh atau petani yang tidak setuju dengan kebijakan perekonomian ketat yang dicanangkan. oleh pemerintah berdasarkan arahan IMF.

Hal tersebut bertambah parah lantaran adanya perselisihan di an-tara menteri-menteri di bidang ekonomi. Tarrin cenderung untuk mengikuti resep IMF yang tidak setuju dengan intervensi peme-rintah kepada pihak swasta. Sedangkan di sisi lain Supachai lebih

menginginkan adanya stimulus yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian secepatnya. Namun perbedaan kedua kubu tersebut tetap pada kerangka rasionalitas dan di atas ketentuan hukum yang berlaku, serta yang terutama adalah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keseluruhan program pemulihan ekonomi.

Pemerintahan Chuan Leek Pai, dengan memanfaatkan momentum krisis, berhasil memberi keleluasaan yang besar bagi para tim teknokratnya untuk membuat kebijakan perekonomian. Hasilnya dapat dilihat dari pembentukan Financial Restructuring Agency, penjualan aset dan intervensi terhadap empat bank yang *insolvent*. Tindakan-tindakan tersebut memberi fondasi yang cukup kuat bagi sistem perekonomian, khususnya keuangan, dalam menjalankan prinsip *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian (prudent) dalam membuat suatu kebijakan.

Selain membangun fondasi yang kuat bagi perekonomian Thailand, pemerintahan Chuan berusaha mempelopori penegakkan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, dan hubungan keluarga. Korban dari upaya penegakkan hukum ini salah satunya adalah menteri dalam negeri Thailand, posisi nomor dua terpenting di kabinet yang membawa pukulan politik bagi pemerintahannya. Selain itu Thaksin Shinawatra, P.M Thailand saat ini, juga menjadi korban dari upaya penegakkan hukum di Thailand. la dituduh oleh National Counter-Corruption Comission (NCCC), suatu badan independen yang dibentuk pada tahun 1997 yang mempunyai misi mengungkap kasus-kasus korupsi, menyembunyikan harta pribadinya miliaran baht pada saat pengumuman jumlah aset pribadi sebagai syarat untuk dilantik menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1997. Apabila tuduhan tersebut terbukti benar. Thaksin tidak diperkenankan untuk berpolitik selama 5 tahun.

Pemerintahan Chuan berakhir pada saat pemilu yang diadakan pada 6 Januari 2001, dimana partai Thai Rak Thai di bawah pim-

pinan Thaksin Shinawatra memenangkan pemilu dengan hampir meraih mayoritas mutlak dalam jumlah kursi di parlemen. Selain disebabkan adanya skandal yang menimpa menteri dalam negeri, Partai Demokrat juga menjadi korban dari reformasi ekonomi yang dijalankannya. Dengan kebijakan keuangan ketat menyebabkan masyarakat Thailand, terutama yang berada di desa, habis kesabarannya untuk menunggu pemulihan ekonomi.

Namun harus diakui bahwa Pemerintahan Chuan Leek Pai memberikan landasan yang kuat bagi negara Thailand dalam menjalankan program reformasi hukum, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kenyataan tersebut pemerintahan Thailand yang kemudian dipegang oleh Thaksin mempunyai tugas yang maha berat yaitu dituntut untuk meneruskan program reformasi ekonomi yang telah dirintis dengan baik oleh pemerintahan Chuan Leek Pai serta menunjukkan hasil yang lebih nyata dan lebih baik

Bertahannya Perdana Menteri Chuan Leek Pai sampai dengan diadakannya pemilu, menunjukkan bahwa secara politis Chuan Leek Pai dapat bertahan dan menjalankan kebijakan-kebijakan reformasi struktural ekonomi Thailand. Tentunya ini berbeda dengan para Perdana Menteri Thailand sebelumnya yang selalu dijatuhkan oleh parlemen sebelum menyelesaikan masa jabatannya karena mendapat mosi tidak percaya.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang tingkat kecurangannya dapat ditekan dan relatif damai, seakan-akan merupakan jawaban dari masyarakat Thailand bahwa mereka telah siap untuk berdemokrasi dan mengikuti proses politik secara sehat.

Pemerintahan Thailand kemudian dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, sebagai pemenang pemilu dengan jumlah kursi parlemen lebih dari 50%. Suatu kemenangan pertama dengan mayoritas mutlak sebagai “mandat historis” Thai Rak.

Situasi perpolitikan Thailand kemudian mendapat ujian yang sangat besar pada saat timbulnya keputusan pengadilan terhadap Thaksin atas tuduhan menyembunyikan harta kekayaan pribadi yang mestinya diumumkan kepada publik. Sebab bila terbukti bersalah, Thaksin harus melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Thaksin yang menangis di depan Mahkamah Konstitusional ketika menyampaikan pembelaannya mencoba berkelit dari dakwaan korupsi yang mengancam karir politiknya.

Dominasi Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra selama tiga bulan terakhir pemerintahannya sebelum jatuh, juga mengindikasikan gaya kepemimpinannya yang *one man show*. la menonjolkan gaya kepemimpinan individual, personal, dan tidak bersemangat kolegial.

Kepemimpinan Thaksin pun menjadi sorotan masyarakat di dalam dan luar negeri, menyusul pemeriksaan Mahkamah Konstitusi Thailand yang menuduhnya tidak mencantumkan sebagian kekayaan yang seharusnya wajib disampaikan ketika menjabat sebagai Deputi PM Thailand tahun l977.

Proses peradilan Thaksin dianggap sebagai ujian bagi reformasi konstitusi Thailand yang diperkenalkan tahun 1997 dengan tujuan memberantas korupsi-kolusi dan menciptakan *good governance*, suatu pemerintahan yang dikelola dengan efektif, transparan, dan berakuntabilitas publik.

Akibat perkara Thaksin ini, para investor dan masyarakat versikap *wait and see*, "menunggu dan melihat" perkembangan politik dan pembaruan lebih lanjut di negeri Siam itu.

KUDETA THAILAND DALAM RENTANG SEJARAH

Dinamika politik Thailand memperlihatkan gejala ke arah kekerasan. Tampilnya militer ke gelanggang politik Thailand menunjukkan tanda-tanda mengerikan. Apapun alasan militer melakukan kudeta, suasana mengerikan niscaya membayangi masya-

rakat sipil di negeri Siam itu. Pasalnya, sekali kudeta terjadi, biasanya muncul spekulasi akan terjadi kudeta berikutnya.[2]

Alasan klise yang biasa digunakan militer untuk melancarkan kudeta, di negara mana pun, umumnya sama, yakni ingin menggantikan pemerintahan sipil yang lemah, menyeleweng dan korup. Pertanyaan yang segera muncul adalah, apa yang menyebabkan militer merasa bahwa mereka lebih mampu menghilangkan korupsi daripada sipil? Sebab, pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa pemerintahan militer yang menggantikan pemerintahan sipil itu juga tidak dapat membebaskan dirinya dari korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

Sejarah di banyak negara menunjukkan, adalah sulit bagi militer untuk menyerahkan kekuasaan yang digenggamnya secara sukarela kepada sipil. Sekali militer menggenggamnya, maka mereka akan terus menggenggamnya. Hanya sedikit sekali pemimpin militer yang di saat mendapatkan peluang untuk mengambil alih kekuasaan, justru memutuskan untuk tidak melakukannya. Dalam konteks Thailand, militer memang mudah tergoda untuk kudeta.

Kudeta militer bukan barang baru di Thailand. Meminjam catatan Basis Susilo, dosen Universitas Airlangga, selama 74 tahun sejak monarki absolut diganti monarki konstitusional pada 1932, sudah ada 40 pergantian perdana menteri dengan 25 figur perdana menteri serta 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta.[3]

Kudeta militer pertama di Thailand dilakukan oleh perwira-perwira Thai lulusan luar negeri pada 1932. Mereka berhasil mengakhiri sistem politik Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Sejak itu percobaan kudeta seakan tak per-

---

[2] Herdi Sahrasad, "Kudeta dan Runtuhnya Musim Semi Demokrasi di Thailand", *Bisnis Indonesia,* 26 September 2006

[3] Yuli Ismartono, "Demokrasi dalam Transisi di Muangthai"

nah berhenti. Thailand diguncang percobaan kudeta sebanyak 17 kali sampai kudeta yang terakhir pada 1991.

Kudeta militer terakhir terjadi pada 1991, ketika Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan PM Chatchai Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi ketika itu memaksa militer kembali memasuki arena politik.

Pada Februari 1991 itu, sekelompok militer termasuk Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Jenderal Sunthorn Kongsompong dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Suchinda Kraprayoon, melancarkan kudeta terhadap Perdana Menteri Chatichai Choonhavan yang terpilih lewat pemilihan umum. Alasannya, pemerintahannya dianggap luar biasa korup.

Namun, kudeta tidak berdarah itu mendapat kecaman luas dari internasional. Untuk meredam kecaman tersebut, sekelompok militer yang melakukan kudeta itu membentuk Dewan Penjaga Perdamaian Nasional (NPKC). NPKC itu kemudian menunjuk seorang pengusaha, yang juga mantan Duta Besar Thailand untuk AS, Anand Panyarachun sebagai Pejabat Perdana Menteri Sementara sampai pada pemilu 22 Maret 1992.

Selama masa pemerintahan Anand Panyarachun ini berhasil disusun konstitusi baru yang mengharuskan seorang calon dipilih dari anggota Majelis Rendah atau orang yang dipilih melalui pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Ketua Partai Samakhi Tham Narong Wongwan sebagai pemimpin dari partai pemenang pemilu diangkat menjadi Perdana Menteri. Kemenangan Narong Wongwan itu tidak dapat diterima oleh Jenderal Suchinda Kraprayoon. la menuduh Narong Wongwan terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang termasuk narkotika dan mengambil alih jabatan Perdana Menteri .

Ulah Jenderal Suchinda Kraprayoon itu membuat lebih dari 150 ribu orang, sebagian besar mahasiswa dan orang-orang muda dari kelas menengah baru, turun ke jalan untuk berunjuk rasa menentangnya. Orang-orang muda berdasi yang membawa telepon genggam dan menggunakan mobil mewah tampak marah menentang Jenderal Suchinda Kraprayoon.

Aksi unjuk rasa itu cepat berkembang menjadi bentrokan verdarah antara pengunjuk rasa dan militer. Dalam kurun waktu 17-19 Mei 1992, sebanyak 50 pengunjuk rasa tewas, dan 250 orang dinyatakan hilang (James Luhulima, 2003).

Raja Bhumibol Adulyadej langsung turun tangan ketika itu. Dia memanggil Jenderal Suchinda Kraprayoon untuk mengundurkan diri dan meminta Anand Panyarachun untuk kembali memerintah sampai pemilu 13 September 1992, yang dimenangkan oleh Partai Demokrat pimpinan Chuan Leekpai. PM Chuan Leekpai pun kemudian memimpin Thailand.

Thailand beruntung karena Panglima Angkatan Darat (AD), Jenderal Wimol Wongwanitch, sebagai orang terkuat di AD Thailand saat itu menolak campur tangan dalam urusan politik. Bukan itu saja, Wimol juga secara bertahap menarik militer keluar dari politik. Alhasil, kudeta pada 1991 tercatat sebagai kudeta terakhir di Thailand pada abad ke-20.

KEPEMIMPINAN THAKSIN SHINAWATRA

Thaksin dan Pembangunan Ekonomi

Dengan partai barunya yang bernama Thai Rak Thai (berarti: Thai Cinta Thai) dibentuknya dengan beberapa tokoh, Thaksin Shinawatra terkenal dengan ambisinya untuk menciptakan Thailand baru dengan menciptakan slogan *'Think new, act new, for every Thai'*. Thaksin juga memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang terkenal dengan 'Thaksonomics' yang berpijak pada argumen *'a company is a country: a country is a company'*. Layaknya seo-

rang pemimpin perusahaan, Thaksin juga memproyeksikan dirinya sebagai Perdana Menteri CEO (Chief Economic Executive). Karenanya, banyak kalangan beranggapan bahwa sedang terjadi *'Thaksinisasion of Thailand'* pada masa pemerintahan Thaksin. Thaksinisasi Thailand membawa pola baru dalam hubungan masyarakat-negara.

Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang memulai debut pemerintahannya dengan membentuk kabinet koalisi antara Partai Thai Rak Thai (Thais love Thai) dengan Partai Chart Thai dan Partai New Aspiration, menuai banyak kritik karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari kekuatan politik lama yang korup. Kekuatan politik lama itu adalah gabungan dari kelompok pengusaha besar dan birokrasi pemerintah yang menjalin hubungan dekat dengan militer di bawah pemerintahan diktator militer yang sebelumnya berkuasa.

Thaksin sendiri adalah pengusaha terkaya di Thailand. Ia bergerak di bidang telekomunikasi dan dibesarkan oleh rezim militer yang memerintah sebelumnya melalui pemberian hak monopoli dan perlakuan-perlakuan khusus lain. Ia juga anggota pemerintahan koalisi yang dipimpin Ketua Partai New Aspiration, Chavalit Yongchaiyudh yang terguling pada krisis finansial 1997.

Thaksin bahkan pernah dituduh sengaja tidak melaporkan asetnya secara jujur semasa masih menjabat dalam pemerintahan Chavalit, dan sempat diperiksa oleh komisi antikorupsi nasional. Dalam kabinet Thaksin yang dilantik 18 Februari 2001, Chavalit diberi jabatan sebagai menteri pertahanan oleh Thaksin.[4]

---

[4] Baca, Kompas edisi Januari-September 2005. Pemerintahan Thai ini fokus ke kondisi ekonomi domestik melalui kebijakan-kebijakan yang propertumbuhan, di antaranya:

1. memfokuskan pada pembangunan infrastuktur.
2. Merombak birokrasi yang gemuk, memberikan pelayanan investasi dalam sistem satu rumah, yang langsung dibawahi oleh Perdana Menteri.
3. Menerapkan hukum yang tegas bagi koruptor dengan UU Korupsi dengan hukuman yang berat.

Sebagai orang yang diremehkan dan dilecehkan di awal masa pemerintahannya, Thaksin mengklaim telah mampu membawa banyak perbaikan pada perekonomian hingga membuatnya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Fenomena *Thaksinomics* (resep kebijakan ekonomi ala Thaksin) membuat penasaran banyak orang, kendati di Thailand sendiri sejumlah media massa terkemuka menilai pemerintahannya sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di bawah Thaksin, tahun 2005, pasar modal Thailand menjadi *best performing stock market* di Asia, dengan indeks saham naik 135 persen. Sebelumnya, tahun 2004, menjadi kedua terbaik setelah Indonesia. Banyak pihak ketika itu menduga pertumbuhan ekonomi Thailand akan "mentok" pada 2002, tetapi mereka keliru besar karena pertumbuhan terbukti terus meningkat hingga rata-rata di atas 8 persen per tahun selama masa pemerintahan Thaksin.

Mengapa negara-negara lain gagal, tetapi Thailand berhasil? Menurut analis Jim Walker dalam kajiannya di CLSA "Out and About" Newsletter, kuncinya adalah karena pemerintahan ini fo-

---

4. Kemudahan mendirikan usaha, kemudahan dalam menyewa dan memecat pekerja, penegakan kontrak, kemudahan dalam memperoleh kredit, kemudahan untuk menutup usaha, kemudahan dalam registrasi hak kepemilikan (property right), serta perlindungan investor.
5. Keamanan cukup terkendali karena Thaksin cenderung otoriter dalam pemerintahannya, walaupun sempat terjadi kericuhan di daerah Thailand Selatan.
6. Kebijakan makroekonomi, khususnya inflasi yang juga relatif kondusif dan sektor swastan yang lebih dinamis.
7. Indeks saham mengalami peningkatan dan mata uang Bath cukup stabil.
8. Ekspor meningkat signifikan yang turut berpengaruh terhadap neraca perdagangan Thailand.
9. Menerapkan insentif pajak yang diatur tersendiri dalam "The Investment Promotion Act of 1997" yang telah diamandemen 2002, seperti menawarkan pembebasan pajak dan bea masuk selama delapan tahun untuk mesin-mesin mobil hemat BBM.
10. Memangkas ekonomi biaya tinggi dan melarang pungutan liar.
11. Paket kebijakan ketenagakerjaan yang memanjakan investor.
12. Keadaan negara yang saling mendukung antara pemerintah, keluarga kerajaan, politikus dan masyarakatnya.

kus ke kondisi ekonomi domestik melalui kebijakan-kebijakan yang pro-pertumbuhan. Thaksinomic dinilai sukses membawa perekonomian Thailand yang sebelumnya lunglai, tanpa arah, serta tertekan "secara psikologis dan finansial", menjadi perekonomian paling bergairah di ASEAN.

Kebijakan Thaksin yang "konsentrasi pada hal-hal mendasar" difokuskan pada upaya mendorong permintaan dalam negeri. Bukan melalui proyek-proyek mega atau memperbesar belanja pemerintah, tetapi dengan menyalurkan kredit dan dukungan ke sektor pedesaan dan usaha kecil dan menengah yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian.[5]

Hasilnya, konsumsi berhasil menjadi lokomotif perekonomian tiga tahun terakhir dan separuh lebih dari penerimaan pajak diperoleh dari wilayah nonperkotaan. Thaksin sendiri dikenal memiliki visi masa depan Thailand yang sangat tegas. Salah satu ambisinya adalah mewujudkan pasar terintegrasi Indo-China yang rencananya juga merangkul Provinsi Yunnan di China dengan Thailand sebagai pusatnya.

Pembangunan jalan raya yang menghubungkan Yunnan dengan Laem Chabang di Bangkok melalui Laos sudah dibangun. Thailand juga membangun jalan yang menghubungkan Bangkok dengan Phnom Penh, yang nantinya juga akan terhubung dengan India melalui Myanmar dan Bangladesh. Semua itu akan mendukung pembangunan ekonomi Thailand di masa mendatang.

Thaksin juga membabat birokrasi yang dinilai menjadi penghambat kemajuan ekonomi dan bisnis. Pemerintahan Thaksin menganggarkan sedikitnya 10 miliar baht untuk membiayai program reformasi birokrasi, dengan mengurangi 5 persen dari jumlah pegawai negeri yang mencapai 1,7 juta orang. Deputi Dirjen Pengawas Keuangan Supa Piyajitti mengatakan, langkah itu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi di jajaran pega-

[5] Baca Kompas edisi Januari-September 2005.

wai negeri. Berdasarkan program ini akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja tiap pegawai negeri setiap enam bulan.

Sebanyak lima persen pegawai dengan kinerja terburuk akan diberi dua pilihan, pensiun atau menjalani program pelatihan. Mereka yang memilih pensiun, mendapat kompensasi setara delapan bulan gaji, di luar komponen pesangon normal lainnya. Sementara pegawai yang memilih ikut pelatihan, akan terus dievaluasi. Mereka yang tidak beranjak dari skor terburuk setelah pelatihan langsung dipecat tanpa kompensasi.

Periode penilaian pertama akan dilakukan September 2005. Proses ini memang membuat gerah dan stres kalangan pegawai negeri. Namun, pada saat yang sama akan memacu pegawai yang selama ini bekerja seenaknya untuk memperbaiki kinerjanya agar tidak dipecat. Sistem penilaian itu sendiri memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengajukan banding jika mereka merasa dinilai secara tidak adil.

Thaksin yang mantan Chief Executive Officer (CEO) Shin Corp ini juga membawa gaya kepemimpinannya di perusahaannya ke pemerintahan, hingga ke kementerian-kementerian dan birokrasi, termasuk pemerintahan daerah. Tentu saja tidak semua eksperimen ini berhasil, tetapi gaya kepemimpinan ala CEO Thaksin ini diakui sedikit banyak berhasil menekan *red tape* di birokrasi.

Pegawai negeri di beberapa lembaga pemerintah, terutama di keuangan dan perdagangan, seperti Bank of Thailand dan Board of Investment, terkenal sangat profesional. Tetapi, sebaliknya di lembaga-lembaga atau departemen-departemen lain, mereka terkenal dengan reputasinya yang sangat korup, birokratis, dan suka memanfaatkan kekuasaan.

Salah satu proyek percontohan Thaksin adalah mengubah sejumlah gubernur di daerah menjadi semacam CEO, yang berarti memberi mereka wewenang yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Hal ini sempat membawa kekacauan di birokrasi ka-

rena para gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya ke Thaksin.

Sebagai CEO, menurut lembaga konsultan yang berbasis di Hongkong, Political Economic Risk Consultancy (PERC), para gubernur ini dimungkinkan membuat aturan-aturan baru, yang tidak jarang membuat murka banyak pejabat lain yang ada di bawahnya. Perubahan-perubahan ini dilakukan nyaris tanpa keterbukaan sehingga banyak yang gagap.

Di beberapa provinsi, sistem bahkan menjadi macet karenanya. Beberapa pejabat juga cemas mereka ikut terseret melakukan hal-hal meragukan yang diperintahkan para CEO-gubernur, yang sebenarnya melanggar hukum itu.

Thaksin sendiri, menurut PERC, sering menunjukkan sikap otoriter. Sikapnya yang tidak mentolerir perbedaan pendapat juga membuat tidak nyaman bawahannya dan menghalangi para pegawai menunjukkan kinerja terbaik mereka. Keinginan menyenangkan atasan kadang kala membuat para bawahannya, terutama mereka yang banyak berhubungan dengan kalangan pengusaha asing, bersikap kaku dan memainkan peran menunda-nunda dalam bersikap agar posisinya aman.

Selain apa yang disebut Thaksinomic, keberhasilan pemerintahan Thaksin juga tidak terlepas dari birokrasi di Thailand yang independen, tidak bisa diintervensi oleh partai politik atau politisi. Kesinambungan kelembagaan menjadi dasar penting kekuatan ekonomi Thailand yang politiknya sering diwarnai kudeta militer dan konflik antarpartai.

Sistem multipartai yang dianut Thailand dan pemerintahan koalisi yang dihasilkannya memang membuat suksesi terlalu sering terjadi dalam jajaran kabinet dan pemerintahan. Untungnya, meskipun beda faksi atau partai, militer atau sipil, pemerintahan baru umumnya tidak jauh berbeda dalam hal ideologi dan faham kebijakan makroekonomi dari pemerintahan yang digantikannya. Se-

hingga, kesinambungan kebijakan dari waktu ke waktu tetap terjaga.

Pada masa-masa instabilitas politik, birokrasi di Thailand terbukti bisa memainkan peran sebagai faktor penstabil karena tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara normal, meskipun negara dalam krisis politik karena para politikus dan para jenderal saling gontok-gontokan. Tetapi sebaliknya, pada kondisi normal pegawai negeri dinilai sebagai faktor penghambat karena terlalu lamban dan konservatif.

Namun, ini bukan hal yang aneh. Di kebanyakan negara Asia lain karakteristik birokrasi yang ada juga seperti itu. Yang membedakan pegawai negeri di Thailand dengan di negara-negara lain adalah pegawai negeri di Thailand boleh merangkap sebagai politikus dan pengusaha sehingga memunculkan banyak konflik kepentingan. Termasuk Thaksin sendiri yang merupakan seorang pengusaha, kendati ia mengaku telah menyerahkan kepemimpinan Shin Corp kepada anaknya.

Oleh sejumlah media massa terkemuka setempat, Thaksin dikritik karena KKN-nya, tetapi tidak sedikit kalangan lain menilai ia berhasil dalam membawa kemajuan pada perekonomian Thailand.

Dari indeks persepsi korupsi yang disusun Transparency International tahun 2004, Thailand masih berada di urutan 66, di bawah Malaysia (39), Singapura (5), Hongkong (16), dan Taiwan (35), tetapi masih lebih bagus dibandingkan beberapa negara Asia lain seperti China (71), India (91), Philipina (104), Vietnam (106), Indonesia (137), dan Myanmar (143). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, korupsi di Thailand dinilai juga turun.

Berdasarkan laporan yang dibuat World Bank Group, *Doing Business in 2005 Removing Obstacles to Growth*, Thailand bahkan disebut merupakan salah satu tempat paling mudah di dunia untuk melakukan bisnis. Negara ini masuk 20 teratas dari 145 negara dalam hal kemudahan untuk berbisnis.

Urutan selengkapnya adalah Selandia Baru, AS, Singapura, Hongkong, Australia, Norwegia, Inggris, Kanada, Swedia, Jepang, Swiss, Denmark, Belanda, Finlandia, Irlandia, Belgia, Lituania, Slowakia, Bostwana, dan Thailand. Malaysia membayangi beberapa nomor di belakang Thailand.

Kemudahan dalam melakukan usaha itu diukur dari tujuh kriteria yang mencerminkan indikator iklim bisnis. Yakni, kemudahan mendirikan usaha, kemudahan dalam menyewa dan memecat pekerja, penegakan kontrak, kemudahan dalam memperoleh kredit, kemudahan untuk menutup usaha, kemudahan dalam registrasi hak kepemilikan (property right), serta perlindungan investor.

Dari laporan tersebut diketahui, negara-negara di Asia Timur mengenakan biaya paling tinggi dibandingkan negara-negara lain dalam hal penegakan kontrak, yakni rata-rata 45 persen dari pendapatan per kapita negara itu. Demikian juga pesangon atau biaya lain yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika mereka ingin memberhentikan (pemutusan hubungan kerja/PHK) pekerjanya. Untuk PHK seorang pekerja, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan pengusaha sekitar 79 minggu gaji pekerja bersangkutan.

Untuk mendirikan usaha di negara-negara berkembang, biaya administrasi yang harus dibayar tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan di negara maju. Jumlah prosedur birokrasi yang harus dilewati dua kali lebih banyak. Di negara-negara maju, untuk mengurus perizinan usaha rata-rata hanya perlu melewati enam prosedur administratif dengan waktu rata-rata 27 hari dan biaya sekitar 8 persen dari pendapatan per kapita. Sementara, di negara-negara Asia Timur rata-rata harus melewati sembilan prosedur dengan waktu rata-rata 61 hari dan biaya 60 persen dari pendapatan per kapita.

Dari semua negara di Asia Timur itu yang terburuk adalah Laos (198 hari), disusul Indonesia (151 hari), Kamboja (94 hari), dan Vietnam (78 hari). Bandingkan dengan Thailand yang hanya 33

hari. Prosedur yang harus dilewati di Thailand juga hanya delapan prosedur.

Ratusan ekspatriat yang disurvei PERC menyatakan birokrasi di Thailand masih lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, China, Indonesia, India, dan Philipina. Dari sisi efisiensi birokrasi, Thailand juga lebih baik dibandingkan Vietnam dan India. Satu hal yang positif dalam sistem politik di Thailand, siapa pun pemerintahannya, apakah itu militer atau sipil, secara konsisten mereka mendukung pertumbuhan sektor swasta. Sektor swasta dibiarkan tumbuh secara alamiah sejalan dengan perjalanan sejarah bangsa Thailand.

Menurut ekonom senior Bangkok Bank, Nimit Nontapunthawat, adanya keseimbangan kekuatan antara kerajaan, birokrasi, politisi, militer, dan sektor swasta membuat Thailand benar-benar menjadi sistem pluralistis sejati. Tidak ada dominasi kalangan tertentu, keluarga tertentu, atau kelompok elite tertentu.

Hal senada diungkapkan Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kunci keberhasilan ekonomi Thailand terletak pada sektor swastanya yang dinamis, birokrasi yang sangat probisnis, dan kebijakan makroekonomi yang juga relatif kondusif. Thailand, menurut Bank Dunia, adalah contoh terbaik dari kebijakan orientasi keluar (outward orientation), sikap terbuka terhadap investasi asing dan filosofi ramah pasar yang didukung manajemen makroekonomi yang konservatif dan kebijakan utang yang hati-hati.

Kebijakan yang probisnis dan perlindungan langsung terhadap pelaku usaha dalam negeri selama periode 1960-an hingga 1980-an menjadi landasan terjadinya apa yang disebut keajaiban ekonomi Thailand pada akhir 1980-an hingga sebelum krisis finansial tahun 1997. Pertumbuhan ekspor yang mencapai dua digit per tahun antara 1985-1995, yang dibarengi konsumsi domestik yang kuat sebagai lokomotif, menjadikan Thailand perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama kurun tersebut.

Sektor manufaktur Thailand merupakan yang terbesar di ASEAN, sektor swastanya juga paling terdiversifikasi dan paling memiliki jiwa entrepreneurial.

Sudah Lama Thailand disegani sebagai kekuatan ekonomi di Asia, khususnya di ASEAN. Sebagai satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di kawasan itu, Thailand menunjukkan taringnya baik dalam masa sebelum dan setelah krisis ekonomi yang melanda. Dalam masa pra krisis, Thailand unggul dengan kekuatan industrinya yang merajai ASEAN bahkan menyaingi Jepang. Namun dalam masa pasca krisis ekonomi, Thailand berhasil keluar dari krisis berkat pemberdayaan Industri Kecil, pertanian, serta pembenahan Investasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Thailand yang sangat mencolok setelah krisis tentu membuat banyak investor jatuh hati untuk menanamkan modalnya di negeri gajah putih ini. Negeri itu mulai berubah sejak Thaksin Shinawatra duduk sebagai Perdana Menteri Thailand pada awal 2001. Kebijakan-kebijakan yang diambil cukup membuat dunia berdecak kagum atas kebangkitanThailand. Terlepas dari itu semua, Thaksin juga dianggap melakukan tindakan korupsi, sampai akhirnya pemerintahan diambil alih oleh militer dalam kudeta tanpa pertumpahan darah bulan september 2006.

Kelemahan Thaksin

Pada era Thaksin yang agak kontroversial ini, beberapa capaian sukses Chuan Leek Pai itu kini dikhawatirkan oleh masyarakat domestik dan para investor asing terancam mundur kembali akibat kepemimpinan Thaksin yang - walaupun memenangkan pemilu secara meyakinkan - dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami penurunan efektivitas dan erosi legitimasi. Ada enam faktor yang menyebabkan kelemahan Thaksin dan mengurangi kredibilitasnya sebagai pemimpin Thailand yaitu: *Pertama*, Skandal tuduhan menyembunyikan harta pribadi miliaran baht, yang menggerus kepercayaan pasar, investor internasional, dan masya-

rakat dalam negeri. Terutama karena tindakan itu menyangkut moral etika dalam kepemimpinan Thaksin. Kebijakan ekonomi taipan telekomunikasi Thailand itu juga masih mencari-cari arah dan format yang tepat, karena kebijakan ekonomi dan keputusan politik lebih terkonsentrasi di tangan PM Thaksin.

Kedua, Gaya kepemimpinannya yang *one man one show* dalam mengelola pemerintahan membuattnya terlihat lebih seperti seorang chief executive perusahaan (CEO) ketimbang sebagai perdana menteri. Kekuasaannya mengalami personalisasi, hampir mendekati otoritarian, mungkin disebabkan oleh kemenangannya dalam pemilu yang meyakinkan (firm victory) dan latar belakang bisnisnya sebagai taipan telekomunikasi. la menangani keputusan keputusan penting pemerintah oleh dirinya sendiri ketimbang mendelegasikan kepada para menterinya. Penggumpalan kekuasaan yang berkaitan dengan sikap Thaksin yang cenderung *over confidence* dan obsesif ini terjadi pada saat ekonomi Thai merosot dan para investor potensial bersikap *wait and see*. la mengumpulkan kekuatan/kekuasaan hingga menggumpal ke dalam dirinya untuk mencerminkan pemimpin yang dinamis yang ingin mensejahterakan rakyat miskin di Thai yang menjadi negara yang sedang sulit dan sudah parlous estate.

Ketiga, Thaksin telah memecat gubernur bank sentral yang independen dan profesional akibat perselisihan soal suku bunga. Gubemur bank Sentral Thailand Chatumongkol Sonakul (seorang teknokrat berpendidikan Universitas Harvard, AS) diberhentikan Thaksin dan digantikan oleh Pridyathorn Devakula yang secara kualitatif dan kompetensi masih di bawah Chatumongkol, namun lebih kooperatif dan memilih bekerja dalam tim ketimbang secara individual seperti pendahulunya itu. Perbedaan sikap dan pendapat antara Thaksin dan Chatumongkol dilatarbelakangi perbedaan visi, misi, dan konflik kepentingan soal penanganan kebijakan moneter. Chatumongkol menghendaki suku bunga yang rendah untuk deposito 2-3% dan pinjaman 7%. Di mata Chatu-

mongkol kenaikan suku bunga tak akan meningkatkan pembelanjaan komsumsi. Alasan Chatumongkol ini dibenarkan dan didukung IMF. Karena itu pula, pemecatannya merupakan berita buruk bagi Thailand dan berdampak negatif bagi citra pemerintahan Thaksin di kalangan domestik, investor, dan dunia internasional. *Keempat*, Thaksin lebih membela para konglomerat ketimbang rakyat banyak. Ini bertentangan dengan kampanyenya yang bercorak populistik. Atas kebijakan Thaksin, Thai Asset Management Corporation telah mengambil alih utang yang vermasalah atau macet lebih dari 1 triliun baht demi kepentingan para bankir dan pengusaha besar yang menjadi sekutu-sekutu politiknya yang terpercaya.

Penghapusan utang (write off) para kapitalis besar itu sungguh mengecewakan rakyat banyak. Thaksin dituduh telah mengkhianati janjinya sendiri untuk memberdayakan rakyat kecil. Untuk mengalihkan kekecewaan rakyat itu, Thaksin cenderung menekankan "nasionalisme semu" dan menyatakan akan mengubah perekonomian dari model pembangunan AS dan Jepang menuju ekonomi yang lebih ramah Iingkungan dengan fokus pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun hasilnya masih tanda tanya. Perlu bukti nyata dan waktu untuk melaksanakannya. Hal ini juga mencerminkan bahwa Thaksin mulai mengalami disorientasi dan kehilangan *sense of direction* dalam kebijakan ekonominya di tengah gelombang globalisasi kapitalisme *Kelima*, rakyat melihat Thaksin gagal memenuhi janji untuk mensejahterakan rakyat. Janji populisme Thaksin ternyata mengecewakan rakyat. Buktinya, meski pemerintah berjanji akan memberikan moratorium utang 3 tahun bagi 25 % petani Thai, hanya kaum tani yang memiliki utang di bawah US$2.200 (100 ribu baht) yang memperoleh moratorium itu.Kemudian janji untuk menyediakan dana pinjaman bergulir (revolving loan) bagi 77 ribu desa, ternyata dalam praktiknya hanya diberikan bagi desa-desa yang secara studi kelayakan dinilai memenuhi persyaratan dan kriteria, yang dianggap *viable*. Janji skema penyediaan kesehatan dan

pengobatan sebesar 30 bath ternyata hanya diberikan kepada mereka yang tak punya asuransi kesehatan.

Keenam, Thaksin juga mengecam pers dan media massa yang mengkritiknya secara tajam. la memerintahkan para pemimpin redaksi untuk mengurangi kritik dan kecaman pedas atas pemerintahannya. Hal ini, kata Ubonrat Sirryuvasak, pakar komunikasi Chulaloagkorn University, Thailand, telah mengesankan Thaksin tipikal seorang pendatang baru politik yang tidak sabar dan tidak tahan dengan kritik media massa.

Kritik terhadap pemerintahan Thaksin berarti juga kritik terhadap kapitalis besar Thailand. Sering terjadi, perusahan besar yang Thaksin miliki atau milik koleganya, menghentikan pemasangan iklan bagi pers yang mengkritiknya. Misalnya, seperti yang dialami dwimingguan Prachacvhart yang kehilangan iklan dari perusahaan Shin Corporation (yang didirikan Thaksin) karena kritiknya terhadap pemerintahan Thaksin. Pemimpin redaksi harian berbahasa Inggris, The Nation, Panan Janviroj juga sempat diinterogasi polisi untuk dimintai sumber informasi atas pemberitaan yang mengkritik kunjungan Menlu Thai Surakiart Sathirathai ke Burma. Ini merupakan hal yang pertama kali terjadi di Thailand pada era demokrasi, sehingga mengejutkan publik politik negeri Siam itu.

Arogansi Thaksin

Thaksin mengklaim keselamatan politikya merupakan kepentingan nasional Thailand, seraya mengklaim masa depan negeri itu terletak di tangannya. Padahal para investor dan para pemilihnya menghendaki Thailand dengan pemulihan ekonomi, stabilitas politik, dan *good governance,* bukan sekadar janji, pernyataan, dan wacana. Gaya Thaksin dalam berkuasa terkesan otoritarian dan arogan.[6]

---

[6] *Far Eastern Economic Review.* 31 Mei 2001.

Akibatnya, para investor luar dan dalam negeri khawatir dengan stabilitas politik Thailand menyusul menurunnya popularitas, kredibilitas, dan legitimasi Thaksin yang ditandai dengan melemahnya mata uang baht dan menurunnya ekspor Thailand, serta utang nasional yang mencapai 60 persen dari GDP.

Thaksin menyatakan akan fokus pada permintaan domestik dan investasi, dengan tak lagi mengandalkan pada hubungan dan perdagangan luar negeri. yang berarti menekankan semangat nasionalistik. Perekonomian yang terbuka dengan usaha swasta, *free enterprise*, yang bersifat persaingan bebas tetap dipertahankan.

"Thailand akan bergerak menuju integrasi ekonomi ke negara-negara Asia. Kami berpikir global bertindak lokal, sesuai kepentingan nasional," kata Thaksin di depan the 2001 Fortune Global Forum, Hong Kong.

Gaya kepemimpinan Thaksin menimbulkan persoalan akuntabilitas, transparansi dan etika-moral yang menjadi sorotan masyarakat. Meminjam wacana Benedict Anderson, guru besar studi Asia Tenggara di Cornell University, agaknya kualitas moral-etik Thaksin sedang dalam ujian.

Sementara itu di sisi lain, kalangan oposisi sedang menanti runtuhnya mandat legal Thaksin sebagai perdana menteri. Para analis politik Bangkok melihat "serigala dan buaya politik" akan muncul dan menyerangnya jika Thaksin tak lagi memiliki kekuasaan yang sah, legal, dan konstitusional.

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang menjadi yang akan menentukan karir politik Thaksin. Jika ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi, maka berakhirlah jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Thaksin Dikudeta

Setelah menahan diri selama 15 tahun lebih, akhirnya militer Thailand kembali melibatkan diri dalam hiruk pikuk politik. Situasi ini menimbulkan spekulasi politik yang luas bahwa militer

Thailand dipastikan tampil ke pentas politik guna mengambil kekuasaan dari Thaksin. Spekulasi ini berkali-kali dibantah petinggi militer Thai, namun pada Selasa (19/9/2006) malam, spekulasi itu terjawab dan terbukti tatkala panser, thank dan konvoi militer Thai marak menggerakkan kudeta secara tiba-tiba.

Ketika Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra tengah mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) New York, militer Thailand melakukan “kudeta malam”, membekukan konstitusi dan memberlakukan keadaan darurat.

Menghadapi rentetan kudeta di negerinya, Raja Rama IX (Bhumibol Adulyadej) menjadi penentu dan pengambil keputusan politik yang bakal mematerikan jalannya perubahan kekuasaan ke depan.

Sebenarnya, Raja Rama IX (Bhumibol Adulyadej) enggan memasuki koridor politik. Tetapi, ketika menyangkut kehidupan rakyat banyak, ia tak bisa tinggal diam.

Sejarah Thai sudah menunjukkan fakta tersebut, misalnya, tahun 1973 secara jelas Raja menghendaki Marsekal Thanom Kittikachorn mundur dari rezim militer dan membentuk pemerintahan demokrasi.

Kemudian menyusul kudeta tahun 1991, Raja juga mendesak rezim militer pimpinan Jenderal Suchinda Kraprayoon mengadakan pemilu. Namun hasil pemilihan umum yang digelar pada 1992 membuat rakyat marah karena partai pemenang pemilu menempatkan Jenderal Suchinda sebagai perdana menteri. Raja memanggilnya dan memilih Mayjen Chamlong Srimuang yang prodemokrasi. Kedua jenderal menghadap Raja sambil berlutut. Raja hanya minta agar demokrasi ditegakkan. Sejak itu, Kudeta militer menjadi tabu. Pada ulang tahunnya yang ke-78 di tahun 2005, Raja mencerca Perdana Menteri Thaksin Shinawatra agar bersedia menerima kritik itu sebagai konsekuensi seorang pemimpin.

"Pepatah bahwa raja tidak mungkin berbuat salah, itu adalah penghinaan. Itu berarti raja bukan manusia. Saya bisa berbuat salah dan saya tak takut dikritik langsung," kata Sang Raja.

Kepemimpinan Raja Rama IX yang telah berkuasa 60 tahun di Thailand menjadikan raja sebagai kepala negara terlama di dunia. Keteladanan serta integritas Raja Bhumibol terasa pantas diambil contoh. Hak dan kesejahteraan petani pun diperhatikan, seperti terlihat dengan kebijakan impor beras. Baginya, petani adalah segalanya.

Namun dalam konteks kudeta militer terhadap Thaksin, Raja Bhumibol justeru menyatakan dukungannya, meskipun di masa lalu Raja mengharapkan kepada para politikus, aparat negara, dan segenap lapisan masyarakat sipil untuk tidak selalu melibatkan istana jika terjadi proses pembelajaran politik di negaranya. Dengan dukungan raja atas kudeta militer ini, maka Thaksin, sang konglomerat sekaligus politisi, tersingkir dari kekuasaan di Thailand dan menjadi pecundang politik di tanah pelarian dan pengasingan. Musim semi demokrasi di negeri Siam telah muram dan padam. Ironis dan paradoksal bahwa di tangan militer dan restu raja, demokrasi telah dijegal.

Setelah menggulingkan Thaksin, Panglima Angkatan Darat Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, berjanji mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Militer melancarkan kudeta terhadap Thaksin dengan mengepung kantornya menggunakan tank, mengambil alih stasiun televisi dan mengumumkan pemerintah peralihan yang berjanji setia kepada Raja. Dalam pidatonya, dewan pimpinan Jenderal Sonthi itu menyampaikan sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut termasuk meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintahan yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat, tuduhan korupsi, dan penyelewengan kekuasaan.

Para pejabat senior militer yang telah bertemu dengan Raja Bhumibol Adulyadej, mencabut Undang-Undang Dasar negeri itu.

Jenderal Sonthi juga memecat Wakil Perdana Menteri Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya. Dua petinggi yang setia kepada Thaksin itu selain dicopot dari jabatan, juga ditangkap.

Ketika militer di bawah komando mengambil alih kekuasaan, konstitusi, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet dan Mahkamah Konstitusi semuanya dibekukan.

Sonthi, pemimpin kudeta dalam pidatonya yang disiarkan langsung secara nasional oleh stasiun televisi setempat, Rabu (20/9/06), menegaskan bahwa Thaksin sudah menyebabkan perpecahan, membuat korupsi dan nepotisme makin merajalela, serta membunuh lembaga independen. "Kalau pemerintahan yang dipimpin Thaksin diizinkan mengelola negara ini maka mereka bakal melukai rakyat," tegasnya. Kudeta ini juga menimbulkan spekulasi adanya dukungan Ratu Sirikit.

Dugaan campur tangan Ratu Sirikit dalam kudeta militer 2006 yang menyingkirkan Thaksin Shinawatra mencuat di media Inggris, The Guardian.

Dugaan itu muncul setelah WikiLeaks membocorkan dugaan yang sama dalam situsnya. Politikus yang menuding permaisuri Raja Bhumibol Adulyadej mengotaki kudeta tersebut adalah Samak Sundaravej. Dia pernah tujuh bulan menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2008. [7]

Setelah penggulingan Thaksin, pemimpin junta militer Thailand bersumpah mengambil alih lagi satelit-satelit perusahaan telekomunikasi terbesar negeri itu, yang tahun lalu dijual oleh keluarga bekas perdana menteri ke tangan perusahaan investasi pemerintah Singapura. “Saya ingin mereka kembali, khususnya satelit-satelit yang meru-pakan aset nasional,” kata Jenderal Sonthi Boonyaratglin di hadapan 2.000 pegawai negeri di Bangkok, Thailand.

---

[7] *The Guardian,* edisi 14-20 Desember 2006.

Suatu pernyataan militer yang disiarkan melalui televisi mengumumkan bahwa Dewan Pembaruan Pemerintah pimpinan Sonthi bersama Raja sebagai Kepala Negara telah mengambil-alih kekuasaan di Bangkok dan provinsi sekitarnya tanpa perlawanan apa pun.

Dewan tersebut, yang terdiri atas semua panglima Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut serta Polisi, juga menyatakan bahwa mereka tak bermaksud memerintah negeri tersebut untuk diri mereka sendiri. Dalam pidatonya, Jenderal Sonthi menyampaikan sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut termasuk meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintah yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat serta tuduhan korupsi serta penyelewengan kekuasaan.

Sejumlah faktor yang mendorong berulangnya kudeta militer ini antara lain; *Pertama,* kudeta ini terjadi atas adanya restu raja. Pendudukan kantor Perdana Menteri oleh pasukan Jendral Sonthi Boonyaratglin merupakan simbol restu Raja Bhumibol Adulyadej atas tindakan militer. Hal ini sekaligus mengungkapkan ketidaksukaan Raja pada Thaksin Shinawatra. Selama ini Raja Thai merupakan simbol penghormatan rakyat Thai sekaligus sosok yang sangat kharismatik. Keputusan apapun yang diambil oleh para politisi dan militer tidak akan berjalan jika raja tidak merestui. Demikian pula kudeta terhadap Thaksin ini tidak mungkin terjadi jika Raja tidak menghendaki.[8]

Kedua, adalah keinginan militer untuk memulihkan stabilitas dan mengakhiri krisis politik yang sudah berjalan kurang lebih 9-10 bulan terakhir sejak awal 2006. Konflik politik tersebut dipicu oleh berbagai tindakan dan keputusan Thaksin yang kontroversial dan secara laten dapat menimbulkan krisis politik yang berkepanjangan. Tampilnya kembali Thaksin menjadi perdana menteri setelah meletakkan jabatan beberapa hari sebelumnya merupakan *blunder*

---

[8] *Kompas, Media Indonesia* dan *Antara,* edisi September-Oktober 2006

yang memperuncing pertikaian politik. Kembalinya Thaksin itu dikecam berbagai pihak terutama kubu oposisi dan militer karena sikap Thaksin yang dinilai tidak nasionalis dan arogan.

Thaksin pun dianggap tidak nasionalis karena tindakannya menjual beberapa aset nasional penting kepada pihak asing, seperti perusahaan telekomunikasi miliknya sendiri, The Shin Corp kepada Singapura. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi partai yang didirikannya, Thai Rak Thai, yang berarti 'Thai Cinta Thai'. Apalagi kemudian diketahui bahwa Thaksin ternyata bukan orang bersih karena terlibat skandal korupsi dan *money politics* dalam upayanya memenangkan kursi perdana menteri.

Ketiga, pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer itu adalah demi menyelamatkan negara dari perpecahan. Semasa Thaksin berkuasa, Jenderal Sonthi ditugaskan meredakan ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan dengan jalan kekerasan. Wilayah yang didominasi oleh kaum Muslim ini sudah lama ingin memerdekakan diri dari Thailand. Langkah kontroversial yang dikeluarkan Thaksin ini ditujukan terhadap para separatis di Pattani, Yala dan Narathiwat, propinsi di bagian selatan Thailand. Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Raja Thailand menghimbau pemerintah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan pada mereka. Namun sebaliknya Thaksin justru memberlakukan darurat militer sejak 5 Januari 2004. Jendral Sonthi pun berselisih paham dengan Thaksin karena pemimpin militer ini lebih memilih pendekatan politik daripada kekerasan. Akibatnya, konflik pemerintah dengan militer pun tak terhindarkan. Jika militer tidak segera mengambil langkah tegas, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi di Thailand.

Keempat, militer menganggap Thaksin gagal melakukan perbaikan kondisi dalam negeri. Thaksin dituduh sebagai pemecah belah bangsa dan tidak mampu memberantas korupsi, bahkan Thaksin sendiri pun terlibat korupsi. Thaksin juga dianggap tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjalankan program anti-korupsi se-

bagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Dia terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak, dan membeli suara saat pemilu. Thaksin sendiri bahkan pernah diajukan ke pengadilan gara-gara masalah *cronyism* dan korupsi. Bahkan kemudian diketahui bahwa penjualan saham The Shin Corp milik keluarga Thaksin pun dibebaskan dari pajak penjualan sehingga mendatangkan keuntungan 1,9 milyar dollar bagi keluarganya.

Terakhir, sifat pretorian militer Thailand menjadikan kelompok ini selalu siap siaga melakukan kudeta. Kudeta terakhir terjadi pada 1991 ketika terjadi *vacuum of power* setelah PM Chapichai Chonopan mengundurkan diri dan tidak terpilih penggantinya. Memang benar bahwa beberapa saat lalu militer berjanji menghentikan kegiatannya di bidang politik menyusul tuntutan demokratisasi. Namun ternyata janji tersebut sulit ditepati. Reformasi militer ternyata berjalan lamban, sementara kondisi kacau dalam negeri tidak kunjung bisa diatasi. Thaksin pun dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena program liberalisasi terhadap beberapa sektor seperti pembangunan bendungan Pu Nam Dam yang dibimbing AS dan penjualan beberapa saham kepada pihak asing.

Sementara di sisi lain, kudeta militer ini juga terjadi lantaran tidak rela Thaksin menjual perusahaan keluarga Shin Corp. kepada Temasek Holding Plc., yang dimiliki pemerintah Singapura pada Januari 2006. Penjualan itu termasuk Shin Satellite, satu-satunya operator satelit di Thailand yang punya empat satelit telekomunikasi.

Penjualan Shin Corp. senilai US$ 1,9 triliun bebas pajak itu ditentang banyak warga Thailand, yang menuding Thaksin menjual aset kunci kepada negara asing. Belakangan Thaksin terjungkal pada September lalu lewat kudeta tak berdarah oleh militer.

Jenderal Sonthi Boonyaratglin menyebut satelit-satelit itu sebagai adalah harta karun Thailand. "Singapura adalah negeri mungil yang minim area pertanian, tapi kaya, dan pialang pintar yang dapat membeli aset-aset kami," katanya.

Menurut Sonthi, pihaknya prihatin atas aset nasional yang telah terlanjur terbeli. Tapi ia menolak mengatakan bagaimana Thailand bakal membeli lagi Shin Corp. "Saya hanya ingin mereka kembali karena saya bertugas menyelamatkan aset negara," ujarnya.

Sebelumnya, Sonthi cemas Singapura bakal menggunakan satelit-satelit itu untuk mengintai Thailand. Ia sudah memerintahkan para pejabat militer menanggalkan telepon seluler dan beralih memakai peranti *walkie-talkie* untuk mencegah spionase telekomunikasi.

Namun, Singapura membantah menggunakan satelit-satelit Shin Corp. untuk memata-matai negeri tetangganya itu. Soal ambisi terbaru junta Thailand tersebut, Temasek menolak memberikan komentar.

THAILAND PASCA KUDETA THAKSIN

Krisis Politik Berlanjut

Pasca kudeta militer terhadap Thaksin, rakyat Thailand berharap transformasi politik yang ada bisa mengembalikan stabilitas di negaranya. Mereka berharap dengan naiknya pemerintahan darurat militer bisa muncul pemerintahan baru lewat mekanisme pemilu yang adil. Namun kini, kenyataan malah terjadi sebaliknya. Negeri Gajah Putih ini terus terseret dalam krisis politik yang berlarut-larut.

Kudeta militer yang terjadi pada 19 September 2006 merupakan kudeta yang ke-18 kali. Dan ini merupakan kudeta yang pertama kali didukung oleh Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Kudeta militer itu dipimpin langsung oleh Jenderal Sonthi. Mereka berdalih, pemerintah Thailand saat itu tidak memiliki kelayakan politik, tidak cakap dalam mengelola negara, menyalahgunakan kekuasaan, dan terlibat kasus korupsi dan kolusi. Tudingan kalangan militer Thailand itu pun akhirnya terbukti dalam peng-

adilan. Berdasarkan hasil putusan pengadilan, PM terkudeta Thailand, Thaksin Shinawatra terbukti melakukan korupsi, menerima suap, melakukan investasi ilegal, dan melakukan pelarian pajak. Selain itu, istri Thaksin juga terbukti telah menyalahgunakan kekayaan negara. Akibatnya, pengadilan Thailand pun menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada istri perdana menteri terkudeta itu. Bersamaan dengan itu, diputuskan pula perintah penangkapan Thaksin Shinawatra.

Pasca dikeluarkannya putusan pengadilan, Partai Thai Rak Thai, partai pendukung Thaksin dibubarkan. Dengan pembubaran partai tersebut, popularitas Thaksin pun makin menurun drastis. Sementara itu, pemerintahan darurat militer Thailand, di bawah pimpinan Jendral Purnawirawan Surayud Chulanot yang berjanji akan mundur dari kancah politik dan menggelar pemilu yang adil dan bebas, akhirnya merealisasikan janjinya. Selain itu, referendum untuk mengamandemen konstitusi pun digelar dan rakyat Thailand mendukung perubahan undang-undang dasar. Bahkan Raja Thailand turut mensahkan hasil referendum tersebut.

Akhirnya dalam pemilu parlemen pertama yang digelar pada paruh kedua tahun 2007, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) unggul sebagai pemenang pemilu dan Samak Sundravej terpilih sebagai perdana menteri. Di masa itu, muncul front Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang berusaha menentang pemerintahan Sundravej. Para pendukung Partai Demokrat, juga turut menyokong front tersebut. Di masa kepemimpinan Thaksin, Partai Demokrat terbilang sebagai kelompok oposisi.

Di mata para penentangnya, Samak Sundravej merupakan anasir dari partai Thai Rak Thai di era Thaksin. Karena itu pihak oposisi beranggapan bahwa Sundravej merupakan kepanjangan tangan dari Thaksin. Selain itu, Sundravej juga berniat untuk mengubah konstitusi. Tentu saja, niat itu dinilai oleh kubu oposisi sebagai tindakan yang melanggar nyata demokrasi dan konstitusi. Mereka berdalih, rencana pengubahan konstitusi itu merupakan upaya

pemerintah untuk mengembalikan Thaksin ke tampuk kekuasaan dan membuka peluang dibebaskannya mantan Perdana Menteri Thailand itu dari tuntutan pengadilan.

Aksi demo besar-besaran menentang Sundravej akhirnya memaksa Perdana Menteri yang baru terpilih itu, mengundurkan diri. Setelah beberapa waktu jeda, akhirnya pemilu parlemen kedua digelar. Kali ini, Somchai Wongsawat yang sempat menjadi menteri pendidikan dalam kabinet Sundravej, akhirnya terpilih sebagai perdana menteri. Kubu penentang pemerintah pun menuding Wongsawat sebagai kroni Thaksin Shinawatra. Selain itu, Wongsawat yang juga saudara ipar Thaksin itu dituding membentuk pemerintahan oligarki. Aksi demo besar-besaran anti-pemerintah pun kembali marak, sehingga akhirnya Wongsawat pun terpaksa mundur. Mundurnya dua perdana menteri yang dituding sebagai kroni Thaksin ini tidak bisa dilepaskan dari peran Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang mendalangi beragam aksi demo menentang pemerintah.

Sebulan kemudian, pemilu parlemen yang ketiga digelar juga. Kali ini Partai Demokrat yang dulunya menjadi partai oposan terbesar dalam pemerintahan sebelumnya, berhasil menjadi pemenang pemilu dan Abhisit Vejjajiva terpilih sebagai Perdana Menteri yang baru. Meski dalam pemilu kali ini, Partai Demokrat hanya unggul dengan suara tipis, namun partai ini berhasil menggalang koalisi dengan dua partai lain yang lebih kecil. Vejjajiva adalah seorang Perdana Menteri Thailand berusia 41 tahun. Ia merupakan lulusan jurusan ekonomi dan filsafat Universitas Oxford, Inggris. Pemerintahan Vejjajiva yang mendapat dukungan Raja Thailand ini, berjanji bakal mengembalikan stabilitas politik dan akan menggunakan pandangan dari para pemimpin partai-partai lainnya untuk mengelola negara. Ia juga berjanji bakal fokus pada perbaikan ekonomi yang bertumpu pada sektor pariwisata. Ia mengaku bahwa rekonsiliasi nasional bisa dicapai dengan sikap politik yang bijaksana dan berpikir jauh ke depan.

Meski demikian, Vejjajiva pun tak luput dari aksi penentangan. Kini giliaran para pendukung Thaksin yang memotori aksi demo menuntut Vejjajiva mundur. Mereka dikenal sebagai kelompok seragam merah. Para penentang menuding Vejjajiva melakukan kecurangan dalam pemilu dan bersikap diktator. Mereka juga menuntut Vejjajiva melepas jabatannya. Akhirnya, gelombang aksi demo pendukung Thaksin pun makin meluas bahkan berhasil menduduki istana Perdana Menteri dan kantor-kantor penting pemerintah lainnya.

Mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra pun bersikeras akan terus mendorong massa untuk melanjutkan aksi unjuk rasa hingga demokrasi yang sejati terwujud. Ia mengingatkan bahwa rakyat Thailand hingga kini telah mengalami 18 kali kudeta dan 22 pemilu digelar. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat benar-benar menginginkan terwujudnya demokrasi yang sebenarnya. Thaksin juga menuding klaim Vejjajiva yang tidak akan menggunakan peluru panas untuk membubarkan aksi unjuk rasa sebagai kebohongan belaka. Ia bahkan menuntut masyarakat internasional turut menengahi dan menghentikan aksi kekerasan di negerinya.

Awalnya, pemerintah bersikap lunak menghadapi aksi protes kubu oposisi, dan melarang pihak tentara dan polisi menggunakan cara-cara kekerasan. Namun setelah aksi demo kubu oposan berhasil menggagalkan KTT ASEAN di Pattaya dan banyak membuat kerusakan terhadap aset pemerintah, maka pemerintah Vejjajiva pun memberlakukan status darurat militer. Meski pemberlakuan status semacam itu bukanlah hal yang baru bagi warga Thailand, namun dengan diberlakukannya darurat militer, maka pihak keamanan bebas untuk bertindak keras terhadap para demonstran anti-pemerintah. Setidaknya dua pendemo dinyatakan tewas dan ratusan lainnya dicekal.

Dengan ditangkapnya tiga pemimpin aksi demo anti-pemerintah dan melemahnya tuntutan Thaksin, sepertinya stabilitas politik di Thailand bakal kembali normal. Namun ternyata muncul skenario

baru seperti tudingan skandal korupsi Perdana Menteri dan penghinaan seorang petinggi negara terhadap Raja, bisa menjadi dalih untuk menggelar kudeta baru. Thaksin mengklaim bahwa putusan pengadilan mengenai dirinya tidak sah lantaran terpengaruh oleh campur tangan para petinggi hukum Thailand. Selain itu, para pendukung Thaksin sendiri menolak putusan pengadilan.

Krisis politik di Negeri Gajah Putih ini setidaknya telah memberikan tiga pukulan berat. *Pertama*, terhadap posisi Thailand sebagai anggota senior ASEAN. *Kedua*, industri pariwisata yang terancam bangkrut. Dan ketiga, hak-hak kaum minoritas muslim Thailand menjadi terabaikan. Lantas mungkinkah kudeta yang kesembilan belas bakal muncul?

Perubahan Haluan Ekonomi Thailand

Berita dari Thailand pasca kudeta 2006 menunjukkan bahwa golongan intelektual di kota Bangkok dan kaum pengusaha yang tadinya mendukung tindakan kudeta junta militer terhadap pemerintahan Thaksin, mulai kecewa dengan pemerintah Jenderal Surayut Chulanont. Kekecewaan itu disebabkan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh junta militer tidak memberi banyak peluang kepada para pengusaha.[9]

William Pesek, mengemukakan nasionalisme yang dierapkan junta militer tampaknya tidak akan punya tempat dalam abad globalisasi sekarang. Pergerakan bebas barang-barang, modal dan manusia dimaksudkan untuk membuat tapal batas nasional sebagai hal yang aneh. Dan kendati begitu, atau paling tidak versi ekonomi dari nasionalisme terbukti merupakan sebuah kekuatan yang diperhitungkan pada hari-hari awal abad ini. Contoh-contoh belum lama berselang dari kecenderungan itu berlangsung di Rusia, Venezuela dan bahkan Thailand.

Kenapa dibilang “bahkan” ? Karena ekonomi Thailand adalah ekonomi Asia ke-9 yang terbesar dan selama bertahun-tahun ada-

---

[9] *Harian Waspada*, September 2006-Juni 2007.

lah kesayangan globalisasi. Bahkan setelah masa gelap krisis ekonomi Asia satu dasawarsa lalu, Thailand membuka ekonominya selebar mungkin terhadap para eksekutif dan investor asing sebagaimana dilakukannya terhadap kaum turis. Ada alasan lain bahwa berbaliknya Thailand secara nasionalis itu menjadi suatu hal yang mengherankan banyak pihak lantaran Thai tidak punya minyak. Dapatkah Thai betul-betul bersikap 'persetan' terhadap globalisasi? Adapun yang aneh mengenai kontrol militer terhadap Thailand sejak Thaksin digulingkan ialah merek atau corak nasionalisme ekonomi yang rupanya telah diterima justeru menjadi suatu hal yang berakibat buruk bagi rakyat. Biasanya nasionalisme adalah mengenai menolong penduduk atau menyalahkan si kaya atas nasib si miskin. Dalam kasus Thailand, usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan junta militer justeru mungkin merugikan atau menyakiti semua warga Thai.

"Para pemimpin Thai baru lebih bagus menjadi prajurit ketimbang memerintah negeri," kata Song Seng Won, ekonom regional dari CIMB-GK Securities di Singapura ketika diminta mengomentari rencana pemerintah Thai dalam membatasi investasi asing. "Saat ini hati kaum militer itu berada di pihak unsur-unsur nasionalis dan investasi asing langsung di korbankan". Thitinan Pongsudhirak, ilmuan politik dari Chulalangkorn University, Bangkok berkata "Tukang-tukang kudeta kehilangan arah dan jalan. Mereka mencoba menaruh pengaman-pengaman terhadap penjajahan ekonomi, setelah pendulum bergerak sangat jauh di bawah pemerintahan Thaksin."

Hal ini tentu berbeda dengan negara-negara seperti Rusia dan Venezuela yang bisa menggunakan pendapatan minyaknya yang luas untuk menangkal kemerosotan dalam investasi asing langsung, perdagangan atau *gross demostic product* (GDP). Jika anda berada di Thailand dan ekspor-ekspor besar anda ialah produk-produk pertanian, ikan dan barang-barang manufaktur padat karya, maka berpaling menjauh dari ekonomi global bukanlah sebuah opsi

atau pilihan. Mengubah keadaan akan lebih merugikan daripada berbuat baik bagi bangsa yang berjumlah 64 juta jiwa ini. Seraya terdapat beberapa kekacauan mengenai apa yang tengah terjadi, junta militer bertujuan menutup lobang-lobang guna menjamin taruhan para investor internasional dalam perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik ditutupi pada kurang dari 50 persen. Para investor juga dihantui oleh gerak untuk mengubah aturan-aturan investasi dan membatasi spekulasi mata uang baht.

Keadaan yang berubah dengan begitu cepat membuat para pebisnis tidak punya pilihan selain mengikuti berita-berita media dan mengharapkan hal terbaik yang bisa dilakukan. Pemerintah memperkirakan sebanyak 1337 perusahaan akan terkena aturan-aturan pemilikan yang diperketat. Hal itu akan menghembuskan hawa dingin di kalangan iklim bisnis Thai.

Alasan di balik pengawasan yang begitu ketat terhadap aset-aset asing tak lepas dari kaitannya dengan penjualan Shin Corporation. Temasek dari Singapura telah memegang kontrol mayoritas atas perusahaan Shin dari keluarga Thaksin yang tidak membayar pajak atas suatu transaksi yang memicu penggulingan Thaksin. Para pengamat memperkirakan bahwa perubahan baru-baru ini dalam aturan-aturan investasi asing Thai dimaksudkan untuk mengurangi saham Temasek dan menghentikan transaksi modal Shin di masa mendatang.

Para pemimpin baru Thai begitu lemah dan kurang berhasil, sehingga mereka membangkitkan nostalgia bagi masa Thaksin. Kepemimpinan militer Thai yang goyah itu merusak investasi, bisnis dan kepercayaan konsumen. Meskipun, beberapa orang mungkin menamakan pendekatan junta militer itu sebagai nasionalisme ekonomi.

Yingluck Shinawatra, Perdana Menteri Perempuan Pertama

Pada pemilih Thailand yang digelar pertengahan 2011, Yingluck Shinawatra yang cantik dan cerdas, terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand. Kelembutan, kedamaian dan kearifan perdana menteri ini diharapkan mampu mengubah karakter dan keterbelahan warga Thailand menuju rekonsiliasi, kesejahteraan dan kemajuan bersama, yang tentu berdampak konstruktif di Asia Tenggara. Baginya, kesempatan telah terbuka.

Yingluck Shinawatra dilaporkan memiliki kekayaan mencapai 541 juta baht atau sekira Rp154,1 M (Rp284.9 per baht. Laporan ini dikeluarkan oleh lembaga anti korupsi di Thailand.

Kekayaan dari Yingluck ini dianggap lebih kecil dari laporan kekayaan dari kakaknya, Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri dikenal sebagai mantan Perdana Menteri Thailand yang kabur dari kasus korupsi yang menerpanya.

Laporan kekayaan ini juga menyebutkan kekayaan putra Yingluck yang baru berusia 9 tahun. Kekayaan anaknya itu dikabarkan mencapai 4,4 juta baht atau sekira Rp1,2 M. Demikian diberitakan *AFP,* Kamis (29/9/2011). Sementara kekayaan suami Yingluck mencapai 76,8 juta baht atau sekira Rp21,8 M. Tetapi suami Yingluck juga memiliki catatan hutang senilai 369,7 juta baht atau sekira Rp105,4 M.

Seluruh laporan keuangan ini sendiri dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengawas Korupsi Thailand. Laporan ini menyebutkan aset Yingluck yang berupa properti dan beberapa investasi lainnya.

Tetapi jumlah kekayaan Perdana Menteri perempuan Thailand pertama ini masih kalah jauh dengan seorang menterinya. Menteri Sains dan Teknologi Plodprasip Suraswadi dikabarkan memiliki kekayaan mencapai 963 juta baht atau sekira Rp274,4 M.

Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, Yingluck berprofesi sebagai pengusaha. Dia adalah direktur dari perusahaan properti

SC Asset Corp. Dirinya pun sebelumnya menjabat posisi penting di kerajaan bisnis kakaknya.

Dalam jangka pendek, naiknya pebisnis Yingluck Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand yang baru menghadapi berbagai tantangan dahsyat. Perdana menteri perempuan pertama Thailand ini menghadapi masalah domestik yang berat.

Berbagai hal harus diselesaikan Yingluck, yang memang tak memiliki pengalaman politik memadai, dalam upaya membangun kembali negara dan bangsa Thailand agar bersatu. *Pertama*, ia harus mewujudkan rekonsilasi rakyat Thailand yang terbelah antara pro dan kontra Thaksin agar bersatu kembali.

Rekonsiliasi nasional harus tercapai, yang nantinya akan menjadi landasan kokoh bagi berkembangnya negara ini. Rekonsiliasi nasional merupakan tantangan pertamanya sebagai perdana menteri Siam.

Upaya rekonsiliasi masyarakat Thailand yang terpecah menjadi agenda utama ketika nanti memimpin. Rakyat Thailand yang terbelah dua antara pendukung dan penentang Thaksin atau yang dikenal dengan massa Kaos Merah (pro-Thaksin) dan Kaos Kuning, akan menjadi penghalang dalam upaya perbaikan ekonomi.

Yingluck sadar bahwa kelompok Kaus Kuning, harus diajak berdialog dan berdamai untuk bersatu bersama membangun ekonomi Siam yang baru, pasca pemerintahan Partai Demokrat.

Kaus kuning, sebuah kelompok yang dibentuk untuk menggulingkan Thaksin dari kekuasaan, sejauh ini menegaskan akan melakukan apa pun yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kubu Thaksin berkuasa kembali.

Kedua, membenahi ekonomi Thailand, dimana kalangan rakyat pedesaan rindu kebijakan populis Thaksin yang berkuasa 2001-2006 lalu. Kebijakan populisme yang kreatif dalam upaya membangun ekonomi rakyat pedesaan, diperlukan agar kemenangannya tidak mengecewakan para konstituen.

Ketiga, dalam konteks *rule of law*, pemerintahnya harus memproses Thaksin Shinawatra sesuai hukum yang berlaku. Ini tantangan berat pula bagi Yingluck Shinawatra karena ia adalah adik Thaksin Shinawatra yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006.

Thaksin hingga kini masih dituding sebagai pemecah belah warga dan politik Thailand. Karena itu Yingluck harus bisa mengikis dan menghapus pengaruh Thaksin pada pemerintahan barunya agar tak mengundang kecurigaan dan perlawanan fisik kubu oposisinya.

Hukum harus ditegakkan Yingluck atas kasus korupsi Thaksin untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh warga Thailand. Sungguh berat, namun ia bisa meminta pengampunan kepada Paduka Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, Sang Raja Thailand.

Yingluck Shinawatra mengantongi gelar dari FISIP Chiang Mai University pada 1988, kemudian mendapat gelar Master Public Administration, spesialis Info System, dari Kentucky State University, Amerika Serikat, 1991. Yingluck, dari partai Phue Thai, terpilih sebagai perdana menteri setelah maju dan mengalahkan Abhisit Vejjajiva dari partai Demokrat.

Dia seakan menjadi legenda baru karena merupakan perempuan pertama yang menjadi perdana menteri Thailand. Siapa sangka perempuan yang masih hijau di gelanggang politik, bisa memenangkan pertarungan politik dan menjabat perdana menteri. Wanita cantik berusia 44 tahun ini dilaporkan belum pernah sekalipun menduduki posisi sebagai pegawai publik ataupun aktif dalam kegiatan partai.

Tapi sejarah sedang memihaknya. Betapa tidak? Nilai saham Thailand di pasar saham negara itu melonjak lebih dari tiga persen, atau naik 33 poin stelah kemenangan srikandi partai Pheu Thai tersebut. Menurut komisi pemilihan Thailand, tingkat partisipasi warga dalam pemilihan itu mencapai lebih dari 70 persen.

Lalu apakah Thailand akan kembali dilanda kudeta? Waktulah yang akan menjawabnya.(*)

DIALEKTIKA ISLAM DI ASIA TENGGARA DALAM LINTASAN SEJARAH: RADIKALISME DI PHILIPINA SELATAN DAN THAILAND[1]

ISLAM DI ASIA TENGGARA

Selama berabad-abad Islam di Asia Tenggara mengalami dialektika dengan realitas sosial-politik kawasan. Pada beberapa wilayah, Islam menghadapi dinamika yang tak terelakkan: konflik dan ketegangan serta perdamaian, berlangsung silih berganti dari masa ke masa. Maka, merekonstruksikan Asia Tenggara sebagai suatu masyarakat regional sebetulnya bukan persoalan mudah. Hal itu karena indikator-indikator integrasi saling bertemu dengan indikator yang justru menunjukkan disintegrasi kawasan. Keberagaman yang tinggi seolah justru menjadi ciri kawasan. Meskipun demikian, fakta adanya kesamaan-kesamaan yang luas menjadikan kawasan ini tetap valid untuk dipandang sebagai suatu entitas kawasan.[2]

Karaktek semacam ini tidak bisa dilepaskan dalam memahami dinamika Islam di Asia Tenggara. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas kawasan, namun keberagamannya sangat menonjol. Muslim Asia Tenggara, tidak mungkin dipahami sekadar sebagai tipologi agama mayoritas di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam, atau sebaliknya. Prototipe agama minoritas di Philipina, Singapura, Kamboja dan Vietnam. Keberagaman menjadi sangat menonjol di masing-masing negara yang nyaris sulit dicari benang merah yang merangkai perkembangan Muslim di

---

[1] Risalah ini ditulis bersama oleh Herdi Sahrasad dan Al Chaidar, pengamat terorisme dan politik serta dosen Fisip Universitas Malikussaleh Aceh, sekaligus Direktur Centre for Terrorism and Strategic Studies, University of Indonesia. Penulis berterimakasih kepada Al Chaidar atas bantuan, kritik dan diskusinya untuk risalah ini.

[2] Kesulitan mengembangkan konsep Asia Tenggara sebagai suatu entitas kajian digambarkan dengan sangat baik oleh Benedict Anderson, *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia* (Yogyakarta: Qalam, 2002), h. 4-26.

kawasan Asia Tenggara. Padahal pada masa pra kolonialisme kawasan ini pernah disatukan dalam perdagangan dan agama yang luas.

Pra kolonialisme mungkin bisa ditunjuk sebagai masa di mana Islam di Asia Tenggara pernah menjadi faktor determinan perkembangan ekonomi politik dan sosial budaya kawasan. Hal itu, terutama, didorong oleh proses islamisasi yang berlangsung secara damai, berjalan seiring dengan perkembangan perdagangan antar kawasan. Di sini kita tidak bisa mengabaikan peranan pedagang-pedagang Muslim yang disamping meramaikan aktivitas ekonomi kawasan juga menyebarkan ajaran Islam.[3]

Islam memulai penyebarannya di semenjung Malaya dan hanya berhadapan dengan kebudayaan Buddhis Muangthai di dataran utama Asia Tenggara. Islam mendesak maju terus dengan sayapnya menyebar hingga ke sisi timur kepulauan itu hingga ke pulau-pulau yang dewasa ini dinamakan Philipina Selatan. Di sini kemajuannya terhenti dengan kedatangan orang Spanyol di Manila yang menaklukkan mereka dengan membawa misi agama Katolik.[4]

Bagaimana memahami Islam di Asia Tenggara? Kata kuncinya adalah kompleksitas. Hal ini terjadi karena kehadiran Islam di Asia Tenggara harus berhadapan dengan tradisi-tradisi yang sudah mapan terutama ajaran Hindu dan Buddha yang sudah diterima luas di kawasan Asia Tenggara sebelummnya. Islam bukanlah satu-satunya agama besar yang tumbuh subur di Asia Tenggara.

---

[3] Tentang Peranan pedagang Muslim dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, lihat umpamanya, J.V. van Leur, *Indonesian Trade and Society* (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h. 91-117.

[4] Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique, Yasmin Hussain, *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah,* (terj. A Setiawan Abadi dari judul asli *Readings on Islam in Southeast Asia*) (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 2.

Di samping itu, corak Islam yang berkembang telah mengalami proses sinkretisasi yang kompleks berbaur dengan sejarah kedatangan agama-agama besar lainnya seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Agama-agama ini meninggalkan endapan yang sulit dibedakan sehingga terjadilah persenyawaan yang kuat di antara tradisi-tradisi agama itu, yang barangkali tidak ada bandingannya di kawasan lain.[5] Oleh sebab itu, tidaklah signifikan apabila menganggap Islam hanya "lapisan tipis yang sedang mengelupas" sebagaimana kaum kolonial mendefinisikannya. [6]

Salah satu sumbangan besar Islam di Asia Tenggara adalah perannya dalam mewujudkan negara-negara maritim yang kuat dan tangguh. Di sini kehadiran ajaran Islam bertemu dengan kebutuhan sebagian besar negara-negara kecil di pesisir untuk membangun sistem kekuasaan yang baru ataupun kebutuhan negara pedalaman yang telah mengalami proses Indianisasi akan pentingnya menyerap dinamika ekonomi politik pesisir yang tidak mampu disediakan oleh paham kekuasaan lama. Dengan kata lain, sumbangan Islam di Asia Tenggara terhadap pembentukan negara sebetulnya mengambil dua tipe.

Pertama, Islam menentukan secara penuh pembentukan negara dan tradisinya. Di sini Islam memberikan jalan keluar bagaimana kekuasaan negara dibangun melampaui batas-batas lokal sehingga bisa meletakkan dasar bagi suatu imperium. Seperti munculnya kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Banten, Gowa-Tallo, Sulu, Maguindanau, Ternate, dan sebagainya.

Kedua, Islam mengalami proses akomodasi struktural dengan sistem negara yang sebelumnya sudah terstruktur dalam paham

---

[5] Lihat Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (terj. dari *Islam and society in Southeast Asia*), (Jakarta: LP3ES, 1988), h. ix.

[6] Kesimpulan ini diambil oleh pemerintah kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia pada akhir abad ke-19. Lihat ulasan dari Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

Hinduisme ataupun Budhisme. Contoh yang paling mencolok adalah kerajaan Mataram-Islam ataupun kerajaan Malaka. [7]

Meskipun pada saat itu, masing-masing negara Islam terlibat dalam perebutan hegemoni, namun hingga menjelang masuknya pengaruh Barat, tidak satupun negara yang mayoritas penduduknya menganut Islam di Asia Tenggara mampu tampil sebagai kekuatan yang paling hegemonik. Asia Tenggara tetap dicirikan oleh keberagaman negara dan bangsa, apapun bentuk dan jenisnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa di tengah persaingan masing-masing kekuasaan politik Islam, aktivitas ekonomi perdagangan kawasan terus tumbuh dan berkembang. Seperti dikatakan Anthony Reid, "Ledakan pasar pada abad keenam belas yang terus menerus itu, tidak saja berpengaruh terhadap Eropa dan Laut Tengah sebelah timur, tetapi juga Cina dan Jepang." [8]

Pasar yang luas dan sumber daya alam yang besar inilah yang menjadi daya tarik pertama para pedagang Barat untuk memasuki kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, Barat memasuki kawasan ini, bukanlah semata-mata demi perdagangan. Kepentingan politik dan agama yang terbalut di dalamnya menjadikan kedatangan Barat tersebut menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan di Asia Tenggara. *Milestone* utama kehadiran Barat adalah kejatuhan Malaka akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Sejak itu, negara-negara Barat makin intensif hadir dalam setiap ketegangan ekonomi politik di Asia Tenggara. Dan keterlibatan itu makin jauh yang menandai lahirnya era kolonialisme. Sejak itu pula, dunia Islam Asia tenggara terbelah dalam sekat-sekat kolonialisme.

---

[7] Lihat Taufik Abdullah, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan" dalam *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara,* h.70.

[8] Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680* (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), h. 1.

KEKUATAN-KEKUATAN KOLONIAL DI ASIA TENGGARA

Ada beberapa faktor utama yang menarik kekuatan-kekuatan kolonial ke Asia Tenggara, utamanya tentu perdagangan. Rempah-rempah adalah komoditi yang paling banyak dicari pedagang Eropa. Masyarakat Eropa menggunakan rempah-rempah sebagai obat, bumbu masak dan juga sebagai pengawet. Permintaan komoditi ini meningkat tajam seiring dengan semakin maju dan pesatnya persebaran pasar-pasar di Eropa selama periode Perang Salib.

Rempah-rempah, khususnya lada, pada masa itu hanya menjadi monopoli pedagang Arab dan India untuk wilayah Asia Barat dan Samudera India. Untuk Genoa di Mediterrania dimonopoli oleh pedagang Itali. Karena kelangkaan persediaan dan kesulitan perjalanan yang panjang dari pulau-pulau rempah-rempah, mereka mematok harga yang sangat tinggi setibanya di Eropa. Dengan keuntungan yang sangat kolosal inilah kemudian Spanyol dan Portugis menyusun rencana untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Rencana ini diikuti oleh Belanda, Inggris dan Perancis. Dan tentu saja daerah yang menjadi rebutan adalah pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara seperti Malaka, Makassar dan sebagainya.

Sayangnya, kedatangan kaum pedagang Eropa tersebut tidak semata-mata bermotifkan ekonomi perdagangan. Mereka mempunyai idealisme lain yaitu misi untuk peradaban (civilizing mission) ke masyarakat Asia Tenggara. Negara Spanyol dan Portugis menerjemahkan itu dengan upaya memperkenalkan agama Katholik di kawasan Asia Tenggara. Meskipun derajatnya lebih kecil, hal yang sama juga dilakukan oleh Perancis, Belanda dan Inggris.

Di sinilah kompleksitas persoalan terjadi. Tidak sebagaimana kedatangan Islam sebelumnya yang berjalan damai, misi kaum Eropa berlangsung penuh ketegangan karena misi tersebut dilakukan dengan kawalan senjata dan pemaksaan perdagangan. Tidak

mengherankan apabila sejak awal, kedatangan Barat selalu menimbulkan konfrontasi dari negara-negara Islam Asia Tenggara. Konfrontasi terbuka yang pertama adalah kejatuhan Malaka di tangan Portugis pada tahun 1511.

Sejak itu kehadiran negara-negara Barat di Asia Tenggara nyaris tak terbendung. Melalui serangkaian intrik politik dan ekonomi serta memanfaatkan persaingan antar kerajaan Islam di Asia Tenggara, secara perlahan kehadiran negara Eropa makin dominan. Sejarah Asia Tenggara sejak abad 17-18 menunjukkan bagaimana perlawanan, aliansi dan ketegangan itu berlangsung sangat rumit. Namun, melalui keunggulan teknologi dan strategi, satu persatu negara-negara Islam di Asia Tenggara jatuh dalam pelukan kolonialisme. [9]

Memasuki abad ke-19, kolonialisme Eropa di Asia Tenggara nyaris menemukan bentuknya yang utuh. Di sini kawasan Asia Tenggara seakan dikavling oleh negara-negara kolonial. Belanda mendapat jatah wilayah Hindia Belanda. Inggris menguasai Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Perancis mendapat Vietnam dan Kamboja. Sedangkan Spanyol dan selanjutnya Amerika, mendapat Philipina. Masing-masing negara kolonial mengembangkan kebijakan tersendiri terhadap wilayah yang dikuasainya. Termasuk juga terhadap masyarakat Muslim yang berada di bawah kekuasaannya

ISLAM DI BAWAH KOLONIALISME

Politik kolonial yang membagi-bagi wilayah Asia Tenggara dalam kekuasaan kolonial membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara. *Pertama*, interaksi intensif antar komunitas Islam di masing-masing daerah Asia Tengggara

---

[9] Gambaran tentang kejatuhan negara-negara Islam di Asia Tenggara dalam kolonialisme, lihat umpamanya, D.J.M. Tate, *The Making of Modern Southeast Asia* (New York: Oxford University Press, 1971), h. 101-307.

makin berkurang, akibat penguasaan negara kolonial yang berbeda-beda. Dinamika Selat Malaka umpamanya, terbagi dan terbelah antara Sumatera yang dikuasai oleh Belanda dan Semenanjung Malaya yang dikuasai oleh Inggris. Masyarakat Muslim di Pattani juga tidak bisa mengembangkan interaksi intensif dengan sesama Muslim di Semenanjung Malaysia yang dikuasai Inggris. Hal yang sama terjadi pada masyarakat Muslim di Philipina Selatan. Pembelahan kolonial ini mengakibatkan terhentinya kegiatan perdagangan antar kawasan Muslim serta pertukaran sosial budaya lainnya.

Kedua, akibat perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing negara kolonial, dinamika Islam yang berkembang pun makin beragam yang terkadang tidak saling berkaitan. Dalam konteks ini Belanda tampak menekan lebih kuat terhadap kekuatan perlawanan kaum Muslim. Mereka yang mengobarkan perlawanan dengan memanfaatkan semangat Islam, mendapat perlawanan militer yang paling keras, seperti pada Perang Aceh dan Perang Jawa yang dipimpin Diponegoro. Tidak hanya itu, aspirasi golongan Islam dalam lembaga-lembaga bentukan kolonial juga sangat dibatasi. Sedikit akomodasi yang diberikan hanya kepada pendirian *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor Urusan Agama) yang dikhususkan bagi registrasi perkawinan masyarakat Muslim dan urusan wakaf. Secara singkat, sebagaimana diformulasikan oleh Snouck Hurgronje, peletak dasar politik Islam Hindia Belanda, Belanda akan mengambil sikap netral terhadap "Islam Ritual" termasuk segi-segi menyangkut perkawinan dan pewarisan (sebab itu pemerintah membuka kantor urusan bumiputera) dan akan menekan secara keras terhadap "Islam Sosial politik". [10]

Represi yang keras itu ternyata mampu menjadi stimulus yang sangat kuat bagi gerakan modernisasi dan nasionalisme di

[10] Tentang Politik Islam Hindia-Belanda, lihat H.Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 9-98.

Indonesia. Mungkin dengan mempertimbangkan kekalahan-kekalahan yang pernah dialami pada masa abad kesembilan belas dan sebelumnya, generasi baru Islam abad dua puluh, mulai berani melakukan elaborasi doktrin Islam dalam konteks kemodernan. Maka lahirlah organisasi-organisasi Islam yang lebih modern dan mulai mekarnya gagasan-gagasan baru seperti "Islam dan Sosialisme" sebagaimana dijabarkan oleh HOS Tjokroaminoto, "Islam dan Nasionalisme" sebagaimana dikembangkan oleh Soekarno, Hatta dan sebagainya. Pendeknya, kekerasan penjajahan Belanda tersebut menjadi picu yang sangat kuat bagi munculnya pola baru gerakan Islam di Indonesia pada awal abad dua puluh. [11]

Represi yang sangat kuat itu juga dirasakan oleh minoritas Muslim di Philipina. Perjuangan kesultanan Muslim Mindanau dan Sulu yang berlangsung sejak abad 16, harus berakhir dengan tragis: mengakui kedaulatan Spanyol. Di tengah pergumulan dengan kolonialisme itu, agenda masyarakat Muslim di Philipina menjadi sangat berat. Perjuangan mendapatkan ruang bagi pelaksanaan agama dan tradisinya menjadi sangat sukar karena harus berbenturan dengan kepentingan kolonial yang hanya mengandalkan pendekatan represi militer. Akibatnya, respons masyarakat Muslim terhadap kolonialisme lebih banyak didominasi oleh respons kekerasan. Situasi ini tidak banyak mengalami perubahan tatkala Amerika Serikat tampil sebagai kekuatan kolonial baru di Philipina pada awal abad dua puluh. Keberlangsungan represi kekerasan yang sangat lama itulah yang menyebabkan perkembangan Islam di Philipina lebih diwarnai oleh tradisi kekerasan. Mereka tidak sempat mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih kuat, baik yang berkaitan dengan respons terhadap modernisme, maupun hubungan agama dengan negara, sebagaimana rekan-rekan mereka di Indonesia.

---

[11] Tentang Gerakan modern Islam di Indonesia pada awal abad dua puluh, baca Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* .

Meskipun tidak mengalami proses kolonialisme, perkembangan Muslim di Muangthai Selatan, hampir serupa dengan Philipina. Mereka harus menjadi kelompok minoritas di tengah struktur negara Budhisme. Di samping itu, hubungan agama dan tradisi dengan Melayu yang sangat kuat, menyebabkan hubungannya dengan pemerintahan Thai sangat dilematis. Sikap pemerintahan Thai juga demikian. Hubungan Muslim di Muangthai Selatan dengan pemerintahan pusat di Bangkok nyaris tidak pernah berlangsung secara harmonis. [12]

Pendeknya, di kedua negara tersebut, posisi minoritas Muslim memang menjadi tidak *at home*. Mereka bergumul dengan keinginan mendapatkan otonomi guna mendapatkan ruang bagi pelaksanaan agama dan tradisi. Sementara itu perjuangan itu harus bergesekan dengan garis besar politik negara yang bersangkutan.

Politik Islam Inggris terhadap masyarakat Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara, tampak lebih ramah dibandingkan Belanda ataupun Spanyol di Philipina. Pola penguasaan yang dilakukan secara tidak langsung, dengan melanggengkan posisi sultan-sultan yang berkuasa di Semenanjung Melayu dan Borneo, menyebabkan Inggris lebih memilih politik non-intervensi terhadap agama dan tradisi Melayu. Segala perkembangan agama dan kebudayaan dilimpahkan sepenuhnya dalam penguasaan sultan-sultan yang bertahta. Garis politik ini dipertahankan dengan sangat ketat oleh Inggris sehingga, seperti dikatakan oleh Khoo Kay Kim, " There was, in fact, no evidence of a major conflict between Islam and the British administration…"[13]

Keberhasilan ini memang suatu prestasi tersendiri bagi Inggris. Sebab, melalui politik non intervensi itu, Inggris mampu meminimalkan gerakan perlawanan yang berbasiskan agama. Dalam

---

[12] Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani* (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 68-72.

[13] Khoo Kay Kim, "Islam: a View of the Pre-1941 Scenario" dalam *Malay Society: Transformation and Democratization,* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1995), h. 209.

konteks itu pula, sejarah kolonialisme Inggris di Malaysia hampir tidak banyak diwarnai oleh perlawanan heroik sebagaimana di Indonesia. Di sini pula 'nasionalisme Melayu' menemukan bentuk aneh. Nasionalisme itu bukan diterpa oleh ketegangan struktur kolonial, melainkan oleh ketegangan horisontal yang bersifat etnis, terutama hubungan dengan komunitas keturunan Cina. Di sinilah kita menemukan "jalan berbeda" dengan perkembangan gagasan nasionalisme di Indonesia.

Ketiga, kelanggengan kolonialisme menjadikan masyarakat Muslim kawasan Asia Tenggara praktis kehilangan sentimen yang bersifat regional. Masing-masing terlibat dalam agenda domestik dalam tempo yang sangat lama sehingga *world view* masing-masing kelompok Muslim lebih bersifat *inward- looking*. Gerakan modern Islam di Indonesia umpamanya, praktis tidak mempunyai orientasi regional. Organisasi NU dan Muhammadiyah misalnya, kendati tokoh-tokoh gerakan ini mempunyai jaringan perkawanan yang relatif bersifat regional, namun format gerakan Islam mereka tetap berorientasi nasional. Hal yang sama terjadi pula di Malaysia. Mereka cenderung mengembangkan paham Islam yang disesuaikan dengan paham kebangsaan masing-masing.

Kalau demikian, di manakah mereka akan dipertemukan kembali? Untuk menjajaki permasalahan ini pada masa kolonial, kita harus mengamati salah satu momen dalam peribadatan Islam yang sangat penting yaitu Haji. Pelaksanaan haji, dalam beberapa segi bisa menjadi momentum penting pertemuan kembali para aktivis gerakan di kawasan Asia Tenggara. Praktek haji pula yang membukakan pintu bagi perkembangan Islam di Asia Tenggara akan ide-ide pembaharuan Islam, kebangkitan Islam dan sejenisnya. Dalam hal ini termasuk pula gagasan Pan Islamisme yang berkembang di Timur Tengah yang cukup memberikan inspirasi bagi gerakan modern Islam di Indonesia. Bahkan gerakan konservatif Islam, seperti Nahdlatul Ulama, dalam beberapa segi, bisa dikatakan respons dari perkembangan di Timur Tengah.

Kendatipun pelaksanaan ibadah haji mampu menjadi pintu bagi perkembangan lokal Asia Tenggara, namun belum ditemukan bukti kuat bahwa pelaksanaan haji tersebut bisa menstimulus respons yang bersifat regional. Contoh paling nyata, sekali lagi, adalah gerakan Islam di Indonesia pada masa kolonial di mana pola gerakan lebih terstimulasi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah dan dinamika kolonialisme yang dihadapi, dibandingkan dengan merespons perkembangan regional secara intensif. Hal yang sama terjadi pula di negara Islam lainnya di Asia Tenggara. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan perkembangan dunia Islam di masing-masing negara kolonial, seolah tidak bergeming dengan dinamika regional, kendatipun mereka mulai bersua kembali dalam praktek ibadah haji.

Dari beberapa uraian di muka dapat disimpulkan bahwa konsep "umat" secara regional pada dasarnya pernah ditemukan pada abad 15-16. Melalui integrasi ekonomi kawasan yang intesif, terjadilah perkembangan masyarakat Islam yang bersifat saling mempengaruhi. Pola ini menjadi menarik karena kesatuan umat secara regional tersebut berlangsung di tengah pluralitas negara-negara Asia Tenggara klasik yang saling bersaingan.

Tetapi perkembangan semacam ini kemudian dihentikan oleh kolonialisme melalui praktik penguasaan teritori yang ketat, di mana masing-masing negara kolonial seolah mengkavling wilayah Asia Tenggara tanpa memperhatikan kesatuan-kesatuan sosial budaya yang berkembang. Di sinilah komunitas Islam Selat Melaka umpamanya, menjadi terpecah, dan kedekatan umat Islam di Semenanjung Malaka dengan Pattani (Muangthai Selatan) mengalami kebuntuan.

Hal yang sama terjadi pada kedekatan umat Islam di Philipina Selatan dengan perkembangan Islam di Indonesia Timur. Dengan kata lain, Dunia Islam Asia Tenggara yang pernah berjaya pada masa sebelumnya harus mengalami pembelahan yang sangat tragis oleh kolonialisme. Dengan kalimat yang berbeda, D.J.M.

Tate menyebutnya dengan "The Deviding of the Malaysian World."[14]

Konsekuensi dari pembelahan ini adalah perkembangan Islam antar daerah menjadi sangat segmentaris. Masing-masing terlibat dalam agenda lokal yang berlangsung sangat lama. Mereka akhirnya lebih bersifat *inward-looking* atau *domestic oriented*. Sentimen yang bersifat regional menjadi sesuatu yang langka terhadang oleh *cultural block* yang sangat kokoh. Perkembangan semacam inilah yang kini masih sangat kuat terasa.

Sekitar 65 persen masyarakat Asia memeluk agama Islam dan di wilayah Asia Tenggara, Islam menjadi agama mayoritas masyarakatnya. Islam turut membentuk *melting pot* peradaban di kawasan Asia Tenggara bersama Konfusianisme, Hindhuisme dan Kristen serta budaya lokal dalam suatu konfigurasi multikulturalisme yang unik.

Menurut Azyumardi Azra, kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan atas pengaruh yang diterima wilayah tersebut. *Pertama*, adalah wilayah Indianized Southeast Asia, Asia Tenggara yang dipengaruhi India yang dalam hal ini Hindu dan Buddha. *Kedua*, Sinized South East Asia, wilayah yang mendapatkan pengaruh China, adalah Vietnam. *Ketiga*, yatu wilayah Asia Tenggara yang dispanyolkan, atau Hispainized South East Asia, yaitu Philipina.[15] Ketiga pembagian tersebut seolah meniadakan pengaruh Islam yang begitu besar di Asia Tenggara, khususnya Philipina. Seperti tertulis bahwa Philipina termasuk negara yang terpengaruhi oleh Spanyol. Hal itu benar adanya, akan tetapi pranata kehidupan di Philipina juga terpengaruhi oleh Islam pada masa penjajahan Amerika dan Spanyol.

Di kawasan Asia Tenggara, Islamisasi telah berkembang pada sejak awal masuknya bangsa Arab dan Gujarat ke kawasan ini. Is-

---

[14] D.J.M. Tate, *The Making of Modern South-east Asia,* h. 101.

[15] Baca, Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

lamisasi pertama kali masuk ke kawasan Asia Tenggara seiring dengan perdagangan serta peziarah yang datang dan kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Asia Tenggara.[16] Hal ini berbeda dengan masuknya Islam ke dalam area geopolitik lainnya di dunia, dimana masuknya Islam diawali dengan penaklukan suatu wilayah yang kemudian terjadilah Islamisasi.

Masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara berkembang melalui beberapa sektor kehidupan yakni perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Berkembangnya Islam di kawasan Asia Tenggara sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Yakni tahap masuknya Islam pertama kali, dimana para pedagang dan peziarah ini memasuki teluk Malaka di Abad ke-5 dan melakukan perdagangan secara damai dengan masyarakat pesisir hingga berkembang ke dalam tahap terbentuknya kerajaan Islam di Asia Tenggara. Tahap kedua adalah tahap dimana Islam masuk saat datangnya kolonialisme Barat ke kawasan Asia Tenggara hingga berkembang seperti saat ini.[17]

Islam yang berkembang di kawasan Asia Tenggara umumnya bersifat moderat dan universal tanpa memandang perbedaan, hal ini dikarenakan masuk dan berkembangnya Islam di kawasan Asia Tenggara melalui lembaga-lembaga Islam yang memasuki desa-desa dan menghargai kultur budaya kesukuan dan kebiasaan lokal masyarakat Asia Tenggara, dimana membuat Islam tumbuh dengan toleransi dan mampu menerima perbedaan kesukuan dan adat lokal. Dan toleransi inilah yang membuat Islam dapat berkembang dalam berbagai tingkat kepemimpinan intelektual dan keagamaan di kawasan Asia Tenggara pada saat itu

Penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari letak geografis kawasan tersebut, yakni berada di jalur laut perdagangan internasional yang berpusat di selat Malaka. Selat Ma-

---

[16] Lihat Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975); dan Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara.*

[17] Lihat Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara.*

laka merupakan kawasan strategis yang dapat menghubungkan Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Islam masuk ke kawasan Asia Tenggara melalui para pedagang maupun rohaniawan dari Gujarat, Arab, dan Persia.

Sesuai dengan catatan sejarah, Kerajaan Samudera Pasai yang pada kala itu berpusat di bagian utara pulau Sumatera merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam terbesar pada jamannya. Begitulah gambaran penyebaran Islam pada era-era imperialisme kuno.[18]

Ratusan tahun kemudian, memasuki periode Perang Dingin abad 20, Islam seperti menjadi benteng dan tameng bagi mereka yang menolak ideologi komunisme. Pada periode ini, perlakuan buruk terhadap umat Muslim dan munculnya perasaan mengalami marginalisasi, suatu hal yang menggelisahkan dan mengecewakan, banyak terjadi.

Hal inilah yang nantinya menjadi pemicu kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal. Situasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara semakin menarik perhatian Barat, terutama Amerika, seiring dengan dideklarasikannya '*war on terrorism*'.

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan diversifikasi etnis dan religi, bahkan kombinasi keduanya, dengan ragam kultur yang nyata.

Namun inti dari potensi konflik etno-religi di Asia Tenggara bukan disebabkan oleh banyaknya varietas, melainkan lebih kepada isu mayoritas dan minoritas. Etnis dan religi memang telah membentuk identitas sendiri bagi masyarakat kawasan ini.

Selain itu, terdapat suatu bentukan konfrontasi ideologi yang lain, yakni pemerintah (negara-bangsa) versus anggapan kelompok

---

[18] "Muslim Moro Pilih Cara Damai Atasi Konflik", *www.republika.co.id,* diakses pada 29 April 2012. Lihat juga, "Kepentingan: Penyebab Konflik Thailand Selatan", *www.indonesia.ucanews.com,* diakses pada 29 April 2012.

etno-religi tertentu yang menginginkan sebuah negara dengan landasan hukum agama. Islam, dalam hal ini menjadi salah satu kelompok yang berada di garis depan.

Kekuatan radikal Islam pada dasarnya lahir karena perbedaan ideologi mengenai bagaimana pemikiran untuk membangun sebuah negara bangsa harus dilandaskan seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Konsep mengenai dominasi dan didominasi juga menjadi salah satu alasan lahir, berkembang, dan terkoneksinya organisasi radikal Islam di region Asia Tenggara maupun dalam dunia internasional. [19]

Konflik-konflik etnis berbasis agama mulai terjadi di Asia Tenggara semenjak umat Islam menjadi minoritas di beberapa kawasan di Asia Tenggara, dimana terjadi diskriminasi dan pengabaian akan hak-haknya. Konflik kaum Pattani yang merupakan kaum Muslim melayu yang berada di Thailand merupakan salah satunya. Kaum Pattani merupakan kaum yang berbeda secara etnisitas maupun agama dari mayoritas masyarakat Thailand, kaum ini berada di perbatasan Thailand dengan Malaysia.[20]

Kebijakan pemerintah Thailand yang melegalkan masyarakat Thailand ke dalam satu etnis agama mayoritas yakni Thai-Buddhist, membuat masyarakat Pattani semakin tersingkir dan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan gerakan separatisme Islam muncul di Thailand.

Beberapa konflik di Asia Tenggara yang juga menyeret Islam ke dalamnya adalah; konflik Moro di Philipina Selatan, gerakan separatis PULO di Thailand Selatan, dan gerakan separatis GAM di Aceh, Indonesia. Mata Amerika Serikat semakin tertuju pada Indonesia, Philipina, dan Thailand paska peristiwa 9/11. [21]

---

[19] Vaughn, Bruce. "Islam in South and Southeast Asia" dalam *CRS Report for Congress*, 2005.

[20] Vaughn, Bruce. "Islam in South and Southeast Asia."

[21] Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merupakan gerakan separatisme masyarakat Aceh bermula dari timbulnya kecemburuan masyarakat Aceh dengan masya-

Tiga negara tersebut juga dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme yang telah terjadi dan diklaim sebagai negara tempat muncul dan menjamurnya para teroris. Gerakan Islam radikal ini sendiri dinilai muncul dari para ekstrimis Muslim yang mengikuti pendidikan, sejenis *camp* kemiliteran, di Timur Tengah, dimana pendidikan yang didapatkannya tersebut cenderung radikal. Gerakan seperti ini memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip yang diusung, salah satunya adalah prinsip anti Barat. [22]

Sehingga tidak jarang dari gerakan Islam radikal tersebut ada yang menginginkan terbentuknya suatu negara Islam di kawasan Asia Tenggara yang menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai ideologi serta dasar negara dan pemerintahannya. PULO, MILF, MNL, dan juga GAM adalah beberapa contoh dari gerakan tersebut.

Alasan dasar yang tidak boleh diabaikan adalah memang terkadang terbentuk pengesampingan hak umat Islam sebagai kelompok minoritas, yang kemudian memicu konflik seperti yang terdapat di Thailand ataupun Philipina. Pada dasarnya *armed separatism* lahir sebagai reaksi dari adanya *unwillingness* yang kebanyakan dilakukan oleh pemerintah negara-negara di Asia Tenggara pada hak-hak dan upaya *self-determination* kelompok-kelompok minoritas.

Maka yang terbentuk adalah konfrontasi etno-religi versus pemerintah. Kelompok etno-religi dalam hal ini kelompok radikal Islam berpendapat bahwa negara menggunakan konsep post-kolonial, dan ini berarti mengulangi kelemahannya yang gagal untuk mengelola kawasan dengan diversifikasi etno-religius yang

---

rakat yang berada di pulau Jawa, dimana sentralisasi yang berpusat di pulau Jawa membuat kawasan lainnya tertinggal dan berbeda perekonomiannya dengan masyarakat di pulau Jawa. Selain ketimpangan sosial-ekonomi, masyarakat Aceh yang menerapkan kultur budaya Islam tidak sependapat dengan aturan pemerintahan Indonesia yang sekuler karena mayoritas penduduknya muslim. Hal inilah yang mendorong semangat separatisme masyarakat Aceh di Indonesia

[22] Bruce Vaughn , "Islam in South and Southeast Asia."

tinggi. Modernitas juga menjadi faktor yang dianggap melawan otoritas tradisi dan stuktur sosial dan ekonomi yang telah terbentuk. Dominasi *preferensi* oleh etnis atau agama mayoritas juga menjadi alasan mengapa para kelompok Islam tersebut merasa termarjinalkan dan menginginkan aksi separatis.

Tiga daerah di Asia Tenggara yang memliki profil mengenai konflik etno-religi Islam di antaranya adalah Thailand, Philipina Selatan, dan Aceh di Indonesia. Apabila dianalisis, akar dari permasalahan separatisme di ketiga wilayah tersebut sama, yakni: adanya ketidaksensitifan terhadap kepentingan lokal (pemerintah terlalu fokus pada kepentingan masyarakat di pusat, pengabaian terhadap aspirasi regional (sebagai contoh kondisi ekonomi dan infrastruktur daerah peripheri cenderung rendah), adanya represi militer (beberapa negara memiliki sejarah penindasan secara militer terhadap etnis-etnis dan penganut agama tertentu), serta tekanan dari Islam itu sendiri (ajaran memegang teguh ideologi sendiri dengan 'mengabaikan' pandangan kelompok lain) .[23]

Pada masa setelah perang dingin usai, kelompok-kelompok organisasi berbasiskan agama mulai muncul di kawasan Asia Tenggara, contohnya seperti kelompok-kelompok Islam yang muncul karena adanya perbedaan perlakuan di masyarakat, kelompok ini mengawali gearakan separatisme berbasis agam di kawasan Asia Tenggara, dimana kelompok Islam sebagai minoritas terdapat di Thailand dan Philipina. Hal ini kemudian membuat kelompok Islam berubah menjadi semakin ekstrem apabila dibandingkan dengan keadaannya dahulu. Kelompok Islam kemudian berhubungan dengan militan yang membuat gerakan tersebut menjadi separatisme berjubah etno-religius.[24]

---

[23] Peter Chalk,"Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh," dalam *Studies in Conflict and Terrorism* (Routledge, 2001), h. 241-269.

[24] Peter Chalk, 2001. "Separatism and Southeast Asia…", h. 241-269

Gerakan PULO atau *Pattani United Liberation Organization* muncul sebagai reaksi para umat Muslim, yang mayoritasnya bermukim di kawasan Thailand Selatan, terhadap pemerintah pusat. Mereka menilai pemerintah telah mengabaikannya hingga mereka merasa tersingkirkan dan termarjinalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti mewajibkan masyarakat Thailand Selatan, yang notabenenya terbiasa menggunakan bahasa Melayu, untuk menggunakan aksara dan bahasa Thai.

Gerakan separatisme lainnya terjadi di Philipina, dimana kaum Islam Moro di pulau Mindanao mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan mayoritas penduduk Philipina yang beragama Kristen dan berbahasa Inggris. Pemerintah Philipina kurang peka dengan adanya diversitas dalam negerinya sehingga menyebabkan kaum Moro kehilangan haknya sebagai sebuah etnis agama yang berbeda dan minoritas dari masyarakat Philipina.

Keharusan asimilasi yang pemerintah Philipina terapkan membuat mereka ingin merdeka dan memiliki kewenangan sendiri yang berbeda dengan pemerintah Philipina. Oleh karena itu terbentuk Moro Islamic Liberal Front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) yang menjadi kelompok separatis di Philipina.

Gerakan separatisme berbasis agama di kawasan Asia Tenggara telah berkembang ke ranah militan dan radikal. Hal ini dikarenakan tidak jarang pemuda gerakan-gerakan separatis tersebut dikirim ke luar daerah terutama Timur Tengah yang memiliki kedekatan agama untuk belajar ilmu perang dari kelompok Islam yang radikal.

Hal itulah yang menyebabkan gerakan separatisme Islam di Asia Tenggara tidak jarang berakhir dengan konflik militer, dimana mereka menggunakan senjata dan bertindak radikal demi mendapatkan kebebasannya. Dari sini, terjadi perubahan dalam kontur Islam di kawasan Asia Tenggara yang umumnya moderat menjadi radikalis.

Kelompok Islam radikal di Thailand lahir dari adanya 'penindasan' hak-hak populasi Muslim Melayu yang terutama berada di daerah Pattani.

Menurut Chalk (2001), kelompok ini dapat tumbuh dikarenakan tiga faktor:

Pertama adalah adanya kepercayaan yang dianut oleh kelompok Islam mengenai romantisme kerajaan Islam, Pattani Darussalam.

Kedua, adalah adanya hubungan lintas batas negara dengan kelompok Islam di Kelantan, Malaysia, yang mendukung gerakan kelompok Islam Pattani.

Ketiga, adalah adanya ajaran untuk 'hijrah' yaitu beralih ke sesuatu yang lebih baik yang diwujudkan dengan melepaskan semua 'penyiksaan' pemerintah untuk unifikasi agama, suku, dan etnis.[25]

Kelompok radikal Islam Thailand berada di bawah PULO (Pattani United Liberation Army) dan New-PULO yang didirikan oleh Kabir Abdul Rahman pada tahun 1960-an. Kelompok ini ditunggangi oleh militan di Malaysia Utara. Selain itu kelompok ini juga memiliki kerjasama dengan Islam radikal di Timur Tengah dan Asia Selatan (Hisbullah). Kerjasama juga dalam bentuk pelatihan, yaitu dengan kelompok radikal Iran, Irak, dan Pakistan.

Kelompok Islam radikal di Philipina Selatan berasal dari etnis Moro Muslim yang mendiami pulau Mindanao. Kelompok ini menjadi radikal dikarenakan beberapa faktor, seperti adanya rasa dendam terhadap pengaruh Katholik yang bertransmigrasi dari wilayah utara, ketakutan akan upaya kelompok Katholik maupun pemerintah yang menginginkan asimilasi budaya dan agama sehingga dikhawatirkan agama dan budaya Islam akan luntur, adanya perasaan frustasi terhadap rendahnya angka ekonomi dan infrasruktur di kawasan tersebut, serta penolakan terhadap sistem

[25] Peter Chalk, 2001. "Separatism and Southeast Asia…", h. 241-269

kerakyatan, politik, dan juridiksi pemerintah yang dinilai sekuler.[26]

Kelompok ini berada dalam organisasi MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan ASG (Abu Sayyef Group) yang didirikan sekitar tahun 1980 dan 1989. Keduanya menginginkan pemisahan diri dari negara Philipina dan mendirikan MIR (Moro Islamic Republic). Selain memiliki hubungan dengan pemikir ekstrimis lokal seperti di Malaysia, kelompok ekstrimis Philipina juga dikatakan memiliki koneksi yang kuat dengan Al-Qaedah pimpinan Osamah bin Ladden, sehingga CIA dari Amerika Serikat dan NIA dari Australia pun turut intervensi dalam upaya pemberantasan kelompok separatis ini.

Dalam pemerintahan, masyarakat Pattani juga tidak memiliki perwakilan, baik perwakilan regional maupun perwakilan agama. Pemerintah juga menghapuskan aturan-aturan lokal yang didasarkan pada ajaran Islam. Kondisi yang seperti ini tentu memunculkan rasa kebencian terhadap pemerintah, yang semakin hari semakin memuncak. Imbasnya, banyak dari mereka yang menjadi pengangguran sebab ketidakmampuan mereka berbahasa Thai dan kebencian mereka terhadap pemerintah pusat.

Sebaliknya, dari sisi pemerintah Thailand, mereka menilai masyarakat Pattani dan Islamismenya merupakan pembawa masalah dan bibit dari kelahiran pemberontakan. Pemerintah tidak jarang menaruh rasa curiga kepada masyarakat Muslim atas kasus kejahatan yang terjadi. Tidak heran jika hubungan antara masyrakat Muslim dengan pemerintah Thailand sering menegang.

Kemunculan MILF, MNLF, maupun Abu Sayyaf di Philipina secara garis besar memiliki latar belakang yang sama dengan kemunculan gerakan PULO di Thailand. Mereka, masyarakat Muslim yang mayoritas mendiami kawasan Moro, merasa tersing-

---

[26] Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique, Yasmin Hussain, *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah,* h. 2.

kirkan, termarjinalkan, dan tentunya iri dengan masyarakat Philipina Utara, yang mayoritas adalah pemeluk Katholik yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Philipina.

Kasus Moro ini telah berlangsung sejak lama, namun *turning point* dari kasus ini berawal dari dimasukkannya kawasan Mindanao sebagai bagian dari kawasan administratif Philipina pada tahun 1940. Yang menjadi masalah di sini adalah pemerintah Philipina yang tidak kunjung mengakui hukum adat Moro. MNLF sendiri merupakan suatu gerakan separatis yang didirikan oleh Nur Misuari pada tahun 1972 yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Republik Bangsa Moro.

ISLAM DI PHILIPINA

Kalangan Islam Philipina yang kebanyakan hidup bertani, tidak percaya pada pemerintah Philipina. Segala undang-undang dan hukum yang dikeluarkan pemerintah cenderung diabaikan. Mereka lebih percaya pada para datuk yang menjadi pemimpin lokal. Datuk pula yang berhak mengendalikan hukum adat, seperti tradisi peradilan agama, poligami, perkawinan, dan perceraian. [27]

Bila kita melihat sejarah perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi tiga fase: *Pertama*, Moro berjuang melawan penguasa Spanyol selama lebih dari 375 tahun (1521-1898). *Kedua*, Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun (1898-1946). *Ketiga*, Moro melawan pemerintah Philipina (1970-sekarang).

Namun perlu dipahami, alasan apa yang membuat gerakan Islam di Philipina itu mengambil jalur kekerasan. Minimal ada tiga ala-

---

[27] Cesar A. Majul, *Muslim in the Philippine* (Jakarta: LP3ES, 1989). Lihat, Ali M Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Sebagai bandingan, baca Fred R. Von der Mehden, *Religion and Nationalism in Southeast Asia* (Madison: University of Wisconsin Press, 1968); Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front* (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet-2.

san yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Philipina.

Pertama, bangsa Moro sulit menerima Undang-Undang Nasional karena jelas undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katholik yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah. *Ketiga*, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Philipina ke wilayah mereka di Mindanao, karena program ini telah mengubah mereka dari mayoritas menjadi minoritas di segala bidang kehidupan.

Berakhirnya kolonialis Spanyol dan Amerika pada saat itu, membuat suatu yang sangat tak terduga. Penulis beranggapan demikian karena kedatangan penjajah tersebut merupakan malapetaka bagi Philipina dengan meninggalkan agama kristen bagi masyarakat Philipina. Kristen yang dianut kebanyakan warga di Philipina Utara telah membantu warga utara itu memperoleh kekuasaan atas seluruh kepulauan Philipina. Radikalisme ini pada hakikatnya merupakan sebuah artikulasi konflik antara Philipina Utara-Kristen dengan Philipina Selatan-Islam.

Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pada akhirnya melahirkan perlawanan atau perjuangan baru. Dibentuklah apa yang disebut sebagai Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971. Perkembangan berikutnya, MLF sebagai induk perjuangan Bangsa Moro akhirnya terpecah: Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nurulhaj Misuari dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Salamat Hashim.

Namun, dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-

Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). [28]

Di samping perjuangan bersenjata melalui organisasi seperti MNLF, masyarakat sipil juga melakukan pendekatan damai dan demokratis di bawah pengawasan PBB, melalui Bangsa Moro People's Consultative Assembly yang melakukan pertemuan pada tahun 1996 dan 2001. Pertemuan pertama, yang menurut laporan dihadiri lebih dari satu juta orang, menghasilkan pernyataan untuk mendirikan kembali negara dan pemerintahan Bangsa Moro.

Hal ini semakin nyata dalam pernyataan bersama yang dideklarasikan oleh ratusan ribu Bangsa Moro yang ikut serta dalam Rapat Umum untuk Perdamaian dan Keadilan in Cotabato City dan Davao City pada 23 Oktober 1999, di Marawi City pada 24 Oktober 1999,dan di Basilan pada 7 Desember 1999.

Dalam serangkaian rapat umum mereka mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pemerintah Philipina [29]:

> *"…kami percaya bahwa satu-satunya solusi berguna dan abadi bagi hubungan yang tidak sehat dengan pemerintah Philipina adalah pengembalian kebebasan kami yang secara ilegal dan imoral telah dicuri dari kami, dan kami diberi kesempatan untuk mendirikan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai sosial, relijius dan budaya kami".*

Sikap ini dipertegas dalam pertemuan kedua, yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan dihadiri sekitar dua setengah juta orang, yang menyatakan "Satu-satunya solusi yang adil, bermakna dan permanen untuk persoalan Mindanao adalah kemerdekaan rakyat dan wilayah Bangsa Moro sepenuhnya".

Hubungan problematis antara Bangsa Moro dan pemerintah pusat di Manila, yang dalam banyak kasus berarti konfrontasi kekerasan, harus dipahami dalam konteks keinginan untuk merdeka. Masyarakat Bangsa Moro meyakini bahwa jaminan terbaik untuk

---

[28] Lihat Cesar A. Majul, *Muslim in the Philippine*, h. 141; baca juga Ali M Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* .

[29] Laporan Reuters dan R*epublika,* 7-9 Desember 1999.

keamanan mereka dan satu-satunya kesempatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini adalah ketika mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur nasib sendiri, yang menjadi inti permasalahan dalam konflik berkepanjangan yang terjadi.

Sejarah Manila[30]

Literatur sejarah menyingkapkan bahwa nama Manila, ibu kota Philipina itu, sebenarnya berasal dari kata *Fi Amanillah (*Bahasa Arab) yang berarti *di bawah lindungan Allah.* Tidak banyak orang yang tahu, memang, kalau kota pusat tran-saksi perdagangan bangsa Philipina itu dahulu kala menganut sistem pemerintahan Islam.[31]

Sebab, menurut catatan sejarah, sebelum Spanyol datang menjajah di tahun 1565, para sultan Islam dari Brunei Darrussalam, Minangkabau dan Johor sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut. Tak aneh, bila pencetusan nama Manila pun diadopsi berdasarkan kata di atas. Mereka berharap bahwa kelak suatu saat nanti, Manila akan menjadi kota yang tidak hanya menganut sistem pemerintahan Islam yang demokratis tapi juga modern, aman, dan sejahtera. Dalam beberapa dekade, cita-cita itu sempat terlaksana.

Jumlah Umat Islam di Philipina sekarang lebih dari 12 juta jiwa atau 12 persen dari populasi penduduk Philipina. Tapi ada data lain yang mengatakan cuma 5 persen. Philipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan jumlah 86,241,697 jiwa pada 2005, dan Philipina mempunyai kira-kira 92,2 juta penduduk menurut perkiraan sensus 2009.

Setelah Spanyol berkuasa, merekalah yang menciptakan *image* buruk tentang kaum Muslim Philipina. Spanyol menyebut kaum Muslim dengan sebutan "Moor". Dalam bahasa Spanyol, moor

---

[30] Lihat Ali M. Kettani, Ali M., *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini.*

[31] Urian-uraian berikut teks ini bersumber dari *http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/09/03/04/35244-muslim-di-Philipina-minoritas-di-negeri-sendiri.*

berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan huramentados (tukang bunuh). Disesuaikan dengan muatan lokal Philipina, *moor* kemudian diganti menjadi *moro.* Inilah cikal-bakal penyebutan Muslim Moro dan terus melekat sampai sekarang.

Penduduk Philipina Selatan, seperti halnya warga Thailand Selatan, sebagian Malaysia dan Singapura, Brunei Darussalam, serta sebagian penduduk Indonesia, berasal dari rumpun antropologi yang sama, yaitu Austronesian/Malayo Polynesian. Maka, tak mengherankan, terdapat kesamaan ciri-ciri fisik dan bahasa (etnolinguistik) yang hampir sama.

Dalam bahasa Tagalog (Filipino), yang kini menjadi bahasa nasional Philipina, terdapat kurang lebih 5.000 kata yang hampir sama dengan bahasa Melayu (Indonesia) walau kadang artinya berbeda, seperti pintu, kanan, murah, mahal, gunting, anak, balai, aku (ako), kita, dan hitungan angka (1 sampai 10, yang amat mirip dengan bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda sekaligus).[32]

Kesamaan ini semakin kental karena kesamaan agama, yakni Islam. Ketika Muslim Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Brunei, dan Philipina berkumpul bersama-sama, katakanlah ketika beribadah haji di Tanah Suci, tak ada yang dapat memastikan asal kewarganegaraan mereka. Kecuali, tentu saja, ketika mereka mulai berbicara.

Batas negara memang tidak sama dengan batas kultural. Muslim Nusantara boleh berbeda kewarganegaraan, tapi secara budaya hampir sama. Di pusat suvenir Aldevinco, Davao City, misalnya, di antara barang-barang yang dijual adalah sarung Samarinda dan batik asli Solo dan Pekalongan.

Sayangnya, eksistensi dan status Muslim Nusantara tersebut tidaklah sama. Muslim menjadi mayoritas di Indonesia, Malaysia,

---

[32] Baca "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri", *http://majalah-alkisah.com/index.php/component/content/article/38-tarikh/429-islam-di-mindanao-minoritas-di-negeri-sendiri*

dan Brunei. Namun menjadi minoritas di Thailand, Singapura, dan Philipina. Memang, mayoritas bukanlah jaminan bahwa hidup akan lebih baik. Apalagi menjadi minoritas. Demikianlah yang terjadi dengan minoritas Muslim Moro di Mindanao, Philipina.

Kisah Awal Kedatangan Islam di Philipina

Agama Islam masuk ke Philipina sebelum penjelajah Spanyol menginjakkan kaki di tanah negeri ini. Itu dibuktikan dengan adanya laporan seorang pengembara Cina pada zaman Dinasti Yuan, 1280-1368. [33]

Muslim di Philipina terdiri atas 13 kelompok etnolinguistik, masing-masing Iranun, Magindanao, Maranao, Tao-Sug, Sama, Yakan, Jama Mapun, Ka'agan, Kalibugan, Sangil, Molbog, Palawani and Badjao. Ada pula muslim di kalangan penduduk pribumi (indigenous people) Mindanao seperti Teduray, Manobo, Blaan, Higaonon, Subanen, T'boli, dan lain-lain. Selain itu penduduk Muslim juga dapat diketemukan di Luzon maupun Visayas kendati tidak dalam jumlah yang signifikan. Muslim yang men-diami Mindanao, pulau Basilan, Palawan, Sulu dan kepulauan Tawi-Tawi kemudian disebut sebagai Bangsa Moro. Data tahun 2005 menyebutkan total muslim di Philipina berjumlah 5% (4.5 juta jiwa) dari total penduduk Philipina. [34]

Muslim di Philipina biasanya dikenali sebagai masyarakat Moro. Mereka umumnya berdiam di Pulau Mindanao (pulau kedua terluas di Philipina), Kepulauan Sulu, Palawan, Basilan, dan pulau-pulau sekitarnya. Secara geografis, gugusan pulau-pulau ini berada di selatan Philipina, sedangkan bagian utara negeri ini adalah gugusan Kepulauan Luzon.

---

[33] Lihat Ali M. Kettani, Ali M., *Minoritas Muslim di di Dunia Dewasa Ini*

[34] "Apa dan Siapa Bangsa Moro", *http://www.voa-islam.com/news/philipine/2009/07/16/326/apa-dan-siapa-bangsa-moro*

Dalam sejarahnya, Islam masuk ke Philipina, tidak lama setelah Islam berkembang di dunia Melayu. Islam masuk ke wilayah Philipina Selatan, khususnya kepulauan Sulu dan Mindanao pada 1380 M yang dibawa oleh seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul al Makhdum (Syeikh Makhdum). Banyak pedagang dan dai Muslim yang mengikuti Syeikh Makhdum. Mereka berdiam di sana dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat.[35]

Ini berarti, kedatangan Islam di Philipina jauh lebih awal daripada kedatangan kolonial Barat, khususnya bangsa Spanyol yang masuk ke kawasan itu pada 1566 M. Adalah Raja Baguinda, seorang pangeran dari Minangkabau, Su-matera Barat, tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Raja Baguinda tiba di Kepulauan Sulu setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas kerja kerasnya, Kabungsuwan Maguindanao, raja terkenal dari Manguindanao, pun akhirnya memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis.[36]

Pada masa itu, sudah dikenal sistem pemerintahan dan peraturan hukum, yaitu Manguindanao Code of Law, atau Luwaran yang didasarkan atas *Minhaj* dan *Fath al-Qareeb, Taqreeb al-Intifa* dan *Mir'at al-Thullab*. Maguindanao kemudian menjadi seorang Datuk yang berkuasa di Provinsi Davao di bagian tenggara pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai kepulauan Philipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja.[37]

Penyebaran Islam di Sulu dan Mindanao diyakini berasal dari para pedagang, guru-guru dan sufi keturunan Arab yang berlayar

---

[35] " Muslim di Philipina, Minoritas di Negeri Sendiri", *http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/09/03/04/35244-muslim-di-Philipina-minoritas-di-negeri-sendiri.*

[36] Lihat, "Apa dan Siapa Bangsa Moro".

[37] Lihat Ali M. Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini.*

hingga ke Sulu dan Mindanao. Hampir sama dengan model penyebaran Islam di Indonesia. Mereka kemudian mengislamkan dan menikahi penduduk setempat.

Masjid pertama di Philipina tercatat berada di Tubig-Indangan di Pulau Simunul. Didirikan oleh Makhdum Karim alias Sharif Awliya, keturunan Arab, sekitar tahun 1380.

Berikutnya para musafir keturunan Arab secara berturut-turut membangun Kesultanan Sulu pada 1390, dan Kesultanan Maguindanao dan Buayan pada akhir abad ke-15.

Seorang sejarawan, Abhoud Syed M. Lingga, menyebutkan, sultan pertama Sulu, Paduka Mahasari Maulana Al-Sultan Sharif Ul-Hashim, yang memerintah tahun 1450-1480, berasal dari Sumatera. Sultan ini menikah dengan putri Raja Baguinda, yang berasal dari Minangkabau ("Menangkabaw" dalam istilah di Mindanao).[38]

Sharif Muhammad Kabungsuwan, pendiri Kesultanan Maguindanao, yang tiba di Mindanao pada 1515, ayahnya berasal dari Arab dan ibunya adalah keluarga Kesultanan Johor (kini bagian dari Malaysia). Sementara itu, Sultan Sulu ke-7 memiliki darah Brunei (kini Brunei Darussalam).

Kesultanan Makassar dan Ternate pada masa silam turut memainkan peranan penting di Mindanao. Ketika Gubernur Spanyol Corcuera menyerbu Sulu pada 1638, Rajah Bongsu, Sultan Sulu, mendapat bantuan dari para prajurit Makassar. Sementara itu, Kesultanan Ternate kerap membantu Sultan Buisan di Maguindanao dalam perangnya melawan penjajah Spanyol.[39]

Sampai kini masih cukup banyak keturunan Indonesia yang tinggal di Mindanao. Namun kini lebih banyak berasal dari Sulawesi Utara, utamanya Kepulauan Sangir Talaud dan Miangas (Pulau Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang berjarak sangat de-

---

[38] Lihat, "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri"

[39] Lihat Ali M. Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini.*

kat dengan Mindanao, dan sebaliknya amat jauh dari Manado, ibukota Sulawesi Utara).

"Saat ini ada sekitar 8.000 orang Indonesia yang masih berkewarganegaraan Indonesia di Mindanao. Belum lagi mereka yang tak terdaftar dan mereka yang telah berkewarganegaraan Philipina," ujar Bernard Loesi, konsul Indonesia di Konsulat Jenderal RI di Davao City.[40]

Tak hanya menyebarkan Islam di Mindanao, pergerakan Islam kemudian melaju ke utara, merambah area Visayan, yaitu Cebu, Mactan, kemudian Palawan, hingga Luzon, pulau tempat metropolitan Manila. Disinyalir, metropolitan Manila pada abad ke-16 berada di bawah kekuasaan raja Muslim, yaitu Rajah Sulaiman Mahmud. Sama halnya dengan daerah Tondo, Cebu, dan Mactan di Visayan.[41]

Datangnya penjajah Spanyol pada tahun 1521 mengubah semuanya. Perluasan dakwah Islam dari selatan (Mindanao dan Sulu) terhambat, dan pertempuran terjadi di banyak tempat selama tiga abad lebih kekuasaan kolonial Spanyol. Perang dengan Spanyol baru mereda pada tahun 1898, saat beralihnya kekuasaan negeri Philipina dari Spanyol ke Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris 10 December 1898.[42]

Jejak Penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat di Philipina[43]

Pada tahun 1521, Spanyol, dipimpin Ferdinand de Magelllans, datang ke Philipina dan langsung membuat onar. Ia menaklukkan seantero negeri, hanya wilayah selatan yang tak bisa mereka kuasai.

Berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya, penduduk wilayah selatan, yang mayoritas Muslim, tidak sudi hidup dalam penjajah-

[40] Baca, "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri"
[41] Baca, " Muslim di Philipina, Minoritas di Negeri Sendiri"
[42] Baca, "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri".
[43] Lihat Ali M. Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini.*

an. Spanyol menghabiskan 375 tahun untuk menaklukkan kaum Muslimin.

Spanyol tidak hanya menjajah, tapi juga membawa misi Kristen di bumi Islam tersebut. Pada 1578, Negeri Matador ini mengadu domba rakyat Philipina untuk memerangi orang-orang Islam di selatan. Spanyol melabelinya dengan nama perang suci, hingga dari sinilah kemudian timbul kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Philipina terhadap bangsa Moro, yang Islam hingga sekarang. Sejarah mencatat, orang Islam pertama yang masuk Kristen akibat politik yang dijalankan penjajah Spanyol ini adalah istri Raja Humabon dari Pulau Cebu, yang disusul oleh rakyatnya.[44]

Pada masa penjajahan spanyol, warga Philipina mendirikan sebuah organisasi yaitu Katipunan yang berdiri pada tahun 1892 yang merupakan organisasi anti Spanyol di Manila.

Katipunan memiliki tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol melalui revolusi. Organisasi masyarakat ini diprakarsai oleh para pejuang Philipina Andrés Bonifacio, Teodoro Plata, Ladislao Diwa. Awalnya, Katipunan adalah organisasi rahasia sampai penemuannya pada tahun 1896 yang mengakibatkan pecahnya Revolusi Spanyol. Katipunan, secara harfiah berarti "asosiasi." Berasal dari kata "tipon" yang berarti "masyarakat" atau "berkumpul bersama". Nama resmi revolusioner adalah Kataas-taasan, *Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan* (dalam bahasa Indonesia: *dan Maha Mulia Masyarakat tertinggi dari Anak Bangsa,* Spanyol*: Supremay YM Asociación de los Hijos del Pueblo).* The Katipunan juga dikenal dengan sing-

[44] Urian-uraian teks ini bersumber dari *http://www.republika.co.id/berita/ dunia-islam/islam-mancanegara/09/03/04/35244-muslim-di-Philipina-minoritas-di-negeri-sendiri.*

katannya, KKK. Para Katipunan memiliki beberapa tujuan,[45] yaitu:

- Mengembangkan aliansi yang kuat dengan masing-masing dan setiap Katipunero menyatukan Philipina menjadi satu bangsa padat;
- Memenangkan kemerdekaan Philipina dengan cara konflik bersenjata (atau revolusi);
- Mendirikan sebuah republik setelah kemerdekaan.

Munculnya Katipunan menandai akhir perang salib untuk mengamankan reformasi dari Spanyol dengan cara kampanye damai.

Sejatinya, kedatangan bangsa Eropa dan Amerika dapat dikatakan seabagai malapetaka bagi Moro. Migrasi secara besar-besaran tak bisa dihindari. Konflik budaya, kekuasaan, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan lainnya, membuat Mindanao panas. Buntutnya, muncul persoalan multikompleks. Golongan Islam merasa bahwa mereka adalah pewaris sah Mindanao dan daerah-daerah yang pernah dikuasai Islam. Sementara itu, para migran–umumnya beragama berbeda–mayoritas telah merasa secara sah pula mendiaminya.[46]

Setelah kekuasaan Spanyol berakhir, datanglah AS. Spanyol, dengan tanpa rasa malu, seolah-olah Mindanao dan Sulu kepunyaan mereka, menjual Philipina kepada AS. Harganya? Konon mencapai US$ 20 juta, harga yang sangat tinggi pada tahun 1898. Penjualan ini diatur dalam Traktat Paris.

Sadar bahwa orang Islam Philipina telah telanjur benci terhadap penjajah, AS pun bersiasat dengan berpura-pura mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak. Periode 1903-1913

---

[45] Lihat, Akhwan Ahm Asy'ari Mukarrom dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2008). Lihat juga, Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara,* Jakarta: LP3ES, 1993.

[46] Lihat Ali M. Kettani, *Minoritas muslim di Dunia Dewasa Ini.*; Akhwan Ahm Asy'ari Mukarrom dkk, *Pengantar Studi Islam;* dan Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.*

dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan Bangsa Moro. Strategi AS tidak hanya secara fisik dalam peperangan. Melainkan juga melalui pendidikan dan ajakan yang efeknya bagi Muslim Moro lebih dahsyat. Hasilnya, kesatuan politik dan perlawanan kaum Muslim tidak terkendali. Satu hal yang paling ironis, budaya Islam sedikit demi sedikit semakin hilang dari masyarakat Muslim Moro lantaran AS mengganti semua sistem yang digunakan bangsa Muslim Moro. [47]

Pada intinya ketentuan tentang hukum AS merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum Muslimin (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Philipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis.

Manuel L. Quezon, seorang senator (1936-1944), berusaha memperbanyak jumlah bangsa Philipina non-Muslim. Konsep penjajahan AS melalui koloni diteruskan oleh pemerintah Philipina begitu AS hengkang dari negeri tersebut. Sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri.

Kekuatan Islam Philipina Pasca Kemerdekaan

Meski Philipina telah meraih kemerdekaaan pada tahun 1946, namun nasib bangsa Moro tidak pernah berubah sampai sekarang. Philipina menjelma menjadi penjajah yang lainnya, bahkan sama kejamnya. Dalam masa kemerdekaan Philipina, Muslim Moro sadar bahwa perjuangannya harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Kemudian dibentuklah MIM, Anshar-el-Islam, MNLF, MILF, MNLF-Reformis, BMIF.[48]

Namun kekurangannya, pada saat yang sama juga hal itu memecah kekuatan bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka sendiri secara keseluruhan. Dibandingkan de-

---

[47] Baca, "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri".

[48] Lihat Ali M. Kettani, *Minoritas muslim di Dunia Dewasa Ini.*; Akhwan Ahm Asy'ari Mukarrom dkk, *Pengantar Studi Islam;* dan Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.*

ngan masa pemerintahan semua presiden Philipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos, masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos.

Perkembangan berikutnya, kita semua tahu. MLF sebagai induk perjuangan bangsa Moro akhirnya terpecah. *Pertama*, Moro National Liberation Front (MNLF), pimpinan Nurulhaj Misuari, yang berideologikan nasionalis-sekuler. *Kedua*, Moro Islamic Liberation Front (MILF), pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Philipina Selatan.

Muncul pula kecurigaan bahwa pemerintah terlalu berpihak sebelah. Orang Moro yang kebanyakan hidup bertani tak percaya pada pemerintah Philipina. Mereka lebih percaya pada para datuk yang menjadi pemimpin lokal. Segala undang-undang dan hukum yang dikeluarkan pemerintah cenderung diabaikan. Soal tanah, misalnya, mereka lebih mendengar fatwa datuk. Sesuai tradisi, tanah adalah kepunyaan marga (klan) dan diatur oleh datuk. Datuk pula yang berhak mengendalikan hukum adat, seperti tradisi peradilan agama, poligami, perkawinan, dan perceraian.

Sebaliknya, pemerintah menganggap umat Islam Mindanao sengaja mengisolasi diri dari golongan lain. Mereka dituduh antipati terhadap pemerintah, bahkan cenderung menunjukkan sikap bermusuhan. Pemerintah merasa telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Mindanao. Misalnya, dengan mengadakan perbaikan di bidang kesempatan kerja, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah, agaknya, yang perlu diurai: mendekatkan kesamaan dalam perbedaan.

Salah satu solusi logis dan sederhana untuk mengakhiri konflik agar Islam di Philipina selatan dapat berkontestasi dengan baik dalam politik adalah dengan diberikan otonomi khusus terhadap

kelompok-kelompok separatis Muslim radikal di selatan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dengan hal ini diharapkan bisa meyakinkan kelompok Front Pembebasan Islam Moro untuk menandatangani kesepakatan damai antara pusat dan Philipina selatan. Otonomi bebas itu meliputi kewenangan untuk mengontrol sumber daya alam di Philipina Selatan yang diklaim Muslim Philipina sebagai warisan nenek moyang mereka.

Setelah kejatuhan Marcos dari tampuk kekuasaan di Philipina dan naiknya Corazon Aquino sebagai Presiden, maka kebijakan Pemerintah Philipina terhadap Muslim Moro pun mulai bergeser. Corazon Aquino menjanjikan untuk memberi peluang otonomi bagi mereka selama tidak ada usaha untuk memisahkan diri dari Republik Philipina. Kemudian diadakanlah negosiasi-negosiasi dan pembahasan syarat-syarat otonomi bagi Muslim Moro yang ditetapkan dalam konstitusi baru dan diratifikasi pada awal tahun 1987.[49]

Namun usaha Pemerintahan Corazon Aquino untuk mengajak faksi-faksi terbesar dalam masyarakat Muslim Moro menemui kegagalan, dan kemudian hanya bisa mengajak Nur Misuari dengan Moro National Liberation Front (MNLF). Padahal sejak MNLF bisa dirangkul dan diajak kerja sama oleh Pemerintah Philipina pada perundingan di Tripoli, Libya pada bulan Desember 1977 yang kemudian menghasilkan Tripoli Agreementö, maka sejak itu simpati masyarakat Muslim Moro serta dukungan internasional terutama dari dunia Islam terhadap MNLF berangsur-angsur mulai pudar. Walaupun pada mulanya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Juli 1975 memberi pengakuan formal bagi

[49] Untuk melihat secara lebih jelas bagaimana peran Fidel Ramos sebagai ahli strategi militer dalam menghadapi resistensi militer kaum pemberontak Islam (Moro), kita harus melihat rekonstruksi sejarah Islam di Asia Tenggara secara singkat.

Terimakasih kepada rekan saya yakni dua alumni UI yakni Darmawan Sinayangsyah, dan Al Chaidar serta seorang alumnus Fisip UI yang memberikan bahan/materi bagi penulisan ini, sayang banjir Jakarta telah menghanyutkan materi/bahan bacaan sebagai bahan penulisan teks ini.

MNLF. Bahkan Libya yang menjadi tuan rumah dalam perundingan tersebut akhirnya kehabisan antusiasme. Dan memang pada akhirnya Pemerintah Philipina, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya pada bulan Maret 1980, mengeluarkan pernyataan bahwa Tripoli Agreement mengalami kemacetan.[50]

Kemacetam Tripoli Agreement itu kemudian mempunyai dampak yang sangat luas. Pada bulan Maret 1984, Salamat Hashim yang mantan anggota Pimpinan Pusat MNLF sekaligus Ketua Komite Hubungan Luar Negeri MNLF mendirikan Moro Islamic Liberation Front (MILF), setelah melihat sudah tidak ada lagi harapan untuk mengontrol kepemimpinan Nur Misuari ataupun untuk mengadakan rekonsiliasi dengan faksi Nur Misuari.

Kronologi pemisahan kelompok Salamat Hasyim ini sesungguhnya sudah bermula sejak Desember 1977, pada saat itu Komite Pusat MNLF mengambil kebijakan menuntut Nur Misuari mundur dari kursi kepemimpinan. Bersamaan dengan itu, mereka meminta Salamat Hasyim menggantikannya. Keputusan itu didukung oleh Komite Militer dan Sipil gerakan tersebut. Mereka menulis surat permohonan agar Nur Misuari mengundurkan diri.

Namun Nur Misuari tidak mau menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Salamat Hasyim. Peristiwa itu menyebabkan gerakan ini terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung Salamat Hasyim, dan kelompok yang masih setia dengan Nur Misuari. Pada puncaknya kelompok yang mendukung Salamat Hasyim pada bulan Maret 1984 resmi mendirikan gerakan sendiri dengan menggunakan label Islam sebagai identitas perjuangan mereka sekaligus sebagai pembeda dengan gerakan yang dipimpin Nur Misuari.

Dari sinilah kemudian ada penggembosan kekuatan MNLF. Sebagai perbandingan, MNLF sekarang ini hanya mempunyai kurang lebih 15.000 personil saja, itupun belum dihitung dengan mereka

---

[50] Lihat, Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*…

yang menyeberang atau pun yang menyerah dan gugur. Lebih parah lagi kemudian faksi Abu Sayyaf pimpinan Abdul Razak Janjalani juga memisahkan diri dengan MNLF pada tahun 1993. Padahal faksi ini secara ideologis sangatlah dekat dengan MILF, yang konvergensi seperti ini sangatlah mungkin akan menyatukan mereka.

Seperti diketahui MILF sekarang ini menjadi kekuatan militer terbesar, terkuat dan paling rapi di dalam masyarakat Muslim Moro yang anggotanya 60.000 personil yang menyebar di seluruh provinsi Muslim. Bahkan dilaporkan bahwa kekuatan milisia mereka mencapai 120.000 orang, mereka sendiri mengklaim mampu berjuang selama lebih dari 4000 tahun dan mempunyai pabrik senjata sendiri yang antara lain mampu memproduksi mortir 60 mm, 81 mm, pistol RPG 2 kaliber 45 dan 90 RR.

Kebijakan Pemerintah Philipina selanjutnya, yaitu setelah naiknya Jendral Fidel Ramos sebagai presiden pada tahun 1992, memberi peluang bagi Nur Misuari untuk membangun harapan dan memperbaiki citranya yang hancur. Tidak seperti pendahulunya, Presiden Ramos adalah ahli dalam strategi militer dan mumpuni dalam bidang psikologi massa. Dia mempunyai program untuk membangun Philipina sebagai macan ekonomi di antara para tetangganya. Untuk mencapai hal tersebut, tentu dibutuhkan stabilitas di wilayah selatan. Untuk itulah Presiden Ramos merangkul Nur Misuari, yang dipandangnya sangat berguna sebagai tameng yang efektif untuk menghadapi konflik-konflik di selatan.

Dalam hal ini, posisi MILF tak ubahnya seperti HAMAS di Palestina yang sesungguhnya memiliki dukungan luas dari masyarakatnya sendiri, namun dengan kondisi makro subyektif yang sudah sangat tidak memihak pada Jihad Islam, bahkan dari dunia Islam itu sendiri, maka PLO di Palestina dan MNLF di Philipinalah yang lebih dikenal di dunia internasional sebagai simbol perjuangan masing-masing dari kedua kawasan tersebut.

MILF sendiri mendudukkan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama referensinya. Orientasi ideologis dan program-programnya dijalankan berdasarkan tuntunan-tuntunan Islam, yang bertujuan menegakkan masyarakat Islami atau lebih tegas lagi untuk menegakkan implementasi yang gradual terhadap syariat Islam.

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah Philipina yang tidak pernah ada tanda-tanda untuk memberi kemerdekaan kepada Muslim Moro untuk berdaulat dan menerapkan syariat Islam, MILF menggali kembali konsep-konsep Islam yang mengatur perjuangan penegakan syariat Islam. Dari sini mereka mendapat kesimpulan bahwa satu-satunya cara adalah dengan apa yang dinamakan Jihad.

Pengambilan keputusan untuk menerapkan Jihad - dalam pengertian perjuangan bersenjata - terhadap pemerintah Philipina, serta sejauhmana konsistensi perjuangan bersenjata mereka tersebut terhadap syariat perang yang dituntunkan oleh Al Quran dan Hadist yang menjadi sumber utama referensi mereka.

Sebagaimana diungkapkan oleh para sejarawan, sejatinya perjuangan Muslim Moro untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik di hadapan penguasanya tidaklah pernah membawa hasil yang optimal. Sejak masa kolonialisme Spanyol, yang masuk ke Philipina pada tanggal 16 Maret 1521, setelah mereka tidak berhasil menaklukkan Philipina Selatan dengan peperangan, mereka kemudian menerapkan politik *ôdevide and ruleö* (pecah belah dan kuasai) dan sekalipun gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari teritorialnya, yang kemudian secara tidak sah dan tak bermoral menjual Philipina kepada Amerika Serikat seharga US$ 20 juta pada tahun 1898 melalui traktat Paris. Demikian juga dengan AS, yang walaupun pada mulanya kedatangan mereka menampilkan diri sebagai sahabat baik dan dapat dipercaya, namun akhirnya pada kurun waktu 1898-1902, AS telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah

Philipina Selatan untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903-1913 dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan Muslim Moro. Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah AS ke pemerintah Philipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi Philipina Selatan ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis.

Pada perundingan di Jakarta akhir Oktober 1996 antara Pemerintahan Fidel Ramos dengan MNLF dicapai kesepakatan mengenai otonomi bagi masyarakat Muslim Moro.Namun dengan otonomi yang diberikan tersebut ternyata tidak membuat MILF menghentikan jihad terhadap pemerintah Philipina, bahkan perjuangan bersenjata MILF terus dilancarkan.

Pada 2012, Pemerintah Philipina dan pemberontak Muslim sepakat berdamai di wilayah selatan negara. Hal ini disampaikan Presiden Benigno Aquino menandai berakhirnya konflik 40 tahun yang telah menewaskan 100 ribu orang dan menurunkan ekonomi kawasan. Kesepakatan damai bersama Front Pembebasan Islam Moro (MILF) ini disampaikan kepada publik, Ahad, 7 Oktober 2012, sebagai peta jalan damai untuk menciptakan kawasan otonomi baru di kawasan mayoritas Muslim di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Katholik.

Presiden Benigno Aquino Jr, yang masa jabatannya berakhir pada 2016, menyampaikan kesepakatan damai itu melalui televisi pemerintah. Dia menyebutkan bahwa pemerintah dan MILF telah sepakat pada kerangka kerja perdamaian. Kesepakatan dicapai menyusul perundingan maraton antara pemerintah dengan MILF di Malaysia selaku mediator pertemuan.

“Kesepakatan damai ini diharapkan dapat diteken dalam waktu beberapa hari ke depan di ibu kota Manila,” kata pejabat pemerintah Filipina. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat prinsip-prinsip umum yang perlu dijelaskan, misalnya soal kekuasaan, bagi hasil, dan cakupan wilayah Muslim. Jika semuanya dianggap

oke, sebuah kesepakatan final dapat dicapai pada 2016, ketika masa jabatan Aquinio habis.[51]

"Persetujuan kerangka kerja ini membuka jalan untuk perdamaian final di Mindanao," kata Aquino mengacu kepada daratan di selatan dan tanah kelahiran negara Muslim.[52]

Namun sejauh ini, kondisi di Philipina Selatan masih bagai bara dalam sekam, berbagai upaya perdamaian digelar, namun pertumpahan darah tak kunjung reda, seakan jalan tak berujung terhampar di kawasan Asia Tenggara itu.

ISLAM DI THAILAND SELATAN

Berdasarkan studi sejarah, Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui para pedagang dari Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat Muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong Muslim di daerah Thailand Selatan ini di antaranya adalah propinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat dan Songkhla. Di provinsi-provinsi tersebut, rata-rata dihuni oleh sekitar 70 – 80 persen Muslim. Selain itu, umat Muslim juga tersebar di beberapa wilayah lain, seperti di propinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithammarat.

Dalam konteks Thailand, Islam tidak serta merta ada di negeri Siam (Thailand). Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, akan tetapi Islam merupakan agama minoritas di daratan utama Asia Tenggara

---

[51] Laporan *Antara*, 8 Oktober 2012.

[52] Koresponden *Al Jazeera* (8 Oktober 2012), Jamela Alindon, melaporkan dari Manila bahwa persetujuan kerangka kerja ini telah lama dinantikan oleh para pihak yang bersengketa.

yang telah dihuni dan didominasi oleh agama Hindu dan Buddha jauh sebelum Islam datang ke daerah tersebut sekitar abad ke-9. [53]

A. Teeuw dan Wyatt berpendapat bahwa Pattani telah ditubuhkan sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Pendapat mereka berasaskan kepada tulisan Tomes Pires dan lawatan Laksamana Cheng Ho ke rantau ini dalam tahun 1404-1433 M. Menurut Hikayat Pattani pula, Kerajaan Melayu Pattani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana.[54]

Nik Anuar Nik Mahmud menambahkan bahwa Islam masuk ke kerajaan Pattani pada abad ke-13 dan lebih dulu dari Malaka. Islam masuk ke kerajaan Melayu-Patani melalui seorang ulama dari Pasai, Syeikh Said, telah menukar namanya kepada nama Islam yaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam. Semenjak itu, Patani telah menjadi tumpuan saudagar-saudagar Islam dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal di rantau ini. Secara historis, kehadiran Muslim dalam kehidupan politik Thailand dapat dilacak pada bad ke-13 di era kerajaan Sukhothai dan baru pada periode Ayutthaya kaum Muslim mampu menegaskan posisi dominan mereka.[55]

Dalam hal ini, Teeuw dan Wyatt berkeyakinan bahwa Islam telah bertapak di Kuala Berang, Terengganu, yaitu pada sekitar 1386-1387.[56] Nik Anuar Nik Mahmud menambahkan bahwa Islam masuk ke kerajaan melayu-Pattani melalui seorang ulama dari Pasai, Syeikh Said, setelah menukar namanya dengan nama Islam yaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Dil Alam. Semenjak itu, Pattani

---

[53] Lihat, Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of The Muslim in Thailand*, (Thammasat University,2003 h.3. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2005).

[54] A. *Teeuw* dan D.K. *Wyatt.*, *Hikatat Pattani* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1970). h.68-69.

[55] *Teeuw* dan D.K. *Wyatt.*, *Hikatat Pattani.*

[56] A.*Teeuw* dan D.K.*Wyatt.*, *Hikatat Pattani* , h.68. Lihat juga, Omar Farouq Bajunid, 'The Muslim In Thailand: A Review", *Southeast Asian Studies,* Vol. 37, No. 2 September 1999.

menjadi tumpuan saudagar-saudagar Islam dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Timur-Barat yang terkenal di rantau ini.

Pattani adalah salah satu wilayah Thailand yang pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pada abad ke-15, negeri ini menjadi sebuah negara Islam terbesar di Asia Tenggara dengan nama Kerajaan Islam Pattani Darussalam. Orang Arab menyebutnya Al Fathoni. Pattani jatuh ke tangan Thailand pada tahun 1785 setelah kerajaan Thailand mengirimkan intelijen untuk mencari rahasia kelemahan Pattani. Makar Thailand sangat licik sehingga akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan Pattani. Sultan Muhammad, Raja Pattani gugur sebagai syahid di medan pertempuran.

Jumlah umat Islam di Thailand relatif kecil, yakni sekitar dua persen. Sumber lain menyebutkan ada sekitar sepuluh persen dari jumlah penduduk Thailand. Namun demikian mereka terus bertahan dan berusaha berdakwah, meski dengan segala keterbatasan. Dalam bidang ekonomi mereka jauh tertinggal oleh para pengusaha China yang beragama Buddha. Demikian pula dalam bidang politik, pemerintahan Thailand yang didominasi penganut Buddha sangat meminggirkan umat Islam.

Salah satu kebijakan pemerintah Thailand yang merugikan umat Islam adalah memerintahkan kepada umat Buddha agar menyebar ke daerah selatan Thailand yang dihuni oleh umat Islam untuk mengimbangi dan menggembosi kiprah umat Islam. Dalih mereka adalah umat Islam dituduh sebagai penyebab timbulnya berbagai masalah politik dan sosial. Suatu dalih yang terlalu dibuat-buat dan sama sekali tidak berdasar fakta.[57]

Budaya masyarakat Muslim Thailand sangat kental dengan budaya Melayu, karena memang rumpun Melayulah yang paling

---

[57] Peter Chalk, The *Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand. Understanding the Conflict's Evolving Dinamic* (Santa Monica,CA: RAND Corporation, 2008).

menonjol dalam perjalanan panjang sejarah Muslim Thailand sejak abad ke-13.

Selain itu, secara geografis, letak Thailand di bagian selatan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Mata pencaharian sebagian besar Muslim Thailand adalah nelayan dan petani. Laut adalah merupakan harta karun bagi mereka. Kesederhanaan dan kejujuran mereka menjadi modal utama untuk bisa menciptakan kehidupan yang tenteram dan bahagia.

Fenomena religius tradisional masih bisa disaksikan di sudut-sudut dusun. Misalnya, saat kembali pulang kerja dari laut, kebiasaan mereka adalah membaca Al Qur'an di rumah bersama keluarga. Mereka taat beribadah. Setiap kali adzan berkumandang, segera mereka bergegas menuju masjid. Kostum sarung dan sorban merupakan pakaian keseharian mereka. Rumah-rumah panggung, bilik bambu adalah wajah kesederhanaan mereka. Di sana terbangun suatu komunitas religius bagaikan sebuah komunitas pesantren. Di bidang pendidikan, anak–anak Muslim memiliki dua sekolah. Sehari-hari mereka belajar di sekolah pemerintah Thailand dan setiap pekan mereka belajar membaca dan memahami Al Qur'an di sekolah Islam dibimbing oleh para orang tua.

Latar belakang sejarah wilayah selatan Thailand yang mayoritas Muslim sangat berbeda dengan wilayah utara (Siam) yang mayoritas Buddha. Pattani misalnya, negeri ini tidak merasa menjadi bagian dari Siam, karena baik secara ideologi, budaya, maupun agama jelas tidak sama. Mereka dipaksa oleh pemerintah untuk menyatu dalam sebuah negeri Buddha tanpa mendapatkan kompensasi yang layak, bahkan sampai dipasung kebebasannya. Hal inilah yang menyebabkan keinginan masyarakat Muslim di wilayah selatan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Thailand. Sementara pemerintah Thailand menghadapinya dengan tindak kekerasan.[58]

---

[58] Lihat Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*

Perkembangan selanjutnya, nama Pattani telah menjadi sebutan bagi seluruh wilayah Muslim di Thailand Selatan, tidak lagi menjadi sebuatan sebuah provinsi di Thailand. Pattani telah menjadi lambang perjuangan umat Islam.

Di negeri ini, berdiri sebuah masjid yang menjadi lambang Islam, yaitu Masjid Pintu Gerbang atau disebut juga Masjid Kerisek. Masjid ini di berada depan pintu gerbang Istana Negara dengan lebar 15,10 meter, panjang 29,60 meter dan tinggi 6,5 meter.

Tentara Thailand pernah membakar masjid bersejarah ini sebanyak tiga kali, namun hingga sekarang masih bisa bertahan. Masjid Pintu Gerbang ini menjadi penghulu masjid-masjid lainnya di Thailand Selatan yang jumlahnya sekitar 1.395 (tahun 1987).

Pada tahun 1935 masjid Pintu Gerbang diangkat menjadi situs negara dan dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Tentu saja umat Islam tidak mau menerima keputusan pemerintah tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan, hingga demonstrasi besar-besaran pada tahun 1988 menuntut agar masjid lambang umat Islam tersebut diizinkan dijadikan tempat ibadah kembali. Hasilnya, pemerintah memutuskan bahwa masjid tersebut tetap menjadi situs negara, tetapi boleh dijadikan sebagai tempat ibadah.

Mesjid lain yang menjadi syiar Islam di Thailand adalah Masjid Shalahudin Al Ayubi dan Masjid Kulusei. Masjid Shalahudin Al Ayubi adalah sebuah masjid yang terletak di Nahofi. Arsitektur bangunan masjid ini memiliki kesamaan dengan masjid Madinah dengan dihiasi menara setinggi kira-kira 25 meter. Nama Shalahudin Al Ayubi diambil untuk mengenang kemenangan beliau sebagai panglima Islam dalam Perang Salib pada abad ke-12 M.

Sedangkan Masjid Kulusei adalah sebuah masjid yang menyimpan legenda. Masjid ini hingga sekarang pembangunannya tidak rampung, disebabkan adanya persengketaan antar keluarga dan antar suku yang cukup serius. Pada abad ke-16 M, masjid ini dibangun oleh seorang China Buddha yang kemudian masuk Islam.

Sebelum masuk Islam, ia pernah bernadzar bahwa jika dirinya masuk Islam, maka ia akan membangun sebuah masjid.

Akhirnya, ia menjadi seorang Muslim yang taat dan mulai membangun masjid yang dinadzarkannya. Akan tetapi, seorang adik perempuannya yang masih beragama Buddha, sangat tidak senang melihat perubahan pada diri kakaknya.

Sang adik kemudian menempuh berbagai cara untuk menggagalkan rencana kakaknya. Hingga kemudian perseteruan adik-kakak tersebut berkembang menjadi perseteruan suku. Orang-orang China Buddha di daerah tersebut terkena makar, sehingga merusak dan menghancurkan masjid tersebut. Hingga kini masjid Kulusei tinggal dinding-dinding rapuh tanpa atap.

Dinamika Islam di Thailand Selatan

Melayu Pattani atau yang acapkali disebut Pattani, merupakan satu dari sekian banyak kelompok etnik Melayu di Asia Tenggara. Kelompok sosial ini bermukim di Tanah Genting Kra, Provinsi Pattani, Thailand Selatan (Pantai Teluk Thailand). Pattani juga merupakan salah satu nama dari empat provinsi di Thailand bagian selatan yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam atau sekitar 80% Muslim. [59]

Di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia bagian utara, Semenanjung Malaka, region Asia Tenggara. Sementara di bagian utara dan barat, provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Yala (Jala) dan Narathiwat (Menara), dimana kedua provinsi ini pada masa lalu merupakan bagian dari Tanah Genting Kra atau Pattani Raya.

---

[59] Omar Farouk, "Asal-usul dan Evolusi Nasionalisme Etnis Muslim Melayu di Muangthai Selatan", dan Uthai Dalyakasem, "Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Etnis: Kasus Muslim di Siam Selatan", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (terj. dari *Islam and society in Southeast Asia*), (Jakarta: LP3ES, 1988).

Hampir seluruh orang Melayu Pattani bermukim di Provinsi Pattani. Fakta tersebut menyebabkan mereka terpinggirkan secara sosial dan politik, serta menjadikannya sebagai suku bangsa minoritas di Thailand. Karena hal itu pula, hingga kini, masih saja muncul gerakan-gerakan perlawanan terhadap negara (penguasa) dari orang Pattani. Salah satunya ialah gerakan separatis masyarakat Pattani yang dikenal dengan Dar al-Islam.[60]

Kalangan Muslim-Melayu Pattani ini sesuai namanya memiliki hubungan yang erat dengan wilayah Malaysia. Dimana dengan alasan tersebut, etnis ini kemudian tidak meninggalkan bahasa Melayu dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu menurut mereka merupakan simbol identitas dan persatuan muslim Thailand. Kebanggaan Muslim-Melayu di Thailand Selatan terhadap budaya Melayu dan identitasnya sebagai etnis Melayu tidak terlepas dari fakta historis yang menyatakan bahwa Thailand Selatan dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Pattani yang didirikan oleh orang–orang yang berasal dari etnis Melayu.

Bila menilik dari sejarahnya, sejak abad ke-11 M hingga tahun 1786, Kerajaan Pattani Raya merupakan sebuah kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, kira-kira luasnya setara dengan luas wilayah negara Thailand saat ini plus beberapa area yang kini termasuk teritori Malaysia Utara. [61]

Pada masa kejayaan Sriwijaya di Nusantara, Pattani dan kerajaan-kerajaan kecil lain-nya yang terdapat di daerah Semenanjung Melayu dan Sumatera sempat berada dalam kekuasaan imperium Sriwijaya. Dari abad ke-7 M hingga awal abad ke-13 M, Sriwijaya menguasai jalur pedagangan di Selat Malaka, dan menarik pajak dari para pedagang yang melintasi dan berdagang di kawasan itu.

---

[60] Peter Chalk, The *Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand. Understanding the Conflict's Evolving Dinamic, S*anta Monica, CA: RAND Corporation, 2008).

[61] "Pattani", *http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/192/pattani*

Nama Pattani sesungguhnya baru muncul di sekitar abad ke-14 M. Sebelum itu, tanah Pattani adalah hak milik dari kerajaan yang bernama Langkasuka. Langkasuka merupakan salah satu dari puluhan kerajaan kuno di Asia Tenggara. Langkasuka berubah menjadi Pattani pada abad ke-14 karena berbagai hal yang sifatnya politik-ekonomi, terutama lantaran kerajaan ini berada di pusat perdagangan dan bertemunya para merkantil dari Asia dan Eropa.

Pedagang Arab mulai masuk sekitar abad ke-12, dan mencapai puncaknya di abad ke-15 melalui para pedagang Arab yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Pattani Raya.

Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi Kerajaan Pattani Raya tumbuh pesat. Karena interaksi semakin intens antara raja Pattani dan masyarakatnya dengan para pedagang yang berlabuh tadi, maka pada abad ke-15 raja Pattani mendeklarasikan bahwa dirinya—yang juga diikuti masyarakatnya—memeluk Islam. Sejak itu, Pattani dikenal sebagai masyarakat berbasis Islam dengan corak budaya, organisasi sosial masyarakatnya, dan institusi pemerintahan yang tentu berlainan dengan model Kerajaan Langkasuka yang berkiblat pada Hindu-Buddha.[62]

Namun, setelah berperang selama hampir setengah abad (dari tahun 1785—1826 M), memasuki abad ke-19 akhirnya Pattani dikalahkan kembali oleh Siam (Ayuthaya). Hal ini didukung oleh pemerintah kolonial Inggris yang pada tahun 1826 M mengakui kekuasaan Siam atas Pattani. Pada tahun 1902 M, Kerajaan Siam memberlakukan kebijakan Thesaphiban yang menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Pattani. Sejak saat itu, Kerajaan Pattani semakin lemah dan tertekan.

Di awal abad ke-20, ketika Perang Dunia II meletus, bangsa Siam berpihak pada Jepang untuk menentang pendudukan Inggris.

[62] Syed Serajul Islam, "The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philippines," *Asian Survey* 38, No. 5 , Mei 1998.

Sementara itu, Tengku Mahmud Muhyiddin, salah seorang putera mantan raja Pattani, berdinas dalam ketentaraan Inggris dengan pangkat mayor. Ia kemudian membujuk penguasa kolonial Inggris yang berkantor di India agar mengambil alih Pattani dan menggabungkannya dengan Semenanjung Melayu. Pada 1 November 1945, sekumpulan tokoh Pattani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil menyampaikan petisi pada Inggris agar empat wilayah di daerah selatan Siam dibebaskan dari kekuasaan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung Melayu.[63]

Dalam kaitan ini, Dar al-Islam merupakan gerakan militan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari belenggu ketidakadilan dari pemerintahan Kerajaan Thai (bangsa Siam/Ayuthaya). Selain itu, buntut dari pelbagai persoalan di masa lalu yang tak kunjung usai juga men-jadi motif gerakan ini untuk mendeklarasikan negara Islam. Hal ini senada dengan kondisi masyarakat Melayu Moro di Pulau Mindanao, Philipina bagian Selatan, dimana sama-sama berke-inginan untuk memisahkan dari cengkraman negara induknya.

Dalam perkembangannya, ternyata Inggris tetap mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sebagai tolok ukur dalam mengambil keputusan. Dengan alasan tergantung pada pasokan beras dari Siam, maka kemudian Inggris memilih tetap mendukung pendudukan Siam atas Pattani.

Pada tahun 1909 M, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian yang berisi pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Siam di Pattani. Dalam perjanjian itu, dijelaskan secara tegas mengenai batas wilayah kerajaan Siam dan Semenanjung Melayu. Garis batas yang disepakati dalam perjanjian tersebut sekarang menjadi daerah batas Malaysia dan Thailand.

---

[63] Lihat, Syed Serajul Islam, “The Islamic Independence Movements in Patani…”

Sejarah panjang rakyat Pattani sering digelayuti dengan konflik, perang dan damai; situasi ini acap datang silih berganti. Namun, apapun kondisinya, ternyata rakyat Pattani tetap memiliki identitas sosial budaya yang tidak jauh berbeda dengan kawasan Melayu lainnya.

Merujuk pada konsep identitas yang diungkapkan oleh Fisher, yang mengasumsikan bahwa kemunculan konflik disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan.

Muslim-Melayu di Pattani yang sangat bangga dengan etnisnya dan budayanya merasa berbeda dengan bangsa Thai yang menganut agama Budha. Mereka pun berusaha menjaga identitas dan eksistensinya dari dominasi Thai. Hal ini diungkapkan dengan penolakan yang dilakukan Muslim-Melayu dalam kebijakan asimilasi bangsa oleh pemerintah Thailand dan menjadikan masyarakat Thailand menjadi satu, yaitu bangsa Thai.[64]

Di Pattani, ternyata juga berkembang berbagai pertunjukan dan permainan rakyat, seperti Makyong, mengarak burung, wayang kulit Melayu, dan seni musik nobat.[65]

Minoritas Muslim dan Konflik di Thailand Selatan

Muslim di Thailand Selatan memiliki identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk (dan juga pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama Islam,

---

[64] Lihat, Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik*: *Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak,* terj. S. N. Kartikasari, dkk, (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), cet. I.

[65] "Pattani", *http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/192/pattani.* Muslim Pattani juga gemar memainkan permainan tradisional masyarakat Siam, yaitu menora. Dalam permainan menora, terdapat unsur ritual, nyanyian, tarian dan lakon. Berkaitan dengan alat-alat musik, yang berkembang luas di masyarakat adalah serunai, nafiri, dan rebab. Sebagai bangsa yang hidup di dalam kuasa bangsa Siam, di Pattani tetap muncul suatu perlawanan. Perlawanan tersebut terefleksi dalam nyanyian rakyat berjudul *dodoi* yang kerap dinyanyikan ketika menidurkan anak.

dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari Bangsa Pattani. Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam Kerajaan Islam Pattani.

Identitas ini sangat dekat dengan etnisitas Aceh yang tidak sekedar memiliki status Daerah Istimewa, tetapi otonomi khusus dengan peran dan hak lebih besar bagi pemerintah lokal atas kekayaan sumber daya alam. Otonomi luas barangkali solusi bagi Muslim Pattani untuk menentukan arah ekonomi dan politik wilayahnya di bawah kekuasaan pemerintah pusat Thailand. Tetapi ide otonomi nampaknya belum menjadi agenda pemerintah pusat. Seandainya wacana dimunculkan kalangan intelektual, muncul banyak kekhawatiran atas sikap tanggapan yang tidak fair dan berlebihan bahwa otonomi bisa dijadikan jembatan menuju kemerdekaan.

Dinamika jumlah penduduk Muslim di Thailand hanya sekitar 15 persen, jauh lebih kecil dibandingkan penganut Buddha yang sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak kerajaan Sriwijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan.[66]

Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan, dan 86 % di pedesaan (YCCI, 2006: 34), sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19 %, minoritas, dan 76.6 % Buddha. Sedangkan mayoritas penduduk yang berbahasa Mela-yu, rata-rata 70 persen

[66] Lihat, Omar Farouk, "Asal-usul dan Evolusi Nasionalisme Etnis Muslim Melayu di Muangthai Selatan", dan Uthai Dalyakasem, "Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Etnis: Kasus Muslim di Siam Selatan".

berada di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China ada di tiga provinsi: Narathiwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala, 3.0 % .[67]

Songkhla adalah provinsi terbesar di Thailand Selatan, yang memiliki bandara internasional, dan sebagai pusat perdagangan di Selatan. Masyarakat Buddha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Meskipun mereka minoritas di Selatan, mereka termasuk kelompok ekonomi menengah, sebagai pegawai pemerintah dan atau pengusaha.

Di masa lalu, Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan wilayah Kesultanan Pattani –awalnya kerajaan tertua di Semenanjung Malaya bernama Langkasuna, yang berdiri pada abad ke-2. Daerah ini berulangkali menjadi wilayah vasal kerajaan lain: Sriwijaya, Nakhon Si Thammarat, Sukhothai; hingga kembali menjadi wilayah otonom pada abad ke-15 dan menjadi kerajaan Islam bernama Kesultanan Pattani.[68]

Sebagai wilayah otonom, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di Pattani berkembang pesat. Hubungan diplomatik terjalin dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pattani jadi satu titik penting dalam perniagaan Selat Malaka. Menurut Peter Chalk, kawasan itu meningkat menjadi satu entitas sosio-politik religius, dan terus menikmati identitas penuh yang terpisah dari kerajaan Thai-Buddha yang telah berdiri di utara.[69]

Pattani sempat berjaya di era Sultan Muzaffar Shah pada pertengahan abad ke-16. Sultan mendirikan masjid pertama, Krisek atau Krue Se, di provinsi Pattani yang berarsitektur Timur Tengah. Zaman keemasan berlanjut para era empat ratu yang memerintah sejak 1584: Ratu Hijau, Ratu Biru, Ratu Ungu, dan Ratu Ku-

---

[67] Sensus Penduduk Kantor Statistik Nasional Thailand, 2000.

[68] "Satu Negara Dua Kerajaan", *http://historia.co.id/?d=812*

[69] Peter Chalk, "Militant Islamic Separatism in Southern Thailand" dalam Jason F. Isaacson dan Colin Lewis Rubenstein (Eds.), *Islam in Asia: Changing Political Realities* (Sydney: Transaction Publishers, 2002).

ning. Kekuatan ekonomi dan militernya mampu menghadapi empat kali invasi kerajaan Siam dengan bantuan kesultanan Pahang dan Johor –kini bagian dari Malaysia.

Pada abad ke-17, menurut Peter Chalk, kerajaan itu muncul sebagai pusat utama ilmu pengetahuan Islam di dunia Melayu, dihormati oleh banyak kesultanan, setara dengan kesultanan Aceh yang prestisius.[70]

Selama masa integrasi Pattani, masyarakat Thai Buddhis mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena mereka selalu mendominasi sebagai pemimpin utama lembaga-lembaga pemerintah Thailand Selatan. Sementara etnis China kebanyakan tinggal di perkotaan sebagai pedagang. Kawasan 'pecinan' terbesar di Selatan adalah di Kabupaten Betong, Provinsi Yala. Sementara penduduk etnis Thai yang berada di pedesaan kehidupan ekonomi dan kedudukannya sama dengan kebanyakan Muslim, sebagai petani, nelayan atau pedagang kecil.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia.[71]

Sejak penyatuan kelima negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Buddhis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara Jenderal Luang Pibulsongkram, yang memimpin 1938-1944, Marshal Sarit Thanarat, 1958-1963 dan pemimpin jenderal lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi – upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai- secara kuat di seluruh Thailand, termasuk

[70] *Inter Press Service*, 27 September 2010.
[71] Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*

wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan.

Kalangan Muslim-Melayu di Thailand selatan umumnya kaum tani dan nelayan miskin yang tersingkir dari percaturan bisnis kalangan pedagang yang bekerja dengan Pemerintah Thailand. Penguasa Bangkok dan pedagang non-muslim telah berhasil dengan baik dalam mengolah hasil bumi baik dalam bidang perkebunan maupun pertambangan, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar umat muslim. Pada akhir tahun 1970-an, lebih dari 12 pertambangan material telah dibuat, 10 di antaranya adalah penambangan terbuka di daerah selatan dan sepertiga dari pemasukan pemerintah Thailand berasal dari wilayah selatan. Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand tersebut tidak mendapat respon yang baik dari sebagian masyarakat besar muslim. Mereka menganggap pemerintahan imperialis Thailand telah merampas hasil alam masyarakat Muslim Thailand. Hal ini dikarenakan tak ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat daerah selatan.[72]

Para akademisi mencatat, usaha pertambangan dan perkebunan karet yand dimodali non-muslim sejak awal abad ke-20 ternyata tidak banyak mengubah struktur ekonomi lokal. Masyarakat muslim Pattani harus puas sebagai pekerja rendahan, seperti penyadap karet dan buruh kasar. Bahkan, peluang ekonomi yang baru muncul juga tetap meletakkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dan rendah pendapatannya, seperti pesuruh di kantor-kantor dan pekerja bangunan.[73]

---

[72] Dennis P. Walker, *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005* (Australia: Monash University, 2005)

[73] Taufik Abdullah *, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).

Partai Demokrat – yang menekankan persatuan kuat negara Thailand – tidak berbuat banyak dalam perdamaian di Selatan, khususnya mendukung kepentingan Muslim. Kritik ini tentu penting diperhatikan oleh pihak politisi, yang memainkan isu Selatan untuk kepentingan mereka.

Partai Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara sengaja meninggalkan Selatan dalam proses pembangunan dan modernisasi Thailand secara umum. Bahkan membiarkan kerusuhan di Selatan. Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Di antara mereka adalah aparat pemerintah.

Separatisme, Etnis atau Agama?

Bagi masyarakat Indonesia, konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dan Buddhis Thai. Kata 'Muslim' dan 'Buddhis' mengarahkan pada kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat.

Apabila dilihat lebih dekat, identitas Muslim Melayu di Selatan memang sangat kuat. Masyarakat khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala, dan Narathiwat identitas keislaman dan kemelayuan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat lebih *welcome* dengan orang Melayu daripada dengan etnis lain, terutama Thai.

Penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional Thailand juga sangat kuat di tiga provinsi ini, di atas 70 %, dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan: Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa Melayu dilarang digunakan sebagai bahasa resmi di perkantoran, lembaga pendidikan pemerintah, dan tempat atau acara resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu, karena bahasa ini memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan mayoritas warga Thailand, yang berbahasa Thai dan Buddha.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 2000 orang meninggal berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok yang tidak dikenal. Pada April 2004, 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di Masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah.

Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai meninggal di perjalanan, setelah mereka mendemo pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan di belakang. Dua peristiwa ini sangat membekas di hati Muslim, dan banyak pemuda dan masyarakat Muslim semakin menggiatkan penyerangan terhadap berbagai organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Reaksi Muslim selatan ini direspon negatif oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat militer di kelima provinsi ini.

Peristiwa Takbai yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi paling keras dari milisi Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etnis China dan pendeta Buddha. Hampir setiap bulan sejak peristiwa 2004, terjadi korban di pihak tentara atau Buddha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi 'gerilyawan' dari Selatan.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati oleh Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme – pro kebijakan

pusat – menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan, baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi.

Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah-kerajaan Thailand hanya akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Persengketaan antara penduduk Muslim dan pemerintahan Thailand itu terus memanas sejak dekade 70-an. Pembunuhan dan berbagai tindak kekerasan lainnya sering dialami oleh para aktivis Islam. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai organisasi yang berhaluan keras menuntut kemerdekaan Pattani, seperti Pattani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan Barisan Revolusi Nasional (BNP).

Kehidupan Pattani di semenanjung Siam yang strategis menjadi tujuan pedagang pedagang dari berbagai penjuru dunia, sehingga menjadikan Pattani daratan yang ramai dan sibuk. Sehingga dalam waktu yang singkat Pattani telah menjadi kerajaan yang kuat dan ramai dari segi ekonomi maupun politik. Hubungan Pattani dengan luar negeri yang baik menjadikannya selamat dari penjajahan negara Siam, Portugis dan Belanda.

Kegagalan merebut kemerdekaan bagi wilalyah Muslim di Thailand Selatan telah memunculkan gerakan gerakan baru yang lebih besar. Pada tahun 1950 dan seterusnya hubungan melayu Muslim Thailand Selatan dengan penguasa Thailand diliputi ketidakpercayaan, kecurigaan dan kesalahpahaman yang berlarut larut. Hal itu dikarenakan ketidaksetujuan komunitas Muslim pada aturan-aturan dan proses *asimilasi* yang dilakukan oleh pemerintah Thailand kepada komunitas Muslim,

> *"From the late 1950s to the present, relations between the Malay-Muslims of the South and Thai authorities have been relatively the same. Mistrust, patronizing and misunderstanding on the part of the government officials are still prevalent. Fear, resentment and disapproving of Thai rule and power are also rampant among the Malay-Muslims. Similar policies aimed at integration and assimilation of the Muslims are still being prescribed to the local offices."* [74]

Pada tahun 1970, diberlakukan operasi pembersihan gerakan anti-pemerintah di wilayah Muslim Thailand Selatan. Hal tersebut menimbulkan reaksi keras dari komunitas Muslim dengan bermunculannya gerakan pemberontakan dan pembebasan wilayah Muslim Thailand selatan.

Akan tetapi, Pergolakan menahun antara Muslim minoritas dengan pemerintah, menurut Patrick Jory, sebenarnya adalah perseteruan dua etnis, Melayu-Pattani dengan etnis Thai. Akan tetapi mengapa pada saat ini menggunakan label agama "Islam"? Masih menurut Patrick Jory, bahwa pada masa kolonial, pemerintah berusaha untuk menghilangkan istilah "Malay" (melayu) pada masyarakat Thailand Selatan dan menggantinya menjadi "Thai-Muslim" atau "Thai-Islam". Karena identitas melayu akan memberikan kekuatan menumbuhkan semangat nasionalisme dan berusaha berpisah dari pemerintah Thailand, dan separatisme itu hanya memperkuat kredibilitas untuk menuntut pemisahan dan kecondongan pada negeri tetangga Malaysia, [75]

Menurut Patrick Jory, pemerintah Bangkok melihat, dengan pergantian linguistik tersebut, gerakan asimilasi Malay-Muslim dengan Thai-Buddha akan tercapai secara gradual, melalui proses waktu [76].

---

[74] Patrick Jory, 'Religious Labelling, From Pattani Malayu To Thai Muslim", *Jurnal ISIM*, Vol. 18, autumn, 2006, h. 42

[75] Lihat, Patrick Jory, "*Religious Labelling, From Pattani Malayu To Thai Muslim*"

[76] " *The government has attempted to replace it with the religious label "Thai-Muslim" in the hope that this linguistic change would contribute to the overall goal of assimilation"*. Lihat, Patrick Jory, "Religious Labelling, From Pattani Malayu To Thai Muslim."

Terlepas dari konflik etno-religious yang terjadi, umat Muslim di Thailand Selatan di masa kontemporer ini telah mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai bidang. Meskipun tetap berada dalam tekanan dan diskriminasi dari pemerintah Thailand. Muslim di Thailand bukanlah komunitas baru dan juga bukan komunitas yang dipinggirkan. Maka dari itu Muslim di Thailand saat ini adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Thailand secara keseluruhan dan tetap menjadi minoritas di berbagai bidang, sosial maupun politik. Bagaimanapun, Muslim tetaplah minoritas dalam negara nasional Thailand modern dewasa ini. [77]

Periode Konflik Berdarah 1960-Sekarang

Konflik bersenjata di "Negeri Gajah Putih" ini terjadi antara pasukan Thailand melawan kelompok-kelompok separatis bersenjata Thailand selatan. Di antara kelompok-kelompok separatis bersenjata tersebut, kelompok yang paling dominan dan paling populer dalam konflik ini adalah Pattani United Liberation Organization (PULO; Organisasi Pembebasan Bersatu Pattani), kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka "Pattani Darussalam" di wilayah Thailand Selatan. Secara garis besar, konflik di Thailand Selatan bisa dibagi ke dalam 3 fase berdasarkan waktu dan intensitasnya: fase permulaan (1960 - 1998), fase pemberontakan kembali (2001 - 2004), dan fase kritis yang juga merupakan puncak berlangsungnya konflik (2005 hingga sekarang).[78]

Seperti sudah dijelaskan di atas, konflik di Thailand Selatan ini umumnya dipandang sebagai konflik agama semata antara Muslim Melayu di Thailand Selatan melawan orang Thai Buddha yang mendominasi pemerintahan pusat Thailand. Namun sebenarnya, ada begitu banyak faktor yang menyebabkan konflik ini timbul, dimana selain faktor perbedaan agama, faktor-faktor

---

[77] "*The Muslims today just as the past continue to be numerically and politically significant as national minority in modern-day Thailand*". Lihat Patrick Jory, "Religious Labelling, From Pattani Malayu To Thai Muslim", h. 221.

[78] Barbara Leitch LePoer (ed.), *Thailand, A Country Study* (The Library of Congress, 1987). Lihat juga, Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*

seperti kesenjangan sosial dan tindakan ka-sar aparat keamanan juga turut berperan. Selebihnya, konflik di Thailand Selatan ini mengakibatkan ribuan orang tewas dan keru-gian material yang tidak main-main. Jumlah tersebut masih sa-ngat mungkin terus bertambah ke depannya kalau melihat masih berlangsungnya konflik ini. Ada tiga fase konflik yang bisa kita catat [79]

a. Konflik Fase I (1960 - 1998)

Pada fase ini, konflik mencuat tak lama sesudah diberlakukan-nya peraturan dari pemerintah Thailand yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan untuk mengadopsi kurikulum pendidikan berbau sekuler. Ustad Haji Abdul Karim Hassan menyatakan penolakannya dan kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional (BRN) di tahun 1960. Hal yang cukup menarik adalah dalam perjuangannya, BRN tidak hanya mengusung ideologi Islam, tapi juga ideologi nasionalisme Melayu dan sayap kiri (sosialisme). Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa BRN memang memiliki relasi yang erat dengan Partai Komunis Malaya.[80]

Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas konflik, Thailand pun melakukan sedikit perubahan strategi untuk meredam konflik. Lobi dengan pemerintah Malaysia ditingkatkan. Hasilnya, Mahathir Muhammad - perdana menteri (PM) Malaysia saat itu - setuju untuk melakukan kerjasama lintas perbatasan dengan aparat Thailand. Kerjasama tersebut berbuah manis bagi Thailand karena berkat kerjasama tersebut, tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontak Thailand Selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil diringkus. Sebagai akibatnya, kekuatan pemberontak pun mengalami penurunan tajam dan Thailand Selatan sempat memasuki periode damai untuk sementara waktu.

---

[79] Lihat Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*
[80] Lihat Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*

b. Konflik Fase II (2001 - 2004)[81]

Meski masih bagai bara dalam sekam, fase ini ditandai dengan sinyal situasi damai di Thailand Selatan dengan pemberian otonomi khusus dan pengucuran subsidi lebih besar dari pemerintah pusat ke Thailand Selatan dengan harapan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan bisa terakomodasi, dan mereka tidak memberontak lagi. Namun bulan April 2004 , terjadi sebuah momen paling kontroversial dalam konflik di Thailand Selatan terjadi. Saat itu - tepatnya pada tanggal 28 April - sekitar 100 orang anggota milisi menyerang 10 pos militer di Thailand selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari para milisi tersebut kemudian lari bersembunyi di Masjid Krue Se, masjid yang sangat disakralkan oleh penduduk Muslim lokal. Para tentara yang mengejar milisi-milisi tersebut lalu menembaki masjid dan menewaskan milisi-milisi yang bersembunyi di dalamnya. Peristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para penduduk Muslim setempat sehingga sejak saat itu, konflik di Thailand Selatan pun semakin diwarnai oleh sentimen agama.

Momen kontroversial selama konflik di tahun 2004 tak hanya sampai di situ. Bulan Oktober 2004 di kota Takbai, Narathiwat, para penduduk lokal berdemonstrasi menuntut dibebaskannya 6 kawan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh aparat setempat karena dituduh menyediakan persenjataan untuk pasukan pemberontak setempat. Respon aparat Thailand untuk meredam demonstrasi tersebut tidak main-main, bahkan terkesan berlebihan. Ratusan penduduk lokal ditangkap dan diikat sambil dipaksa menanggalkan pakaian bagian atasnya, lalu dimasukkan ke dalam truk dalam kondisi bertumpuk-tumpuk untuk kemudian diangkut ke pos militer di Pattani. Hal ini lang-

[81] Lihat, David K. Wyatt, *A Short History of Thailand* (Yale University Press: New Haven, Connecticut, 2003). Lihat juga, Peter Chalk, *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand.*

sung mencetuskan kontroversi, memicu ketegangan serius antara Bangkok dan Muslim-Melayu di Thailand Selatan itu.

c. Konflik Fase III (2005 – 2012)

Serangan bom menandai konflik di fase ini, seiring menjamurnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam yang baru terbentuk, misalnya Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP) dan Barisan Islam Pembebasan Pattani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para pemain lama seperti PULO dan BRN juga ibarat menemukan kembali tajinya kembali pada periode ini. [82]

Dalam sebuah laporan disebutkan, pasukan militer Thailand menewaskan empat orang yang diduga gerilyawan saat terjadi aksi tembak-menembak di Thailand Selatan ketika terjadi pergolakan (30/1/2012). Ini merupakan kerusuhan terbaru di wilayah yang telah bertahun-tahun diganggu oleh kekerasan separatis.[83]

Jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan dan vandalisme pada fase ini berkisar antara 5.000 hingga 30.000 orang.

Di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalisme yang dilakukan oleh para pemberontak mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan konflik pada fase sebelumnya. Bulan Februari 2005 contohnya, sebuah bom rakitan seberat 50 kg meledak di perbatasan Thailand-Malaysia. Sebulan kemudian, beberapa buah bom meledak di bandara, supermarket, dan hotel Provinsi Songkhla.

---

[82] "Bom Tewaskan Satu Orang di Thailand Selatan", *Antara,* 9 Februari 2012.
[83] "Kekerasan di Thailand Selatan Belum Usai", *Kompas,* 30 Januari 2012.

Selain melakukan aktivitas pemboman, para milisi pemberontak juga semakin sering melakukan aksi-ak-si penembakan dan pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama setempat.

Semakin gencarnya aktivitas para pemberontak lantas membuat PM Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, mengerahkan lebih banyak personil militer di area konflik. Total, ada sekitar 24.000 tentara dan hampir 70.000 anggota milisi pro-pemerintah yang diterjunkan sejak tahun 2004.[84]

Namun, minimnya ketrampilan pasukan Thailand dalam metode-metode anti-teror dan buruknya rasa saling pengertian dengan penduduk lokal menyebabkan upaya para tentara untuk meredam konflik menjadi tidak efektif. Tak hanya itu, pihak tentara juga kerap bergesekan dengan otoritas polisi setempat karena keterlibatan sejumlah anggota polisi dalam sindikat narkoba di Thailand selatan.

Dialektika Islam Thailand

Keamanan Negeri Gajah Putih di bagian Selatan makin memprihatinkan. Pada Selasa (31/7/2012) malam waktu setempat dua ledakan bom mengguncang Pattani. Lebih ironis, sasarannya adalah hotel yang empat tahun sebelumnya diguncang tragedi serupa. *Bangkok Post* melaporkan, juru bicara kepolisian Pattani menyatakan, bom meledak di belakang hotel CS Pattani di distrik Muang dan menyebabkan hotel itu terbakar hingga ke lantai 7. Semua tamu dievakuasi dari hotel dan hanya satu orang yang mengalami luka. Hotel CS pertama kali dibom pada 2008 yang menewaskan tiga orang dan 10 luka-luka.[85]

Investigasi awal oleh polisi mengatakan, bom seberat 10 kg itu diperkirakan merupakan bom rakitan yang disembunyikan dalam mobil yang diparkir di dekat dapur. "Saya bisa merasakan ge-

---

[84] "Thai Protesters Want New Coup", *BBC News*, 26 August 2008.
[85] *Bangkok Post*, 31/7/2012

taran bom itu karena rumah saya hanya berjarak 100 meter dari lokasi," kata seorang saksi mata.

Sekitar 30 menit setelah bom itu meledak, dua ledakan keras juga terjadi di Paknam Road dan Jaroen Pradit Road. Ledakan itu menghancurkan instalasi listrik di kawasan itu. Akibatnya, distrik Muang dilanda kegelapan.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra langsung mengadakan rapat darurat di Bangkok untuk menentukan langkah yang diperlukan.

Tahun 2012 juga terjadi sebuah ledakan bom yang sangat parah, tepatnya pada 1 April 2012, saat Lee Gardens Hat Yai di Plaza Hotel dibom dan menewaskan tiga orang serta melukai lebih dari 350 wisatawan. Semen-tara 31 Maret 2012 dua bom mobil di ibu kota Provinsi Yala yang merenggut 11 korban dan melukai sekitar 200 orang. Serangan tersebut merupakan salah satu yang mematikan dalam konflik ini di wilayah Selatan.

Di wilayah tersebut, para gerilyawan memperjuangkan kebebasan sebuah negara yang berdaulat dari pemerintah kolonial Siam-Thailand. Lebih dari 5000 orang telah tewas, dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden, atau sekitar 3,5 insiden dalam sehari, di tiga provinsi selatan dan empat distrik di Songkhla sejak perjuangan pemisahan diri umat Muslim dari cengkraman penjajah Buddha Thailand meletus lagi pada Januari 2004.[86]

Dalam kaitan ini, akademisi David Brown secara kritis melihat gerakan Muslim di Thailand Selatan sebagai bagian dari reaksi atas kolonialisme internal di Thailand. Disparitas ekonomi antara pusat dan provinsi di pinggiran menimbulkan tumbuhnya semangat separatisme, atau istilah Brown 'separatisme etnis' yang terjadi di Selatan, Utara dan Timur Laut.[87]

---

[86] Laporan Deep South Watch, Bangkok, 2004.

[87] David Brown, "From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism

Masing-masing melibatkan melayu Muslim di Selatan, etnis perbukitan di Utara dan di Timur Laut. Identitas Muslim Melayu di Selatan, masyarakat komunis di Utara secara jelas berbeda dengan mayoritas Thai-Buddha, sedangkan di Timur Laut hanya berbeda etnis, yaitu kelompok Laos-Thai.

Disparitas ekonomi ini memang sangat mencolok, pada tahun 1983, jauh sebelum krisis moneter yang bermula di Thailand, Kota Metropolis Bangkok memiliki pendapatan per kapita, 51.441 bath, sementara Minoritas Muslim di Thailand Selatan Selatan, 16.148 bath, tiga kali lebih rendah dibandingkan Bangkok, sementara di bagian Utara, 12.441 bath dan wilayah Timur Laut, 7.146 bath.

Disparitas ini menimbulkan kekecewaan, kecemburuan dan rasa ketidakadilan yang kemudian berakibat pada keinginan masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri (otonomi, dan merdeka).[88]

Dua puluh empat tahun kemudian, kesenjangan inipun semakin lebar, karena pemerintah menaruh curiga atas tumbuhnya kekuatan masyarakat di wilayah ini, dan pembangunan tidak diprioritaskan.

Disparitas memiliki konsekuensi yang mendalam di luar aspek ekonomi, yaitu lambatnya peningkatan sumberdaya manusia, pendidikan yang tidak merata, dan tekanan kebijakan berbasis keamanan yang mengancam masyarakat sehingga mereka merasa seperti tidak berada di rumah sendiri.

Kesenjangan ini pula yang menurunkan tingkat nasionalisme masyarakat di luar mayoritas Thai-Buddha. Perbedaan yang mencolok antara Melayu Muslim di Selatan dan Buddha-Thai di seluruh wilayah Thailand dilihat oleh Ted Robert Gurr tidak pada keragaman etnisitasnya, tetapi lebih pada agamanya. Muslim di Selatan Thailand dan Buddha dianut hampir di seluruh Thailand.

---

in Southeast Asia", *Pacific Affairs,* Vol. 61, No. 1 (Spring, 1988), h. 51

[88] David Brown, "From Peripheral Communities …", h. 51-77

Kalau kita periksa, sesungguhnya identitas lokal di Thailand Selatan lebih dekat dengan Kelantan dan Kedah, Malaysia. Masyarakat secara tradisional lebih *at home* menggunakan bahasa Melayu dibandingkan bahasa Thai yang digalakkan oleh pemerintah pusat sebagai bahasa resmi negara. Keterpaksaan masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dirasakan selama puluhan tahun, sejak integrasi Melayu di selatan Thailand menjadi bagian dari Kerajaan Thailand.

Penggunakan bahasa Thai wajib digunakan di kantor kerajaan, pemerintah, sekolah dan media. Radio, TV dan media cetak harus menggunakan bahasa Thai sebagai medium pemberitaan. Media elektronik, khususnya radio lokal hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Melayu kurang dari 20 persen dari keseluruhan programnya.

Strategi pemerintah Thailand memang membuahkan hasil. Dalam waktu sekitar 50 tahun, banyak generasi muda Melayu Muslim lebih suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka 'dipaksa' keluarga untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika mereka berkumpul di lingkungan keluarga.

Upaya menjaga tradisi nenek moyang menjadi bagian dari identitas terkuat bagi keluarga Muslim Melayu di Thailand Selatan yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Thai lainnya. Mereka menyadari bahwa niat memisahkan diri dari pemerintah Kerajaan Thailand hanyalah suatu mimpi lama, yang kini harus ditinggalkan.

Berintegrasi dengan Thailand, bersaing dengan mayoritas masyarakat etnis Thai yang Buddhis adalah pilihan saat ini. Strategi yang perlu dibangun adalah memajukan pendidikan, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas lokal.

Hal yang terakhir ini (stabilitas lokal) masih menjadi kendala bagi penciptaan perdamaian di wilayah selatan. Berbagai teror, pem-

bunuhan dan pengeboman sering terjadi. Ketika terjadi penyerangan atau pembunuhan yang melibatkan korban tentara, polisi atau masyarakat Buddha, yang dituduh adalah Muslim. Bahkan Thaksin Sinawatra menyebut mereka dengan istilah "Bandit Muslim". Istilah yang menodai perasaan Muslim Melayu di selatan, karena pencitraan telah sengaja dicip-takan oleh pemerintah, tanpa melihat lebih obyektif siapa yang terlibat.

Kesepakatan Perdamaian yang Rapuh

Pada Januari 2013, Pemerintah Thailand untuk pertama kalinya menandatangani kesepakatan dengan kelompok pemberontak di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. [89]

Penandatanganan kesepakatan bersejarah itu ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, antara perwakilan pemerintah Thailand dan perwakilan Barisan Revolusi Nasional (BRN) beberapa jam sebelum kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Malaysia. Dalam pertemuan dengan PM Najib Razak itu, PM Yingluck juga membicarakan upaya penyelesaian konflik bersenjata selama sembilan tahun, dan Malaysia kemungkinan menjadi tuan rumah perundingan.

Dokumen konsensus menuju proses dialog itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr dan Hassan Taib dari BRN.

"Terima kasih kepada Allah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah. Kami akan sampaikan kepada rakyat kami untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini," kata Hassan yang disebut sebagai Kepala Kantor Penghubung BRN di Malaysia.

Perjanjian itu membuka jalan bagi pembicaraan perdamaian formal pertama dengan gerilyawan di selatan. Dokumen tersebut melancarkan proses dialog untuk perdamaian di provinsi perba-

---

[89] *Kompas*, 28/2/2013.

tasan selatan. Pemerintah dan militer Thailand berturut-turut telah melakukan kontak dengan kelompok gerilyawan. Mereka menyatakan beberapa keberhasilan dalam melacak tokoh operatif utama. Tetapi, mereka tidak pernah secara terbuka mengadakan pembicaraan dengan berbagai kelompok gerilyawan yang beroperasi di selatan.

Malaysia, yang membantu menengahi kesepakatan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerilyawan Muslim telah membawa kelompok gerilyawan Muslim Thailand ke meja perundingan. Malaysia tampil sebagai pengatur untuk memainkan peran mediasi dalam pembicaraan.

Surat kabar Thailand, *The Nation*, mengutip dari Deep South Watch, sebuah organisasi berada di bawah "Prince of Songkla University" di provinsi Pattani (750 km selatan Bangkok), mencatat bahwa sejumlah besar insiden yang mencapai 10.284 insiden telah terjadi di wilayah tersebut sejak Januari 2004.

Sungguh berbagai bentuk serangan militer yang terus-menerus dilancarkan secara intensif dan masif, keras dan bengis pada tahun 2004 oleh tentara Thailand terhadap gerakan separatis, yang berlangsung dalam waktu lama, telah meningkatkan permusuhan di antara penduduk setempat, hingga mengakibatkan pecahnya operasi pembunuhan balas dendam terhadap kedua umat, yaitu Buddha dan Muslim dan bahwa 60 persen korban tewas yang jumlahnya mencapai 4.390 orang adalah kaum Muslim Thailand.

Salah satu insiden berdarah yang lepas lepas dari perhatian media, adalah ketika Gerilyawan separatis melakukan aksi pembunuhan, dan militer membalasnya dengan kekerasan brutal tanpa ada tindakan berarti dari pemerintah.

Kejadian itu terjadi pada bulan Desember tahun 2012. Beberapa pria dengan wajah tertutup kain menyerang sebuah sekolah di Thailand Selatan. Mereka membunuh tiga guru Buddha di depan

para kolega dan muridnya. Para guru Buddha itu dikirim oleh pemerintah pusat ke tempat itu. Ini hanyalah satu dari rangkaian aksi kekerasan di Thailand Selatan. Kelompok separatis Islam menyerang sekolah-sekolah dan kantor publik. Akibatnya, sekitar 1300 sekolah ditutup untuk sementara atas alasan keamanan.[90]

Di tiga provinsi selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat yang berbatasan dengan Malaysia, juga ada kelompok gerilyawan separatis yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Mereka menentang pemerintah pusat dan menuntut kemerdekaan. Mereka menyerbu kantor polisi, meledakkan bom mobil, menyerang toko-toko dan kantor publik dengan senapan mesin. Mereka mengancam pemilik toko yang membuka tokonya pada hari Jumat. Mereka menculik dan membunuh orang-orang yang dianggap sudah bekerjasama dengan pemerintah pusat di Bangkok. Hampir setiap hari insiden semacam ini terjadi. Daerah konflik ini terletak hanya beberapa ratus kilometer dari daerah wisata Thailand yang terkenal seperti Puket dan tujuan-tujuan wisata lain di pantai barat.

Di Thailand Selatan sedang terjadi perang saudara yang semakin lama semakin brutal, demikian dilaporkan organisasi *International Crisis Group (ICG)* dalam laporan yang dikeluarkan Desember 2012.

Jim Della-Giacoma dari ICG menyatakan, tujuan kelompok gerilyawan separatis masih belum jelas. Gerakan separatis itu memang terdiri dari beberapa kelompok.

"Yang kita lihat di sini adalah gerakan perlawanan kelompok-kelompok Islam Melayu. Mereka berjuang di Selatan untuk hak menentukan nasib sendiri. Tapi masih belum jelas, apakah mereka menuntut kemerdekaan dari Thailand, suatu hal yang tidak realistis, atau mereka ingin langkah demi langkah mencapai otonomi yang lebih besar," tutur Giacoma.

---

[90] Deutsche Welle, 16/1/2013

Menurut penelitian ICG, gerakan perlawanan itu terdiri dari jaringan komando militan kecil yang aktif pada tingkat desa. Komite desa merekrut relawan dan membiayai aksi-aksi mereka, melakukan propaganda dan meneruskan informasi rahasia kepada kelompok lain. Dengan taktik gerilya ini, mereka mampu bergerak cepat.

Militer Yang Represif

Sejak dulu, pemerintah Thailand mengandalkan kekuatan militer untuk menghadapi pemberontakan di selatan. Sekitar 65.000 tentara, para militer dan polisi ditempatkan di kawasan itu. Selain itu, militer juga mempersenjatai kelompok lokal Buddha dan memberi pelatihan senjata kepada sekitar 80.000 relawan.

Menurut organisasi Human Rights Watch, banyak warga muslim yang diculik, disiksa dan dibunuh militer yang bertindak di bawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka luput dari sanksi hukum.

Organisasi hak asasi sejak lama mengkritik penerapan undang-undang darurat karena telah memberi militer kekuasaan dan kewenangan yang terlalu besar sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sunai Pathak dari Human Rights Watch dengan tegas mengatakan: ”Sejak sembilan tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan. Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenai sanksi.” Tindakan seperti itu justru dijadikan alasan oleh para pemberontak yang terus melakukan aksi kekerasan. Akibatnya, militer bertindak lebih represif lagi.

‘’Spiral kekerasan ini berputar makin lama makin cepat”, kata Sunai Pathak. ”Ini lingkaran setan,” ujarnya. Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil.

Pemerintah seharusnya menjamin, bahwa praktek-praktek ilegal semacam itu tidak dilakukan lagi. Dan kalau ini terjadi, pelakunya harus dihukum. Hanya dengan cara itu pemerintah pusat bisa mengembalikan rasa percaya masyarakat.

Kebanyakan warga muslim di Thailand Selatan berpandangan moderat. Namun mereka sejak lama merasa menjadi warga kelas dua. Menurut pandangan mereka, berbagai forum perundingan damai yang dibentuk pemerintah Thailand di masa lalu sudah gagal menyelesaikan konflik.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang berkuasa sejak Agustus 2011 mengambil kebijakan politik yang lebih moderat menghadapi para pemberontak dibanding pemerintahan sebelumnya. Yingluck mengunjungi korban serangan bom di Thailand Selatan.

Namun demikian, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa soal pemberontak di kawasan Thailand Selatan tanpa dukungan militer. Sejak dulu, militer Thailand yang sangat berpengaruh menolak segala tuntutan otonomi dari provinsi-provinsi selatan. Mereka tidak ingin terjadi perpecahan. "Militer tidak akan melepaskan kendali," demikian analisa Jim Della-Giacoma dari ICG.

Militer melihat dirinya sebagai pelindung negara kesatuan Thailand, yang dilandaskan pada raja, agama dan bahasa. Kalau kawasan selatan diberi otonomi, semua elemen ini harus ditinjau lagi

Dalam laporannya tentang konflik di Thailand, ICG menyebutkan, pemerintah sekarang harus menjadikan krisis di selatan sebagai prioritas utama. Isu desentralisasi tidak boleh menjadi tabu.

Kekerasan yang terjadi berkembang sangat cepat, sehingga pemerintah dipaksa untuk bertindak. Laporan ICG menegaskan, jka tidak, pemerintah di Bangkok akan kehilangan seluruh kendali, dan dampaknya tidak bisa diramalkan.

Lengahnya Pemerintah Thailand dalam menangani kekerasan berbagai kelompok separatis di provinsi-provinsi paling selatan

yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Melayu dalam satu dasawarsa ini telah memberi ruang konflik politik yang hanya menguatkan pihak pemberontak. [91]

Selama ini, Bangkok berdalih penanganan butuh kesabaran, namun nyatanya serangan pemberontak telah makin canggih dan brutal sehingga korban jiwa pun bertambah.

Bangkok harus menyadari bahwa Muslim Thailand selatan sudah memiliki memori kolektif mengenai masa lampu mereka yang dibanggakan. Merujuk Ruth McVey sebagaimana disitir Clive J. Christie, dalam *A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism and Separatism*, pernah menyatakan, "Sebuah gerakan separatis akan sangat kuat bila identitas gerakan itu bisa dikaitkan dengan memori sebuah negeri secara historis."[92]

Bangkok harus pula menyadari bahwa Muslim-Melayu di Thailand adalah kekuatan yang memiliki ideologi dan ikatan historis dengan negara tetangga yang Muslim yakni Malaysia. Maka, konflik akan terus berlangsung karena tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti. Pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini. Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertama kalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun 2013. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan pemberontak sebagai bagian dari solusi. Namun, kebijakan ini butuh niat dari politisi-politisi Thailand untuk mende-

---

[91] Matt Wheeler - Analis Asia Tenggara di International Crisis Group (ICG), "Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu di Thailand Selatan" *Kompas,* 14 Desember 2012.

[92] Lihat, Clive. J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism And Separatism*. (Singapore: ISEAS, 2000)

politisasi masalah Selatan ini, merangkul masyarakat sipil, membangun mufakat tentang devolusi kekuasaan politik dan mempercepat usaha untuk berdialog.[93]

Thailand Selatan bagaimanapun masih membara dan masih menjadi arena permainan politik elite Bangkok. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Hampir pasti tidak efektif pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS untuk memadamkan bara pemberontakan di Thailand Selatan. Bagaimanapun, itu langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau memangkas gerakan pemberontakan ini.

Sudah terbukti bertahun-tahun Muslim Thailand melawan rezim Bangkok dengan caranya sendiri, bersenjata, dan dengan diplomasi ke Dunia Islam (Timur Tengah), yang memungkinkan mereka membangun jaringan internasional dan dukungan global.

Meski kekerasan terus berlangsung di Thailand, namun skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Media juga telah menyiarkan rekaman CCTV ketika pemberontak membunuh empat tentara pada siang bolong di distrik Mayo, provinsi Pattani.[94]

Tayangan sadis yang menunjukkan bagaimana 16 pemberontak tak hanya menembaki prajurit-prajurit itu tetapi juga melucuti senjata mereka itu memberi umpan bagi publik untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan pemerintah selama ini.

---

[93] Baca, Matt Wheeler, "Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu…"

[94] Pada 31 Maret 2012, serangkaian bom meledak pada hari yang sama di Pattani, Yala dan Hat Yai menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk seorang warga negara Malaysia, dan mencederai lebih dari 500 orang.

Matt Wheeler mengingatkan, dengan mendinginnya sengketa politik nasional di Bangkok, isu Thailand Selatan kini naik kembali menjadi topik panas bagi media, birokrasi dan politisi. Sayangnya, perhatian baru ini belum mengerucut kepada pemikiran segar dalam mengatasi masalah yang ada.

Ada kecenderungan kuat pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin Shinawatra, yang mulai berkuasa Agustus 2011, mendesak Kolonel Polisi Thawee Sodsong, yang pro-Thaksin, untuk memberi darah segar pada Pusat Administrasi Provinsi-Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) yang kini dipimpinnya. Polisi dan Militer Thai bertahun-tahun menjadikan medan konflik Thailand Selatan untuk mencari penghasilan tambahan (revenue) untuk kepentingan bercokol para perwira dan polisi Thailand itu sendiri. Sehingga solusi efektif atas konflik di Thailand Selatan itu tidak pernah kunjung tercapai. Padahal meja perundingan lebih memungkinkan solusi damai atas wilayah rawan dan rentan konflik tersebut.

Thawee sebenarnya telah diterima dengan baik di wilayah itu karena kerja kerasnya dan pengerahan bantuan langsung tunai. Namun, pengeboman 31 Maret 2012 terjadi pada saat munculnya berita Thaksin gagal memulai suatu perundingan damai dengan tokoh pemberontak yang ada di luar negeri dan spekulasi bahwa keduanya berkaitan pun merebak. Serangan bom ini terjadi di wilayah Thailand Selatan yang mayoritas berpenduduk Muslim, Sabtu (31/3/12). Sebanyak delapan orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 70 luka-luka akibat gelombang kekerasan yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia ini. Tiga bom meledak di kawasan bisnis Kota Yala pada jam makan siang. Diduga perangkat bom telah dipasang di dalam mobil dan sepeda motor. Dalam insiden lainnya, telah terjadi pula ledakan di sebuah hotel di Distrik Hat Yai, Provinsi Song Kha dan di sebuah toko makan-an di Provinsi Pattani. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Thaksin, yang masih tinggal dalam pengasingan, menolak berita bahwa dia telah bertemu pemberontak. Eskalasi kekerasan serta bantahan itu telah mengembalikan usaha dialog ke titik nol.[95]

Menurut Matt Wheeler, Kabinet Yingluck setuju membentuk satgas tingkat tinggi untuk mengkoordinasi 17 kementerian yang memiliki tanggung jawab di sana. Sayangnya, menurut Matt Wheeler, langkah itu dicederai oleh kebiasaan mengutak-utik birokrasi dengan adanya tuntutan dari pihak militer untuk meletakkan SBPAC yang merupakan insitusi sipil itu di bawah kendali Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) yang didominasi militer.

Bentuk dasar dari solusi politik untuk konflik di Thailand Selatan ini sudah lama diketahui publik, namun Bangkok tak punya komitmen untuk mengambil pendekatan yang tegas dan menyeluruh.

Bangkok harus menyadari bahwa warga Muslim Thai bertahun-tahun merasa dijauhkan dari peluang sosial-ekonomi dan pendidikan yang diberikan ke bagian lain negara itu. Yala, Narathiwat, dan Pattani adalah beberapa provinsi termiskin di Thailand, yang di dalamnya banyak laki-laki muda Muslim yang menjadi pengangguran. Standar pendidikan rendah, yang berarti hanya beberapa Melayu-Muslim yang bisa lulus ujian masuk untuk posisi pemerintah, termasuk polisi setempat. Posisi-posisi yang selalu diambil oleh warga Thailand dari luar daerah yang tidak berbicara bahasa lokal atau memahami adat istiadat budaya telah melahirkan kebencian di antara penduduk setempat. Pemberontakan ini dapat disimpulkan merupakan pergesekan di antara dua sisi yaitu, Thai-Buddha dengan Melayu-Muslim.[96]

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun 2013 mengenai skema penyelesaian konflik sebenarnya cu-

---

[95] Matt Wheeler, "Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu…"

[96] *Koran Tempo*, Sabtu, 20 September 2008.

kup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.[97]

Pemerintah Bangkok seharusnya menghentikan militerisasi di sana, menghapus undang-undang keamanan yang represif and mengakhiri impunitas terhadap kelakuan aparat bersenjata karena semua ini telah jadi stimulus untuk para pemberontak.

Pembicaraan dengan perwakilan pemberontakan, perubahan cara memerintah di Thailand Selatan, pemenuhan keadilan dan pengakuan budaya yang unik dari wilayah ini adalah hal-hal yang perlu ada dalam pendekatan komprehensif untuk menghentikan kekerasan ini.

Selama Bangkok gamang, para pemberontak pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin memang disengaja demikian.

Untungnya, pihak militer memiliki kepentingan strategis untuk membatasi konflik ini di wilayah yang jelas. Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, hal itu akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Tanpa adanya pemikiran yang kreatif and aksi yang pintar, Bangkok beresiko kehilangan kendali inisiatif.

Para analis sering mengaitkan pertumpahan darah di Thailand selatan dengan konflik etnis dan identitas. Patrick Joy, misalnya, melihat pergolakan menahun antara muslim minoritas dengan pemerintah, sebagai perseteruan dua etnis, Melayu-Pattani dengan etnis "Thai" sebagai mayoritas.

---

[97] Matt Wheeler, "Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu…"

Menurut Patrick Jor, jika Bangkok tidak serius menyelesaikan secara damai konflik di Thai Selatan, maka Muslim Thai selalu menoleh pada masa lalu, melihat kembali pengalaman kolonialisme di masa lampau yang telah menyingkirkan mereka, menoleh kembali era dimana pemerintah Bangkok pun berusaha untuk menghilangkan istilah "Malay" (Melayu) pada masyarakat Thailand Selatan dan menggantinya menjadi "Thai-Muslim" atau "Thai-Islam". Hal ini membangkitkan kembali identitas Muslim-Melayu di Thai Selatan. Dan identitas Melayu itu bakal memberikan kekuatan menumbuhkan semangat nasionalisme dan berusaha berpisah dari pemerintah Thailand. Maka, tidaklah tepat kalau Bangkok terus berusaha menggerus politik identitas itu.

Lingkaran konflik dan kekerasan di Thailand Selatan bisa diselesaikan dengan perundingan damai dan bermartabat, asal Bangkok bersungguh-sungguh dan tidak menjadikan kawasan Thai Selatan itu obyek bagi penggelaran militer untuk bermain dan mereguk keuntungan sesaat yang merugikan rakyat.

KONKLUSI

Dari deskripsi di atas, nampak Asia Tenggara dengan penduduk multi-agama dan multi-etnik mendapat tantangan besar bagaimana menyatukan mereka dalam payung satu nasionalisme. Apalagi beberapa etnik atau agama telah tumbuh dalam satu kekuatan dinamis selama ratusan tahun.

Sebagian gerakan separatisme di Asia Tenggara muncul dari satu etnik atau agama yang mendapat kebijakan diskriminatif dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini diciptakan untuk meredam menguatnya identitas lokal yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah pusat, atau sengaja dibuat untuk tujuan integrasi nasional. [98]

---

[98] Antara 1947 hingga 1953, beberapa negara baru di Asia Tenggara mendapat letupan kelompok yang menuntut 'otonomi khusus' atau 'pemisahan diri' dari pe-

Dua negara yang belum berhasil 'menaklukkan' kelompok ini di antaranya Thailand Selatan dan Philipina yang kebetulan sama-sama Muslim minoritas di tengah mayoritas Buddha di Thailand dan Kristen di Philipina.

Sementara Islam menyebar ke berbagai negara di Asia Tenggara, di antaranya ke Thailand Selatan, atau dikenal dengan sebutan Muslim Pattani, atau secara resmi di Thailand, Islam Pattani.

Supaya konflik ini dapat dihentikan, menurut penulis, lebih baik penguasa Manila atau kerajaan Thai mewujudkan hak otonomi masyarakat Islam di sana atau membuat semacam daerah khusus seperti dalam kasus Aceh dan Papua di Indonesia. Sehingga masyarakat Muslim Thai atau Philipina Selatan mempertimbangkan untuk tidak memisahkan diri dan dapat memperluas penerapan hukum syariah di provinsi-provinsi Muslim. Dan pemerintah Thailand maupun Philipina harus membuat kebijakan yang pro Islam seraya memberikan bukti kepada rakyat di wilayah itu bahwa tidak akan ada lagi ketidakadilan. Dengan demikian, Masyarakat mampu melaksanakan aspirasi politik mereka seperti yang diinginkan.

Jalan menuju perdamaian di Thailand Selatan dan Philipina Selatan niscaya tetap terbuka, meski sangat terjal dan berliku serta memerlukan sumber daya dan waktu.(*)

---

merintah pusat.

NORODOM SIHANOUK, HUN SEN DAN KHMER MERAH KAMBOJA: REFLEKSI POLITICO-HISTORIS [1]

Kamboja di bawah Raja Norodom Sihanouk adalah negara di kawasan Indo-China yang punya sejarah konflik dengan tetangganya, Vietnam dan Thailand. Bahkan sampai akhir-akhir ini, letupan kisruh Kamboja dengan Vietnam dan Thailand masih sering terjadi, terutama di daerah perbatasan. Dalam sejarahnya di masa lampau, Kamboja pernah menjadi korban perluasan daerah dan perebutan kekuasaan antara Vietnam (Annam) dan Thailand (Siam), bahkan hampir seluruh Kamboja pernah jadi daerah taklukan Siam atau Annam pada abad ke-18 atau ke-19.[2]

Vietnam pada era Perang Dingin (Cold War) - sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai akhir 1980-an - adalah sekutu Soviet dan Thailand adalah sekutu Amerika Serikat karena punya ikatan historis dengan pakta pertahanan Asia Tenggara,SEATO (1954-

---

[1] Risalah ini ditulis bersama oleh Herdi Sahrasad dan Hendrajit (Direktur The Global Research Institute/ GFI) & Pemimpin Redaksi Majalah *The Global Review*, dan alumnus program studi Hubungan Internasional Fisip Universitas Nasional , Jakarta). Penulis berterimakasih kepada Hendrajit atas bantuan, kritik dan diskusinya untuk risalah ini.

[2] Tentang Kamboja, Vietnam dan Thailand ini, lihat Charles A.Fisher, *Southeast Asia, A Social,Economic and Political Geography* (London: Mathuen & Co.Ltd, 1969). Mengenai Sengketa Kamboja dan Thai, kasus itu mencuat lagi dalam KTT ke-18 ASEAN 2011 di Jakarta, dimana Perdana Menteri Hun Sen dari Kamboja membuat kisruh dengan mengangkat sengketa bilateral Kamboja dan Thailand. Di masa lampau, contoh lain konflik Kamboja dan Thai terkait kompleks candi Angkor Wat yang berulangkali menjadi persoalan Thai dan Kamboja selama beberapa abad. Kompleks candi tersebut dibangun pada abad ke-3 dan meskipun sebagian besar tinggal reruntuhan batu, setiap kali dirunut siapa pemiliknya, apakah warga Khmer ataukah Thai, selalu memancing perselisihan. Oleh karena selama perjalanan waktu, Angkor Wat yang sekarang berada di wilayah Kamboja, sejak abad XV sudah tiga kali berpindah tangan. Dari Kamboja ke Thailand atau sebaliknya, sesuai sudut pandang masing-masing. Lihat, Julius Pour, "Perbatasan Kamboja-Thailand," *Kompas,* 15/03 2004.

1977). Sampai sekarang hubungan Thailand-AS masih terjalin di antaranya dalam bentuk pelatihan militer bersama tahunan, kerja-sama intelijen, dan mengijinkan adanya pangkalan militer angkat-an laut AS beserta operasi misinya.[3] .

Vietnam bersengketa dengan China yang mendirikan kota Sansha di Pulau Phu Lam di jajaran kepulauan Hoang Sa (Spratly) seperti diputuskan Komisi Militer Sentral China. Sementara Kamboja condong ke China dalam sengketa soal Spratly.[4]

Di tengah posisi geopolitik yang sulit seperti itu, untuk memper-tahankan keseimbangan kekuatan, Kamboja sejak lama memilih China sebagai sekutu utama sampai sekarang dalam menghadapi kemungkinan hegemoni konflik teritorial dan ancaman potensial negara tetangga.[5]

Hubungan Kamboja dan China era Sihanouk begitu kuat. Tidak mengherankan, sampai wafatnya pun, Sihanouk dalam sisa usia-nya memilih berada di Beijing. Seperti kita ketahui, rakyat Kam-boja meratapi kepergian Raja Norodom Sihanouk, yang mening-gal di Beijing, China, pada usia 89 tahun, Senin (15/10/2012). Je-

---

[3] Evelyn Goh, "Great Powers and Hierarchial Order in Southeast Asia: Analy-zing Regional Security Strategy", *Jurnal International Security,* 2007, Vol.32, h. 13-157. Perselisihan Kamboja dan Thai terakhir ini semakin memuncak ketika Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai penasihat ekonomi negaranya. Sejumlah pengamat menyebut kedua negara tengah berada pada ancaman perang terbuka, setelah kasus-kasus sebelumnya yakni saling usir diplomat dan bentrok berdarah terkait saling klaim kawasan di sekitar sebuah kuil kuno dari abad 11, Preah Vihear. Kedua negara terlibat bentrok ketika kuil itu memperoleh status warisan dunia dari UNESCO. Baca, "Konflik Thailand-Kamboja dan ASEAN," *Harian Pelita,* 18 Januari 2013.

[4] *Kompas dan inilah.com* ,19 Juli 2012. Langkah China yang diumumkan 19 Juli itu termasuk pemilihan anggota pertama Kongres Partai Komunis China di kota Sansha pada 21 Juli. Tentu saja langkah China ini ditentang Vietnam. Vietnam me-nyatakan bahwa pendirian kota Sansha dan pemilihan perangkat pemerintah daerahnya melanggar hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas kepulauan Hoang Sa (Pulau Paracel) dan Truong Sa (Spartly).

[5] Dewasa ini, Kamboja maupun Vietnam juga membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat. Namun dari segi ikatan historis, Phnom Penh lebih condong ke RRC, sementara Vietnam ke Moskwa (Rusia) dan Thailand ke AS.

nazahnya disemayamkan selama tiga bulan di Phnom Penh sebelum dikremasi dalam upacara kenegaraan.

Pada 2004, Sihanouk turun tahta dan menyerahkan kekuasaan pada anaknya Norodom Sihamoni. Sihanouk menyebut perdana menteri dan raja adalah pasangan yang diberkahi Buddha.

Pada 2005, dalam usia 83 tahun, Sihanouk berobat ke China dan Korea Utara. Norodom Sihanouk kembali ke Kamboja 2006 setelah meninggalkan negerinya selama sekitar 10 bulan. Sihanouk menjalani perawatan medis di China dan sempat menghabiskan waktu di Korea Utara.

Mantan raja Kamboja ini adalah tokoh kunci dalam kehidupan politik Kamboja lebih dari enam dekade. Menjelang kepulangannya, Sihanouk sudah meminta tak perlu ada upacara penyambutan resmi untuk dirinya.

Di Kamboja sendiri, setelah Sihanouk mundur, peran keluarga kerajaan dalam dunia politik Kamboja ikut melemah. Sihanouk mendapati situasi politik yang jauh berbeda dengan saat dia meninggalkan negeri itu untuk berobat ke Beijing dan Pyongyang 10 bulan sebelumnya, kurun 2005.

Pada massa itu, Partai pemerintah, Fucinpec berkoalisi dengan Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang mengusung Hun Sen. Fucinpec seakan tak terkendali setelah pemimpinnya, Pangeran Ranaridh mengundurkan diri setelah terjadi skandal yang diatur dengan sangat rapi. Dengan demikian, Hun Sen bisa berkuasa dengan sangat leluasa. Kondisi ini menandai awal dari berakhirnya pengaruh keluarga kerajaan dalam dunia politik Kamboja.

Selama meninggalkan negerinya, Sihanouk sempat menjalankan hobinya yaitu membuat film. Di Korea Utara, Sihanouk bahkan sempat membuat satu film.

Kepulangannya ke Kamboja 2006 disambut ribuan rakyat. Sihanouk pulang untuk memastikan masa depan sistem monarki di Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen telah menyiapkan sebuah

mobil limousine untuk menjemputnya pada waktu itu, suatu isyarat bahwa elite Kamboja yang berkarakter sosialis agraris, senang menikmati kemewahan produk Barat yang sangat kapitalis.

POTRET NORODOM SIHANOUK

Sebagai pemimpin, sosok Raja Kamboja, Norodom Sihanouk memang unik. Hidupnya erat kaitannya dengan sosok negeri Kamboja, yang perjalanan sejarahnya penuh konflik politik dan perang saudara. Begitu pula jejak langkah Sihanouk, yang diwarnai dengan langkah maju mundur, naik turun, dan pasang surut, bahkan tragedi. [6]

Sihanouk sempat dituding berbuat khilaf atau kesalahan oleh kaum muda di negerinya, yang tak terlalu mengenal dekat sepak terjangnya semasa ia memimpin dulu. Bahwa dia dituding sebagai salah satu sosok yang semestinya ikut bertanggung jawab saat negerinya mengalami tragedi pembantaian massal oleh rezim Khmer Merah. Sekitar dua juta jiwa tewas oleh kekejian rezim saat negeri itu dipimpin rezim Maois ultraradikal pada 1975-1979. Pemerintahan Khmer Merah ketika itu memaksa warga kota menjalani reedukasi dan ideologisasi dengan kekerasan di pedesaan, membuat kota-kota Kamboja kosong dan rakyat dipaksa memenuhi kamp-kamp kerja paksa. Sungguh, hal ini merupakan tragedi bangsa Kamboja (Khmer).[7]

Sihanouk, yang pernah menjalani status tahanan rumah di Istana Kerajaan saat Khmer Merah memerintah Kamboja, tetap dihormati oleh sebagian besar rakyatnya.

Setidaknya di dinding rumah orang-orang lama Kamboja, foto Sihanouk masih dipajang sebagai sosok mantan raja yang dihor-

[6] Nazaruddin Nasution, "Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia," *Esai,* Kedutaan Besar Republik Indonesia Pnom Penh, 2002. Baca, "Pasang Surut Seorang Raja," *Kompas,* Selasa, 16 Oktober 2012.

[7] *Kompas,* "Pasang Surut Seorang Raja."

mati meskipun kini raja mereka adalah anak Sihanouk, Norodom Sihamoni. Dan pemerintahannya saat ini dipegang Perdana Menteri Hun Sen, sosok orang kuat Kamboja.

Sihanouk dituturkan sempat kehilangan lima dari 14 anaknya selama Khmer Merah memerintah Kamboja dengan tangan besi.

Sihanouk menjadi pelaku sejarah pada masa kemerdekaan Kamboja pada 1950-an dan juga berperan dalam menjaga keutuhan Kamboja saat menghadapi permasalahan internal pada 1970-an.

Sihanouk, dikenal sebagai sahabat pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu, baik semasa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memerintah.

Terlahir pada 31 Oktober 1922, Sihanouk yang dimanjakan oleh masa kanak-kanak di bawah penjajahan Perancis di Indo-China dimahkotai sebagai raja pertama Kamboja pada tahun 1941 saat ia masih berusia 19 tahun. [8]

Meski mula-mula diremehkan oleh penjajahnya, pada 1953 Perancis pun didepak keluar dari Kamboja saat Sihanouk menjadi raja. Dua tahun setelah kemerdekaan 17 April 1953, Sihanouk pun turun takhta pada tahun 1955 untuk memberikan kursi kerajaannya kepada sang ayah, Norodom Suramarit.

Sejak tahun 1955 itu, Sihanouk pun mengejar karier politiknya sebagai pemimpin partai politik dan enam kali naik turun sebagai Perdana Menteri Kamboja. Masa itu sering diwarnai drama kemarahan Sihanouk di panggung politik. Ia kembali menjadi Raja Kamboja setelah wafatnya sang ayah pada tahun 1960.

Setelah kembali bertakhta, Sihanouk membawa Kamboja dalam situasi sulit dengan sikap netralnya sebagai salah satu pendiri Gerakan Nonblok saat dunia dilanda Perang Dingin.

Hubungan dengan Amerika Serikat (AS) memburuk pada tahun 1965, bahkan Kamboja memutuskan hubungan diplomatik de-

[8] *Kompas*, “Pasang Surut Seorang Raja.”

ngan AS lantaran keterlibatan AS di Perang Vietnam. Sihanouk bahkan seolah membuka front terhadap Amerika saat tahun 1969, Kamboja berpaling ke China. AS, yang merasa khawatir Kamboja menjadi tempat bernaung pelarian Vietnam, membombardir tempat-tempat di Kamboja yang diduga menjadi sarang pengungsi Vietnam. [9]

Sihanouk, yang gagal menjauhkan Kamboja dari peperangan, berkali-kali memprotes tindakan AS itu, tetapi protesnya tak diacuhkan.

Di dalam negeri Kamboja, Sihanouk dikenal dengan pemerintahan satu tangan. Ia bahkan sempat dikritik sebagai penguasa Khmer di zaman kuno, tetapi berbaju gaya Barat.

"Saya Sihanouk dan seluruh rakyat Kamboja adalah anak-anakku," ungkapnya. Sebagai politisi Kamboja, semasa takhta dipegang sang ayah, Sihanouk dikenal keras, bahkan sebagian menyebutnya zalim dan kejam.

Akan tetapi, Sihanouk juga dikenal sebagai dilettante, penggemar seni, playboy yang tak kenal lelah, sering terlihat dengan antusiasmenya yang terkesan kekanak-kanakan. Ia juga membuat film, melukis, mengarang lagu, menjadi manajer tim sepak bola, bahkan memimpin grup musik jazz-nya sendiri. Ia juga dikenal gemar mobil-mobil balap, gemar makanan, dan juga wanita. Ia menikah setidaknya lima kali (bahkan ada yang mengatakan enam kali) dan memiliki 14 anak.

Meski demikian, banyak warga Kamboja mengagumi Sihanouk bak seorang dewa. Rakyat Kamboja menilai, Raja Norodom Sihanouk identik dengan Kamboja. Memang, dialah pemimpin rakyat Kamboja yang dihormati. Semasa hidupnya, Sihanouk menjadi sahabat para pemimpin Indonesia. Raja Sihanouk adalah seorang tokoh legendaris dan kharismatik yang disegani dan dihormati rakyat Kamboja, dan merupakan tokoh yang paling lama berku-

---

[9] *AFP*, 16/10/2012

asa di dunia. Sihanouk yang memerintah Kamboja mulai tahun 1941 dalam usia 18 tahun. Tokoh-tokoh yang relatif lama memerintah di dunia antara lain Fidel Castro dari Kuba selama 44 tahun, Soeharto dari Indonesia selama 32 tahun dan sahabat akrab Sihanouk, Sukarno, memerintah selama 22 tahun. Pada tahun 2004, Sihanouk menyerahkan jabatan raja kepada putranya, Pangeran Sihamoni, setelah memerintah Kamboja selama 63 tahun (1941-2004). Sihanouk adalah sahabat sejati Bung Karno, presiden pertama RI, yang dilambangkan dengan kehadirannya pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung.[10]

Sihanouk berhasil bertahan menghadapi berbagai pertarungan melawan perang saudara dan *genocide* di Kamboja, yang sangat terkenal dengan *killing fields*-nya. Dia adalah pahlawan kemerdekaan, raja sekaligus perdana menteri.

Terlepas dari situasi internal yang dihadapi Sihanouk di dalam negeri, namun satu hal yang sangat melekat bagi rakyat Indonesia adalah kedekatannya dengan Bung Karno.

Hal ini terus berlangsung dengan saling kunjungan antara kedua kepala negara/pemerintahan tersebut selama beberapa kali. Bahkan berlanjut terus sewaktu Megawati menjadi presiden kelima RI.

Dalam acara jamuan makan malam kenegaraan menyambut Presiden Megawati tahun 2001, Raja Sihanouk memperlakukan Megawati seolah-olah sebagai anaknya sendiri, dan mempersilahkan Megawati untuk menginap di kamar yang sama di istana yang pernah ditempati oleh Presiden Soekarno.

Berkat Sihanouk, nama Indonesia sangat dikenal oleh rakyat Kamboja. Lagu Bengawan Solo, Halo-halo Bandung terdengar hampir di semua forum resmi maupun tidak resmi.

---

[10] Lihat, Nazaruddin Nasution, mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja (2000-2003) dalam analisisnya kepada *Antara,* 16 Oktober 2012.

Setiap Sihanouk berulang tahun, ia selalu menyanyikan lagu-lagu Indonesia, yang selalu dibanggakannya di hadapan korps diplomatik.

Meskipun Sihanouk adalah seorang Raja yang memerintah secara feodal, namun dalam menjalankan pemerintahannya dia cenderung bersikap demokrat. Sayang, sikap kenegarawannya ini telah mengakibatkan dia dengan mudah menjadi "sasaran tembak" dari lawan-lawan politiknya,

TRAGEDI KAMBOJA: PENINDASAN DAN PEMBANTAIAN

Kamboja memiliki luas sekitar 181.040 kilometer persegi, berbagi perbatasan 800 kilometer dengan Thailand di sebelah utara dan barat, perbatasan 541 kilometer dengan Laos di timur laut, dan perbatasan 1.228 kilometer dengan Vietnam di sebelah timur dan tenggara. Masyarakat Kamboja etnis homogen, karena lebih dari 90% penduduk adalah asal Khmer dan berbicara bahasa Khmer, bahasa resmi negara. Sisanya termasuk China, Vietnam, Cham dan Khmer Loeu.

Kamboja merupakan negara di Asia Tenggara yang semula berbentuk Kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti Khmer di Semenanjung Indo-China antara Abad Ke-11 dan Abad Ke-14. Kamboja pernah mengalami kejayaan dalam sejarah masa lampaunya sekitar abad 12 dan 13, dimana luas kekuasaannya waktu itu sampai Burma (Myanmar) di sebelah Barat, di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Chmapa, di bagian selatan mencakup hampir seluruh bagian Vietnam Selatan dan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Sedangkan di bagian utara, wilayahnya mencapai perbatasan antara Laos-RRC sekarang.[11]

Rakyat Kamboja biasanya dikenal dengan sebutan Cambodian atau Khmer, yang mengacu pada etnis Khmer di negara tersebut.

---

[11] AR Sutopo, "Konflik Vietnam dan Kamboja", dalam Hadi Soesastro dan AR Sutopo (Eds), *Strategi dan Hubungan Internasional* (Jakarta: CSIS, 1981), h.398-414.

Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini berbatasan langsung dengan Thailand, Laos dan Vietnam. Sebagian besar rakyat Kamboja beragama Buddha Theravada, yang turun-temurun dianut oleh etnis Khmer. Namun, sebagian warganya juga ada yang beragama Islam dari keturunan muslim Cham.

Sejak abad ke-9 sampai abad ke-15, Kamboja pernah menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Khmer, yang berpusat di Angkor. Angkor Wat (Candi Angkor), kuil ibadah utama Kerajaan Khmer, merupakan lambang Kamboja yang mencerminkan kemegahan kerajaan lampau sebagai kekuatan dunia, dan menjadi tempat wisata utama di Kamboja hingga saat ini.

Kamboja pernah menjadi Daerah Perlindungan Perancis (jajahan Perancis) sejak tahun 1863 sampai negeri ini memperoleh kemerdekaan pada tahun 1953. Pada tahun 1941 sampai 1945, Kamboja pernah diduduki oleh Tentara Jepang dalam Perang Dunia II.

Ke-mudian pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an, negara ini berada di bawah kekuasaan Raja Norodom Sihanouk, saat negara ini berada di dalam kegentingan untuk mempertahankan ketidakberpihakannya melawan Vietnam Selatan dan Vietnam Utara.

Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tanggal 18 Maret 1970, ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di Moskow dalam sebuah kunjungan kenegaraan, keponakannya yang bernama Pangeran Sisowath Sirik Matak bersama Lo Nol melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Lon Nol, seorang jenderal yang didukung oleh Amerika Serikat, lalu menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah negara republik.

Republik Khmer Lon Nol yang berkiblat kapitalisme pro-AS menjadikan Kamboja berada di bawah hegemoni AS untuk melawan Vietnam Utara. Angkatan Darat dan armada laut Amerika Serikat telah mengubah Kamboja menjadi medan pertempuran

dalam rangka melawan komunisme Vietnam Utara. Lebih dari 100.000 penduduk sipil Kamboja tewas akibat petaka yang dijatuhkan pesawat pembom Amerika B-52.

Sihanouk sendiri tidak kembali ke negaranya dan memilih menetap di Beijing, China. Ia memimpin pemerintahan dalam pelarian dan Khmer Merah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut.

Beberapa tahun kemudian, Kamboja menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berkuasa pada tahun 1975, menjatuhkan Lon Nol. Saat itu, Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai "Year Zero," dimana segala sesuatunya ingin dibangun dari titik nol.

Pol Pot yang nama aslinya Saloth Sar mengklaim sebagai seorang supernasionalis yang meyakini komunisme menyediakan perlengkapan teknis untuk mengatasi hambatan hirarkis, ketidakadilan dan rendah diri serta ketaklukan.

Pol Pot amat kejam dan brutal. Pada bulan Agustus 1976, Pol Pot menjalankan Rencana Empat Tahun untuk meningkatkan produksi pertanian sebagai produk ekspor melalui industrialisasi pertanian dan pengembangan industri ringan beragam.[12] Oleh Pol Pot, tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot justru merupakan awal masa kegelapan bagi rakyat Kamboja.

Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah masa yang membuat seluruh dunia terkejut, jengkel, marah dan mengutuk luar biasa. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Mata uang dihapuskan, pelayanan pos dihentikan, dan hubungan dengan luar negeri diputus. Hukum

[12] David P. Chandler, *Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot* (Westview Press , 1992).

Kamboja juga dihapuskan, diganti hukum besi komunisme Maois. Pol Pot dan Khmer Merah mengklaim bahwa Kamboja mampu menciptakan tatanan sosialis murni yang berdiri sendiri melalui produktivitas petani, seraya mengklaim bahwa mereka *membuat sebuah revolusi yang unik khas Kamboja.* [13]

Pol Pot menganggap kota-kota besar sebagai basis dari kaum aristokrat dan penghambat revolusi. Untuk mendorong petani meninggalkan kota ke desa, Pol Pot juga menyebarkan isu bahwa kota-kota besar di Kamboja akan dibom dan diserang oleh Amerika Serikat. *"Apakah ada negara yang berani menghapuskan uang dan pasar seperti cara yang kami miliki?. Kami adalah model yang baik bagi seluruh dunia,'' demikian klaim Pol Pot.*

Khmer Merah Pol Pot memerintahkan lebih dari dua juta penduduk untuk meninggalkan kota menuju pedesaan dengan alasan melakukan Revolusi Agraria untuk tinggal dan bekerja di pedesaan sebagai petani. Dalam persepsi Pol Pot, petani ideal adalah sosok yang sederhana, tak perlu berpendidikan, pekerja keras dan tidak rentan terhadap eksploitasi. [14]

Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja. Ada sekitar 343 ladang pembantaian (*Killing Fields)* yang tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah ladang pembantaian paling terkenal. Di sini, sebagian besar korban yang dieksekusi adalah para intelektual dari Phnom Penh, yang di antaranya adalah: mantan Menteri Informasi Hou Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk David Lioy Scott dari Australia. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng. Haing S Ngor yang masa itu berprofesi sebagai seorang dokter adalah segelintir inte-

[13] Stephane Curtois, The *Black Book of Communism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

[14] Nuzulul Dina, "Konflik Kamboja Rezim Pol Pot-Khmer Merah," *Kompas.com,* 17 Januari 2012, diakses pukul 19.00

lektual yang berhasil lolos dari buruan rezim Khmer Merah. Haing dianugerahi Piala Oscar tahun 1984 atas perannya di film "The Killing Fields." Dalam film itu, ia memerankan tokoh Dith Pran, jurnalis Kamboja yang selamat dari pembantaian. [15]

Meskipun Sihanouk dipersilahkan kembali sebagai kepala negara secara simbolik oleh Pol Pot, namun yang sesungguhnya berkuasa di Kamboja (1975-1979) adalah rezim Khmer Merah.

Tragedi yang menimpa Pangeran Sihanouk sepertinya belum selesai sampai di sini. Pada 1979, pada titik puncak kekejaman dan kelaliman dari rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot terhadap lawan lawan politiknya, para anggota keluarga besar Sihanouk di Phnom Penh juga tak luput dari pembantaian.[16]

Menurut para analis politik, kisah kelam Kamboja ini adalah pola yang dipraktikkan oleh penguasa Komunis di mana pun apabila berkuasa, termasuk di Indonesia, yang dikhawatirkan juga bakal terjadi sekiranya rezim komunis pro-China berhasil berkuasa pada tahun 1965.

Dalam perkembangan kemudian, dengan dukungan Uni Soviet dan Vietnam Utara, faksi lain dalam tubuh Khmer Merah yang dipimpin Heng Samrinh, berhasil menggulingkan rezim Pol Pot pada 1979. Pada waktu itu Vietnam juga sudah berhasil menggulingkan rezim militer sayap kanan Nguyen van Thiu, yang tentunya secara otomatis juga mengusir tentara Amerika dari bumi Vietnam Selatan. Situasi pasca penggusuran rezim Pol Pot tersebut sempat membuat China marah besar. Karena dengan demikian, pengaruh China di Kamboja telah bergeser ke tangan Soviet yang mendukung gerakan Heng Samrinh. Vietnam menge-

---

[15] Laporan *Pelita.com, Kompas.com dan Antara.com* mengenai wafatnya Sihanouk dan Sejarah Kamboja, 16-17 Oktober 2012, diakses pukul 11.00. Haing S. Ngor tewas terbunuh di kediamannya di Los Angeles, AS, ketika melawan perampokan yang dilakukan tiga pecandu narkoba pada 1996.

[16] Rezim Khmer Merah (Khmer Rouge) inilah yang telah melakukan pembantaian massal terhadap hampir sekitar dua juta jiwa rakyat Kamboja yang tidak berdosa, yang merupakan sepertiga dari jumlah enam juta rakyat Kamboja saat itu

rahkan 150,000 sampai 160,000 pasukannya di Kamboja dan menyediakan banyak infrastruktur administratif di negeri Sihanouk itu. Karena konflik ini sama-sama dari kubu komunis, maka AS/Barat menyebut konflik tersebut sebagai "Pertarungan Timur-Timur'' (East-East Struggle). Vietnam didukung Soviet yang menyediakan bantuan US$1-2 miliar per tahun bagi Hanoi dan Khmer Merah Pol Pot didukung China dengan bantuan ekonomi dan militer. [17]

Akibat invasi rezim Vietnam ke Kamboja ini, yang kemudian mendirikan rezim baru, People's Republic of Kampuchea (Republik Rakyat kamboja, PRK), maka Phnom Penh dianggap dikuasai boneka Vietnam dan mendapatkan reaksi yang keras dari komunitas internasional.

Masalah esensial dalam perkembangan konflik di Kamboja ini adalah bahwa kendati dunia telah mengutuk tindakan Pol Pot yang dilakukan oleh DK-PBB akibat kekejamannya, intervensi kekuatan asing ke Kamboja melalui penggunakan kekuatan militernya untuk menjatuhkan rezim yang tengah menjadi sorotan dunia tersebut, tetap tidak dapat dibenarkan.

Konflik di Kamboja selanjutnya memasuki tahap internasionalisasi yang intensif, di mana tahun-tahun berikutnya perkembangan konflik diwarnai dengan pergolakan di dalam negeri melalui pihak-pihak oposisi yang masing-masing berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi menjatuhkan pemerintahan PRK di Phnom Penh yang tak lain merupakan kepanjangan tangan Vietnam di Kamboja.

Sementara itu, komunitas dunia dalam kerangka regional maupun global mulai meningkatkan perhatiannya terhadap konflik yang yang makin kompleks itu.

ASEAN sebagai organisasi regional menyadari bahwa implikasi

---

[17] Bernard K. Gordon, "The Third Indochina Conflict," *Foreign Affairs,* Fall 1986

dari pendudukan Vietnam terhadap Kamboja telah merusak visinya untuk menjadikan suatu komunitas Asia Tenggara yang kelak juga akan mengikut sertakan Vietnam, Kamboja dan Laos. Invasi ini juga menjadi perhatian utama ASEAN sebagai aksi solidaritas, Vietnam telah mengancam keamanan Thailand sebagai salah satu anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan Kamboja.[18]

Sihanouk sendiri terpaksa menyingkir ke Beijing sewaktu Vietnam menyerbu Kamboja pada penghujung tahun 1979, dan sejak 1980 Vietnam berhasil menempatkan Hun Sen sebagai perdana menteri, yang terus memerintah Kamboja hingga dewasa ini (lebih dari 30 tahun).

Dalam kompleksitas masalah Kamboja itu, figur Sihanouk sebagai tokoh sentral Kamboja dan menjadi episentrum dari seluruh kekuatan politik Kamboja yang justru semakin nyata. Dalam berbagai perundingan perdamaian dalam kerangka rekonsiliasi seluruh kekuatan politik Kamboja pasca tergusurnya rezim Pol Pot yang bengis itu, Sihanouk praktis merupakan tokoh kunci dan faktor penentu yang diperhitungkan semua kekuatan politik di dalam negeri maupun komunitas internasional.

ASEAN, misalnya, sebagaimana fakta sejarah, sangat menentang tindakan Vietnam ini. Reaksi keras ASEAN ini akhirnya mendorong Vietnam untuk berunding. Maka bertindaklah Menlu RI Mochtar Kusumaatmadja sebagai interlocutor antara Vietnam dan ASEAN.

Suasana perang saudara yang melanda Kamboja selama 20 tahun (1970-1990) tersebut, pada akhirnya pulih ketika Indonesia, melalui Menlu Ali Alatas, menawarkan jasa-jasa baiknya pada tahun 1988 dan 1999.

Melalui "Jakarta Informal Meeting" dan "Informal Meeting on Cambodia" yang bertujuan untuk mendamaikan empat pihak yang bertikai di Kamboja saat itu, Hun Sen (CPP), Heng Samrin

[18] *BBC* dan *Deutsche Welle*, 16-17 Oktober 2012.

(Khmer Merah), Ranariddh (Funcinpenc) dan Son San (KPNLF) berhasil diundang ke meja perundingan.

Konferensi Perdamaian Paris (1991) yang diketuai secara bersama oleh Indonesia dan Prancis, dan disahkan oleh PBB, telah juga berhasil menciptakan perdamaian di Kamboja ketika itu.

Paska perdamaian PBB, Pangeran Sihanouk melanjutkan pemerintahannya (1993-2004). Berbeda dari Pangeran Sihanouk yang memerintah sebagai seorang politisi dan negarawan, penggantinya Pangeran Sihamoni (2004-sekarang), sesuai dengan latar belakangnya yang merupakan sahabat Guruh Sukarnoputera, nampaknya lebih menonjol sebagai seorang seniman dan budayawan.

Hal ini semakin menempatkan PM Hun Sen sebagai *the strong man of Cambodia* untuk memperkokoh soliditas pemerintahannya.

Beberapa kalangan menilai, Hun Sen, meskipun banyak dikritik dan dikecam karena pemerintahannya yang bersifat otoriter, namun dinilai berhasil secara pesat membangun negerinya melalui dukungan sejumlah negara donor.

Keberhasilannya konon disebutkan karena Hun Sen mencontoh keberhasilan Soeharto sejak 1970 melalui program pembangunan lima tahun yang berkelanjutan (Pelita).

PENGGULINGAN SIHANOUK

Berbagai laporan menyingkapkan bahwa penggulingan Pangeran Sihanouk di Kamboja ternyata tidak luput dari peran CIA. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi Duta besar Indonesia ikut andil di dalamnya. Kudeta terhadap Sihanouk itu terjadi pada 18 Maret 1970.[19]

Dalam sebuah pernyataannya pada 10 Maret 1970, Pangeran Norodom Sihanouk mengeluh bahwa kelompok sayap kanan di

---

[19] Hendrajit dkk, *Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Global Future Institute-GFI, 2010).

Phnom Penh telah mengail di air keruh selama ia tidak berada di Kamboja. Kelompok ini ingin agar Kamboja masuk dalam kubu Amerika (kapitalis).

Pangeran Norodom Sihanouk bukan sekadar dikenang sebagai raja Kamboja. Namun dia masuk dalam deretan para pemimpin Asia yang sempat mengalami dinamika Perang Dingin pada 1950-an hingga akhir 1980-an. Sihanouk juga tercatat sebagai salah satu kepala negara/pemerintahan Asia yang masuk dalam target operasi badan intelijen Amerika Serikat, CIA, karena tidak mau masuk dalam orbit pengaruh Washington, sehingga Sihanouk jadi sasaran proganda hitam Amerika dan sekutu-sekutu baratnya sebagai agen Uni Soviet dan China yang berhaluan komunis.[20]

Padahal, seperti juga Bung Karno dari Indonesia, dan beberapa pemimpin kawasan Asia lainnya, Sihanouk masuk dalam deretan para pemimpina Asia da Afrika yang menginginkan terbentuknya "kekuatan ketiga" yang tidak memihak kutub liberal kapitalis AS/Eropa Barat, dan juga tidak berhaluan komunis yang waktu itu dimotori oleh Soviet dan China. Dengan kata lain, Sihanouk termasuk pendukung Gerakan Non Blok.

Akibatnya, CIA kemudian menyusun skenario kudeta dengan bantuan para perwira militer sayap kanan Kamboja yang dipimpin oleh Jenderal Lon Nol. Dan kisah kudeta terhadap Sihanouk secara gamblang telah menggambarkan betapa dramatisnya plot kudeta yang dirancang oleh Washington. Karena agenda besar AS di balik penggulingan Sihanouk sebagai pemimpin Kamboja yang mengakar di kalangan rakyat, adalah untuk meng-internasionalisasi perang Vietnam. Dan Sihanouk, dipandang sebagai faktor yang bisa menghambat, bahkan menggagalkan skenario Washington.[21]

---

[20] Hendrajit, "Skenario CIA Dalam Penggulingan Pangeran Sihanouk di Kamboja," *vivanews.co.id*, 28 November 2012 diakses pukul 01.00

[21] Lihat Hendrajit dkk, *Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia.*

Karena sejak 1960, Sihanouk selalu berusaha keras mencegah meluasnya perang Indo-China, sehingga dengan sikapnya ini, Sihanouk menjadikan dirinya sebagai pemimpin Kamboja yang bisa diterima oleh semua faksi, termasuk kelompok sayap kiri. Para pihak yang melawan garis politik Sihanouk adalah kelompok bisnis yang berhaluan sayap kanan dan faksi fanatik anti-komunis dari kelompok militer.

Tentu saja sikap politik luar negeri Sihanouk yang menentang meluasnya perang Indo-China, dibaca sebagai melawan skema Amerika yang justru ingin eskalasi perang Indo-China terus meluas. Dengan begitu, Sihanouk otomatis melawan skema internasionalisasi perang Vietnam yang dilancarkan oleh Washington.[22]

Perang Indo-China memang sudah dilancarkan oleh Amerika sejak 1964, semasa Presiden Lyndon B Johson. Yang kemudian diteruskan oleh Presiden Richard Nixon pada 1968, hingga saat terjadinya kudeta terhadap Sihanouk pada 18 Maret 1970. Sejak perang Indo-China dilancarkan, Amerika menggunakan Thailand dan Okinawa sebagai basis dan pusat kegiatan, baik operasi militer maupun operasi intelijen. Dalam operasi militer, khususnya ketika melakukan pemboman terhadap Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, Amerika menggunakan basis militernya di Thailand, Taiwan, Okinawa, Hawaii, Filipina dan Guam.[23]

Di Thailand ini pula, Amerika menggunakannya sebagai pangkalan militer untuk menggempur kekuatan-kekuatan komunis di Kamboja. Maka ketika pasukan udara Amerika mengebom Laos Utara dan Vietnam Utara, Thailand merupakan pusat komando pengeboman yang digunakan oleh pasukan Amerika, khususnya pangkalan militer yang bernama Udorn Air Base.

---

[22] Prince Norodom Sihanouk, *My War with CIA* (Baltimore: Penguin Book, 1974).

[23] Hendrajit**,** "Skenario CIA Dalam Penggulingan Pangeran Sihanouk di Kamboja." *vivanews.co.id*, 28 November 2012.

Para pengamat internasional menyingkapkan bahwa Sihanouk semakin memperlihatkan sikapnya yang terang-terangan menentang kebijakan Washington untuk melawan komunis di Kamboja, ketika pada 1969 Pangeran yang flamboyan mati-matian mencegah Kamboja masuk ke dalam skema internasionalisasi perang Vietnam, dan mengambil sikap netral dengan mempertahankan keseimbangan politik di Kamboja. Inilah puncak kejengkelan Washington, yang akhirnya bermuara pada dukungan terbuka pada militer sayap kanan pimpinan Jenderal Lon Nol untuk menggusur Sihanouk pada 18 Maret 1970.

Setelah Sihanouk berhasil digulingkan, praktis terjadi terjadi destabilisasi di kawasan Indo-China. Pada satu pihak, sayap kanan dukungan Amerika menguasai dan mengambil-alih kendali politik, pada saat yang sama Sihanouk dan para pendukungnya mau tidak mau harus berada dalam satu kubu dengan berbagai elemen sayap kiri baik komunis maupun nasionalis kiri.

Para akademisi mencatat, sejak 18 Maret 1970 itulah, para pemimpin Khmer Merah yang berhaluan kiri berhasil mengajak Sihanouk untuk bersekutu melawan imperialisme Amerika. Konspirasi sayap kanan dan militer Kamboja telah memaksa Sihanouk menjadi satu kubu dengan Komunis. Sihanouk sendiri, sebagai politisi yang cukup berpengalaman meski waktu itu masih berusia relatif muda, sudah merasa dirinya sedang jadi target operasi CIA dan faksi sayap kanan Kamboja.

"Kelompok sayap kanan di Phnom Penh telah mengail di air keruh selama saya tidak berada di Kamboja. Mereka ingin agar Kamboja masuk dalam kubu Amerika," begitu tutur Sihanouk saat lawatannya ke Perancis.[24]

Dalam sebuah jumpa pers, Sihanouk juga menyatakan bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini, telah diadakan kontak

---

[24] Hendrajit, "Skenario CIA Dalam Penggulingan Pangeran Sihanouk di Kamboja."

intensif antara para perwira militer sayap kanan dan CIA dan mengingatkan adanya bahaya kudeta, yang semuanya tergantung pada sikap dari militer.

Benar saja, akhirnya Sihanouk tak bisa bertahan, karena Jenderal Lon Nol yang mengendalikan angkatan bersenjata Kamboja sebagai Panglima Militer, lebih berpihak pada Wakil Perdana Menteri Sirik Matak dan para pengikut sayap kanannya. Sihanouk sendiri sadar bahwa Sirik Matak secara intensif telah menjalin kontak-kontak dengan kalangan kedutaan Amerika di Phnom Penh sejak kedubes tersebut dibuka pada 1969.

Yang menarik dari jalinan kisah tergusurnya Sihanouk, adalah tentang keterlibatan militer Indonesia yang ketika itu sudah berada dalam kekuasaan Jenderal Soeharto. Sebuah studi yang dilakukan oleh Julie Southwood dan Petrcik Flanagan dalam bukunya, *Indonesia, Law, Proganda and Terror,* mengungkap ada-nya kedekatan Lon Nol dengan Soeharto. Sejak 1965, sekitar 2 bulan setelah Soeharto berhasil mendalangi penggulingan Bung Karno, sebuah tim para perwira militer Kamboja diam-diam berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari cara Soeharto menggulingkan Bung Karno.[25]

Dari fakta yang diungkap dua peneliti tersebut, maka kunjungan dan studi pihak militer Kamboja ke Indonesia, tentu pihak militer Indonesia sudah mengetahui dari awal bakal adanya kudeta 18 Maret 1970 tersebut.

Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu saluran penghubung antara perwira militer Lon Nol dan pihak Amerika adalah kedutaan besar Indonesia di Phnom Penh. Indonesia sepertinya punya tugas ganda, di satu sisi memberikan nasehat kepada Lon Nol tentang siasat pertempuran, di sisi lain memberikan laporan intelijen pertahanan kepada Amerika mengenai rencana Lon Nol.

---

[25] Lihat, Julie Southwood dan Petrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror* (London: Zed Press, 1983).

Jika catatan sejarah di atas benar, maka nampak jelas jejak-jejak CIA dalam operasi rahasia penggulingan Sihanouk tidak saja terlihat nyata di Kamboja, melainkan juga melibatkan jaringan kaki tangannya di Indonesia dan Thailand.

Namun demikian, hubungan Kamboja dan Indonesia nampaknya tidak terganggu dengan tragedi kudeta ini sebab Indonesia dan ASEAN begitu sungguh-sungguh mendukung perdamaian dan kedaulatan Kamboja serta kembalinya Raja Sihanouk ke dalam tahta kekuasaan di Phnom Penh untuk membangun kembali bangsa dan negaranya dari reruntuhan konflik berdarah dan perang saudara yang membuat rakyat Kamboja menderita.

HUN SEN DAN KAMBOJA

Surutnya kuasa Sihanouk di Kamboja telah membuka ruang dan peluang bagi Hun Sen untuk terus menaikkan pamornya. Di era Perdana Menteri Hun Sen, Barack Obama adalah Presiden Amerika pertama yang menjejakkan kaki di Kamboja. Obama mendesak Hun Sen untuk memperbaiki rekam jejak hak asasi manusia di negara itu. Menurut Obama, catatan buruk hak asasi manusia di Kamboja merupakan ganjalan dalam relasi antara kedua negara.[26]

Dalam pertemuan itu Obama juga secara khusus menyinggung soal pelaksaan pemilu di Kamboja yang dinilai kurang adil dan bebas, soal tahanan politik, dan perampasan tanah. Masalah-masalah tersebut menjadi ganjalan dalam relasi Amerika dan Kamboja.

Obama mendesak Hun Sen untuk mengambil langkah maju atas persoalan-persoalan tersebut. Kamboja perlu memperbaiki pelaksanaan pemilu di negerinya agar berjalan bebas dan adil. Untuk itu, Kamboja memerlukan sebuah komisi pemilihan umum yang

[26] Desakan tersebut disampaikan Obama dalam pertemuan dengan Hun Sen di Gedung Peace Palace, sebagaimana disampaikan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Ben Rhodes. *Kompas*, Senin (19/11/2012).

independen. Kamboja juga perlu membebaskan para tahanan politik dan mengizinkan berdirinya sebuah partai oposisi. Sebelum lawatan Obama ke Kamboja untuk menghadiri KTT Asia Timur di Phnom Penh, kelompok hak asasi manusia terkemuka, Human Right Watch (HRW) mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan berkunjung ke Phnom Penh, agar menekan Kamboja terkait dugaan pelanggaran HAM dan pembunuhan tanpa pengadilan yang terjadi.

Human Right Watch mendesak Obama agar menuntut reformasi yang sistematis dan mengakhiri kekebalan hukum bagi para pejabat yang melanggar hukum, apabila ia bertemu Perdana Menteri Hun Sen yang berkuasa sejak tahun 1985 dan berikrar akan memerintah sampai berusia 90 tahun.[27]

Lembaga hak-hak asasi manusia itu mencurigai lebih dari 300 orang tewas dalam serangan bermotif politik dalam dua dasawarsa belakangan oleh pemerintah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam satu laporan “Tell Them That I Want to Kill Them: Two Decades of Impunity di Hun Sen`s Cambodia”, Human Right Watch menuduh beberapa pejabat tinggi dan para perwira militer terlibat dalam pembunuhan yang menurut kelompok itu tidak pernah diusut secara penuh.

Kasus itu termasuk serangan granat tahun 1997 yang menewaskan 16 orang, yang menurut Human Right Watch, ada kaitannya Biro Penyelidik Federal dan satuan pengawal pribadi Hun Sen.

Pemerintah Kamboja terus mendapat desakan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan PBB, terkait dengan tindakan kekerasan terhadap para pembangkang dan kaum pemrotes.Banyak

[27] “Jika Obama tidak membicaraan tentang pelanggaran hak asasi manusia... kunjungannya akan dianggap oleh pemerintah sebagai satu persetujuan dan memperdalam rasa tidak dapat diganggu gugat,” kata Wakil Direktur HRW untuk Asia Phil Robertson kepada AFP (18/11/2012). “Tindakan keras dan pemerintah otoriter Hun Sen menghasilkan banyak pembunuhan dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang tidak dihukum,” demikian Robertson.

kasus HAM itu terkait sengketa-sengketa tanah, yang kini dianggap sebagai masalah hak azasi manusia paling mendesak negara itu.

Tahun 2012 dianggap tahun pertumpahan darah dengan adanya pembunuhan seorang aktivis lingkungan terkenal, seorang wartawan yang memberitakan pembalakan liar, dan seorang gadis berusia 14 tahun, yang ditembak mati oleh pasukan keamanan dalam kasus sengketa tanah. Sementara itu 12 senator AS dan para anggota Kongres juga mendesak Obama membicarakan tentang situasi hak asasi manusia yang memburuk di Kamboja.

Menanggapi desakan AS tersebut, Hun Sen menyampaikan, situasi politik di Kamboja yang disebutnya unik melatarbelakangi kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, Hun Sen menegaskan, Kamboja sangat ingin menjalin relasi yang lebih hangat dengan Amerika. Hun Sen mengulangi kembali permintaannya agar Amerika bersedia menghapuskan utang Kamboja sebesar 370 juta dolar AS.

DEMOKRASI KAMBOJA

Negara Kamboja memiliki 3 partai politik utama, yaitu Partai Rakyat Kamboja, Funcipec, dan Partai Sam Rainsi. Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen, adalah partai yang berkuasa saat ini. Dalam lebih dua dekade ini, Hun Sen adalah tokoh kedua di Kamboja setelah Raja Kamboja, Norodom Sihanouk.

Hun Sen adalah sosok tahan banting. Pasca Jakarta Informal Meeting (JIM) I dan JIM II yang digelar untuk menyelesaikan konflik Kamboja, Hun Sen ikut Pemilu 1993 yang diawasi oleh PBB. Dalam Pemilu itu lawan-lawan politiknya tidak kepalang tanggung. Mereka adalah para elit Kamboja yang sudah hidup mapan di AS, Australia dan negara-negara Eropa lainnya. Para elit itu kembali ke Kamboja hanya karena ingin mengalahkan Hun Sen. Namun sejarah Kamboja nampaknya sudah ditentukan, bahwa yang men-

jadi pemimpin negara itu adalah Hun Sen, pejuang yang memiliki cacat fisik akibat perang saudara.

Sekalipun secara formal yang menang pemilu 1993, Pangeran Norodom Ranariddh, tapi putera raja Kamboja ini tidak bisa memimpin. Hun Sen yang hanya menjadi penguasa nomor dua akhirnya naik menjadi Perdana Menteri penuh. Sehingga tak mengherankan, jika sampai saat ini Hun Sen masih bertahan, itu berarti dia memang pemimpin yang tahan banting.

Hun Sen menolak menyerahkan kekuasaan pada 1993, ketika Partai Funcinpec dipimpin oleh Pangeran Norodom Ranariddh menang pemilu, tetapi setuju menggalang pemerintahan koalisi dengan pangeran sebagai perdana menteri pertama dan Hun Sen sendiri sebagai perdana menteri kedua.

Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja atau CPP, menggulingkan mantan perdana menteri bersama, Pangeran Norodom Ranariddh, putra dari Pangeran Sihanouk dan saudara Raja Sihamoni dalam perang saudara singkat tapi berdarah antara dua mitra koalisi pada tahun 1997. Hun Sen dikenal sebagai sosok tangguh sekaligus misterius yang telah mendominasi politik Kamboja selama lebih dua dekade terakhir. Politisi yang kehilangan sebelah mata akibat konflik Kamboja itu, membawa Kamboja dengan cepat bangkit dari sebutan "negeri pembantai" menjadi negara anggota ASEAN yang disegani. Hun Sen telah merevisi pertumbuhan ekonomi Kamboja se-tara dengan di beberapa negara berkembang lain.[28]

Di bawah kepemimpinannya, yang sering dinilai kontroversial – seperti mengajak rakyat Kamboja bersikap anti-Thailand - Hun Sen membawa negaranya menjadi anggota ke-10 ASEAN pada Juli 1998 serta meletakkan dasar-dasar demokrasi, mengedepankan perdamaian, melakukan rekonsiliasi nasional, dan memajukan pertumbuhan ekonomi. Atas prestasi Hun Sen pula, Kam-

[28] *Suara Karya*, 7 April 2012.

boja dipercaya menjadi Ketua ASEAN pada Februari 2012, dan terakhir mampu menggelar KTT ASEAN ke-20 pada awal April 2012.[29]

Hun Sen, ayah enam anak yang menjadi perdana menteri saat berusia 33 tahun ini, sukses mengubah Kamboja dari cengkeraman rezim Pol Pot – yang telah membantai 2 juta jiwa warga - menjadi negeri damai dan stabil dalam politik dan ekonomi. Dia pula yang gigih dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemerataan hasil pertumbuhan di seluruh negeri.

Hun Sen sadar bahwa akibat perang saudara yang lama, ekonomi Kamboja terus menderita selama beberapa dekade. Rakyat Kamboja makin miskin akibat perang saudara dan konflik internal.

Di bawah Hun Sen, Kamboja terus membangun, meski pendapatan rakyat Kamboja per kapita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sebagian besar rumah tangga di pedesaan bergantung pada pertanian dan terkait sub-sektor. Beras, ikan, kayu, garmen dan karet adalah ekspor utama Kamboja, dan Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Thailand, Hong Kong, Indonesia dan Malaysia adalah mitra utama ekspor.

Pemulihan ekonomi Kamboja terus melambat secara dramatis pada tahun 1997-1998 akibat krisis ekonomi regional, kekerasan sipil, dan pertarungan politik. Investasi asing dan pariwisata juga jatuh secara drastis.

Namun sejak 1999, pertumbuhan mulai stabil. Bisa dikatakan, tahun 1999, adalah tahun pertama penuh perdamaian dalam 30 tahun, dimana kemajuan dibuat melalui reformasi ekonomi dan pertumbuhan kembali sebesar 5,0%. Meskipun banjir besar terjadi di Kamboja, PDB tumbuh 5,0% pada tahun 2000, 6,3% pada tahun 2001, dan 5,2% pada tahun 2002.

---

[29] *Suara Karya*, 7 April 2012.

Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat Kamboja, dengan meningkatnya kedatangan wisatawan dari 219.000 pada tahun 1997 menjadi 1.055.000 pada tahun 2004. Selama tahun 2003 dan 2004 laju pertumbuhan tetap stabil pada 5,0%, sedangkan pada tahun 2004 inflasi sebesar 1,7% dan ekspor sebesar $ 1,6 miliar dolar AS.

Baru pada tahun 2004, masih di bawah Hun Sen, PDB per Kapita mencapai USD $ 1900, yang menempati peringkat ke 175 (dari 232) negara. Penduduk Kamboja tidak memiliki keterampilan pendidikan dan produktif, khususnya di pedesaan yang dilanda kemiskinan dan kekurangan infrastruktur dasar. Korupsi di pemerintahan menghambat investasi asing dan keterlambatan bantuan asing. Pemerintah Kamboja mengatasi masalah ini dengan bantuan dari donor bilateral dan multilateral. Sampai tahun 2012, Hun Sen merupakan Perdana Menteri Kamboja terlama.

Hun Sen sendiri lahir dari keluarga petani di Kompang pada musim panas 1952, dan dididik oleh para biksu Buddha di Phnom Penh.

Tahun 1970, dia bergabung dengan Khmer Merah, walau belakangan disangkal, dan sembilan tahun kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Kamboja sebelum diangkat menjadi perdana menteri pada 1985.

CPP memenangkan pemilihan di tahun 1998, dan membentuk koalisi dengan Funcinpec, partai royalis Ranariddh, dengan Hun Sen sebagai perdana menteri tunggal. Pada tahun 2003 pemilu Majelis Nasional, CPP memenangkan 73 kursi dengan 47% suara,

Sam Rainsy, partai oposisi-liberal memenangkan 24 kursi (22%), dan Funcinpec memenangkan 26 kursi (21%). Sebelas wanita di antara mereka terpilih. Setelah terjadi kebuntuan Funcinpec dan Partai Sam Rainsy bersatu untuk menentang CPP, namun Funcinpec berpaling dan bergabung dengan CPP, sehingga memung-

kinkan untuk mengontrol dua pertiga kursi di Majelis Nasional yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Pada 2007, Partai Hun Sen, Cambodian People's Party (CPP), yang berkuasa selama 27 tahun, merebut di atas 70 persen kursi dewan komunal dengan menang 58 persen dari suara dalam pemilihan umum dan menjadi mayoritas di parlemen.

Para pengamat menyebutkan Hun Sen telah membawa stabilitas politik di negeri itu sejak awal 1990-an setelah era pergolakan Khmer Merah dan telah menarik minat investasi pabrik-pabrik internasional, khususnya di sektor garmen, sumber utama ekspor.

Pada 2007, Sam Rainsy, pemimpin Partai Utama Oposisi, kepada *Reuters* di Jenewa menyebutkan bahwa para petani melakukan pemberontakan melawan Hun Sen soal perebutan tanah dan pengusiran paksa, meskipun para pengamat independen ragu bahwa dia akan kehilangan kendali utama dalam kekuasaan. Pemerintahan Hun Sen sudah melakukan hal yang sama pada 1960. Dan ketika tanah dibagi-bagi, hal itu memicu ke sebuah revolusi berdarah.

Pada 2012, hasil pemilu menyebutkan partai pendukung Perdana Menteri Hun Sen kembali meraih 77,81 persen. Sedangkan satu-satunya partai pesaing, Partai Sam Rainsy (Sam Rainsy Party), meraih 21,93 persen.

Pemilu yang digelar ini untuk mengisi 57 dari 61 kursi di Senat Kamboja. Sedangkan empat kursi lainnya akan diisi lewat penunjukan oleh parlemen, Majelis Nasional, dan oleh Raja King Norodom Sihamoni.

Meski tidak meraih suara mayoritas, pada pemilu kali ini suara partai oposisi Sam Rainsy mengalami peningkatan sehingga mampu meraih 11 kursi di Senat. Pada pemilu enam tahun lalu, partai ini hanya meraih 2 kursi, Partai Rakyat Kamboja meraih 45 kursi, dan partai Funcinpec merah 10 kursi.

Sam Rainsy, pendiri partai oposisi terbesar Kamboja, menilai pencapaian sukses partainya menjadi bukti bahwa sebagian rakyat tak puas atas kinerja Hun Sen. Dan pencapaian ini sangat berarti karena partainya bertarung sendirian melawan partai penguasa.[30]

Sam Rainsy bahkan mengungkapkan tentang upaya partai berkuasa membeli suara partainya, dan ia menuduh penguasa menggunakan uang untuk pemilu.

Kamboja, yang menerapkan sistem dua kamar untuk parlemennya, mengadakan pemilu setiap enam tahun sekali untuk memilih anggota senat. Namun senat tidak berkuasa untuk mengajukan veto atau bahkan mengamendemen legislasi dari Majelis Nasional.[31]

KAMBOJA DAN ISU LAUT CHINA SELATAN

Setiap bangsa, negara dan lembaga internasional, termasuk Kamboja tanpa kecuali, harus menyesuaikan diri pada konstelasi global dan regional yang telah berubah dan yang sedang terus berubah sedemikian drastisnya. [32]

Terkait isu Laut China Selatan, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, meminta negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) memberikan prioritas utama pada penurunan ketegangan dengan Beijing

---

[30] "Meskipun sistem pemilu dan pernyataan media kembali sangat bias ke CPP (partai berkuasa), jika kita tetap di sana dan kita tidak hanya merawat kehadiran kita namun meningkatkannya dari 2 menjadi 11, ketika yang berkuasa menentang kita, kita harus sangat kuat melawannya," kata Sam Rainsy di tempat pengasingannya di Prancis, (AFP, 30 Januari 2012)

[31] Direktur Eksekutif Comfrel - pemantau pemilu Kamboja independen -, Koul Panha, mengatakan lembaganya memilih tidak menunjuk stafnya untuk berpartisipasi dalam pemilu karena dana US$ 500 ribu yang telah dikeluarkan untuk pemilu tak berguna dan tidak ada artinya. (Antara, 30/1/2012).

[32] Yanyan Mochamad Yani, "Diplomasi HAM Dalam Hubungan Internasional", *www.tabloiddiplomasi.org*, diakses 2012 pukul 22.00. Yanyan Mochamad Yani adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran.

di Laut China Selatan (LCS). Sebagai sekutu Beijing, Kamboja selalu berkonsultasi dengan China terkait isu LCS.

Pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pada Senin (9/7/2012), Hun Sen juga menekankan kepentingan semua pihak menjaga stabilitas kawasan. Sebagai seorang realis dalam politik, Hun Sen mengatakan mempersiapkan tata perilaku (*code of conduct*) dengan China di perairan yang disengketakan merupakan tujuan utama kesepuluh negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Ketegangan menyangkut klaim berbagai negara meningkat terkait pulau-pulai di LCS yang menjadi isu panas di pertemuan tersebut. Terlebih lagi saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan mitranya dari China ketika itu berencana akan hadir pada Forum Regional ASEAN (ARF), forum yang memusatkan pembicaraan pada keamanan di kawasan.

Hun Sen mengimbau para delegasi untuk fokus dalam mempersiapkan tata perilaku di perairan LCS. Tata perilaku itu akan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa wilayah, yang diklaim sekaligus oleh beberapa negara.

Bagi Kamboja, ASEAN harus menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi penggerak dalam upaya memajukan dialog dan kerja sama di bidang politik dan keamanan. "Menjaga perdamaian dan keamanan kawasan merupakan hal yang sangat penting bagi kemakmuran ASEAN," katanya. [33]

Ketegangan di LCS baru-baru ini meningkat ketika Vietnam dan Filipina menuduh Beijing telah menunjukkan perilaku agresif. Manila menjadi pihak utama yang mendorong ASEAN untuk bersatu membujuk China menerima tata perilaku di LCS. Namun, Beijing sendiri lebih memilih menyelesaikan masalah LCS secara individual dengan negara-negara pengklaim.

---

[33] *AFP*, 9 Juli 2012.

Kawasan Laut China Selatan di ASEAN yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, memiliki makna yang sangat penting bagi Amerika Serikat maupun China. Jika mereka bisa menguasai laut China Selatan, maka secara otomatis mereka menguasai jalur perdagangan ekonomi yang sangat besar dan akan menaikkan daya tawar negara mereka. Amerika yang selama ini berkuasa di sana, sekarang sudah mendapat penantang baru yaitu China. Para pemimpin ASEAN ketika menutup KTT regional di ibukota Kamboja, Phnom Penh, masih berbeda pendapat mengenai sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Dalam KKT ASEAN di Pnhon Penh,_Senin (19/11/12), para pemimpin ASEAN kembali tak bisa mengeluarkan suara bulat terhadap sengkarut Laut China Selatan. Di satu sisi Filipina ngotot batas lautnya berhimpitan dengan Laut China Selatan, di sisi lain Kamboja menyarankan agar Filipina berdiskusi dengan China.[34]

Suara tak bulat Kamboja ini sudah terdengar sejak ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang membahas Laut China Selatan pada Juli 2012. Sikap Kamboja menggagalkan kesepakatan yang biasanya mudah dicapai oleh 10 negara ASEAN.

Indikasi suara Kamboja "dibeli" oleh China, makin kentara ketika Kamboja menerima dana gratis alias hibah sebesar US$53 juta untuk pengembangan sumber daya air yang diteken beberapa waktu sebelum KTT Phnom Penh itu.

Dengan adanya perubahan-perubahann di tingkat global dan regional, Kamboja melihat munculnya aneka ragam tantangan dan sekaligus peluang baru bagi Kamboja di masa mendatang. Pada tataran praksis, politik luar negeri Kamboja sebagai suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Oleh sebab itu, eratnya relasi ber-

---

[34] "Suara Kamboja di KTT ASEAN 'Dibeli' China?," *Inilah.com*, Selasa, 20 November 2012.

dasarkan kepentingan antara Kamboja dan China terkait konflik di Laut China Selatan, mencerminkan kuatnya kepentingan strategis kedua negara itu di dalamnya.(*)

VIETNAM, KUASA DAN KEPEMIMPINAN: PERDAMAIAN ADALAH LANJUTAN DARI PEPERANGAN DENGAN CARA LAIN

NASIONALISME VIETNAM

Bangsa Heroik-Patriotik

Di Asia Tenggara, bangsa Vietnam dikenal sangat patriotik dan heroik dalam melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan, sebagaimana Indonesia. Dan semangat itu yang coba diimplementasikan pemimpin Vietnam dalam pembangunan ekonomi Hanoi.[1]

---

[1] Literatur sejarah mengungkapkan, rakyat Vietnam telah menderita di bawah kekuasaan kolonial Perancis selama hampir enam dekade ketika Jepang menyerbu bagian dari Vietnam pada tahun 1940. Itu pada tahun 1941, ketika Vietnam memiliki dua kekuatan asing menduduki mereka, bahwa komunis Vietnam pemimpin revolusioner Ho Chi Minh tiba kembali di Vietnam setelah menghabiskan tiga puluh tahun perjalanan dunia. Setelah Ho Chi Minh kembali di Vietnam, ia mendirikan sebuah markas di sebuah gua di utara Vietnam dan mendirikan Viet Minh, yang tujuannya adalah untuk membersihkan Vietnam dari penjajah Perancis dan Jepang. Setelah mendapatkan dukungan untuk perjuangan mereka di utara Vietnam, Viet Minh mengumumkan pembentukan sebuah Vietnam independen dengan pemerintah baru yang disebut Republik Demokratik Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Prancis, bagaimanapun, tidak bersedia menyerahkan koloni mereka begitu mudah dan melawan. Takut penyebaran komunisme tinggi oleh "teori domino," AS memutuskan untuk membantu Perancis mengalahkan Ho dan kaum revolusioner dengan mengirimkan bantuan militer Perancis pada tahun 1950. Dalam hal ini, AS menyatakan bahwa jika satu negara di Asia Tenggara jatuh ke komunisme maka negara-negara sekitarnya juga akan segera jatuh. Pada tahun 1954, setelah menderita kekalahan yang menentukan di Dien Bien Phu, Perancis memutuskan untuk menarik diri dari Vietnam. Pada Konferensi Jenewa 1954, sejumlah negara bertemu untuk menentukan bagaimana Perancis secara damai bisa mundur. Dalam perjanjian itu, ditetapkan gencatan senjata bagi penarikan pasukan Perancis damai dan pembagian sementara Vietnam sepanjang paralel ke-17 (yang memisahkan negara itu menjadi komunis Vietnam Utara dan non-komunis Vietnam Selatan). Selain itu, pemilihan umum yang demokratis akan diadakan pada tahun 1956 yang akan menyatukan negara di bawah satu pemerintahan. Amerika Serikat menolak untuk menyetujui pemilu, takut komunis menang. Dengan bantuan dari Amerika Serikat, Vietnam Selatan melakukan pemilu hanya di Vietnam Selatan ketimbang seluruh negeri. Setelah menghilangkan sebagian besar saingannya, Ngo

Peperangan melawan kekuatan asing itu menjadi sumber spirit, nilai-nilai dan inspirasi bagi bangsa Vietnam untuk membangun diri, memodernisasi diri dan memajukan peradaban dan kebudayaan mereka.

Para pemimpin Vietnam umumnya terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme Perancis dan Jepang sampai pertengahan abad 20, dan pada era Perang Dingin, bangsa Vietnam harus melawan pendudukan dan hegemoni AS dimana pada akhir 1969 jumlahnya pasukan AS mencapai 475.200 orang. [2]

Pada 1969 itu, dalam perang di Vietnam, prajurit Amerika yang tewas telah mencapai 40.024 orang dan korban di pihak Vietnam lebih banyak lagi. Jumlah pasukan negara-negara sekutu AS mencapai puncaknya, 70.300 orang. Sedangkan dari angkatan bersenjata Vietnam Selatan (Vietsel) sendiri 897.000, dengan korban tewas sampai saat itu telah mencapai 110.176 orang. Korban tewas di pihak AS sampai akhir 1970 telah mencapai angka 44.245, sementara Vietsel kehilangan 133.522 pasukannya yang tewas. Laporan resmi AS mengungkapkan, akhir 1971 jumlah korban tewas Amerika tercatat 45.626, sementara Vietsel 156.260. Nixon juga memerintahkan pengurangan pasukan AS di Vietnam sejalan dengan kemajuan perundingan di Paris. Sehingga pada akhir 1972 jumlahnya tinggal 24.200, sementara yang tewas sampai saat itu tercatat 45.926 personel. Sedangkan Vietsel terus melakukan mobilisasi kekuatan sehingga mencapai lebih dari satu juta orang. Pada akhir 1972 Vietsel telah kehilangan 195.847 pasukannya tewas.[3]

Dinh Diem terpilih, namun ia dibunuh pada tahun 1963 selama kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat.

[2] "Jendral Giap Ungkapkan Rahasia Kekuatan Vietnam", *Merdeka.com*, 30 April 2006.

[3] Tentang perang Vietnam ini, lihat, Bachtiar Iljas, *Perang Vietnam & Netralisasi Asia Tenggara,* (Jakarta: Penerbit Delegasi, 1964). Lihat, Perang Vietnam Berakhir, *Vivanews,*30 April 2012 diakses pukul 11.00. Lihat, "Kisah Korban Bom Napalm Vietnam 40 Tahun Kemudian", *Tempo,* 2 Juni 2012.

Menurut sumber diplomatik, pada 27 Januari 1973 perjanjian perdamaian ditandatangani di Paris oleh AS, Vietsel, Vietnam Utara, dan Vietcong, dan sebulan kemudian perjanjian perdamaian juga tercapai di Laos. Ketika pada bulan Maret 1973 penarikan pasukan Amerika dinyatakan telah selesai, dan semua markas MACV (US Military Assistance Command Vietnam) ditutup, ternyata pada waktu bersamaan pihak komunis membebaskan 590 tawanan Amerika. Tercatat pada saat itu 46.163 personel AS tewas di Vietnam, sedangkan korban di pihak Vietsel sudah mencapai lima kali lipatnya atau 223.748 yang tewas. Tahun itu semua pasukan asing lainnya, termasuk Perancis, juga telah ditarik dari Vietnam.[4]

Sejarah menyingkapkan bahwa, sekalipun Perjanjian Paris sudah diteken, namun di lapangan pasukan Vietnam Utara/VC tetap bertempur dengan pasukan Vietsel. Awal Januari 1975 Hanoi memerintahkan *offensif* besar-besaran untuk `membebaskan' Vietsel. Pasukan Vietnam Utara terang-terangan menyerbu lewat perbatasan. Bulan Maret 1975 Presiden Vietsel Nguyen Van Thieu yang berkuasa sejak 1967 memerintahkan penarikan pasukan dari kawasan dataran tinggi di Vietnam Tengah dengan tujuan untuk memusatkan pertahanan Vietsel di wilayah sekitar Saigon. Namun ternyata penarikan pasukan itu menjatuhkan moril tentara Vietsel, sehingga satu persatu wilayah kekuasaan Vietsel dengan cepat jatuh ke tangan Vietnam Utara, seperti Quang Tri, Hue, Da Nang, Qui Nhon, Nha Trang, dan lain-lainnya.

Merasa gagal memimpin perlawanan terhadap Vietcong, pada 12 April 1975 Nguyen Van Thieu mengundurkan diri, digantikan oleh Jenderal Duong Van Minh (Big Minh) sebagai presiden sementara. Big Minh didampingi Marsekal Nguyen Cao Ky yang tetap menjadi wapres. Namun penguasa baru Vietnam Selatan itu lembek dan tidak didukung rakyat. Terbukti pada 29 April 1975 tentara Vietnam Utara malah sudah mencapai Saigon. Dua kopral

[4] "Fakta Kenapa AS kalah dalam Perang Vietnam", *http://www.metrologin.com/2011/10/fakta-kenapa-as-kalah-dalam-perang.html* diakses pukul 10.00

marinir yang menjadi anggota kontingen AS di Saigon terkena pecahan roket pasukan Utara. Mereka adalah anggota militer AS terakhir yang tewas di bumi Vietnam. Pertempuran dan pertumpahan darah hebat memperebutkan kota ini praktis tidak terjadi sebagaimana dicemaskan dan ditakutkan AS sebelumnya. Tentara Vietsel sudah jatuh semangat dan morilnya. Tanggal 30 April 1975 pasukan Vietnam Utara dengan tank-tanknya mendobrak gerbang istana kepresidenan, dan tragedi perang Vietnam pun berakhir, dengan segala spirit, memori, luka dan tragedinya.[5]

Kemenangan Vietnam Utara atas Selatan ini menjiwai para pemimpin Hanoi untuk membangun dan memodernisasi bangsa dan negara. Ideologi komunisme menjadi pegangan utama dengan sokongan Soviet dan sekutunya.

Komunisme Sebagai Ideologi

Ketika Soviet dan Eropa Timur ambruk, para pemimpin Vietnam menilai bahwa para penguasa di kawasan Blok Timur itu telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi sosialis, mengalienasikan massa, dan kehilangan dukungan rakyat. Mereka terlalu lamban dan lemah dalam mengelola aspirasi rakyat, kesadaran politik masyarakat dan kemajuan ilmu-teknologi bagi kemajuan bangsa.[6]

Vietnam ingin melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan kekuatan produktif dan menyediakan barang kebutuhan pokok serta konsumsi, namun secara bertahap dan hati-hati, dan Hanoi tetap menganut sistem satu partai karena meyakini bahwa sistem ini masih memadai untuk mengelola perubahan basis sosial dan memelihara kepercayaan rakyat.[7]

---

[5] Tentang perang Vietnam ini, lihat, "30-4-1975: Perang Vietnam Berakhir", *Vivanews.com*, 30 April 2012. Lihat, Kisah Korban Bom Napalm Vietnam 40 Tahun Kemudian, *Tempo,* Sabtu, 02 Juni 2012

[6] William S Turley, "Political Renovation in Vietnam: Adaptation vs Preservation in a post-communist era", *Paper The Fairbank Centre*, Harvard University,AS, 28 Januari, 1991.

[7] Melanie Beresford, "The Political Economy of Dismantling thebureacratic centralism and Subsidy System in Vietnam", dalam Kevin Hewison, Richard

Sejak era kolonial, kelahiran kaum nasionalis kiri dan Partai Komunis Vietnam merupakan hasil jerih payah rakyat Vietnam sendiri, bukan diciptakan oleh kekuatan asing baik Soviet maupun China. Nasionalisme dan komunisme di Vietnam dalam perkembangannya memang memperoleh bantuan dan dukungan dari Rusia, yang kemudian vital bagi Hanoi dalam menghadapi rivalitas dengan China.[8]

Namun Hanoi tidak sepenuhnya bisa didikte oleh Moskwa sebab bangsa Vietnam berkarakter kuat dan berdaulat. Sehingga ketika Soviet ambruk, Vietnam secara mandiri keluar dari isolasi dan membangun hubungan dengan AS/Barat

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berambisi besar menjadi macan baru di Asia. Sebagai negara komunis dengan penduduk 91 juta orang, Vietnam semula mengandalkan nasionalisme ideologis untuk membangun masyarakatnya, namun perubahan internasional dan regional mendorong Hanoi menggeser orientasi nasionalisme ideologis menuju nasionalisme pragmatis untuk mengejar ketertinggalan perekonomiannya dibandingkan negeri tetangga di Asia. Modernisasi ekonomi Vietnam menjadi pilihan, tanpa mengesampingkan total landasan ideologi dan budaya yang mendasari kebijakan politik dan ekonominya baik ke luar maupun ke dalam negeri.

Vietnam memiliki spirit nasionalisme ekonomi yang sangat kuat, dalam arti bangsa dan negara Indo-China itu memiliki etos kerja kuat dan rasa malu kalau kalah bersaing di kawasan Asia. Vietnam ingin mengejar ketertinggalan ekonomi di kawasan Asia ini dengan modernisasi dan kebijakan pintu terbuka bercorak sosialisme pasar (*market socialism)*. Diktum Jenderal Vo Nguyen Giap bahwa "perdamaian adalah lanjutan dari peperangan dengan cara

---

Robinson and Garry Rodan, *Southeast Asia in the 1990s* (London: Allen & Unwin,1993), hal.213-236.

[8] Peter King, Vietnam the Politics of the Lesser Evil, dalam Roger Scott, *The Politics of New States* (Sydney and London: Allen & Unwin, 1970), hal. 112-123.

lain'' begitu kuat membekas di kalangan pemimpin dan masyarakat Vietnam.[9]

Vo Nguyen Giap adalah ahli strategi terkemuka dan orang yang paling banyak disebut rakyat Vietnam setelah Presiden Ho Chi Minh. Jenderal Vo Nguyen Giap dikagumi oleh semua lapisan rakyat Vietnam dan masyarakat internasional. Vo Nguyen Giap adalah tokoh besar sastra, jurnalistik dan militer Vietnam dengan semboyan: "perdamaian adalah lanjutan dari peperangan dengan cara (peralatan) lain'', dan "Hidup bersama dengan manusia dan hidup bersama dengan kehidupan".

Pandangan, spirit dan nilai-nilai dari Vo Nguyen Giap menjadi rujukan pemimpin dan elite Vietnam untuk membangun negeri itu. Pertanyaannya: bagaimana mengimplementasikan roh, nilai-nilai dan semangat Vo Nguyen Giap di Vietnam dalam konteks globalisasi ekonomi kekinian? Sampai sejauh ini, nasionalisme Vietnam masih terus berburu dan mencari.

Menghadapi globalisme yang penuh ketidakpastian, masyarakat Vietnam menoleh kembali kepada sejarahnya. Pada akhir April 1975, pasukan Vietnam Utara berhasil membuat pasukan AS dan pasukan Vietnam Selatan menyerah, kalah. Peristiwa ini ditandai dengan simbol menyedihkan bagi Amerika ketika Dubes AS untuk Vietnam Selatan terbang dengan helikopter dari atap bangunan kedutaannya. Vietnam dipaksa untuk menghadapi imperialis agresif paling kuat dan kejam. "Perang berlangsung selama lima pemerintahan dari lima presiden dan menghadapi kami dengan kekuatan tak setara," kata *Vo Nguyen Giap*. Menurut Vo Nguyen Giap, tanpa memegang senjata, Vietnam bisa berdiri dan

---

[9] Daoed Joesoef, "Perang dan Damai", dalam Hadi Soesatro, & AR Sutopo, Editor, *Strategi dan Hubungan Internasional* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1981).

menghancurkan rantau perbudakan dan kemudian mengalahkan dua imperialis besar untuk membebaskan bangsa dan rakyat.[10]

Vo Nguyen Giap meminta rakyat Vietnam melihat kembali ke dalam ribuan tahun sejarah, mempelajari kebudayaan nasional serta tradisi serta warisan kemiliteran bangsa Vietnam, sekaligus kecenderungan revolusioner Vietnam.

Menurutnya kekuatan bangsa Vietnam terletak pada pengembangan falsafah kehidupan dan kebudayaannya dengan patriotisme pada intinya, yang menghasilkan keinginan tidak menyerah untuk berjuang. Kekuatan ini telah dimanfaatkan untuk mengatasi kekerasan alam dan agresi asing. Dengan semangat itulah Vietnam membangun dirinya.

Sampai 2008, pendapatan per kapita Vietnam mendekati 3.000 dollar AS. Pertumbuhan ekonomi pernah mencapai hampir sembilan persen. Hanoi hanya kalah dari China yang selama dua dekade mencapai lebih tiga belas persen. Inilah yang membuat Vietnam mempunyai wajah baru yang amat mencengangkan.Vietnam mulai masuk ke wilayah industri.

Industri semen tumbuh pesat, begitu pula mainan anak-anak, tekstil, pariwisata. Tambang batubara dan minyak bumi tengah digalakkan. Pertanian, yang menjadi basis ekonomi Vietnam selama ribuan tahun, masih dikembangkan dengan baik. Ekspor beras Vietnam terutama dikirim ke Indonesia.[11]

EKONOMI VIETNAM

Macan Baru Asia?

Vietnam berusaha berpacu dengan waktu menjadi macan baru di Asia. Investasi asing mencapai US$100 miliar sampai tahun 2008.

---

[10] "Jendral Giap Ungkapkan Rahasia Kekuatan Vietnam", *Merdeka.com*, 30 April 2006 diakses pukul 22.00. Tentang perang Vietnam, lihat, Bachtiar Iljas, *Perang Vietnam & Netralisasi Asia Tenggara*.

[11] Abun Sanda, "Inilah Wajah Baru Vietnam", *Kompas,* Kamis, 30 Agustus 2012. Dalam hal impor beras, Indonesia sendiri kini tampaknya lebih berkonsentrasi pada impor beras asal Vietnam dibanding beras Thailand

Hanoi berjanji pada tahun 2008 itu bahwa Vietnam akan memperbaiki infrastruktur, HAM, dan iklim investasi.[12]

Salah satu hal yang bisa mengganjal alur investasi asing ke Vietnam memang catatan hak asasi manusia. Tapi, Vietnam mencoba memolesnya. Mereka bahkan bekerja sama dengan Amerika Serikat, musuh mereka saat perang, untuk memperkuat investasi, hubungan perdagangan antara rakyat dengan rakyat.

Vietnam menjamin hak asasi manusia akan membaik pada tahun ini. Akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007. Inilah yang akan dilakukan pemerintah, yang berusaha membuat rakyatnya hidup dengan tenang. Duta Besar Vietnam di Washington, Le Cong Phung menegaskan Hanoi bertekad meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan AS.

Data riset Profesor Nguyen Minh Hoa dan Son Than Tung, Msc. dari Universitas Sains Sosial Kemanusiaan di Ho Chi Minh memaparkan sebagian besar proyek investasi asing di sana. Tahun 2007, Ho Chi Minh memiliki 34,9 persen investasi sektor industri dan 58,8 persen sektor jasa dari seluruh investasi asing di Vietnam

Investasi yang membanjiri Vietnam ini tentu berdampak baik dari segi ekonomi. Standar hidup masyarakat meningkat dengan naiknya GDP per kapita, dari US$1,36 menjadi US$1,8 di tahun 2004. Vietnam juga menunjukkan peningkatan pada Human Development Index (HDI) tahun 2007/2008 versi UNDP. Negara ini menduduki indeks ke-105, dua peringkat di atas Indonesia.

Soal relasi AS-Vietnam, Washington mencabut embargo perdagangan tahun 1994 dan memulihkan hubungan diplomatik penuh pada tahun berikutnya. Itu berarti dua dasawarsa setelah jatuhnya Saigon dalam perang Vietnam. Jumlah transaksi dagang antarnegara itu pun naik menjadi sekitar US$10 miliar tahun 2007, dengan investasi AS di Vietnam senilai sekitar US$ 5,6 miliar.

---

[12] Herdi Sahrasad, "Vietnam, Macan Baru Asia", opini, *Suara Pembaruan*, 9 April 2008.

Hubungan Vietnam dan AS memang terus membaik. Saat ini, sekitar 6.000 mahasiswa Vietnam mengenyam pendidikan di AS. Beberapa tahun ke depan, jangan kaget kalau jumlah itu mungkin meningkat menjadi 10.000 orang.

Kini, 60 persen dari 84 juta warga Vietnam berusia di bawah 30 tahun. Saat ini, 96 persen warganya tidak buta huruf. Tak heran, perkembangan ekonominya tercepat kedua di Asia.

Vietnam juga mempunyai posisi yang bagus untuk menjadi negara dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang menakjubkan. Vietnam telah merambah dunia informasi begitu cepatnya.

Demi memerangi pembajakan di negerinya, pemerintah Vietnam menandatangani perjanjian kerjasama dalam menggunakan *software* legal dengan raksasa Microsoft.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung dan Chief Executive Officer Microsoft Steve Ballmer dalam kunjungan satu harinya ke negeri komunis ini.

AFP mencatat, kedua pihak menyatakan kesepakatan ini akan membuat pemerintah Vietnam semakin menegakkan *intellectual property* (IP) yang berpengaruh pada pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Situasi dan perkembangan di Vietnam itu jelas mengancam ekonomi Indonesia. Gabungan Elektronik Indonesia (Gabel) yang dipimpin Rahmat Gobel meyakini, tambahan investasi baru dari sejumlah prinsipal elektronik asing senilai Rp 3,4 triliun (US$377 juta) pada 2007-2010, kian terancam hengkang dari Indonesia, yang sebagiannya lari ke Vietnam.

Kerusakan Lingkungan

Salah satu dampak pembangunan ekonomi di Vietnam adalah kerusakan lingkungan. Perkembangan ekonomi Vietnam selama ini ternyata berdampak buruk pada ekologi dan lingkungan. Hasil

sektor agrikultur di Ho Chi Minh menyusut hingga tinggal 6,3 persen. Sekalipun penggunaan lahan agrikultur di kota tersebut masih tergolong besar. Ho Chi Minh masih memiliki 58,94 persen dari seluruh lahan kota yang dimanfaatkan bagi agrikultur.

Banjir, misalnya, menjadi salah satu biang keladi buruknya hasil agrikultur Ho Chi Minh. Kota ini secara geografis memang berada di daratan yang rendah. Rata-rata tanah Ho Chi Minh berada 19 meter di bawah permukaan laut. Bahkan daerah urban sekalipun rata-rata berada 2 meter di bawah permukaan laut. Dengan 7955 kilometer kanal dan sungai, sekitar 16 persen Ho Chi Minh berupa jaringan air. Sekitar 120 area kota terancam banjir setiap kali curah hujan meningkat.

Riset IDS Climate Change and Disasters Group memaparkan perubahan iklim membuat cuaca Vietnam semakin sulit diprediksi. Tingkat badai pun bertambah di negara tersebut. kerugian akibat badai tahun 2006 di Vietnam hampir mencapai US$1,2 miliar. Riset Bank Dunia mengungkap fakta permukaan air laut naik 1 meter di daerah Vietnam. Akibatnya sekitar 27 persen habitat alam, 33 persen daerah konservasi, dan 23 persen area biodiversitas negara ini ikut terancam. Peningkatan permukaan air laut juga mengancam 12,2 persen lahan subur Vietnam, dimana sekitar 23 persen populasi penduduk tinggal di sana.

Selama ini pemerintah dan penduduk memang kurang memperhatikan segi pelestarian alam. Partisipasi masyarakat melestarikan alam masih minim. Terutama penduduk miskin kerap tak memiliki akses informasi atas apa yang sedang terjadi, meski mereka menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Para petani tradisional Vietnam hanya tahu alam kini sulit diprediksi. Badai juga kerap datang menghancurkan pemukiman dan lahan pencaharian mereka.

Adaptasi Lingkungan

Untuk menghadapi masalah kerusakan lingkungan di Vietnam, langkah pertama adalah adaptasi lingkungan yang dimulai tahun 2006. Pemerintah mulai mendirikan Komite Kota Penanganan Banjir dan Badai di Ho Chi Minh. Komite ini berupaya menangani dampak banjir tahun 2006 sekaligus mempersiapkan penduduk menghadapi bencana 2007. Partisipasi lokal diwujudkan lewat komunikasi *online* dengan manajer-manajer lingkungan yang ada di kelompok masyarakat. Secara regular pemerintah turun ke lapangan berusaha mewawancarai perwakilan rakyat. Berupaya mencari tahu dampak banjir yang sebenarnya di masyarakat.

Namun hingga kini strategi adaptasi Vietnam masih bersifat reaktif daripada proaktif. Tindakan pencegahan baru diambil setelah banjir atau badai melanda. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menghadapi pencemaran, Department of Natural Resources and Environment (DONRE) Vietnam mengeluarkan berbagai peraturan mengatur manajemen limbah padat kota, yang menawarkan monitoring polusi industri dan konstruksi. DONRE hadir dengan inspeksi limbah medis, limbah impor dan polusi di daerah industri.

Di tingkat internasional, Pemerintah Vietnam setuju meratifikasi rencana implementasi Protokol Kyoto. Rencana ini masuk dalam pengawasan UNFCCC dari 2007-2010. Vietnam mengadaptasi *Clean Development Mechanism*(CDM). Lewat CDM ini Vietnam berusaha menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing. Lewat penawaran sistem adaptasi, negara ini berusaha menenangkan kekhawatiran investor yang berniat kabur gara-gara Vietnam rentan terkena bencana.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kemajuan Vietnam sebagai macan baru Asia mengharuskan negeri itu mengelola lingkungannya, dan tidak pasrah pada bencana. Agenda

pembangunan berwawasan lingkungan kini menjadi prioritas pembangunan di Vietnam.

Resesi Ekonomi

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1990-an, tumbuh kelas menengah baru di Vietnam. Pada awalnya toserba atau supermarket di Vietnam hanya terjangkau oleh kalangan kaya. Namun itu berubah setelah program reformasi 1986 yang bermoto "Doi Moi," atau pembaruan. Sistem ekonomi terpimpin yang sentralistis ditanggalkan, diganti dengan sistem yang lebih luwes dan terbuka. Keleluasaan yang muncul mendorong kemajuan.[13]

"Dalam proses reformasi itulah lahir kelas menengah yang baru," ungkap Gerhard Will, pakar Vietnam dari lembaga Jerman untuk urusan Keamanan dan Internasional, SWP.

Tapi pada 2011-2012, krisis ekonomi melanda Vietnam, dan kegagalan teknokrasi akibat korupsi dan inefisiensi membayangi negeri itu.

Resesi ekonomi ini terjadi karena pemerintah kesulitan untuk mereformasi sektor perbankan yang terlilit utang serta perusahaan negara yang kurang efisien. Donor-donor utama memberi peringatan keras ke Hanoi .

Reformasi Vietnam dinilai amat lamban, bahkan menghadapi perlawanan dari dalam negeri, terutama dari kelompok elite bercokol. Keajaiban ekonomi Vietnam yang tumbuh 7% per tahun telah berlalu, dan Vietnam kini menghadapi laju inflas tinggi, beban utang meninggi dan kekhawatiran akan ambruknya ekonomi negeri Paman Ho itu. Kemunduran ekonomi, pertarungan politik dan sikap saling mengintai satu sama lain di kalangan elite politik, mewarnai negeri itu. [14]

---

[13] "Vietnam 'Harimau Asia' di Tepi Jurang", *Deutsche Welle*, 27/11/12

[14] Loc Doan, "Despite Slowing Economy, Vietnam Resists Reforms", *World Politics Review*, 27 September 2012.

Sementara korupsi oleh penguasa dan politisi tidak hanya meng-garuk tanah rakyat, namun juga menghisap kehidupan masya-rakatnya. Kondisi pekerja yang memprihatinkan, protes-protes masyarakat dan buruh yang tak dipedulikan, semua itu membu-tuhkan perubahan sikap pemerintah Vietnam dan memerlukan kesungguhan pemimpin Hanoi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.[15]

Bertahun lamanya, Vietnam dianggap sebagai negara yang pere-konomiannya sedang meninggi, *booming*. Namun salah urus di jajaran pemerintahan dan krisis ekonomi perlahan membawa kehancuran.[16]

Dalam pertemuan di Hanoi yang dihadiri Perdana Menteri Viet-nam Nguyen Tan Dung, negara-negara donor menjanjikan 6,5 mi-liar dolar AS untuk agenda pembangunan Vietnam pada tahun 2013. Jumlah tersebut berkurang dari tawaran tahun-tahun sebe-lumnya - para donor menjanjikan 7,3 juta Dolar untuk tahun 2012 - namun tetap disambut baik oleh Vietnam.

Dua negara donor terbesar bagi Vietnam untuk tahun 2013 adalah Jepang yang menjanjikan 2,6 miliar dolar AS, dan Uni Eropa yang menyediakan 963 juta dolar AS. Negara-negara donor terutama menekankan pentingnya mengatasi pinjaman-pinjaman negara yang bermasalah, meningkatkan tata usaha korporat pada peru-sahaan-perusahaan dan bank-bank yang dimiliki negara, serta memperbaiki tingkat transparansi dan pengungkapan pada sektor negara.

Setelah satu dekade mengalami liberalisasi perbankan yang begi-tu cepat dan berantakan, Vietnam kini memiliki 42 bank domes-tik. Kebanyakan dibebani pinjaman bermasalah (beracun) dari perusahaan-perusahaan milik negara yang kurang efisien dan ti-dak dikelola dengan baik. Tahun 2011, pemerintah Vietnam

---

[15] Benedict J. Tria Kerkvliet, "Reconsidering Vietnam's political system", *East Asia Forum*, November 26th, 2012.

[16] Kompas, 27/11/2012.

mengumumkan rencana restrukturisasi yang agresif namun implementasinya terus tertunda. Pada tahun 2013 dan selanjutnya, tantangan-tantangan berat harus dapat ditangani Hanoi.[17]

Negara komunis tersebut – yang pernah disebut sebagai "macan ekonomi" Asia - tengah mengalami tren pelambatan pertumbuhan ekonomi seraya bergulat dengan inflasi yang kembali menjulang, investasi asing yang terus merosot serta kekhawatiran dampak buruk utang 'najis' dan salah urus ekonomi.

Perekonomian Vietnam semakin kehilangan dinamisme dan hambatan-hambatan struktural semakin mencekik sehingga menyeret tingkat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Vietnam juga beresiko masuk ke dalam jebakan pendapatan kelas menengah seperti Indonesia dan makin berkurangnya daya saing Vietnam di Asia. Hanoi hanya mengharapkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen pada tahun 2012 - laju terlambat dalam 13 tahun terakhir. Seperti Indonesia, Vietnam harus menargetkan pendapatan kelas atas [18]

Sebenarnya Vietnam sudah belajar dari krisis ekonomi Asia tahun 1997, yang telah membangkitkan kesadaran kepemimpinan di Vietnam untuk berubah. Namun dalam krisis 2011-2012 ini, Vietnam menghadapi kesulitan untuk melakukan penyesuaian kreatif atas ekonomi global dan regional. Nasionalisme ideologis (Komunis) yang telah dianut Hanoi, terbukti tidak cukup dan tidak efektif untuk menjawab tuntutan dan masalah regional maupun global. [19]

---

[17] Sanjay Karla, Wakil Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Vietnam menegaskan hal itu di Hanoi akhir 2012.

[18] Hal itu dikatakan Direktur Bank Dunia untuk Vietnam, Victoria Kwakwa, pada sebuah pertemuan tahunan negara-negara donor. Lihat, "Vietnam "Harimau Asia" di Tepi Jurang", *Deutsche Welle*, 11/12/12

[19] Pemimpin Vietnam menyadari beberapa hal substansial dalam percaturan global: Pertama, menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar-masalah global di berbagai bidang seiring dengan semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan segala implikasinya, baik yang positif

Vietnam merasakan bahwa kebutuhan mengembangkan fleksibilitas kebijakan telah menempatkan kepemimpinan pada posisi dilematis antara mempertahankan legitimasi negara berbasis ideologi atau membangun ekonomi berbasis pasar. Dalam kondisi mendapat tekanan-tekanan regional dan global yang menuntut kecerdasan dan kewaspadaan menghadapi kompleksitas permasalahan menyangkut pilihan-pilihan kebijakan, kepemimpinan Vietnam membulatkan tekad Hanoi untuk tetap mempertahankan fondasi politik *Doi Moi* tahun 1986, sambil memperbarui karakternya supaya bisa menyelenggarakan percepatan pembangunan dalam abad 21. Sejak 1986 politik pragmatisme menjadi basis perubahan kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri Vietnam. [20]

Akademisi Michael Leifer memberikan pengertian pragmatisme yang menjadi karakter politik Vietnam sebagai kebijakan yang menyesuaikan perkembangan baru di lingkungan regional dan global. Kebijakan luar negeri tidak lagi merupakan *resultante* tuntutan ideologi. Kepentingan pragmatis dan praktis menggantikan kepentingan ideologis dimana titik terendah peran ideologi terjadi awal 1990-an ketika Soviet ambruk menyusul kegagalan *glastnost* dan *perestroika*. Hanoi meneguhkan suatu kebijakan ekonomi-politik yang mengutamakan kepentingan nasional, dengan menyesuaikan diri pada perkembangan dan perubahan di tingkat

---

maupun negatif. Kedua, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata-hubungan antar negara. Ketiga, menguatnya isu-isu baru dalam agenda internasional, seperti masalah HAM, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, "good governance", lingkungan hidup, dan lain-lain.

[20] Di sini, pengertian pragmatisme tidak hanya bisa dipakai untuk menjelaskan karakter kebijakan luar negeri Vietnam saja, tetapi juga dipakai untuk menjelaskan karakter kebijakan ekonominya. Hal ini karena politik domestik berideologi Komunis tidak mampu menyelesaikan permasalahan akut ekonomi pascareunifikasi Vietnam utara dan selatan pada 1975. Motivasi ideologi tidak mampu menggerakkan kekuatan produktif di masyarakat. Masyarakat di bagian selatan yang terbiasa dengan ekonomi pasar bebas mengalami kemandekan dan stagnasi. Sedangkan masyarakat di bagian utara mengalami kekakuan sistem ekonomi kolektif. Secara keseluruhan, ekonomi berbasis ideologi telah menghasilkan perilaku eksploitatif dari elite-elite partai dan birokrasi. Akibatnya, kemiskinan semakin meluas dan ketimpangan ekonomi serta ketidakadilan sosial menjadi tidak terelakkan

regional maupun global menyusul ambruknya Uni Soviet yang menjadi penyokong utama kebijakan luar negeri Hanoi. Kini perlahan tapi pasti, kebijakan pragmatis mengesampingkan ideologi yang kaku dan dogmatis. [21]

Dengan kebijakan yang pragmatis, paket reformasi Hanoi telah berhasil mempercepat pertumbuhan dengan rata-rata 8 persen selama 1990-1997. Akhirnya, Vietnam mulai tampak bisa mengatasi sebagian permasalahan kemiskinan dan bahkan muncul menjadi pengekspor beras terbesar kedua setelah Thailand. Tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar 7 persen selama 2000-2005. Seteah masa krisis ekonomi Asia, tingkat pertumbuhan ini merupakan angka tertinggi dibanding negara-negara di wilayah Asia Timur, termasuk Asia Tenggara. Orientasi pasar juga telah membuat pendapatan perkapita naik dari US$ 220 pada 1994 menjadi US$ 832 pada 2007. Kepemimpinan politik di Vietnam pada 2001 menyadari pentingnya peran pasar dalam pembangunan, dibanding pada masa menjelang akhir 1980-an. Di sini, kepemimpinan pragmatik mulai terasa menjadi kebutuhan bagi pembangunan ekonomi Vietnam. Apalagi, hasil pertanian pada akhir 1970-an sangat merosot dan Vietnam terpaksa menjadi pengimpor besar.

Pada Desember 1997, Partai Komunis Vietnam menyetujui restrukturisasi bertahap badan-badan usaha milik negara dan pengembangan ekonomi pasar sosialis, tetapi tidak mengurangi dominasi mereka. Selain itu, partai juga menyetujui pengembangan usaha swasta di beberapa bidang dengan tetap menjaga akuntabilitas keungan dan otonomi badan usaha milik negara, dan menetapkan reformasi perkreditan, konsesi pajak, hak guna usaha di atas tanah badan usaha milik negara, perbankan, pembendaharaan, transportasi dan lisensi.[22] Sampai 2008, capaian ekonomi

---

[21] Michael Leifer, "Vietnam's Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Coping with Vulnerability," dalam Robert S. Ross, ed., *East Asia in Transition* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995), h. 267.

[22] Derek Tonku, "Vietnam Market Reform and Ideology", *Asian Affairs,* Vol. 28, no.2 (1997), h. 188.

Vietnam mencengangkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, sekitar 7 persen per tahun. Namun kelesuan ekonomi sejak 2011 kian tak terelakkan. Vietnam tampak goyah.

Krisis ekonomi global sejak 2007 sampai 2012, menimbulkan keraguan para akademisi akan masa depan di Vietnam. Ekonom Adam Fforde, dari Universitas Victoria di Melbourne, Australia, menilai serius krisis ekonomi Vietnam.

Angka inflasi 7% yang tercatat pada Oktober 2012 menciutkan penghasilan rakyat Vietnam. Produk domestik bruto tumbuh 5,03 persen tahun ini, yang artinya turun dari 5,89 persen dibanding tahun 2011. Begitu pun investasi asing turun 14 persen pada tahun 2012. Harga properti jatuh, sehingga banyak penduduk yang membayar kredit lebih besar dari nilai rumahnya saat dibeli. Selain itu biaya pendidikan dan kesehatan juga terus melejit.

Pengeluaran yang sudah membengkak itu tidak sebanding dengan nilai produk yang diterima, sementara praktek korupsi meluas dalam bidang kesehatan dan banyak penyelewengan di bidang pendidikan. Para analis menekankan, perlunya reformasi sistem pendidikan, mengingat gelar akademis sering diperjualbelikan atau dipinjamkan kepada politisi dan pengikut partai.[23]

Gejolak ekonomi Vietnam tak pelak lagi memukul keras kaum kelas menengah baru. Seakan kaki yang belum terjejak kokoh itu mulai terseok lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keleluasaan yang berhasil diraih kelas menengah mulai terkikis habis. Kaum kelas menengah mengalami cukup banyak pembatasan di tingkat politik dan ekonomi.[24]

Hanoi menghadapi maraknya korupsi, inefesiensi dan kerugian besar dalam perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai negara (BUMN) seperti perusahaan pembuat kapal Vinashin. Ho Chi

---

[23] "Vietnam: Reformasi Ekonomi atau Stagnasi", *http://www.dw.de/vietnam-reformasi-ekonomi-atau-stagnasi*.

[24] *Deutsche Welle*, 27/11/12

Minh City memang masih hiruk-pikuk dengan isu energi, dibanjiri banyak turis dan diwarnai dengan macetnya lalu-lintas – semua tentunya menunjukkan vitalitas ekonomi kota itu. Angkatan mudanya sulit mendapat pekerjaan, hampir 20% perusahaan kecil dan menengahnya sudah menghentikan bisnis mereka selama setahun terakhir, dan berbagai proyek infrastruktur kota mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan.[25]

Media menyingkapkan, kota-kota besar di Vietnam kini berada dalam keadaan lesu atau nyaris lumpuh bahkan hancur. Ratusan lokasi pembangunan yang terbengkalai menjadi pemandangan umum yang mengindikasikan dengan jelas tentang sakitnya ekonomi negara itu. Vietnam benar-benar sedang menghadapi kehancuran atau kegagalan total ekonomi.[26]

Seorang pejabat senior Partai Komunis Vietnam membandingkan keadaan ekonomi negara itu dengan keterpurukan pasar 15 tahun lalu yang menghancurkan ekonomi di banyak negara Asia

"Saya bisa mengatakan kondisi Vietnam kini nyaris sama dengan krisis di Thailand tahun 1997," kata Hua Ngoc Thuan, wakil ketua Komite Rakyat Ho Chi Minh City, lembaga eksekutif tinggi kota itu. Para investor properti menetapkan harga setinggi mungkin. Mereka membeli untuk berspekulasi, bukan untuk pemanfaatannya.[27]

Sesungguhnya, masalah ekonomi Vietnam saat ini memang tidak separah krisis keuangan 1997 - ekonominya masih bisa tumbuh sekitar 4% - namun daftar kesulitan yang dihadapi negara itu terus bertambah di tengah ekspektasi rakyat yang begitu tinggi.

Dalam kaitan ini, penahanan salah seorang pengusaha paling kaya Vietnam pekan ini, Nguyen Duc Kien, membuat indeks pasar saham negara itu anjlok 4,8%, suatu penurunan paling besar da-

---

[25] *Deutsche Welle*, 27/11/12

[26] "Vietnam Akan Hadapi Kehancuran Ekonomi", *www.analisadaily.com,* 27/8/2012, diakses pukul 11.00

[27] *Deutsche Welle*, 27/11/12

lam empat tahun. Tuduhan terhadap Kien sangat tidak jelas, sementara media pemerintah menuduhnya melakukan kegiatan bisnis ilegal.

Cara penanganan kasus yang tidak transparan memperparah citra negara yang sudah buruk itu. Usaha pemersatuan antara kepemimpinan Vietnam yang penuh rahasia dan ekonomi kapitalis membuat suram prospek pemulihan di negara berpenduduk 91 juta jiwa itu.

Investor menjadi skeptis terhadap pengaturan ekonomi pemerintah dan mempertanyakan keabsahan statistik mereka. Bank sentral negara itu mengatakan, satu dari 10 peminjam di dalam sistem perbankannya tidak meneruskan pembayaran mereka, namun lembaga pemeringkat Fitch Ratings mensinyalir persentase kredit macet jauh lebih tinggi.

Ekonom terkemuka dan mantan pejabat tinggi di dalam sebuah organisasi riset pemerintah, Le Dang Doanh, menyatakan kekhawatirannya tentang *timing* masalah yang dihadapi Vietnam, yang terjadi ketika ekonomi global terpengaruh oleh krisis hutang dan dilema keberadaan mata uang euro di Eropa, yang juga berimbas kepada ekonomi Vietnam, juga terkait sangat kritisnya keadaan ekonomi di AS.

Vietnam membutuhkan lebih dari sekedar suntikan uang dengan suku bunga rendah. Perusahaan raksasa pemerintah yang tidak efisien seperti Vinashin yang berkembang semaunya dalam dunia bisnis dengan pengoperasian yang sangat tidak berkualifikasi, sebaiknya dibubarkan atau dibatasi saja. “Kini saatnya yang baik untuk melakukan langkah kreatif,” kata Doanh menunjuk kepada konsep perusahaan-perusahaan yang ada yang digantikan dengan para pesaingnya yang jauh lebih inovatif.[28]

---

[28] Laporan Kompas, AFP dan Reuters 2-29 Agutus 2012

Masih Ada Harapan

Meski Didera krisis ekonomi, Vietnam tetap punya harapan. Pemerintah Hanoi mengakui, tahun 2011 adalah satu tahun yang sulit bagi perekonomian Vietnam, tetapi adalah juga tahun yang mencatat keberhasilan yang dicapai pemerintah Vietnam dalam menangani, menata-laksanakan ekonomi makro dan mengekang inflasi. Dengan kebijakan moneter yang ketat dan hati-hati, tata laksana yang fleksible, dana kredit diprioritaskan untuk produksi pertanian, ekspor, industri penunjang, badan usaha kecil dan menengah, pasar valuta asing, cadangan valuta asing dan neraca pembayaran internasional menjadi baik. Surplus neraca umum mencapai 3,1 miliar dolar AS. Defisit anggaran keuangan sepanjang tahun turun menjadi hanya tinggal 4,9% GDP, lebih rendah terbanding dengan rencana semula yaitu 5,3 persen. Modal investasi publik mengurangi prosentasi investasi sosial dari 34,6 persen GDP menjadi hanya tinggal 31,2 persen pada tahun 2011.

Tomoyuki Kimura, Direktor Nasional Bank Pembangunan Asia (ADB) di Vietnam memberitahukan bahwa ADB bersama dengan wakil pemerintah, dan semua organisasi keuangan menegaskan dukungan terhadap strategi perkembangan sosial-ekonomi Vietnam dalam tahap yang akan datang, khususnya restrukturisasi perekonomian dengan tiga titik berat ialah restrukturisasi investasi publik, restrukturisasi badan usaha milik negara dan restrukturisasi sistim perbankan.[29]

Meski Vietnam relatif pendatang baru di dunia perminyakan, tapi sekarang sudah menjadi nomer tiga di ASEAN, menghasilkan lebih 400.000 barrel per hari. Guru Petroleum untuk orang Vietnam yang pertama kali adalah Pertamina. Maka, berbondong-bondonglah karyawan Petroviet datang ke Jakarta, ke kantor Pertamina di jalan Medan Merdeka Timur. Mereka belajar dari Per-

---

[29] "Vietnam sedang melaksanakan reformasi perekonomian yang tepat arah untuk berkembang", *http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Vietnam-sedang-melaksanakan-reformasi-perekonomian-yang-tepat-arah-untuk-berkembang/ 61083.vov*

tamina bagaimana mengelola perusahaan minyak. Magang untuk orang Petroviet bukan hanya di manajemen, tetapi menyeluruh, dari mulai keuangan, exploration, refinery dan distribusi. Namun akhir-akhir ini, Petroviet sudah berpaling muka, akhir-akhir ini banyak orang Petroviet yang berguru ke Petronas Malaysia, yang lebih maju dan profesional.

Walau masih disebut negeri miskin, *'poor country'* namun GDP Vietnam pertahun di tahun 2009 mencapai USD 280 milyar at PPP (purchasing power parity) Kalau dihitung cara lain hanyalah USD 70,9 miliar nominal. Pendapatan per kapita USD 828, dimana penduduk Vietnam 86,1 juta. Hasil pertanian biji jambu monyet terbesar didunia, sharenya 1/3 dari dunia. Hasil persawahan di Vietnam yang ditanami padi menghasilkan padi, sekarang nomer dua di dunia setelah Thailand. Share GDP hasil pertanian mencapai 20% dari GDP total.

KRISIS POLITIK

Kelesuan ekonomi Vietnam 2012 tak lepas dari kondisi lesunya ekonomi tahun 2011, dimana Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung yang terpilih kembali September 2011, tak berhasil dan menghadapi pemanggilan parlemen yang dikuasai komunis dan didesak untuk mengundurkan diri atas kesalahannya dalam mengurus ekonomi yang mengalami krisis.

Tindakan itu merupakan pertama kali seorang Perdana Menteri Vietnam secara terbuka didesak untuk mundur oleh anggota Majelis Nasional yang memiliki 500 anggota. Kalangan parlemen menyatakan, saatnya untuk memikul tanggung jawab bukan hanya meminta maaf.

Anggota parlemen Trung Quoc dan Nguyen Ba Thuyen, mendesak Perdana Menteri Tan Dung mundur, namun Dung terlihat tenang. Parlemen mendesak Dung memulai kemajuan pemerintah ke arah satu budaya pengunduran diri.

Kegagalan Dung untuk menetapkan satu rencana mengatasi krisis ekonomi negara telah menghancurkan kepercayaan publik dan parlemen pada kepemimpinan Komunis.[30]

Beruntung, Dung terhindar dari hukuman pada satu pertemuan penting Partai Komunis 2011 menyangkut sejumlah skandal yang menodai kepemimpinan negara itu. Tetapi Dung tetap meminta maaf atas korupsi, inefesiensi dan kerugian besar dalam perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai negara seperti perusahaan pembuat kapal Vinashin.

Menanggapi kecaman publik yang jarang terjadi di Vietnam ini, Tan Dung menyatakan ia tidak pernah berusaha untuk menduduki jabatan tinggi bagi dirinya sendiri.

"Partai menugaskan saya untuk melanjutkan tugas saya sebagai perdana menteri," katanya seraya menyatakan setiap tugas yang diberikan oleh partai dan negara. Majelis Nasional pada 2011 mempertimbangkan satu resolusi yang dapat memaksa para pemimpin senior untuk memenangkan suara kepercayaan untuk tetap memangku jabatan, tetapi tidak jelas apakah keputusan itu hanya simbolis.

Tan Dung, mantan gubernur Bank Sentral yang masa jabatan lima tahun keduanya disetujui oleh parlemen yang dikuasai komunis September 2011, merupakan perdana menteri yang paling berpengaruh di negara itu, meski prestasi ekonominya terus merosot. Sehari sebelumnya, saingannya, Truong Tan Sang, orang kedua Partai Komunis dipilih sebagai presiden.

Sebagian pengamat mengatakan bahwa meskipun kecil kemungkinannya bagi kepemimpinan baru untuk bisa mendorong revolusi dalam sistem politik satu partai di Vietnam, persaingan antara keduanya tersebut mungkin menandai perubahan-perubahan penting.

---

[30] Para pemimpin Vietnam menghadapi kesulitan untuk memecahkan krisis ekonomi, meski secara kolegial mereka bekerja keras untuk itu.

Di permukaan, persaingan untuk jabatan pemimpin di Vietnam yang berpaham komunis tidak terdengar. Hanya ada satu calon untuk setiap jabatan utama. Hoang Tu Duy, anggota kelompok pro-demokrasi terlarang Viet Tan, mengatakan bahwa walaupun pemilu itu hanya sandiwara, pemerintah harus mengadakannya agar absah.

Yang menarik adalah rezim harus mengadakan sandiwara pemilu agar nampak seperti pemerintahan normal yang berfungsi berdasarkan hukum dengan para pemimpin yang terpilih. Mereka melakukan ini karena harus bekerjasama dengan dunia luar, dengan investor dan juga untuk memuaskan rakyatnya sendiri.

Menurut Duy, perbedaan antara politik nyata Vietnam dengan wajah publiknya memberi tekanan kepada Majelis Nasional agar mulai bertindak sebagai badan rakyat tertinggi, seperti dinyatakan dalam konstitusi. Dalam hal ini, Martin Gainsborough dari Universitas Bristol mengatakan tidak realistis memberlakukan nilai-nilai liberal pada proses pemilu itu. Gainborough mengatakan mereka yang memegang jabatan dipandang sebagai orang-orang berbakat, dari keluarga baik-baik dengan latar belakang yang baik dan mereka tidak perlu membuktikan itu di depan umum.

“Parlemen dapat dinilai dengan cara yang sama, yaitu bahwa anggota-anggotanya secara resmi ditegaskan sebagai orang-orang berkualitas dan bukan pemenang dalam persaingan politik pemilu di mana calon terbaiklah yang menang,” paparnya. Liberalisasi politik ini menandai tergerusnya ‘sakralitas’ ideologi dan tumbuhnya rasionalisasi politik seiring modernisasi. Komunisme Vietnam menyesuaikan diri dengan arus modernisasi dan liberalisasi karena Vietnam tak ingin tertinggal dan terbelakang meski sistem ekonomi dan politiknya berjalan pincang.

Selagi inflasi mencapai 22 persen dari tahun ke tahun dan masyarakat internasional terus menyaksikan pelaksanaan HAM Viet-

nam yang buruk, para politisi memiliki banyak pekerjaan untuk lima tahun ke depan.

Parlemen Vietnam yang dikuasai Partai Komunis memutuskan bahwa pemimpin terpilih, termasuk presiden dan perdana menteri, menjadi subjek penilaian tahunan. Berdasarkan resolusi yang diumumkan Kamis 22 November 2012, maka mulai tahun 2013 para pemimpin itu - antara lain ketua Mahkamah Agung - akan menghadapi pemungutan suara untuk mosi percaya dari 500 anggota Majelis Nasional.

Jika dalam dua tahun berturut-turut mereka tidak berhasil mengumpulkan 50% suara yang mendukung, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pemungutan suara untuk mosi tersebut diumumkan kepada masyarakat luas. Resolusi ini dicapai sepekan setelah Perdana Menteri, Nguyen Tan Dung, menolak seruan agar mengundurkan diri yang diajukan seorang anggota parlemen karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah ekonomi.

Tan Dung pernah menegaskan di depan parlemen bahwa dia akan tetap pada jabatannya sepanjang Partai Komunis meminta dia untuk memegang jabatan perdana menteri.

Editor BBC Vietnam, Nga Pham, menyatakan bahwa mosi percaya itu tidak bisa langsung diwujudkan karena parlemen tidak memiliki yurisdiksi atas Partai Komunis. Secara prinsip, parlemen bisa melakukan pemungutan suara untuk jabatan puncak pemerintah, namun keputusan akhir tidak akan bisa diwujudkan tanpa dukungan Partai Komunis yang berkuasa.

VIETNAM DAN ASEAN

Menyusul bubarnya Soviet dan runtuhnya Blok Timur 1990-an, maka Vietnam meninggalkan politik aliansinya dengan Uni Soviet dan Eropa Timur serta mulai menjalin hubungan bebas dengan semua negara berdasar prinsip saling menghormati. Resolusi

nomor 13 Politbiro Hanoi ketika itu menegaskan arah politik luar negeri yang menekankan multidireksi. Pembukaan hubungan diplomatik dengan ASEAN, AS/Barat dan sekutunya menandai permulaan kebijakan mengakhiri pengucilan atau isolasi Hanoi. Keaggotaan Vietnam di ASEAN menjadi pintu masuk bagi interaksi Vietnam dengan dunia luar yang lebih luas. Namun demikian, di lingkungan Asia Tenggara, Vietnam berhadapan dengan RRC dalam konflik Kepulauan Spratley di Laut China Selatan (LCS).

Di kawasan Asia, masalah Laut China Selatan merupakan masalah sensitif yang bisa membakar konflik Vietnam dan China. Bagaimanapun, Vietnam dan Philipina khawatir melihat perilaku China yang semakin asertif di LCS belakangan ini.

Vietnam dan Philipina berulang-ulang memprotes ulah kapal perang China yang meluncurkan tembakan peringatan kepada nelayan Filipina yang menangkap ikan di dekat Pulau Paracel dan Spratly. Kapal perang China juga dianggap menghalangi kapal Vietnam dan Philipina yang sedang mengeksplorasi kandungan minyak di perairan itu. Hal yang lebih menggelisahkan lagi adalah tindakan Angkatan Laut China yang telah menanam patok-patok yang menggambarkan tanda-tanda kepemilikan di Pulau Paracel dan Spratly, yang sebenarnya masih dituntut sebagai wilayah Philipina dan Vietnam. Apalagi setelah Beijing membentuk pemerintahan daerah yang berlokasi di wilayah sengketa itu. Sebenarnya bukan hanya Philipina dan Vietnam yang menuntut perairan LCS sebagai wilayahnya.[31]

Dewasa ini, ketika harga minyak bumi membubung tinggi, Vietnam dan Philipina jelas tergerak untuk aktif bergiat mencari potensi *off shore*-nya. Sementara Malaysia dan Brunei masih tetap

[31] Makarim Wibisono, "Sengketa Laut China Selatan", *Kompas,* Selasa, 11 Desember 2012. Selain Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia mengklaim gugusan Pulau Spratly ke selatan sebagai miliknya dan tumpang tindih dengan posisi China. Vietnam sebaliknya mengklaim gugusan Pulau Paracel ke utara yang sekarang dikuasai China sebagai miliknya.

sibuk mengeksploitasi tambang di wilayah tradisionalnya. Vietnam dan anggota ASEAN lainnya seperti Philipina, Taiwan, Brunei dan Malaysia turut mengklaim wilayah perairan yang menjadi sengketa tersebut, yang kaya akan sumber daya minyak dan gas, selain juga merupakan jalur perdagangan internasional.

Vietnam dan Filipina sering berhadapan langsung dengan reaksi China di lapangan. Sebaliknya, China juga menangkap gejala meningkatnya sikap asertif Philipina dan Vietnam. Philipina telah mendeklarasikan perairan LCS dengan nama baru, yaitu Laut Philipina Barat. Di samping itu, Presiden Aquino selalu memasukkan masalah LCS dalam agenda pembicaraan bilateral dengan koleganya di ASEAN, yang memiliki kepentingan yang sama dan mengajak mengambil langkah bersama menghadapi China.[32]

Sejauh ini, berbagai langkah Indonesia terkait isu LCS dianggap masih tepat sasaran dan bisa membawa ASEAN menempatkan diri dalam konflik China-AS.

Stabilitas ASEAN tidak terlepas dari berbagai dinamika di kawasan. Di bidang politik/keamanan, menurut akademisi Syamsul Hadi PhD dari Fisip-UI, merujuk perspektif Carlyle A Thayer (Southeast Asian Affairs, 2011), ada tiga faktor yang mempengaruhi dinamika politik/keamanan regional di kawasan Asia Timur saat ini.[33]

Pertama, bertambahnya ketegangan dalam hubungan China-AS; *kedua*, meningkatnya kembali keterlibatan AS di Asia Timur; dan *ketiga*, peningkatan keagresifan China di Laut China Selatan.

Ketiga faktor ini merupakan ujian yang serius bagi ASEAN, yang telah memproklamasikan diri sebagai kekuatan pendorong utama (*primary driving force)* dalam penyelesaian isu-isu regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

---

[32] Makarim Wibisono, "Sengketa Laut China Selatan". Lihat juga, Syamsul Hadi, "Tantangan Kita di ASEAN", *Kompas***,** 16 November 2011.

[33] Herdi Sahrasad, "Menebak Udang di Balik Batu Lawatan Hillary", *www.inilah.com*, Selasa, 4 September 2012 .

Meluasnya ketegangan di Laut China Selatan dimulai ketika Vietnam dan Malaysia mengajukan perluasan klaim wilayah landas kontinen mereka ke sebuah area di Laut China Selatan sejauh 200 mil laut (370,4 kilometer) dari garis pantai.

China secara tegas menyatakan keberatan atas klaim Vietnam dan Malaysia, dengan menegaskan kedaulatannya yang tidak bisa dipertanyakan atas pulau-pulau di LCS dan perairan di sekitarnya.[34]

ASEAN secara tepat telah melihat konflik di LCS berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Karenanya, tekad ASEAN untuk tidak membiarkan Asia Tenggara sebagai arena bersaing negara-negara besar patut diapresiasi.

Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2011 telah memastikan agar dua kekuatan besar, China dan AS, tidak dalam posisi berhadap-hadapan dan menjadikan LCS sebagai ladang konflik bersenjata mereka.

Persoalan LCS makin memanas ketika China merasa dipojokkan dengan manuver Philipina yang hendak membawa ASEAN untuk berhadapan dengannya. Manuver Philipina ini, diduga dilakukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan China.

China juga menyatakan ketidaksukaannya dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam masalah LCS. Meski mengakui tidak memiliki klaim atas wilayah LCS, bagi AS keterlibatannya adalah dalam rangka memastikan alur laut bagi pelayaran internasional aman.

Langkah-langkah agresif China yang mengiringi responnya yang keras itu justru memperbesar kecenderungan ke arah pelibatan kekuatan-kekuatan "ekstra-regional" untuk mengimbanginya.

---

[34] Robert Beckman, "The South China Sea: Worsening Dispute or Growing Clarity in Claims", dalam Yang Razali Kassim (ed.), *Issues in Human Security in East Asia* (Singapura: RSIS dan ISEAS, 2011), h. 172-174.

ASEAN telah bersepakat memperluas East Asia Summit dengan memasukkan AS dan Rusia sebagai anggota tetap. Kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia dan beberapa negara ASEAN pada bulan November 2010 dan kehadirannya dalam KTT ASEAN di Bali 17-19 November 2011 menandai fase *reengagement* (keterlibatan kembali) AS dalam percaturan regional di Asia Tenggara.

AS ingin memastikan China tidak melakukan intimidasi atau ancaman penggunaan kekerasan (use of force) untuk penyelesaian klaim dengan negara-negara kekuatan militernya tidak sebanding, termasuk dalam soal kepulauan Spratley di LCS itu.

Dalam hal ini, Indonesia berusaha menjadi jangkar stabilitas di Asia Tenggara, menyatukan dan menjaga soliditas ASEAN dalam mengatasi rivalitas China-AS yang bersaing secara geopolitik-geostrategi dan berebut sumber daya alam di kawasan LCS. Indonesia terus berusaha agar ASEAN tidak terjebak dalam pusaran rivalitas AS dan China yang bisa menjadikan Asia Tenggara menjadi kawasan konflik terbuka.

Konflik LCS yang melibatkan China dengan negara-negara ASEAN khususnya Vietnam, Philipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia, jelas dipandang menganggu kenyamanan agenda luar negeri AS, yang secara sungguh-sungguh dan spektakuler kini berorientasi ke lingkungan Asia Pasifik.

Memperhatikan konflik China dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Philipina terkait sengketa Laut China Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut.[35]

---

[35] Herdi Sahrasad, "Menebak Udang di Balik Batu Lawatan Hillary." Lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Jakarta, bertemu Presiden SBY Selasa (4/9/12) itu salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pan-

Sejumlah anggota ASEAN menyambut baik haluan Amerika Serikat ke Asia guna menanggapi pergerakan China di kawasan tersebut. Sementara kubu China, yang didukung oleh Kamboja, berupaya menghindari pendekatan multilateral ASEAN yang bertujuan mengucilkan China. Beijing sendiri cenderung memilih pendekatan bilateral. Menghadapi situasi rumit di LCS ini, ASEAN sebaiknya mempercepat upaya untuk segera memulai perundingan dengan China untuk mencapai penyelesaian *code of conduct* atas LCS.[36]

Ketegangan di Laut China Selatan bisa meledak menjadi perang kalau negara-negara yang bersitegang tidak dapat menahan diri dan menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional.[37]

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Philipina serta anggota ASEAN lainnya, berkewajiban mengambil langkah-langkah dalam kerangka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan China sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa LCS.

Atas perimbangan itu pula, Gedung Putih ingin ada respon persahabatan penuh dari Indonesia yang sangat diperlukan AS sebelum mendapatkan dukungan serupa dari negara-negara lain di ASEAN dalam konteks rivalitas AS-China di Asia. Seluruh negara ASEAN diharapkan mendukung agenda keterlibatan AS secara damai dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan yang mempengaruhi stabilitas tataran Asia Pasifik itu.

---

dangan di antara negara anggota ASEAN terkait konfliknya dengan China di kawasan Laut China Selatan, selain membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington. Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh China

[36] *The Wall Street Journal,* 13 Januari 2013.

[37] Presiden Akademi Diplomatik Vietnam Dang Dinh Quy menegaskan hal itu, lihat "Kisruh Laut Cina Selatan, Asia Tenggara Terancam Perang", *jaringnews.com*, Jumat, 4 November 2011, diakses pukul 17:29 .

Dalam kaitan dengan ASEAN, Indonesia harus bisa meyakinkan Vietnam agar jangan sampai terjadi konflik terbuka di kawasan ASEAN, yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti China dan AS. Dalam kedudukan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tak punya pilihan selain terus menekankan pentingnya semua pihak, termasuk China dan AS, untuk mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea/DOC) 2002, dalam kaitan dengan sengketa LCS untuk membangun situasi keamanan yang kondusif di kawasan ini.

Penting dicermati dan dicamkan pandangan diplomat Makarim Wibisono bahwa ASEAN, terutama Vietnam dan Kamboja, perlu berikhtiar menghindarkan agar kompetisi AS-China di Asia Tenggara jangan memecah keutuhan ASEAN dan jangan berkembang menjadi konfrontasi yang membahayakan stabilitas kawasan.

ASEAN perlu berupaya keras untuk mentransformasi persaingan itu ke dalam pola kerjasama AS, China, dan ASEAN yang bermanfaat.

KONKLUSI

Lingkungan geostrategis dan geopolitik membentuk karakter Vietnam dan mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri Hanoi dalam berkiprah di arena regional dan global.

Kesukaran para elite, pemimpin dan teknokrat Vietnam mengatasi krisis ekonomi beberapa tahun ini menunjukkan Vietnam membutuhkan kepemimpinan nasional yang kredibel dan kapabel melampaui PM Tan Dung. [38]

---

[38] Nguyen Tan Dung lahir 17 November 1949 di provinsi Ca Mau, adalah Perdana Menteri Vietnam saat ini. Ia dipilih Parlemen Vietnam pada 27 Juni 2006 untuk menggantikan Perdana Menteri Phan Van Khai yang mengundurkan diri seminggu sebelumnya. Sebelum terpilih sebagai perdana menteri, Dung menjabat Wakil Perdana Menteri I pada 29 September 1997 hingga 27 Juni 2006. Tan Dung juga pernah menjabat sebagai gubernur bank sentral. Selain itu ia juga memiliki latar

Tan Dung sendiri dikenal sebagai salah satu arsitek kemajuan ekonomi Vietnam yang pertumbuhannya termasuk paling tinggi di Asia Tenggara, yakni 7,5 persen, sebelum akhirnya mengalami kemerosotan tajam menjadi 4% tahun 2011-2012.

Ke depan, di luar PM Tan Dung, pemimpin saat ini, harus dicari para pemimpin alternatif yang kreatif, cerdas dan kredibel yang mampu tampil sebagai pemecah masalah (problem solver). Dalam upaya meneruskan "perdamaian sebagai lanjutan dari peperangan dengan cara lain''. Selayaknya regenerasi kepemim-pinan baru yang kredibel dan kapabel di Vietnam dipertimbangkan untuk memimpin Hanoi menuju masa depan. Reinterpetasi ideologi dan nasionalisme dibutuhkan untuk memperkuat aksi dan tindakan bagi teknokrasi pembangunan Vietnam. Sosialisme pasar yang selama ini menjadi semboyan ideologi Vietnam, membutuhkan rumusan baru yang kontekstual dengan tantangan zaman.

Regenerasi kepemimpinan nasional yang berotak dan berakal budi, dengan kecakapan teknokratis, bukan karena berotot dan jago perang, jauh lebih diperlukan Vietnam ketimbang sekedar politisi revolusioner yang demagog, yang terlibat skandal dan lembek dalam mengatasi kelesuan ekonomi di era globalisasi. Dengan kata lain, menghadapi masalah dan tantangan di dalam dan luar negeri, Vietnam memerlukan kepemimpinan nasional yang cakap, berintegritas dan didukung rakyat untuk mewujudkan cita-cita Hanoi menjadi macan baru di Asia. Prospek dan kesempatan untuk itu niscaya terbuka.(*)

---

belakang militer dan terlibat pertempuran dengan Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Ia menjadi anggota Partai Komunis Vietnam pada 10 Juni 1967 dan terpilih sebagai anggota Politbiro Partai pada Kongres Nasioanl Partai ke-8, ke-9, dan ke-10.

Burma dan Aung San Suu Kyi: Jalan Berduri Menuju Demokrasi

Akhirnya Ikon demokrasi Burma Aung San Suu Kyi bisa lepas bebas. Suu Kyi meraih kemenangan dalam pemilu Burma (Myanmar) pada 1 April tahun 2012. Media rezim militer Burma telah menegaskan bahwa pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi memenangkan kursi pertamanya di Parlemen dan Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) pimpinannya meraih 43 dari 45 kursi yang diperebutkan.

Inilah kemenangan rakyat Burma dalam melawan penindasan, dengan dukungan dari sanksi ekonomi internasional yang dipelopori AS/Barat, yang telah mengisolasi negara tersebut selama lebih dari 10 tahun dan memaksa rezim militer membuka diri bagi demokrasi, dengan cara membebaskan Suu Kyi dan menyelenggarkan pemilu yang demokratis.[1]

Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, ketika bertemu Presiden Myanmar Thein Sein, menekankan tentang pentingnya untuk melanjutkan perkembangan demokratisasi, menghentikan kekerasan di wilayah minoritas etnik, pembebasan tanpa syarat bagi para tahanan politik yang masih dipenjara, dan pemutusan ikatan militer antara Burma dan Korea Utara. Obama juga menekankan perlunya pembaruan ekonomi di Burma dengan membuka diri bagi modal asing. Pernyataan Obama ini tak lepas dari kepentingan para pebisnis AS bermaksud merambah minyak dan gas serta mineral lainnya di Burma. AS/Barat bakal masuk ke Burma melalui penanaman modal asing yang sudah pasti siap menguras sumber daya alam Burma sampai tandas.[2]

---

[1] Sebastian Strangio, "What Obama Wants From Myanmar", *www.foreign Affairs.com*, November 19, 2012 diakses pukul 01.00. BBC, 3 April 2012, juga melaporkan bahwa Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon memuji keberanian Presiden Myanmar Thein Sein, yang mau menyelenggarakan pemilu demokratis di negara itu.

[2] Brian P. Klein, "How Not to Invest in Myanmar, The Risks for the World's

Hanya soal waktu, para aktivis HAM dan LSM mengingatkan, jika rakyat dan pemerintah Burma tak waspada dan hati-hati, kapitalisme predatoris yang haus sumber daya alam, akan menggilas kekayaan Burma seperti halnya Indonesia.

Obama sangat bangga menjadi presiden Amerika pertama yang mengunjungi Burma. Kegembiraannya semakin besar saat ia akhirnya bisa bertemu langsung dengan Suu Kyi, sesama penerima Nobel Perdamaian. Suu Kyi meraih Nobel Perdamaian tahun 1991.[3]

"Orang pertama yang harus saya kunjungi adalah simbol demokrasi, yang menginspirasi banyak orang, tak hanya di negara ini tapi juga di seluruh dunia," kata Obama saat bertemu dengan Suu Kyi, Senin, 19 November 2012.

Suu Kyi telah melewati tahun-tahun yang sulit dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Jalan terjal yang ditempuhnya semakin menunjukkan keberanian perempuan berusia 67 tahun yang menjadi pemimpin National League for Democracy (Liga Nasional untuk Demokrasi) itu.

Obama menilai, Suu Kyi telah menunjukkan bahwa kebebasan dan martabat manusia tak bisa dipungkiri. Citra Suu Kyi menjulang di kancah internasional dengan adanya dukungan Obama terhadap proses demokrasi yang berlangsung di negaranya. Dengan suara perlahan, Suu Kyi mengatakan bahwa waktu yang paling sulit adalah saat ketika kita berpikir kesuksesan ada di depan mata".

"Kita harus sangat berhati-hati agar tak terpikat fatamorgana kesuksesan dan kita harus bekerja untuk keberhasilan yang sebenarnya, yaitu untuk rakyat," kata Suu Kyi.

Newest Frontier Market", www.*foreignaffairs.com,* 25 Juli 2012, diakses pukul 24.11

[3] Suu Kyi juga dianugerahi penghargaan internasional lainnya seperti *Sakharov Prize for Freedom of Thought*, *Jawaharlal Nehru Award for International Understanding* dan *International Simón Bolívar Prize*.

Menyusul kunjungan Obama ke Burma, hampir pasti hubungan kedua negara akan semakin erat. Apalagi Amerika telah menempatkan duta besarnya di Rangoon. AS berjanji membantu membangun kembali perekonomian negara tersebut. "Hari ini menandai babak baru antara Amerika dan Burma," kata Obama.

Obama menyaksikan bahwa para pendukung Suu Kyi merayakan kemenangan di Rangoon dengan sikap rendah hati dan seruan bagi rekonsiliasi nasional. Pemimpin oposisi itu memenangkan kursi di parlemen dengan lebih dari 80 persen suara. Suu Kyi menyambut datangnya era baru bagi Myanmar dan menyerukan persatuan politik. Meski pemilu tersebut merupakan suatu langkah signifikan, pemerintah masih perlu bekerja keras untuk mempercepat upaya mencapai rekonsiliasi nasional.

Aung San Suu Kyi adalah simbol demokrasi bagi rakyat Burma, simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Burma yang membusuk dan memburuk di mata dunia. Rezim militer itu begitu ketakutan terhadap tekanan internasional dan meminta kepada Suu Kyi selaku pemimpin oposisi Burma agar menggunakan nama resmi negaranya sebagai Myanmar. Padahal nama Myanmar bagi rakyat Yangoon berbeda arti dan makna dengan nama Burma

Negara itu mengganti nama Burma menjadi Myanmar ketika masih berada di bawah kekuasaan militer pada tahun 1989 dan sejak saat itu mulai digunakan secara meluas oleh penguasa.

Namun kelompok-kelompok oposisi menolak menggunakannya dan tetap menyebutnya dengan Burma sebagai tanda perlawanan terhadap rezim militer. Apalagi pelbagai negara dan organisasi media di negara-negara Barat - termasuk BBC - juga memilih untuk tetap menggunakan Burma.

Agaknya seruan agar nama Myanmar tetap dipakai, digaungkan oleh penguasa militer setelah Suu Kyi melakukan lawatan ke Eropa dan mendapat perhatian meluas dari berbagai media internasional.

Dalam kunjungannya -antara lain ke Norwegia untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian- Suu Kyi menyebut negaranya sebagai Burma. Suu Kyi juga menggunakan Burma ketika berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Thailand, yang tampaknya membuat pemerintah Burma tersinggung.

Bagaimanapun juru bicara Partai Liga Nasional Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, Nyan Win, menegaskan bahwa penyebutan Burma tidak bermaksud melecehkan konstitusi.

Pada saat pergantian nama, rezim militer Rangoon berpendapat Burma adalah peninggalan kolonialisme dan hanya mewakili kelompok suku Burma yang merupakan mayoritas di negara itu.

Namun sejumlah ahli Etimologi - ilmu yang mempelajari asal kata - maupun beberapa pihak lain berpendapat alasan yang diajukan rezim militer tersebut tidak tepat karena Myanmar dan Burma berasal dari akar yang sama, yang merujuk pada suku Burma- dan selama beberapa abad digunakan berselang-seling. Memang, untuk sementara, organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, sudah mengganti Burma menjadi Myanmar.

Dalam pernyataan yang diterbitkan harian The New Light of Myanmar yang merupakan corong pemerintah, Komisi Pemilihan merujuk pada konstitusi negara dengan tetap menyebut negara tersebut dengan nama Myanmar. "Seperti yang tertulis dalam konstitusi bahwa negara disebut sebagai Republik Persatuan Myanmar, tidak ada yang berhak menyebutnya Burma," demikian pernyataan rezim militer Rangoon.

BURMA, KEMISKINAN DAN KEKERASAN

Burma secara geografis terletak di Asia Tenggara. Negeri itu berbatasan di sebelah utara dan timur laut oleh Republik Rakyat China, di sebelah timur dan tenggara dengan Lao Republik Rakyat Demokratik dan Kerajaan Thailand, di sebelah barat oleh Republik Rakyat Bangladesh dan Republik India (negara bagian Aruna-

chal Pradesh, Nagaland, Manipur, dan Mizoram). Ibukotanya adalah Yangon (Rangoon) dengan jumlah penduduk kurang lebih 60 juta orang. Setelah puluhan tahun mengalami salah urus oleh para penguasa militer, sekarang sepertiga warganya yang berjumlah 60 juta orang itu hidup dalam kemiskinan.[4]

Burma adalah negeri multi etnis yang sarat konflik sejak era kolonial. Isu etnis sudah menonjol sejak penjajahan Inggris di negeri itu, dimana ada sekitar 140 kelompok etnis yang berbeda menjelang kemerdekaan Burma. Lebih lima dekade konflik antara rezim militer dan etnis mewarnai negeri itu, sementara sanksi ekonomi dari dunia internasional makin menyulitkan rakyat Burma itu sendiri.[5]

Burma adalah negara yang kaya sumber daya dengan basis pertanian yang kuat (50% dari PDB berasal dari pertanian, peternakan dan perikanan, dan kehutanan). Memiliki kayu-kayu besar, gas alam, tembaga dan cadangan perikanan dan merupakan sumber utama permata dan batu giok.

Ekonomi Burma masih sangat terbelakang sejak berada di bawah pemerintahan otoriter selama 50 tahun. AS dan negara-negara lain menjatuhkan berbagai sanksi sepanjang masa itu, sehingga membuat ekonomi Burma terisolasi. Produk domestik bruto per kapita saat ini berkisar $1.300.

Pada 2012, Burma mulai melakukan liberalisasi perdagangan domestik dan asing, mempromosikan peran sektor swasta dan membuka diri terhadap investasi langsung dewasa ini. Namun ekonomi negara itu tetap lamban, berat, tak efektif, dan inefisiensi terus membayangi sebagian besar perekonomian akibat infrastruktur yang terus memburuk. [6]

---

[4] *VOA Indonesia*, 22/1/2013.

[5] N Ganesan dan Kyaw Yin Hlaing, (Eds), *Myanmar: State, Society and Ethnicity* (Singapura: ISEAS, 2007).

[6] *The Wall Street Journal*, 9 Januari 2013.

Negara menguasai sektor energi, industri berat, dan perdagangan beras. Entitas komersial militer memainkan peran utama dalam perekonomian yang tidak efisien itu. Korupsi, suap dan inefisiensi anggaran mengganggu jalannya reformasi dan Myanmar masih jauh dari kriteria internasional terkait pemerintahan bersih.[7]

Di bawah rezim militer yang represif, menyusul makin menguatnya junta militer 1988, yang kemudian diikuti dengan penolakan hasil pemilu 1990 yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan tokohnya Aung San Suu Kyi, bantuan dan investasi asing terus mengering.[8]

Pada tahun 2003, tekanan ekonomi asing menjadi semakin gencar setelah rezim militer ini menyerang konvoi Aung San Suu Kyi. Pemerintahan Amerika Serikat menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Myanmar, yang semakin mengetatkan tekanan ekonomi.

Statistik ekonomi Myanmar tidak mudah didapatkan. Bahkan sejak tahun 1997, para jenderal tidak mempublikasikan anggaran dasar negara yang formal, dan angka-angka yang mereka berikan tidak dapat dipercaya.

Pada periode yang sama, angka-angka mengenai kesehatan, pendidikan, dan seterusnya sangatlah langka. Tetapi, berdasarkan beberapa perkiraan, rezim militer Burma ini diperkirakan menggunakan 40% dari anggaran belanja mereka untuk pertahanan dan persenjataan, dan hanya membelanjakan kurang dari 1% GDP untuk kesehatan dan pendidikan.

Statistik yang tersedia menunjukkan dari populasi yang mendekati 50 juta, terdapat 29 juta pekerja, namun 70% dari pekerja ini hanya bekerja di sektor pertanian. 50% GDP datang dari pertanian, dan hanya 15% datang dari industri. Dan pengangguran diperkirakan di atas 10%. GDP per kapita pada 2006 adalah

---

[7] *Reuters*, 7/1/2013 dan *Kompas*, 8/1/2013

[8] Aung San Suu Kyi diganjar dengan hukuman tahanan rumah selama 20 tahun lebih dan baru dibebaskan tahun 2010, setelah pemilihan umum yang mendorong terbentuknya pemerintahan sipil pertama yang didukung pihak militer.

US$1800.[9]

Para analis mencatat, statistik ini menyembunyikan distribusi kekayaan yang sesungguhnya. Sekitar 10% populasi yang paling miskin hanya mengkonsumsi 2.8% dari kekayaan nasional, sedangkan 10% populasi yang terkaya mengkonsumsi 32.4% (statistik tahun 1998). Ini diperparah dengan tingkat inflasi yang semakin membengkak, yang sekarang di atas 20%. Ini menjelaskan mengapa 25% rakyat Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan. Bahaya penyakit menular seperti Aids, diare, hepatitis, demam tipus, demam berdarah, dan malaria juga sangat tinggi di negara ini. Beberapa tahun yang lalu, usia harapan hidup adalah sekitar 62 tahun, tetapi sekarang usia harapan hidup diperkirakan jatuh di bawah 50 tahun. Hal ini merupakan indikasi memburuknya infrastruktur secara umum yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. [10]

Menurut laporan resmi, etnis Burma yang merupakan etnis mayoritas di negeri itu umumnya berasal dari Tibet, meskipun etnis ini adalah kelompok yang datang belakangan di Burma, karena etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai) sudah lebih dahulu mendiami negara tersebut. Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Burma.

Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, yang juga berbatasan dengan Thailand. Ketika terjadi kolonialisasi Barat atas Burma, berbagai etnis di Burma bersatu untuk melawan penjajahan.[11]

---

[9] Fred Weston, "Tragedy of Myanmar", *www.marxist.com,* 27 September 2007, diterjemahkan oleh Ted, diakses pukul 22.00.

[10] Fred Weston , *Ibid*

[11] Secara garis besar, kelompok etnis di Myanmar dapat dikelompokkan dalam delapan kelompok etnis: *Pertama*, Etnis Bamar/Burma. Dua pertiga dari total warga Myanmar. Beragama Buddha, menghuni sebagian wilayah negara kecuali pedesaan. *Kedua*, Etnis Karen. Suku yang beragama Buddha, Kristen atau paduannya. Mereka menghuni pegunungan dekat perbatasan dengan Thailand. *Ketiga*, Etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai). Etnis yang beragama Buddha yang berkerabat dengan etnis

Dalam kaitan ini, misi dan visi Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, adalah mempersatukan seluruh etnis yang ada di Burma untuk bersama-sama membangun negeri menjadi negara demokratis. Namun, sentimen rasial/etnis ini dimunculkan kembali oleh Ne Win. Pada 17 Juli 1947, Aung San dibunuh oleh lawan-lawan politiknya. Kematian Aung San menjadi simbol perjuangan rakyat Burma yang prodemokrasi.

Meski rekan Aung San yakni U Nu, menjadi perdana menteri kemudian, situasi politik Burma tetap tidak stabil dan memburuk.

Sebenarnya, sejak memperoleh kemerdekaannya 4 Januari 1948, Myanmar mengalami pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Di bawah rezim militer, keadaan Myanmar menjadi begitu buruk dan terpuruk. Namun negeri ini pernah mengalami saat-saat demokrasi menjadi sistem tata kelola pemerintahan. Demokrasi pernah bersemi tahun 1948 – yakni saat Inggris memberikan kemerdekaan – hingga tahun 1962 – sebelum junta militer mulai berkuasa melalui kudeta. Pada masa demokrasi itu (1958-1962) pemerintahan dipilih rakyat berdasarkan konstitusi negara dan semua pihak tunduk pada hasil pemilu. Ketika Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan pemerintah yang berkuasa mengenai hasil pemilu, pemerintah bisa menerimanya. Pada masa ini militer sempat berkuasa selama 16 bulan (1958-1960) di bawah komando Jenderal Ne Win, namun Ne Win kemudian tunduk pada konstitusi dan mengadakan pemilu tahun 1960. Meskipun partai politik yang disukai militer tidak menang dalam pemilu,

---

Thai. Pada umumnya menghuni di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. *Keempat*, Etnis Arakan. Juga disebut Rakhine, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan di Myanmar barat. *Kelima*, Etnis Mon. Etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand.. *Keenam*, Etnis Kachin. Kebanyakan beragama Kristen. Mereka juga tersebar di China dan India. *Ketujuh*, Etnis Chin. Kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India. *Kedelapan*, Etnis Rohingya. Etnis Muslim yang tinggal di utara Rakhine (Arakan), banyak yang telah mengungsi ke Bangladesh atau Thailand.

militer menerima hasilnya dan kembali ke barak. [12]

Burma tumbuh menjadi negara merdeka yang penuh dengan konflik etnis yang diperparah dengan keterlibatan para militer bersenjata. Pengalaman melawan penjajahan Inggris dan Jepang, ditambah dengan ancaman dari China dan Amerika, membuat militer berhati-hati terhadap dunia luar.

Pemberontakan bersenjata telah menjadikan militer Burma tumbuh menjadi kekuatan terpenting, sedangkan pengalaman perjuangan kemerdekaan dan berhadapan dengan ancaman dari luar telah membangun ideologi nasional Burma.

Dalam perkembangannya, situasi yang memburuk di Burma ternyata mendorong militer melakukan kudeta. Tahun 1962 Ne Win memimpin kudeta yang menempatkan junta militer kembali berkuasa.[13] Alasan Ne Win ialah menjaga stabilitas, dan dengan cara itu Ne Win memancangkan kuasanya bertopang kekuatan militer.

Demikianlah, pemerintahan yang demokratis Burma tumbang setelah terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win pada 1962. Dua puluh enam tahun kemudian yakni 1988, kembali negeri itu mengalami kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Saw Maung.

Peneliti Hendri Kuok mencatat, pada tanggal 3 Agustus 1988, pemerintah militer mendeklarasikan Undang-undang Darurat. Pada tanggal 8 Agutus 1988, mahasiswa, buruh dan tani melancarkan pemogokan nasional. Hal ini membuat kota Rangoon dan seluruh negeri lumpuh. Aksi ini dikenal sebagai "8888 Action". Akibatnya, tanggal 9 Agustus 1988 diberlakukan jam malam, mulai jam 8 malam sampai 4 pagi. Namun semua usaha ini gagal untuk menghentikan demonstrasi mahasiswa yang jumlahnya sudah menca-

[12] Fajar Kurnianto, "Menunggu Manuver Suu Kyi", opini, *Koran Jakarta,* Kamis 18 November 2010.

[13] Buni Yani, "45 Tahun Sejarah Hitam Junta Myanmar", *Jurnal Nasional,* 25 Oktober 2007.

pai angka ratusan ribu, bahkan menjadi semakin panas manakala polisi menembaki massa.

Menurut laporan Radio Rangoon, pada tanggal 12 Agustus 1988 tercatat paling tidak 98 orang meninggal. Angka itu bisa jauh lebih tinggi, bahkan beberapa media asing memperkirakan sekitar 3000 orang. Para demonstran mulai menduduki kantor polisi dan merebut senjata dari tangan polisi dan menggunakannya untuk melawan polisi yang lain. Pada tanggal 12 Agustus 1988, Sei Lwin mengundurkan diri sebagai ketua partai BSPP dan presiden. Seminggu kemudian Jaksa Agung dalam kabinet Sei Lwin, yaitu Dr. Maung Maung, diangkat menjadi presiden dan ketua partai. Pada tanggal 24 Agustus 1988, Maung Maung mengumumkan bahwa Kongres Luar Biasa partai Lanzin akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 1988 dengan agenda membahas referendum nasional dan menerapkan sistem demokrasi multipartai.[14]

Laporan media menyingkapkan, pada tanggal 19 september 1988, terjadi pemberontakan yang dikenal dengan nama pemberontakan 8888, dengan dipelopori oleh aktivis mahasiswa. Gerakan pemberontakan ini disokong oleh rakyat dan para biksu Budha, namun ditindas dengan kekerasan militer oleh Jenderal Saw Maung. Menurut para analis,etnis Burma tidak ingin ada etnis non-Burma berkiprah di pemerintahan. Pada saat yang sama, militer Myanmar didominasi oleh etnis Burma, namun masyarakat Burma secara umum tidak setuju dengan cara-cara militer menguasai pemerintah.

Selama junta militer berkuasa, banyak perubahan bterjadi di Burma. Nama Burma diubah menjadi Myanmar pada 18 Juni 1989. Perubahan ini dimaksudkan agar etnis non-Burma merasa tidak dianaktirikan. Namun, hal ini tidak mengubah apa pun. Etnis non-Burma tetap ditindas. Junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangoon. Pada 7 November 2005, junta membuat ibu ko-

---

[14] Hendri Kuok, “Belajar Peristiwa Sepuluh Tahun yang Lalu di Burma”, *Pembebasan*, Nomor IX, 1998.

ta baru bernama Naypyidaw. Pada 21 Oktober 2010, junta mengubah bendera dan lagu kebangsaannya. Untuk menopang kekuasaannya, junta membentuk organisasi bernama Union Solidarity and Development Association (USDA). Disinyalir, anggota organisasi ini direkrut dari para kriminal di penjara Yangoon. Fungsinya seperti mata-mata (intelejen junta) untuk mengontrol rakyat Burma.[15]

Dalam melawan junta, kekuatan moral yang dimiliki NLD ternyata sangat inspiratif bagi rakyat negeri itu, apalagi represi militer terhadap rakyat semakin meningkat setelah itu.

Laporan media menyingkapkan bahwa kaum agamawan Buddha yang selama ini tidak terlibat politik, ternyata kemudian bangkit dan menjadi pendorong tumbuhnya embrio *people power* yang hampir tak terbayangkan bisa terjadi di negeri pagoda tersebut. Pembangkangan kaum pendeta Buddha yang berakhir berdarah tersebut (2008) sangat berdampak besar terhadap militer dan rezim politiknya, sehingga mereka harus melakukan kompromi untuk membuat Pemilu yang ditunda lebih dari sembilan tahun lamanya. Beruntung Myanmar masih mendapat dukungan penuh dari RRC dan juga bersahabat dengan India sehingga tekanan internasional masih bisa diredam.

Para analis mencatat, gerakan *people power* di Myanmar masih dalam tahap awal atau embrionik, tetapi hal itu telah meruntuhkan anggapan berbagai pihak bahwa Myanmar tidak akan dapat melakukan demokratisasi dari bawah karena tradisi dan budaya rakyat untuk itu tidak ada. Demikian pula Myanmar tidak memiliki masyarakat sipil yang cukup baik organisasinya, serta parpol yang kuat.

Namun keraguan ini lenyap setelah perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan para pendeta Buddha dan rakyat di Yangoon. Ini

---

[15] Awani Irewati, “Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi”, *Jurnal Penelitian Politik,* LIPI, Vol.4 No.1, Tahun 2007

membuktikan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membuat tradisi baru berupa gerakan sosial untuk menuntut kebebasan dan demokrasi.

Terbukti embrio gerakan sosial berupa pembangkangan sipil tanpa kekerasan yang bertumpu di atas pondasi kepemimpinan moral, telah lahir di negeri seribu pagoda itu. Dalam hal ini, pengaruh Suu Kyi bagi tumbuhnya tradisi baru ini sangat jelas, sama juga halnya pengaruhnya terhadap munculnya gerakan demokratisasi yang lebih terkoordinasi dan tidak lagi sporadis serta berdaya tahan banting.

Junta militer berkuasa dengan sangat represif tanpa mengindahkan hak asasi manusia. Tidak hanya merepresi gerakan rakyat prodemokrasi, namun junta juga membantai gerakan sentrifugal etnis Karen, etnis minoritas terbesar kedua setelah Shan. Gerakan sentrifugal ini dihadapi dengan brutalisme tanpa ampun yang telah merenggut ribuan jiwa. Kebebasan berpendapat dibatasi, begitu juga dengan hak-hak sipil lainnya. Semua keburukan ini dilakukan junta untuk meredam gerakan prodemokrasi yang kian hari semakin berani ditunjukkan oleh warga. Junta militer berusaha menyimpan rapat semua rahasia negara yang dianggap bisa membahayakan, termasuk tempat penyelenggaraan pemerintahan.

Sejarah mencatat bahwa NLD didirikan pada 27 September 1988, dan Aung San Suu Kyi, yang saat itu baru tiba dari Oxford, bergabung dengan NLD hingga menjadi ketuanya. Pada 1990, partai ini memenangkan 392 dari 492 kursi yang diperebutkan (80,8 %). Namun junta militer berkuasa, yang disebut State Law and Order Restoration Council (SLORC) sebelum kemudian berubah menjadi State Peace and Development Council (SPDC), tidak mengizinkan NLD menyelenggarakan pemerintahan. Bahkan, menganulir hasil pemilu.

Media Barat melaporkan, SLORC merupakan nama untuk pemerintah junta setelah kudeta militer pada 18 September 1988, meng-

gantikan Burma Socialist Programme Party (BSPP). BSSP adalah partai militer yang dibentuk pada 4 Juli 1962 oleh Jenderal Ne Win setelah pada 2 Maret 1962—dengan anggota yang didominasi oleh etnis Burma—menguasai pemerintah Burma melalui sebuah kudeta militer.

BSSP adalah satu-satunya partai di Burma yang menyelenggarakan pemerintah hingga terjadi kudeta militer kedua pada 1988. Pada 1997, SLORC dihapuskan dan disusun kembali dengan nama SPDC. Para komandan militer regional yang kuat adalah anggota SLORC yang dipromosikan ke posisi baru dan dipindahkan ke ibu kota.

Setelah pemilu 1990, pemerintah junta melakukan berbagai tekanan terhadap NLD dan simpatisannya sekaligus melarang NLD dari semua aktivitas politiknya. Rakyat Burma terus melawan dan membangkang. Hal ini terbukti dengan kemenangan Aung San Suu Kyi, dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilu 1990. NLD memenangi 392 dari 485 kursi di parlemen, tetapi kemenangan itu tidak diakui rezim militer. Bahkan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi ditahan oleh pemerintahan rezim militer selama lebih dari 20 tahun.

Beberapa tokoh NLD ditangkap, kemudian dipenjara atau dijatuhi tahanan rumah, termasuk Suu Kyi. Beberapa tokoh yang lolos dari penangkapan itu kemudian membentuk National Coalition Government of The Union of Burma (NCGUB) untuk melaksanakan perjuangan bagi demokrasi dan kebebasan.

Junta militer telah begitu banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia antara lain; *Pertama,* pengrusakan *civil society*, dimana junta militer terus menekan dan mematikan kekebasan politik rakyatnya. Dan terbukti pada tahun 1996 pemerintahan junta militer mengeluarkan aturan bahwa kepemilikan televisi dan internet harus mendapatkan izin dari pemerintah, junta juga melakukan sensor terhadap video lokal maupun impor. Sehingga pangamat asing sangat sulit ma-

suk ke Myanmar untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai peristiwa yang terjadi di Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Junta bertujuan mengisolasi rakyatnya dari pengaruh luar yang dianggap sangat mengganggu kepentingan junta. Hal ini sekaligusmerupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat.[16]

Kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh junta militer adalah pembatalan hasil Pemilu tahun 1990, penangkapan dan menahan tokoh pro-demokrasi di Myanmar Aung San Suu Kyi, serta memenjarakan U Win Htein, asisten Aung San Suu Kyi. Selain menetapkan tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi, junta militer masih memenjarakan sekitar 1. 100 pejuang demokrasi.

Ketiga, melanjutkan penindasan terhadap etnis minorotas. Berdasarkan laporan Departemen Amerika Serikat, kekerasan terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh Jenderal Than Shwe semakin memburuk pada tahun 2004. Kekerasan tersebut meliputi kasus-kasus pemerkosaan oleh tentara, kerja paksa dan pengusiran terhadap etnis-etnis minoritas. Junta militer telah melakukan eksploitasi dalam jangka waktu yang cukup lama terhadap wilayah-wilayah etnis minoritas yang telah dikuasai oleh militer Burma. Akibatnya, Amerika Serikat mengambil tindakan dengan memperketat embargo yang sudah diterapkan satu tahun sebelumnya.

Pada Juli 2003, sebagai bagian dari *US Burmese Act 2003,* Amerika melarang semua impor yang diproduksi di Myanmar. Pengaruh langsungnya, larangan ini menghilangkan bagian yang cukup besar dari sumber pendapatan rezim militer. Pada tahun yang sama Amerika juga melarang semua transaksi keuangan dan pengiriman uang dengan menggunakan dolar AS terhadap Myanmar.

---

[16] Giandi Kartasasmita, "Pengaruh Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa Terhadap Transisi Demokrasi di Myanmar (1988-sekarang)", *Skripsi*, FISIP-HI Universitas Parahyangan, tidak diterbitkan, 2006, h.39.

Pada 20 Mei 1997, Amerika Serikat juga melarang semua investasi baru di Myanmar yang dilakukan oleh warga negara Amerika ataupun perusahaan Amerika Serikat, serta menarik dan memberhentikan untuk sementara beberapa hak istimewa perdagangan dan masih banyak lagi sanksi lainnya yang timbul sebagai respon dari meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia.[17]

Dalam kaitan ini, dunia internasional makin terkejut oleh langkah junta memindahkan ibu kota negara dari Rangon ke Naypyidaw, sebuah kota di tengah hutan belantara sekitar 320 kilometer sebelah utara Yangon, pada bulan November 2005. Beberapa teori menyebutkan bahwa langkah pemimpin junta Jenderal Than Shwe ini merupakan respons terhadap semakin gencarnya kampanye militer Amerika menggulingkan pemerintahan yang tidak demokratis seperti Saddam Hussein di Irak dan Taliban di Afganistan. Naypyidaw dianggap daerah yang relatif aman bagi pertahanan militer Myanmar bila tiba-tiba terjadi agresi AS yang tidak diinginkan.[18]

Junta militer terus berkuasa dan menindas hak-hak asasi manusia, yang mendorong meningkatnya sanksi internasional.

KEMENANGAN SUU KYI DAN DUNIA INTERNASIONAL

Aung San Suu Kyi adalah simbol demokrasi. Pemimpin oposisi Myanmar itu menyerukan "kemenangan rakyat" setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mendeklarasikan keberhasilannya memenangi kursi parlemen dalam pemilu yang demokratis. Apa sebetulnya yang diinginkan Suu Kyi dengan NLD-nya?

Gagasan utama Suu Kyi adalah soal rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembebasan Myanmar dari segala macam tirani. Ia pernah

[17] "Myanmar Sanctions, Engagement or Another Way Forward", *International Crisis Group Report* (Brussel : IGG, 26 April 2004), h. 25.

[18] Buni Yani, "45 Tahun Sejarah Hitam Junta Myanmar."

ditawari untuk keluar negeri sebagai ganti dari tahanan rumahnya. Ia menolak keras dan memilih terisolasi dan menderita untuk kebebasan negerinya. Dalam praktiknya, terbukti rezim militer Burma terus membungkam dan menahan Suu Kyi di masa lalu.

Sebagaimana diketahui, Suu Kyi bukanlah perempuan yang menempati posisi puncak dalam pemerintahan Myanmar. Ia berdiri kokoh sebagai oposisi sejak tahun 1988, menentang tampuk tertinggi yang dijalankan oleh junta militer.

Keterlibatan Suu Kyi dalam politik sendiri bisa dibilang tidak disengaja. Pada tahun 1988, ia pulang ke Burma untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Sebelumnya, Suu Kyi tinggal di Inggris beserta suaminya, Michael Aris dan hidup tenang dengan dua anak. Namun kepulangannya yang direncanakan singkat tersebut ternyata menjadi momentum bagi para aktivis yang tengah berdemonstrasi menentang kepemimpinan junta militer.

Keberadaan Suu Kyi yang dianggap mampu memberikan kekuatan politik ini, tidak lepas dari sejarah. Ayah dari Suu Kyi, Aung San, adalah tokoh penting dalam politik Burma. Ia sukses memerdekakan Burma dari Inggris lewat jalur diplomasi, namun kemudian dieksekusi secara tiba-tiba oleh kelompok militer di usia 32 tahun. [19]

Meski meninggal sebelum Burma diresmikan merdeka dari Inggris, nama Aung San menjadi harapan bagi warga Burma. Mereka, khususnya aktivis anti-militerisme, melihat keberadaan Suu Kyi sebagai mesias seperti halnya Aung San dulu membebaskan Burma dari penjajahan. Keberadaan Suu Kyi ini tercium oleh pemerintah SPDC yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap kestabilan. [20]

Walaupun ayah Suu Kyi sendiri seorang jenderal, kekuasaan militer yang represif dan berkepanjangan telah membangkitkan sema-

---

[19] *Majalah Bhinneka*, Edisi 2 Desember 2012
[20] *Majalah Bhinneka*, Edisi 2 Desember 2012

ngat Suu Kyi dan kelompoknya untuk mendorong kehidupan demokrasi. Ketika ditanya apa makna demokrasi, Suu Kyi menjawab, untuk istilah itu hanya rakyatlah yang lebih tahu substansinya meski tidak disampaikan dengan kata-kata. Dan terbukti dalam pemilu 1990 rakyat mendukung gagasan yang dibawa NLD untuk mengantar pada kemajuan Myanmar. NLD menang, namun diberangus rezim militer yang berkuasa. Di sini, Suu Kyi memang menempati posisi sentral dalam perubahan sosial politik di negeri ini. Perubahan ini jugalah yang bisa mengantar pada perubahan ekonomi. Barat masih memegang ucapan Suu Kyi sebagai indikator apakah akan perlu segera menanam modal secara besar-besaran atau menunda dulu.[21]

Penyelenggaraan pemilu April 2012 yang bebas dan demokratis dan dimenangkan oleh NLD menjadi momentum bagi Suu Kyi untuk menyerukan agar dunia internasional membantu negerinya yang tengah berbenah.

"Hal yang lumrah jika anggota dan pendukung NLD bersuka cita saat ini. Namun, perkataan, tingkah laku, dan tindakan yang bisa menyakiti dan membuat sedih partai atau orang lain harus dihindari. Saya minta semua anggota NLD memastikan bahwa kemenangan rakyat ini menjadi kemenangan yang bermartabat," kata Suu Kyi, ikon demokrasi Myanmar itu.

Kemenangan itu menandai perubahan dramatis dalam karier politik Suu Kyi selama 22 tahun terakhir menjadi tahanan rumah junta militer Myanmar.

Setelah menjalani tahanan rumah selama 22 tahun, Aung San Suu Kyi, pemimpin prodemokrasi Burma (National League for Democracy/NLD), yang juga adalah putri salah satu *founding fathers* Burma, Aung San, akhirnya bebas berpolitik.

Para pengamat menilai kini pemerintah sipil Myanmar memerlukan keberadaan Suu Kyi di parlemen untuk mengesahkan sis-

---

[21] *Kompas*, Sabtu (12/08/1995).

tem politik mereka dan mendapat keringanan sanksi AS/Barat terhadap rezim tersebut.

Meski NLD memenangi 45 kursi yang diperebutkan dalam pemilu, parlemen masih sangat didominasi militer dan mantan tokoh militer.

Tingkat partisipasi rakyat yang tinggi pada pemilu pertama yang diikuti Suu Kyi sejak 1990 itu menunjukkan betapa besar keinginan mereka untuk menjadikan ikon oposisi itu sebagai wakil mereka di parlemen.

Kemenangan bagi Suu Kyi menandai era baru dalam 24 tahun karier politiknya, yang sebagian besar dihabiskannya sebagai tahanan rumah atau penjara.

Pemilu sela itu sebenarnya untuk mengisi 45 kursi kosong dari total 664 posisi di parlemen nasional. Meskipun Suu Kyi dan partainya berhasil meraih 45 kursi itu, keseimbangan kekuatan belum akan tercapai karena parlemen masih didominasi militer atau mantan tokoh militer dari rezim lama.

Namun demikian, Aung San Suu Kyi berharap kemenangan ini bisa memujudkan era baru bagi Burma. Suu Kyi adalah aktivis pro-demokrasi Myanmar dan pemimpin NLD. Ia menjadi tahanan rumah selama 15 tahun dan dibebaskan secara resmi oleh junta militer Myanmar pada tanggal 13 November 2010.

Suu Kyi menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991 karena perjuangannya mempromosikan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer. Suami Suu Kyi meninggal tahun 1999 dan dia hanya memiliki kontak terbatas dengan anaknya, karena kekhawatiran jika meninggalkan Burma dia tidak akan diijinkan untuk kembali.

Setelah kemenangannya dalam pemilu, Aung San Suu Kyi kembali mendapatkan paspornya untuk pertama kali dalam 24 tahun. Sebelumnya paspor Suu Kyi dicabut karena dianggap sebagai

musuh politik junta militer saat itu [22] Tahun 1988 ia pernah mengunjungi Burma untuk menjaga ibunya yang tengah sakit dan kemudian aksi protes pecah dan dia tidak bisa meninggalkan Burma sejak saat itu.

Sungguh, kemenangan Suu Kyi menumbuhkan harapan rakyat. Kemenangan itu akan menjadi langkah besar bagi rekonsiliasi nasional.

"Saya berdiri di sini bukan untuk memberitahu Anda soal apa yang harus dilakukan tapi saya ingin katakan apa yang kami butuhkan," kata Suu Kyi dalam pidatonya di Bangkok setelah menghadiri World Economic Forum Bangkok, Suu Kyi melakukan perjalanan ke Eropa .

Dia mendesak para investor untuk segera masuk ke Burma agar menciptakan peningkatan taraf hidup bagi warga Burma.

"Kami tak ingin investasi justru membawa ketidakadilan dan memberi keistimewaan bagi mereka yang sudah mendapatkannya. Yang kami inginkan adalah pekerjaan," kata Suu Kyi.

Suu Kyi menambahkan pelatihan keterampilan kerja adalah sebuah kunci utama bagi warga Burma untuk mendapatkan pekerjaan yang diciptakan para investor.

Saat ini, pemerintah sipil Burma yang didukung militer telah melakukan serangkaian reformasi untuk membuka negeri yang selama ini sangat tertutup.

Kondisi negeri itu kini juga lebih bebas untuk gerakan oposisi, bahkan Partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi yang selama ini dilarang bisa mengikuti pemilihan umum.

[22] Komisi Pemilihan Burma sudah mengukuhkan bahwa pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan partainya memperoleh kemenangan besar dalam pemilihan sela. Komisi Pemilihan mengatakan partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangkan sedikitnya 43 kursi dari 45 kursi parlemen yang diperebutkan. (BBC, 2 April 2012).

Bagaimanapun, NLD yang telah menjadi kekuatan utama bagi demokrasi di Myanmar selama lebih dari dua dasawarsa, kini mendapatkan kursi di meja pembuat kebijakan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu.

Meskipun pihak militer dan pemerintah sipil-militer yang berkuasa berusaha membantu Partai Solidaritas dan Pengembangan Persatuan [USDP] untuk memenangkan pemilihan umum sela itu - termasuk adanya laporan pelecehan terhadap kandidat dan pendukung NLD, tuduhan penyerangan terhadap pendukung NLD, dan larangan bagi NLD untuk mengadakan kampanye di beberapa lokasi umum terkemuka -, namun NLD tetap meraih suara mayoritas dan USDP hanya memenangkan sedikit bagian dari 48 kursi yang diperebutkan.

Suu Kyi menandaskan kemenangan partainya dengan memenangkan sebuah kursi parlemen untuk dirinya sendiri. Dia telah membangun hubungan yang hangat dan konstruktif dengan Presiden Thein Sein dan telah berkembang harapan di seluruh Burma bahwa presiden akan menawarkan sebuah kursi di kabinet kepada Suu Kyi.

Hasil dari perkembangan ini adalah bahwa, Burma atau Myanmar memiliki sistem multi-partai yang sesungguhnya untuk pertama kalinya sejak kudeta militer pada tahun 1962.

Para pemimpin AS/Barat merasa optimis akan langkah reformasi nyata yang dilakukan secara konsisten di bawah pemerintahan Presiden Thein Sein. Di bawah pengarahannya, Burma telah meliberalisasikan hukum investasi, berencana untuk membebaskan mata uang, meluncurkan rencana untuk mengakhiri perang sipil antara negara itu dengan pemberontak minoritas etnis, mengundang kembali Dana Moneter Internasional [IMF] dan lembaga keuangan internasional lainnya, dan secara agresif mengusahakan investasi dan hubungan dari negara-negara di seluruh dunia.

Pada bulan Maret 2012, pemerintah Burma mengumumkan bahwa mereka juga mengizinkan bank asing untuk beroperasi di dalam negeri, sebuah langkah pembuka yang besar bagi reformasi keuangan. Banyak penanam modal dan analis yang hendak datang telah membandingkan potensi pembukaan ini dengan saat awal reformasi yang terjadi di Cina pada akhir tahun 1970-an di bawah Pemimpin Besar Deng Xiaoping.

Bahkan sebelum kemenangan NLD di pemilihan umum, parlemen telah aktif mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah juga telah menyiapkan sebuah komisi hak asasi manusia nasional, dengan mengundang para politisi yang pernah diasingkan dan membebaskan banyak tahanan politik.

ISU MINORITAS

Sebelum pemilu demokratis 2012, sejarah politik Myanmar mencatat berbagai lembaran hitam, namun juga membekaskan harapan. Kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilihan umum (pemilu) 1990 tidak diakui, dan junta militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Bahkan, pimpinan LND Aung San Suu Kyi, di tahan. Dampaknya adalah, Myanmar tidak hanya terjerumus ke dalam sistem pemerintahan yang otoriter, tapi juga terkena imbas sanksi politik dan ekonomi dari komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat.

Kondisi ini akhirnya memaksa Burma melaksanakan pemilu yang demokratis dan kebijakan luar negeri yang terbuka, menyusul kemenangan Aung San Suu Kyi dalam pemilu 2012. Demokratisasi ini menghantarkan Myanmar pada perubahan-perubahan yang substansial seperti terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2014, dan dicabutnya sanksi impornon-militer oleh AS/Barat. Bahkan AS telah mengizinkan sejumlah perusahaan-perusahaan AS untuk beroperasi di Myanmar.

Namun baik kubu Suu Kyi maupun militer masih dibayangi tragedi pembantaian Muslim Rohingya. Pasalnya, Burma adalah contoh negara bangsa yang gagal mewujudkan semboyannya "unity in diversity" (berbeda-beda tapi tetap satu juga) karena konflik dan pertumpahan darah antara negara dan minoritas. Politik "Burmanisasi" dari negara terhadap minoritas etnis di negeri itu, tidak berhasil, bahkan pembantaian atas etnis minoritas makin digalakkan.[23]

Selain Rohingya, etnis Kachin, Karen, dan Shan juga termasuk kelompok suku populer di Myanmar dan telah ditumpas pada era pemerintahan militer. Sementara Muslim Myanmar yang berjumlah sekitar satu juta jiwa terus mengalami diskriminasi di tengah warga negara itu. Satu juta Muslim Rohingya berada di bawah penindasan junta sejak tahun 1962 hingga sekarang. Junta Myanmar memegang kekuasaan mutlak dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada partai, etnis, agama, dan kelompok lain untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, dan budaya. Junta menumpas setiap etnis, partai, dan agama yang tidak sejalan dengan gagasan dan kebijakan militer. Situasi di era Perang Dingin dan setelahnya telah menguntungkan militer Myanmar. Pada era Perang Dingin, militer Myanmar mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer dari Komunis China. Dan setelah berakhirnya era itu, Myanmar dan junta di negara itu memperoleh dukungan dari India atas alasan geografis dan keamanan.

Pada dasarnya, Myanmar bertindak sebagai lingkaran penghubung antara China dan India. Oleh karena itu, jarang sekali mendapat tekanan dari dunia internasional. Dalam hal ini, pembunuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan serta penangkapan Muslim Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar ternyata semakin keras dan terpantau masyarakat interna-

[23] Lihat, Martin Smith, "Ethnic Groups in Burma, Burma: Development, Democracy and Human Rights", *Anti-Slavery Internasional's Human Right Series, 1994*, terutama pengantar dan bab I. Martin Smith, "Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity", *Politics in Contemporary Asia Series* (Zed Books, 1999).

sional. Kekerasan kejam tersebut dilakukan oleh ekstrimis Buddha dan pasukan pemerintah. Ribuan jiwa Muslim tak berdosa gugur dalam kekerasan tersebut. Radio Free Europe pada 12 Juli 2012 melaporkan bahwa sebuah helikopter Burma menyerang tiga kapal yang membawa hampir 50 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian di barat Burma. Serangan itu diyakini telah membunuh semua orang di kapal.

Dari 16 Juni 2012 dan seterusnya, militer terlihat lebih aktif dalam melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massal dan penangkapan di negara bagian Rakhine Utara. Sudah sejak dulu, junta Myanmar menerapkan program sistematis pembersihan agama dari Muslim Rohingya, dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk bebas bergerak, pernikahan, keimanan, identitas, kepemilikan bahasa, warisan dan budaya, kewarganegaraan, pendidikan dan lain-lain. Menurut laporan terakhir, Muslim Rohingya di Myanmar berada dalam penderitaan tragis. Laporan mengatakan 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 80.000 lebih terlantar.

Problem kaum minoritas Rohingya merupakan masalah akut yang dihadapi Muslim Myanmar dan tidak terkait sepenuhnya dengan junta militer, sebab dalam fakta problem itu telah melanda kaum Muslim jauh sebelum militer berkuasa, bahkan sejak era kolonial. Problem akut yang dihadapi Muslim Rohingya bersifat sangat historis mengakar, baik dari segi sosio-ekonomi maupun kultur keagamaan. Tragedi atas Rohingya membutuhkan solusi komprehensif dari semua aktor dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimanapun, pembantaian minoritas Muslim ini menjadi perhatian masyarakat internasional dan justru menyudutkan Suu Kyi maupun rezim militer Burma yang dianggap tidak manusiawi, bengis, bahkan anti-Muslim.

Militer Burma sepertinya sejak lama sudah bernafsu membasmi minoritas Rohingya ini, dan sejak 1960-an, rezim militer di bawah Jenderal Ne Win melakukan pendekatan baru untuk menghentikan gerakan sentrifugal minoritas Muslim dan Kristen dan lainnya yakni di samping operasi militer, juga dilakukan "program pangkas empat", yaitu: memangkas akses pangan, dana pembangunan, kecerdasan, dan akses ke pemerintahan. Program pangkas akan berhenti jika etnis minoritas menghentikan pemberontakan atau gerakan sentrifugal yang dinilai penguasa membahayakan .[24]

Langkah rezim militer Burma dalam memberangus Muslim Rohingya, merupakan tragedi pembantaian yang celakanya dilakukan oleh sebagian penganut Buddha radikal yang disokong junta militer Myanmar. Menyedihkan bahwa pembantaian itu seakan sepi reaksi dan kecaman dunia internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika yang mengaku sebagai pembela HAM terkesan bungkam, demikian halnya kubu Suu Kyi. Politik standar ganda oleh militer dan kubu Suu Kyi terkait isu Rohingya ini, sebagaimana PBB dan AS, menunjukkan lumpuhnya moralitas dan etika kemanusiaan. Semua itu juga merefleksikan padamnya humanisasi sekaligus ambiguitas demokrasi yang mereka anut.

Burma, ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan badan internasional lainnya semestinya sigap dalam mengupayakan solusi konstruktif untuk mengatasi derita minoritas Muslim Rohingya, baik melalui kampanye, diplomasi, maupun langkah kemanusiaan. Dengan cara demikian, kemenangan Suu Kyi, pembaruan ekonomi dan politik Burma maupun transisi demokrasi di Rangoon, memberikan harapan akan masa depan Burma yang lebih baik. Sungguh isu Rohingya dan kompleksitas masalah di Burma ini merupakan batu ujian yang berharga, tidak hanya bagi rakyat

[24] Teuku Kemal Fasya, "Dilema Rohingya dan Demokrasi Myanmar", opini, *Kompas,* 03 Agustus 2012.

Burma, namun juga bagi masyarakat internasional yang peduli dan punya hati nurani sebagai masyarakat warga dunia.[25] (*)

---

[25] Masyarakat Muslim Rohingya sudah puluhan tahun ada di Myanmar sebagai komunitas muslim, tetapi junta militer Myanmar tetap menganggap mereka sebagai pendatang illegal yang harus diusir. Tragedi Rohingya jelas menunjukkan belum seriusnya junta militer mendemokrasikan negara itu. Mantan Wapres M.Jusuf Kalla telah berusaha menyelesaikan masalah pembantaian Rohingya itu, suatu bukti lagi dari komitmen Indonesia bagi perdamaian di Asia Tenggara..

Bush, Islam, dan Asia Tenggara

Lawatan Presiden AS George W. Bush ke Indonesia November 2006 tidak terlepas dari kepentingan strategis Amerika di kancah global. Bush menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan beberapa agenda bilateral. Namun, dikhawatirkan kehadiran Bush akan membangkitkan sentimen Islam radikal.[1]

Pasca runtuhnya Soviet, AS bertekad untuk tetap menjadi satu-satunya negara adidaya. Di dunia Islam, ambisi itu ditanggapi dengan kecemasan dan ambivalensi antara negeri-negeri muslim seperti Saudi dan Kuwait yang mendukung AS dan negeri-negeri muslim yang menentangnya, semacam Iran dan Suriah, selebihnya negeri-negeri muslim bersikap netral.

Di belahan Eropa, ambisi AS itu menimbulkan keretakan yang makin lebar dengan Eropa, sekutunya di Barat. Eropa saat ini menjadi satu-satunya kawasan di mana kekuasaan tandingan atas AS dapat muncul. Kasus serangan AS ke Iraq menampakkan permainan *divide and rule* oleh Washington dengan memainkan Inggris dan Eropa Timur yang mendukung serangan AS ke Iraq, berhadapan dengan (vis-à-vis) Prancis-Jerman yang menolak invasi/hegemoni AS ke Iraq tersebut.

AS DAN DUNIA ISLAM

Persepsi Bush banyak dipengaruhi pandangan Samuel P. Huntington dan Bernard Lewis dalam memandang dunia Islam. Bagi Bush, AS menyadari betapa sangat sulit dunia Islam (Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara) menerima standar AS dalam soal Islam militan. Dunia Islam hingga kini tetap menolak memasukkan Hamas atau Jihad Islam di Palestina

---

[1] Baca, Herdi Sahrasad, "Bush, Huntington, dan Indonesia", *Tempointeraktif/ Koran Tempo*, Senin, 20 November 2006, dan Herdi Sahrasad, "Bush, Islam, dan Asia Tenggara", *Koran Jawa Pos/Indopos*, 9 Nopember 2006.

sebagai kelompok teroris. Sebab, mereka berjuang membebaskan negeri mereka dari penjajahan Israel. [2]

Huntington sudah jauh-jauh hari mengingatkan Bush dan pemimpin Barat yang lain agar mereka waspada terhadap perkembangan Islam. Karena itulah, Huntington memperingatkan, pertumbuhan penduduk muslim merupakan satu faktor destabilisasi terhadap masyarakat muslim dan lingkungannya, termasuk destabilisasi terhadap AS/Barat. Jumlah besar kaum muda muslim dengan pendidikan menengah akan terus memperkuat kebangkitan Islam dan militansi Islam, militerisme, dan imigrasi ke Barat.

Hasilnya, pada awal-awal abad ke-21, Barat akan menyaksikan kebangkitan kekuatan dan kebudayaan Islam dan sekaligus benturan antara masyarakat Islam dan Barat.

Dalam bukunya, *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity*, Huntington meyakinkan Bush dan pemimpin Barat bahwa dewasa ini Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS, *This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War*.

Di sini, Huntington menggunakan istilah "perang baru" (new war) antara AS dan Islam militan. Bahwa Islam adalah potensi musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS khususnya. Paralel dengan Huntington, penasihat Gedung Putih, Bush menyebut perang melawan Islam militan itu sebagai *crusade*.

Untuk memengaruhi Bush, Huntington menyodorkan polling di sejumlah negeri Islam yang menunjukkan bahwa sebagian besar kaum muslim sangat tidak menyukai kebijakan AS. Polling di sembilan negara Islam, Desember 2001-Januari 2002, yang ditunjukkan Huntington kepada Bush dan rakyat AS menampilkan opini umum di kalangan muslim bahwa AS adalah "kejam,

---

[2] Lihat, Samuel P. Huntington, *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon and Schuster, 2004).

agresif, arogan, mudah terprovokasi, dan culas dalam politik luar negerinya".

Banyak kelompok Islam oleh Huntington dimasukkan ke kategori militan sehingga layak diserang AS secara dini. Tanpa memberikan alasan, sebab-sebab, dan fakta yang akurat dan komprehensif, Huntington menyatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir kaum muslim memerangi kaum Protestan, Katolik, Kristen Ortodoks, Hindu, Yahudi, Buddha, atau China. Di sini, Bush kemudian melihat Afghanistan dan Iraq sebagai negeri muslim yang layak diserang. Ketegangan dan terorisme global pun mencuat tak terelakkan, terutama dilancarkan aktivis Islam Al Qaidah dan jaringannya.

Dalam konteks Asia, terutama Asia Tenggara, Bush membuka peluang bagi peningkatan AS-ASEAN dan hubungan RI-AS di berbagai bidang yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengembangkan *area of common interests* (kepentingan bersama) serta meminimalkan perbedaan (area of differences) dalam berbagai segmen pola hubungan AS-ASEAN dan RI-AS tanpa harus "hanyut" ke dalam pelukan "hegemoni AS".

AS DAN ASIA TENGGARA

Asia Tenggara masih trauma dengan malapraktik IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di kawasan ini 1997-1998, yang menyebabkan krisis itu berkepanjangan, sebagaimana dicatat guru besar National University of Singapore Chang Heng Che (kini Dubes Singapura untuk AS) dan ekonom Paul Krugman serta Jeffrey Sach.

AS yang mengendalikan IMF dan Bank Dunia dinilai mereka tidak berbuat banyak dalam upaya mengatasi krisis ekonomi itu sehingga mendorong ASEAN lebih mendekati China yang lebih responsif dan suportif dalam membantu ASEAN mengatasi krisis ekonomi.

Dewasa ini, di Asia Tenggara, Indonesia merupakan elemen penting dalam perang AS dengan terorisme global, termasuk perang terhadap Al Qaidah, Jamaah Islamiyah, dan jaringannya. Indonesia adalah *anchor of stability* (jangkar stabilitas) di Asia Tenggara.

Keberhasilan Indonesia menangkap pelaku teror dan menghancurkan jaringan terorisme merupakan kontribusi sangat penting terhadap upaya masyarakat internasional dan pemerintah AS dalam menghadapi terorisme global. Karena itu, secara geopolitik dan geo-ekonomi, peran Indonesia di mata AS bagi terwujudnya stabilitas di Asia Tenggara sangat krusial, sekaligus sebagai sekutu pengimbang terhadap China di Asia. Sementara di mata AS potensi pasar dan sumber daya alam Indonesia sangat besar.

Dalam paradigma pemerintah AS yang meletakkan perang terhadap terorisme dalam kerangka ideologis, Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia merupakan role model yang dibutuhkan AS. Masyarakat Indonesia dengan tradisi agama dan pluralisme serta memiliki toleransi, juga berperan sebagai *counter balance* dalam menghadapi peningkatan radikalisme agama dan terorisme yang dapat membahayakan sendi-sendi demokrasi dan stabilisasi di Asia Tenggara.

Karena itu, lawatan Bush pada November ini ke Indonesia, negeri terbesar di Asia Tenggara, akan memperkuat relasi AS-RI dan AS-ASEAN seiring dengan penguatan relasi AS-NATO di Eropa bahwa kedua hal itu vital bagi Washington vis-à-vis dunia Islam. AS butuh legitimasi dari Indonesia dalam meneruskan kebijakan memerangi terorisme ke depan.

Namun demikian fakta bahwa perilaku AS di bawah pemerintahan Bush sebagai terorisme negara dalam kasus serangan ke Iraq untuk menggusur Saddam Hussein dan Afghanistan soal Taliban serta intervensinya di Palestina dan tekanannya atas Iran soal program nuklir tidak bakal didukung dan dilegitimasi oleh Indonesia.

Kepentingan dan popularitas Bush di dalam negeri tidak akan terdongkrak dengan kunjungannya ke Jakarta. Pemerintah SBY-Kalla bersikap normatif, standar, dan terukur dalam menerima kehadiran Bush. Apalagi, masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah dikecewakan kebijakan Bush yang menggunakan standar ganda dalam hubungannya dengan dunia Islam.

Dalam hal ini, Indonesia harus meyakinkan AS bahwa perangnya melawan terorisme akan gagal tanpa menyelesaikan masalah Palestina dan menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah (Timteng). Bush sebaiknya menyimak laporan akademisi di Harvard dan Chicago yang berseberangan dengan Samuel Huntington bahwa perdamaian di Timteng tak akan terjadi tanpa berdialog dan mendengar langsung keluhan kelompok Sunni-Syiah Iraq, Hamas, dan Hizbullah yang legitimate dan didukung konstituennya.

BUSH, HUNTINGTON, DAN INDONESIA

Kedatangan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush ke Indonesia pada November 2006 menjadi diskursus di kalangan Islam dan masyarakat madani yang bersikap kritis dan waspada terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Berbagai demonstrasi digelar menyambut pertemuan Bush dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bush yang ketika itu baru saja mengalami pukulan telak dengan pengunduran diri Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, yang dikenal menganut garis keras dalam kebijakan luar negeri AS, khas kubu *hawkish,* membicarakan kerjasama keamanan, politik, dan ekonomi dengan Yudhoyono. Dalam bidang ekonomi, pembicaraan menyangkut operasi kor-porasi AS yang vital di Indonesia, seperti Exxon, Freeport, dan Caltex.[3]

Bush memiliki pandangan yang paralel dengan Samuel P. Huntington, akademisi Harvard University dan penasihat kawakan

---

[3] Lihat, Herdi Sahrasad, "Bush, Huntington, dan Indonesia"; juga, Herdi Sahrasad, "Bush, Islam, dan Asia Tenggara."

Gedung Putih, yang melihat tragedi 11 September 2001 sebagai faktor signifikan bagi penguatan hegemoni AS, yang dimanifestasikan dalam bentuk kehadiran dan peran global AS dalam pentas politik internasional secara lebih dominan. Bush dan Huntington adalah kubu *hawkish*, penganut kebijakan garis keras terhadap dunia Islam.

Serangan teroris 11 September memperkuat keyakinan Bush dan Huntington bahwa kepentingan keamanan negara itu tidak dapat dilepaskan dari situasi keamanan global, yang pada gilirannya menuntut penguatan posisi hegemoni AS dan keterlibatan luas dalam percaturan politik internasional. Secara geopolitik, di mata Bush dan Huntington, Indonesia merupakan jangkar stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, selain untuk mengimbangi kehadiran China. Penguatan itu tampak jelas antara lain dalam dua aspek, yakni respons AS terhadap terorisme pada tataran umum, dan invasi ke Afganistan dan Irak serta intervensi ke Palestina pada tataran khusus.

Dalam merespons terorisme, kalkulasi kebijakan keamanan, pertahanan, dan luar negeri AS dapat dikatakan berubah secara signifikan, yang pada gilirannya telah mempengaruhi konstelasi politik internasional. Di sini sikap Bush yang keras terhadap terorisme teraktualisasi dalam kebijakan AS yang melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antarnegara. Pernyataan Bush, "*either you are with us or you are with the terrorists,*", secara hitam-putih menggambarkan dunia yang terpilah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*). Pembelahan dunia demikian mempersulit posisi banyak negara, khususnya negara pascakolonial yang tidak ingin dipersepsikan oleh konstituennya berada dalam orbit AS.

Lagi pula, AS sulit untuk menerima pendapat negara lain bahwa perang melawan terorisme tidak harus dilakukan di bawah pimpinan AS. Sementara itu, bagi banyak negara berkembang,

termasuk Indonesia, masalah kemiskinan, beban utang luar negeri, separatisme, keterbelakangan, konflik sosial, dan konflik antaretnis dilihat lebih berbahaya ketimbang masalah terorisme sebagai ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah negara.

Bagi Bush dan Huntington, tragedi 11 September 2001 juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan AS dalam menilai sebuah negara. Sekarang ini, AS cenderung lebih hirau pada masalah terorisme ketimbang isu demokrasi dan hak asasi manusia. Kenyataan bahwa Presiden Pervez Musharraf di Pakistan dan militer Thailand di bawah Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin naik ke tangga kekuasaan melalui kudeta militer tidak lagi menjadi kendala dan penghalang bagi AS untuk menjalin aliansi antiterorisme dengan kedua negara itu.

Dengan jelas Washington cenderung menjadikan komitmen melawan terorisme lebih menonjol, ketimbang komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, sebagai alat untuk menilai "siapa lawan dan siapa kawan?". Akibatnya, terjadi pergeseran agenda global dari demokrasi dan hak asasi manusia menjadi perang khususnya terhadap terorisme yang dianggap mengancam kepentingan dan keamanan AS secara langsung.

PERSEPSI HUNTINGTON

Persepsi Bush paralel dengan Huntington, yang dalam bukunya *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity*, menyatakan musuh utama Barat pasca-Perang Dingin adalah Islam militan, dan dari berbagai penjelasannya, definisi "Islam militan" melebar ke mana-mana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, baik radikal maupun fundamental.

Huntington pernah menduduki jabatan-jabatan prestisius di bidang akademis dan aktif terlibat dalam perumusan kebijakan luar

negeri AS. Pada 1977-1978, ia bekerja di Gedung Putih sebagai Coordinator of Security Planning for the National Security Council. Dalam bukunya, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Huntington masih tidak terlalu tegas menyebut Islam sebagai alternatif musuh baru bagi Barat, tapi dalam *Who Are We?*, ia menegaskan betapa Islam menjadi musuh dan ancaman bagi Barat.[4]

Huntington mendukung agar AS/Barat melakukan *preemptive strike* terhadap kaum militan. Nasihat Huntington memang telah dijalankan Gedung Putih dengan menyerang Irak dan Afganistan serta mengintervensi Palestina, apalagi pada 2002 doktrin *preemptive strike* (serangan dini) dan *defensive intervention* (intervensi defensif) telah secara resmi diumumkan. Kekuatan Islam militan di berbagai belahan bumi pun dihabisi oleh AS, dan yang disebut sebagai Islam militan bukan hanya Usamah bin Laden atau kelompok Al-Qaidah, melainkan mencakup juga banyak kelompok lain yang bersifat negatif terhadap AS.

Pandangan Huntington mempengaruhi Bush, terutama persepsi bahwa apa yang dulu dilakukan oleh komunis internasional juga dilakukan kini oleh kelompok-kelompok Islam militan, seperti aksi protes dan demonstrasi damai, dan partai-partai Islam ikut bertanding dalam pemilihan umum. Kalangan Islam militan juga melakukan kerja-kerja amal sosial dan kultural.

Dalam hal ini, akibat kecenderungan kuat mengaitkan Islam dengan terorisme di kalangan pengambil kebijakan di AS, tatanan politik global semakin kompleks dan rumit oleh ketegangan antara AS dan negara Islam ataupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Kehati-hatian dari negara berpenduduk mayoritas muslim dalam merespons persoalan terorisme ini kerap menimbulkan kecurigaan dari AS, bahkan tidak jarang melahirkan tekanan-tekanan politik yang tidak mudah untuk dihadapi. Akibat-

[4] Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations* and the *Remaking of World Order* (Touchstone Books, 1996),

nya, pemerintah di negara berpenduduk mayoritas muslim kerap dihadapkan pada dilema antara kewajiban memberantas terorisme di satu pihak dan keharusan menjaga hak-hak konstituen domestik di pihak lain. Meminjam studi Rizal Sukma (CSIS, 2003), kebijakan perang terhadap terorisme yang dijalankan AS telah menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok Islam di banyak negara muslim.

Dari uraian di atas tampak bahwa salah satu makna kunjungan Bush ke Indonesia adalah memperkuat relasi Washington-Jakarta. Apalagi, sampai saat ini, AS masih mengalami kesulitan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan perang melawan terorisme yang tidak menimbulkan komplikasi dalam hubungannya dengan dunia Islam, termasuk Indonesia. Sudah tentu Bush ingin memainkan “kartu Islam Indonesia” untuk melegitimasi kepentingan AS/Barat dan perilaku/kebijakan AS di kancah global, sekaligus sebagai konsumsi politik dalam negerinya. Di sinilah kemungkinan kunjungan pemimpin AS itu ke Indonesia menuai protes dan mengalami komplikasi ekonomi-politik, yang harus didekonstruksi dan dicari solusinya oleh pemimpin kedua negara itu sendiri. ***

PENUTUP

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang mengandung kompleksitas masalah sejak datangnya era kolonialisme Barat pada abad 16 (Spanyol, Portugis, Belanda) sampai tibanya era kemerdekaan bangsa-bangsa di kawasan itu pada abad ke-20. Kolonialisme mewariskan memori kolektif di kalangan bangsa-bangsa Asia Tenggara mengenai heroisme dan pengorbanan bersama melawan penjajahan seperti yang terjadi di Indonesia, Vietnam, Philipina, Burma dan Kamboja. Sementara era pasca kolonial ditandai dengan pembangunan ekonomi dan modernisasi pada paruh terakhir abad 20, yang pada satu sisi membawa kemajuan sosial-ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan struktural dan ketidakadilan serta kerusakan lingkungan, juga melahirkan konflik-konflik sosial dan separatisme di kawa-san ini (Thailand Selatan, Filipina Selatan, Papua, pembantaian etnis Rohingya di Burma dan lainnya).

Setelah mengalami periode otoriterisme yang cukup lama, demokratisasi di Asia Tenggara dimulai pada dasawarsa terakhir abad ke-20, sekitar tahun 1990-an, sebagai dampak dari gelombang ketiga demokratisasi global, dengan kompleksitas masalah yang tidak kalah ruwetnya. Demokratisasi di Filipina, Indonesia, Thailand dan Myanmar, misalnya, masih menyisakan pertanyaan: apakah bisa bertahan dan berkembang maju, atau malah jatuh bangun tak tentu tuju?.

Belum mengendap proses demokratisasi itu, pada awal abad 21, Asia Tenggara mengalami serangan terorisme pada kasus Bom Bali 2002, tepatnya sekitar setahun setelah bom WTC 11/9/2001, suatu tragedi yang menyentakkan nurani masyarakat dunia. Selain Bom Bali, ledakan Bom Manila juga mengejutkan dunia internasional.

Akibatnya Asia Tenggara disebut sebagai "front kedua" terorisme dan gerakan Islam radikal setelah ''front pertama'' di Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, seperti yang terjadi di Bali, dan Manila, dimana terjadi penyerangan terhadap tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ancaman keamanan mulai bergeser karena terorisme yang merajalela, sehingga keamanan bukan lagi sekedar persoalan gencatan senjata antar negara, melainkan peledakan bom yang mungkin terjadi di mana saja, di tempat-tempat umum, di hotel, pusat perbelanjaan, bahkan tempat ibadah.

Masalah terorisme merupakan salah satu isu yang menjadi tantangan besar bagi stabilitas dan keamanan di negara-negara Asia Tenggara, dimana intensitas aktivitas dan serangan dari teroris yang ada di Asia Tenggara, mengindikasikan bahwa wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu sarang dari jaringan terorisme internasional.

Tentang ancaman terorisme di Asia Tenggara, Prof Rohan Gunaratna dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura beranggapan bahwa terdapat pergeseran *center of gravity of terrorism* dari kawasan Timur Tengah menuju kawasan Asia Pasifik yang terjadi di tahun 1990-an, seiring dengan kebijakan AS me-ngenai perang melawan terorisme secara global.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa negara-negara Asia Tenggara telah menjadi ladang perekrutan dan tempat pengoperasian jaringan terorisme internasional. Terdapat organisasi-organisasi radikal yang dianggap sebagai organisasi terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Di antaranya *Jemaah Islamiyah* (JI) di Indonesia, *Abu Sayyaf Group* (ASG), *Moro Islamic Liberation Form* (MILF) Filipina, dan *Kumpulan Mujahidin Malaysia* (KMM) Malaysia. ASEAN berusaha keras memadamkan gerakan terorisme ini.

Organisasi-organisasi ini menjadi gambaran bahwa terorisme dilakukan oleh kelompok *sub-state*, bukan *state*, yang memiliki ja-

ringan terorisme internasional, sehingga disebut juga dengan terorisme transnasional.

Asia Tenggara juga menghadapi perbedaan kepentingan yang merupakan faktor utama dalam setiap konflik yang terjadi di antara negara-negara kawasan ini.

Negara-negara Asia Tenggara membentuk cincin di sekitar China Selatan dan membentang di sepanjang Laut China Selatan, yang termasuk kawasan laut paling penting secara strategis dan ekonomis di dunia.

Asia Tenggara juga menghubungkan China dan kekuatan nomor dua di kawasan itu yakni India. Selain itu lebih dari 600 juta orang hidup di negara-negara anggota ASEAN. Secara keseluruhan organisasi ASEAN membentuk kekuatan ekonomi nomor tiga di Asia. Semua faktor tersebut membuat Asia Tenggara demikian menarik bagi Amerika Serikat.

Kepentingan Amerika Serikat bertentangan dengan tradisi pengaruh besar China yang secara geografis saja, sudah dekat dengan Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi pada hampir seluruh negara Asia Tenggara terkait erat dengan kemajuan ekonomi Cina. Besarnya pengaruh Cina, ditunjukkan dalam kasus Kamboja.

Dalam konteks kewilayahan, Asia Tenggara memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Hal tersebut kerap menjadi penyebab dalam konflik mengenai perbatasan negara-negara yang berada di kawasan.

Sumber konflik perbatasan wilayah tidak hanya mengenai permasalahan zona kelautan melainkan dikarenakan oleh banyak hal, antara lain: perbedaan penggunaan bukti sejarah untuk membuktikan kewilayahan, kekayaan sumber daya alam suatu wilayah sehingga negara-negara yang berkonflik saling bersikukuh mempertahankan wilayah tersebut. Juga penyelundupan di wilayah perbatasan, pengelolahan perbatasan yang belum optimal dan kelamahan aparat yang menjaga perbatasan. Misalnya, kasus

blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang disebabkan perbatasan negara di Laut Sulawesi. Kasus kedua masih melibatkan Indonesia dan Malaysia yaitu kasus Sipadan-Ligitan. Tidak hanya dengan Indonesia, rupanya Malaysia juga terlibat dalam konflik perbatasan dengan Filipina, dengan kasus wilayah Sabah yang diklaim oleh keduanya.

Konflik di Laut China Selatan juga mengganggu stabilitas Asia Tenggara. Kekayaan mineral (migas) di kawasan Laut China Selatan menjadi salah satu pemicu konflik. Dengan luas daratan yang hanya mencapai 3 kilometer persegi dan luas wilayah lautan 244.700 kilometer persegi di wilayah Laut China Selatan, kawasan itu menjadi daerah perebutan beberapa negara di sekitarnya seperti Vientam, Filipina, China, Malaysia dan seterusnya. Konflik itu bisa menyeret AS, China dan Jepang jika tidak dapat diselesaikan secara damai.

Namun demikian, di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa-bangsa Asia Tenggara, masih ada benang merah yang menjadi ikatan-ikatan keadaban di antara mereka.

Arkeolog FIB- UI, Dr. Agus Aris Munandar dalam risalahnya ''Kawasan Asia Tenggara dalam Dinamika Sejarah Kebudayaan'' (*Departemen Arkeologi FIB UI, Depok,* 2009) menyingkapkan bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara tempat terbentuknya ASEAN, maka terdapat beberapa *central concept* yang dapat dikembangkan bersama oleh negara-negara ASEAN sebagai peradaban ASEAN (ASEAN Civilization).

Pertama, kebudayaan leluhur bersama Austronesia: jejak kebudayaan ini ada di setiap negara ASEAN hingga sekarang, walaupun tersaput oleh anasir kebudayaan baru yang datang kemudian. Contoh: terekam dalam bahasa, arsitektur rumah tradisional, tata kota, *"the soul of government system", religi,* etnik, kesenian, ornamen, adat sopan satun, dan lain-lain.

Kedua, kemampuan peradaban ASEAN untuk berinteraksi dan berdialog dengan budaya luar yang datang, kemudian unsur budaya luar itu menjadi luluh dan dianggap sebagai milik sendiri. Akibat adanya kemampuan tersebut, penduduk wilayah Asia Tenggara sejak masa silam tidak pernah menjadi India atau menjadi China dalam bidang budaya, melainkan tetap Austronesia.

Ketiga, tradisi agraris dan maritim yang sebenarnya sangat kuat mengakar, namun akibat kolonialisme banyak negara yang melupakan kedua kemampuan itu. ASEAN sebagai ethno-genesis Austronesia harus mampu mengembangkan lagi pencapaian-pencapaian baru di bidang agraris (telah dipelopori Thailand) dan maritim (seharusnya Indonesia).

Keempat, toleransi dan solidaritas ASEAN telah ditunjukkan sejak masa silam. Terdapat berita tertulis yang menyatakan ada kerjasama antara beberapa kerajaan Asia Tenggara untuk membendung pengaruh China yang selalu mendesak ke selatan.

Kelima, penyebaran peradaban "kita bukan berasal dari mana-mana, namun menyebar ke mana-mana". Bercermin sejak masa silam wilayah Asia Tenggara selalu didatangi oleh pengaruh luar, dan pengaruh budaya Asia Tenggara itu meluas hingga sepertiga dari bola bumi.

Dengan menyimak paparan di atas, Asia Tenggara memiliki posisi geopolitik dan geostrategi yang unik, signifikan dan sepantasnya tidak diremehkan oleh negara-negara adidaya dan negara besar di Asia.

Bagaimanapun, ASEAN, sebagai bentuk regionalisme di Asia Tenggara, memiliki alasan dan prospek masa depan dalam membangun kerjasama, stabilitas dan keamanan sesuai kerangka ZOPFAN (Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas) untuk menyangga perdamaian Asia Pasifik dan dunia, dimana kiranya Indonesia dan ASEAN merupakan jangkar stabilitas yang menentukan di kawasan.

Buku ini tentu saja jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi perkenalan awal bagi para mahasiswa dan peminat studi Asia Tenggara untuk membaca "politik dan kepemimpinan" di kawasan yang menjadi perebutan pengaruh negara-negara besar dan adidaya itu.***

BIBLIOGRAFI

A. *Teeuw* dan D.K. *Wyatt*., *Hikatat Pattani*. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1970).

Abdurrahman Wahid, "Anwar, UMNO", *Kompas,* Selasa (20-10-1998).

Abun Sanda, "Inilah Wajah Baru Vietnam'', *Kompas,* Kamis, 30 Agustus 2012.

Ahluwalia, "Klan, Kuasa, dan Kekerasan", *www.inilah.com* (08/01/2008).

Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique, dan Yasmin Hussain, *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah,* (terj.) (Jakarta: LP3ES, 1989).

Ahmad Nyarwi, "Pemilu Malaysia, Rasisme dan Dinasti Politik", *Media Indonesia,* 10 Maret 2008.

Akhwan Ahm Asy'ari Mukarrom dkk, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2008).

Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam, Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nastional Liberation Front* (Jakarta: Darul Falah, 2000), cet-2.

Alexander Irwan, "Bisnis Jepang dan etnis Cina di Indonesia", *Bisnis Indonesia*, 2 Juli 1995.

Alexander Irwan, "Dominasi Pengusaha Etnis Cina di Asia Timur dan Tenggara", *Bisnis Indonesia*, 23 Juli 1995

Alexander Irwan, "Yang Ersatz dan Yang Regional", *Bisnis Indonesia*, 16 Juli 1995.

Ali M Kettani, *Minoritas Muslim di dunia dewasa ini* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Amnesty International, *Indonesia* (London: Amnesty International Publication, 1977).

Amnesty International, *Report of Mission to Singapore 1978,* (London: Amnesty, 1980).

Amy Chua, *World on Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability* (New Haven: Yale Law School, 2003).

Andrew Richard Rihi Iye "Keterkaitan Thailand terhadap Integrasi ASEAN 2015", *Makalah,* seminar ASEAN-DEPLU, Unhas. 2011

Anne Booth dan Peter McCawley, (ed), *Ekonomi Orde Baru,* (terj.) (Jakarta: LP3ES, 1982),

Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992);

Anwar Ibrahim, "Muslims Have No Monopoly Over 'Allah'", *Wall Street Journal,* edisi 27/1/2010.

Anwar Ibrahim, *The Asian Rennaisance* (Singapura: Time Books International, 1998).

Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990)

Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).

Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia* (New York & London: Routledge Curzon, 2003).

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2005).

Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

Bachtiar Iljas ,*Perang Vietnam & Netralisasi Asia Tenggara* (Jakarta: Penerbit Delegasi, 1964).

Barbara Leitch LePoer (ed.), *Thailand, A Country Study* (The Library of Congress, 1987).

Benedict Anderson, *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara dan Dunia* (Yogyakarta: Qalam, 2002).

Benedict J. Tria Kerkvliet, *''Reconsidering Vietnam's political system'', East Asia Forum*, November 26th, 2012.

Benedict R.O'G Anderson, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

Bernard K. Gordon, "The Third Indochina Conflict," *Foreign Affairs,* Fall 1986.

Brian P. Klein, "How Not to Invest in Myanmar, The Risks for the World's Newest Frontier Market", www.*foreignaffairs.com,* 25 Juli 2012.

Buni Yani, "45 Tahun Sejarah Hitam Junta Myanmar", *Jurnal Nasional,* 25 Oktober 2007.

Cesar A. Majul, *Muslim in the Philippine* (Jakarta: LP3ES, 1989).

Chan Heng Chee, *Singapore: The Politics of Survival* (Singapore: Oxford University Press, 1971).

Chan Heng Chee, *The Dynamic of One Party Dominance* (Singapore: NUS Press, 1976).

Charles A. Fisher, *Southeast Asia, A Social,Economic and Political Geography* (London: Mathuen & Co.Ltd, 1969).

Clive. J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: Decolonization, Nationalism And Separatism* (Singapore: ISEAS, 2000).

D.J.M. Tate, *The Making of Modern Southeast Asia* (New York: Oxford University Press, 1971), h. 101-307.

David Brown, "From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia David Brown", *Pacific Affairs,* Vol. 61, No. 1 (Spring, 1988).

David Camroux, "Accomodation, Cooption and Confrontation", *Asian Survey,* jurnal *XXVI* No.9, September 1996.

David P. Chandler, *Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot* (West-view Press , 1992).

Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973).

Dennis Bloodworth, *The Tiger and The Trojan Horse* (Singapore: Times International Press, 1986).

Dennis P.Walker, *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005,* (Australia: Monash University, 2005)

Derek Tonku, “Vietnam Market Reform and Ideology”, *Asian Affairs, Vol*. 28, no.2 (1997), h. 188.

Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi,* (terj.) (Jakarta: Gramedia dan The Asia Foundation, 2001).

Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchial Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategy’’, *Jurnal International Security,* 2007, Vol.32.

Fachry Ali, “Masyarakat, Pemimpin dan Budaya di Asia Tenggara: Perspektif (Pengalaman) Indonesia”, *makalah,* Institute for Southeast Asian Islamic Studies, IAIN Sulthan Syarif Qasim, Juli 1997.

Fajar Kurnianto, “Menunggu Manuver Suu Kyi”, opini, *Koran Jakarta,* Kamis 18 November 2010.

Farid Gaban, “Renaisans Asia”, *Majalah Tempo*, 24 November 1998.

Farish A. Noor, “Politik Identitas dan Demokratisasi di Malaysia”, *Makalah*, Pusat Sudi Sosial Asia Tenggara, PAU Universitas Gadjah Mada, April 2009.

Fred R. Von Der Mehden, *Religion and Nationalism in Southeast Asia* (Madison: University of Wisconsin Press, 1968)

Fred Weston, “Tragedy of Myanmar”, *www.marxist.com,* 27 September 2007.

Giandi Kartasasmita, “Pengaruh Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa Terhadap Transisi Demokrasi di Myanmar (1988-sekarang)”, *Skripsi*, FISIP-HI Universitas Parahyangan, tidak diterbitkan, 2006.

Guillermo O’Donnell, “Reflection on the Pattern of Change in the Bureaucratic Authoritarian State,” *Latin American research Review*, (Winter, 1978).

H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).

H.W. Arndt & Hal Hill (eds.), *Southeast Asia’s Economic Crisis: Origins, Lessons and the Way Forward* (Singapore: ISEAS, 1999).

Hadi Soesastro dan AR Sutopo, (Eds.), *Strategi dan Hubungan Internasional* (Jakarta: CSIS, 1981).

Hal Hill (ed.), *Indonesia's New Order: The Dynamic of Socio-Economic Transformation* (New South Wales: Allen and Unwin, 1994).

Hal Hill, *The Indonesian Economy in Crisis*: *Causes, Consequences and Lessons,* (Singapore: ISEAS, 1999).

Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Hasrul Sani Siregar, "Dinamika ASEAN dan Permasalahannya", *Riau Pos*, 9 Oktober 2012.

Hendrajit dkk, *Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Global Future Institute-GFI, 2010).

Hendrajit, "Skenario CIA Dalam Penggulingan Pangeran Sihanouk di Kamboja," *vivanews.co.id*, 28 November 2012.

Hendri Kuok, "Belajar Peristiwa Sepuluh Tahun yang Lalu di Burma", *Pembebasan,* Nomor IX, 1998.

Herdi Sahrasad, "Bush, Islam, dan Asia Tenggara", *Koran Jawa Pos/Indopos*, 9 Nopember 2006.

Herdi Sahrasad, "Kudeta dan Runtuhnya Musim Semi Demokrasi di Thailand", *Bisnis Indonesia,* 26 September 2006

Herdi Sahrasad, "Mahathir, Abdullah Badawi dan Nilai-Nilai Asia'', opini, *Suara Pembaruan,* 10 Maret 2004

Herdi Sahrasad, "Menebak Udang di Balik Batu Lawatan Hillary", *www.inilah. com*, Selasa, 4 September 2012 .

Herdi Sahrasad, "Pemilu Malaysia dan Anwar Ibrahim", *Republika,* opini, Selasa, 19 Februari 2008.

Herdi Sahrasad, "Solusi untuk Freeport", *Koran Tempo,* opini, 28/3/2006.

Herdi Sahrasad, "Vietnam, Macan Baru Asia", opini, *Suara Pembaruan*, 9 April 2008.

Herdi Sahrasad, "Bush, Huntington, dan Indonesia", *Tempo-interaktif/Koran Tempo*, Senin, 20 November 2006.

Hewison, Robison and Rodan (Eds.), *Southeast Asia in the 1990s, Authoritarianism, Democracy and Capitalism* (Sydney: Allen and Unwin, 1993).

Ho Kai Leong, James Chin and Ho Khai Leong (Eds.), *Mahathir's Administration: Performance and Crisis in Governance* (Singapore: Times Academic Press, 2002).

Ho Khai Leong dan James Chin, (eds.), *Pentadbiran Mahathir: Prestasi dan Krisis dalam Pemerintahan*, (Singapore and Kuala Lumpur: Times Publishers, 2003).

Ivan Sudjatmoko, "Netralisasi Asia Tenggara (Pembentukan ASEAN)", makalah Departemen Ilmu Sejarah, UNY, 2011.

Jason F. Isaacson dan Colin Lewis Rubenstein, *Islam in Asia: Changing Political Realities* (Sydney: Transaction Publishers, 2002)

J. Thomas Linblad (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia: Berbagai Tantangan Baru,* (terj.), (Jakarta: LP3ES, 2000).

J.H. Boeke, *Economics and Economy Policy of Dual Societies*, (Haarlem, 1953).

J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study in Plural Economy* (Massachusett: Cambridge University Press, 1939).

J.V. van Leur, *Indonesian Trade and Society* (Bandung: Sumur Bandung, 1960).

James Minchin, *No Man is an Island: A Portrait of Singapore's Lee Kuan Yew* (Sydney: Allen and Unwin, 1990).

John Bresnan, *Managing Indonesia: The Modern Political Economy* (New York: Columbia University, 1993).

John Drysdale, *Singapore: Struggle for Success* (Singapore: Times Books International, 1984).

Jomo K. Sundaram, (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia* (London: Zed Books, 1998).

Jomo K. Sundaram, "Ekonomi Bebas atau Pembebasan Ekonomi: Beberapa Pandangan tentang Perlunya Tata Ekonomi Dunia Baru", dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1982.

Jomo K. Sundaram. (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia* (Hongkong: Hong Kong University Press, *tth*).

Julie Southwood dan Petrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror* (London: Zed Press, 1983).

Julius Pour, "Perbatasan Kamboja-Thailand," *Kompas,* 15/03 2004.

K.G. Tregonning, *Malaysia* (Melbourne: F.W. Chesire, 1964).

Karl A. *Wittfogel, Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power* (New Haven: Yale University Press 1957).

Kevin Hewison, Richard Robinson and Garry Rodan, *Southeast Asia in the 1990s,* (London: Allen & Unwin,1993).

Khoo Kay Kim, "Islam: a View of the Pre-1941 Scenario" dalam *Malay Society: Transformation and Democratization* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1995), h. 209.

Kishore Mahbuban, "Dinasti Kepemimpinan Negara-Negara Asia", *Koran Tempo, 11*/1/2013.

Kunio Yushihara, *Building A Prosperous Southeast Asia,* (Oxford University Press, *1991)*

Lee Kuan Yew, *From Third World to First, The Singapore Story (1965-2000): Memoirs of Lee Kuan Yew* (Singapore: Singapore Press Holdings, 2000).

Leo Suryadinata, (Ed), *Ethnic Relations and Nation Building in Southeast Asia: The Case of Ethnic Chinese* (Singapore: ISEAS and SSAS, 2006).

Loc Doan, ''Despite Slowing Economy, Vietnam Resists Reforms'', *World Politics Review*, 27 Sepember 2012.

Lukman Mohamad dan Azmi Abdul Manaf, (eds), *Globalisasi di Malaysia* (Kuala Lumpur, UKM, 2003).

M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia, c. 1300 to the present* (London: Macmillan, 1981).

Mahathir Mohamad, *Jalan Ke Puncak* (Selangor: Pelanduk Publications, 1999).

Mahathir Mohamad, *The Malay Dilemma* (Kuala Lumpur: Federal Publications, 1970).

Makarim Wibisono, "Sengketa Laut China Selatan", *Kompas,* 11 Desember 2012.

Matt Wheeler, "Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu di Thailand Selatan" *Kompas,* 14 Desember 2012.

Taufik Abdullah*, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

Patrick Jory, "Religious Labelling, From Pattani Malayu To Thai Muslim*", Jurnal ISIM*, Vol. 18, autumn, 2006.

Saiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1993).

Syed Serajul Islam*, "The Islamic Independence* Movements in Patani of Thai-land and Mindanao of the Philippines," Asian Survey 38, No. 5 , Mei 1998.

Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations* and the *Remaking of World Order* (Touchstone Books, 1996),

Samuel P. Huntington, *Who Are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon and Schuster, 2004).

Yanyan Mochamad Yani, "Diplomasi HAM Dalam Hubungan Internasional'', *www.tabloiddiplomasi.org*, 2012.

Yudi Latif, "Dari Nation Building Menuju State Building", *Makalah,* Centre for Parliamentary & Presidential Studies (CPPS)-Universitas Paramadina, 2004.

______________, "Myanmar Sanctions, Engagement or Another Way Forward", *International Crisis Group Report* (Brussel: IGG, 26 April 2004).

______________, "Bahaya Politik Dinasti", *http://cetak.kompas.com/ read/2010/04/23/ 03395434/ bahaya. politik.dinasti*

______________, "Islam di Mindanao, Minoritas di Negeri Sendiri", *http://majalah-alkisah.com/index.php/component/content/article/ 38-tarikh/429-islam-di-mindanao-minoritas-di-negeri-sendiri* .

_____________, "Pattani", *http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/192/pattani*

_____________, "Jendral Giap Ungkapkan Rahasia Kekuatan Vietnam", *Merdeka.com*, 30 April 2006.

_____________, "Kawasan Perbatasan, Asean di Tengah Perubahan Kekuatan Kawasan", *www.kawasanperbatasan.com*, 5 November 2012.

_____________, "Kepentingan: Penyebab Konflik Thailand Selatan", *www.indonesia.ucanews.com,* diakses pada 29 April 2012.

_____________, "Kisruh Laut Cina Selatan, Asia Tenggara Terancam Perang", *www.jaringnews.com*, Jumat, 4 November 2011.

_____________, "Suara Kamboja di KTT ASEAN 'Dibeli' China?," *www.inilah.com*, Selasa, 20 November 2012.

_____________, "Vietnam 'Harimau Asia' di Tepi Jurang", *Deutsche Welle*, 27/11/12

_____________, "Vietnam Akan Hadapi Kehancuran Ekonomi", *www.analisadaily.com,* 27/8/ 2012, diakses pukul 11.00

_____________, "Vietnam: Reformasi Ekonomi atau Stagnasi", *http://www.dw.de/vietnam-reformasi-ekonomi-atau-stagnasi*.

_____________, Kisah Korban Bom Napalm Vietnam 40 Tahun Kemudian, *Tempo,* Sabtu, 02 Juni 2012.

_____________, *Statistical Year Book Malaysia,* 1999.

_____________,"Muslim Moro Pilih Cara Damai Atasi Konflik", *www.republika.co.id,* diakses pada 29 April 2012.

_____________, "Konflik Thailand-Kamboja dan ASEAN," *Harian Pelita,* 18 Januari 2013.

_____________, "Apa dan Siapa Bangsa Moro", *http://www.voa-islam.com/news/philipine/2009/07/16/326/apa-dan-siapa-bangsa-moro*

_____________, "Satu Negara Dua Kerajaan", *http://historia.co.id/?d=812*, Desember 2012.

____________, "Bom Tewaskan Satu Orang di Thailand Selatan", *Antara,* 9 Februari 2012.

____________, "Kekerasan di Thailand Selatan Belum Usai", *Kompas,* 30 Januari 2012.

____________,"Thai protesters 'want new coup'", *BBC News,* 26 August 2008.

INDEKS

A

B

C

D

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

The Media Istitute, based in Jakarta, is a non profit research organisation. It's focus on government's policies, politics, media and strategic studies. It's goal is to strengthen the capacity of various stakeholders of democracy such as government, politicians, political parties, member of parliaments, business corporations and civil society.

CTSSUI Center for Terrorism and Strategic Studies University of Indonesia

CTSS-UI (Center for Terrorism and Strategic Studies, University of Indonesia) is a non-profit research organization dedicated to analysis and policy impact regarding to terrorism and strategic issues. With staff and large network of affiliated scholars, CTSS-UI conduct research and analysis, and develop policy initiatives that look to the future and anticipate change toward a better Indonesia.

Sebagai bacaan komplementer bagi mahasiswa dan peminat studi Asia Tenggara, buku sahaja ini telah memberikan perkenalan awal serta merupakan sumbangsih yang tidak sia-sia, dan selayaknya kita apresiasi pula.

Yudi Latif PhD,
Mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina

Dengan penuh dedikasi dan jerih payah yang tak kenal lelah, penulis buku ini berusaha memberikan perspektif mengenai kekuasaan dan kepemimpinan di Asia Tenggara, yang saya yakin bermanfaat bagi mahasiswa dan peminat studi Asia Tenggara. Saya mendorongnya merampungkan buku sahaja ini, meski terkendala oleh berbagai keterbatasan yang ada.

Sigid Edi Sutomo,
Vice Chairman, Center for Terrorism and Strategic Studies,
University of Indonesia.

Esai-esai dalam buku ini semula merupakan artikel atau tulisan di pelbagai media dan jurnal mengenai dinamika dan masalah di Asia Tenggara. Perspektif ilmu sosial dan humaniora (ilmu politik, sejarah, hubungan antarbangsa dan jurnalisme) telah membekali penulisnya untuk menyajikan tulisan yang reflektif, komunikatif, renyah, sederhana dan mudah dibaca.

Airlangga Pribadi,
Pengajar Fisip Universitas Airlangga dan mahasiswa Doktoral (PhD) Murdoch University, Australia.

HERDI SAHRASAD adalah Pengajar ilmu sosial Universitas Paramadina, dan juga Associate Director The Media Institute dan Center for Terrorism and Strategic Studies Universitas Indonesia (CTSS-UI), serta peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina dan aktif menulis di berbagai media.

ISBN 148-2-523-795
9781482523799